

DRAFT LAPORAN INDUK

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAB. GRESIK 2025-2045

BAPPEDA KAB. GRESIK
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245, Kab Gresik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya lah, kita dapat menuntaskan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 ini.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta untuk mencapai Visi "Indonesia Emas 2045", KLHS - RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Dokumen RPJPD.

Tuntasnya Dokumen KLHS - RPJPD ini dapat dimanfaatkan dalam mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045 untuk capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mengakomodir isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Dengan selesainya dokumen ini diucapkan terima kasih kepada Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Gresik yang telah menyelesaikan dokumen ini. Kepada nara sumber dari berbagai stakeholder yang memberikan masukan selama konsultasi publik diucapkan terima kasih. Selain itu juga diucapkan terimakasih kepada tim pendamping penyusunan dokumen KLHS ini.

Gresik, 2023

Bupati

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 15
1.2 Maksud dan Tujuan 17
1.3 Dasar Hukum 17
1.4 Sasaran 19
1.5 Ruang Lingkup 19
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 19
1.5.2 Ruang Lingkup Materi 4
1.6 Mekanisme Pembuatan KLHS RPJPD 4
1.7 Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Gresik 9
1.8 Sistematika Pembahasan 16

BAB 2 DASAR TEORI

2.1 Sejarah Lahirnya Kabupaten Gresik 18
2.2 Dinamika Perkembangan Wilayah 20
2.3 Kajian Kebijakan Tata Ruang 22
2.3.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 TentangPercepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan 23
2.3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 26
2.4 Kajian Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 40

BAB 3 KONDISI UMUM DAERAH

3.1 Kondisi Fisik 44
3.1.1 Administrasi dan Geografi 44
3.1.2 Iklim 45
3.1.3 Topografi 46
3.1.4 Geologi 48
3.1.5 Jenis Tanah 49

3.1.6 Hidrologi 50
3.1.7 Kondisi Sumberdaya Alam 56
3.1.8 Kondisi Kebencanaan 69
3.1.9 Penggunaan Lahan 71
3.2 Kondisi 6 Muatan KLHS 73
3.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 73
3.2.2 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan 78
3.2.3 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 101
3.2.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 143
3.2.5 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 151
3.2.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati 171
3.3 Kondisi Demografi 181
3.3.1 Kependudukan 181
3.3.2 Indeks Pembangunan Manusia 185
3.3.3 Kondisi Kemiskinan 186
3.3.4 Aspek Kesehatan 189
3.3.5 Pendidikan 195
3.3.6 Peribadatan 197
3.4 Kondisi Ekonomi Dan Keuangan Daerah 198
3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 198
3.4.2 Pendapatan Daerah 200
3.4.3 Belanja Daerah 201
3.4.4 Pembiayaan Daerah 202

BAB 4 ANALISIS TPB
4.1 Capaian Indikator TPB 204
4.1.1 Indikator yang Sudah Mencapai Target 207
4.1.2 Indikator yang Belum Mencapai Target 212
4.1.3 Indikator yang Data Tidak Tersedia 215
4.2 Capaian Indikator TPB Tiap Pilar 217

4.2.1 Pilar Sosial 217
4.2.2 Pilar Ekonomi 221
4.2.3 Pilar Lingkungan 224
4.2.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola 226
4.3 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan 228
4.3.1 Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan 229
4.3.2 Pemusatan Isu 233
4.3.3 Identifikasi Isu PB Strategis 236
4.3.4 Isu PB Paling Strategis 244
4.3.5 Baseline Isu 247

BAB 5 ANALISIS CAPAIAN TPB PADA ORGANISASI
5.1 Identifikasi Para Pemangku Kepentingan 262
5.2 Analisis Capaian Indikator Berdasarkan Daya Dukung Dan Daya Tampung 265
5.3 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah 268
5.3.1 Indikator yang Sudah Mencapai Target 269
5.3.2 Indikator yang Belum Mencapai Target 275
5.3.3 Indikator yang Data Tidak Tersedia 278
5.4 Target dan Indikator Pencapaian TPB Pada Perangkat Daerah 280
5.5 Analisis Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB 328
5.6 Perumusan TPB Prioritas 330

BAB 6 ANTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI
6.1 Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Daerah 339
6.1.1 Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Daya Dukung Pangan 340
6.1.2 Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Daya Dukung Air 345
6.1.3 Alternatif Dan Rekomendasi Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) 349
6.2 Alternatif dan Sekenario dan Rekomendasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Dengan Upaya Tambahan 354
6.2.1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) 355

6.2.2 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan) 370

6.2.3 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan) 378

6.2.4 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) 389

6.2.5 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 11 (Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan) 393

6.2.6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 12 (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 400

6.2.7 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 15 (Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati) 404

6.3 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan 412

6.4 Ringkasan Arahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gresik 412

BAB 7 KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan 430

7.1.1 Capaian Daerah Terhadap Indikator TPB 430

7.1.2 Capaian OPD terhadap Indikator TPB 431

7.1.3 Hasil Perumusan Isu Strategis 433

7.1.4 Hasil Perumusan TPB Prioritas 434

7.1.5 Rekomendasi Bagi Daerah 435

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rata-rata Capaian Sasaran Pokok (%) dan Predikat Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Gresik Tahun Pelaksanaan 2005-2025 10
Tabel 1. 2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja RPJPD Kabupaten Gresik per Urusan Sampai dengan Akhir Periode 10

Tabel 3. 1 Luas Vegetasi Alami 21
Tabel 3. 2 Luas Ekoregion Kabupaten Gresik 21
Tabel 3. 3 Luas Daerah Aliran Sungai 22
Tabel 3. 4 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik 22
Tabel 3. 5 Luas Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 45
Tabel 3. 6 Kondisi Iklim Kabupaten Gresik 46
Tabel 3. 7 Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian di Wilayah Kabupaten Gresik (Ha) 46
Tabel 3. 8 Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan di Wilayah Kabupaten Gresik (Ha) 47
Tabel 3. 9 Jumlah Mata Air dan Waduk di Kabupaten Gresik 50
Tabel 3. 10 Sungai di Kabupaten Gresik 51
Tabel 3. 11 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik 51
Tabel 3. 12 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik 52
Tabel 3. 13 Sistem Pelayanan Jaringan Perpipaan 55
Tabel 3. 14 Sumber Pelayanan Jaringan Peripaan 55
Tabel 3. 15 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan PDAM 5 Tahun Terakhir 56
Tabel 3. 16 Produksi Pertanian (ton) 56
Tabel 3. 17 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Gresik Tahun 2018 57
Tabel 3. 18 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Padi Ladang di Kabupaten Gresik Tahun 2016 57
Tabel 3. 19 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Jagung di Kabupaten Gresik Tahun 2018 58
Tabel 3. 20 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Tahun 2019 58
Tabel 3. 21 Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2019 58
Tabel 3. 22 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Tahun 2019 59
Tabel 3. 23 Sentra Komoditas Unggulan Tanaman Holtikultura di Kabupaten Gresik 59
Tabel 3. 24 Luas Panen Tanaman Sayuran Buah Semusim di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022 60
Tabel 3. 25 Produksi Tanaman Sayur dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022 60
Tabel 3. 26 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman (Kwintal) Tahun 2019-2022 61

Tabel 3. 27 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (m^2) Tahun 2019-2022 62
Tabel 3. 28 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (kg) Tahun 2019-2022 62
Tabel 3. 29 Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019 63
Tabel 3. 30 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) Tahun 2021-2022 64
Tabel 3. 31 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton), Tahun 2021- 2022 65
Tabel 3. 32 Jumlah Industri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten GresikTahun 2011-2016 67
Tabel 3. 33 Industri di Kawasan Industri KIG 67
Tabel 3. 34 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2022 69
Tabel 3. 35 Data Kerugian Akibat Bencana Banjir Tahun 2021 69
Tabel 3. 36 Data Kerugian Akibat Tanah Longsor Banjir Tahun 2021 70
Tabel 3. 37 Data Kerugian Akibat Angin Kencang Banjir Tahun 2021 71
Tabel 3. 38 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Gresik 72
Tabel 3. 39 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Kabupaten Gresik 72
Tabel 3. 40 Timbulan Sampah Kabupaten Gresik Tahun 2021 82
Tabel 3. 41 TPS di Kabupaten Gresik 83
Tabel 3. 42 Bank Sampah di Kabupaten Gresik 91
Tabel 3. 43 Persentase Capaian Air Limbah Domestik Kabupaten Gresik 99
Tabel 3. 44 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan 101
Tabel 3. 45 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan 101
Tabel 3. 46 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan 102
Tabel 3. 47 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih 103
Tabel 3. 48 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih 104
Tabel 3. 49 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Serat Fiber 105
Tabel 3. 50 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Serat Fiber 105
Tabel 3. 51 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar 106
Tabel 3. 52 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar 106
Tabel 3. 53 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik 107
Tabel 3. 54 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik 108
Tabel 3. 55 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 109

Tabel 3. 56 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 109
Tabel 3. 57 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana 110
Tabel 3. 58 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana 110
Tabel 3. 59 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air 111
Tabel 3. 60 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air 112
Tabel 3. 61 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah 113
Tabel 3. 62 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah 113
Tabel 3. 63 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara 114
Tabel 3. 64 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara 114
Tabel 3. 65 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami 115
Tabel 3. 66 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami 116
Tabel 3. 67 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit 117
Tabel 3. 68 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit 117
Tabel 3. 69 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup 118
Tabel 3. 70 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup 119
Tabel 3. 71 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Ekowisata 120
Tabel 3. 72 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Ekowisata 120
Tabel 3. 73 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam 121
Tabel 3. 74 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam 121
Tabel 3. 75 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Kesuburan Tanah 122
Tabel 3. 76 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Kesuburan Tanah 122
Tabel 3. 77 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara 123
Tabel 3. 78 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara 123
Tabel 3. 79 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Primer 124

Tabel 3. 80 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Primer..... 125
Tabel 3. 81 Produksi Pertanian (ton) 143
Tabel 3. 82 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Gresik Tahun 2018..... 144
Tabel 3. 83 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Padi Ladang di Kabupaten Gresik Tahun 2016..... 144
Tabel 3. 84 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Jagung di Kabupaten Gresik Tahun 2018..... 145
Tabel 3. 85 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Tahun 2019..... 145
Tabel 3. 86 Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2019..... 146
Tabel 3. 87 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Tahun 2019 146
Tabel 3. 88 Sentra Komoditas Unggulan Tanaman Holtikultura di Kabupaten Gresik 146
Tabel 3. 89 Ijin Produksi Pertambangan Tahun 2022 149
Tabel 3. 90 Perhitungan Total Emisi GRK Sektor Energi 152
Tabel 3. 91 Data Aktivitas Terkait Estimasi Emisi GRK dari Kegiatan IPPU di Kabupaten Gresik..... 153
Tabel 3. 92 Perhitungan Total Emisi Sektor Pertanian dan Peternakan..... 153
Tabel 3. 93 Perhitungan Total Emisi Sektor Pengelolaan Limbah..... 154
Tabel 3. 94 Rekpitulasi Estimasi Emisi GRK..... 154
Tabel 3. 95 Junlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2022..... 155
Tabel 3. 96 Ancaman Banjir Per Kecamatan Tahun 2020 Di Kabupaten Gresik..... 155
Tabel 3. 97 Tingkat Ancaman Bencana Kebakaran Lahan/Hutan Tahun 2020 Di Kabupaten Gresik..... 156
Tabel 3. 98 Tingkat Ancaman Bencana Tanah Longsor 2020 Di Kabupaten Gresik..... 157
Tabel 3. 99 Tingkat Ancaman Bencana Tanah Longsor 2020 Di Kabupaten Gresik..... 157
Tabel 3. 100 Tingkat Ancaman Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi 2020 Di Kabupaten Gresik..... 158
Tabel 3. 101 Tingkat Kerentanan Kabupaten Gresik 159
Tabel 3. 102 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim 160
Tabel 3. 103 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim..... 160
Tabel 3. 104 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim..... 160
Tabel 3. 105 Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gresik..... 174
Tabel 3. 106 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas 178
Tabel 3. 107 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas 179
Tabel 3. 108 Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022 181
Tabel 3. 109 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 182
Tabel 3. 110 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022..... 183
Tabel 3. 111 Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 184

Tabel 3. 112 Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik 2015-2022 187
Tabel 3. 113 Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan (Unit) Kabupaten Gresik Tahun 2022 189
Tabel 3. 114 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Gresik Tahun 2021/2022 195
Tabel 3. 115 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023 196
Tabel 3. 116 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023 196
Tabel 3. 117 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023 197
Tabel 3. 118 Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022 198
Tabel 3. 119 Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022 198
Tabel 3. 120 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022 199
Tabel 3. 121 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 dan 2019 200
Tabel 3. 122 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022 201
Tabel 3. 123 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 dan 2019 202
Tabel 3. 124 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022 202
Tabel 3. 125 Komposisi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 dan 2019 202
Tabel 3. 126 Persandingan Isu Strategis dengan 6 Muatan KLHS 243

Tabel 4. 1 Indikator Yang Sudah Mencapai Target 208
Tabel 4. 2 Indikator Yang Belum Mencapai Target 213
Tabel 4. 3 Indikator Yang Data Tidak Tersedia 216
Tabel 4. 4 Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Pilar Sosial 218
Tabel 4. 5 Indikator yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Pilar Sosial 220
Tabel 4. 6 Indikator Data Tidak Tersedia Berdasarkan Pilar Sosial 221
Tabel 4. 7 Indikator Data yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Pilar Ekonomi 222
Tabel 4. 8 Indikator Data yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Pilar Ekonomi 223
Tabel 4. 9 Indikator Data Tidak Tersedia Berdasarkan Pilar Ekonomi 224
Tabel 4. 10 Indikator Data yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Pilar Lingkungan 225
Tabel 4. 11 Indikator Data yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Pilar Lingkungan 225
Tabel 4. 12 Indikator Data Tidak Tersedia Mencapai Target Berdasarkan Pilar Lingkungan 226
Tabel 4. 13 Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Pilar Tata Kelola 227
Tabel 4. 14 Indikator yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Pilar Tata Kelola 227
Tabel 4. 15 Indikator Data Tidak Tersedia Berdasarkan Pilar Tata Kelola 227
Tabel 4. 16 Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan OPD 269

Tabel 4. 17 Indikator yang Belum Mencapai Target 276
Tabel 4. 18 Indikator Data Tidak Tersedia 279
Tabel 4. 19 Pemetaan Anggaran 328

Tabel 5. 1 Daftar Isu Panjang 229
Tabel 5. 2 Pemusatan Isu (Daftar Pendek) 233
Tabel 5. 3 Matriks Isu PB Strategis 237
Tabel 5. 4 Normalisasi Sebab Akibat 246
Tabel 5. 5 Keterkaitan Sebab Akibat 246
Tabel 5. 6 Perhitungan Kekuatan Hubungan Sebab Akibat 246
Tabel 5. 7 Kondisi Pengelolaan Persampahan 248
Tabel 5. 8 Proyeksi Timbulan Sampah 248
Tabel 5. 9 Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan Penguraian Limbah 249
Tabel 5. 10 Jumlah Industri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten GresikTahun 2011-2016 250
Tabel 5. 11 Luas Daerah Aliran Sungai 254
Tabel 5. 12 Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2022 257
Tabel 5. 13 Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Tahun 2022 259
Tabel 5. 14 Pinjaman Modal Kerja yang Diberikan Bank Umum Tahun 2022 259
Tabel 5. 15 Kontribusi Mitra Pembangunan 262
Tabel 5. 16 Kontribusi Perusahaan Mitra Pembangunan 264
Tabel 5. 17 Persandingan D3TLH dengan TPB 265
Tabel 5. 18 Target dan Indikator Pencapaian TPB Pada Perangkat Daerah 281
Tabel 5. 19 Interaksi antar TPB 330
Tabel 5. 20 Matriks Keterkaitan TPB dengan Kondisi Umum, 6 Muatan KLHS dan Isu PB Prioritas 333
Tabel 5. 21 Skor dan Gap Ketercapaian TPB 336

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Arahan Pengembangan Wilayah Jawa Timur 24
Gambar 2. 2 Peta Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung Provinsi Jawa Timur 25
Gambar 2. 3 Peta Lokasi Program/Proyek di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila 25

Gambar 3. 1 Peta Bentang Alam 0
Gambar 3. 1 Peta Vegetasi Alami 0
Gambar 3. 1 Peta Ecoregion 1
Gambar 3. 1 Peta Daerah Aliran Sungai 2
Gambar 3. 1 Peta Batas Wilayah Fungsional 3
Gambar 3. 2 Peta Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Gresik 40
Gambar 3. 3 Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Gresik 73
Gambar 3. 4 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Gresik 75
Gambar 3. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 78
Gambar 3. 6 Kualitas Udara Kabupaten Gresik Tahun 2022 79
Gambar 3. 7 Tonase Pelayanan Persampahan Kabupaten Gresik Tahun 2020 82
Gambar 3. 8 Presentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan 103
Gambar 3. 9 Presentase Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih 104
Gambar 3. 11 Presentase Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana 111
Gambar 3. 12 Presentase Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara 115
Gambar 3. 13 Prosentase Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup 119
Gambar 3. 14 Luas Penanaman Mangrove Kabupaten Gresik 150
Gambar 3. 10 Presentase Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim 161
Gambar 3. 15 Luas Vegetasi Kabupaten Gresik 171
Gambar 3. 16 Grafik Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022 182
Gambar 3. 17 IPM Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik tahun 2012 – 2022 186
Gambar 3. 1 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik 187
Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik (Ribu Jiwa) 188
Gambar 3. 3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik 188
Gambar 3. 1 Capaian Angka Kematian Ibu Kabupaten Gresik 190
Gambar 3. 2 Angka Kematian Bayi Kabupaten Gresik 191
Gambar 3. 3 Jumlah HIV/AIDS Kabupaten Gresik 192
Gambar 3. 4 Demam Berdarah Kabupaten Gresik 193
Gambar 3. 5 TB Kabupaten Gresik 194

Gambar 3. 6 Malaria Kabupaten Gresik 195
Gambar 3. 12 Presentase Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara 252

Gambar 4. 1 Peta D3TLH Pangan 76
Gambar 4. 2 Peta D3TLH Air 77
Gambar 4. 3 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Pangan 126
Gambar 4. 4 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih 127
Gambar 4. 5 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Serat 128
Gambar 4. 6 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar 129
Gambar 4. 7 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Sumberdaya Genetik 130
Gambar 4. 9 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir 131
Gambar 4. 10 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan, Perlindungan dan Pencagahan Bencana 132
Gambar 4. 11 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan dan Pemurnian Air 133
Gambar 4. 12 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah 134
Gambar 4. 13 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara 135
Gambar 4. 14 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami 136
Gambar 4. 15 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit 137
Gambar 4. 16 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup 138
Gambar 4. 17 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ecotourism 139
Gambar 4. 18 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Budaya Estetika 140
Gambar 4. 19 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah 141
Gambar 4. 20 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Siklus Hara 142
Gambar 4. 21 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Produksi Primer 143
Gambar 4. 8 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim 162
Gambar 4. 23 Peta Risiko Bencana Banjir 163
Gambar 4. 24 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 164
Gambar 4. 25 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor 165
Gambar 4. 26 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim 166
Gambar 4. 27 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim 167
Gambar 4. 28 Peta Risiko Bencana Kekeringan 168
Gambar 4. 29 Peta Risiko Bencana Gempa 169
Gambar 4. 30 Peta Risiko Bencana Epidemi 170
Gambar 4. 22 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas 180
Gambar 4. 31 Capaian TPB 207
Gambar 4. 32 Persentase Capaian Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Tujuan SDGs 208
Gambar 4. 33 Persentase Indikator Yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Tujuan SDGs 213

Gambar 4. 34 Persentase Data Tidak Tersedia 216
Gambar 4. 35 Persentase Capaian Indikator TPB Tiap Pilar 217
Gambar 4. 36 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Sosial 218
Gambar 4. 37 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi 222
Gambar 4. 38 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan 224
Gambar 4. 39 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola 226
Gambar 4. 41 Persentase Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah 268
Gambar 4. 42 Persentase Capaian Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan OPD 269
Gambar 4. 43 Persentase Capaian Indikator yang Belum Mencapai Target Berdasarkan OPD 275
Gambar 4. 44 Persentase Capaian Indikator yang Data Tidak Tersedia Berdasarkan OPD 279
Gambar 4. 45 Persentase Realisasi Anggaran 329

Gambar 5. 1 Alur Analisa DEMATEL 245
Gambar 5. 2 Diagram Sebab-Akibat 247
Gambar 5. 3 Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguaraian Limbah 249
Gambar 5. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 250
Gambar 5. 5 Kualitas Udara Kabupaten Gresik Tahun 2022 251
Gambar 5. 6 Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara 252
Gambar 5. 7 Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan tata Aliran Air dan Banjir 254
Gambar 5. 8 Peta Risiko Bencana Banjir 255
Gambar 5. 9 Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBDm Diare, TB dan Malaria di Kabupaten Gresik Tahun 2022 257
Gambar 5. 10 Indeks Pembangunan Gender 258
Gambar 5. 11 Jumlah Koperasi Aktif tahun 2018-2022 259
Gambar 5. 12 Jumlah Keterkaitan antar TPB 332



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Gresik berupaya lebih memantapkan pembangunan hasil pembangunan, antara lain mencapai daya saing sumber daya manusia yang unggul, pengelolaan yang efisien dan efektif, tersedianya infrastruktur yang baik dan pengelolaan lingkungan dengan fokus pembangunan perdesaan. Strategi pengembangan tata ruang adalah pelestarian dan pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan (penetapan kawasan lindung, pembentukan kawasan fungsional lindung dengan luas minimal 30%, pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang berkurang), pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadap kerusakan lingkungan, kehidupan, pembinaan pengembangan kegiatan pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pembangunan wilayah yang dilakukan selama ini di Kabupaten Gresik belum mampu membatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah dan antar kabupaten/kota serta antara kota dan desa. Untuk menjamin keseimbangan wilayah antar wilayah di Kabupaten Gresik, perlu dirumuskan suatu kebijakan pembangunan wilayah. Untuk menciptakan ketegangan penguasaan yang relatif dan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap daerah, melalui

Sistem Pusat Kegiatan yaitu Sistem Perkotaan (Pusat Kegiatan Lokal-PKL dan Pusat Pelayanan Kecamatan-PPK) dan Sistem Perdesaan. Tentang upaya pembangunan untuk mewujudkan kemajuan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Gresik, yang tentunya harus mengikuti kaidah pemanfaatan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penyusunan KLHS juga harus memperhatikan Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan, yang menetapkan 17 tujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Untuk menurunkan pencapaian SDG, digunakan 319 indikator yang terkait dengan 241 indikator SDG PBB. Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 bertujuan untuk mencoba memperkuat muatan perencanaan daerah agar lebih terarah dan sejalan dengan pembangunan nasional. Dengan demikian, Permendagri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang menyangkut perencanaan pembangunan daerah, tata cara pengendalian dan evaluasi, tata cara evaluasi proyek peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan prosedur evaluasi. Diharapkan RPJPD, RPJMD dan rencana sumberdaya daerah dapat menyusun RPJPD KLHS untuk pelaksanaannya sesuai dengan prinsip RPJPD yang berkelanjutan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik (RPJPD) tahun 2025-2045. Dalam penysunan RPJPD tahun 2025-2045, hasil evaluasi kinerja RPJPD Kabupaten Gresik tahun 2005-2025 digunakan sebagai acuan untuk penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 yang telah diukur menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan sasawan dan arahan kebijakan pembangunan, klasifikasi indikator pelaksanaan dalam 4 periode capaian yakni, (1) RPJMD 2005-2010; (2) RPJMD 2011-2015, (3) RPJMD 2016-2021, dan (4) RPJMD 2021-2026 dengan predikat sangat baik pada akhir RPJPD. Rekomendasi tindak lanjut berupa tolak ukur pencapaian kinerja menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan

yang terarah dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam hal penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya persiapan dalam penyusunan KLHS RPJPD akan diselaraskan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018. Oleh karena itu, Pengurus Kabupaten Gresik sedang menyusun Laporan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan isi RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator TPB, harapan pengambilan keputusan. melalui Pengelola Wilayah sudah matang dan dampak/resiko lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan akibat pelaksanaannya dapat diminimalkan untuk RPJPD.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik adalah dihasilkan laporan KLHS yang dapat diintregrasikan dengan Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik sedangkan tujuan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik adalah untuk:

a. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045
b. Memanfaatkan hasil KLHS RPJPD dalam penyusunan dokumen RPJPD

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
h. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
i. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).

1.4 SASARAN

Sasaran kegiatan Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 adalah:

a. Pengkajian capaian pembangunan berkelanjutan selama 20 tahun terakhir serta perubahan kondisi wilayah yang mendasar
b. Perumusan alternatif dan rekomendasi untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kuaitas lingkungan hidup
c. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian

1.5 RUANG LINGKUP

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Batas wilayah fungsional Kabupaten Gresik dibuat berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah Cekungan Air Tanah (CAT) dan wilayah ecoregion. Wilayah fungsional memberikan penjelasan bahwa setiap bagian dari permukaan bumi sangat beragam. Perlu adanya instrument atau cara untuk menampilkan wilayah fungsional agar dapat memberikan gambaran yang utuh dari wilayah kajian perencanaan. Batas wilayah fungsional merupakan sebaran spasial yang berdampak pada suatu wilayah.

A. Bentang Alam

Klasifikasi bentuk lahan berdasarkan genesisnya menurut Verstappen (1983)

1. Bentuk lahan proses volkanik (V), merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang teradi akibat aktivitas gunung api
2. Bentuk lahan asal proses structural (S), merupakan kelompok besarsatuan bentuk alahan yang terjadi akibat pengaruh kuat struktur geologis
3. Bentuk lahan asal fluvial (F), merupakan kelompok besar satuan bentuk alhan yang terjadi akibat aktivitas Sungai
4. Bentuk lahan asal proses solusional (S), merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah larut, seperti batu gamping dan dolomite.
5. Bentuk lahan assal proses denudasional (D) merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses degradasi, seperti longsor dan erosi.

6. Bentuk lahan asal proses eolian (E) merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses laut oleh tenaga gelombang, arus dan pasang-surut.
7. Bentuk lahan asal marine (M) merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses laut oleh tenaga gelombang, arus dan pasang-surut.
8. Bentuk lahan asal glasial merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses Gerakan es (gletser)
9. Bentuk lahan asal organic merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh kuat aktivitas organisme (flora dan fauna)
10. Bentuk lahan asal antropogenik (A) merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia.

Bentang Alam di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Bukit terisolasi
2. Dataran antropogenik reklamasi
3. Dataran fluvio-marin
4. Dataran structural lipatan
5. Delta
6. Lembah sinklonirium randublatung
7. Palau lepas pantai
8. Perbukitan structural lipatan
9. Rataan pasang surut
10. Wilayah perkotaan (bentang antropogenik)

Sumber: D3TLH Kab. Gresik, 2021

B. Vegetasi Alami

Vegetasi merupakan pengelompokan berbagai flora yang berpola melintasi bentang alam yang terjadi sebagai respons terhadap kondisi lingkungan (EPA,2016) Vegetasi mempunyai peran penting dalam ekosistem terutama pada proses ekologis. Vegetasi memberikan jasa yang sangat penting untuk siklus biogeokimia, penyediaan udara bersih melalui pelepasan oksigen dan penyerapan karbon, peran dalam proses pembentukan tanah dan penyediaan unsur hara, peran dalam penanggulangan bencana baik banjir erosi, longsor melalui perlindungan permukaan tanah, dan peran dalam siklus hidrologi melalui proses intersepsi dan transpirasi. Vegetasi alami digunakan sebagai salah

satu data masukan atau *input* dalam penghitungan jasa Ekosistem. Berikut merupakan table dan gambar vegetasi alami yang ada di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 1 Luas Vegetasi Alami

Vegetasi	Luas (Ha)
Hutan Batu Gamping Pamah	4571.72
Hutan Batu Gamping Pamah Monsun Meranggas	15334.39
Hutan Mangrove Monsun	16.47
Hutan Non Dipterokarpa Pamah	12941.14
Hutan Pamah Monsun Meranggas	17515.71
Hutan Pantai	46523.99
Hutan Pantai Monsun	18229.90
Hutan Terna Rawa Air Tawar Pamah Monsun	4855.21
Savanna	7727.98
Terna Danau Pamah	451.79

Sumber: D3TLH, 2021

C. Ecoregion

Ekoregion merupakan wilayah dengan karakteristik flora, fauna, dan lingkungan yang mirip. Secara umum ecoregion mencakup area yang lebih kecil dibandingkan dengan bioregion dan ecozone. Berdasarkan World Wildlife Fund (WWF) suatu daerah dapat dikategorikan sebagai ecoregion Ketika memiliki kesamaan dinamika Ekosistem atau flora dan fauna, kesamaan pada factor lingkungan dan interaksi yang krusial bagi kelangsungan kelompok/wilayah tersebut.

Ekoregion menjadi konsep unit karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan factor pembatas, potensi jasa Ekosistem yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaannya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Pemenuhan terhadap aspek ini merupakan factor kunci untuk mewujudkan Pembangunan nasional berkelanjutan yang berbasis sumber daya alam. Berikut merupakan tabel dan gambar mengenai ecoregion di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 2 Luas Ekoregion Kabupaten Gresik

Ekoregion	Luas (ha)
Bukit Terisolasi	120.24
Dataran Antropogenik Reklamasi Material Pasir	699.51
Dataran Fluvio-marin Pesisir Utara Jawa Material Aluvium	20068.54
Dataran Struktural Lipatan (Dataran Nyaris) Rembang Material Batupasir Tufaan dan Batulempung Gampingan	5836.75
Delta Pangkah (Bengawan Solo) Material Aluvium	4705.30
Lembah Sinklinorium Randublatung Batupasir dan Batulempung Napalan	28356.71

Palau Lepas Pantai Material Terumbu	19830.23
Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan	25700.58
Rataan Pasang Surut Pantai Selatan Jawa	1462.13
Rataan Pasang Surut Pantai Utara Jawa Material Aluvium	12581.01
Wilayah Perkotaan (Bentang Antropogenik)	4709.58

Sumber: D3TLH Kab. Gresik, 2021

D. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Gresik terbagi kedalam 2 Daerah Aliran Sungai utama yaitu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hilir dan Daerah Aliran Sungai Brantas Hilir. Berikut merupakan table dan gambar yang menjelaskan daerah aliran sungai utama yang mengaliri Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 3 Luas Daerah Aliran Sungai

Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)
Bengawan Solo Hilir	113731.05
Brantas Hilir	12820.88

Sumber: D3TLH, 2021

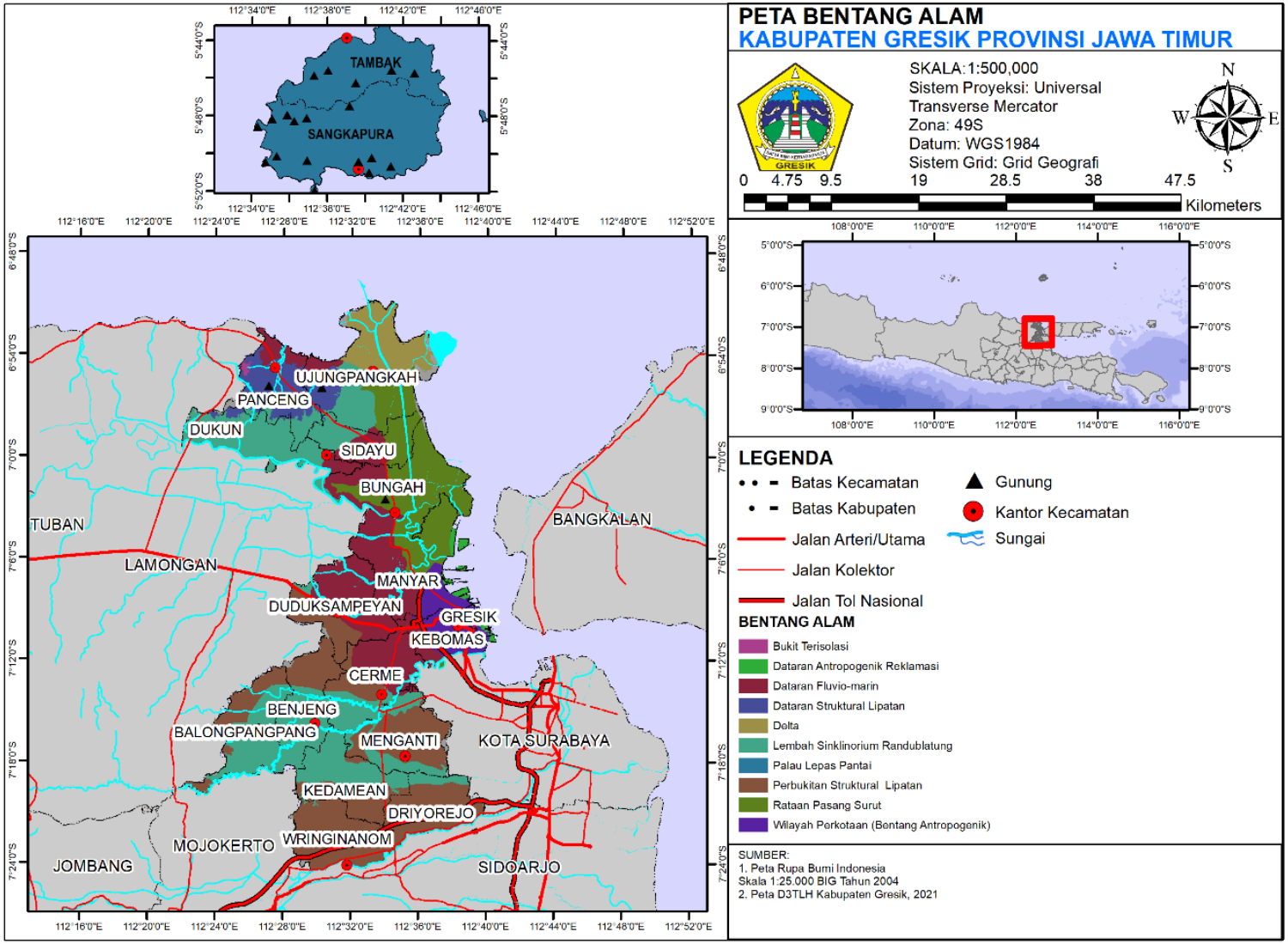
E. Cekungan Air Tanah

Kabupaten Gresik mempunyai 2 Cekungan Air Tanah yang terdiri dari Cekungan Air Tanah Panceng dan Cekungan Air Tanah Surabaya-Lamongan. Cekungan Air Tanah Panceng melingkupi Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Sidayu. Cekungan Air Tanah Surabaya-Lamongan melingkupi Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Menganti.

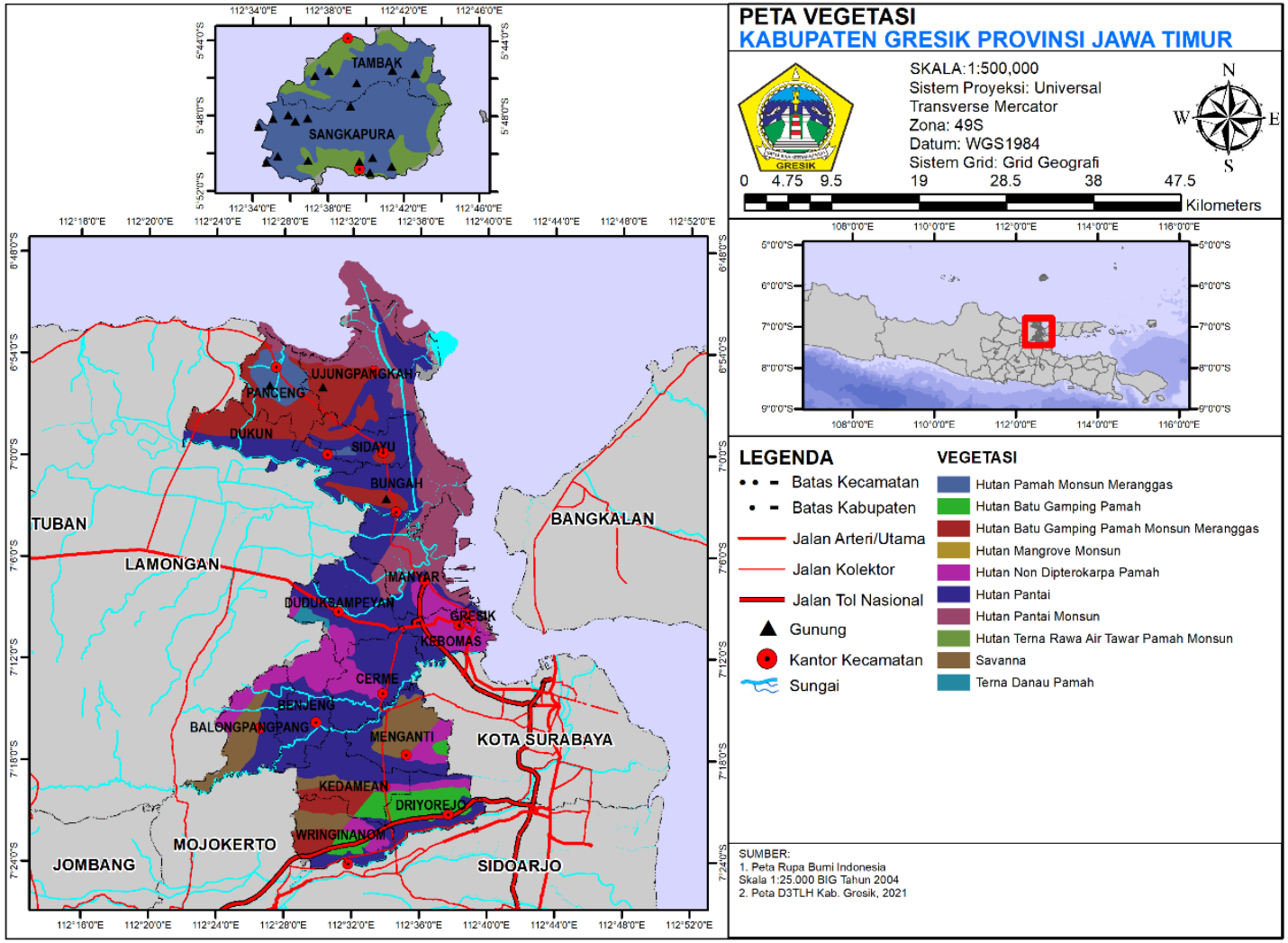
Tabel 3. 4 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik

CAT	Keterangan	Air Tanah Bebas (m^3/tahun)	Ait Tanah Tertekan (m^3/tahun)	Luas (Ha)
Panceng	Daerah Imbuhan Air Tanah	27 juta	41 juta	10967,81
Surabaya-Lamongan	Daerah Lapasan Air Tanah	843 juta	37 juta	16883,05
Surabaya-Lamongan	Daerah Lapasan Air Tanah	843 juta	37 juta	16699,34
Surabaya-Lamongan	Daerah Lapasan Air Tanah	843 juta	37 juta	9451,36

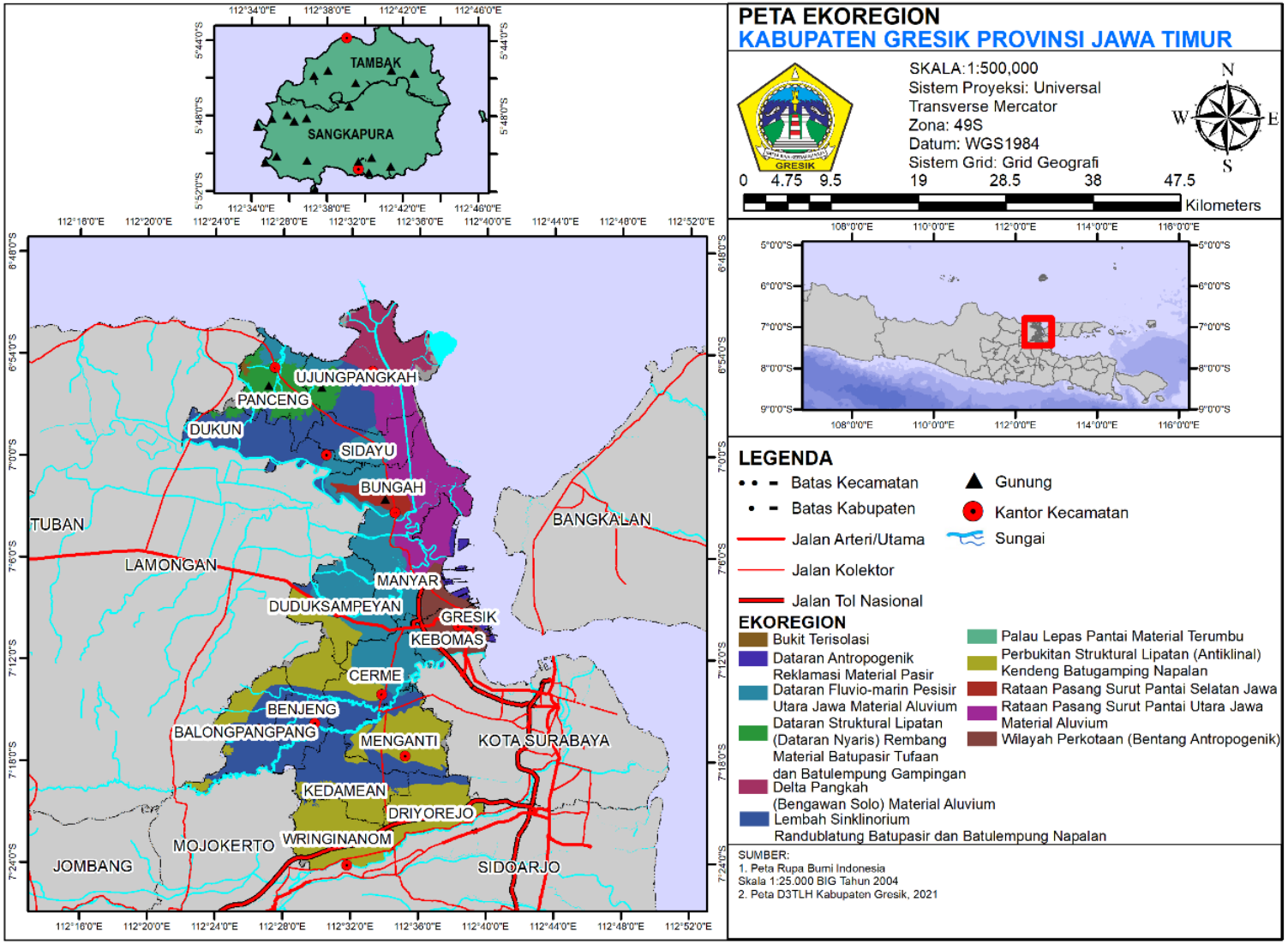
Sumber: KLHS RPJMD 2021-2026



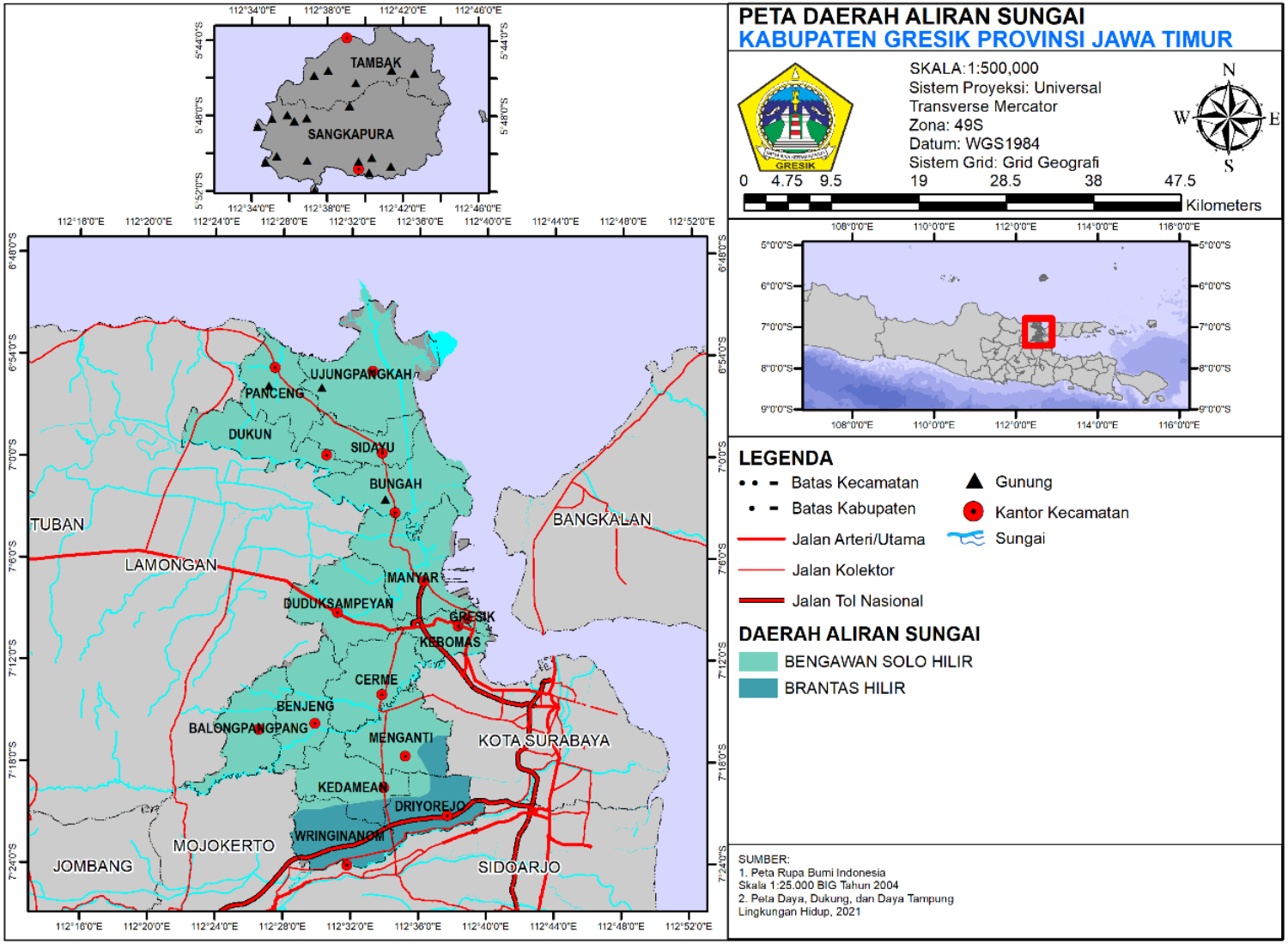
Gambar 3. 1 Peta Bentang Alam



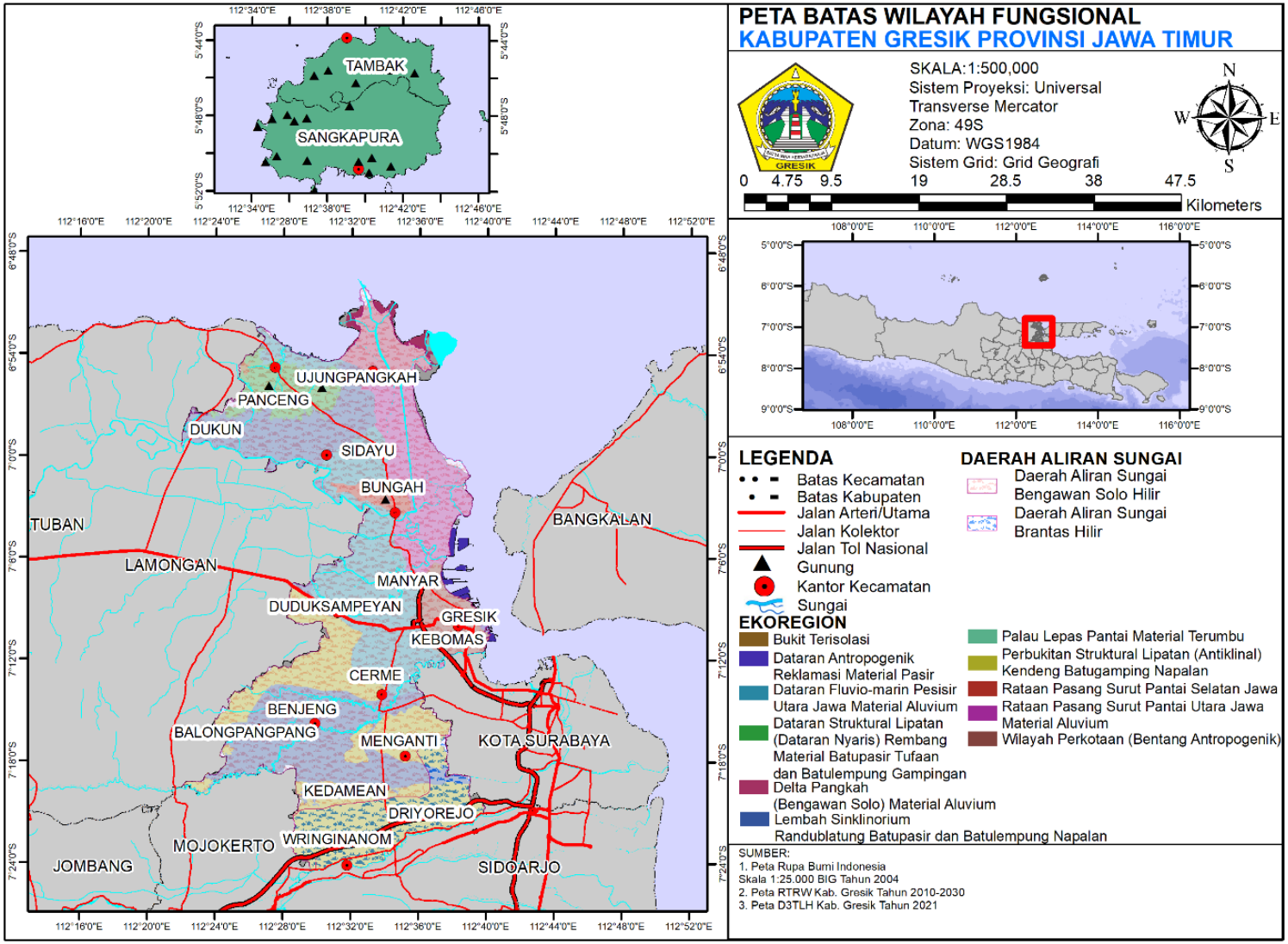
Gambar 3. 2 Peta Vegetasi Alami



Gambar 3. 3 Peta Ecoregion



Gambar 3. 4 Peta Daerah Aliran Sungai



Gambar 3. 5 Peta Batas Wilayah Fungsional

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 meliputi:

a. Kondisi Umum Daerah

   Kondisi umum daerah memuat antara lain kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah.

b. Capaian Indikator TPB

   Capaian indikator TPB yang dimaksud berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta perbandingan terhadap target yang ingin dicapai.

c. Pembagian Peran

   Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

1.6 MEKANISME PEMBUATAN KLHS RPJPD

Tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 meliputi:

a. Pembentukan Tim Pembuatan KLHS-RPJPD

   Pemerintah Daerah membentuk tim penyusun KLHS RPJPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tim penyusun KLHS RPJPD dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup. Tim penyusun KLHS RPJPD beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam penyusunan KLHS RPJPD. Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun KLHS RPJPD melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

1) Kondisi umum daerah, paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah.
2) Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3) Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa analisis kontribusi.

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan.

c. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1) Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Yang dimaksud dengan target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun indikator-indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi 7 "kategori pertama" dengan tanda (*) adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; "kategori kedua" dengan keterangan huruf ((a), (b), ...) di belakang nomor adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan "kategori ketiga" tanpa tambahan keterangan adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

2) Alternatif proyeksi disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJPD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3) Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
4) Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya tambahan disusun dengan memperhatikan: (a) pencapaian target tanpa upaya tambahan; (b) pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; (c) potensi, daya saing dan inovasi daerah; (d) daya dukung dan daya tampung daerah; (e) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Alternatif proyeksi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah.

1) Isu Strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2) Permasalahan berupa tantangan pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3) Sasaran Strategis berupa kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan isu Strategis dan permasalahan.

Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJPD. Laporan KLHS RPJPD ditandatangani oleh ketua tim pembuat KLHS RPJPD. Laporan KLHS RPJPD terdiri dari:

1) Laporan induk KLHS RPJPD;
2) Ringkasan eksekutif KLHS RPJPD; dan
3) Tahapan proses pembuatan KLHS RPJPD.

Ketua tim pembuat KLHS RPJPD menyampaikan laporan KLHS RPJPD kepada kepala daerah untuk dilakukan penjaminan kualitas.

d. Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian KLHS RPJPD

1) Penjamin Kualitas KLHS

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJPD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJPD dan kualitas substansi KLHS RPJPD. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJPD dibuktikan dengan :

a) Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD;
b) Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJPD;
c) Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan;
d) Laporan KLHS RPJPD.

Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJPD, pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJPD ditanda tangani oleh kepala daerah. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan cara : (a) penilaian bertahap; dan/atau (b) penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Penilaian mandiri bertahap dilakukan 2 (dua) kali pada saat : (a) setelah tahapan pengkajian selesai; dan (b) setelah tahapan rekomendasi dan integrasi KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selesai. Hasil penilaian mandiri bertahap yang dilakukan setelah tahapan pengkajian selesai memuat informasi tentang:

a) Pemenuhan kualitas hasil dan ketentuan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS sampai dengan tahapan pengkajian; dan
b) Rekomendasi perbaikan KLHS dan penyempurnaan proses pembuatan dan pelaksanaan tahap selanjutnya

Hasil penilaian mandiri bertahap yang dilakukan setelah tahapan rekomendasi dan integrasi KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selesai memuat informasi tentang:

a) KLHS telah memenuhi ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
b) Rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Penilaian mandiri sekaligus dilakukan secara keseluruhan setelah KLHS selesai dibuat dan diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Hasil penilaian mandiri sekaligus memuat informasi tentang:

a) KLHS telah memenuhi ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
b) Rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Penilaian mandiri, harus mempertimbangkan: (a) dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan (b) laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan. Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

2) Pendokumentasian KLHS

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS. Laporan KLHS memuat informasi tentang:

a) Dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
b) Metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
c) Metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
d) Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
e) Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
f) Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
g) Hasil penjaminan kualitas KLHS;
h) Ringkasan Eksekutif.

Laporan KLHS menjadi informasi pendukung : (a) sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan (b) sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Gresik. Selanjutnya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanahkan bahwa Laporan KLHS dilengkapi dengan :

a) Ringkasan Eksekutif;
b) Ringkasan Eksekutif hasil kajian pembangunan berkelanjutan;
c) Kajian terhadap Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan;
d) Lampiran :
   (1) Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan;
   (2) Peta Potensi Dampak Pembangunan Daerah;
   (3) Peta Rekomendasi Alternatif Perbaikan;
   (4) Penjaminan Kualitas KLHS oleh Kepala Daerah;
   (5) SK Tim Penyusun RPJPD;
   (6) Berita Acara Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah yang menyusun laporan KLHS;
   (7) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD;
   (8) Daftar Hadir dan Notulensi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD;
   (9) Persetujuan Validasi KLHS;
   (10) Data dan Informasi lain-lain yang mendukung seperti: Foto proses penyusunan KLHS, Hasil Studi, Studi Kelayakan, Data-data, Peta, dan seterusnya.

1.7 HASIL EVALUASI RPJPD KABUPATEN GRESIK

Penilaian capaian indikator kinerja dalam Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005 - 2025 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2026 bersifat kuantitatif, sehingga dalam menentukan Capaian Kinerja diselaraskan dengan

Indikator yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan Periode Penetapan. Berdasarkan Hasil Evaluasi capaian Kinerja masing masing indikator outcome, diperoleh persentase rata-rata capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1 Rata-rata Capaian Sasaran Pokok (%) dan Predikat Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Gresik Tahun Pelaksanaan 2005-2025

No	Periode	Rata-rata Capaian (%)	Predikat
1	2005-2010	87,78	Baik
2	2011-2015	96,73	Sangat Baik
3	2016-2020	103,68	Sangat Baik
4	2021-2026	103,66	Sangat Baik
	Rata-rata	**97,96**	

Rata-rata Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode diperoleh 97.96% dengan Predikat Sangat Baik. Capaian kinerja dengan nilai tertinggi diperoleh pada Periode 3 (RPJMD Tahun 2016 -2020) dengan Persentase 103.68%, sedangkan pada Tahun 2021-2026 memperoleh rata-rata capaian 103.66% mendasari realisasi kinerja pada Tahun 2022.

Tabel 1. 2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja RPJPD Kabupaten Gresik per Urusan Sampai dengan Akhir Periode

Urusan	Faktor Penghambat
Pendidikan	Belum memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga Pada tahun 2022/2023 terdapat 459 Sekolah Dasar (SD)pendidik Rasio murid terhadap guru tingkat Sekola Dasar 14:88 Rasio murid terhadap guru tingkat SMP sebesar 16:25.
	Fasilitas belajar-mengajar belum tersedia secara mencukupi
	Masih lemahnya evaluasi dan klarifikasi terhadap APBS.
	Integrasi dan Validasi Data Pokok Pendidikan
	Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata
	Banyak penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang didirikan oleh masyarakat belum berbadan hukum
	Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja;
	Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik
	Masih tingginya angka putus sekolah
	Rendahnya pendapatan tenaga pengajar honorer
	Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling;
	Bantuan dana Pendidikan belum maksimal
Kesehatan	Banyaknya peralatan kesehatan yang sudah rusak dan ketinggalan zaman, serta sarana dan prasarana penunjang di rumah sakit dan puskesmas yang kurang memadai.
	Prevalensi HIV / AIDS Tinggi

Urusan	Faktor Penghambat
	Prevalensi TB tinggi
	Jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis Masih Kurang
	Masi tingginya Pasien dengan Kasus Covid-19
	Masih tingginya Angka Stunting
	Kesehatan ibu bersalin untuk menghapus angka kematian ibu
	Pendistribusian tenaga kesehatan yang belum merata
	Masih terdapat balita gizi buruk
	Belum terintegrasinya sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan melalui penggunaan teknologi informasi, dan belum tersistematisasinya informasi data klinis (medical record), serta monitoring dan evaluasi.
	Belum digunakannya sistem teknologi informasi teknologi untuk memudahkan pelayanan administrasi keluarga miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ketersediaan distribusi air bersih perpipaan PDAM dan non perpipaan belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat
	Keluarga yang memiliki Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) belum 100%
	Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan
	Penataan ruang secara mendetail melalui RDTR belum terlaksana untuk seluruh kecamatan
	Kemantapan infrastruktur pada jalan kabupaten belum seluruhnya meningkat;
	Konektivitas daerah yang menghubungkan dengan kawasan strategis belum optimal
	Belum adanya ikon infrastruktur publik tematik dengan sistem logistik kota yang efisien untuk mendukung industri yang ada
	Cakupan layanan irigasi masih dibawah kebutuhan
	Tingginya frekuensi kejadian banjir yang salah satunya disebabkan rendahnya kapasitas daya tampung sungai
	Saluran drainase kabupaten belum tertangani secara optimal.
	Kualitas Jaringan jalan belum merata karena adanya ketimpangan kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing
	Masih terdapat kawasan kumuh
	Pemulihan sosial—ekonomi perdesaan melalui pembangunan infrastruktur permukiman di perdesaan berbasis padat karya
	Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	Belum optimalnya forum kewaspadaan dini masyarakat/FKDM di Kabupaten/ Kec/ Kel/ Desa; Masyarakat masih rentan terhadap isuisu yang berpotensi konflik
	Gresik merupakan daerah rawan bencana banjir dan kekeringan
Sosial	Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) belum optimal
	Pelaksanaan pemutakhiran data penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Basis Data Terpadu) belum optimal
	Belum Tersedia Pusat Rehabilitasi Sosial, Panti Asuhan untuk Anak-Anak dan Lansia Terlantar Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

Urusan	Faktor Penghambat
	Tingkat, Keparahan, dan Kedalaman dan Posisi Relatif Kemiskinan Kabupaten Gresik masih diatas 2 Digit
Tenaga Kerja	Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja
	Data urusan ketenegakerjaan belum faktual dan up to date
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih rendah
	Job fair belum efektif menyerap tenaga kerja terutama warga Gresik
	Masih adanya perusahaan perusahaan yang belum mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama karena masih dalam proses perundingan
	Penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal;
	Peningkatan kapasitas tenaga kerja berbasis pelatihan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri;
Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	Belum optimalnya peran serta masyarakat utamanya perempuan dalam pembangunan,
	Masih Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat
	Pemenuhan hak anak belum optimal;
Pangan	Minimnya sarana prasarana penunjang ketahanan pangan
	Alih fungsi lahan
	Insensitas Pembangunan Non-Pertanian Sangat tinggi
	Kurang optimalnya diversifikasi pangan
	Keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan,
	Belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan.
	Minimnya sarana prasarana penunjang ketahanan pangan
	Proses pembebasan lahan masih terhambat terutama kerjasama warga terdampak
	Adanya tanah terlantar milik Daerah yang belum bermanfaat
	Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat
Lingkungan Hidup	Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten belum optimal
	Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah belum optimal
	Meningkatnya volume sampah serta Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau Reuse, Reduce dan Recycle (3R);
	TPA pada tingkat Kabupaten sudah over capacity dan statusnya meminjam dari semen Indonesia.
	Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)
	Pengawasan dan penanganan limbah industri masih perlu ditingkatkan
	Polusi udara akibat pabrik dan kepadatan penduduk tinggi di Desa Kramatinggi
	Indeks Pencemaran Air memiliki nilai terendah terhadap indeks pencemaran udara dan tutupan lahan
	Pencemaran limbah pabrik di pada aliran sungai
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kartu Tanda Penduduk Elektronik/KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah; dan
	Arus migrasi masuk penduduk ke Kabupaten Gresik yang tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli

Urusan	Faktor Penghambat
	Kabupaten Rresik dan penduduk non permanen yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) (Masih terdapat data ganda, anomali dan non aktif)
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Belum optimalnya fungsi pemerintahan desa / kelurahan bersama lembaga keswadayaan masyarakat Desa/Kelurahan sebagai mitra kerja.
	Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa terhadap Pemerintah Daerah
	Belum adanya kerjasama antar Desa yang telah memiliki legal standing
	Belum adanya pengaturan terhadap Asset, Resources dan Profit Shares.
	Sistem Informasi Desa belum aplikatif dan integratif
	Ketergantungan Anggaran Desa Kepada Bantuan Keuangan APBD
	Desa perlu mengoptimalkan aset yang ada untuk dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
	Perlu penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi desa maju
	Sebaran program pembangunan desa masih didominasi oleh pembangunan, perlu didorong agar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
	Belum Optimalnya Peran Bumdes dan Bumades ditingkat desa
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif masih tinggi
	Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB aktif (akseptor).
Perhubungan	Penataan parkir on street dan of street belum optimal
	Pengelolaan perkeretapian belum menjadi alternatif dalam sistem logistic barang dan orang
	Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan sistem logistik nasional
	Masih terjadinya kemacetan di berbagai titik akibat peningkatan aktivitas masyarakat
	Kapasitas jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan yang ada
Komunikasi Dan Informatika	Sistem informasi penunjang kinerja OPD belum terintegrasi
	Bekum adanya Command Center untuk memonitor langsung keadaan Kabupaten Gresik secara realtime
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;	Masih belum optimalnya penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang sudah terdaftar.
	Masih belum optimalnya memfasilitasi bagi anggota koperasi agar lebih memahami tentang seluk beluk koperasi
	Usaha Mikro Kecil yang terdampak pandemi COVID-19
Penanaman Modal	Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan
	Kurangnya event – event promosi khususnya dibidang investasi
	Investasi belum sepenuhnya diarahkan pada pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Penyerapan tenaga kerja)
Kepemudaan Dan Olah Raga	Daya dukung sarana dan prasarana olahraga terbuka publik perlu ditingkatkan untuk mendorong prestasi dan aktivitas olahraga masyarakat
	Peranan kepemudaan belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pembangunan
	Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Gresik belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan

Urusan	Faktor Penghambat
	kerwirausahaan, pengarustamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku
	Belum terdapatnya basis data keolahragaan yang komprehensif
	Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik
Statistik	Analisa Data Sektoral yang disusun masih Rendah
	Belum optimalnya sistem Satu Data Pembangunan
	Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam mensupply data sektoral
	Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola untu mendukung pembangunan
Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal
	Belum ditetapkannya pola hubungan komunikasi sandi antar OPD
Kebudayaan	belum optimalnya inventarisasi dan publikasi ragam dan lokasi budaya
	terbatasnya sarana dan prasarana kesenian,
	kurang optimalnya inisiasi kebudayaan Gresik dalam produksi produkproduk lokal baik di lingkup mikro, menengah, maupun industri besar;
	Inovasi cipta karya seni yang kurang mengangkat budaya khas Gresik,
	Belum adanya city branding berbasis kebudayaan Gresik
	belum optimal pengelolaan, promosi, dan pengembangan. Cagar budaya religi, sejarah, dan permuseuman
Perpustakaan	Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan.
	Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca
	lemahnya basis data terkait naskah kuno milik Daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
	Minat baca rendah.
	Lemahnya basis data terkait naskah kuno milik Daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
Kearsipan	Akses Penggunaan Arsip Belum Efektif
	kompetensi arsiparis yang tidak menyesuaikan dengan tatakerja kearsipan terkini, fasilitas penunjang kearsipan yang belum memadai,
	kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip.
	Ketidaktesediaan Record Center atau depo pengelolaan arsip terpadu dengan klasifikasi tertentu
	Publikasi dan/atau penggunaan arsiparsip dengan klasifikasi tertutup masih belum diatur secara normatif
Kelautan Dan Perikanan	belum optimalnya penataan wilayah pesisir pantai
	Daya Dukung lahan masih kurang optimal
	Terdapat alih fungsi tambak akibat tidak adanya perlindungan lahan tambak produktif
	Pemasaran hasil Perikanan masih bersifat individu dan belum terintegrasi dari hulu ke hilir
	Kurangnya bibit ikan/udang yang berkualitas.
	Sarana dan Prasarana penangkapan ikan kurang memadai sehingga kurang optimalnya hasil tangkapan

Urusan	Faktor Penghambat
	Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan atau budidaya yang tidak merusak lingkungan
	Belum tersedianya data yang memadai karena masih belum optimalnya sistem informasi basis data terutama data saluran tambak
Pariwisata	KOntribusi Sektor Paariwisata terhadap PDRB masih rendah
	Masih kurangnya penataan fasilitas penunjang wisata religi dan wisata alam untuk mewujudkan rasa aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun luar negeri.
	Perkembangan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud belum diiringi manajemen pengelolaan yang representatif untuk menghadirkan pelayanan kepariwisataan yang elegan dan berdaya tarik tinggi.
	pengembangan ekonomi kreatif berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah masih belum terintegrasi dengan destinasi pariwisata.
	frekuensi promosi yang masih rendah
	Pemulihan sosial ekonomi di sektor pariwisata dampak pandemi covid-19;
	Belum maksimalnya analisis pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi
	Belum berkembangnya Produk Ekonomi Kreatif lokal
	Cenderung tidak stabilnya Peran Sektor Pertanian terhadap PDRB Gresik
	Terhambatnya Pengembangan Kawasan Industri, Agropolitan dan Minapolitan
	Pengalihan lahan dan tingkat pertumbuhan pertanian yang tidak secepat sektor industry dan perdagangan, kualitas SDM petani yang masih rendah
	Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku agrobisnis, masih minimnya sarana dan prasarana pertanian
	Semakin tingginya konversi lahan pertanian ke lahan no pertanian
	Ketersediaan bibit tanaman perkebunan baik jumlah kualitas maupun ketepatan waktu penyediaannya sangat kurang ;
	Tingkat penguasaan tehnologi petani masih terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat.
	Produk pangan segar pertanian belum bersertifikat baik prima tani maupun SNI
	Semakin tingginya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian
	Ketersediaan bibit tanaman perkebunan baik jumlah kualitas maupun ketepatan waktu penyediaannya sangat kurang ;
	Tingkat penguasaan tehnologi petani masih terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat.
	Produk pangan segar pertanian belum bersertifikat baik prima tani maupun SNI;
	Insentif untuk pengelolaan lahan pertanian berkalnjutan
	Perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan gangguan produksi
	Aspek daya saing produk pertanian relative masih rendah
	Masih terbatasnya RPH mosern yang berstandar SNI
	Masih belum optimalnya perlindungan usaha Tani
	Petugas lapangan pertanian masih belum memiliki peran yang dominan
Perdagangan	Masih rendahnya daya beli masyarakat
	ingginya Angka Kemiskinan bertolak belakang dengan meningkatnya PDRB kabupaten Gresik dan meningkatnya sektor industry dan perdagangan
	Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, kerjasama dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan Pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan serta Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Urusan	Faktor Penghambat
	Perlu pengelolaan antara pasar modern dengan pasar tradisional, agar usaha sektor informal, masyarakat dapat dilindungi
	Belom optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industri berbasis ekonomi digital
	Kerjasama antar daerah dan nasional untuk peningkatan promosi produk unggulan daerah Belum Optimal
	Adanya Persainngan antara Pelaku Usaha Mikro Pasar tradisional dengan Pasar Modern
Perindustrian	Masih kurangnya fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana bagi industri kecil dan menengah
Perencanaan	Perubahan regulasi teknis dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah
	Implementasi Perencanaan Melalui sistem informasi pemerintahan daerah sering berubah
	Terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di Daerah
Keuangan	Integrasi sistem informasi pemerintahan daerah
	Belum optimalnya Penganggaran alternatif melalui CSR dan/atau croudfunding
	Rasio kemandirian fiskal yang rendah
Kepegawaian Daerah, Pelatihan dan Pengembangan	Masih rendahnya etos kerja pegawai, serta belum optimalnya manajemen SDM aparatur
	Inovasi Daerah yang diciptakan dibanding dengan kreatifitas ASN untuk mendukung percepatan pembangunan melalui inovasi Daerah masih rendah
	ata Kelola Manajemen Talenta pemerintahan Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja individu dan/atau organisasi
	Reformasi birokrasi untuk mewujudkan good and clean governance masih rendah
Sekretariat Daerah	Perumusan kebijakan strategis yang dinamis
	Nilai Akuntabilitas kinerja intansi pemerintahan Belum maksimal
	Pelaporan realisasi fisik pembangunan yang semu
Sekretariat DPRD	Pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi fungsi perumusan peraturan perundangan, penganggaran, dan pengawasan
Pengawasan	Belum ada Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan
	Penguatan sumber daya aparatur pengawas internal pemerintah
	Harmonisasi dan pemahaman terhadap regulasi
Kesatuan Bangsa dan Politik	Kondusifitas Daerah dalam penyelesaian konflik
	Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol dan Toga
	Masih adanya Konflik Sosial akibat intoleran umat beragama

1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan pada dokumen ini berisi mengenai latar belakang penyusunan dokumen, maksud dan tujuan, sasaran, dasar hukum, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup wilayah, ruang lingkup waktu serta materi, mekanisme penyusunan dokumen, peran

pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan sistematika pembahasan.

BAB II DASAR TEORI

Bab II dasar teori berisi tentang tinjauan kebijakan dan teori yang digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen KLHS RPJP Kabupaten Gresik, diantaranya yaitu teori perencanaan pembangunan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pendekatan dan prinsip KLHS, metode evaluasi pencapaian TPB, metode analisis 6 muatan KLHS, serta hasil akhir dari KLHS RPJP. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pendukung dan standar dalam proses analisis. Selain teori, terdapat dinamika perkembangan Kabupaten Gresik dan Sejarah Kabupaten Gresik.

BAB III KONDISI UMUM DAERAH

Bab III membahas tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Gresik yang ditinjau dari karakteristik fisik, sosial budaya, ekonomi dan keuangan daerah, lingkungan, serta arahan kondisi 6 muatan KLHS.

BAB IV ANALISIS TPB

Bab IV membahas mengenai ketercapaian TPB yang akan dibedakan berdasarkan pilar dan juga OPD yang bertanggungjawab. Selain itu akan disampaikan realisasi anggaran dan peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB.

BAB V ANALISIS CAPAIAN TPB PADA ORGANISASI

BAB V pada dokumen ini berisi mengenai analisis capaian indikator TPB berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Selanjutnya dilakukan perumusan TPB prioritas yang akan disusun rekomendasinya pada Bab VI.

BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

BAB VI akan menyampaikan rekomendasi untuk TPB prioritas yang disesuaikan dengan permasalahan. Pada bab ini, rekomendasi akan disampaikan dalam bentuk sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi TPB prioritas tersebut.

BAB VII KESIMPULAN

BAB VII merupakan bagian penutup yang akan disampaikan dalam bentuk kesimpulan serta saran dari hasil tahap perumusan TPB.



BAB II DASAR TEORI

2.1 SEJARAH LAHIRNYA KABUPATEN GRESIK

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan perkembangan industri yang cukup pesat. Gresik berkembang pada abad ke-11 dan menjadi pusat perdagangan antar pulau dan antar negara. Sebagai kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi oleh pedagang asing seperti Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Selain industrinya, Gresik juga semakin dikenal dengan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Pembawa dan penyebar Islam adalah yaitu Syech Maulana Malik Ibrahim bersama-sama dengan Fatimah Binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Syekh Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di Gresik dengan cara bergaul dengan Masyarakat. Dia juga tidak langsung menentang agama dan kepercayaan masyarakat. Namun dengan menunjukkan keindahan dan kebaikan agama Islam. Melihat hal tersebut, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Setelah menarik hati masyarakat, Syekh Maulana Malik Ibrahim berdagang di Desa Roomo, Manyar, Gresik. Syekh Maulana pernah berkunjung ke Ibu Kota Majapahit di Trowulan. Kedatangannya disambut baik oleh Raja Brawijaya dan mendapat kepercayaan dari Raja Brawijaya sebagai pemimpin Gresik di bawah kedaulatan Majapahit. Berkat perannya dalam menyebarkan Islam dan memimpin Gresik, Syekh Maulana dikenal dengan sebutan Sunan Gresik.

Nama Nyai Ageng Pinatih, seorang janda kaya raya dan syahbandar tidak lepas dari sejarah lahirnya Kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) yang oleh orang tuanya dibuang ke laut dan ditemukan seorang pelaut dari anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah beranjak dewasa, Jaka Samudra yang bergelar Raden Paku menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedato. Dari tempat inilah Jaka Samudra dikenal denan panggilan Sunan Giri.

Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya dianggap sebagai penguasa, tiang penyangga raja dan Menteri, maka disamping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali (penyebar Agama Islam), Syekh Maulana Malik dikenal juga sebagai Sultan/Prabu (Penguasa Pemerintahan). Sunan Giri juga dikenal menjadi salah satu tokoh wali songo yang dikenal dengan nama Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin. Tahun dimana beliau dinobatkan sebagai pengusaha pemerintahan (1478 M) dijadikan sebagai hari lahirnya Kota Gresik. Syekh Maulana Malik memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun.

Bupati yang pertama menjabat adalah Kyai Ngabehi Tuemenggung Poesponegoro pada tahun 1617 Saka, yang jasadnya dimakamkan di komplek makam Poesponegoro di Jalan Pahlawan Gresik, satu komplek dengan makam Syech Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali, hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, Kota Gresik juga bisa disebut dengan Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak. Hasil kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban, dan lain-lain.

Terdapat beberapa versi asal-usul nama Gresik. Dalam Babad Hing Gresik, Gresik disebut dengan Gerwarasi. Sedangkan Prasasti Karang Bogem menyebut nama Gresik secara gamblang di bagian kalimat pembuka. Pada masa penjajahan, bangsa China menyebut Kota Gresik dengan T'Se T'Sun atau kampung kotor. Peta kuno yang dibuat oleh bangsa Portugis pada abad ke-15, Gresik disebut dengan Gerwarace, Agace, dan Agati. Bangsa Arab yang datang ke Jawa menyebut Gresik dengan Qorrosyaik. Sebutan ini diambil

dari kalimat perintah kapten kapal untuk menancapkan jangkar saat sampai ke Pelabuhan. Sementara itu, dalam buku Historisch Onderzoek karya J.A.B.Wisselius, bangsa Belanda (VOC) menyebut Gresik dengan Gerrici atau Grissee. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul "The History of Java" menyebut Gresik dengan sebutan Giri-Gisik. Dari berbagai sebutan-sebutan tersebut, Giri-Gisik menjadi yang paling popular di kalangan masyarakat. Giri berarti bukit dan Gisik berarti pantai sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Gresik. Giri-Gisik kemudian berubah menjadi Gresik.

Pada mulanya, Gresik merupakan salah satu kawedanan dalam Kabupaten Surabaya. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1974, Kabupaten Surabaya berubah menjadi Kabupaten Gresik. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata.

2.2 DINAMIKA PERKEMBANGAN WILAYAH

Kabupaten Gresik yang terus berkembang memaksa adanya alih fungsi lahan. Berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Gresik Tahun 2019, penggunaan lahan di Kabupaten Gresik pada 2019 mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Data menujukkan luas lahan sawah yang mengalami penurunan dari yang semula 38.052,5 ha menjadi 35.779 ha pada tahun 2017, atau turun sebesar 5,65%. Luas tegalan juga menunjukkan kenaikan dari 20.627 ha menjadi 20.831 ha atau naik sebesar 0,9 %. Luas lahan perkebunan semula 3.729 ha naik menjadi 4.357,35 ha atau naik sebesar 16,8 %. Hal ini disebabkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan dan tegalan.

Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Gresik dengan tanah relatif subur dengan dominasi jenis tanah aluvial. Akan tetapi, alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman dan industri yang sangat tinggi menyebabkan ketersediaan lahan pertanian terutama pertanian pangan menjadi berkurang terutama di Kecamatan Gresik. Berdasarkan data, alih fungsi lahan tertinggi untuk lahan sawah sebesar 2.273,5 ha yang digunakan sebagai lahan

permukiman dan industri (DLH Kabupaten Gresik, 2019). Berikut tabel luas perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 13 Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Gresik Tahun 2017

No.	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha)		Sumber Perubahan
		Lama	Baru	
1	Permukiman	1198,77	1198,77	Penduduk
2	Industri	2721,00	3293,69	Industri
3	Perkebunan	245,00	315,00	Industri & Pemukiman
4	Pertambangan	-	-	
5	Sawah	38052,50	35779,00	Industri & Pemukiman
6	Pertanian lahan kering	20627,00	20831,00	Alih fungsi Lahan
7	Perikanan	-	-	
8	Hutan	-	-	

Sumber: IKPLHD Kab. Gresik, 2019

Berdasar data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa rekapitulasi prosentase penggunaan lahan di Kabupaten Gresik menurut penggunaan lahan/tutupan lahan hingga akhir Tahun 2017 mencapai 94.425,24 Ha dari total 119.125,56 Ha luas wilayah Kabupaten Gresik, dengan prosentase Lahan Sawah mencapai 30 %, Lahan Non Pertanian mencapai 21 %, Lahan Kering 19 %, Lahan Perkebunan 4 %, Lahan Hutan 3 % dan Luas Lahan Badan Air seluas 23 % wilayah di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 7 Eksisting Penggunaan Lahan Tahun 2019

No	Jenis Peruntukkan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan (ha)
Kawasan Lindung			
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9,426.12	9,426.11
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5,828.62	1,804.18
3	Kawasan Terumbu Karang	5,387.00	5,387.00
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3.918,85	3.918,85
5	Kawasan Resapan Air	1,252.58	1,040.61
6	Kawasan Cagar Alam	661,38	661,38
	Jumlah	26,450.9	7,401.39
Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Pemukiman	26,063.55	15,331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23,372.70	39,572.98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	21,678.36	31,092.21
4	Kawasan Hortikultura	16,885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12,448.03	10,108.57
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6,644.01	2,797.65
7	Kawasan Perkebunan	2,573.67	10,761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1.034,56	6,544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34
10	Kawasan Pariwisata	82.85	7.92
11	Kawasan Bandar Udara	68.44	72.82
12	Kawasan Pelabuhan	1,257.69	366.89
	Jumlah	112,909.02	117792.25

Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Dari luasan hutan yang ada di Kabupaten Gresik, telah terjadi penurunan jumlah luasan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena tekanan terhadap kawasan hutan untuk pengembangan investasi industri dan pergudagan yang cukup besar. Dari data status lingkungan hidup Kabupaten Gresik tahun 2017 diketahui bahwa sebesar 3.293,69 ha kawasan hutan mengalami pelepasan untuk pengembangan industri terutama di wilayah Kecamatan Kebomas.

2.3 KAJIAN KEBIJAKAN TATA RUANG

Kebijakan tata ruang mengacu pada serangkaian rencana, pedoman, dan peraturan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur penggunaan lahan dan pengembangan wilayah di suatu negara atau wilayah tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan rencana tata ruang yang berkelanjutan, efisien dan terkelola dengan baik yang memungkinkan penggunaan sumber daya alam dan manusia secara rasional, sekaligus menghindari konflik penggunaan lahan. Kebijakan tata ruang

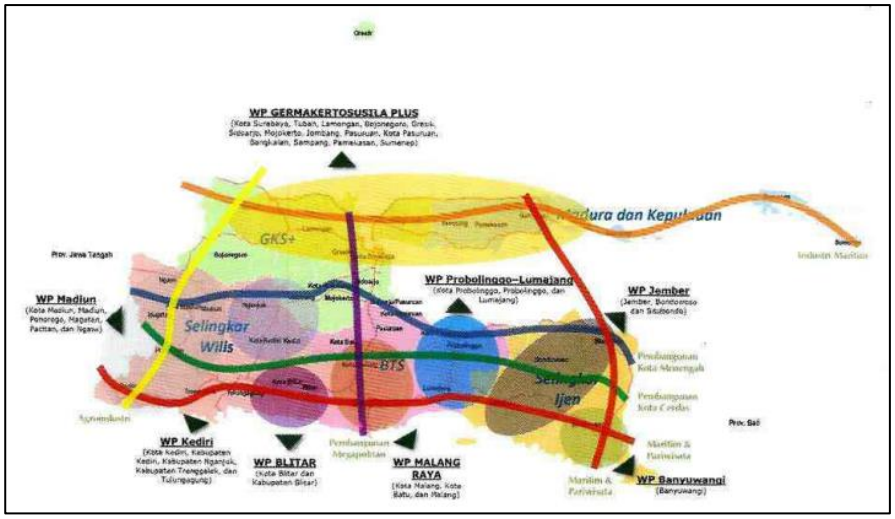
yang akan dibahas adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik yang berisikan tentang rencana pola ruang dan rencana struktur ruang Kabupaten Gresik.

2.3.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 TentangPercepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, perlu adanya langkah-langkah strategis dan terintegrasi atas arah pembangunan yang jelas, strategi yang tepat. Fokus, dan terukur guna mencapai percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Percepatan pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Berikut merupakan isi dari Peraturan Presiden tersebut.

a. Dilakukan percepatan pembangunan dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional atas Kawasan Gerbangartosusila, Kawasan BTS, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
b. Dilakukan pengembangan Kawasan Selingkar Ijen, dan Kawasan Madura dan Kepulauan.
c. Percepatan pembangunan ekonomi dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Induk.

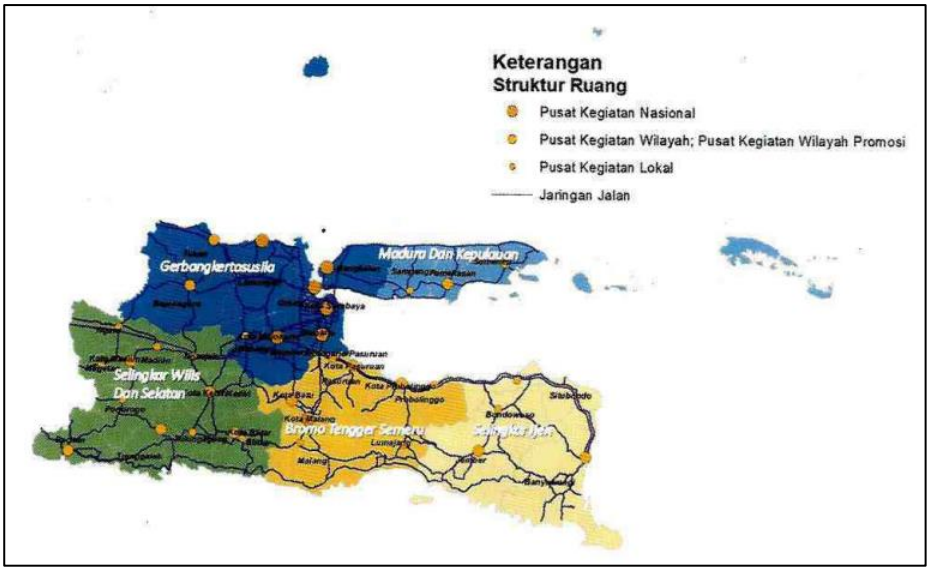
Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023, pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur diarahkan pada peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar, pengembangan dan peningkatan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Berikut merupakan peta arahan pengembangan wilayah Jawa Timur.



Gambar 2. 1 Peta Arahan Pengembangan Wilayah Jawa Timur
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

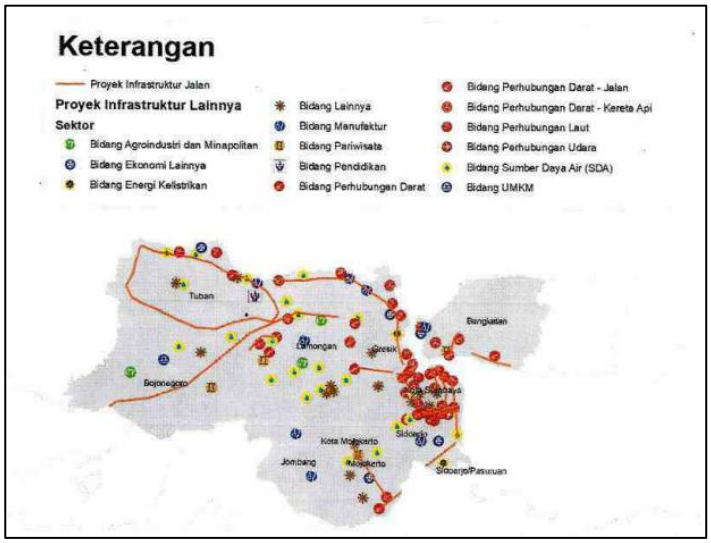
Secara garis besar, upaya optimasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi yang hendak dirintiskan di Provinsi Jawa Timur telah selaras dengan arah pengembangan wilayah. Hal tersebut didukung pula dengan potensi kegiatan ekonomi dan keunggulan wilayah Provinsi Jawa Timur yang didominasi oleh kegiatan industri pengolahan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; dan pariwisata, yang juga merupakan fokus sektor dalam rangka transformasi ekonomi Pemerintah ke depan. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah, telah disepakati kawasan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Terdapat dua pendekatan yang akan diterapkan dalam percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yaitu pendekatan untuk pusat pertumbuhan yang telah ada dan pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan baru. Pendekatan pusat pertumbuhan yang telah ada memerlukan penguatan infrastruktur, dilakukan pada kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, yang dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur. Pendekatan ini diterapkan untuk Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, Kawasan Prioritas BTS, dan Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.



Gambar 2. 2 Peta Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung Provinsi Jawa Timur
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Kebijakan, program/ kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara Juanda - Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong, Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan PLTSa di Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 2. 3 Peta Lokasi Program/Proyek di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

2.3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik

Struktur ruang wilayah kota merupaka gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang merupkan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional bahkan iternasional. Kabupaten Gresik memiliki potensi-potensi terkait pengembangan struktur ruang seperti ketersediaan fasilitas dan utilitas yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dimanfaatkan dan digunkan sebagai modal dasar dalam membentuk struktur ruang wilayah. Potensi lain dari struktur ruang wilayah di Kabupaten Gresik yaitu *Primate City* sebagai permasalahan utama struktur ruang wilayah tidak terjadi di Kabupaten Gresik. Kondisi ini tentu membawa dampak positif bagi semua stakeholders dan diharapkan dapat dipertahankan dengan melakukan beberapa rangkaian.

Selain memiliki potensi, pengembangan struktur ruang wilayah di Kabupaten Gresik juga memiliki permasalahan. Permasalahannya yaitu masih terjadi disparitas perkembangan wilayah, dimana SSWP II sebagai pusat Kabupaten Gresik relatif lebih berkembang jika dibandingkan SSWP lainnya. Permasalahan terkait pengembangan struktur ruang wilayah di Kabupaten Gresik yang tertulis dalam Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil analisa didapat suatu gambaran yang berbeda antara Rencana Struktur Kota dengan Kondisi eksisting. Perbedaan ini terlihat pada SSWP I dan SSWP II. Sedangkan pada SSWP III dan SSWP IV terlihat memiliki kemiripan.
2. Pokok permasalahan yang utama berada SSWP I dimana strategi untuk mengembangan IKK Sidayu terlihat tidak terjadi. Hal ini terlihat dari nilai total score sebagai indikasi kemajuan wilayah menduduki peringkat terakhir sehingga peringkat IKK pun menjadi terakhir. Permasalahan lain adalah kecamatan yang tergabung di Pulau Bawean terlihat tidak mengalami kemajuan yang berarti. Nilai score dan peringkat IKK terlihat masih sangat jauh dibandingkan dengan IKK lain sehingga perlu dicari jalan keluar dalam pengembangan kedua IKK tersebut.
3. Permasalahan lainnya adalah faktor penyebab rendahnya tingkat kemajuan IKK yang paling sering adalah faktor 1. Faktor 1 terdiri dari variabel fasilitas kesehatan, variabel aksesibilitas, variabel penduduk eksisting, variabel kualitas rumah, variabel

ketersediaan fasilitas sampah, variabel ketersediaan fasilitas air bersih dan variabel luas lahan industri. Jika melihat pada variabel-variabel tersebut, maka dapat dilihat karakteristik IKK di Kabupaten Gresik masih sangat perlu didorong dalam meningkatkan pelayanan fasilitas kota. IKK yang memiliki nilai faktor 1 yang tinggi hanya IKK Kebomas yang notabene adalah ibukota kabupaten. Dengan demikian, kesenjangan itu masih ada diantara IKK yang menjadi ibukota kabupaten dengan IKK lainnya.

4. Faktor penentu dalam meningkatkan kemajuan IKK dan peringkat IKK adalah faktor 3 yaitu fasilitas perdagangan. Kondisi ini didukung pula oleh mulai berkembangnya Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah perdagangan dan jasa. Dengan demikian, upaya pengembangan pusat SSWP khususnya SSWP II dan IV ini dapat dilakukan dengan mendorong penyediaan fasilitas perdagangan tersebut.

2.3.2.1 Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terdapat beberapa skenario kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Gresik yaitu kebijakan dan strategi sistem perkotaan, kebijakan dan strategi sistem perdesaan, dan kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

A. Kebijakan dan Strategi Sistem Perkotaan

1. Kebijakan sistem perkotaan
   a. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota- perkotaan dan wilayah
   b. Pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan.
2. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota-perkotaan dan wilayah meliputi:
   a. Mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan pada pusat regional dan sub-regional
   b. Mengembangkan pusat regional pada PKN
   c. Mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing kecamatan

d. Mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaaan.

3. Strategi pemerataan Pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan meliputi:
   a. Membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai PPK
   b. Mendorong fungsi dan peran dari perkotaan yang berfungsi sebagai PKN dan PPK melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta pemantapan sistem hirarki perencanaan sarana dan prasarana wilayah
   c. Menata kawasan perkotaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan perkotaan
   d. Memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan.

B. Kebijakan dan Strategi Sistem Perdesaan

1. Kebijakan sistem perdesaan meliputi:
   a. pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki; b. peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan; dan c. pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan.
2. Strategi pengembangan sistem pusat perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki meliputi:
   a. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan b. membentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, sampai pada pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
3. Strategi peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan meliputi:
   a. membentuk sistem pusat permukiman perdesaan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan b. melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4. Strategi pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan meliputi:
    a. mengembangkan kawasan perdesaan berbasis industri pada kawasan yang potensial; b. menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis pertanian dan perkebunan sebagai pengembangan kawasan agropolitan; dan c. menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis perikanan sebagai pengembangan kawasan minapolitan.

C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten.

1. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana utama meliputi:
    a. pengembangan jaringan transportasi darat; b. pengembangan jaringan transportasi laut; dan c. pengembangan jaringan transportasi udara
2. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi darat meliputi:
    a. pengembangan jaringan jalan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah
    b. Peningkatan sistem jaringan kereta api umum dan stasiun kereta api
    c. Pengembangan sistem angkutan umum secara merata
    d. Peningkatan sistem jaringan Sungai
    e. Pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan jaringan Sungai
    f. Pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan.
3. Strategi pengembangan jaringan jalan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah meliputi:
    a. Mengembangkan jalan bebas hambatan guna mendukung perkembangan antar wilayah dan antar kegiatan serta menghubungkan perkotaan melalui jalur arteri primer;
    b. Meningkatkan peran jalan arteri primer, kolektor primer, maupun lokal primer
    c. Meningkatkan peran jalan sekunder pada kawasan perkotaan
    d. Meningkatkan peran jalan lingkungan pada kawasan permukiman

e. Mengembangkan alternatif sistem transportasi yang baru pada wilayah yang mempunyai tingkat perkembangan kegiatan fungsional tinggi dan pada ruas-ruas jalan yang macet
f. Mengatur sirkulasi lalu lintas pada jaringan jalan yang memiliki kinerja rendah dengan rekayasa lalu lilntas
g. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan dengan cara melebarkan atau membuat alternatif jalan baru
h. Mengatur dan merencanakan pemisahan moda transporasi untuk mengurangi beban pada jaringan jalan di dalam wilayah perkotaan
i. Menetapkan batas ruang milik jalan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan antar pengguna jalan
j. Mengembangkan fasilitas pendukung transportasi pada ruang milik jalan

4. Strategi peningkatan sistem jaringan kereta api umum dan stasiun kereta api sebagaimana meliputi:
   a. Mengoptimalkan sistem jaringan jalur kereta api umum dan komuter yang menghubungkan kabupaten dan kota sekitar
   b. Meningkatkan prasarana stasiun kereta api sebagai pendukung optimalisasi sistem jaringan jalur kereta api umum dan komuter.
5. Strategi pengembangan sistem angkutan umum secara merata sebagaimana dimaksud meliputi:
   a. Mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi antar kabupaten
   b. Mengembangkan angkutan umum penghubung antar kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan secara terintegrasi
6. Strategi peningkatan sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud meliputi:
   a. Meningkatkan peran jaringan sungai pada kawasan perkotaan
   b. Mengoptimalkan sistem jaringan sungai yang menghubungkan kabupaten dan kota sekitar
   c. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan sungai sebagai pendukung optimalisasi sistem jaringan sungai.
7. Strategi pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi jaringan Sungai meliputi:

a. ningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan jaringan Sungai
b. Mengembangkan terminal sebagai prasarana pemberhentian dan keberangkatan.

8. Strategi pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan sebagaimana meliputi:
   a. Mengembangkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal penumpang yang memadai
   b. Meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan stasiun kereta api yang memadai
   c. Mengembangkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal angkutan sungai yang memadai.
9. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi laut meliputi
   a. Peningkatan prasarana jaringan transportasi laut
   b. Peningkatan kebutuhan penyeberangan antar pulau.
10. Strategi peningkatan prasarana jaringan transportasi laut meliputi:
    a. Meningkatkan kapasitas standar pelayanan pelabuhan penyeberangan
    b. Meningkatkan fasiitas penunjang pelabuhan penyeberangan
11. Strategi peningkatan rute penyeberangan meliputi:
    a. Mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata yang didukung penyeberangan antar pulau
    b. Menambah frekuensi penyeberangan antar pulau.
12. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi udara meliputi:
    a. Pengembangan prasarana transportasi udara
    b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sekitarnya.
13. Strategi pengembangan prasarana transportasi udara meliputi:
    a. Mengembangkan Bandar Udara Perintis;
    b. Menyediakan fasilitas pendukung Bandar Udara Perintis.
14. Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sekitarnya meliputi:
    a. mengembangkan kawasan di sekitar Bandar Udara Perintis

b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat kawasan di sekitar Bandar Udara Perintis.

2.3.2.2 Rencana Pola Ruang

A. Kawasan Lindung

Adapun kawasan lindung di Kabupaten Gresik diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Badan Air

Badan air yang terdapat di Kabupaten Gresik yang terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Gresik terdiri dari 3 (tiga) kawasan, yaitu kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Ujung Pangkah

3. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi di Kabupaten Gresik terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa, meliputi:

a. Cagar Alam

Pengelola hanya memastikan hutan tersebut tidak diganggu oleh aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan (Kemenhut, 2013) Kabupaten Gresik memiliki Kawasan Cagar Alam kurang lebih 615 (enam ratus lima belas) hektar, yang terdapat di:

- Cagar alam Pulau Bawean terdapat di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;

- Cagar Alam Pulau Gili Noko terdapat di Kecamatan Sangkapura; dan
- Cagar Alam Pulau Nusa terdapat di Kecamatan Sangkapura.

Adapun rencana pemantapan kawasan cagar alam diatas antara lain:

- Pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
- Peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
- Pencegahan pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi utama cagar alam.

b. Suaka Marga Satwa

Kabupaten Gresik Kawasan Suaka Margasatwa yang berada di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Adapun rencana pemantapan kawasan suaka margasatwa diatas antara lain:

- Pengelolaan suaka margasatwa untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
- Peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
- Pencegahan pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi utama suaka margasatwa.

4. Kawasan Lindung Geologi

Kabupaten Gresik memiliki keunikan geologi yang secara fisik diwujudkan dalam bentukan alam yang menarik yaitu berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik atau Kawasan keunikan proses geologi seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di Kecamatan Wringinanom. Pengelolaan kawasan lindung geologi meliputi pengelolaan kawasan cagar alam geologi melalui :

a. Studi dan penetapan kawasan cagar alam geologi;
b. Mempertahankan ciri khas dan keunikan kawasan sebagai monuman alam yang dapat difungsikan sebagai obyek wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
c. Penguasaan lokasi untuk mengamankan obyek dan memudahkan pelestarian;

d. Pemeliharaan lingkungan sekitar kawasan dengan penghijauan yang mendukung fungsi lindung ekologis, dan
e. Penataan kawasan dengan dukungan prasarana dan sarana pengamatan, perlindungan dan pemeliharaan yang memadai.

5. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Gresik yang meliputi pada Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Ujungpangkah. Adapun rencana pemantapan kawasan ekosistem mangrove diatas antara lain:

a. Pelestarian mangrove sebagai pembentuk ekosistem mangrove dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut.
b. Pengendalian pengembangan kegiatan budidaya di kawasan ekosistem mangrove dengan memperhatikan fungsi mangrove.
c. Perlindungan pantai dari bahaya pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud yaitu berupa hutan produksi tetap di Kabupaten Gresik yang terlatak di Kecamatan Panceng dan Kecamatan Ujungpangkah. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budidaya tanaman di bawah tegakan hutan.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Arahan pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Gresik yaitu dengan mengembangkan sistem pusat agropolitan pada daerah pertanian. Sistem pusat agropolitan Gresik dibedakan menjadi dua wilayah pengembangan yaitu agropolitan Gresik Utara yang berpusat di Kecamatan Panceng dan Agropolitan Gresik Selatan yang berpusat di Kecamatan Balongpanggang. Sistem pusat agropolitan Gresik meliputi:

a. Kawasan Tanaman Pangan

Sentra produksi tanaman pangan merupakan kawasan-kawasan di kawasan agropolitan yang memiliki sektor unggulan tanaman pangan. Adapun rencana kawasan tanaman pangan diatas antara lain:

- Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya;
- Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi
- Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
- Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices; dan
- Perubahan sawah irigasi teknik menjadi kegiatan budidaya terbangun pada jaringan jalan kolektor dan lokal yang memliki perkembangan sangat tinggi maka peralihan fungsi dibatasi maksimal adalah 100 meter dari as jalan.

b. Kawasan Hortikultura

Produksi tanaman hortikultura merupakan produksi primer di kawasan agropolitan Gresik baik di Gresik utara atapun Gresik selatan. Arahan Pengelolaan Kawasan Pertanian di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- Area lahan sawah beririgasi harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain
- Apabila area terpaksa berubah fungsi maka harus disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan ditambah biaya investasi pembangunan prasarana irigasi di lokasi tersebut
- Pengembangan sawah beririgasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung
- Pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan

3. Kawasan Perikanan

Penggunaan lahan tambak berdasarkan Rencana Tata Ruang Gresik Kota merupakan kawasan perikanan budidaya, terjadi pengurangan luas lahan tambak untuk kebutuhan industri dan permukiman. Luas lahan tambak adalah 15% dari luas total. Arahan pengelolaan kawasan Peruntukan perikanan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

a. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang
b. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya
c. Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri
d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
e. Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan
f. Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

4. Kawasan Pertambangan dan Energi

a. Kawasan Pertabangan Mineral Bukan Logam

Kabupaten Gresik merupakan daerah berpotensi penghasil tambang, terutamanya untuk batuan onyx. Arahan pengelolaan kawasan pertambangan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
2. Pengelolaan kawasan bekas pertambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
3. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas pertambangan

b. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kawasan Jawa Integrated Industrial and Pot Estate (JIIPE) Gresik akan dibangun Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kabupaten Gresik yang terdapat di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura. Adapun arahan pengelolaan kawasan pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
2. Pengelolaan kawasan bekas pertambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
3. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas pertambangan.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Rencana penggunaan lahan industri adalah mengakomodasi rencana EJIIZ dengan asumsi pertumbuhan ekonomi progresif (skenario optimis), yang

menghasilkan total penggunaan lahan di dokumen rencana Gresik Utara, Gresik Selatan, serta Gresik Kota. Selain itu, terdapat pengalokasian industri dengan luas tidak terlalu besar di kecamatan lainnya. Rencana ini mengadopsi dokumen-dokumen rencana yang ada dan mengarahkan kebijakan pengembangan industri ke utara sebesar 92,99 %. Arahan pengelolaan kawasan Peruntukan industry di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis
b. Pengembangan kawasan peruntukan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan
c. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas
d. Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri
e. Pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial
f. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

6. Kawasan Pariwisata

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Gresik ditinjau dari karakteristik dan potensinya dapat dikelompokkan menjadi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Arahan pengelolaan kawasan perutukkan pariwisata di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

a. Melengkapi sarana dan prasarana pariwisata sesuai kebutuhan, rencana pengembangan dan tingkat pelayanan masing-masing kawasan daya tarik wisata;
b. Pengembangan koridor periwisata dengan dukungan promosi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

7. Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Permukiman Perkotaan

Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik memiliki rencana pengembangan yang terdapat di Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujung Pangkah.. Arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada :

- Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru
- Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan
- Penggunaan lahan eksistingnya

b. Permukiman Pedesaan

Untuk pengembangan kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Gresik yang terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecanatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamaran Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Wringinanom. Arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada:

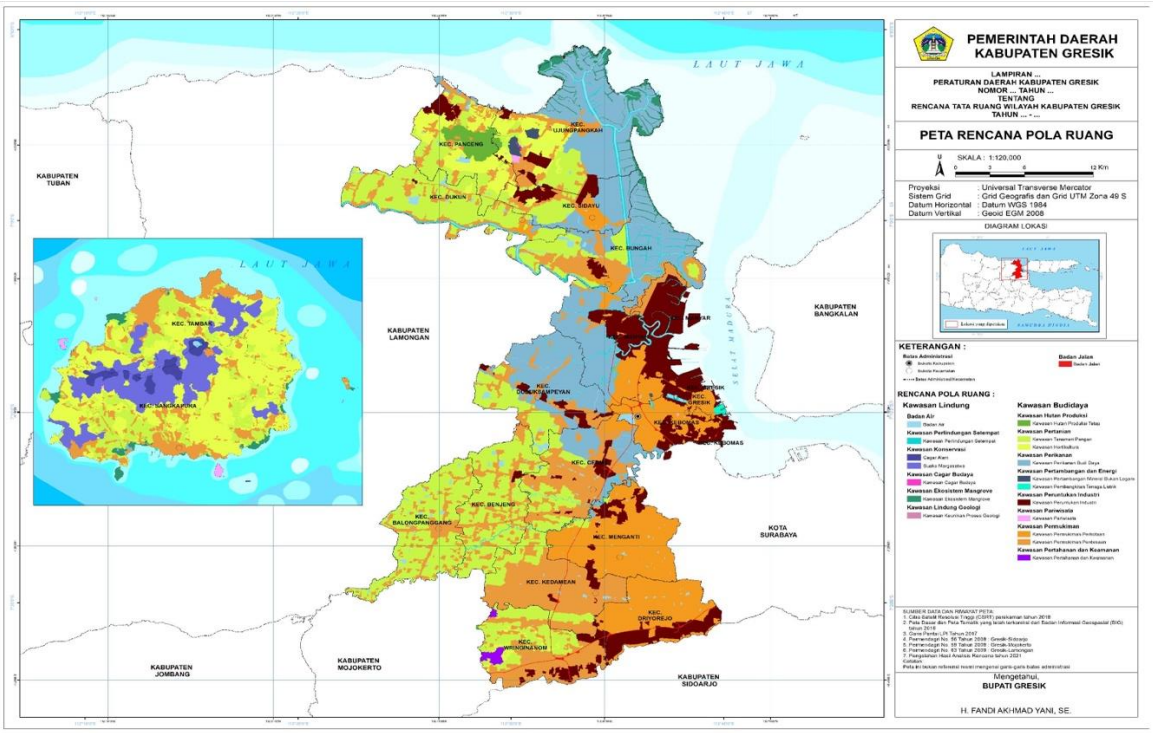
- Memperhatikan keberadaan sawah irigasi sebagai kawasan limitasi pengembangan kawasan
- Memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas
- Memperhatikan kebutuhan perumahan penduduk pedesaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Memperhatikan keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada seperti ibu kota kecamatan sebagai pusat distribusi dan koleksi di seluruh wilayah kecamatan.

8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Gresik adalah berupa kawasan militer yang terdapat di Kecamatan Wringinanaom., yang pengelolaannya tidak berada di bawah kewenangan Kabupaten Gresik.

9. Badan Jalan

Badan jalan yang terdapat di Kabupaten Gresik berada di Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Wringinanom.



Gambar 3. 6 Peta Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Kabupaten Gresik

2.4 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator yang digunakan untuk menyusun pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 241 indikator. Pemerintah juga mengamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan

RPJMD serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan Rencana Perangkat Kerja Daerah diharapkan dapat menyusun KLHS RPJMD agar dapat mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Peraturan tersebut juga diperbarui menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Isu-isu strategis Pembangunan kabupaten Gresik dirumuskan dengan seksama agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, sekaligus dapat menangkap peluang yang membantu pencapaian Pembangunan Kabupaten Gresik periode 2021-2026. Isu Stratgeis Pembangunan Gresik dirumuskan pada konstelasi global, nasional, regional, dan daerah.

- Isu prioritas hasil penjaringan yang ada di Kabupaten Gresik adalah:

1. Kerusakan ekosistem air dan pesisir akibat tingginya beban pencemaran
2. Penurunan kualitas air permukaan dan udara terkait daya tampungnya terhadap bahan pencemar
3. Sebaran kemiskinan dan penurunan kemandirian Masyarakat Perubahan kondisi lingkungan (khususnya daerah pesisir) dan akibat dampak pandemic Covid19
4. Penurunan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya kelompok wanita dan marjinal
5. Ancaman kekeringan karena perubahan iklim dan kondisi eksisting lahan serta pola pemanfaatan lahan
6. Peningkatan volume limbah dan sampah dari industri yang menurunkan kualitas lingkungan
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarana dan prasarana permukiman perkotaan.

- Isu Hasil Kajian Kondisi Lingkungan Eksisting yaitu:

1. Jasa penyediaan air cukup baik.
2. Daya tamping air dan udara sudah memasuki ambang batas
3. Peningkatan kejadian bencana, khususnya banjir karena sebagian besar kawasan merupakan daerah rawa.

- Isu Hasil Evaluasi Capaian TPB

1. Kualitas air dan sanitasi

2. Limbah dan persampahan
3. Peningkatan pengadaan infrastrukrur untuk pengembangan industri
4. Pembangunan sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender

Perumusan Pembangunan daerah dan isu strategis menjadi penting dalam penyelarasan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan sedangkan analisa isu strategis dirumuskan dalam konstelasi global, nasional, regional, dan lokal yang berkaitan erat dengan pembangunan Gresik pada periode 2021-2026.Keselerasanisu strategis dan misi pembangunan dijabarkan sebagaimana berikut:

Konstelasi	No	Isu Srategis	Misi					Nawakarsa
			1	2	3	4	5	
Global	1.1	Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemic Covid19	■	■	■	■	■	Lintas Sektor
	1.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	■	■	■	■	■	Lintas Sektor
	1.3	Revolusi Industri 4.0		■	■			Gresik Mapan, Gema Karya
	1.4	Perubahan Iklim			■	■	■	Gresik Lestari
	1.5	Pengarustamaan Hak Asasi Manusia	■	■	■	■	■	Lintas Sektor
Nasional	2.1	Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024	■	■	■	■	■	Lintas Sektor
	2.2	Peraturan Presidedn Nomor 80 Tahun 2019		■	■			Gresik Mapan
	2.3	Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital		■	■			Gresik Mapan, Gema Karya
	2.4	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		■		■	■	Gresik Mapan, Gresik Cerdas, Gresik Sehat
	2.5	Agenda Pembangunan Jawa Bali		■	■			Gresik Mapan
Jawa Timur	3.1	Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	■	■	■	■	■	Lintas Sektor
	3.2	Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020- 2024		■	■			Gresik Mapan
Gresik	4.1	Tata Kelola Pemerintahan Agile berbasis Smart City dan Satu Data	■					Gresik Akas
	4.2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi	■					Gresik Akas
	4.3	Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif					■	Gresik Seger
	4.4	Daya Saing Daerah	■	■	■	■		Lintas Sektor

Konstelasi	No	Isu Srategis	Misi					Nawakarsa
			1	2	3	4	5	
	4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik						Gresik Mapan
	4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong						Gresik Mapan
	4.7	Kemandirian Desa						Gresik Mapan
	4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan						Gresik Agropolitan
	4.9	Ketenagakerjaan						Gema Karya
	4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan						Gresik Cerdas
	4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan						Gresik Sehati
	4.12	Keadilan dan Kesetaraan Gender						Lintas Sektor
	4.13	Pengarustamaan Hak Anak						Lintas Sektor
	4.14	Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan Gresik						Gresik Barokah
	4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis						Gresik Lestari



BAB III KONDISI UMUM DAERAH

3.1 KONDISI FISIK

Kondisi fisik merupakan karakteristik yang dimiliki oleh suatu wilayah tanpa adanya campur tangan manusia. Karakteristik ini juga menjadi sebuah pembeda bagi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Karakteristik fisik Kabupaten Gresik dibedakan atas kondisi iklim, topografi, geologi, jenis tanah, hidrologi serta penggunaan lahan.

3.1.1 Administrasi dan Geografi

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.193,76 km2. Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112^0-113^0 Bujur Timur dan 7^0-8^0 Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto
Sebelah Barat	: Kabupaten Lamongan
Sebelah Timur	: Selat Madura dan Kota Surabaya

Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan– Mojokerto–Surabaya– Sidoarjo–Lamongan).

Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sangkapura seluas 118,27 km2 atau 9,91 persen dari luas total Kabupaten Gresik. Sedangkan Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Gresik seluas 5,54 km2 atau 0,46 persen dari luas total Kabupaten Gresik. Untuk Peta Administrasi Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Tabel 3. 5 Luas Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021

Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase
Wringinanom	62,62	5,25
Driyorejo	51,29	4,30
Kedamean	65,95	5,52
Menganti	68,73	5,76
Cerme	71,73	6,01
Benjeng	61,26	5,13
Balongpanggang	63,88	5,35
Duduksampeyan	74,29	6,22
Kebomas	30,16	2,53
Gresik	5,54	0,46
Manyar	97,7	8,18
Bungah	79,84	6,69
Sidayu	47,13	3,95
Dukun	59,08	4,95
Panceng	62,77	5,26
Ujungpangkah	94,82	7,94
Sangkapura	118,27	9,91
Tambak	78,70	6,59
Jumlah (ha)	**1.193,76**	**100**

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

3.1.2 Iklim

Kabupaten Gresik sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur, dipengaruhi iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan serta bertemperatur sedang. Suhu udara di Kabupaten Gresik berkisar antara 27° C (suhu terendah) hingga 29° C. Berikut merupakan rincian keadaan iklim tiap bulan di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 6 Kondisi Iklim Kabupaten Gresik

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	27,6	300,9	28	84,5	4,5	3,5
Februari	27,5	280,9	25	84,7	3,7	4
Maret	28,1	124,4	23	83,6	2,8	6,7
April	28,1	136,3	28	83,1	1,7	7,5
Mei	28,3	227,8	27	83,5	2,8	5,4
Juni	27,9	310,1	28	83,2	3,7	5,3
Juli	27,9	144,4	21	80,1	5,7	7,2
Agustus	28,3	22,6	22	77,5	6	8,8
September	28,4	67,4	21	79,3	4,3	7,1
Oktober	27,5	236,5	25	83,9	2	4,6
November	27,5	211,4	27	85,8	1,5	3,8
Desember	27,4	575,9	29	84,3	3,4	4,8

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023

3.1.3 Topografi

Secara topografis, Kabupaten Gresik didominasi oleh dataran rendah. Kabupaten Gresik memiliki ketinggian dengan rata-rata kisaran 0 – 500 mdpl. Kondisi topografi Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua aspek, yaitu ketinggian wilayah dan kemiringan lereng. Berikut merupakan rata-rata ketinggian setiap kecamatan beserta luas wilayahnya di Kabupaten Gresik:

Tabel 3. 7 Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian di Wilayah Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian (mdpl)			
	0-10	**10-20**	**>20**	**Jumlah**
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.259,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00

Kecamatan	Ketinggian (mdpl)			
	0-10	10-20	>20	Jumlah
Jumlah (ha)	**92.843,00**	**18.246,00**	**6.318,00**	**119.513,00**
Persentase (%)	**79,08**	**15,54**	**5,38**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Berikut merupakan distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian wilayahnya:

a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
b. Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% jauh lebih sedikit. Berikut merupakan data luas daerah berdasarkan kemiringan lerengnya:

Tabel 3. 8 Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan di Wilayah Kabupaten Gresik (Ha)

No	Kecamatan	Lereng				Jumlah
		0 – 2%	3 – 15%	16 – 40%	> 40%	
1	Wringinanom	3.968,00	2.286,00	0,00	0,00	6.262,00
2	Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
3	Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
4	Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
5	Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
6	Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
7	Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
8	Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
9	Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
12	Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
13	Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
14	Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
15	Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,0	6.259,00
16	Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
17	Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
18	Tambak	143,00	2.656,94	4.899,81	55,25	7.739,00
	Jumlah (Ha)	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.072,23	119.513,00
	Persentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa mayoritas wilayah di Kabupaten Gresik berada pada kemiringan lereng 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613 Ha atau setara dengan

80,59%, sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas 1.072 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah, Sangkapura, dan Tambak.

3.1.4 Geologi

Selain itu, Kabupaten Gresik tersusun dari beberapa formasi batuan yang masing – masing formasi memiliki komposisi litologi yang beragam. Setiap litologi memiliki peran dalam terjadinya bencana, seperti terjadinya longsor dan banjir. Berikut merupakan formasi batuan Kabupaten Gresik, diantaranya ialah:

a. Kabupaten Gresik bagian utara tersusun dari Formasi Batugamping Mio-Pliosen dengan komposisi litologi batugamping terumbu, batugamping pasiran dengan setempat terdapat litologi napal. Ancaman bencana longsor tinggi tersebar di daerah utara berada pada perbukitan gamping. Longsor terjadi karena aktifitas penambangan pada tebing batugamping. Kekear – kekear yang terbentuk pada batugamping menjadi ancaman serius ketika dibagian bawahnya terganggu oleh aktifitas getaran dari proses penambangan akan ambrol dan menjadi longsor batuan (rock fall).
b. Kabupaten Gresik bagian tengah tersusun dari Formasi Aluvium dengan komposisi litologi penyusun krakal, krikil, pasir lanau dan lempung.
c. Kabupaten Gresik bagian selatan tersususn dari Formasi Sedimen Plio-Plistosen dengan komposisi litologi batugamping, batupasir setempat kaya akan fosil molusca dan foraminifera.
d. Di Pulau Bawean tersususn dari Formasi Gunungapi Plistosen dengan komposisi litologi perselingan lava basaltic, lava andesit, tuff dan breksi gunungpai di beberapa tempat ditemukan zona pelaharan. Tingkat pelapukan tinggi berada di sekitaran pemukiman dengan soil yang tebal. Batuan gunung api yang lapuk akan menjadi pemicu gerakan tanah terutama di zona pelaharan, banyaknya bongkah – bongkah batuan yang ada pada bukit dengan kelerengan yang terjal akan menjadi ancaman gerakan tanah tinggi. Pulau Bawean secara geografis terletak di tengah laut dengan komposisi batuan vulkanik, selain memiliki ancaman longsor tinggi juga berpotensi memiliki ancaman bencana abrasi tinggi karena sifat garis pantainya yang relatif lurus, serupa dengan wilayah Kabupaten Gresik daratan bagian utara.

3.1.5 Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan jenis tanah Aluvial, Grumusol dan Mediteran. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

b. Kabupaten Gresik bagian Utara (meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daera h pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

c. Kabupaten Gresik bagian Tengah (meliputi wilayah; Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas) merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

d. Kabupaten Gresik bagian Selatan (meliputi Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringinanom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

e. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan seba gian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu onyx).

3.1.6 Hidrologi

Kabupaten Gresik merupakan daerah muara sungai Bengawan Solo yang juga dilalui oleh Kali Lamong dan Kali Surabaya. Keadaan permukaan air tanah di Kabupaten Gresik mayoritas relatif dalam, terdapat beberapa daerah yang mempunyai permukaan air tanah yang cenderung dangkal yaitu pada daerah di sekitar rawa/sungai. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut di atas, keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor. Berikut merupakan jumlah mata air dan waduk di Kabupaten Gresik:

Tabel 3. 9 Jumlah Mata Air dan Waduk di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Jumlah Mata Air	Jumlah Waduk
Balongpanggang	11	15
Benjeng	2	4
Bungah	4	11
Cerme	1	11
Driyorejo	2	5
Duduksampeyan	2	5
Dukun	19	9
Kebomas	6	1
Kedamean	4	12
Manyar	6	2
Menganti	1	12
Panceng	9	5
Sidayu	7	5
Ujungpangkah	2	2
Wringinanom	9	1
Total	**85**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Kabupaten Gresik memiliki total sebanyak 85 mata air dan 100 waduk yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Gresik. Kecamatan Dukun memiliki jumlah mata air terbanyak yakni 19 mata air. Kemudian untuk jumlah waduk terbanyak ialah di Kecamatan Balongpanggang sebanyak 15 waduk. Sedangkan Kecamatan Cerme dan Menganti hanya memiliki masing-masing 1 mata air dan Kecamatan Kebomas dan Wringinanom juga memiliki masing-masing 1 waduk.

Tabel 3. 10 Sungai di Kabupaten Gresik

Nama Sungai	Panjang (km)
Bengawan Solo	59,17
Kali Baturata	6,01
Kali Baturaya	3,1
Kali Bedahan	6,38
Kali Benem	30,33
Kali Ceper	6,95
Kali Corong	8,9
Kali Deje	5,49
Kali Gladakgede	3,86
Kali Grunjungan	5,57
Kali Joho	3,93
Kali Kebonagung	4,42
Kali Kope	4,23
Kali Lamongan	63,97
Kali Lancabur	2,22
Kali Laok	5,59
Kali Legundi	2,69
Kali Lewean	4,12
Kali Mantup	14,99
Kali Mas	30,11
Kali Medangan	14,23
Kali Mentani	4,01
Kali Mireng	6,67
Kali Raya	4,16
Kali Tambak	7,05
Kali Wadak	3,91
Kali Wangen	9,76

Tabel 3. 11 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik

Cekungan Air Tanah	Keterangan	Air Tanah Bebas (m3/tahun)	Air Tanah Tertekan (m3/tahun)	Sumber	Luas (Ha)
CAT Brantas	Daerah Lepasan Air	3.647 Juta	175 Juta	Kepres No 26 Tahun 2011	10.462,23
CAT Panceng	Daerah Imbuhan Air Tanah	27 Juta	41 Juta		10.967,81
CAT Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		16.883,05
CAT Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		16.699,34

Cekungan Air Tanah	Keterangan	Air Tanah Bebas (m3/tahun)	Air Tanah Tertekan (m3/tahun)	Sumber	Luas (Ha)
CAT Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		9.451,36

Sumber : DD Pembangunan Waduk Lamong, 2012

Tabel 3. 12 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Palem Watu	Palem Watu	Menganti	40,00
2	Menganti	Menganti	Menganti	13,00
3	Mojotengah	Mojotengah	Menganti	7,00
4	Kepatihan	Kepatihan	Menganti	7,00
5	Randu Padang	Randu Padang	Menganti	7,00
6	Pengalangan	Pengalangan	Menganti	7,00
7	Boteng	Boteng	Menganti	5,00
8	Hendro Sari	Hendro Sari	Menganti	4,00
9	Sido Jangkung	Sido Jangkung	Menganti	3,00
10	Piranti	Piranti	Menganti	3,00
11	Sido Wungu	Sido Wungu	Menganti	2,00
12	Laban	Laban	Menganti	2,00
13	Kadamean I	Kedamean	Kedamean	9,00
14	Ngepung I	Ngepung	Kedamean	8,50
15	Doro (Ngepung II)	Ngepung	Kedamean	8,50
16	Balong Jrambah (Kedamean II)	Kedamean	Kedamean	7,00
17	Belahan Rejo	Belahan Rejo	Kedamean	4,00
18	Slempet	Slempet	Kedamean	4,00
19	Gading Sido Raharjo	Sido Raharjo	Kedamean	4,00
20	Tanjung	Tanjung	Kedamean	3,00
21	Katimoho	Katimoho	Kedamean	3,00
22	Tulung	Tulung	Kedamean	3,00
23	Turi Rejo	Turi Rejo	Kedamean	3,00
24	Mojowuku	Mojowuku	Kedamean	2,50
25	Gunung Dalen	Gowo,Sumput	Driyorejo	5,00
26	Mojosari Rejo	Mojosari Reji	Driyorejo	4,00
27	Wedoro	Radegan Sari, Wedoro Anom	Driyorejo	3,00
28	Anom	Gadung,Wedoro Anom	Driyorejo	3,00
29	Banjaran	Karang Andong, Banjaran	Driyorejo	1,00
30	Sumber Sooko	Sooko	Balong Panggang	2,12
31	Ngasin	Ngasin	Balong Panggang	15,00
32	Pacuh	Pacuh	Balong Panggang	12,00
33	Pinggir	Pinggir	Balong Panggang	9,00
34	Tanah Landeyan	Tanah Landean	Balong Panggang	9,00
35	Brankal	Brankal	Balong Panggang	8,00
36	Doho Agung	Doho Agung	Balong Panggang	5,00
37	Kedung Sumber	Kedung Sumber	Balong Panggang	5,00

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
38	Tenggor	Tenggor	Balong Panggang	4,50
39	Sekar Putih	Sekar Putih	Balong Panggang	4,00
40	Ngampel	Ngampel	Balong Panggang	3,50
41	Kedung Jati	Babatan	Balong Panggang	3,00
42	Mojo Gede	Mojo Gede	Balong Panggang	3,00
43	Babatan	Babatan	Balong Panggang	2,00
44	Bandung Sekaren	Bandung Sekaren	Balong Panggang	2,00
45	Ceme Lor	Ceme Lor	Ceme	4,00
46	Wedani	Wedani	Ceme	5,00
47	Kandangan	Kandangan	Ceme	4,00
48	Betiting	Betiting	Ceme	4,00
49	Cagak Agung	Cagak Agung	Ceme	2,50
50	Iker-iker Geger	Iker-iker Geger	Ceme	2,50
51	Ceme Kidul	Ceme Kidul	Ceme	2,00
52	Kambingan	Kambingan	Ceme	1,00
53	Banjar Anyar	Banjarsari	Ceme	92,00
54	Gedang Kulud	Gedang Kulud	Ceme	52,00
55	Ngabetan	Ngabetan	Ceme	9,00
56	Jogodalu	Jogodalu	Benjeng	29,00
57	Banter	Banter	Benjeng	17,00
58	Pundutrate	Pundutrate	Benjeng	7,00
59	Gluran Ploso	Gluran Ploso	Duduk Sampeyan	3,00
60	Sumengko	Sumengko	Duduk Sampeyan	218,00
61	Kali Ombo	Tambak Rejo	Duduk Sampeyan	64,00
62	Gredek	Gredek	Duduk Sampeyan	8,00
63	Sumari	Sumari	Duduk Sampeyan	7,00
64	Pandaan	Pandaan	Duduk Sampeyan	7,00
65	Kedanyang	Kedanyang	Kebonmas	2,50
66	Sidomukti	Sidomukti	Bungah	1,50
67	Mojopuro Gede	Mojopuro Gede	Bungah	4,00
68	Mojopuro Wetan	Mojopuro Wetan	Bungah	4,00
69	Melirang	Melirang	Bungah	8,00
70	Grogol	Masangan	Bungah	5,50
71	Abar-abir	Abar-abir	Bungah	1,25
72	Raci Wetan	Raci Wetan	Bungah	8,00
73	Pengundan	Pengundan	Bungah	4,00
74	Kemangi	Kemangi	Bungah	2,50
75	Indro Delik	Indro Delik	Bungah	1,50
76	Kisik	Kisik	Bungah	1,50
77	Joho	Joho	Dukun	13,60
78	Lowayu	Lowayu	Dukun	97,00
79	Mentaras	Mentaras & Tebuwung	Dukun	36,00
80	Siraman	Lasem & Sembung Anyar	Sidayu&Dukun	8,00
81	Mojo Petung	Mojo Petung	Dukun	22,00
82	Sambo Gunung	Sambo Gunung	Dukun	6,00
83	Mentara Ds	Mentaras	Dukun	3,00

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
84	Bulangan	Bulangan	Dukun	1,70
85	Wonokerto	Wonokerto	Dukun	1,80
86	Suci	Suci	Manyar	9,00
87	Banjasari	Banjasari	Manyar	4,00
88	Sukorejo	Sukorejo	Sidayu	2,50
89	Wadeng	Wadeng	Sidayu	2,00
90	Raci Kulon	Raci Kulon	Sidayu	1,50
91	Raci	Raci	Sidayu	2,50
92	Rabit	Purwodadi	Sidayu	3,00
93	Petung	Petung	Panceng	4,50
94	Duodo	Duodo	Panceng	2,00
95	Ketanen	Ketanen	Panceng	1,50
96	Wotan	Wotan	Panceng	3,50
97	Delegan	Delegan	Panceng	4,00
98	Ketapang	Ketapang Lor	Ujung Pangkah	4,00
99	Bolo	Bolo	Ujung Pangkah	5,60
100	Gogor	Wonorejo	Balonpanggang	35,50
101	Dl Kali Corong	Gumero	Manyar	347,00
		Pejanan	Manyar	7,00
		Tanggulrejo	Manyar	145,00
		Sumberejo	Manyar	69,00
		Betoyo Kauman	Manyar	313,00
		Betouo Guci	Manyar	88,00
		Sembayat	Manyar	10,00
102	Leideng Delik	Kedung Rukem	Benjeng	7
		ulurejo	Benjeng	44
		Munggugianti	Benjeng	88
		Dermo	Benjeng	56
		Klampok	Benjeng	5
		Bulurejo	Benjeng	30
		Ngembung	Ceme	20
		Ngembung	Ceme	28
		Gurunganyar	Ceme	112
		Morowudi	Ceme	25
		Dadapkuning	Ceme	28
103	Dl Leideng Delik	Dooro	Ceme	32
		Dampaan	Ceme	52
		Ngembung	Ceme	22
104	Dl Krikilan			
	Waduk Mojosari Rejo	Mojosrirejo	Driyorejo	15
	Waduk Sumput	Sumput	Driyorejo	15
105	Dl Leideng Gawok	Sidomukti	Dukun	18
		padang Bandung	Dukun	114
		Mojopuro Gede	Dukun	99
		Mojopuro Wetan	Dukun	99
		Raci Wetan	Dukun	96
		Pegundang	Dukun	7
106	Dl Kali Solo	Morobakung	Manyar	73

No	Nama Waduk	Lokasi		Total Areal (Ha)
		Desa	Kecamatan	
		Pejangganan	Manyar	53
		Gumero	Manyar	98
		Ngampel	Manyar	21
		Sembayat	Manyar	103
		Karangrejo	Manyar	107
		Bedanten	Bungah	15
107	DI Wadak	Bendungan	Duduk Sampeyan	18
		Eadak Lor	Duduk Sampeyan	200
		Wadak Kidul	Duduk Sampeyan	256
		Kemudi	Duduk Sampeyan	170
		Petis Benen	Duduk Sampeyan	279
		Palebon	Duduk Sampeyan	108
		Lowayu	Duduk Sampeyan	82
		Samir Plapen	Duduk Sampeyan	173
		Kawistowindu	Duduk Sampeyan	190
108	DI Leideng Jono	Ceme Lor	Ceme	7
		Jonno	Ceme	96
		Padeg	Ceme	64
		Pandu	Ceme	40
		Sampirplapan	Ceme	76
		Semampir	Ceme	110
		Tambak Beras	Ceme	210
109	DI Balonmojo	Balongmojo	Benjeng	15
110	Waduk Sukodono	Sukodono	Panceng	15
111	Waduk Pantenan	Patenan	Panceng	12

Sumber : DD Pembangunan Waduk Lamong, 2012

Dalam pemanfaatan sumber air yan melimpah bagi Kabupaten Gresik dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data-data yang tertuang pada Penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten Gresik Tahun 2015-2030.

Tabel 3. 13 Sistem Pelayanan Jaringan Perpipaan

No	Wilayah Pelayanan	Dilayani Sistem
1	Gresik Kota	IPA Legundi, Sumur GKB, Air Curah dari Segoromadu, Gadung Surabaya dan PT Dewata Bangun Tirta
2	Gresik Tengah	IPA Legundi, dan Air Curah PT Drupadi Agung Lestari
3	Gresik Selatan	Air Curah PT Drupadi Agung Lestari dan IPA Perumnas

Sumber : PDAM Kabupaten Gresik,2014

Tabel 3. 14 Sumber Pelayanan Jaringan Peripaan

No	IPA	Lokasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku yang diambil (debit)
1	Sumur GKB III	Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas	Sumur Dalam	28 L/detik
2	IPA Legundi	Desa Legundi	Kali Surabaya	600 L/detik
3	IPA Perumnas	Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo	Kali Surabaya	100 L/detik
4	Air Curah - Segoromandu	Segoromadu	Air Curah PDAM Surabaya	40 L/detik
5	Air Curah -Gadung	Desa Gadung	Air Curah PDAM Surabaya	5 L/detik
6	Air Curah - PT Dewata	Desa Legundi	Kali Surabaya	210 L/detik
7	Air Curah - PT Drupadi	Desa Krikilan	Kali Surabaya	400 L/detik

Sumber : PDAM Kabupaten Gresik,2014

Tabel 3. 15 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan PDAM 5 Tahun Terakhir

No	Jenis Pelanggan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sosial Umum	60	65	67	67	64
2	Sosial Khusus	766	797	804	835	867
3	Rumah Tangga	59.927	65.533	64.729	66.754	70.287
4	Instansi Pemerintah	132	137	138	149	153
5	Niaga Kecil	1.455	1.612	2.129	2.390	2.653
6	Niaga Besar	94	104	120	123	135
7	Industri Kecil	51	60	72	94	94
8	Industri Besar	143	150	155	164	173
9	Khusus	1	1	1	1	1
	Jumlah	60.629	65.459	68.215	70.577	74.427

Sumber : Company Profile PDAM Kab. Gresik, 2014

3.1.7 Kondisi Sumberdaya Alam

A. Pertanian

Kabupaten Gresik memiliki sektor pertanian yang produksi kooditas unggulanya terdiri dari tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman holtikultura. Berdasarkan produksi pertanian Kabupaten Gresik tertinggi pada tahun 2018 dengan perolehan 599.561,94 ton. Produksi padi sawah di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dimana pada tahun sebelumnya memiliki jumlah 549.765 ton dan pada tahun 2016 menjadi 556.875 ton pada tahun 2017 menjadi 594.410 ton, sehingga realisasi presentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian tahun ke tahun adalah 20%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2%.

Tabel 3. 16 Produksi Pertanian (ton)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Padi	403.906	422.343	433.410	428.755	433.213,30

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jagung	127.218	111.684	136.599	158.136	130.120,30
Kedelai	1.326	1.195	927	279,9	81,8
Kacang Tanah	2.925	2.161	2.151	1.582	1.311
Kacang Hijau	3.026	4.329	3.432	1.854,50	9.378
Ubi Kayu	10.426	11.287	3.547	8.775	224
Ubi Jalar	938	2.035	7.152	178,5	519
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	549.765	556.875	594.410	599.561,94	574.847,40

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka Tahun 2016-2020

Dalam sektor pertanian pasti mengupayakan segala sesuatu demi menunjang peningkatan produktivitas dan diverfikasi tanaman demi memenuhi kebutuhan pangan. Data produksi pertanian dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Gresik meliputi padi, jagung, kacang kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Dalam luas panen rata-rata dari produksi tanaman pangan paling tinggi pada bulan februari dengan rata-rata produksi sebesar 68,75 kw/ha dengan luas panen 16.619,6 Ha.

Tabel 3. 17 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Gresik Tahun 2018

Bulan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (ton)
Januari	1.014	68,63	6.963
Februari	16.619,60	68,75	114.260
Maret	13.043,10	66,5	86.737
April	2.602,30	66,55	17.318
Mei	7.856,20	63,4	49.808
Juni	10.200,20	62,6	63.853
Juli	5.387,10	62,55	33.696
Agustus	3.822,90	62,3	23.817
September	2.807,10	64,5	18.106
Oktober	2.776,90	64,65	18.508
November	1.558,70	67,8	10.568
Desember	274,9	67,8	1.864

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2019

Tabel 3. 18 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Padi Ladang di Kabupaten Gresik Tahun 2016

Bulan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (ton)
Januari	25	57	142,5
Februari	75	56	420
Maret	111	57,8	641,6
April	99	57	564,3
Mei	15	56,5	84,8
Juni	120	56	672
Juli	-	-	-
Agustus	18	56	100,8
September	-	-	-
Oktober	-	-	-

Bulan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (ton)
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	463	56,72	2.625,90

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2019

Tabel 3. 19 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Jagung di Kabupaten Gresik Tahun 2018

Bulan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (ton)
Januari	434,11	n.a	n.a
Februari	3.670,00	n.a	n.a
Maret	3.326,00	n.a	n.a
April	1.105,96	n.a	n.a
Mei	290	n.a	n.a
Juni	2. 751	n.a	n.a
Juli	1.969,24	n.a	n.a
Agustus	1.643,36	n.a	n.a
September	5.033,48	n.a	n.a
Oktober	3.408	n.a	n.a
November	266,8	n.a	n.a
Desember	66,8	n.a	n.a

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2019

Dalam tanaman holtikultura dan buah-buahan di Kabupaten Gresik didominasi dengan jenis tanaman cabai dengan produksinya sebesar 267.072 kuintal dengan luas panen 1.987 Ha.

Tabel 3. 20 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Tahun 2019

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)
Bawang Merah	21	1.417
Bayam	109	4.098
Cabai Besar	421	44.163
Cabai Rawit	1.566	222.909
Cabai	1.987	267.072
Kacang Panjang	59	5.216
Kangkung	135	6.626
Ketimun	24	3.515
Sawi	48	2.246
Terung	84	17.444
Tomat	62	11.070
Blewah	10	1.700
Melon	3	301
Semangka	11	2.180
Total	4.540	589.957

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 3. 21 Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2019

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal
Jahe	31.048	105.801
Laos	47	129
Lempuyang	-	-
Kencur	32	65
Kunyit	7.532.055	21.304.213
Temuireng	36	68
Temukunci	42	96
Temulawak	1.400.007	5.450.013
Jumlah	8.963.267	26.860.385

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 3. 22 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Tahun 2019

Jenis Tanaman	Produksi (ton)
Alpukat	327
Belimbing	5.399
Durian	1.273
Jambu Air	4.578
Jambu Biji	5.150
Jeruk Besar	288
Jeruk Siam	4.830
Jeruk	5.118
Mangga	379.227
Manggis	52
Melinjo	1
Nangka	5.733
Nanas	1
Pepaya	8.486
Pisang	195.135
Rambutan	7.170
Salak	8
Sawo	2.461
Sirsak	744
Sukun	1.170
Total	627.151

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 3. 23 Sentra Komoditas Unggulan Tanaman Holtikultura di Kabupaten Gresik

No	Jenis Komoditas Unggulan	Sentra Produksi	Rencana Hasil Industri
1	Mangga	Kecamatan Panceng	Sirup, manisan, puree mangga, selesai, jeli, sari buah, asinan, dodol, dll.
		Kecamatan Ujungpangkah	
2	Kangkung/Biji Kangkung	Kecamatan Balongpanggang	Bahan kosmetik dan bahan pembuatan obat.
		Kecamatan Benjeng	
		Kecamatan Kedamean	

Sumber: Pemaduserasian Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030

B. Hortikultura

Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri di Jawa Timur. Namun, tak membuat sektor pertanian tergerus. Sebaliknya, kabupaten ini selalu surplus pangan setiap tahun. Hal ini dikarenakan kabijakan Bupati Gresik yang mengedepankan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi daerah. Kegiatan pertanian di Kabupaten Gresik telah menjadi budaya masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Pertumbuhan penduduk dan besarnya kebutuhan bahan baku selain tanaman pangan di Kabupaten Gresik menumbuhkan subsektor hortikultura. Subsektor ini mencaku tanaman sayuran maupun buah-buahan yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat baik sehari-hari maupun untuk keperluan lain. Produksi tanaman hortikultura tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik.

1. Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Musiman

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik 2023, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah produksi bayam, cabai besar, tomat, kangkung, blewah, petsai, dan kembang kol. Namun, untuk bayam, ketimun, semangka, petsai/sawi, bawang merah dan melon mengalami penurunan produksi.

Tabel 3. 24 Luas Panen Tanaman Sayuran Buah Semusim di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022

No	Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim (ha) 2019-2022			
		2019	2020	2021	2022
1	Cabai Rawit	1.566	1.636	1.707	2.113
2	Cabai Besar	421	601	476	566
3	Terung	84	56	30	35
4	Tomat	62	40	26	35
5	Kangkung	135	137	156	158
6	Kacang Panjang	59	44	26	16
7	Bayam	109	85	72	84
8	Ketimun	24	7	4	-
9	Semangka	11	11	46	2
10	Petsai/Sawi	48	67	60	117
11	Blewah	10	3	-	-
12	Bawang Merah	21	21	9	16
13	Melon	3	6	2	2

Sumber: Statistik Holtikultura Kabupaten Gresik, 2019

Tabel 3. 25 Produksi Tanaman Sayur dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022

No	Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim (ha) 2019-2022			
		2019	2020	2021	2022
1	Cabai Rawit	222.909	152.592	229.568	208.456
2	Cabai Besar	44.163	21.770	49.240	49.240
3	Terung	17.444	20.246	2.791	2.947
4	Tomat	11.070	11.283	1.523	2.179
5	Kangkung	6.626	7.084	6.461	8.182
6	Kacang Panjang	5.216	6.361	3.172	565
7	Bayam	4.098	3.638	3.831	4.223
8	Ketimun	3.515	1.395	131	-
9	Semangka	2.180	2.051	1.240	204
10	Petsai/Sawi	2.246	3.344	3.220	4.427
11	Blewah	1.700	240	-	-
12	Bawang Merah	1.417	1.652	658	1056
13	Melon	301	1.040	82	120

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023

Berdasarkan tabel dapat diketahui luas panen dan produksi tanaman sayur dan buah-buahan semusim di Kabupaten Gresik. Cabai rawit merupakan tanaman hortikultura dengan jumlah panen terbanyak, diikuti dengan produksi cabai besar. Sedangkan untuk produksi yang paling rendah yaitu buah melon.

2. Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Tahunan

Selain sayuran, tanaman holtikultura yang tumbuh di Kabupaten Gresik adalah buah-buahan dan sayuran tahunan. Di Kabupaten Gresik, mangga merupakan buah yang paling banyak diproduksi selama periode 2019-2022. Kemudian buah terbanyak kedua adalah pisang serta yang ketiga adalah rambutan. Mangga jenis arumanis asal Jawa Timur diekspor ke Malaysia dan Singapura adalah jenis kualitas khusus Gresik. Berikut adalah tanaman buah-buahan dan sayuran tahuna di Kabupaten Gresik produktivitas 2019-2022.

Tabel 3. 26 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman (Kwintal) Tahun 2019-2022

No	Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan	Produksi (Ku)			
		2019	2020	2021	2022
1	Alpukat	327	1.142	1.253	1.272
2	Belimbing	5.399	4.557	6.896	7.074
3	Durian	1.273	6.032	7.053	6.405
4	Jambu Air	4.578	5.425	9.389	9.337
5	Jambu Biji	5.150	4.881	15.497	16.957
6	Jeruk Besar	288	197	177	172
7	Jeruk Siam/Keprok	4.830	4.623	4.600	4.800
8	Mangga	379.227	675.921	871.346	786.539
9	Manggis	52	182	621	580
10	Markisa	-	12	-	-

11	Nangka	1	-	17.192	17.853
12	Nenas	5.733	7.221	-	-
13	Pepaya	1	1	20.091	26.752
14	Pisang	8.486	8.262	311.148	384.351
15	Rambutan	195.135	218.975	11.535	11.337
16	Salak	7.170	12.477	-	-
17	Sawo	8	-	9.872	9.956
18	Sirsak	2.461	3.629	5.652	6.032
19	Sukun	744	944	7.342	6.694
20	Melinjo	1.170	3.565	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023

Dapat diketahui total produksi dari masing-masing buah-buahan dan sayuran tahunan. Tanaman pisang, alpukat, belimbing, jambu air, jambur biji, jeruk siam dan juga salak mengalami peningkatan jumlah produksi dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan 2022. Berbanding terbalik dengan produksi rambutan yang mengalami penurunan sangat tajam dari tahun 2020 ke tahun 2021.

3. Tanaman Biofarmaka

Tanaman biofarmaka merupakan jenis tanaman yang memiliki manfaat obat, selain itu tanaman biofarmaka dikenal masyarakat kita sebagai pelengkap berbagai masakan nusantara. Contoh tanaman biofarmaka yang dikumpulkan dalam statistic pertanian ini terdiri dari 15 jenis yaitu dlingo/dringo, jaha, kapulaga, keji beling, kencur, kunyit, laos/lengkuas, lempuyang, lidah buaya, mahkota dewa, mengkudu/pace, sambiloto, temuireng, temukunci, dan temulawak. Dari 15 jenis biofarmaka tersebut, untuk Kabupaten Gresik ada tiga komoditas dengan produksi tertinggi yaitu kunyit, temulawak, dan jahe. Berikut adalah luas panen tanaman biofarmaka menurut jenis tanaman tahun 2019-2022.

Tabel 3. 27 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (m^2) Tahun 2019-2022

Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022
Jahe	31.048	10.019	18.465	151.382
Laos	47	13	152	132
Lempuyang	-	20.000	490.000	200.000
Kencur	32	11	158	113
Kunyit	7.532.055	6.200.013	3.589.424	6.484.954
Lidah Buaya	-	5	-	-
Mahkota Dewa	-	10	10	10
Mengkudu	-	10	30	30
Temuireng	36	7	5.752	2.960
Temukunci	42	14	2.429	1.564
Temulawak	1.400.007	4.000.002	8.084.197	1.428.212

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023

Tabel 3. 28 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (kg) Tahun 2019-2022

Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022
Jahe	105.801	81.270	106.570	800.977
Laos	129	50	250	199
Lempuyang	-	70.000	1.200.000	650.000
Kencur	65	21	130	239
Kunyit	21.304.213	21.880.663	23.118.596	24.817.192
Lidah Buaya	-	38	7	-
Mahkota Dewa	-	470	120	150
Mengkudu	-	185	830	1.100
Temuireng	68	15	5.184	3.682
Temukunci	96	29	2.139	2.582
Temulawak	5.450.013	5.550.004	11.946.045	9.389.172

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023

Komoditas terbanyak yaitu kunyit dengan luas panen sebesar 7.532.055 m2 pada tahun 2019 dan produksi tanaman sebanyak 21.304.213 kg. Tanaman kunyit di Kabupaten Gresik tersebar di empat kecamatan yakni Kecamatan Driyorejo sekaligus menjadi produsen terbesar,diikuti degan Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Wringinanom.

4. Tanaman Hias

Selain buah-buahan, tanaman hias juga merupakan jenis tanaman hortikultura yang cocok dibudidayakan di Kabupaten Gresik, terutama untuk adenium. Bunga adenium atau kamboja jepang, bunga melati dan tanaman aglaonema merupakan tiga komoditas tanaman hias yang ditanam di Kabupaten Gresik. Sama dengan tanaman sayuran semusim, beberapa wilayah yang merupakan sentra sayuran semusim juga memiliki produksi tanaman hias yang melimpah. Selain itu permintaan yang tinggi menjadi faktor pendorong banyaknya petani membudidayakan tanaman hias tersebut. Berikut adalah luas panen dan produksi tanaman hias di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019.

Tabel 3. 29 Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019

Jenis Tanaman Hias	Satuan Produksi	Luas Panen (m^2)		Produksi	
		2018	2019	2018	2019
Adenium	Pohon	461	9.751	1.240	62.186
Aglaonema	Pohon	0	1.127	0	3.053
Melati	kg	337	7.775	319	24.960

Sumber: Statistik Hortikultura Kabupaten Gresik, 2023

Menunjukkan produksi tanaman hias di Kabupaten Gresik yakni adenium (kamboja jepang), aglaonema dan melati. Persebaran wilayah budidaya tanaman hias di Kabupaten Gresik lebih terbatas dibandingkan komoditas hortikultura seperti sayur, bah dan biofarmaka. Tahun 2019 Adenium (Kamboja Jepang) dan melati tersebar di dua wilayah yaitu Kecamatan Driyorejo dan Kedamean. Untuk Adenium ada 88 persen di Kecamatan

Driyorejo dengan produksi sebanyak 55 ribu pohon. Sama halnya dengan tanaman hias melati ada 77 persen di Kecamatan Driyorejo dengan 19,2 ribu kilogram. Sedangkan tanaman aglaonema hanya ada di Kecamatan Wringinanom sebanyak 3,05 ribu pohon.

C. Perkebunan

Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Kabupaten Gresik memiliki areal perkebunan kelapa, kopi, tebu dan tembakau. Luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Gresik mencapai 3.609,60 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik dan menghasilkan sebesar 5.049,77ton selama tahun 2022. Berikut adalah luas areal tanaman perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman (Ha) pada tahun 2021-2022.

Tabel 3. 30 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) Tahun 2021-2022

Kecamatan	Kopi		Kelapa	
	2021	2022	2021	2022
Wringinanom			32,29	32,22
Driyorejo			1,02	0,96
Kedamean			58,68	58,48
Menganti			1,50	1,48
Cerme			14,46	14,38
Benjeng			42,12	42,07
Balongpanggang			16,69	16,15
Duduksampeyan			4,34	4,30
Kebomas			0,98	0,92
Gresik			0,98	0,96
Manyar			1,42	1,39
Bungah			60,55	60,36
Sidayu			101,33	101,03
Dukun	1,89	1,89	13,00	12,95
Panceng			27,64	27,58
Ujungpangkah			37,60	27,57
Sangkapura	8,61	8,61	1.420,23	1.420,21
Tambak	0,01	0,01	1.776,76	1.776,58

Kecamatan	Tebu		Tembakau	
	2021	2022	2021	2022
Wringinanom	870,00	826,31	3,00	8,00
Driyorejo	256,00	266,42	-	-
Kedamean	499,60	430,61	-	-
Menganti	22,00	36,28	-	-
Cerme	5,00	36,28	-	1,00
Benjeng	67,00	93,32	2,00	3,00
Balongpanggang	90,00	121,80	12,00	27,00

Duduksampeyan	-	-	2,00	3,00
Kebomas	15,00	13,00	-	-
Gresik	-	-	-	-
Manyar	-	-	-	-
Bungah	-	-	1,00	3,00
Sidayu	-	1,52	-	-
Dukun	-	1,31	2,00	2,50
Panceng	153,50	152,69	3,00	12,50
Ujungpangkah	30,00	30,00	-	-
Sangkapura			-	-
Tambak			-	-

Tabel 3. 31 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton), Tahun 2021-2022

Kecamatan	Tebu		Kelapa	
	2021	2022	2021	2022
Wringinanom	70.706,00	66.495,24	1,67	1,73
Driyorejo	20.376,00	21.043,50	1,12	1,02
Kedamean	39.916,00	35,040,70	9,18	9,31
Menganti	1.650,00	2.754,14	1,39	1,31
Cerme	375,00	2.829,84	5,59	5,38
Benjeng	5.025,00	7.059,63	2,19	2,17
Balongpanggang	6.885,00	9.335,20	13,56	13,15
Duduksampeyan	-	-	1,73	1,73
Kebomas	1.125,00	975,00	0,95	0,90
Gresik	-	-	1,06	1,02
Manyar	-	-	1,43	1,36
Bungah	-	-	13,26	13,47
Sidayu	-	148,20	16,35	17,07
Dukun	-	98,25	7,25	7,01
Panceng	11.512,50	11.775,75	6,26	6,44
Ujungpangkah	2.250,00	2.250,00	23,44	23,52
Sangkapura	-	-	2.243,98	2.243,50
Tambak	-	-	2.700,16	2.699,69

Kecamatan	Tembakau	
	2021	2022
Wringinanom	45,0	120,00
Driyorejo	-	-
Kedamean	-	-
Menganti	-	-
Cerme	-	15,00
Benjeng	30,00	45,00
Balongpanggang	180,00	450,00
Duduksampeyan	30,00	45,00
Kebomas	-	-
Gresik	-	-
Manyar	-	-
Bungah	15,00	45,00

Sidayu	-	-
Dukun	30,00	37,50
Panceng	45,00	187,5
Ujungpangkah	-	-
Sangkapura	-	-
Tambak	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023

D. Perikanan

Kabupaten gresik bagian utara (Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, dan Manyar) merupakan wilayah daerah pegunungan Kapur Utara dengan kualitas tanah yang relatif kurang subur. Sebagian dari daerah tersebut merupakan daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di Pantau Utara Kabupaten Gresik. Hal tersebut dapat meningkatkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Gresik. Pada Kabupaten Gresik baguan tengah (Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas) adalah kawasan dengan tanah yang subur dan terdapat sungai-sungai kecil sehingga cocok untuk perikanan. Sedangkan pada wilayah kepulauan Kabupaten Gresik yang berada di Pulau Bawean dan pulau kecil disekitarnya (Kecamatan Sangkapura dan Tambak) nerupakan dataran rendah yang cukup subur dan memiliki potensi perikanan karena berada di wilayah kepulauan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi besar dalam bidang perikanan.

Kawasan perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Gresik yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 mencapai 21,678 hektar meskipun pada kondisi eksisting mencapai 31, 09 hektar. Produksi ikan di Kabupaten Gresik didapatkan dari penangkapan ikan di laut serta budidaya, antara lain budidaya tambak payau, tambak tawar, serta perairan umum. Produksi penangkapan ikan di laut pada tahun 2022 sebanyak 10.793.753 kg. Budidaya tambak payau sebanyak 68.664.948 kg, budidaya tambak tawar sebanyak 66.267.607 kg, serta budidaya perairan umum sebanyak 16.766.346 kg. Luas tutupan terumbu karang yang ada di Kabupaten Gresik mencapai 1.344 Ha dengan rincian kondisi 37,65% baik dan 40,52% sedang.

E. Industri

Sektor Industri Kabupaten Gresik merupakan salah satu industri utama yang berasa di Jawa Timur. Kabupaten Gresik sering kali melahrikan industri industri besar salah satu contohnya adalah pabrik semen (Semen Gresik) pertama dan merupakan terbesar di

Indonesia. Kabupaten Gresik merupakan penyangga utama dan termasuk kedalam kawasan Gerbangkertosusila.

Kawasan Industri Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal tersebut juga disebabkan karena adanya pembangunan pelabuhan internasional di Kecamatan Manyar. Pada tahun 2016 Kabupaten Gresik memiliki 6.495 industri atau yang terdaftar sebanyak 194 unit industri. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya kenaikan pertumbuhan industri dapat mancapai angka 373%. Dalam hal kenaikan tersebut maka berdampak pada investasi juga.

Tabel 3. 32 Jumlah Industri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten GresikTahun 2011-2016

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Industri	Industri	6.293	6.369	6.451	6.525	6.653	6.495
Tanda Daftar Industri (TDI)	Unit	61	45	25	30	41	194

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2017

Pada tahun 2020 mengalami kondisi Covid 19 dimana hal tersebut mempengaruhi kegiatan dalam industrinya. Kedepannya nanti dibutuhkan adanya pengembangan industri sebagai salah satu isu pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Gresik. Berikut merupakan beberapa daftar perusahaan industri di Kabupaten Gresik :

Tabel 3. 33 Industri di Kawasan Industri KIG

No	Nama Perusahaan	Klasifikasi Industri
1	CV. Mahera	Pergudangan
2	PT. Gas Negara	Industri transmisi dan distribusi gas bumi
3	PT. Petrojaya	Industri pengolahan
4	Eterindo Nusa Graha. PT	Kimia dasar
5	PT. Anugrah Inti Gemanusa	Kimia dasar
6	PT. Kayu Merapi Internusa	Industri hasil hutan dan perkebunan
7	PT. Karisma Joel	Pergudangan
8	PT. Anugrah Cipta Abadi	Kimia dasar
9	PT. Bumumulia Indah Lestari	Kimia dasar
10	PT. Kelola Mina Laut	Pergudangan
11	PT. Madsumaya Indo Seafood	Pergudangan
12	PT. Petrokimia Kayaku	Kimia dasar
13	PT Ispat Panca Putr	Industri Dasar Logam
14	PT. Indopipe	Kimia dasar
15	PT. Matesu Golfy Abadi	Industri gas
16	Cv Kudata Mas	Makanan dan Minuman
17	PT. Ecomec Resouces Indonesia	Industri logam
18	PT. Purna Buana Yudha	Industri gas
19	PT. Primergy Solution	Permesinan dan alat mesin pertanian
20	PT. Bumimulia Indah Lestari	Kimia dasar
21	PT. Sanacitta Husada	Makanan dan Minuman

No	Nama Perusahaan	Klasifikasi Industri
22	PT. GD Indonesia	Industri permesin dan alat pertanian
23	PT. Indumanis	Makanan dan Minuman
24	PT. Buana Tirta Utama	Makanan dan Minuman
25	PT. Sido Mulyo Selaras	Transportasi
26	PT. Komotech Indonesia	Transportasi
27	PT. Hansa Pratama	Industri permesin dan alat pertanian
28	PT. Hansa Pratama	Industri pengolahan
29	PT. Rollent Indonesia	Industri pengolahan
30	PT. Samator Inti Peroksida	Industri gas
31	PT. Cipta Mortar Utama	Galian non logam
32	PT. Energi Baharu Lestari	Permesinan dan alat mesin pertanian
33	PT. Pelita Mandiri	Industri hasil hutan dan perkebunan
34	PT. Indo Gypsum Perkasa	Galian non logam
35	PT. Petrokimia Kayaku	Kimia hulu
36	PT. Petrosida Gresik	Kimia hulu
37	PT. Air Product Indonesia	Industri gas
38	PT. HM Sampoerna	Tembakau
39	PT. Kencana Zavira	Kimia hulu
40	PT. Jatim Sinar Sentosa	Industri pengolahan
41	PT. Graha Sarana	Kimia hulu
42	PT. Gotrans Logistics International	Elektronik dan telematika
43	PT. KINO Indonesia	Industri kimia hilir
44	PT. DSI Underground	Industri permesin dan alat pertanian
45	PT. Harvestar Flour Mills	Makanan dan Minuman
46	PT. Bina Karya Prima	Kimia hilir
47	PT. Blue Gas Indonesia	Industri gas

Sumber : KIG, 2019

F. Pariwisata

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata alam berupa gunung kapur dan wisata laut. Berdasarkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, rencana peruntukan penggunaan lahan kawasan pariwisata sebesar 82,85 Ha, sedangkan eksisting penggunaan lahan kawasan pariwisata di Kabupaten Gresik adalah 7,92 Ha. Secara umum, bentang lahan yang ada di Kabupaten Gresik yang dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan ecotourism terbagi menjadi lahan berpotensi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan jasa ekosistem fungsi budaya untuk rekreasi, total luasan keseluruhan luasan budaya rekreasi Kabupaten Gresik teridentifikasi sebagai wilayah kelas sangat tinggi. Hal ini menandakan Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata fungsi rekreasi.

Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berada di kepulauan Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang termasuk daerah Kecamatan Tambak. Kecamatan Sangkapura memiliki potensi pariwisata. Selain itu, adanya perbukitan karst dan wilayah yang terletak di pesisir

pantau menjadi salah satu penyebab besarnya potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Sangkapura. Selain Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Gresik bagian utara termasuk ke dalam daerah pegunungan kapur yang cocok untuk pariwisata.

3.1.8 Kondisi Kebencanaan

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya. Kabupaten Gresik merupakan wilayah daratan rendah dengan ketinggian antara 2-12 meter di atas permukaan laut. Sungai Kali Lamong merupakan sungai utama yang mengalir melewati Kabupaten Gresik. Sungai Kali Lamong merupakan anak dari Sungai Bengawan Solo dengan luas DAS kurang lebih 720 km2 dan panjang alur sungai kurang lebih 103 km serta memiliki 7 anak sungai. Pada musim penghujan, sungai Kali Lamong tidak mampu menampung semua debit yang masuk, akibatnya terjadi banjir di sekitar Kali Lamong. Penyebab utamanya yaitu curah hujan yang tinggi namun tidak diimbangi oleh kapasitas sungai. Oleh karena itu, banyak permukiman yang terkena lupasan dari Sungai Kali Lamong sehingga mengalami kebanjiran. Pada tahun 2022 terjadi 84 kejadian banjir di Kabupaten Gresik yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain banjir, bencana lain yang terjadi di Kabupaten Gresik yaitu longsor, rob, putting beliung, kebakaran, dan kekeringan. Total jumlah bencana yang ada di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 adalah sebanyak 168 kejadian. Berikut adalah rincian kejadian bencana di Kabupaten Gresik tahun 2014-2022.

Tabel 3. 34 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2022

Jenis Bencana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banjir	3	2	31	16	10		34	87	84
Longsor	1			2				7	7
Rob			3						
Puting Beliung				15	3		4	34	24
Kebakaran				215	131		174	61	
Kekeringan								53	53
Total	**4**	**2**	**34**	**248**	**144**	**-**	**212**	**242**	**168**

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2021, BPBD dan Kabupaten Gresik Dalam Angka 2023

Berikut adalah kerugian yang dialami oleh Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 35 Data Kerugian Akibat Bencana Banjir Tahun 2021

Tempat Terdampak	Satuan	Waktu Kejadian									
		07-Jan	08-Jan	10-Jan	11-Jan	15-Jan	25-Jan	18-Feb	13-Mar	15-Mar	17-Mar
Kecamatan		1	3	2	1	1	2	2	4	4	1
Desa		6	18	3	14	3	6	6	27	42	7

Rumah	Unit	6.200	250	-	406	105	30	-	265	5.838	200
Jalan Desa	Meter	11.600	5.350	-	4.450	1.050	1.150	1.190	1.000	36.580	635
JPD	Meter	600	3.175	700	250	-	100	200	800	23.295	200
Jalan Raya	Meter	400	400	600	8.950	-	-	-	1.450	3.210	-
Sawah	Ha	-	564	-	281	-	80	85	1.361	2.007	-
Tambak	Ha	-	1.085	-	6	200	-	-	-	1.050	575
Fasum	Unit	-	15	-	-	-	3	3	27	38	-
Lain-lain		-	-	-	5		-	-	-	-	-

Lanjutan **Tabel 3.10**

24-Mar	**25-Mar**	**26-Mar**	**28-Mar**	**01-Apr**	**02-Apr**	**10-Apr**	**12-Apr**	**25-Apr**	**17-Jun**	**22-Jun**	**28 okt**
1	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1
1	6	6	5	5	8	1	1	1	2	1	1
12	240	-	-	1	292	-	-	-	-	-	5
400	6.000	1.200	570	1.200	6.000	-	-	-	300	50	-
-	1.400	500	450	950	1.800	800	800	900	-	-	400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30	25	55	95	240	-	-	-	7	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

03-Nov	**04-Nov**	**14-Nov**	**16-Nov**	**23-Nov**	**26-Nov**	**28-Nov**	**30-Nov**	**09-Des**	**12-Des**	**16-Des**
2	5	4	1	1	2	1	2	1	2	2
6	29	16	2	1	2	1	2	4	2	5
1	5.217	1.099	-	-	-	2	-	-	25	75
1.300	29.900	12.275	-	300	500	302	1.000	150	300	900
150	11.010	3.220	1.100	-	-	300	1.200	-	550	550
-	2.200	200	-	-	-	-	-	-	250	-
62	1.377	1.104	-	-	35	45	-	25	55	60
-	146	69	-	-	-	45	-	-	20	0
1	50	18	-	-	-	-	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPBD, 2023

Tabel 3. 36 Data Kerugian Akibat Tanah Longsor Banjir Tahun 2021

Tempat Terdampak	**Satuan**	**Waktu Kejadian/Dampak**			
		11-Jan	28-Okt	28 Nov	09 Des
Kecamatan		1	1	1	1
Desa		2	1	2	1
Rumah	Unit	-	1	3	1
Jalan Desa	Meter	45	100	150	5

JPD	Meter	-	-	-	-
Jalan Raya	Meter	-	-	-	-
Sawah	Ha	-	-	-	-
Tambak	Ha	-	-	-	-
Fasum	Unit	-	-	1	-
Lain-lain		-	-	-	-

Sumber: BPBD, 2023

Tabel 3. 37 Data Kerugian Akibat Angin Kencang Banjir Tahun 2021

Tempat Terdampak	Satuan	Waktu Kejadian/Dampak								
		18-Mar	03-Apr	17 okt	23-Okt	05-Des	09-Des	26-Des	27-Des	31-Des
Kecamatan		1	1	2	1	1	4	3	1	1
Desa		1	1	3	1	1	4	11	1	1
Rumah	Unit	-	-	26	-	1	-	3	3	-
Jalan Desa	Meter	-	-	-	-					-
JPD	Meter	-	-	-	-					-
Jalan Raya	Meter	-	-	-	-					-
Sawah	Ha	-	-	-	-					-
Tambak	Ha	-	-	-	-					-
Fasum	Unit	-	-	-	-					-
Lain-lain		1	1	6	1	-	5	17	-	1

Sumber: BPBD, 2023

3.1.9 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan upaya untuk mengatur penggunaan lahan secara rasional agar tercipta keteraturan dalam penggunaan tanah berdasarkan pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah demi sistem yang adil untuk masyarakat. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peran penatagunaan lahan memiliki peran yang amat penting, tidak hanya sebagai ruang fungsional sebagai tempat berlangsungnya segala macam kegiatan namun juga sebagai wujud teritori atau wilayah yang berdaulat secara politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang terdapat dua pembagian kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui surat Keputusan Menteri yang berwenang di bidang kehutanan dengan fokus utama untuk melindungi pelestarian lingkungan hidup yang terletak di wilayah kabupaten dan kawasan – kawasan lindung. Menurut ketentuan peraturan perundang – undangan, pengelolaan kawasan lindung merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Kondisi persentase penanganan pada kawasan lindung saat ini sebesar 2,19%, dengan adanya pembuatan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan ditargetkan persentase penanganan pada kawasan lindung meningkat menjadi 13,15% pada lima tahun mendatang sesuai dengan penjabaran pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Tabel 3. 38 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Gresik

No	Jenis Peruntukkan Ruang	Perda RTRW Kab.Gresik (ha)	Eksisting Penguunaan Lahan (ha)
	Kawasan Lindung		
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9.426,12	9.426,11
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5.828,62	1.804,18
3	Kawasan Terumbu Karang	5.387,00	5.387,00
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3.918,85	3.918,85
5	Kawasan Resapan Air	1.252,58	1.040,61
6	Kawasan Cagar Alam	661,38	661,38
	Jumlah	26.450,92	7.401,90

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

b. Kawaasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya buatan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa luasan penggunaan kawasan budidaya di Kabupaten Gresik lebih banyak dibandingkan dengan kawasan lindung dari data yang terdapat pada Perda RTRW Kabupaten Gresik maupun eksisting penggunaan lahan. Adapun selisih perbandingan luasan kawasan lingdung dan kawasan budidaya yang terdapat di dalam Perda RTRW Kabupaten Gresik dengan eksisting penggunaan lahan

Tabel 3. 39 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Kabupaten Gresik

No	Jenis Peruntukkan Ruang	Perda RTRW Kab.Gresik (ha)	Eksisting Penguunaan Lahan (ha)
	Kawasan Budidaya		
1	Kawasan Permukiman	2.,063,55	15.331,14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23.372,70	39.572,98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	2.678,36	31.092,21
4	Kawasan Hortikultura	16.885,48	191,79
5	Kawasan Industri	12.448,03	10.108,57
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6.644,01	2.797,65
7	Kawasan Perkebunan	2.573,67	10.761,86
8	Kawasan Hutan Produksi	1.034,56	6.544,01
9	Kawasan Pertambangan	817,25	952,34
10	Kawasan Pariwisata	82,85	7,92
11	Kawasan Bandar Udara	68,44	72,82
12	Kawasan Pelabuhan	1.257,69	366,89

	Jumlah	112.909,02	117.792,25

Sumber : Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

3.2 KONDISI 6 MUATAN KLHS

Terdapat 6 muatan yang berada dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Kinerja Jasa Ekosistem, Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan, Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, serta yang terakhir adalah Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.

3.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

A. Daya Dukung Penyediaan Air

Secara umum, Kabupaten Gresik memiliki status yang belum terlampaui atau surplus air dalam jumlah yang signifikan yaitu 15 kecamatan dan tiga kecamatan dalam status terlampaui atau defisit; dengan jumlah ketersediaan 1.179,22 juta m3/tahun dan jumlah penduduk menurut sistem grid mencapai 1.298.184 jiwa, kebutuhannya mencapai 733,28 juta m3/tahun. Maka dari itu, Kabupaten Gresik surplus ketersediaan air bersih sebesar 445,94 juta m3/tahun. Berikut merupakan tabel status daya dukung air sistem grid Kabupaten Gresik.

No	Kecamatan	Penduduk Sistem Grid 30' X 30' (jiwa)	Ketersediaan Total (juta m3/th)	Kebutuhan Total (juta m3/th)	Nilai Status Air	Status Air
1	Gresik	82.448	3,35	7,33	0,46	Terlampaui
2	Driyorejo	102.646	48,94	52,46	0,93	Terlampaui
3	Wringinanom	73.297	55,12	58,98	0,93	Terlampaui
4	Kedamean	63.887	68,44	66,24	1,03	Belum Terlampaui
5	Menganti	124.468	76,25	72,45	1,05	Belum Terlampaui
6	Balongpangpang	58.015	70,98	66,06	1,07	Belum Terlampaui
7	Benjeng	66.546	68,64	60,29	1,14	Belum Terlampaui
8	Kebomas	109.392	27,91	18,01	1,55	Belum Terlampaui
9	Panceng	52.599	71,65	43,97	1,63	Belum Terlampaui
10	Dukun	67.127	64,32	37,64	1,71	Belum Terlampaui
11	Sangkapura	56.053	101,06	54	1,87	Belum Terlampaui
12	Sidayu	43.533	43,95	22,67	1,94	Belum Terlampaui
13	Tambak	32.519	59,01	29,86	1,98	Belum Terlampaui
14	Cerme	80.032	83,95	37,79	2,22	Belum Terlampaui
15	Ujungpangkah	51.89	86,73	39	2,22	Belum Terlampaui
16	Bungah	68.342	68,82	28,82	2,39	Belum Terlampaui
17	Manyar	114.893	80,35	17,46	4,6	Belum Terlampaui
18	Duduksampeyan	50.497	99,73	20,24	4,93	Belum Terlampaui
Kab. Gresik		1.298.184	1,179,22	733,28	1,61	Belum Terlampaui

Gambar 3. 7 Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Gresik

Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Gresik 2021

Terdapat 15 kecamatan yang memiliki status ketersediaan air terlampaui atau surplus yang menandakan bahwa ketersediaan air mampu memenuhi kebutuhan air yang

layak digunakan oleh penduduk. Kecamatan dengan Nilai Status Air terbesar adalah Kecamatan Duduksampeyan sebesar 4,93, Kecamatan Manyar sebesar 4,60, dan Kecamatan Bungah sebesar 2,39. Kecamatan Bungah memiliki ketersediaan air yang bersumber dari lahan basah yaitu sawah cenderung tinggi yang memberi dampak terhadap kesanggkupan Kecamatan Bungah untuk memnuhi kebutuhan air penduduk. Hal ini dibuktikan dengan produksi beras terbesar di Kabupaten Gresik yang berada pada Kecamatan Bungah menurut BPS (2019) yaitu sebesar 128.235.000 kg/tahun. Kecamatan Manyar memiliki status air terbesar karena Kecamatan Manyar memilili volume ketersediaan air Wilayah DAS Bengawan Solo Hilir sebesar 744 juta m3/tahun. Sedangkan Kecamatan Duduksampeyan memiliki ketersediaan air Wilayah DAS Bengawan Solo Hilir sebesar 495 juta m3/tahun yang tergolong besar untuk ketersediaan air penduduk yang tidak terlalu padat.

Daerah dengan status air terlampaui atau defisit terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Wringinanom. Kecamatan Gresik memiliki status air dengan nilai terendah yaitu 0,46. Hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk Kecamatan Gresik terbesar di Kabupaten Gresik yang mengakibatkan alih fungsi lahan ke permukiman semakin pesat dan menyebabkan area resapan air menipis dan kebutuhan akan air bersih penduduk semakin tinggi yang berdampak terhadap nilai status. Sedangkan status air rendah Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom disebabkan oleh volume ketersediaan air Wilayah DAS yang rendah baik di Wilayah DAS Bengawan Solo Hilir maupun di Wilayah DAS Brantas Hilir.

B. Pangan

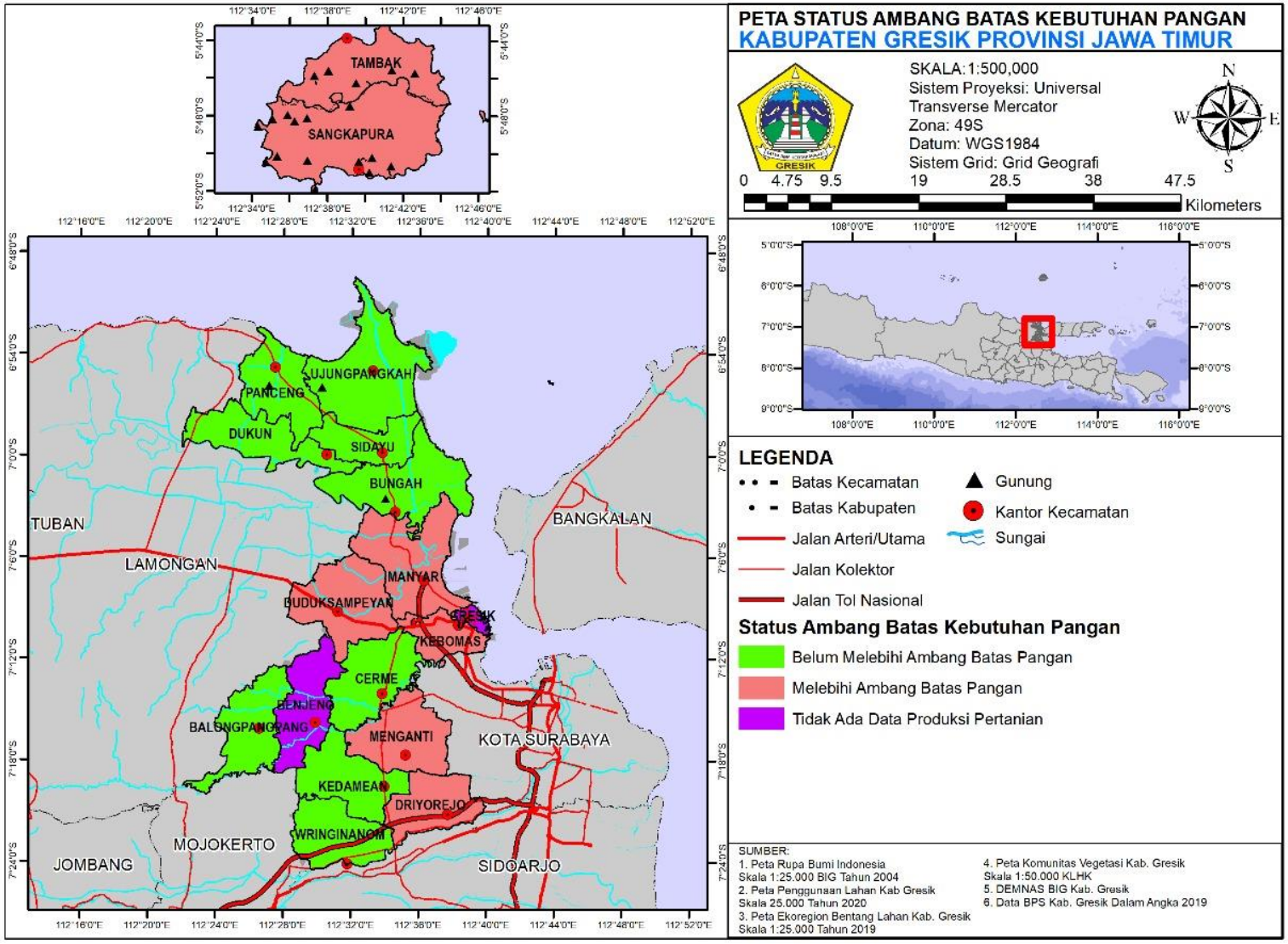
Secara umum, kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan Kabupaten Gresik tergolong sedang. Total kebutuhan pangan Kabupaten Gresik adalah 236.918,58 ton/tahun. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2019 adalah 1.298.184 jiwa dan kebutuhan pangan beras perkapita Kabupaten Gresik mencapai lebih dari 236.918,58 ton/tahun dengan kondisi ekosistem penyedia bahan pangan sawah yang luas. Kabupaten Gresik memiliki ketersediaan pangan beras mencapai lebih dari 424.981 ton/tahun. Daya dukung pangan di Kabupaten Gresik bernilai 1,79 atau > 1 yang menandakan Kabupaten Gresik surplus bahan pangan dengan kata lain Kabupaten Gresik mampu mendukung kebutuhan penduduknya atas bahan pangan. Berikut merupakan tabel perbandingan

jumlah penduduk dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan beras yang ada di Kabupaten Gresik.

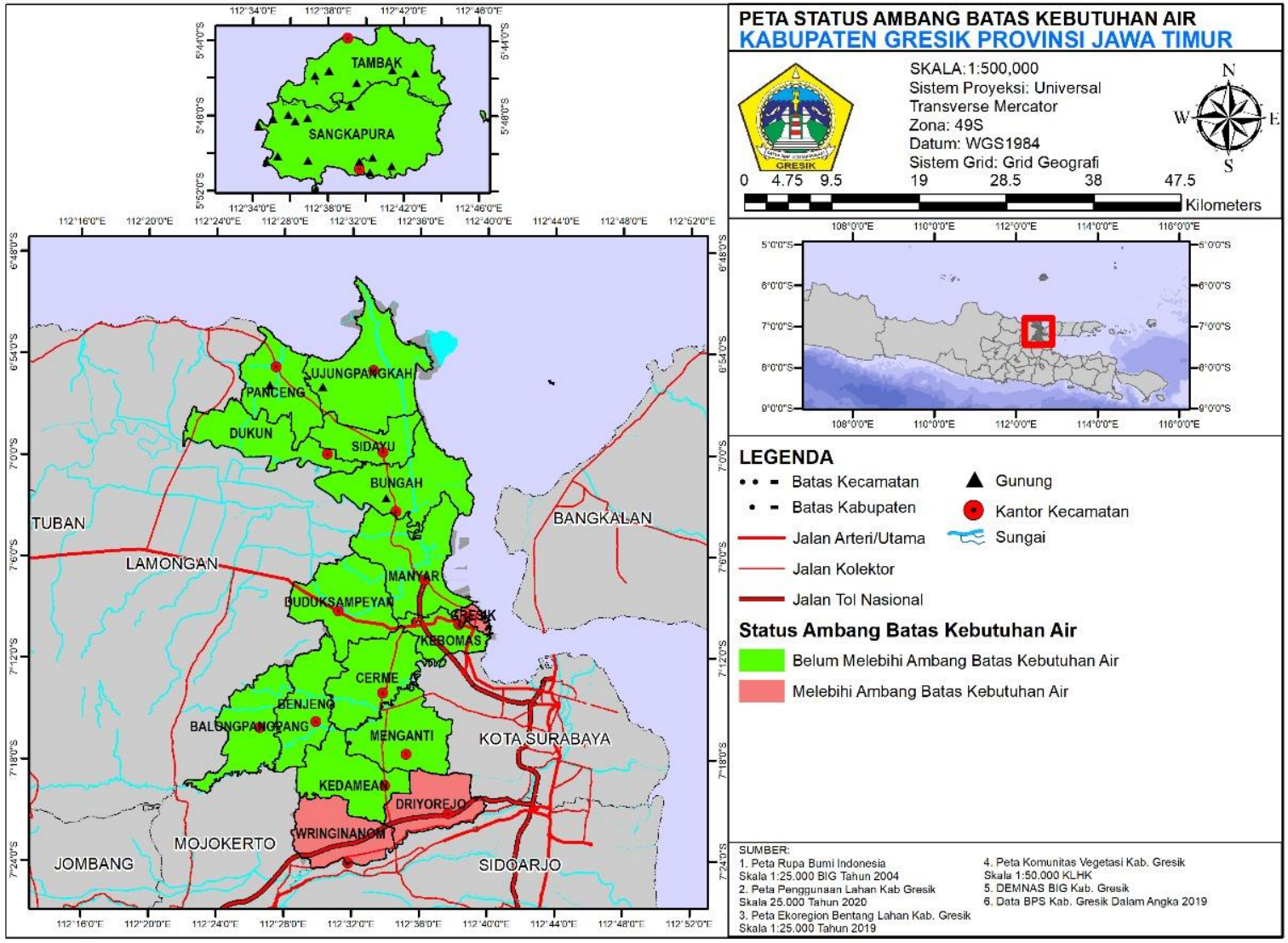
No	Kecamatan	Daya Dukung Bahan Pangan Berbasis Jasa Ekosistem Dengan Sistem Grid (30" X 30")				
		Jumlah Penduduk BPS 2019 (jiwa)	Produksi Beras BPS 2019 (kg/th)	Ketersediaan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th	Kebutuhan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th	Nilai Status Daya Dukung Pangan
1	Benjeng	66.546	-	-	12.144.645	0,00
2	Gresik	82.448	-	-	15.046.760	0,00
3	Manyar	114.893	2.184.000	2.184.000	20.967.972	0,10
4	Kebomas	109.392	4.719.000	4.719.000	19.964.040	0,24
5	Menganti	124.468	18.135.000	18.135.000	22.715.410	0,80
6	Driyorejo	102.646	15.550.000	15.550.000	18.732.895	0,83
7	Tambak	32.519	5.140.000	5.140.000	5.934.718	0,87
8	Duduksampeyan	50.497	8.312.000	8.312.000	9.215.702	0,90
9	Sangkapura	56.053	9.235.000	9.235.000	10.229.672	0,90
10	Panceng	52.599	11.013.000	11.013.000	9.599.317	1,15
11	Wringinanom	73.297	20.108.000	20.108.000	13.376.702	1,50
12	Ujungpangkah	51.890	14.402.000	14.402.000	9.469.925	1,52
13	Balongpangpang	58.015	32.826.000	32.826.000	10.587.738	3,10
14	Dukun	67.127	38.911.000	38.911.000	12.250.678	3,18
15	Kedamean	63.887	38.358.000	38.358.000	11.659.377	3,29
16	Sidayu	43.533	26.442.000	26.442.000	7.944.772	3,33
17	Cerme	80.032	51.411.000	51.411.000	14.605.840	3,52
18	Bungah	68.342	128.235.000	128.235.000	12.472.415	10,28
Kabupaten Gresik		1.298.184	424.981.000	424.981.000	236.918.580	1,79

Gambar 3. 8 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Gresik

Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Gresik 2021



Gambar 4. 1 Peta D3TLH Pangan



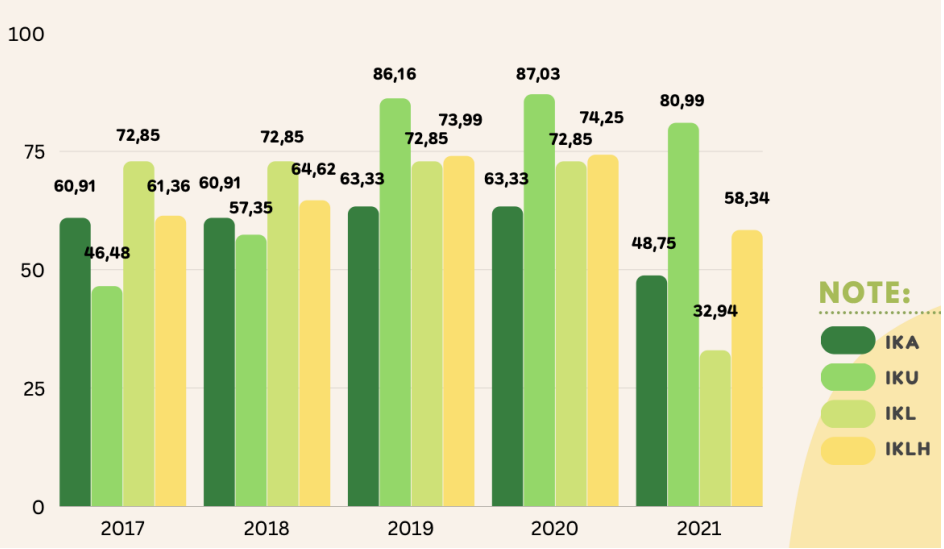
Gambar 4. 2 Peta D3TLH Air

3.2.2 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan

A. Pencemaran Udara

Indeks kualitas udara di Kabupaten Gresik menunjukkan angka yang tinggi, sehingga perlu diambil tindakan untuk menjaga kualitas udara yang ada, upaya pengendalian pencemaran udara serta mempertahankan tutupan lahan yang mempengaruhi kualitas udara.

Indeks kualitas air memiliki indeks paling rendah, sehingga perlu di waspadai kondisi beban pencemar pada badan air permukaan Gresik



Gambar 3. 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021
Sumber: DIKPLHD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Isu utama pada aspek kualitas udara yang di Kabupaten Gresik yaitu pencemaran udara di Kawasan Industri. Penyebab penurunan kualitas udara di Kabupaten Gresik yaitu peningkatan jumlah penduduk, banyak industri, berkembangnya perekonomian. Selain itu, penyebab penurunan kualitas udara bahkan pencemaran udara yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kegiatan industri, dan pembakaran sampah. Berikut adalah hasil pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Gresik.

Lokasi	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)	HC (µg/Nm3)	PM10 (µg/Nm3)	PM2,5 (µg/Nm3)	TSP (µg/Nm3)	Pb (µg/Nm3)
Kecamatan Manyar	34.6	128.8	10.4	19.4	13.6	19.7	4.9	73.9	0.54
Kecamatan Driyorejo	60.4	4571.4	18.3	18.2	14.6	3.86	0.86	3	0.018
Kecamatan Cerme	38	1146	12	9	6.53	13	9	23	0.02
Kecamatan Kedamean	29.5	2683	20.4	9.3	27.3	15.9	4.8	47.9	0.019
Kecamatan Wringinanom	8.28	1150	6.5	6.8	6.8	7.8	2.2	22.1	0.042
Kecamatan Panceng	8.28	1150	6.5	26.3	27.3	4.7	1.4	1.4	0.014
Kecamatan Balongpanggang	36.1	1000	29.6	24.2	8	-	-	58.1	0.015
Kecamatan Benjeng	8.28	1150	6.5	6.8	27.3	(Kosong)	(Kosong)	(Kosong)	(Kosong)
Kecamatan Bungah	10.624	185	9.258	48.3	(Kosong)	(Kosong)	(Kosong)	24.57	0.01
Kecamatan Duduksampeyan	22.7	1150	6.5	7.69	27.3	8.9	2.7	26.7	0.018
Kecamatan Dukun									
Kecamatan Gresik	8.28	1150	18.5	6.8	27.3	(Kosong)	(Kosong)	0.0023	0.000016
Kecamatan Kebomas	20	547.2	20.1	12	4.27	11.1	6	19.27	0.01
Kecamatan Menganti	29.3	6072.3	15.6	19.4	11.2	0	0	24.4	0.047
Kecamatan Ujung Pangkah	8.28	1150	6.5	6.8	27.3	6.03	1.8	18.1	0.002
Kecamatan Sidayu	30	1968	12	13	6.53	(Kosong)	(Kosong)	18	0.02

Gambar 3. 10 Kualitas Udara Kabupaten Gresik Tahun 2022

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan Gambar Kecamatan Diyorejo tercatat memiliki konsentrasi polutan CO tertinggi dengan nilai mencapai 4571 µg/Nm3. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gresik didapatkan melalui perhitungan Indeks Pencemaran Udara melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang mewakili dampak pencemaran udara dari kawasan transportasi, perumahan, perkantoran, dan industri dengan periode pengukuran maksimal 2 kali per tahun. Polutan udara yang diukur dalam ISPU adalah sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (O3), partikulat (PM10), dan partikulat hasil (PM2.5). Perhitungan IKU Kabupaten Gresik didapatkan melalui 9 data terverifikasi pada 4 titik pantau dengan menggunakan metode passive sampler. Dari hasil pemantauan, didapatkan bahwa IKU Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 81,03 dan termasuk ke dalam kategori baik.

B. Pencemaran Air

Kecamatan Sangkapura memiliki 24 mata air yang dapat dimanfaatkan, sementara beberapa kecamatan lain seperti Gresik dan Kebomas tidak memiliki mata air sama sekali. Sebaliknya, kecamatan Kedamean hanya memiliki 9 sumur dan kecamatan Driyorejo bahkan

tidak memiliki sumur sama sekali. Kecamatan Bungah memiliki akses terbanyak terhadap air bersih melalui sumur dengan jumlah 444 sumur, sementara kecamatan Menganti memiliki akses terbanyak melalui sumber air ledeng/PAM dengan jumlah 295 sumber. Adanya perbedaan akses air bersih di setiap kecamatan menjadi salah satu faktor penyebab ketidakmerataan dalam penanganan masalah air di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.49. Jumlah Sumber Air di Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan (Liter)/DAM
1	Gresik	0	26	24	0	0	30
2	Kebomas	0	27	37	0	5	72
3	Manyar	0	52	33	0	0	77
4	Duduksampeyan	0	16	7	0	1	32
5	Cerme	0	53	58	0	15	49
6	Benjeng	1	35	63	0	0	41
7	Balongpanggang	0	21	49	0	0	57
8	Menganti	0	35	295	0	0	131
9	Kedamean	0	9	34	0	0	58
10	Driyorejo	0	18	0	0	0	76
11	Wringinanom	0	11	22	0	0	51
12	Bungah	0	17	444	0	0	53
13	Sidayu	0	11	1	0	0	44
14	Dukun	0	20	67	0	0	41
15	Ujungpangkah	0	8	71	0	0	38
16	Panceng	0	17	9	0	0	19
17	Sangkapura	24	0	101	0	0	9
18	Tambak	1	12	41	0	0	4

Sumber: Laporan D3TLH tahun 2021 dan IKPLHD Tahun 2022

Tabel 2.53. Pemantauan Kualitas Air 2022

No	Nama Sungai	Lokasi/Koordinat	Kelas Air	Kategori
1	Afvour Wringinanom	S:07°23'05.1" E:112°34'32.5"	Kelas IV	Syarat jumlah minimal sungai
2	Kali Mireng	S:07°04'38.5 E:112°34'22.4	Kelas III	Syarat jumlah minimal sungai
3	Tambangan Ds. Bambe (Kali Surabaya)	S:7°21'05.0" E:112°39'44"	Kelas III	Titik Sampling Limbah non point source
4	Bengawan Solo (Jembatan Kalirejo-Karangbinangun)	S:7°00'44.0" E:112°30'18.0"	Kelas III	Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama, Lokasi tengah sungai bengawan solo di Gresik
5	ABA Jembatan Sembayat Bungah (B. Solo)	S:07°03'45.90" E:112°34'35.20"	Kelas III	Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama Lokasi tengah sungai bengawan solo di Gresik
6	ABA Jembatan Ds. Kali Rejo Kec. Dukun (B. Solo)	S:7°00'41.0" E:112°30'18.0"	Kelas III	Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama Lokasi tengah sungai bengawan solo di Gresik
7	Kali Lamong Desa Boboh	S:07°15'02.5" E:112°33'43.7"	Kelas III	Syarat jumlah minimal sungai
8	Kali Lamong Desa Segoromadu, Kec. Kebomas	S:07°11'41.1" E:112°38'45.1"	Kelas IV	Titik Sampling Pencemaran Point Source
9	Afvour Kali Tengah Ds. Bambe, Kec. Driyorejo	S:7°21'04" E:112°39'44"	Kelas IV	Titik Sampling Pencemaran Point Source
10	Afvour Kali Tengah Ds. Tenaru, Kec. Driyorejo	S:7°21'35" E:112°37'39"	Kelas IV	Titik Sampling Pencemaran Point Source
11	Kali Manyar	S:07°06'43,2" E:112°35'37.0"	Kelas IV	Titik Sampling Pencemaran Non Point Source
12	Jembatan Sembayat, Kabupaten Gresik (Pusat)	S:-7.062287° E:112.576396°	Pusat	Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama
13	Stasiun ONLIMO, Kecamatan Wringinanom	S:-7.393877° E:112.567596°	Pusat	Syarat jumlah minimal sungai, Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama

Berdasarkan Laporan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Gresik Tahun 2021, dilakukan pengukuran kualitas air di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Gresik. Laporan Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Gresik tahun 2021 menyajikan hasil analisis keadaan kualitas air sungai berdasarkan, perhitungan indeks pencemaran air (Indeks Kualitas Air). Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui sungai-sungai di Kabupaten Gresik hanya beberapa sungai saja yang memenuhi baku mutu air, sedangkan sungai tercemar ringan dan sungai tercemar sedang masih banyak terdapat di wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Gresik.

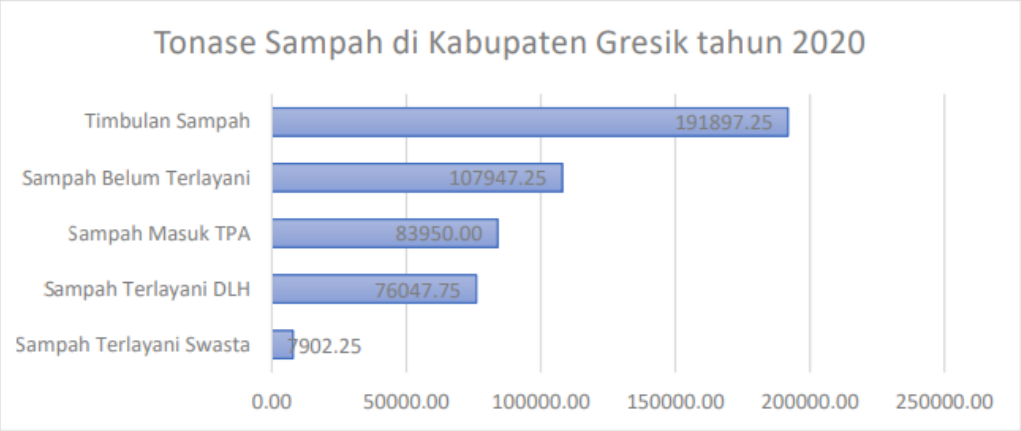
Analisis parameter kualitas sungai yang dilakukan yaitu BOD, COD, DO, TSS, Deteren, Nitrat, Nitrit, dan Minyak Lemak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengandaian Pencemaran Air menunjukkan bahwa air sungai di Kabupaten Gresik masuk di kelas I, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum dan/atau untuk keperluan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaanya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik nilai DO tertinggi pada Pemantauan Pertama dan Pemantauan Kedua secara berturut -turut adalah Kali Towo yaitu 5 mg/L dan Kali Roomo yaitu 4,8 mg/L. Sedangkan nilai DO terendah pada Pemantauan pertama dan kedua yaitu Avour Kepatihan sebesar 3 mg/L dan 2,3 mg/L. Selain itu, ambang batas kualitas air sungai parameter BOD5 adalah 6 mg/L dengan sampel Avour Wringin Anom, Kali Towo, Kali Roomo dan Waduk Bunder. Berdasakan hasil perhitungan, didapatkan bahwa Sungai Avour Waringin Anom, Bengawan Solo, Waduk Bunder, Kali Mering, dan Kali Corong rata-rata memenuhi ambang batas dibawah 50 mg/L yang ditinjau dari nilai COD. Namun, terdapat beberapa sungai yang melebihi ambang batas yang diisyaratkan seperti Saluran Pelabuhan sebesar 82,3 mg/L, Kali Tebalo sebesar 53,88 mg/L dan Kali Tutup sebesar 107,1 mg/L.

C. Persampahan

Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.925 Ha. Sampah yang dihasilkan Kabupaten Gresik berasal dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan, dan sampah perikanan. Besar sampah yang belum terlayani jumlahnya mencapai 107.947.25 ton atau

sebesar 56,25% dari keseluruhan timbulan sampah. Sedangkan yang sudah terlayani oleh DLH dan swasta mencapai 43,75%.



Gambar 3. 11 Tonase Pelayanan Persampahan Kabupaten Gresik Tahun 2020
Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Gresik, 2020

Sebagai salah satu kota besar yang berada di Jawa Timur, timbulan sampah yang ada di Kabupaten Gresik dapat menjadi sebuah masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada setiap kecamatan. Berikut merupakan perkiraan jumlah timbulan sampah Kabupaten Gresik berdasarkan kecamatan.

Tabel 3. 40 Timbulan Sampah Kabupaten Gresik Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)
DUKUN	65.598	19,88
BALONGPANGGANG	56.151	17,01
PANCENG	52.165	15,81
BENJENG	65.165	19,74
DUDUKSAPEYAN	49.270	14,93
WRINGINANOM	71.912	21,79
UJUNGPANGKAH	51.474	15,60
KEDAMEAN	62.761	19,02
SIDAYU	43.359	13,14
MANYAR	116.428	35,28
CERME	80.352	24,35
BUNGAH	67.694	20,51
MENGANTI	125.323	37,97
KEBOMAS	110.682	33,54
DRIYOREJO	102.839	31,16
GRESIK	79.939	24,22
SANGKAPURA	53.376	16,17
TAMBAK	**30.375**	9,20
-	**1.284.863,00**	**389,31**

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Gresik, 2022

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022, terdapat beberapa masalah isu sampah yang mungkin terjadi di Kabupaten Gresik berupa kesadaran masyarakat, tidak adanya tempat pembuangan sampah yang tepat, kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dampah

lingkungan dan kesehatan, serta tidak adanya insentif bagi masyarakat untuk memilah sampah.

Pada saat ini, pengelolaan sampah masih terkonsentrasi di wilayah Kota Gresik dan proses pengelolaan sampah di pedesaan di luar Kota Gresik masih perlu didorong untuk dapat terlaksana secara mandiri oleh masyarakat. Sampah yang ada di Kabupaten Gresik didominasi oleh sampah organik, maka dari itu, pengomposan merupakan salah satu sarana alternatif yang dapat dikembangkan yang dapat dilakukan di TPS-TPS pada wilayah yang dapat memanfaatkan hasil pengomposan terutama untuk pertanian.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang optimal adalah pembangunan TPA Ngipik dengan menggunakan sistem controlled landfill. Pemantauan kualitas lindi dan kualitas udara ambient secara berkala sesuai dengan ketentuan pada dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan pada TPA Ngipik.

Terdapat 18 TPS 3R yang ada di Kabupaten Gresik meliputi Balongpanggang, Benjeng, Bungah, Cerme, Driyorejo, Duduksampeyan, Dukun, Gresik, Kebomas, Kedamean, Manyar, Menganti, Panceng, Sangkapura, Sidayu, Tambak, Ujung Pangkah, Wringinanom. Selain itu, Kabupaten Gresik memiliki 5 Tempat Penampungan Sampah Sementara Terpadu (TPST) yaitu Belahanrejo, JIIPE, Ngipik, Panceng, dan Sangkapura.

Kabupaten Gresik memiliki 364 Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Gresik meliputi:

Tabel 3. 41 TPS di Kabupaten Gresik

No	Nama	Kecamatan
1	TPS Abar-Abir	Bungah
2	TPS Alfamidi Yosowilangun	Manyar
3	TPS Alon-Alon Sidayu	Sidayu
4	TPS Ambeng-Ambeng	Duduksampeyan
5	TPS Babakbawo	Dukun
6	TPS Babaksari	Dukun
7	TPS Babatan	Balongpanggang
8	TPS Balikterus	Sangkapura
9	TPS Balongmojo	Benjeng
10	TPS Balongpanggang	Balongpanggang
11	TPS Balongtanjung	Benjeng
12	TPS Bambe	Driyorejo
13	TPS Bandungsekaran	Balongpanggang
14	TPS Bangeran	Dukun
15	TPS Banjaragung	Balongpanggang

No	Nama	Kecamatan
16	TPS Banjaran	Driyorejo
17	TPS Banjarsari	Manyar
18	TPS Banjarsari (Betiring)	Cerme
19	TPS Banter	Benjeng
20	TPS Banyu Urip	Ujung Pangkah
21	TPS Banyutengah	Panceng
22	TPS Banyuurip	Kedamean
23	TPS Banyuwangi	Manyar
24	TPS Baron	Dukun
25	TPS Bedanten	Bungah
26	TPS Belahanrejo	Kedamean
27	TPS Bendungan	Duduksampeyan
28	TPS Bengkelor	Benjeng
29	TPS Benjeng Pasar	Benjeng
30	TPS Beton	Menganti
31	TPS Betoyokauman	Manyar
32	TPS Betoyokauman	Manyar
33	TPS Boboh	Menganti
34	TPS Bolo	Ujung Pangkah
35	TPS Boteng	Menganti
36	TPS Brangkal	Balongpanggang
37	TPS Bringkang	Menganti
38	TPS Brotonegoro 1	Manyar
39	TPS Brotonegoro II	Manyar
40	TPS Bulangan	Dukun
41	TPS Bulangkulon	Benjeng
42	TPS Bululajang	Sangkapura
43	TPS Bungah	Bungah
44	TPS Cagakagung	Cerme
45	TPS Campurejo	Panceng
46	TPS Cangaan	Ujung Pangkah
47	TPS Cangkir	Driyorejo
48	TPS Cerme Kidul	Cerme
49	TPS Cermen Lerek	Kedamean
50	TPS Dadapkuning	Cerme
51	TPS Dahan Kidul (Dahanrejo)	Kebomas
52	TPS Dalegan	Panceng
53	TPS Dampaan	Cerme
54	TPS Dapet	Balongpanggang
55	TPS Daun	Sangkapura
56	TPS Dekatagung	Sangkapura
57	TPS Deliksumber	Benjeng
58	TPS Dermo	Benjeng
59	TPS Desa Sumengko	Duduksampeyan
60	TPS Dipongo	Tambak
61	TPS Dishub KIR	Kebomas
62	TPS Dohoagung	Balongpanggang
63	TPS Domas	Menganti

No	Nama	Kecamatan
64	TPS Dooro	Cerme
65	TPS Doudo	Panceng
66	TPS Drancang	Menganti
67	TPS Driyorejo	Driyorejo
68	TPS Duduksampeyan	Duduksampeyan
69	TPS Dukuh Kembar	Dukun
70	TPS Dukunanyar	Dukun
71	TPS Gadingwatu	Menganti
72	TPS Gadung	Driyorejo
73	TPS Ganggang	Balongpanggang
74	TPS Gedangkulut	Cerme
75	TPS Gelam	Tambak
76	TPS Gempolkurung	Menganti
77	TPS Gemyang (Gulomantung)	Kebomas
78	TPS Gending	Kebomas
79	TPS Gending	Kebomas
80	TPS Giri	Kebomas
81	TPS Glanggang	Duduksampeyan
82	TPS Glatik	Ujung Pangkah
83	TPS Glidah	Kedamean
84	TPS Gluranploso	Benjeng
85	TPS Golokan	Sidayu
86	TPS Gosari	Ujung Pangkah
87	TPS Granit	Driyorejo
88	TPS Gredek	Duduksampeyan
89	TPS Grejeg	Tambak
90	TPS Gumeng	Bungah
91	TPS Gumeno	Manyar
92	TPS Gununganyar	Cerme
93	TPS Gunungtengah	Sangkapura
94	TPS Hendrosari	Menganti
95	TPS Hulaan	Menganti
96	TPS Iker-Iker Geger	Cerme
97	TPS Ima'an	Dukun
98	TPS indro	Kebomas
99	TPS Indrodelik	Bungah
100	TPS Jaksa Agung Suprapto (Sidokumpul)	Gresik
101	TPS Jalan Raya Banjarsari	Cerme
102	TPS Jatirambe	Benjeng
103	TPS Jogodalu	Benjeng
104	TPS Jombangdelik	Balongpanggang
105	TPS Jono	Cerme
106	TPS Jrebeng	Dukun
107	TPS Kalipadang	Benjeng
108	TPS Kalirejo	Dukun
109	TPS Kambingan	Cerme
110	TPS Kandangan	Cerme
111	TPS Kantor DPRD - Bedilan	Gresik

No	Nama	Kecamatan
112	TPS Kantor Workshop (Kebomas)	Kebomas
113	TPS Karangandong	Driyorejo
114	TPS Karangcangkring	Dukun
115	TPS Karangkidul	Benjeng
116	TPS Karangkirin	Kebomas
117	TPS Karangrejo	Ujung Pangkah
118	TPS Karangrejo	Manyar
119	TPS Karangsemanding	Balongpanggang
120	TPS Katimoho	Kedamean
121	TPS Kawisanyar	Kebomas
122	TPS Kawistowindu	Duduksampeyan
123	TPS Kebonagung	Ujung Pangkah
124	TPS Kebuntelukdalam	Sangkapura
125	TPS Kedamean	Kedamean
126	TPS Kedangan	Duduksampeyan
127	TPS Kedanyang	Kebomas
128	TPS Kedunganyar	Wringinanom
129	TPS Kedungpring	Balongpanggang
130	TPS Kedungrukem	Benjeng
131	TPS Kedungsekar	Benjeng
132	TPS Kedungsumber	Balongpanggang
133	TPS Kelurahan Gulomantung	Kebomas
134	TPS Kemangi	Bungah
135	TPS Kemudi	Duduksampeyan
136	TPS Kepatihan	Menganti
137	TPS Kepuhklagen	Wringinanom
138	TPS Kepuhlegundi	Tambak
139	TPS Kepuhteluk	Tambak
140	TPS Kesambenkulon	Wringinanom
141	TPS Kesamberwetan	Driyorejo
142	TPS Ketanen	Panceng
143	TPS Ketapanglor	Ujung Pangkah
144	TPS Kisik	Bungah
145	TPS Klampok	Benjeng
146	TPS Klangonan	Kebomas
147	TPS Klompanggubug-	Tambak
148	TPS Klotok	Balongpanggang
149	TPS Kota Baru Driyorejo	Driyorejo
150	TPS Kotakusuma	Sangkapura
151	TPS Kramat	Bungah
152	TPS Kramat	Duduksampeyan
153	TPS Kramat	Duduksampeyan
154	TPS Kramat Inggil	Gresik
155	TPS Kramat Langon (Pulopacikan)	Gresik
156	TPS Krikilan	Driyorejo
157	TPS Kumalasa	Sangkapura
158	TPS Laban	Menganti
159	TPS Labanwiras	Wringinanom

No	Nama	Kecamatan
160	TPS Lampah	Kedamean
161	TPS Lebak	Sangkapura
162	TPS Lebanisuko	Wringinanom
163	TPS Lengkong	Cerme
164	TPS Leren	Manyar
165	TPS Lowayu	Dukun
166	TPS Lundo	Benjeng
167	TPS Madumulyorejo	Dukun
168	TPS Manunggal	Kedamean
169	TPS Manyar Sidomukti	Manyar
170	TPS Manyar Sidorukun	Manyar
171	TPS Manyarejo	Manyar
172	TPS Martadinata I Kebungson	Gresik
173	TPS Martadinata II Kebungson	Gresik
174	TPS Martadinata III Lumpur	Gresik
175	TPS Martadinata IV Kroman	Gresik
176	TPS Martadinata V (Tlogopojok)	Gresik
177	TPS Masangan	Bungah
178	TPS Mayarejo	Manyar
179	TPS Melirang	Bungah
180	TPS Menganti	Menganti
181	TPS Menggungianti	Benjeng
182	TPS Mentaras	Dukun
183	TPS Metatu	Benjeng
184	TPS Mojogede	Balongpanggang
185	TPS Mojopetung	Dukun
186	TPS Mojopurnowetan	Bungah
187	TPS Mojopurogede	Bungah
188	TPS Mojosarirejo	Driyorejo
189	TPS Mojotengah	Menganti
190	TPS Mojowuku	Kedamean
191	TPS Mondoluku	Wringinanom
192	TPS Morobakung	Manyar
193	TPS Morowudi	Cerme
194	TPS Munggugebang	Benjeng
195	TPS Ngampel	Manyar
196	TPS Ngampel	Balongpanggang
197	TPS Ngargosari	Kebomas
198	TPS Ngasin	Balongpanggang
199	TPS Ngemboh	Ujung Pangkah
200	TPS Ngembung	Cerme
201	TPS Noto Prayitno (Ngipik)	Gresik
202	TPS Pacuh	Balongpanggang
203	TPS Padang Bandung	Dukun
204	TPS Padeg	Cerme
205	TPS Padeg Banjarsari	Cerme
206	TPS Palebon	Duduksampeyan
207	TPS Palemwatu	Menganti

No	Nama	Kecamatan
208	TPS Panca Warna	Driyorejo
209	TPS Pandanan	Duduksampeyan
210	TPS Pandu	Cerme
211	TPS Pangkah Kulon	Ujung Pangkah
212	TPS Pangkah Wetan	Ujung Pangkah
213	TPS Panjunan	Duduksampeyan
214	TPS Panoraman	Tambak
215	TPS Pantenan	Panceng
216	TPS Pasar Cerme (Cerme Lor)	Cerme
217	TPS Pasar Ngepung	Kedamean
218	TPS Pasar Sidomooro	Kebomas
219	TPS Pasinanlemahputih	Wringinanom
220	TPS Patasselamat	Sangkapura
221	TPS Pedangan	Wringinanom
222	TPS Pejangganan	Manyar
223	TPS Pekalongan	Tambak
224	TPS Pemkab Kembangan	Kebomas
225	TPS Pengalangan	Menganti
226	TPS Pengundan	Bungah
227	TPS Permata (Bunder Asri) Kembangan	Kebomas
228	TPS Perum ABR (Kembangan)	Kebomas
229	TPS Perum Asapri Ngabetan	Cerme
230	TPS Perum Banjarsari	Cerme
231	TPS Perum Betiting	Cerme
232	TPS Perum BP Wetan (Sidokumpul)	Gresik
233	TPS Perum Dinari (Dahanrejo)	Kebomas
234	TPS Perum GKA I	Kebomas
235	TPS Perum GKA II	Kebomas
236	TPS Perum GSP (Dahanrejo)	Kebomas
237	TPS Perum Permata Suci 1	Manyar
238	TPS Perum Permata Suci II	Manyar
239	TPS Perum Queen (Dungus)	Cerme
240	TPS Petiken	Driyorejo
241	TPS Petis Bener	Duduksampeyan
242	TPS Petiyi Tunggal	Dukun
243	TPS Petung	Panceng
244	TPS Pinggir	Balongpanggang
245	TPS Pogangan	Manyar
246	TPS Polres Gresik - Bedilan	Gresik
247	TPS Prambangan	Kebomas
248	TPS Prambangan	Kebomas
249	TPS Prambangan Tol	Kebomas
250	TPS Pranti	Menganti
251	TPS Proklamasi (Tlogopatut)	Gresik
252	TPS Prupuh	Panceng
253	TPS Pucung	Balongpanggang
254	TPS Pudakbarat	Sangkapura
255	TPS Pudaktimur	Sangkapura

No	Nama	Kecamatan
256	TPS Punduttrate	Benjeng
257	TPS Putatlor	Menganti
258	TPS Raciwetan	Bungah
259	TPS Randengansari	Driyorejo
260	TPS Randu Boto	Sidayu
261	TPS Randuagung (Pos Polisi)	Kebomas
262	TPS Randuagung (Pujasera)	Kebomas
263	TPS Randuagung (SMP)	Kebomas
264	TPS Randuagung Makam	Kebomas
265	TPS Randupadangan	Menganti
266	TPS Raya Suci (Dahanrejo)	Gresik
267	TPS Roomo	Manyar
268	TPS RSUD Ibnu Sina (Kembangan)	Kebomas
269	TPS Rusunawa Gulomantung	Kebomas
270	TPS Rusunawa Pom Petro	Kebomas
271	TPS Rusunawa Usman Sadar - Karangturi	Gresik
272	TPS Rutan Banjarsari	Cerme
273	TPS Sambogunung	Dukun
274	TPS Samirplapan	Duduksampeyan
275	TPS Sawahmulya	Sangkapura
276	TPS Sawo	Dukun
277	TPS Sedapurklagen	Benjeng
278	TPS Segoromadu	Kebomas
279	TPS Sekapuk	Ujung Pangkah
280	TPS Sekargadung	Dukun
281	TPS Sekarkurung	Kebomas
282	TPS Sekarputih	Balongpanggang
283	TPS Semampir	Cerme
284	TPS Sembayar	Manyar
285	TPS Sembung Kidul	Dukun
286	TPS Sembunganyar	Dukun
287	TPS Sentro	Menganti
288	TPS Serah	Panceng
289	TPS Setrohadi	Duduksampeyan
290	TPS Sidogedungbatu	Sangkapura
291	TPS Sidojangkung	Menganti
292	TPS Sidokumpul	Bungah
293	TPS Sidomoro	Kebomas
294	TPS Sidomukti	Bungah
295	TPS Sidomukti	Kebomas
296	TPS Sidoraharjo	Kedamean
297	TPS Sidorejo	Bungah
298	TPS Sidorukun	Gresik
299	TPS Sidowungu	Menganti
300	TPS Singorejo (Dahanrejo)	Kebomas
301	TPS Singosari	Kebomas
302	TPS Singosari Semen	Kebomas
303	TPS Sirnoboyo	Benjeng

No	Nama	Kecamatan
304	TPS Siwalan	Panceng
305	TPS Slempit	Kedamean
306	TPS SMPN 1 Kebomas	Kebomas
307	TPS Sooko	Wringinanom
308	TPS Sukaoneng	Tambak
309	TPS Sukarela	Tambak
310	TPS Sukoanyar	Cerme
311	TPS Sukodono	Panceng
312	TPS Sukomulyo	Manyar
313	TPS Sukorejo	Kebomas
314	TPS Sukorejo	Bungah
315	TPS Sukowati	Bungah
316	TPS Sumari	Duduksampeyan
317	TPS Sumberame	Wringinanom
318	TPS Sumberejo	Manyar
319	TPS Sumbergede	Wringinanom
320	TPS Sumberwaru	Wringinanom
321	TPS Sumengko	Wringinanom
322	TPS Sumput	Driyorejo
323	TPS Sumurber	Panceng
324	TPS Sungairujing	Sangkapura
325	TPS Sungaiteluk	Sangkapura
326	TPS Sungonlegowo	Bungah
327	TPS Surowiti	Panceng
328	TPS Suwari	Sangkapura
329	TPS Tambak	Tambak
330	TPS Tambakberas	Cerme
331	TPS Tambakrejo	Duduksampeyan
332	TPS Tambang Sumber (Randuagung)	Kebomas
333	TPS Tanahladean	Balongpanggang
334	TPS Tanggulrejo	Manyar
335	TPS Tanjangawe	Ujung Pangkah
336	TPS Tanjung	Kedamean
337	TPS Tanjung Widoro	Bungah
338	TPS Tanjungan	Driyorejo
339	TPS Tanjungori	Tambak
340	TPS Tebalo	Manyar
341	TPS Tebalon	Duduksampeyan
342	TPS Tebuwung	Dukun
343	TPS Telukjatidawang	Tambak
344	TPS Tenaru	Driyorejo
345	TPS Tenggor	Balongpanggang
346	TPS Tenggulunan	Kebomas
347	TPS Terminal Bunder	Cerme
348	TPS Tirem	Duduksampeyan
349	TPS Tiremenggal	Dukun
350	TPS Trate SD NU	Gresik
351	TPS Tulung	Kedamean

No	Nama	Kecamatan
352	TPS Tumapel	Duduksampeyan
353	TPS Turirejo	Kedamean
354	TPS Wahas	Balongpanggang
355	TPS Watestanjung	Wringinanom
356	TPS Watuagung	Bungah
357	TPS Wedak Kidul	Duduksampeyan
358	TPS Wedak Lor	Duduksampeyan
359	TPS Wedani	Cerme
360	TPS Wedoroanom	Driyorejo
361	TPS Wonokerto	Dukun
362	TPS Wonorejo	Balongpanggang
363	TPS Wotan	Panceng
364	TPS Wotansari	Balongpanggang

Sumber : Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2022-2042

Untuk memenuhi kebutuhan sampah Kabupaten Gresik pada 20 tahun mendatang, akan direncanakan pembangunan TPA pada Banyutengah di Kecamatan Panceng, Daun di Kecamatan Sangkapura, Ngipik di Kecamatan Gresik, dan TPA Terpadu Skala Regional di Kecamatan Kedamean.

Untuk memenuhi kebutuhan sampah Kabupaten Gresik pada 20 tahun mendatang, akan direncanakan pembangunan TPA pada Banyutengah di Kecamatan Panceng, Daun di Kecamatan Sangkapura, Ngipik di Kecamatan Gresik, dan TPA Terpadu Skala Regional di Kecamatan Kedamean. Selain itu, terdapat 277 bank sampah pada tahun 2022 yang cukup berkembang di Kabupaten Gresik. berikut merupakan tabel bank sampah di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 42 Bank Sampah di Kabupaten Gresik

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
1	Jl. Kramat langon 4 rt 02 rw 07	01/08/2018	Adil Sejahtera	Aktif	Sidokumpul
2	Perum giri asri rt 02 rw 02 ngargosari	08/05/2018	Anggrek 2	Aktif	Ngargosari
3	Rt 03 Rw 05	7/25/2022	Anggrek 3	Aktif	Betiting
4	Kalimaya 1 blok i no 3 kota baru driyorejo	4/28/2017	Anggrek Bulan	Aktif	Randegansari
5	Rt 2 perum Giri Asri	08/05/2018	Anggrek Bulan	Aktif	Ngargosari
6	Jl anggur RT 4 rw 3	09/02/2017	Anggur Ceria	Aktif	Betiting
7	Rusunawa sawo	01/01/2020	Antis	Aktif	Gulomantung
8	ds.pandanan rt.02 rw.01	12/16/2019	Asri Mandiri	Aktif	ds.pandanan
9	DUSUN KALIWOT T 19A RW 007	8/22/2022	Awaly Berjaya	Aktif	BUNGAH
10	Gubernur suryo rt 4 rw 5	04/12/2022	Bakti Sosial	Aktif	Tlogopojok
11	Bukit Bambe RT 23 RW 006	12/24/2021	Bambe Asri	Aktif	Bambe

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
12	Jln apel RT 12 RW 03	10/31/2021	Bangkit Bersama Guyup Rukun	Aktif	Betiting
13	RT 17 C / 06	5/20/2018	Bangkit Mandiri	Tidak Aktif	Bungah
14	Dsn, legundi	04/12/2021	Bank Sampan Kepleg	Tidak Aktif	Kepuh legundi
15	Jl Kapten Dulasim Gg 7H RT. 13/RW.03 Kramatinggil/Gresik	12/18/2018	Barkokah	Tidak Aktif	Kramatinggil
16	Dr wahidin sh gang 36 RT 08/RW 01	07/09/2019	Barokah	Aktif	Karangpoh
17	Jl. Banjarsari Asri Gang XVIII Blok N No 12 Perum. Banjarsari Asri Cerme Gresik 61171	10/10/2017	Barokah	Aktif	Sukorame
18	RT 2 RW 5	05/01/2022	Barokah	Aktif	Banjarsari
19	Rt. 01./Rw. 01	09/07/2017	Barokah	Aktif	Randuagung
20	Jln RA KARTINI Gg 6.(RT 1/RW 4)	3/17/2019	Barokah	Aktif	Sidomoro
21	Dr wahidin sh gang 36 rt 08 rw 01	07/09/2019	Barokah Randuagung	Aktif	Randuagung
22	Jl Gubernur Suryo gg 7 Rt 03 Rw 03	03/05/2020	Barokah Tlogopojok	Aktif	Tlogopojok
23	Perum. Cerme indah Jl nanas rt 6 rw 3	02/10/2018	Berkah	Aktif	Sukorejo
24	Jl.Delima 3 RT 2 RW 1	08/07/2022	Berkah	Aktif	Sukorejo
25	Delima,2/1	8/28/2022	Berkah	Aktif	Betiting
26	Perumahan cerme indah RT09 /RW03	02/01/2021	Berkah Barokah	Aktif	Betiting
27	Jl dr wahidin sh gang 36 rt 01 rw 01	08/10/2019	Berkah Jaya	Aktif	Randuagung
28	Jl Ruby 1 RT 1 RW 21	2/17/2019	Berkah Ruby	Aktif	Suci
29	Desa Tumapel RT 08 RW 04	04/01/2019	Berkah Usaha Bersama	Aktif	Tumapel
30	RT/RW 01/01	10/07/2019	Berlian	Aktif	Sidokumpul
31	jl gub suryo 5E Rt 03 Rw 02	02/11/2020	Berlin (Bersih Lingkungan)	Aktif	tlogopojok
32	RT 01/RW 01	09/10/2019	Berseri	Aktif	RACIKULON
33	Jl. RA Kartini No 124 RT1 RW 5	01/01/2021	Bersih Jaya	Aktif	Sidomoro
34	Jln mangga RT 05 RW 02	8/27/2022	Bersinar	Aktif	Sukorejo
35	Mangga,05/02	7/23/2022	Bersinar	Aktif	Sukorejo
36	Biduri pandan 2.4 no 20 Kota Baru Driyorejo Gresik	04/01/2015	Biduri Pandan Jaya	Aktif	Petiken
37	Jl. Grejeg selatan. RT/RW: 002/001	1/28/2021	Bina Usaha	Aktif	Desa Grejeg
38	RT 3A RW 01 Nongkokerep Bungah	06/11/2022	Binar Bungah	Aktif	Bungah
39	Perum Banjarsari Asri blok o no 3 cerme Gresik	8/17/2020	Binar Sekar Buana	Aktif	Banjarsari
40	Jl. Amak khasim rt2RW 3	06/05/2015	Bnk Sampah Rws	Aktif	Sidorukun

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
41	jl.dr sutomo gang 3A, RT 02 / RW 02	9/20/2011	Bogor Doyong Mandiri	Aktif	tlogopatut
42	Jl Bukit Pendil II RT 06 RW O1	06/06/2021	Bukit Pendil Berseri	Aktif	Sukorejo
43	Taman Menganti Emas RT 017 RW 008	6/22/2014	Bumi Lestari	Aktif	Randuagung
44	Perum Kig no 21 RT14 RW03	03/10/2018	Bumi Lestari	Aktif	Mojotengah
45	Perumahan prambon asri RT 7 RW 2	03/01/2016	Bunga Asri	Aktif	Desa Boboh
46	Abdul karim gg 5 no3 rt5 rw 1	1/26/2020	Bunga Matahari	Aktif	Karangpoh
47	Jln santri RT17A RW06	7/20/2018	Bunga Santri Ceria	Aktif	Bungah
48	Perumahan cerme indah blok o RT 9 RW 4 jln duku	02/03/2020	Bunga Tabubuya	Aktif	Betiting
49	JL.Veteran Madya RT 02 RW 03	5/15/2014	Candrawati	Aktif	GENDING
50	RT.01 intan AL	7/25/2022	Cantik (Cekatan Terampil Dan Energik)	Aktif	Petiken
51	Ds.pranti,Dsn.pranti,Rt01/Rw04menganti,gresik	11/09/2019	Cemara Wangi	Aktif	Pranti
52	Jl . Dewi sekar dadu RT.03 / Rw.01	11/20/2021	Centil	Aktif	Ngargosari
53	Jl.BARABAI 1, RT.006, RW.010	1/18/2018	Darlink Senyum	Aktif	SUCI
54	Jalan Delima IV RT. 04 RW. 02	7/23/2022	Delima	Aktif	Sukorejo
55	Jalan Delima RT 003 RW 003	02/03/2020	Delima Berseri	Aktif	Betiting
56	Jalan Delima RT 003 RW 003	02/03/2020	Delima Berseri	Aktif	Betiting
57	Jl. Awikoen Madya Jaya	03/01/2016	Dewi Melati	Aktif	Gending
58	Jl awikoen madya RT 2 RW 2 Gending	01/10/2016	Dewi Srikandi	Aktif	Gending
59	Dukuh,12/05	12/27/2019	Dukuh Berseri	Aktif	Pengalangan
60	Jln Durian,RT 07 Rw 03	04/07/2018	Durian Manis	Aktif	Betiting
61	Jl. Pisang RT 07 RW 04	02/03/2020	Erte Pitoe/Pitoeloengan	Aktif	Betiting
62	Jl usman sadar GG 18 RT 05 RW 01	12/29/2017	Ertelima Bersih	Tidak Aktif	Karangturi
63	Jl Raya roomo GG 1 RT 05 RW 01	09/04/2016	Flamboyan	Aktif	Roomo
64	PERUMAHAN GIRI ASRI RT 03 RW 02	08/01/2018	Flamboyan Giri Asri	Aktif	NGARGOSARI
65	Phyrus Biru RT 19 / RW 05 kbd	07/09/2017	Flamboyan Phyrus Biru Rt 19	Aktif	Gadung
66	RT 6	06/07/2022	Gelam Tengah Jaya	Aktif	Desa Gelam
67	Raya dewi sekardadu rt 1 rw 1 ngargosari	06/05/2018	Gemes Sekardadu	Aktif	Ngargosari
68	Jl. Mulawarman RT-01 / RW-02	9/18/2017	Gerlisa	Aktif	Sekarkurung

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
69	Dsn.Gorekan kidul RT 5 Rw 3	07/02/2021	Gokil Resik	Aktif	Cermen
70	Jl.gub Suryo gang 9 a RT 1 RW 3	1/29/2022	Gotong Royong	Aktif	Tlogo pojok
71	Jl. Mutiara XI RT 7 RW 18 Pondok Permata Suci	08/05/2018	Gps (Gerakan Peduli Sampah)	Aktif	Suci
72	Granit nila 7 rt 06/rw11	04/10/2018	Granit Nila 7	Aktif	Kelurahan petiken
73	JL. GUBERNUR SURYO RT 01 RW 06	3/30/2019	Griyo Pojok	Tidak Aktif	TLOGOPOJOK
74	Jln Dewi Sekardadu RT 1 RW 1 Ngargosari Kebomas Gresik	03/05/2019	Gunung Sari	Aktif	Ngargosari
75	Jln Dewi Sekar Dadu GG gunung sari selatan	2/25/2020	Gunung Sari Selatan	Aktif	Ngargosari
76	Gub suryo 3A RT 01 RW 01 Tlogopojok	03/08/2020	Guru Jasa	Aktif	Tlogopojok
77	Desa Betiting Rt03/02	12/24/2021	Guyub Rukun	Aktif	Ds. Betiting
78	Jl. Kapten Dulasim 7/17, RT 11/RW 03	12/26/2017	Guyub Rukun	Aktif	Betiting
79	Jl. Strawberry RT 04 RW 04	02/03/2020	Guyub Rukun	Aktif	Kramatinggil
80	JL. PANGLIMA SUDIRMAN XVI RT 05 RW III	3/19/2016	Guyub Seru	Aktif	KELURAHAN SIDOMORO
81	Jl Dr Wahidin Sudirohusodo gang 36 RT 3 RW 1	7/29/2018	Guyup Rukun	Aktif	Randu agung
82	PERUM BJSA RT 01 RW 01	09/06/2020	Guyup Rukun	Aktif	Betiting
83	Desa Betiting RT.03 RW.02 Cerme	12/24/2021	Guyup Rukun	Aktif	BANJARSARI
84	Kapten Dulasim XI D, 05/02	01/05/2018	Harapan Jaya	Aktif	Kramat Inggil
85	Perum Cermai Apsari Jln Rambutan RT. 05 RW. 01	09/09/2018	Harmony	Aktif	Ngabetan
86	RT 01 RW 02	10/10/2021	Hijau Berseri	Aktif	Mriyunan
87	Jln. Kelapa 1 Rt 06 Rw 01	8/14/2022	Hijau Berseri	Aktif	Sukorejo
88	Kertosono	9/30/2021	Hijau Selaras	Tidak Aktif	Kertosono
89	Rt 01 rw 04	10/12/2020	Inayati	Aktif	Gosari
90	RT 005 RW 009	08/05/2019	Jaya Mahe	Aktif	RANDUAGUNG
91	RT 2 RW 9 Perumahan bukit Randuagung indah	11/14/2011	Jaya Makmur	Aktif	Randuagung
92	Jalan Jeruk RT 08 RW 03	1/15/2022	Jeruk Berseri	Aktif	Betiting
93	Sunan Giri V/20 Rt 01/05	3/24/2009	Juragan Umplong	Aktif	Kawisanyar
94	Jl. Sunan Prapen I RT 14 RW 04	1/20/2020	Kajen Harum	Aktif	Giri
95	Jalan veteran RT 03 RW 02	12/08/2019	Kampoeng Wakoel	Aktif	Sidomoro
96	Perum Alam Bukit Raya Blok D RT 08 RW 09	12/31/2021	Kampung Bersinar	Aktif	Kembangan
97	Jl.veteran 4 RT 02 RW 02	04/05/2020	Kampung Blimbing	Aktif	Sidomoro
98	Jl.Veteran 6 RT.01 RW.02	01/07/2018	Kampung Lemon	Aktif	Sidomoro

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
99	Jl Usman Sadar 17, RT 01 RW 01	09/05/2015	Karya Mandiri	Aktif	Sukorame
100	Alam singgasana, Rt 07/Rw 05	09/01/2021	Karya Mandiri	Aktif	Betiting
101	sunan giri gang 15 H no 3	7/20/2022	Kebon Resik	Aktif	giri
102	Jl. Ruby VI No. 29 RT 06 RW 21	10/20/2018	Kelompok Ruby Enam	Aktif	Suci
103	Jln. Kopi RT12/RW04		Kemuning		Wotan
104	Jl Tanjung Wira 3 no 21	02/05/2017	Kenanga	Aktif	Yosowilangun
105	Dr.wahidin shd rt04 rw 04 putat kebomas - gresik	07/07/2019	Kerapu	Aktif	Kebomas
106	Jln. Sunan Giri 15 J RT.019 RW.005	01/02/2020	Keteq Makmur	Aktif	Giri
107	Jl.Barabai V RT04/RW10	8/26/2016	Kipas	Aktif	Suci
108	Jl kyai sahlan 07 RT 01/RW 01	9/26/2021	Klorack	Aktif	Manyar sidomukti
109	Jl. Sunan Giri RW 02	06/02/2020	Kudu Resik	Aktif	Giri
110	Granit Kumala RT02/RW10	02/04/2015	Kumala Berseri	Aktif	PETIKEN
111	Perumahan Cerme Indah jl.Kurma,Rt.06/Rw.04	6/26/2021	Kurma Berkah 3R	Aktif	Betiting
112	Jl kutilang RW 14 perumahan GKA Yosowilangun	11/14/2021	Kutilang Asri	Aktif	Yosowilangun
113	dsn kaliwot RT 18 RW 07	7/19/2018	Laju Gemilang	Aktif	bungah
114	Jl. Kapten dulasim gg. 11h rt.08/ rw.2	01/05/2018	Lancar Jaya	Aktif	Kramat inggil
115	Jln. Raya Hulaan rt 17 rw 08	02/03/2021	Langgeng	Aktif	Hulaah
116	Jln langgar raya,RT 1 RW 1	6/26/2022	Lebak Indah	Aktif	Lebak
117	Jln dewi sekardadu rt04/01	06/11/2022	Lili	Aktif	Ngargosari/ dsn margonoto
118	Jln.jagorawi Rt 01 Rw 01	8/20/2021	Lingkungan Bersahabat	Aktif	Balongpanggang
119	Jl Jagorawi RT 01RW 01 dusun Mojoroto	09/06/2020	Lingkungan Bersahabat	Aktif	Balong panggang
120	Desa Hendrosari. Rt 08 / 01	10/01/2020	Lontar Sewu Berseri	Aktif	Desa Hendrosari
121	Setro rt 14 / rw 08	9/27/2020	Lovely Jasmin	Aktif	Setro
122	Jl. Syaikhona Suci	7/22/2022	Mada Berkarya	Aktif	Suci
123	Jl. Mutiara 7 Rt.05 Rw.18	2/19/2021	Maju Bahagia	Aktif	Suci
124	Nongkokerep rt8 rw3	9/18/2018	Maju Bersama	Aktif	Bungah
125	RT 007/RW 008 desa Randuagung kecamatan Kebomas Gresik	7/23/2019	Makmur Mandiri	Aktif	Randuagung
126	Perumahan Alam Singgasana RT05 RW5 Desa Betiting Kec Cerme Kab Gresik	02/03/2020	Makmur Sentosa	Aktif	Betiting
127	JL.DR WAHADIN SHD RT 004 RW 001	08/05/2019	Manangkuli Permai	Aktif	RANDUAGUNG
128	Griya kencana2 rt36 rw13	1/15/2020	Mandiri	Aktif	Betiting
129	Jl kiwi,08/04	12/24/2019	Mandiri	Aktif	Menganti
130	Perum Dinari RT. 05/RW. 05	1/15/2015	Mandiri	Aktif	Dahanrejo
131	Griya Kencana2 Blok G7 no 18 RT 36 RW 13 menganti	4/18/2018	Mandiri Griya Kencana2	Aktif	Menganti

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
132	Jl. Kampung masjid Rt 005 Rw 002	9/30/2020	Mandiri Makin Jaya	Aktif	Desa peganden
133	jalan kapten dulasim RT. 009 /RW .003	01/07/2018	Manfaat Lingkungan	Aktif	kramat inggil
134	Jl. MANGGIS RT 05 RW 04 PERUMAHAN CERME INDAH	06/01/2018	Manggis Manis	Aktif	BETITING
135	RT 11 RW 3 perum cerme indah	02/03/2020	Marqisa	Aktif	Desa betiting
136	jl.Raya Meduran Rt.04 Rw.03	12/18/2011	Meduran Bersatu	Aktif	roomo
137	Perum Giri Asri RT. 05 RW. 02	09/08/2018	Melati	Aktif	Ngargosari
138	Jl. Pancawarna 7.2 No.27 Kota Baru Driyorejo	5/15/2017	Melati Bersih	Aktif	Petken
139	Jln melon rt 14/03	3/14/2021	Melon Amanah	Aktif	Betiting
140	Rt 01 rw 01	09/09/2019	Mentari	Aktif	Prupuh
141	Perum. Cerme indah Jl. Tomat blok. C Rt 13 Rw 03	08/01/2018	Merah Merona	Aktif	Betiting
142	Jl. Ra Kartini X RT.03 RW.04	1/20/2019	Mutiara	Aktif	Sidomoro
143	Jln Mutiara RT 03 RW 12	01/11/2015	Mutiara 3	Aktif	Petiken
144	Jl. Mutiara 1.4 RT. 01 RW. 12	02/04/2021	Mutiara Berseri	Aktif	Petiken
145	Jln.Mutiara RT 02 RW 12	11/11/2018	Mutiara Kreatif	Aktif	Petiken
146	Jl. Gub. Suryo VB, RT.01/RW.02	3/30/2020	Nadhofah	Aktif	Tlogopojok
147	PERUM CERME INDAH JLN NANGKA 2 RT 3 RW 4	6/24/2018	Nangka 2	Aktif	BETITING
148	Jl. Veteran Jaya RT.01 & 04 RW.01	8/17/2015	Nawang Wulan	Tidak Aktif	GENDING
149	Jl.Vereran 3 RT1 / RW 7	10/09/2019	Ngarso Berseri	Tidak Aktif	Singosari
150	Jl. Granit kumala 2 RT. 10 RW. 10	09/04/2017	Nusa Indah	Aktif	Petiken
151	Jl. Raya Padeg No. 22		Pandean Pas		Padeg
152	RT 3 RW 4 Rivera Desa Banjarsari Manyar	8/17/2022	Pattiro Gresik	Aktif	Banjarsari
153	Dsn. Tajungkima, RT.001/RW.005	1/25/2022	Pbm (Peka Bawean Menyala) Dusun Tajungkima	Aktif	Kumalasa
154	jl.Kali tutup RT.05 /RW.02	08/03/2018	Perintis	Tidak Aktif	Desa Sembungan Kudul
155	Jl. Poros Desa Kisik	1/19/2020	Permata Kisik	Aktif	KISIK
156	Jl.Veteran madya RT 01/RW 03	04/01/2021	Pertiwi	Aktif	Kelurahan Gending
157	Perum bukit sekar indah rt 05/01	9/23/2018	Perum Bsi	Aktif	Ngargosari
158	Jl. Mutiara 3 V no 46	04/01/2016	Petiken Lestari	Aktif	Petiken
159	jl. phyrus biru 2.1 rt. 022 rw. 005	2/20/2018	Phyrus Biru Rt 022/Rw 005	Aktif	gadung
160	Jl. Granit Nila 5.1 - 5.6 RT 03 RW 11	2/26/2017	Podo Rukun	Aktif	Petiken
161	Jl.gubernur suryo gg 11 F RT 3 RW 5	9/28/2017	Pojok Asri	Aktif	Tlogopojok

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
162	Jl. Gubernur suryo gg x	2/29/2020	Pojok Ceria	Aktif	Tlogopojok
163	Jln.gubernur Suryo gang 4 RT 01 RW 04.tlogopojok a	3/18/2020	Pojok Garuda	Tidak Aktif	Tlogopojok
164	Jl. Gub. Suryo 5C/11 RT.02/RW.02 Gresik	4/22/2000	Pondhong Jaya	Aktif	Tlogopojok
165	Dsn. Daun Laut, Ds. Daun, Kec. Sangkapura, Bawean Gresik.	10/06/2021	Putri Majeti	Aktif	Desa Daun
166	RT3 RW2	2/28/2012	Putri Mandiri	Aktif	GENDING
167	Perum. Alam Singgahsana RT 06 RW 05, Betiting - Cerme	02/03/2020	Resik Berkah	Aktif	Betiting
168	Perum. Alan Singgahsana M/32, Betiting - Cerme	02/03/2020	Resik Berkah	Aktif	Betiting
169	Veteran I, RT05 / RW02	1/16/2022	Resik Lumintu	Aktif	Sidomoro
170	jln.sunan giri gang 12 RT 10 RW 03	08/05/2020	Resik Mandiri 10	Aktif	GIRI
171	Jl sunan giri rt 9/rw 3 no 164	01/05/2020	Resik Mandiri 9	Aktif	Giri
172	jl gubernur Suryo 333	3/30/2020	Rezeki Berkah	Aktif	Tlogo pojok
173	GG, 1 RT 06 RW 02	1/29/2017	Roomo Gangsar	Aktif	Roomo
174	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243-B Gresik	07/02/2018	Rsud Ibnu Sina Kabupaten Gresik	Aktif	Dahanrejo
175	Jln.kapten dulasim 7G rt 12 rw 03	02/04/2018	Rt 12 Rw 03 Kramat Inggil	Tidak Aktif	Kramat Inggil
176	Jln kapten dulasim 7G/14 RT 12 RW 03	02/04/2018	Rt 12 Rw 03 Kramat Inggil Gresik	Tidak Aktif	Kramat Inggil
177	Jl. Kelapa 2 RT 6 RW 1	8/14/2022	Rt 6	Aktif	Sukorejo
178	Jl. Ruby 4 RT. 4 Rw 21 Pondok Permata Suci Manyar Gresik	4/19/2017	Ruby Sekawan	Aktif	Suci
179	Jl Ruby 5 PPS RT 005 RW 021	11/02/2018	Ruby V	Aktif	Suci
180	Kh. Abdul Karim 9 Rt 07. Rw 01	01/07/2018	Rukun Karangpoh Berseri	Aktif	Karangpoh
181	RT.2 RW.5. Tlogopojok. Gresik	2/22/2020	Sedekah Kita	Aktif	Tlogopojok
182	Jln. Gubernur Suryo gg. 11. RT.2 RW.5	2/22/2020	Sedekah Kita	Aktif	Tlogopojok
183	Perum banjasari asri RT 07 RW 01	8/17/2020	Sedulur Sae	Aktif	Banjarsari/ Banjarsari
184	Jl. Veteran XI RT 05 RW 01	08/07/2020	Seguntung Asri	Aktif	Singosari
185	PERUM CERME INDAH RT 10 RW 03 JL BELIMBING	4/28/2019	Sehat Dan Berkah	Aktif	BETITING
186	Jl. Dr. Wahidin SH gang 36 Rt 06 Rw 01 Randuagung, kec. Kebomas kab. Gresik	1/19/2020	Sehati	Aktif	Sukorejo
187	Jl.jambu raya RT 3 RW 2	8/14/2022	Sehati	Aktif	Randuagung
188	Jl gubernur Suryo no 42 RT 03 RW 01 tlogopojok	02/05/2019	Sejahtera	Aktif	Tlogopojok

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
189	Jln.Mayjend Sungkono sekarkurung	2/18/2022	Sekar Rangkasbitung	Tidak Aktif	Sekarkurungnya
190	Perumahan alam singgasana blok CC no 1 RT 4 RW 5	10/09/2015	Sekawan Bersinar	Aktif	Betiting
191	Rt 01 RW 01	10/09/2021	Sembodo	Aktif	Banyutengah
192	Proklamasi rt 02 rw 05	10/04/2019	Si Cantik Cerdas	Aktif	Sidokumpul
193	Jalan raya Metatu, RT. 01 RW. 01	06/12/2022	Sidoresik	Aktif	Metatu
194	Perum Graha Puncak Anomsari	7/21/2019	Sijari	Tidak Aktif	Wedoroanom
195	Jl. Amak Khasim Gang V / 31 RT 03 RW 06	11/10/2021	Sinar Harapan Mulya	Aktif	Sidorukun Gresik
196	Jln. Granit kumala 1.8 rt 04 rw 10	03/02/2020	Sri Rezeki	Aktif	Petiken
197	RT 002 RW 001	11/27/2017	Srikandi	Aktif	DOORO
198	Proklamasi III RT.3 / RW.7	3/27/2022	Srikandi	Aktif	Bungah
199	RT 15a RW 006	6/21/2019	Srikandi	Aktif	SIDOMORO
200	Puri Asta kencana B6/03 RT 21/RW 05	1/15/2020	Srikandi 21	Aktif	Boteng
201	Jl.Raya Ambeng - ambeng Watangrejo No.05 Kode pos 61162 RT/RW = 007/003	10/12/2022	Srikandi Mbah Nyai Ambeng	Aktif	Ambeng - ambeng Watangrejo
202	Jl. Usman Sadar XV (lapangan Porbat)	9/20/2020	Subasa	Aktif	Sukorame
203	Jalan dr wahidin 36 g rt 5 rw 1	08/03/2022	Sugih Waras	Aktif	Randuagung
204	Jln dr. Wahidin s.h rt 05 rw 01	7/15/2017	Sugih Waras	Aktif	Randuagung
205	Jln Kapten Dulasim 7f Rt 10. Rw 03	03/04/2016	Sumber Rejeki	Aktif	Kramat inggil
206	Sunan Giri 06 RT 02/RW 02	03/02/2022	Sumber Berkah	Aktif	Kawisanyar /Kawisanyar
207	Ds betiting RT 02 RW 01	10/10/2021	Sumber Berkah	Aktif	Ds betiting
208	Rt 02 Rw 02	01/01/2022	Sumber Bersih	Aktif	Betiting
209	Jln. Dr. Wahidin SHD. RW. 01	03/06/2017	Sumber Makmur	Aktif	Banjarsari
210	Perum Banjarsari lb 14 RT 09 rw 01	08/09/2017	Sumber Makmur	Aktif	Desa Randuagung
211	Jl. Veteran no.18 A RT 03/RW 03	7/18/2018	Sumber Rejeki	Aktif	SIDOMORO
212	Jl. Kapten Dulhasim 7D	1/25/2017	Sumber Rejeki Rt 06 Kramat Inggil	Aktif	Kramat Inggil
213	Jl. Kapten Dulhasim 7D	1/17/2017	Sumber Rejeki Rt Kramatinggil	Aktif	Kramatinggil
214	Jl dr wahidin shd	7/15/2017	Sumber Rizki	Aktif	Randuagung
215	RT 01/RW 02	11/01/2021	Sumber Uang	Aktif	DESA BETITING
216	Jalan Sunan Kudus RT.7 RW.2	10/09/2021	Sumber Urip (Surip)	Aktif	Wadak Kidul
217	Sumbergede RT 02 RW 05 Wringinanom Gresik	7/14/2020	Sumbergede	Tidak Aktif	Sumbergede
218	Kebalan RT 11/RW 5	10/15/2020	Taman Sari	Aktif	Pekalongan

No	Lokasi	Tahun Berdiri	Nama Bank Sampah	Status	Kelurahan Pelayanan
219	DUSUN TAMBAK TIMUR	06/01/2022	Tambak Bersih	Aktif	TAMBAK
220	Jl..lintas menara sangkapura	01/06/2022	Teguh Asri	Aktif	Desa Gunungteguh
221	Jl.Awikun Tirta Rt 5 / Rw 2	09/10/2010	Tirta Ceriajl Awikeon Tirta	Aktif	Gending
222	jln.Dewi sri Dusun patar Rt/RW 02/01	4/14/2022	Tps 3 R Ekasambi	Aktif	Desa Patar Selamat
223	Perum Cerme Indah RT 02 RW 04	8/13/2018	Tunas Harapan	Aktif	Betiting
224	Jl. Puntadewa no 13.rt dua re satu	02/02/2015	Usaha Mulia	Aktif	Desa Tirem
225	Jln.RA Kartini 280 Gresik	11/08/2018	Wai Darling	Aktif	Tlogopatut
226	Jalan kapten dulasim RT 12 RW 3	02/01/2018	Waralas Sejahtera Kramat Inggil	Aktif	Kramat inggil
227	Jl Merak 2 RT 3 RW 13	9/24/2021	Wika (Wijaya Kusuma)	Aktif	Yosowilangun

Sumber : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

D. Limbah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 terdapat permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu berupa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS serta belum adanya kelembagaan pengelola yang memadai untuk air limbah domestik. Kabupaten Gresik saat ini sudah memiliki 134 Unit IPAL dan 1 buah IPLT yang dibangun di tahun 2014 yaitu IPLT Betoyoguci yang berlokasi di Kecamatan Manyar dengan kapasitas design 45 m3/hari. Berikut merupakan persentase capaian pelayanan pengolahan air limbah domestik. Berikut merupakan persentase capaian pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 43 Persentase Capaian Air Limbah Domestik Kabupaten Gresik

	Indikator	Target Kab. Gresik	Capaian Tahun 2020
Persentase Pengolahan Air Limbah	Capaian Pelayanan Limbah Domestik	80%	65,725%

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik, 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian pelayanan air limbah di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 baru menyentuh angka sebesar 65,725% hal tersebut masih belum memenuhi target capaian yang direncanakan di Kabupaten Gresik yaitu sebesar 80%.

Seiring perkembangan zaman jumlah limbah yang dihasilkanpun semakin ikut bertambah yang dikarenakan kebutuhan kegiatan industri yang terus meningkat maka dari itu semakin berkembang kegiatan industri hasil limbah yang dihasilkan kini juga semakin

beragam, Kabupaten Gresik merupakan wilayah yang memiliki kegiatan industri yang cukup banyak. Pada tahun 2015 Kabupaten Gresik memiliki 603 industri besar dan menengah, kegiatan dari industri-industri ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan terutama limbah. Berdasarkan data yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2015, disebutkan persentase jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh Kabupaten Gresik merupakan masalah yang tergolong besar dikarenakan sudah pada level provinsi, ialah sebanyak 19,4 juta ton pertahun atau 1,6 juta ton perbulan. Kurangnya prasarana-sarana terkait pengolahan air limbah. Berdasarkan data dari Pemutakhiran SSK 2015 adalah sebagai berikut:

a) Hanya ada 1 truk penyedot tinja milik pemda, pembuangan tinja ke IPLT, sungai atau ke tanah
b) Sudah ada IPLT tapi belum beroperasi
c) Pemanfaatan IPAL Komunal di wilayah perdesaan yang kurang optimal.

E. Lahan Kritis/Kerusakan Lahan

Kerusakan lahan dapat menjadi permasalahan yang besar jika tidak ditangani dengan baik. Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Gresik Tahun 2022, penanganan lahan kritis, terdapatnya lahan kritis, dan kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup. Kerusakan lahan yang ada di Kabupaten Gresik merupakan dampak dari tata guna lahan yang tepat. Kerusakan lahan terjadi ketika lahan digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan kapasitas dan potensinya.

Kerusakan lahan di Kabupaten Gresik terjadi di lahan pertanian, perikanan, atau konservasi alam. Saat lahan pertanian digunakan secara intensif dan tidak sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan, erosi dan kekeringan dapat terjadi sehingga menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan ketidakstabilan pasokan pangan.

Pada lahan perikanan, penggunaan lahan tambak yang intensif dan tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lahan. Kerusakan lahan pada lahan perikanan dapat menyebabkan ternjadinya intrusi air laut, penurunan kualitas air, dan kerusakana ekosistem terumbu karang. Pada konservasi alam, jika lahan hutan atau lahan konservasi lainnya digunakan untuk pengambilan kayu secara ilegal, degradasi lingkungan dapat terjadi. Hal

ini dapat menyebabkan ancaman pada keberlangsungan ekosistem. Berikut merupakan luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 44 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

No.	Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Gresik		26,61		1768,28		3177,25		20697,89		

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Gresik, 2022

3.2.3 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem

Kinerja layanan atau jasa ekosistem di Kabupaten Gresik terbagi menjadi jasa ekosistem penyedia pangan, penyedia air bersih, pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana, pengaturan pemeliharaan kualitas udara, budaya tempat tinggal dan ruang hidup, serta pengaturan iklim. Berikut merupakan kinerja layanan atau jasa ekosistem di Kabupaten Gresik.

A. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Bahan pangan yang dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Persentase Jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Gresik disajikan pada Tabel dibawah ini.

Berdasarkan data pada Tabel di bawah menunjukan bahwa penyediaan jasa pangan di Kabupaten Gresik yang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 6%, 14%, 11%,25% dan 44% dari total luas wilayah. Potensi utama sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Gresik adalah padi. Berdasarkan data daya dukung pangan Kabupaten Gresik Tahun 2021, Ketersediaan pangan mengalami surplus dengan sisa pangan atau selisih ambang batas sebesar 1.030.479 jiwa. Sehingga Kabupaten Gresik dapat mencapai swasembada pangan. Hal ini didukung dengan Jasa Ekosistem yang mendominasi yaitu sangat tinggi.

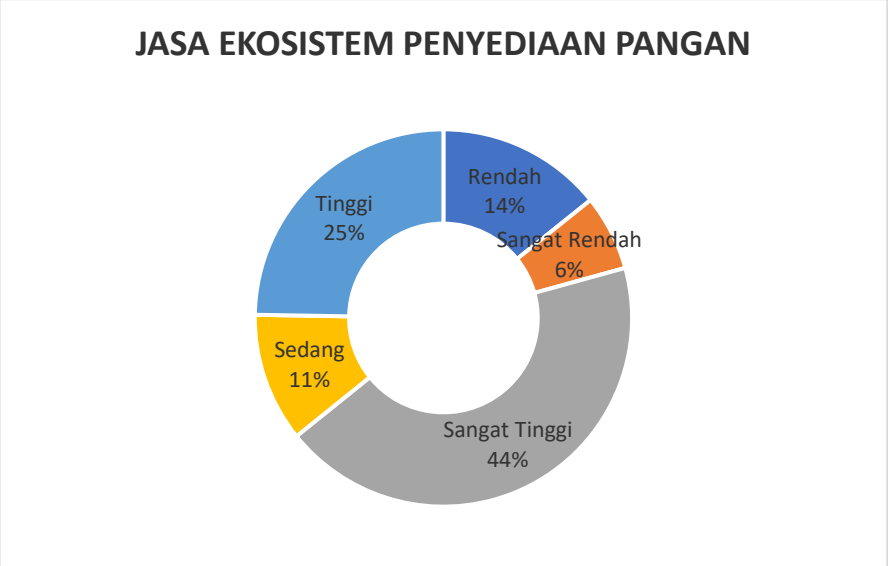
Tabel 3. 45 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	5605,40	301,58	14,36	476,01	199,32	6596,67
2	Benjeng	5251,87	295,54	17,58	516,87	183,39	6265,25
3	Bungah	1873,45	4635,08	1294,46	694,15	271,88	8769,01
4	Cerme	6051,72	366,81	196,91	454,23	123,82	7193,49

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
5	Driyorejo	1790,21	2204,82	294,01	738,51	455,64	5483,20
6	Duduksampeyan	6744,52	677,05	237,69	295,93	250,85	8206,04
7	Dukun	3675,50	1602,31	483,72	493,62	259,73	6514,89
8	Gresik			44,15	4,53	731,84	780,52
9	Kebomas	824,10	120,63	932,52	289,80	1316,54	3483,59
10	Kedamean	4007,88	1810,24	237,95	402,38	281,85	6740,30
11	Manyar	3764,04	2818,79	1256,36	603,99	1100,60	9543,77
12	Menganti	4959,68	1279,09	44,47	364,57	503,65	7151,46
13	Panceng	1354,32	1922,99	1522,63	1429,32	223,79	6453,04
14	Sangkapura	1036,98	1387,60	3089,71	6020,46	849,66	12384,40
15	Sidayu	1823,73	2026,83	132,73	324,52	66,65	4374,46
16	Tambak	593,64	947,46	1414,24	3645,17	575,53	7176,05
17	Ujungpangkah	2726,19	5890,38	1491,34	662,38	258,48	11028,77
18	Wringinanom	1995,34	2462,88	1041,76	300,27	399,42	6199,68
	Total	54078,56	30750,08	13746,60	17716,71	8052,63	124344,58

Tabel 3. 46 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	4,51	0,24	0,01	0,38	0,16
2	Benjeng	4,22	0,24	0,01	0,42	0,15
3	Bungah	1,51	3,73	1,04	0,56	0,22
4	Cerme	4,87	0,29	0,16	0,37	0,10
5	Driyorejo	1,44	1,77	0,24	0,59	0,37
6	Duduksampeyan	5,42	0,54	0,19	0,24	0,20
7	Dukun	2,96	1,29	0,39	0,40	0,21
8	Gresik	0,00	0,00	0,04	0,00	0,59
9	Kebomas	0,66	0,10	0,75	0,23	1,06
10	Kedamean	3,22	1,46	0,19	0,32	0,23
11	Manyar	3,03	2,27	1,01	0,49	0,89
12	Menganti	3,99	1,03	0,04	0,29	0,41
13	Panceng	1,09	1,55	1,22	1,15	0,18
14	Sangkapura	0,83	1,12	2,48	4,84	0,68
15	Sidayu	1,47	1,63	0,11	0,26	0,05
16	Tambak	0,48	0,76	1,14	2,93	0,46
17	Ujungpangkah	2,19	4,74	1,20	0,53	0,21
18	Wringinanom	1,60	1,98	0,84	0,24	0,32
	Total	43,49	24,73	11,06	14,25	6,48



Gambar 3. 12 Presentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

B. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan, kebutuhan pangan dan air bersih selalu bersamaan bahkan air lebih banyak dibutukan. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 41 6/Menkes/ Per/IX/ 1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Persentase Jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Gresik disajikan pada Tabel dibawah ini.

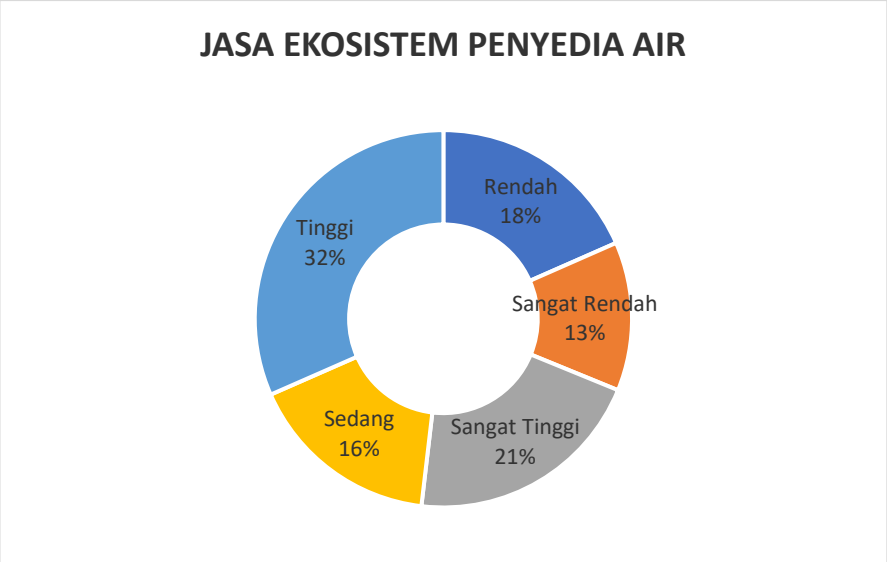
Tabel 3. 47 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1177,42	3060,51	1948,21	410,53		6596,67
2	Benjeng	1444,21	3764,47	583,53	473,04		6265,25
3	Bungah	1599,87	266,61	511,94	2621,50	3769,09	8769,01
4	Cerme	3758,45	2653,92	586,48	194,64		7193,49
5	Driyorejo	1148,91	3460,94	861,12	12,23		5483,20
6	Duduksampeyan	6469,59	1267,59	465,11	3,75		8206,04
7	Dukun	512,67	2540,83	2471,16	990,23		6514,89
8	Gresik				33,37	747,14	780,52
9	Kebomas	1036,81	80,66	1,66	687,47	1677,00	3483,59
10	Kedamean	272,88	4710,77	1450,44	306,21		6740,30
11	Manyar	2858,86	1231,79	108,97	704,80	4639,36	9543,77
12	Menganti	779,66	5089,89	1114,17	167,73		7151,46
13	Panceng	1556,99	3799,02	1048,30	48,74		6453,04

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
14	Sangkapura			3992,30	7471,10	921,01	12384,40
15	Sidayu	1403,85	714,76	673,43	1451,32	131,10	4374,46
16	Tambak			2666,91	3941,08	568,06	7176,05
17	Ujungpangkah	472,65	2319,18	1441,97	3375,07	3419,90	11028,77
18	Wringinanom	1234,58	4307,91	657,18			6199,68
	Total	25727,41	39268,84	20582,88	22892,80	15872,65	124344,58

Tabel 3. 48 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	0,95	2,46	1,57	0,33	0,00
2	Benjeng	1,16	3,03	0,47	0,38	0,00
3	Bungah	1,29	0,21	0,41	2,11	3,03
4	Cerme	3,02	2,13	0,47	0,16	0,00
5	Driyorejo	0,92	2,78	0,69	0,01	0,00
6	Duduksampeyan	5,20	1,02	0,37	0,00	0,00
7	Dukun	0,41	2,04	1,99	0,80	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,00	0,03	0,60
9	Kebomas	0,83	0,06	0,00	0,55	1,35
10	Kedamean	0,22	3,79	1,17	0,25	0,00
11	Manyar	2,30	0,99	0,09	0,57	3,73
12	Menganti	0,63	4,09	0,90	0,13	0,00
13	Panceng	1,25	3,06	0,84	0,04	0,00
14	Sangkapura	0,00	0,00	3,21	6,01	0,74
15	Sidayu	1,13	0,57	0,54	1,17	0,11
16	Tambak	0,00	0,00	2,14	3,17	0,46
17	Ujungpangkah	0,38	1,87	1,16	2,71	2,75
18	Wringinanom	0,99	3,46	0,53	0,00	0,00
	Total	20,69	31,58	16,55	18,41	12,77



Gambar 3. 13 Presentase Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

C. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

Daya dukung lingkungan dalam konteks jasa ekosistem penyedia serat atau biasa disebut dengan "fiber ecosystem services" mengacu pada kemampuan suatu ekosistem untuk menyediakan bahan serat alami yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Jasa ekosistem ini meliputi bahan berserat yang dihasilkan oleh tanaman atau organisme lain dalam ekosistem dan digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, seperti produksi tekstil dan pakaian, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Contoh bahan berserat termasuk katun, linen, rami, dan banyak serat alami lainnya. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia serat fiber Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 49 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Serat Fiber

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1505,68	142,21	2622,98	2154,87	170,94	6596,67
2	Benjeng	1679,90	462,11	3560,08	563,16		6265,25
3	Bungah	1065,38	6,06	1438,79	1032,26	5226,52	8769,01
4	Cerme	1209,62	314,24	1875,26	590,80	3203,57	7193,49
5	Driyorejo	3151,09	1323,75	685,27	323,09		5483,20
6	Duduksampeyan	927,82	430,21	487,76	794,54	5565,71	8206,04
7	Dukun	2298,85	861,84	1237,90	1664,72	451,59	6514,89
8	Gresik	6,10	45,03	96,59	325,51	307,29	780,52
9	Kebomas	186,11	1038,03	740,83	874,92	643,70	3483,59
10	Kedamean	2268,07	315,81	3320,78	731,89	103,74	6740,30
11	Manyar	45,66	725,65	831,48	1281,63	6659,36	9543,77
12	Menganti	1246,92	815,04	3933,98	1061,82	93,70	7151,46
13	Panceng	3627,34	1737,85	751,27	168,51	168,07	6453,04
14	Sangkapura	3071,09	132,97	8376,92	803,42		12384,40
15	Sidayu	997,96	72,26	1153,61	133,23	2017,40	4374,46
16	Tambak	2508,81	54,88	4088,71	523,65		7176,05
17	Ujungpangkah	3267,94	243,53	1396,56	361,06	5759,68	11028,77
18	Wringinanom	3476,63	1422,98	1012,64	286,55	0,87	6199,68
	Total	32540,95	10144,45	37611,38	13675,64	30372,15	124344,58

Tabel 3. 50 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Serat Fiber

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,21	0,11	2,11	1,73	0,14
2	Benjeng	1,35	0,37	2,86	0,45	0,00
3	Bungah	0,86	0,00	1,16	0,83	4,20
4	Cerme	0,97	0,25	1,51	0,48	2,58
5	Driyorejo	2,53	1,06	0,55	0,26	0,00
6	Duduksampeyan	0,75	0,35	0,39	0,64	4,48
7	Dukun	1,85	0,69	1,00	1,34	0,36
8	Gresik	0,00	0,04	0,08	0,26	0,25
9	Kebomas	0,15	0,83	0,60	0,70	0,52
10	Kedamean	1,82	0,25	2,67	0,59	0,08
11	Manyar	0,04	0,58	0,67	1,03	5,36

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
12	Menganti	1,00	0,66	3,16	0,85	0,08
13	Panceng	2,92	1,40	0,60	0,14	0,14
14	Sangkapura	2,47	0,11	6,74	0,65	0,00
15	Sidayu	0,80	0,06	0,93	0,11	1,62
16	Tambak	2,02	0,04	3,29	0,42	0,00
17	Ujungpangkah	2,63	0,20	1,12	0,29	4,63
18	Wringinanom	2,80	1,14	0,81	0,23	0,00
	Total	26,17	8,16	30,25	11,00	24,43

D. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar

Distribusi daya dukung lingkungan dalam konteks jasa ekosistem penyedia bahan bakar mengacu pada cara ekosistem berkontribusi dalam menyediakan sumber daya alami yang dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh manusia. Jasa ekosistem semacam ini melibatkan bahan bakar alami seperti kayu bakar, biomassa, dan bahan-bahan organik lain yang dapat diolah menjadi energi. Kabupaten Gresiksebagai salah satu ecoregion penyedia bahan bakar kayu sebagai salah satu sumber energi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungn. Hal ini dibuktikan dengan penutupan lahan dan karakteristik vegetasi Kabupaten Gresik. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia bahan bakar Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 51 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	27,98	1454,94	2180,74	2315,18	617,83	6596,67
2	Benjeng	21,26	1570,58	3321,48	807,40	544,53	6265,25
3	Bungah		1003,69	1177,31	2421,09	4166,92	8769,01
4	Cerme	35,24	1181,40	1871,95	376,69	3728,20	7193,49
5	Driyorejo	341,37	2321,05	2337,95	473,96	8,87	5483,20
6	Duduksampeyan	2,13	809,56	644,81	893,08	5856,45	8206,04
7	Dukun	1,71	1522,81	1859,87	1016,41	2114,09	6514,89
8	Gresik		25,02	23,45	421,32	310,72	780,52
9	Kebomas		645,62	665,53	1244,78	927,65	3483,59
10	Kedamean	174,49	1985,11	3842,32	405,75	332,63	6740,30
11	Manyar		338,63	902,49	946,07	7356,59	9543,77
12	Menganti	479,05	802,96	4659,47	846,48	363,50	7151,46
13	Panceng	753,18	4357,24	739,12	213,49	390,02	6453,04
14	Sangkapura	3063,84	5897,84	2583,92	838,81		12384,40
15	Sidayu	0,88	831,99	669,19	2112,57	759,82	4374,46
16	Tambak	2302,75	2446,63	2051,48	375,19		7176,05
17	Ujungpangkah	27,29	2408,12	1893,98	3360,43	3338,95	11028,77
18	Wringinanom	245,31	3102,19	2546,65	304,65	0,87	6199,68
	Total	7476,46	32705,39	33971,73	19373,36	30817,63	124344,58

Tabel 3. 52 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar

No	Kecamatan	Kelas

		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	0,02	1,17	1,75	1,86	0,50
2	Benjeng	0,02	1,26	2,67	0,65	0,44
3	Bungah	0,00	0,81	0,95	1,95	3,35
4	Cerme	0,03	0,95	1,51	0,30	3,00
5	Driyorejo	0,27	1,87	1,88	0,38	0,01
6	Duduksampeyan	0,00	0,65	0,52	0,72	4,71
7	Dukun	0,00	1,22	1,50	0,82	1,70
8	Gresik	0,00	0,02	0,02	0,34	0,25
9	Kebomas	0,00	0,52	0,54	1,00	0,75
10	Kedamean	0,14	1,60	3,09	0,33	0,27
11	Manyar	0,00	0,27	0,73	0,76	5,92
12	Menganti	0,39	0,65	3,75	0,68	0,29
13	Panceng	0,61	3,50	0,59	0,17	0,31
14	Sangkapura	2,46	4,74	2,08	0,67	0,00
15	Sidayu	0,00	0,67	0,54	1,70	0,61
16	Tambak	1,85	1,97	1,65	0,30	0,00
17	Ujungpangkah	0,02	1,94	1,52	2,70	2,69
18	Wringinanom	0,20	2,49	2,05	0,25	0,00
	Total	6,01	26,30	27,32	15,58	24,78

E. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Genetik

Distribusi daya dukung lingkungan dalam konteks jasa ekosistem yang menyediakan sumber daya genetik mengacu pada bagaimana ekosistem menyediakan tanaman, hewan, bakteri, dan organisme lain yang informasi genetiknya tersedia bagi mereka. Sumber daya genetik ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan inovasi yang berbeda, seperti varietas tanaman baru yang tahan hama, obat baru atau produk bioteknologi yang berbeda. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 53 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1494,66	182,11	2812,81	1936,40	170,68	6596,67
2	Benjeng	1896,90	268,73	3599,83	499,78		6265,25
3	Bungah	30,20	1087,59	2127,66	5099,81	423,75	8769,01
4	Cerme	1201,99	430,08	5018,55	542,86		7193,49
5	Driyorejo	2775,76	1728,96	966,25	12,23		5483,20
6	Duduksampeyan	958,17	1131,09	5455,49	656,38	4,91	8206,04
7	Dukun	447,44	2541,07	3079,96	446,43		6514,89
8	Gresik		1,81	24,84	132,21	621,66	780,52
9	Kebomas	8,03	289,43	1301,91	1250,88	633,33	3483,59
10	Kedamean	1664,16	981,21	3365,10	626,09	103,74	6740,30
11	Manyar		293,80	2883,08	4884,61	1482,27	9543,77
12	Menganti	1284,11	1187,95	3803,49	803,97	71,95	7151,46
13	Panceng	2622,58	3077,28	218,53	444,66	90,00	6453,04
14	Sangkapura		5790,46	5775,03	818,91		12384,40
15	Sidayu	57,52	1119,26	1613,50	1511,16	73,03	4374,46

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
16	Tambak		3445,07	3206,44	524,54		7176,05
17	Ujungpangkah	1307,04	2343,04	2435,51	4514,88	428,29	11028,77
18	Wringinanom	3282,44	1859,87	974,59	82,78		6199,68
	Total	19031,00	27758,83	48662,55	24788,59	4103,61	124344,58

Tabel 3. 54 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,20	0,15	2,26	1,56	0,14
2	Benjeng	1,53	0,22	2,90	0,40	0,00
3	Bungah	0,02	0,87	1,71	4,10	0,34
4	Cerme	0,97	0,35	4,04	0,44	0,00
5	Driyorejo	2,23	1,39	0,78	0,01	0,00
6	Duduksampeyan	0,77	0,91	4,39	0,53	0,00
7	Dukun	0,36	2,04	2,48	0,36	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,02	0,11	0,50
9	Kebomas	0,01	0,23	1,05	1,01	0,51
10	Kedamean	1,34	0,79	2,71	0,50	0,08
11	Manyar	0,00	0,24	2,32	3,93	1,19
12	Menganti	1,03	0,96	3,06	0,65	0,06
13	Panceng	2,11	2,47	0,18	0,36	0,07
14	Sangkapura	0,00	4,66	4,64	0,66	0,00
15	Sidayu	0,05	0,90	1,30	1,22	0,06
16	Tambak	0,00	2,77	2,58	0,42	0,00
17	Ujungpangkah	1,05	1,88	1,96	3,63	0,34
18	Wringinanom	2,64	1,50	0,78	0,07	0,00
	Total	15,31	22,32	39,14	19,94	3,30

F. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan aliran dan banjir berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah dan infrastruktur alam untuk menyediakan, mengelola, dan melaksanakan siklus hidrologi yang efisien sehingga air dapat dimanfaatkan organisme secara optimal sekaligus meminimalkan bencana akibat tumpahan air. Jasa ekosistem yang mengatur arus dan banjir sangat dipengaruhi oleh siklus hidrologi. Siklus hidrologi (hydrological cycle), adalah pergerakan air di hidrosfer meliputi proses penguapan (evaporation), pendinginan massa udara (kondensasi), pengendapan (precipitation) dan arus.aliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi pembentukan awan hujan, pembentukan dan penguapan presipitasi, transpirasi, dan transpirasi. Perhatikan bahwa siklus hidrologi terjadi di biosfer dan litosfer, yaitu ekosistem perairan meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem laut. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh

keberadaan tata guna lahan dan letak geografis suatu wilayah. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir.

Tabel 3. 55 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1603,29	4564,34	429,04			6596,67
2	Benjeng	2040,26	3734,34	490,65			6265,25
3	Bungah	981,73	1552,22	2897,45	3337,61		8769,01
4	Cerme	1791,20	5058,53	343,76			7193,49
5	Driyorejo	4104,14	1366,83	12,23			5483,20
6	Duduksampeyan	1676,65	6365,44	163,94			8206,04
7	Dukun	316,64	3926,35	2271,90			6514,89
8	Gresik				147,79	632,73	780,52
9	Kebomas	497,88	622,75	16,08	1704,72	642,16	3483,59
10	Kedamean	2060,38	4373,71	306,21			6740,30
11	Manyar	664,73	3826,04	305,49	3733,24	1014,28	9543,77
12	Menganti	2454,96	4464,93	231,57			7151,46
13	Panceng	1331,83	4854,76	266,45			6453,04
14	Sangkapura			5417,03	6591,57	375,80	12384,40
15	Sidayu	849,27	1965,26	1477,21	82,72		4374,46
16	Tambak			3129,97	3720,06	326,02	7176,05
17	Ujungpangkah	402,11	4619,80	3220,33	2786,53		11028,77
18	Wringinanom	5231,20	968,47				6199,68
	Total	26006,27	52263,78	20979,31	22104,23	2990,98	124344,58

Tabel 3. 56 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,29	3,67	0,35	0,00	0,00
2	Benjeng	1,64	3,00	0,39	0,00	0,00
3	Bungah	0,79	1,25	2,33	2,68	0,00
4	Cerme	1,44	4,07	0,28	0,00	0,00
5	Driyorejo	3,30	1,10	0,01	0,00	0,00
6	Duduksampeyan	1,35	5,12	0,13	0,00	0,00
7	Dukun	0,25	3,16	1,83	0,00	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,00	0,12	0,51
9	Kebomas	0,40	0,50	0,01	1,37	0,52
10	Kedamean	1,66	3,52	0,25	0,00	0,00
11	Manyar	0,53	3,08	0,25	3,00	0,82
12	Menganti	1,97	3,59	0,19	0,00	0,00
13	Panceng	1,07	3,90	0,21	0,00	0,00
14	Sangkapura	0,00	0,00	4,36	5,30	0,30
15	Sidayu	0,68	1,58	1,19	0,07	0,00
16	Tambak	0,00	0,00	2,52	2,99	0,26
17	Ujungpangkah	0,32	3,72	2,59	2,24	0,00
18	Wringinanom	4,21	0,78	0,00	0,00	0,00
	Total	20,91	42,03	16,87	17,78	2,41

G. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menujukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatau bencana alam. Persentase Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Gresik disajikan pada tabel dibawah ini.

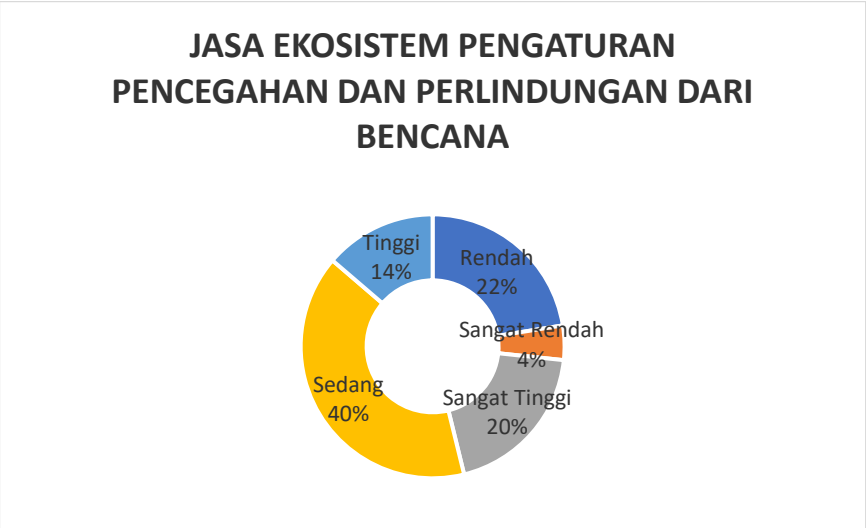
Tabel 3. 57 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	2185,77	213,71	3747,32	449,87		6596,67
2	Benjeng	1993,81	172,60	3595,28	503,56		6265,25
3	Bungah	1,01	940,03	3047,94	4780,03		8769,01
4	Cerme	1310,92	541,67	4909,12	431,79		7193,49
5	Driyorejo	3725,28	1096,35	649,34	12,23		5483,20
6	Duduksampeyan	1382,98	1020,71	5635,30	167,05		8206,04
7	Dukun	0,56	566,52	3493,91	2453,89		6514,89
8	Gresik				34,85	745,66	780,52
9	Kebomas	193,90	281,79	644,95	1023,20	1339,76	3483,59
10	Kedamean	2072,78	347,42	4007,31	312,80		6740,30
11	Manyar	78,78	554,62	3897,96	3623,15	1389,26	9543,77
12	Menganti	4213,44	744,67	1934,91	258,44		7151,46
13	Panceng	783,61	4143,81	1394,64	130,99		6453,04
14	Sangkapura			5231,55	6194,49	958,36	12384,40
15	Sidayu	7,86	836,99	1975,02	1554,58		4374,46
16	Tambak			2925,50	3448,03	802,52	7176,05
17	Ujungpangkah	827,37	4926,13	2720,29	2554,98		11028,77
18	Wringinanom	5448,02	669,49	82,17			6199,68
	Total	24226,07	17056,50	49892,52	27933,93	5235,56	124344,58

Tabel 3. 58 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,76	0,17	3,01	0,36	0,00
2	Benjeng	1,60	0,14	2,89	0,40	0,00
3	Bungah	0,00	0,76	2,45	3,84	0,00
4	Cerme	1,05	0,44	3,95	0,35	0,00
5	Driyorejo	3,00	0,88	0,52	0,01	0,00
6	Duduksampeyan	1,11	0,82	4,53	0,13	0,00
7	Dukun	0,00	0,46	2,81	1,97	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,00	0,03	0,60
9	Kebomas	0,16	0,23	0,52	0,82	1,08

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
10	Kedamean	1,67	0,28	3,22	0,25	0,00
11	Manyar	0,06	0,45	3,13	2,91	1,12
12	Menganti	3,39	0,60	1,56	0,21	0,00
13	Panceng	0,63	3,33	1,12	0,11	0,00
14	Sangkapura	0,00	0,00	4,21	4,98	0,77
15	Sidayu	0,01	0,67	1,59	1,25	0,00
16	Tambak	0,00	0,00	2,35	2,77	0,65
17	Ujungpangkah	0,67	3,96	2,19	2,05	0,00
18	Wringinanom	4,38	0,54	0,07	0,00	0,00
	Total	19,48	13,72	40,12	22,46	4,21



Gambar 3. 14 Presentase Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

H. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan dan Pemurnian Air

Distribusi daya dukung lingkungan dalam konteks jasa ekosistem pengaturan pemurnian air mengacu pada kemampuan ekosistem untuk menjaga kualitas air melalui berbagai proses alami yang menghilangkan polutan, mengendalikan erosi, dan menjaga keseimbangan ekosistem air. Jasa ekosistem semacam ini memiliki peran penting dalam menyediakan air bersih dan sehat bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air.

Tabel 3. 59 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1505,68	2811,70	1784,35	494,93		6596,67
2	Benjeng	1679,90	4055,34	48,58	481,43		6265,25
3	Bungah	939,04	972,84	1534,82	988,10	4334,21	8769,01
4	Cerme	1641,55	5047,01	177,78	327,16		7193,49
5	Driyorejo	488,80	4364,48	621,05	8,87		5483,20
6	Duduksampeyan	1187,04	5684,82	1019,97	314,20		8206,04

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
7	Dukun	115,73	3943,99	184,22	2270,95		6514,89
8	Gresik		8,54	139,17	325,51	307,29	780,52
9	Kebomas	497,88	842,77	1420,59	628,13	94,22	3483,59
10	Kedamean	268,13	5568,30	507,73	396,14		6740,30
11	Manyar	594,17	2589,75	1813,88	802,95	3743,02	9543,77
12	Menganti	1129,62	4981,65	506,75	533,44		7151,46
13	Panceng	2683,19	3317,49	346,92	105,44		6453,04
14	Sangkapura			6664,43	2770,94	2949,03	12384,40
15	Sidayu	849,27	1779,39	233,88	159,34	1352,58	4374,46
16	Tambak			3814,02	1045,17	2316,86	7176,05
17	Ujungpangkah	425,32	3511,48	346,17	1371,64	5374,15	11028,77
18	Wringinanom	718,10	5017,70	381,98	81,91		6199,68
	Total	14723,43	54497,26	21546,29	13106,26	20471,35	124344,58

Tabel 3. 60 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,21	2,26	1,44	0,40	0,00
2	Benjeng	1,35	3,26	0,04	0,39	0,00
3	Bungah	0,76	0,78	1,23	0,79	3,49
4	Cerme	1,32	4,06	0,14	0,26	0,00
5	Driyorejo	0,39	3,51	0,50	0,01	0,00
6	Duduksampeyan	0,95	4,57	0,82	0,25	0,00
7	Dukun	0,09	3,17	0,15	1,83	0,00
8	Gresik	0,00	0,01	0,11	0,26	0,25
9	Kebomas	0,40	0,68	1,14	0,51	0,08
10	Kedamean	0,22	4,48	0,41	0,32	0,00
11	Manyar	0,48	2,08	1,46	0,65	3,01
12	Menganti	0,91	4,01	0,41	0,43	0,00
13	Panceng	2,16	2,67	0,28	0,08	0,00
14	Sangkapura	0,00	0,00	5,36	2,23	2,37
15	Sidayu	0,68	1,43	0,19	0,13	1,09
16	Tambak	0,00	0,00	3,07	0,84	1,86
17	Ujungpangkah	0,34	2,82	0,28	1,10	4,32
18	Wringinanom	0,58	4,04	0,31	0,07	0,00
	Total	11,84	43,83	17,33	10,54	16,46

I. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah

Jasa ekosistem untuk pengolahan dan pembuangan limbah mencakup kemampuan kawasan untuk menetralkan, menguraikan, dan menyerap limbah dan limbah. Dalam kapasitas terbatas, ekosistem mampu menetralkan bahan organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan mikroorganisme (aerobik) yang mampu menguraikan zat organik dalam limbah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak mencemari lingkungan. Mikroorganisme aerobik disediakan oleh ekosistem dan terlibat dalam netralisasi,

penguraian dan penyerapan limbah dan limbah, termasuk bakteri, jamur, protozoa, dan alga. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah.

Tabel 3. 61 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	2119,07	173,53	1687,03	2320,69	296,35	6596,67
2	Benjeng	1594,49	522,36	43,78	3575,33	529,28	6265,25
3	Bungah			16,37	2591,67	6160,97	8769,01
4	Cerme	1114,20	272,70	236,80	1997,91	3571,87	7193,49
5	Driyorejo	313,13	3469,89	1165,75	525,56	8,87	5483,20
6	Duduksampeyan	854,30	896,96	472,83	152,41	5829,53	8206,04
7	Dukun		83,84	523,33	2983,71	2924,01	6514,89
8	Gresik		38,11	185,61	428,62	128,17	780,52
9	Kebomas		4,71	1125,07	1405,35	948,46	3483,59
10	Kedamean	292,74	1664,19	765,94	3811,31	206,13	6740,30
11	Manyar		31,38	781,97	918,10	7812,32	9543,77
12	Menganti	2954,53	1346,33	863,77	1770,33	216,51	7151,46
13	Panceng	2387,59	390,54	1825,75	1546,63	302,53	6453,04
14	Sangkapura		2724,28	6616,00	1933,85	1110,27	12384,40
15	Sidayu		146,79	6,76	1982,29	2238,61	4374,46
16	Tambak		832,31	3754,23	1427,49	1162,02	7176,05
17	Ujungpangkah	22,52	116,90	1182,74	2839,66	6866,95	11028,77
18	Wringinanom	1554,41	3809,21	753,00	82,18	0,87	6199,68
	Total	13206,99	16524,01	22006,76	32293,09	40313,73	124344,58

Tabel 3. 62 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,70	0,14	1,36	1,87	0,24
2	Benjeng	1,28	0,42	0,04	2,88	0,43
3	Bungah	0,00	0,00	0,01	2,08	4,95
4	Cerme	0,90	0,22	0,19	1,61	2,87
5	Driyorejo	0,25	2,79	0,94	0,42	0,01
6	Duduksampeyan	0,69	0,72	0,38	0,12	4,69
7	Dukun	0,00	0,07	0,42	2,40	2,35
8	Gresik	0,00	0,03	0,15	0,34	0,10
9	Kebomas	0,00	0,00	0,90	1,13	0,76
10	Kedamean	0,24	1,34	0,62	3,07	0,17
11	Manyar	0,00	0,03	0,63	0,74	6,28
12	Menganti	2,38	1,08	0,69	1,42	0,17
13	Panceng	1,92	0,31	1,47	1,24	0,24
14	Sangkapura	0,00	2,19	5,32	1,56	0,89
15	Sidayu	0,00	0,12	0,01	1,59	1,80
16	Tambak	0,00	0,67	3,02	1,15	0,93
17	Ujungpangkah	0,02	0,09	0,95	2,28	5,52
18	Wringinanom	1,25	3,06	0,61	0,07	0,00
	Total	10,62	13,29	17,70	25,97	32,42

J. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Daya dukung lingkungan pengaturan kualitas udara apabila vegetasi masih berupa hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Pada wilayah non vegetasi sudah berupa tanah terbuka atau pemukiman memilki jasa pengaturan kualitas udara sangat rendah. Kualitas udara yang baik juga dipengaruhi oleh besaran luas ruang terbuka hijau. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah perkotaan. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang di kawasan perkotaan Kabupaten Gresik.

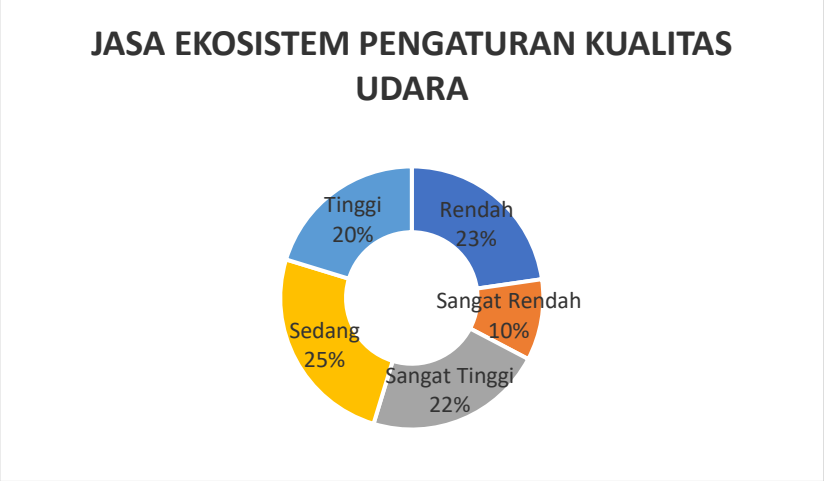
Tabel 3. 63 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1465,38	476,73	4086,28	109,68	458,60	6596,67
2	Benjeng	1591,79	714,70	3413,75	38,81	506,19	6265,25
3	Bungah	96,12	1553,21	1476,55	1999,05	3644,08	8769,01
4	Cerme	1139,04	550,26	1750,04	3388,68	365,46	7193,49
5	Driyorejo	592,36	2510,37	2027,49	344,11	8,87	5483,20
6	Duduksampeyan	801,67	126,91	1212,18	5805,24	260,02	8206,04
7	Dukun	1359,66	1079,15	1701,30	1988,86	385,91	6514,89
8	Gresik	28,05	20,42	88,24	333,01	310,80	780,52
9	Kebomas	946,21	345,35	635,75	1178,33	377,96	3483,59
10	Kedamean	539,45	2478,67	3272,17	122,31	327,70	6740,30
11	Manyar	443,23	706,94	475,69	3948,72	3969,19	9543,77
12	Menganti	1031,25	1092,51	4288,11	498,01	241,58	7151,46
13	Panceng	3940,13	1558,58	308,10	556,52	89,72	6453,04
14	Sangkapura	5355,43	4943,49	1707,36	378,13		12384,40
15	Sidayu	645,05	610,01	916,73	1959,03	243,63	4374,46
16	Tambak	3067,65	2641,95	1137,03	329,41		7176,05
17	Ujungpangkah	2495,73	1434,40	904,75	4986,40	1207,49	11028,77
18	Wringinanom	1828,70	2361,85	1723,51	284,75	0,87	6199,68
	Total	27366,90	25205,52	31125,04	28249,06	12398,06	124344,58

Tabel 3. 64 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,18	0,38	3,29	0,09	0,37
2	Benjeng	1,28	0,57	2,75	0,03	0,41

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
3	Bungah	0,08	1,25	1,19	1,61	2,93
4	Cerme	0,92	0,44	1,41	2,73	0,29
5	Driyorejo	0,48	2,02	1,63	0,28	0,01
6	Duduksampeyan	0,64	0,10	0,97	4,67	0,21
7	Dukun	1,09	0,87	1,37	1,60	0,31
8	Gresik	0,02	0,02	0,07	0,27	0,25
9	Kebomas	0,76	0,28	0,51	0,95	0,30
10	Kedamean	0,43	1,99	2,63	0,10	0,26
11	Manyar	0,36	0,57	0,38	3,18	3,19
12	Menganti	0,83	0,88	3,45	0,40	0,19
13	Panceng	3,17	1,25	0,25	0,45	0,07
14	Sangkapura	4,31	3,98	1,37	0,30	0,00
15	Sidayu	0,52	0,49	0,74	1,58	0,20
16	Tambak	2,47	2,12	0,91	0,26	0,00
17	Ujungpangkah	2,01	1,15	0,73	4,01	0,97
18	Wringinanom	1,47	1,90	1,39	0,23	0,00
	Total	22,01	20,27	25,03	22,72	9,97



Gambar 3. 15 Presentase Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

K. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami

Penyerbukan alami adalah proses penyerbukan (pergerakan serbuk sari dari antera ke kepala putik) yang terjadi secara khusus di dalam bunga yang sama atau di antara bunga yang berbeda tetapi di dalam tumbuhan yang sama atau di antara bunga pada klon tumbuhan yang sama. Ekosistem menyediakan layanan kontrol penyerbukan alami, khususnya dengan menyediakan habitat bagi spesies yang dapat mendukung penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan area bervegetasi seringkali menyediakan lingkungan yang lebih kaya bagi penyerbuk. Penyerbukan alami dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk angin, hewan, air, dan manusia. berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 65 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1467,86	461,94	4113,49	76,02	477,36	6596,67
2	Benjeng	1593,57	463,59	3660,18	18,63	529,28	6265,25
3	Bungah	5,76	1550,79	1559,49	1077,29	4575,68	8769,01
4	Cerme	1192,88	369,73	1998,64	3277,76	354,48	7193,49
5	Driyorejo	602,83	2497,48	1695,75	678,27	8,87	5483,20
6	Duduksampeyan	852,97	58,52	1046,55	5710,35	537,64	8206,04
7	Dukun	1,71	1579,39	2007,56	1326,17	1600,05	6514,89
8	Gresik	28,05	108,66		336,52	307,29	780,52
9	Kebomas	974,57	785,07	193,36	1406,55	124,05	3483,59
10	Kedamean	369,27	2351,37	3479,75	212,22	327,70	6740,30
11	Manyar	578,22	762,61	348,45	3203,46	4651,04	9543,77
12	Menganti	1042,80	1079,79	4291,58	426,99	310,30	7151,46
13	Panceng	1875,57	2929,13	1177,89	238,19	232,27	6453,04
14	Sangkapura	3090,08	6390,38	831,61	1696,53	375,81	12384,40
15	Sidayu	0,88	1055,58	1136,81	747,07	1434,11	4374,46
16	Tambak	2309,53	2537,90	862,17	1137,88	328,56	7176,05
17	Ujungpangkah	245,58	2792,32	1780,59	1712,80	4497,47	11028,77
18	Wringinanom	1753,86	2432,59	1523,54	489,70		6199,68
	Total	17985,98	30206,83	31707,41	23772,40	20671,96	124344,58

Tabel 3. 66 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,18	0,37	3,31	0,06	0,38
2	Benjeng	1,28	0,37	2,94	0,01	0,43
3	Bungah	0,00	1,25	1,25	0,87	3,68
4	Cerme	0,96	0,30	1,61	2,64	0,29
5	Driyorejo	0,48	2,01	1,36	0,55	0,01
6	Duduksampeyan	0,69	0,05	0,84	4,59	0,43
7	Dukun	0,00	1,27	1,61	1,07	1,29
8	Gresik	0,02	0,09	0,00	0,27	0,25
9	Kebomas	0,78	0,63	0,16	1,13	0,10
10	Kedamean	0,30	1,89	2,80	0,17	0,26
11	Manyar	0,47	0,61	0,28	2,58	3,74
12	Menganti	0,84	0,87	3,45	0,34	0,25
13	Panceng	1,51	2,36	0,95	0,19	0,19
14	Sangkapura	2,49	5,14	0,67	1,36	0,30
15	Sidayu	0,00	0,85	0,91	0,60	1,15
16	Tambak	1,86	2,04	0,69	0,92	0,26
17	Ujungpangkah	0,20	2,25	1,43	1,38	3,62
18	Wringinanom	1,41	1,96	1,23	0,39	0,00
	Total	14,46	24,29	25,50	19,12	16,62

L. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia,

ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit. Pengendalian hama dapat berupa pengendalian ekosistem hutan. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan pengendalian hama dan penyakit Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 67 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1505,68	2679,96	1889,56	27,05	494,42	6596,67
2	Benjeng	1679,90	3918,54	167,93	21,23	477,65	6265,25
3	Bungah	5,76	2258,31	924,60	1949,35	3631,00	8769,01
4	Cerme	1275,56	1931,87	425,07	3220,72	340,27	7193,49
5	Driyorejo	2594,03	2130,78	435,30	314,22	8,87	5483,20
6	Duduksampeyan	927,82	576,35	767,18	5679,34	255,35	8206,04
7	Dukun	397,00	3160,33	713,65	1860,31	383,60	6514,89
8	Gresik	1,81	141,62	0,00	329,79	307,29	780,52
9	Kebomas	265,71	1845,01	59,47	1149,65	163,75	3483,59
10	Kedamean	1715,00	4050,93	567,63	8,77	397,98	6740,30
11	Manyar	252,98	1261,63	256,58	4213,73	3558,85	9543,77
12	Menganti	1244,61	4636,74	644,19	165,31	460,61	7151,46
13	Panceng	3542,38	2079,62	355,52	385,52	90,00	6453,04
14	Sangkapura	3090,08	3600,59	2851,39	2296,22	546,12	12384,40
15	Sidayu	5,88	2110,22	106,60	1917,13	234,62	4374,46
16	Tambak	2309,53	1511,27	1086,43	1650,94	617,88	7176,05
17	Ujungpangkah	1386,63	3033,27	1774,95	3632,80	1201,12	11028,77
18	Wringinanom	3108,82	2491,36	314,38	202,34	82,78	6199,68
	Total	25309,17	43418,41	13340,42	29024,44	13252,14	124344,58

Tabel 3. 68 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,21	2,16	1,52	0,02	0,40
2	Benjeng	1,35	3,15	0,14	0,02	0,38
3	Bungah	0,00	1,82	0,74	1,57	2,92
4	Cerme	1,03	1,55	0,34	2,59	0,27
5	Driyorejo	2,09	1,71	0,35	0,25	0,01
6	Duduksampeyan	0,75	0,46	0,62	4,57	0,21
7	Dukun	0,32	2,54	0,57	1,50	0,31
8	Gresik	0,00	0,11	0,00	0,27	0,25
9	Kebomas	0,21	1,48	0,05	0,92	0,13
10	Kedamean	1,38	3,26	0,46	0,01	0,32
11	Manyar	0,20	1,01	0,21	3,39	2,86
12	Menganti	1,00	3,73	0,52	0,13	0,37
13	Panceng	2,85	1,67	0,29	0,31	0,07
14	Sangkapura	2,49	2,90	2,29	1,85	0,44
15	Sidayu	0,00	1,70	0,09	1,54	0,19

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
16	Tambak	1,86	1,22	0,87	1,33	0,50
17	Ujungpangkah	1,12	2,44	1,43	2,92	0,97
18	Wringinanom	2,50	2,00	0,25	0,16	0,07
	Total	20,35	34,92	10,73	23,34	10,66

M. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Tempat tinggal berupa lingkungan fisik sekitarnya dan rumah sebagai tempat tinggal, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan keluarga.

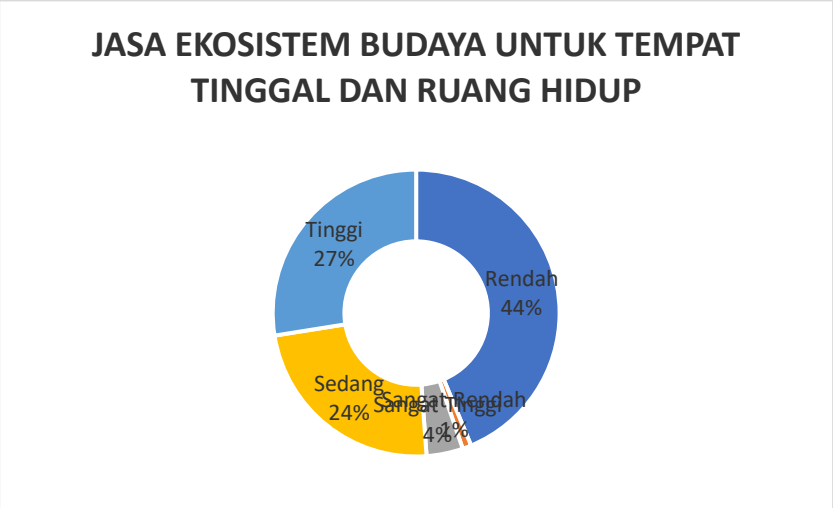
Di Kabupaten Gresik penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas dua jenis, yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Luas penggunaan lahan permukiman total di Kabupaten Gresik tahun 2030 adalah 25.953.39 ha atau 21,78% dari seluruh lahan. Permukiman skala besar terkonsentrasi di Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Cerme sekitar 3.000 – 4.000 ha.

Tabel 3. 69 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang		524,95	3815,20	2218,46	38,05	6596,67
2	Benjeng		646,26	3534,34	1761,42	323,22	6265,25
3	Bungah	284,71	3247,41	468,89	4768,01		8769,01
4	Cerme	244,81	3714,10	1718,73	1375,16	140,70	7193,49
5	Driyorejo		19,90	1368,71	4010,68	83,91	5483,20
6	Duduksampeyan	122,74	5693,23	174,63	1688,13	527,30	8206,04
7	Dukun	69,65	2350,11	1997,94	2097,19		6514,89
8	Gresik	636,06	144,46				780,52
9	Kebomas	1230,00	2206,21	28,14	19,24		3483,59
10	Kedamean		829,07	3752,54	2126,34	32,35	6740,30
11	Manyar	905,03	5232,09	381,72	3024,93		9543,77
12	Menganti	52,75	425,09	2260,19	4346,00	67,43	7151,46
13	Panceng	848,32	4363,17	1049,08	192,47		6453,04
14	Sangkapura			4076,89	8307,52		12384,40
15	Sidayu	324,67	1868,95	763,21	1417,62		4374,46
16	Tambak			2118,70	5057,34		7176,05
17	Ujungpangkah	386,18	2871,14	1309,23	6462,21		11028,77
18	Wringinanom	0,00	77,83	580,23	5514,64	26,98	6199,68
	Total	**5104,93**	**34213,96**	**29398,37**	**54387,37**	**1239,94**	**124344,58**

Tabel 3. 70 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	0	0,42	3,07	1,78	0,03
2	Benjeng	0	0,52	2,84	1,42	0,26
3	Bungah	0,23	2,61	0,38	3,83	0,00
4	Cerme	0,20	2,99	1,38	1,11	0,11
5	Driyorejo	0,00	0,02	1,10	3,23	0,07
6	Duduksampeyan	0,10	4,58	0,14	1,36	0,42
7	Dukun	0,06	1,89	1,61	1,69	0,00
8	Gresik	0,51	0,12	0,00	0,00	0,00
9	Kebomas	0,99	1,77	0,02	0,02	0,00
10	Kedamean	0,00	0,67	3,02	1,71	0,03
11	Manyar	0,73	4,21	0,31	2,43	0,00
12	Menganti	0,04	0,34	1,82	3,50	0,05
13	Panceng	0,68	3,51	0,84	0,15	0,00
14	Sangkapura	0,00	0,00	3,28	6,68	0,00
15	Sidayu	0,26	1,50	0,61	1,14	0,00
16	Tambak	0,00	0,00	1,70	4,07	0,00
17	Ujungpangkah	0,31	2,31	1,05	5,20	0,00
18	Wringinanom	0,00	0,06	0,47	4,43	0,02
	Total	4,11	27,52	23,64	43,74	1,00



Gambar 3. 16 Prosentase Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

N. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ecotourism

Ekowisata adalah salah satu kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek pelestarian alam, aspek pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat setempat serta aspek pembelajaran pendidikan. Ekowisata dimulai ketika ada dampak negatif yang dirasakan pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini tidak hanya diakui dan dibuktikan oleh para ahli lingkungan tetapi juga oleh para budayawan, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan pariwisata itu sendiri. Dampak yang datang

berupa perusakan lingkungan, pengaruh budaya lokal yang tidak terkendali, berkurangnya peran masyarakat lokal dan persaingan usaha mulai mengancam lingkungan, budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya ekowisata.

Tabel 3. 71 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Ekowisata

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	2183,35	517,90	3480,44	414,99		6596,67
2	Benjeng	2011,35	430,04	3356,30	467,56		6265,25
3	Bungah	60,33	2018,09	405,86	5808,21	476,51	8769,01
4	Cerme	1481,64	3704,80	1797,49	209,56		7193,49
5	Driyorejo	4075,95	803,39	591,63	12,23		5483,20
6	Duduksampeyan	2267,50	5649,18	285,61	3,75		8206,04
7	Dukun	26,83	743,27	5239,22	505,56		6514,89
8	Gresik			6,73	355,25	418,54	780,52
9	Kebomas	223,81	828,81	142,61	1461,94	826,43	3483,59
10	Kedamean	2091,68	682,82	3659,59	306,21		6740,30
11	Manyar	247,45	3957,63	345,03	4065,51	928,16	9543,77
12	Menganti	4268,25	888,70	1834,05	160,45		7151,46
13	Panceng	178,22	1701,59	3780,33	792,91		6453,04
14	Sangkapura	8688,69	3695,72				12384,40
15	Sidayu	69,44	1567,89	1148,51	1557,65	30,97	4374,46
16	Tambak	5534,09	1641,95				7176,05
17	Ujungpangkah	598,31	4239,23	3560,76	2614,26	16,21	11028,77
18	Wringinanom	5466,22	652,40	81,06			6199,68
	Total	39473,10	33723,41	29715,22	18736,04	2696,81	124344,58

Tabel 3. 72 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Ekowisata

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,76	0,42	2,80	0,33	0,00
2	Benjeng	1,62	0,35	2,70	0,38	0,00
3	Bungah	0,05	1,62	0,33	4,67	0,38
4	Cerme	1,19	2,98	1,45	0,17	0,00
5	Driyorejo	3,28	0,65	0,48	0,01	0,00
6	Duduksampeyan	1,82	4,54	0,23	0,00	0,00
7	Dukun	0,02	0,60	4,21	0,41	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,01	0,29	0,34
9	Kebomas	0,18	0,67	0,11	1,18	0,66
10	Kedamean	1,68	0,55	2,94	0,25	0,00
11	Manyar	0,20	3,18	0,28	3,27	0,75
12	Menganti	3,43	0,71	1,47	0,13	0,00
13	Panceng	0,14	1,37	3,04	0,64	0,00
14	Sangkapura	6,99	2,97	0,00	0,00	0,00
15	Sidayu	0,06	1,26	0,92	1,25	0,02
16	Tambak	4,45	1,32	0,00	0,00	0,00
17	Ujungpangkah	0,48	3,41	2,86	2,10	0,01
18	Wringinanom	4,40	0,52	0,07	0,00	0,00
	Total	31,74	27,12	23,90	15,07	2,17

O. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika

Estetika keindahan didapatkan dari perpaduan berbagai bentang alam yang masing-masing memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Daya tarik estetika keindahan alam ini tergantung pada kondisinya saat ini, baik rusak atau rusak parah. Ekosistem memiliki fungsi budaya berupa estetika alam seperti laut, gunung, lembah, pantai, dan lain sebagainya. Perpaduan lanskap alam dan lanskap budaya semakin meningkatkan keindahan dan nilai estetika yang dibawa oleh ekosistem. Berikut merupakan profil distribusi daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya estetika alam Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 73 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	79,84	2137,23	3949,98	429,61		6596,67
2	Benjeng	84,31	1957,92	3738,48	484,53		6265,25
3	Bungah	1,01	59,32	1871,28	6158,37	679,03	8769,01
4	Cerme	92,33	1410,31	5474,97	215,88		7193,49
5	Driyorejo	861,00	3217,34	1392,63	12,23		5483,20
6	Duduksampeyan	303,34	1964,16	5932,12	6,42		8206,04
7	Dukun	0,56	94,68	5781,59	638,06		6514,89
8	Gresik				361,98	418,54	780,52
9	Kebomas	190,65	33,16	893,65	1524,60	841,53	3483,59
10	Kedamean	322,14	1833,88	4275,40	308,88		6740,30
11	Manyar	84,09	163,36	3922,18	4320,75	1053,40	9543,77
12	Menganti	998,92	3343,27	2642,48	166,79		7151,46
13	Panceng	10,82	697,67	4951,64	792,91		6453,04
14	Sangkapura	5867,53	2836,54	3680,33			12384,40
15	Sidayu	7,86	61,58	2649,15	1578,46	77,41	4374,46
16	Tambak	3505,72	2036,33	1633,99			7176,05
17	Ujungpangkah	547,57	79,81	7611,67	2678,73	110,98	11028,77
18	Wringinanom	603,87	4862,35	733,46			6199,68
	Total	13561,58	26788,92	61135,00	19678,19	3180,89	124344,58

Tabel 3. 74 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	0,06	1,72	3,18	0,35	0,00
2	Benjeng	0,07	1,57	3,01	0,39	0,00
3	Bungah	0,00	0,05	1,50	4,95	0,55
4	Cerme	0,07	1,13	4,40	0,17	0,00
5	Driyorejo	0,69	2,59	1,12	0,01	0,00
6	Duduksampeyan	0,24	1,58	4,77	0,01	0,00
7	Dukun	0,00	0,08	4,65	0,51	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,00	0,29	0,34
9	Kebomas	0,15	0,03	0,72	1,23	0,68
10	Kedamean	0,26	1,47	3,44	0,25	0,00
11	Manyar	0,07	0,13	3,15	3,47	0,85
12	Menganti	0,80	2,69	2,13	0,13	0,00
13	Panceng	0,01	0,56	3,98	0,64	0,00

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
14	Sangkapura	4,72	2,28	2,96	0,00	0,00
15	Sidayu	0,01	0,05	2,13	1,27	0,06
16	Tambak	2,82	1,64	1,31	0,00	0,00
17	Ujungpangkah	0,44	0,06	6,12	2,15	0,09
18	Wringinanom	0,49	3,91	0,59	0,00	0,00
	Total	10,91	21,54	49,17	15,83	2,56

P. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah

Suatu tanah dikatakan subur jika mengandung unsur hara yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kandungan unsur hara yang cukup dalam tanah akan mendukung pertumbuhan tanaman sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pendukung kesuburan tanah Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 75 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Kesuburan Tanah

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	4951,29	905,68	359,30	380,39		6596,67
2	Benjeng	5135,99	140,82	542,58	445,86		6265,25
3	Bungah	963,73	1073,91	717,24	2700,24	3313,89	8769,01
4	Cerme	2886,00	3656,11	378,78	272,59		7193,49
5	Driyorejo	834,88	3170,63	675,55	802,14		5483,20
6	Duduksampeyan	948,50	6331,41	226,39	699,74		8206,04
7	Dukun	2024,94	1624,30	1993,84	871,80		6514,89
8	Gresik			3,43	175,90	601,18	780,52
9	Kebomas	303,73	813,73	209,86	1488,79	667,49	3483,59
10	Kedamean	3722,62	1962,63	644,03	411,03		6740,30
11	Manyar	518,33	3662,50	176,22	1578,94	3607,77	9543,77
12	Menganti	2408,44	3380,12	655,18	707,71		7151,46
13	Panceng	1182,83	2813,59	2106,06	350,55	0,01	6453,04
14	Sangkapura			1387,60	9828,50	1168,30	12384,40
15	Sidayu	1479,79	1193,62	140,52	1502,71	57,82	4374,46
16	Tambak			947,46	5300,94	927,64	7176,05
17	Ujungpangkah	1513,37	5572,05	1373,05	1690,60	879,70	11028,77
18	Wringinanom	596,21	3168,03	1833,44	601,99		6199,68
	Total	29470,67	39469,13	14370,55	29810,43	11223,80	124344,58

Tabel 3. 76 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Kesuburan Tanah

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	3,98	0,73	0,29	0,31	0,00
2	Benjeng	4,13	0,11	0,44	0,36	0,00
3	Bungah	0,78	0,86	0,58	2,17	2,67
4	Cerme	2,32	2,94	0,30	0,22	0,00
5	Driyorejo	0,67	2,55	0,54	0,65	0,00
6	Duduksampeyan	0,76	5,09	0,18	0,56	0,00

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
7	Dukun	1,63	1,31	1,60	0,70	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,00	0,14	0,48
9	Kebomas	0,24	0,65	0,17	1,20	0,54
10	Kedamean	2,99	1,58	0,52	0,33	0,00
11	Manyar	0,42	2,95	0,14	1,27	2,90
12	Menganti	1,94	2,72	0,53	0,57	0,00
13	Panceng	0,95	2,26	1,69	0,28	0,00
14	Sangkapura	0,00	0,00	1,12	7,90	0,94
15	Sidayu	1,19	0,96	0,11	1,21	0,05
16	Tambak	0,00	0,00	0,76	4,26	0,75
17	Ujungpangkah	1,22	4,48	1,10	1,36	0,71
18	Wringinanom	0,48	2,55	1,47	0,48	0,00
	Total	23,70	31,74	11,56	23,97	9,03

Q. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Siklus Hara

Siklus hara (siklus hara tanaman) merujuk pada aliran hara atau nutrien yang terjadi dalam ekosistem melalui tanah, tanaman, hewan, dan kembali ke tanah lagi. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan nutrien di lingkungan dan mendukung pertumbuhan tanaman serta kehidupan lainnya. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pendukung siklus hara.

Tabel 3. 77 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	2111,31	1676,43	2539,93	269,00		6596,67
2	Benjeng	2459,53	2906,50	880,59	18,63		6265,25
3	Bungah	694,33	477,68	1348,78	2544,18	3704,03	8769,01
4	Cerme	1453,12	1834,76	3839,44	66,17		7193,49
5	Driyorejo	423,57	1653,00	2492,78	913,85		5483,20
6	Duduksampeyan	966,65	490,23	5532,82	1065,16	151,17	8206,04
7	Dukun	1119,57	921,27	3564,16	909,89		6514,89
8	Gresik		34,78	108,65	527,61	109,47	780,52
9	Kebomas	407,60	1039,63	1320,63	699,25	16,48	3483,59
10	Kedamean	259,57	3356,63	2624,76	499,34		6740,30
11	Manyar	436,41	579,41	2840,53	2363,48	3323,94	9543,77
12	Menganti	1078,34	2270,48	3292,30	510,34		7151,46
13	Panceng	319,46	2249,98	3332,04	551,56	0,01	6453,04
14	Sangkapura		3415,11	3249,32	5067,14	652,83	12384,40
15	Sidayu	917,12	405,15	1357,45	1619,73	75,00	4374,46
16	Tambak		1309,32	2504,70	2696,10	665,93	7176,05
17	Ujungpangkah	435,62	915,76	2682,61	3495,28	3499,50	11028,77
18	Wringinanom	662,52	1256,55	2386,19	1894,42		6199,68
	Total	13744,70	26792,68	45897,69	25711,14	12198,37	124344,58

Tabel 3. 78 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,70	1,35	2,04	0,22	0,00

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
2	Benjeng	1,98	2,34	0,71	0,01	0,00
3	Bungah	0,56	0,38	1,08	2,05	2,98
4	Cerme	1,17	1,48	3,09	0,05	0,00
5	Driyorejo	0,34	1,33	2,00	0,73	0,00
6	Duduksampeyan	0,78	0,39	4,45	0,86	0,12
7	Dukun	0,90	0,74	2,87	0,73	0,00
8	Gresik	0,00	0,03	0,09	0,42	0,09
9	Kebomas	0,33	0,84	1,06	0,56	0,01
10	Kedamean	0,21	2,70	2,11	0,40	0,00
11	Manyar	0,35	0,47	2,28	1,90	2,67
12	Menganti	0,87	1,83	2,65	0,41	0,00
13	Panceng	0,26	1,81	2,68	0,44	0,00
14	Sangkapura	0,00	2,75	2,61	4,08	0,53
15	Sidayu	0,74	0,33	1,09	1,30	0,06
16	Tambak	0,00	1,05	2,01	2,17	0,54
17	Ujungpangkah	0,35	0,74	2,16	2,81	2,81
18	Wringinanom	0,53	1,01	1,92	1,52	0,00
	Total	11,05	21,55	36,91	20,68	9,81

R. Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Produksi Primer

Produksi primer adalah produksi senyawa organik dari karbon dioksida di udara atau air, terutama melalui fotosintesis dan membutuhkan lebih sedikit sintesis kimia. Hampir semua makhluk hidup di Bumi bergantung secara langsung atau tidak langsung pada produksi primer. Organisme yang melakukan produksi primer disebut produsen primer atau autotrof dan menjadi dasar rantai makanan. Di ekoregion darat, sebagian besar organisme adalah tanaman, sedangkan ekoregion laut didominasi oleh alga. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pendukung primer.

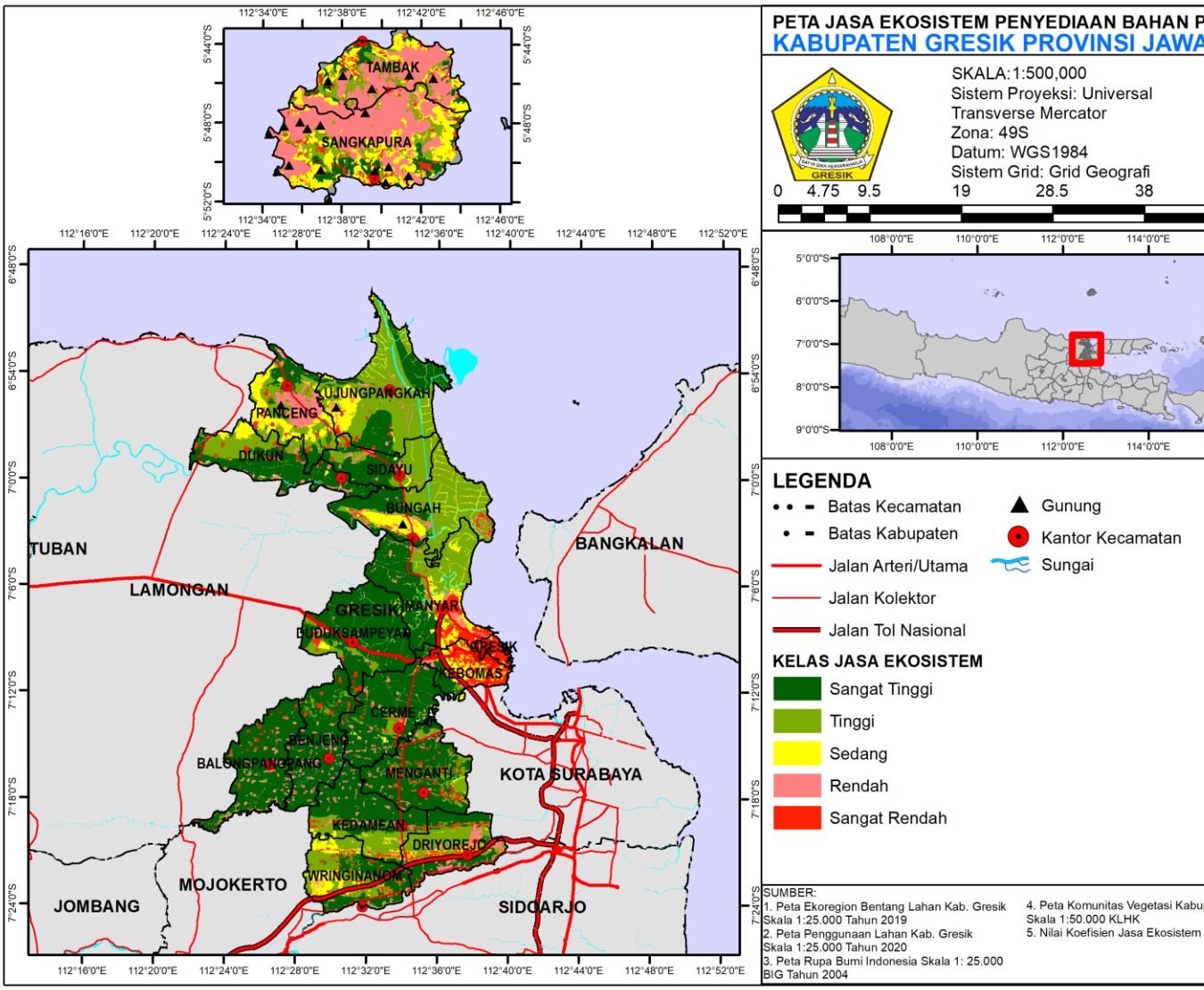
Tabel 3. 79 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Primer

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1663,65	1268,02	3181,17	483,83		6596,67
2	Benjeng	1775,07	1155,71	2805,18	529,28		6265,25
3	Bungah		792,95	222,49	3313,51	4440,06	8769,01
4	Cerme	1222,91	624,01	1782,51	3564,07		7193,49
5	Driyorejo	3890,33	744,24	839,76	8,87		5483,20
6	Duduksampeyan	1293,58	508,25	514,80	5889,40		8206,04
7	Dukun	88,19	3142,16	427,19	2857,35		6514,89
8	Gresik			28,05	445,18	307,29	780,52
9	Kebomas	2,89	251,32	999,57	2114,47	115,34	3483,59
10	Kedamean	1855,25	931,57	3623,47	330,01		6740,30
11	Manyar	56,15	260,00	682,49	5031,55	3513,58	9543,77
12	Menganti	1877,37	2591,27	2346,03	336,79		7151,46
13	Panceng	1982,07	3598,93	566,00	306,04		6453,04
14	Sangkapura		3489,01	5939,09	2580,49	375,81	12384,40
15	Sidayu	146,79	1609,35	298,43	926,94	1392,94	4374,46

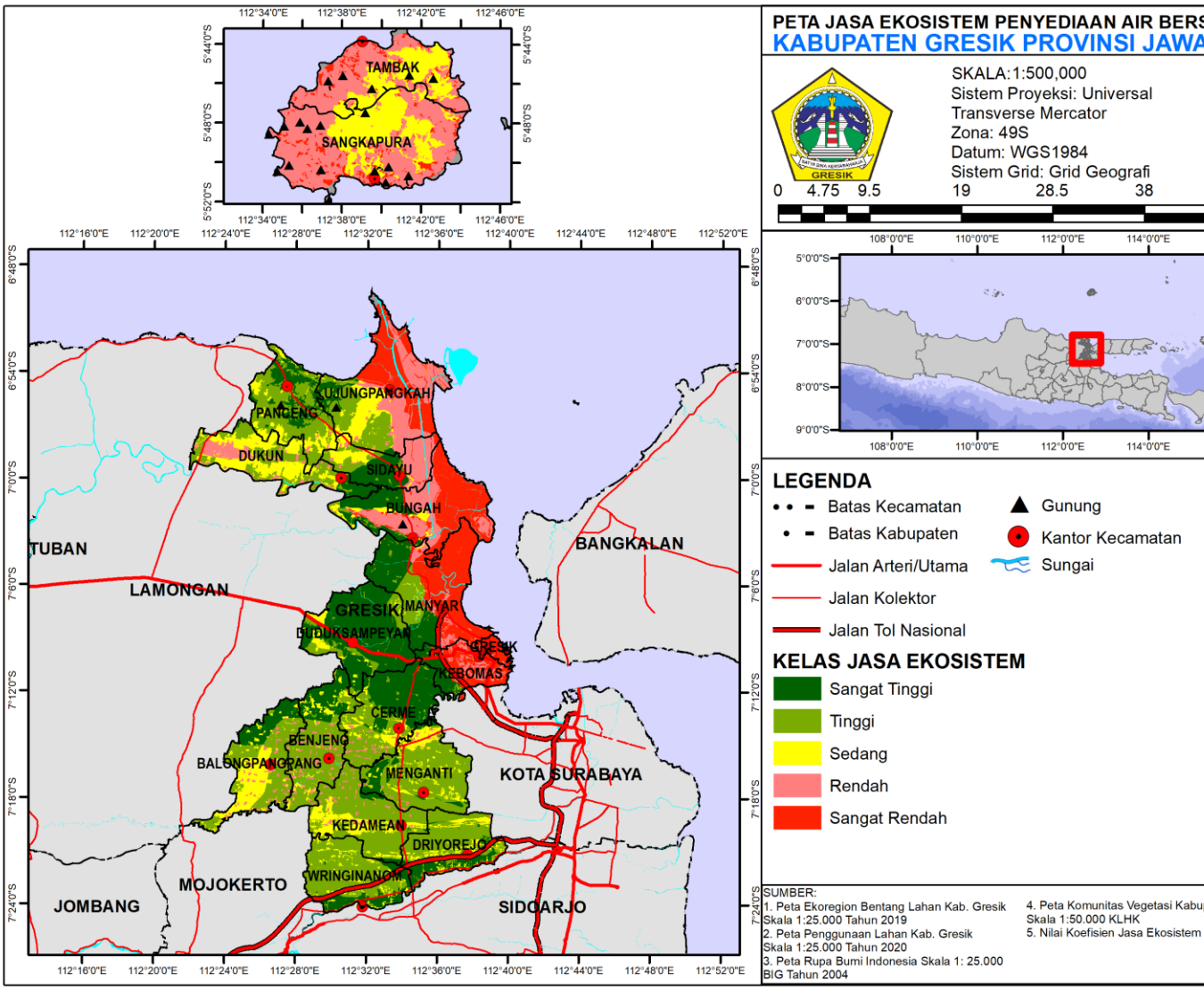
16	Tambak		2359,53	2293,58	2194,37	328,56	7176,05
17	Ujungpangkah	226,72	3999,74	1774,29	2868,17	2159,85	11028,77
18	Wringinanom	4512,97	1401,31	284,53	0,87		6199,68
	Total	20593,94	28727,38	28608,61	33781,21	12633,44	124344,58

Tabel 3. 80 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Primer

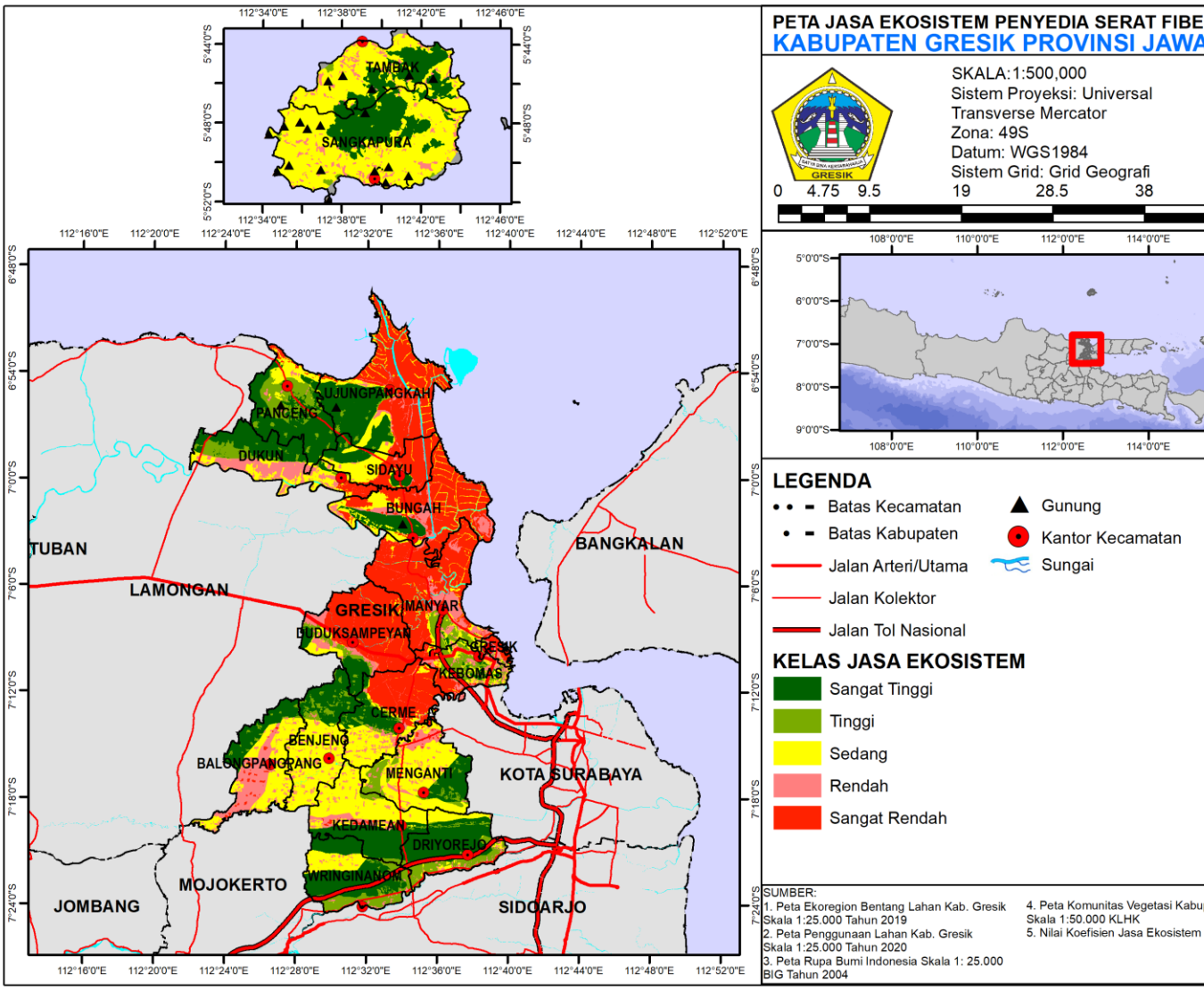
No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	**Tinggi**	**Sedang**	**Rendah**	**Sangat Rendah**
1	Balongpangpang	1,34	1,02	2,56	0,39	0,00
2	Benjeng	1,43	0,93	2,26	0,43	0,00
3	Bungah	0,00	0,64	0,18	2,66	3,57
4	Cerme	0,98	0,50	1,43	2,87	0,00
5	Driyorejo	3,13	0,60	0,68	0,01	0,00
6	Duduksampeyan	1,04	0,41	0,41	4,74	0,00
7	Dukun	0,07	2,53	0,34	2,30	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,02	0,36	0,25
9	Kebomas	0,00	0,20	0,80	1,70	0,09
10	Kedamean	1,49	0,75	2,91	0,27	0,00
11	Manyar	0,05	0,21	0,55	4,05	2,83
12	Menganti	1,51	2,08	1,89	0,27	0,00
13	Panceng	1,59	2,89	0,46	0,25	0,00
14	Sangkapura	0,00	2,81	4,78	2,08	0,30
15	Sidayu	0,12	1,29	0,24	0,75	1,12
16	Tambak	0,00	1,90	1,84	1,76	0,26
17	Ujungpangkah	0,18	3,22	1,43	2,31	1,74
18	Wringinanom	3,63	1,13	0,23	0,00	0,00
	Total	16,56	23,10	23,01	27,17	10,16



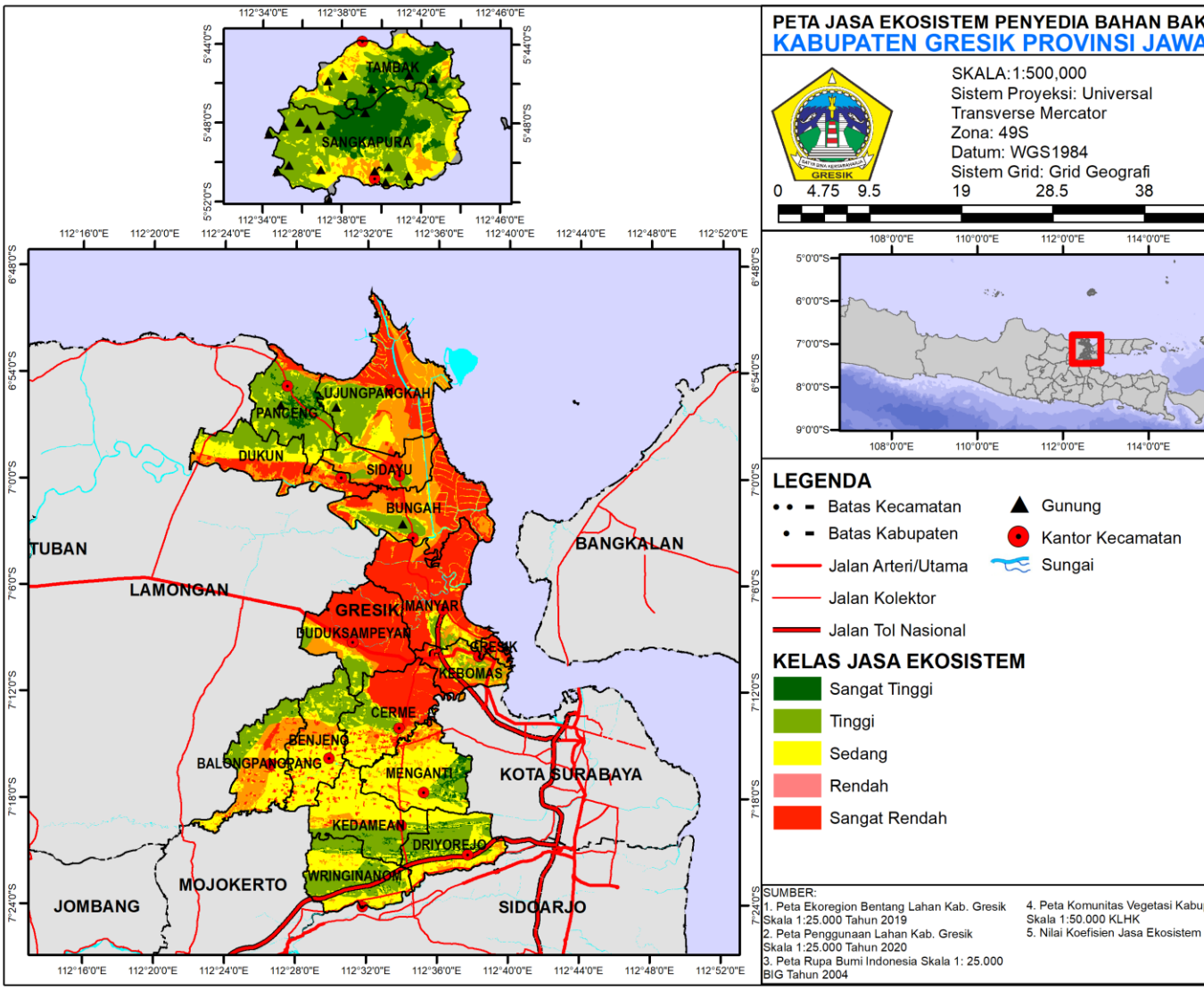
Gambar 4. 3 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Pangan



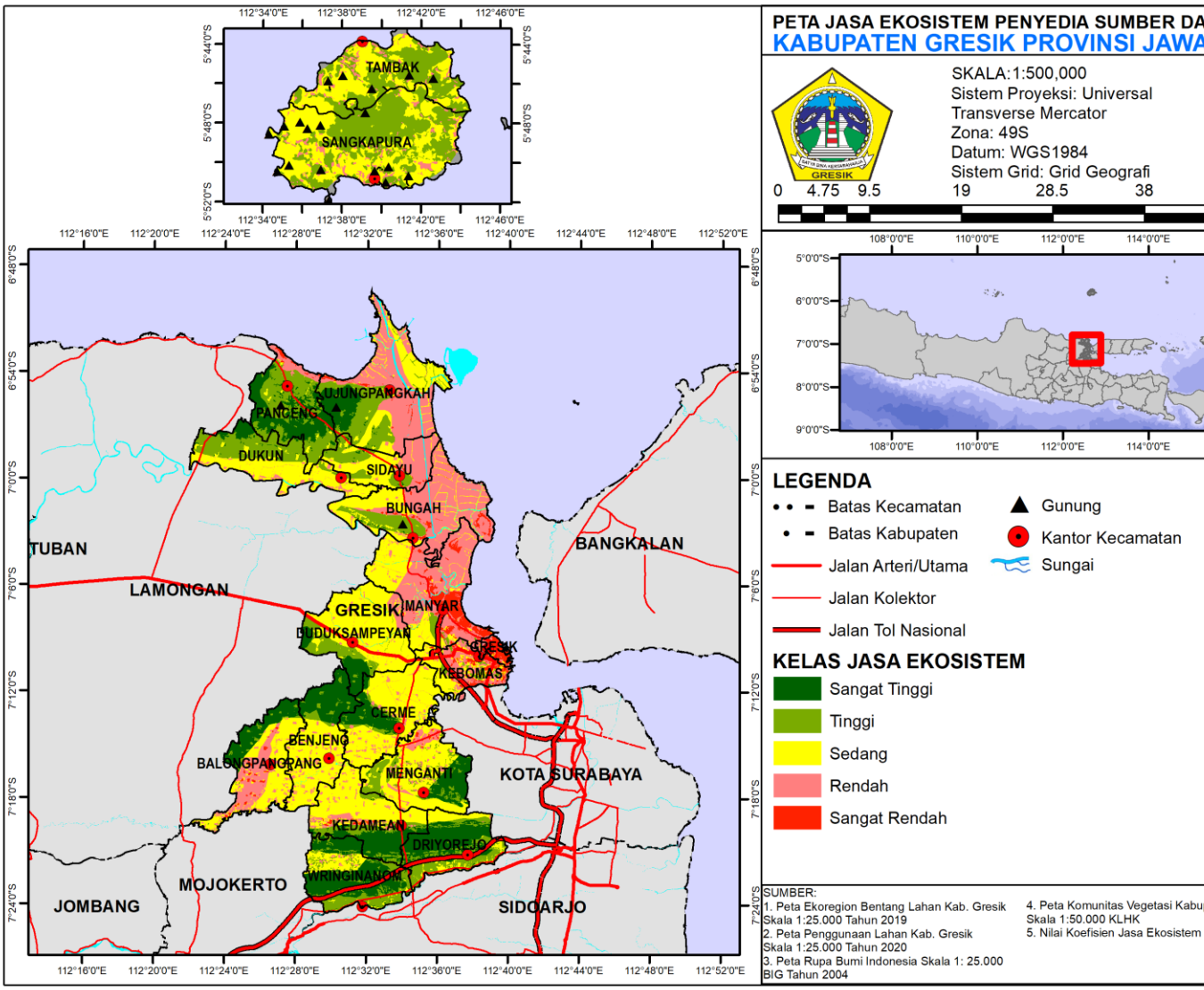
Gambar 4. 4 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih



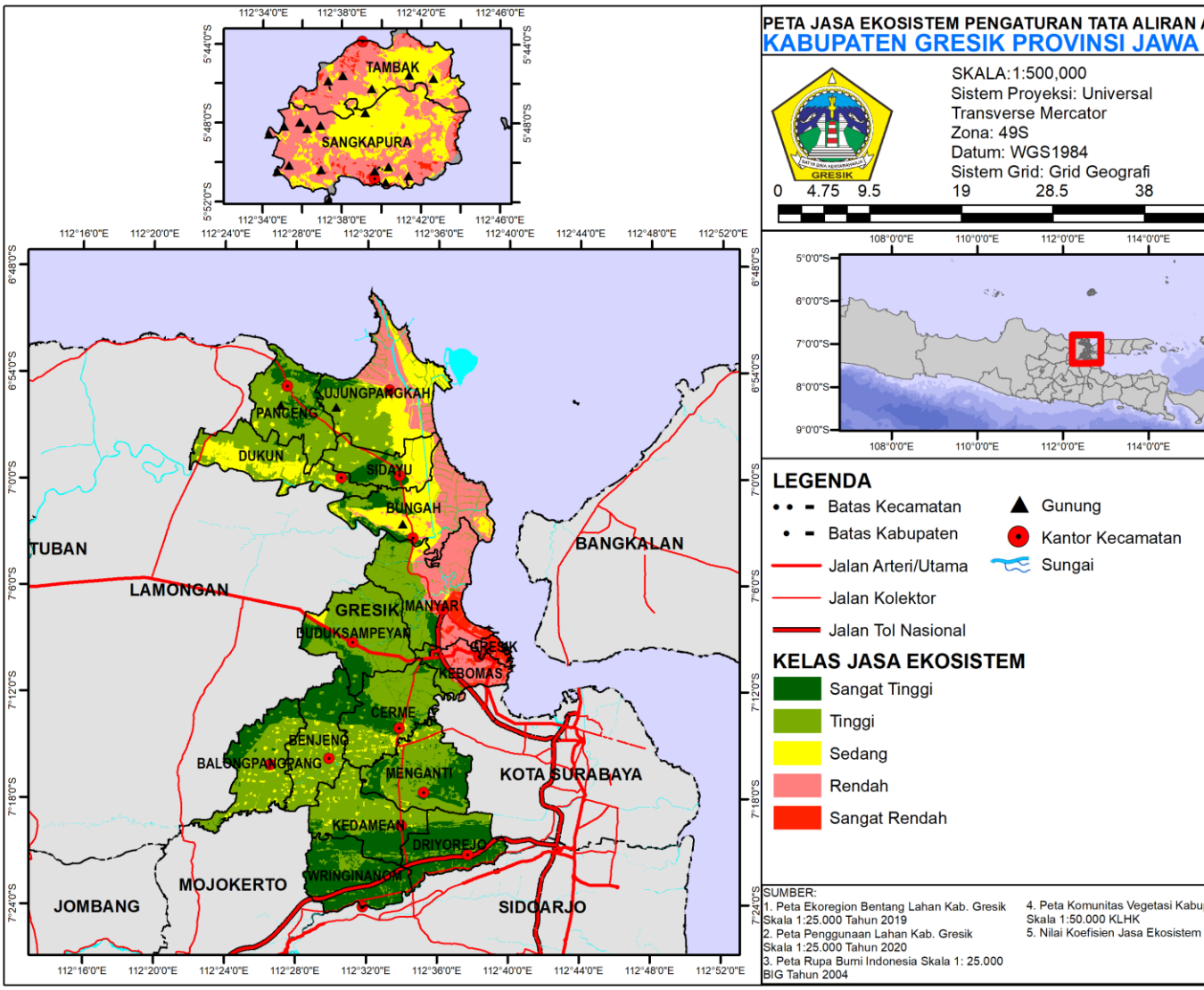
Gambar 4. 5 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Serat



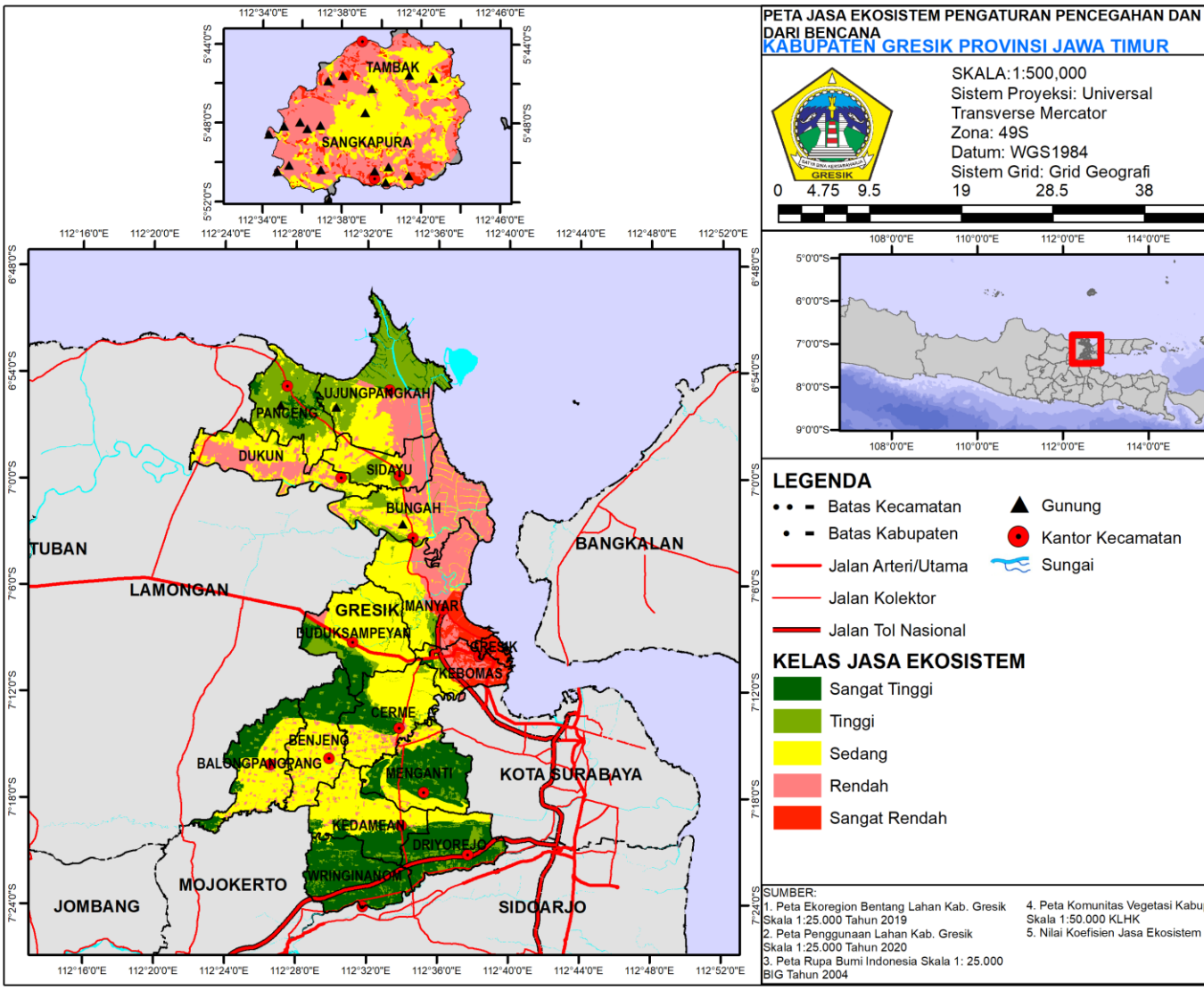
Gambar 4. 6 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar



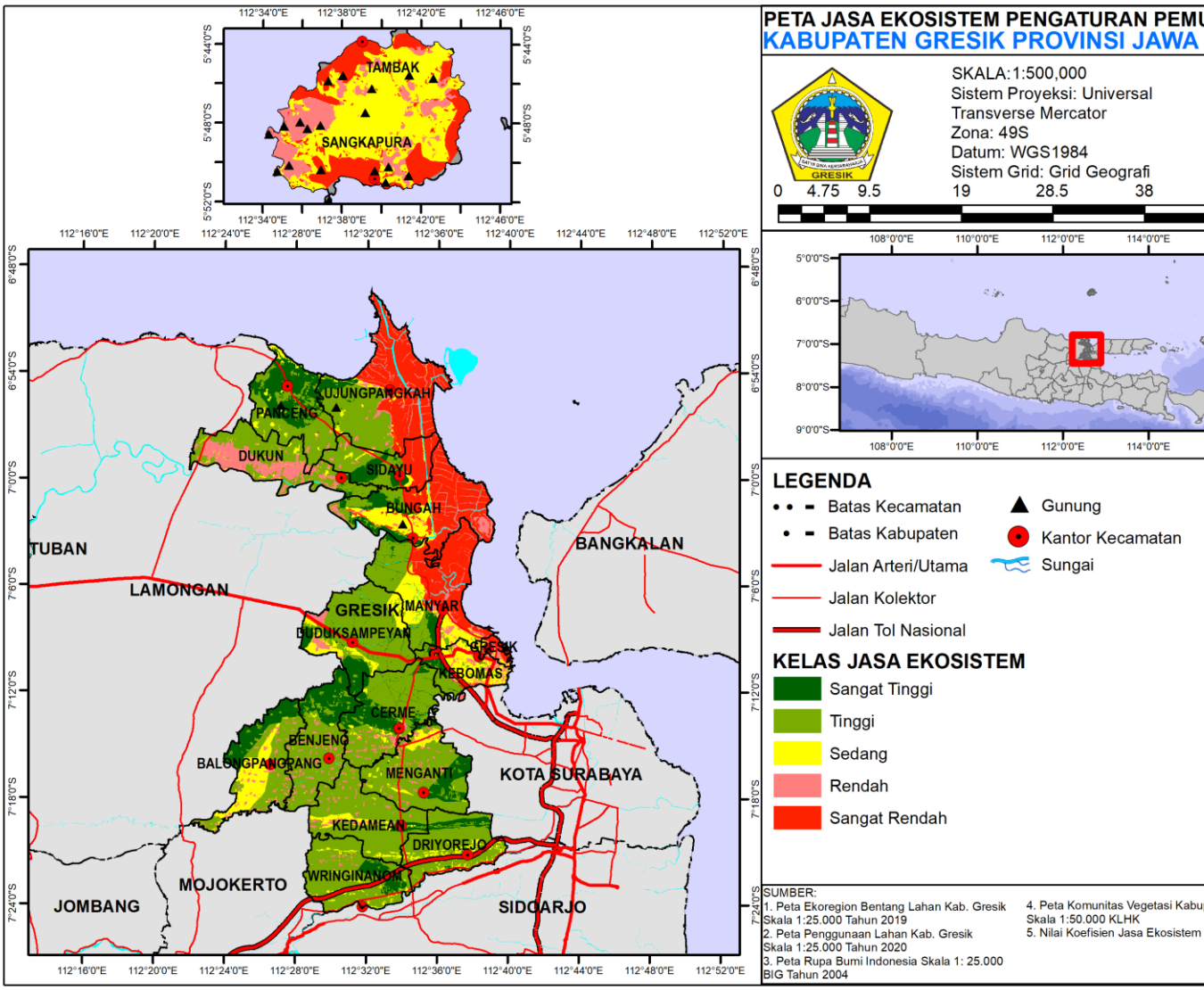
Gambar 4. 7 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Sumberdaya Genetik



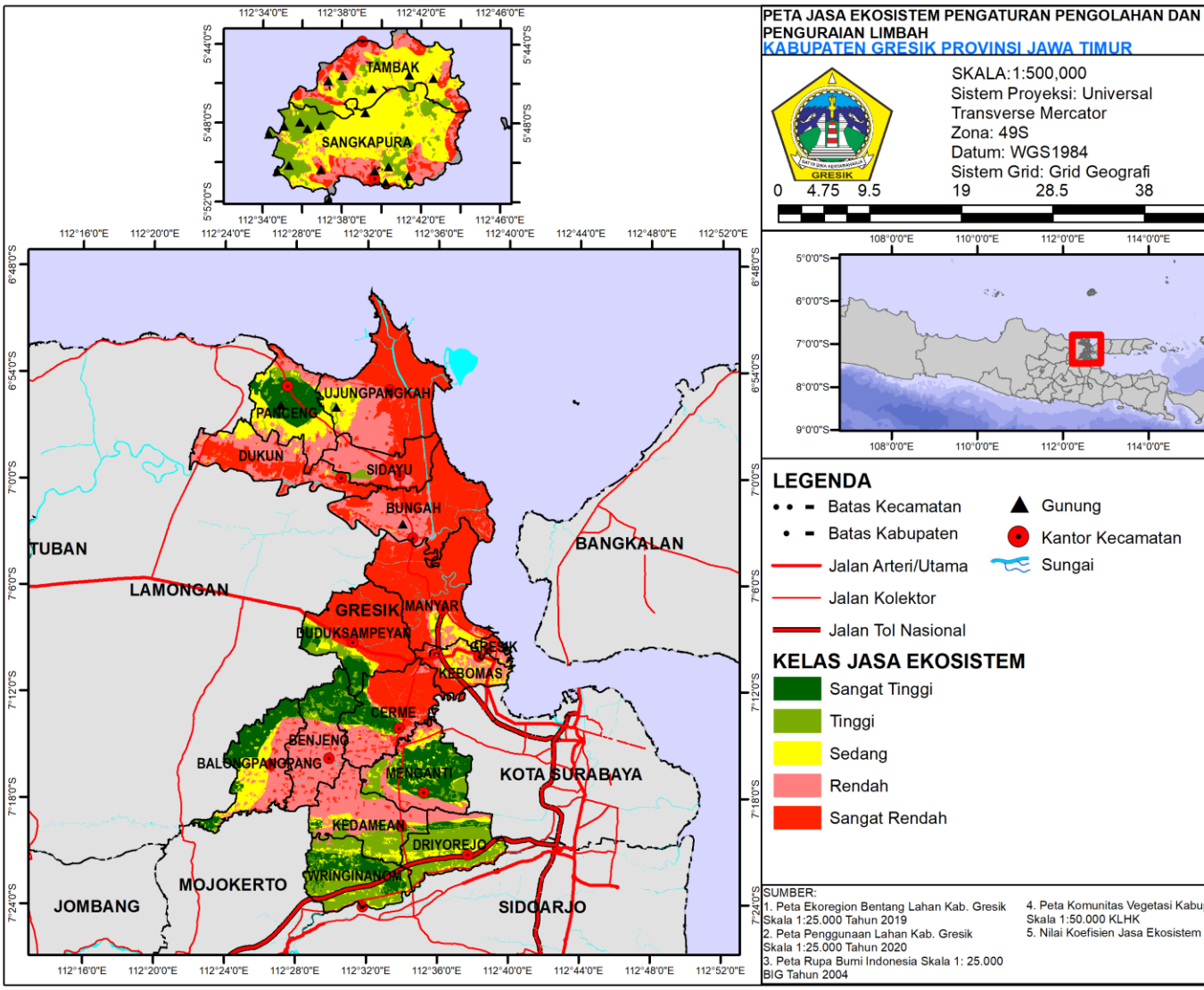
Gambar 4. 8 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir



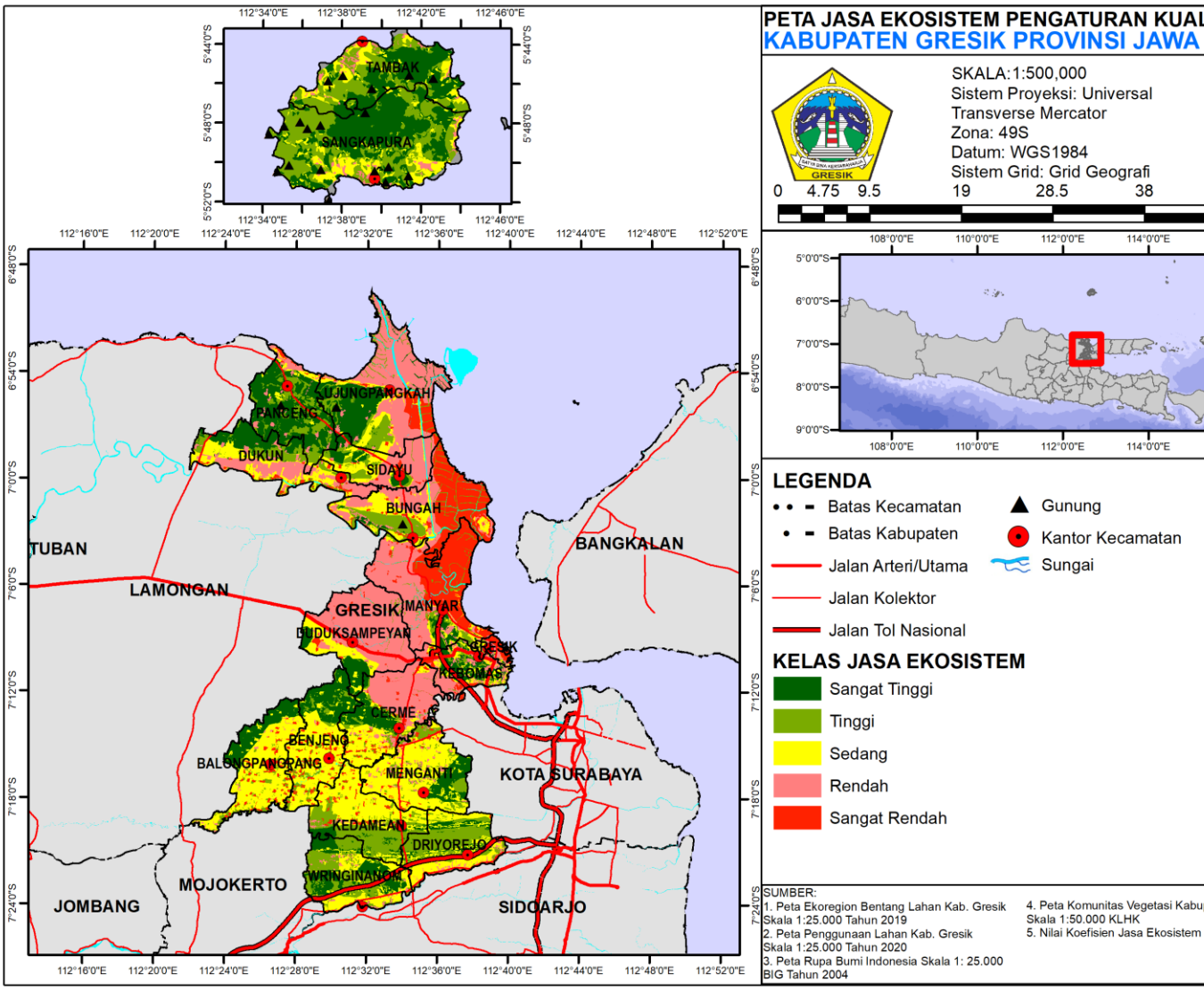
Gambar 4. 9 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan, Perlindungan dan Pencagahan Bencana



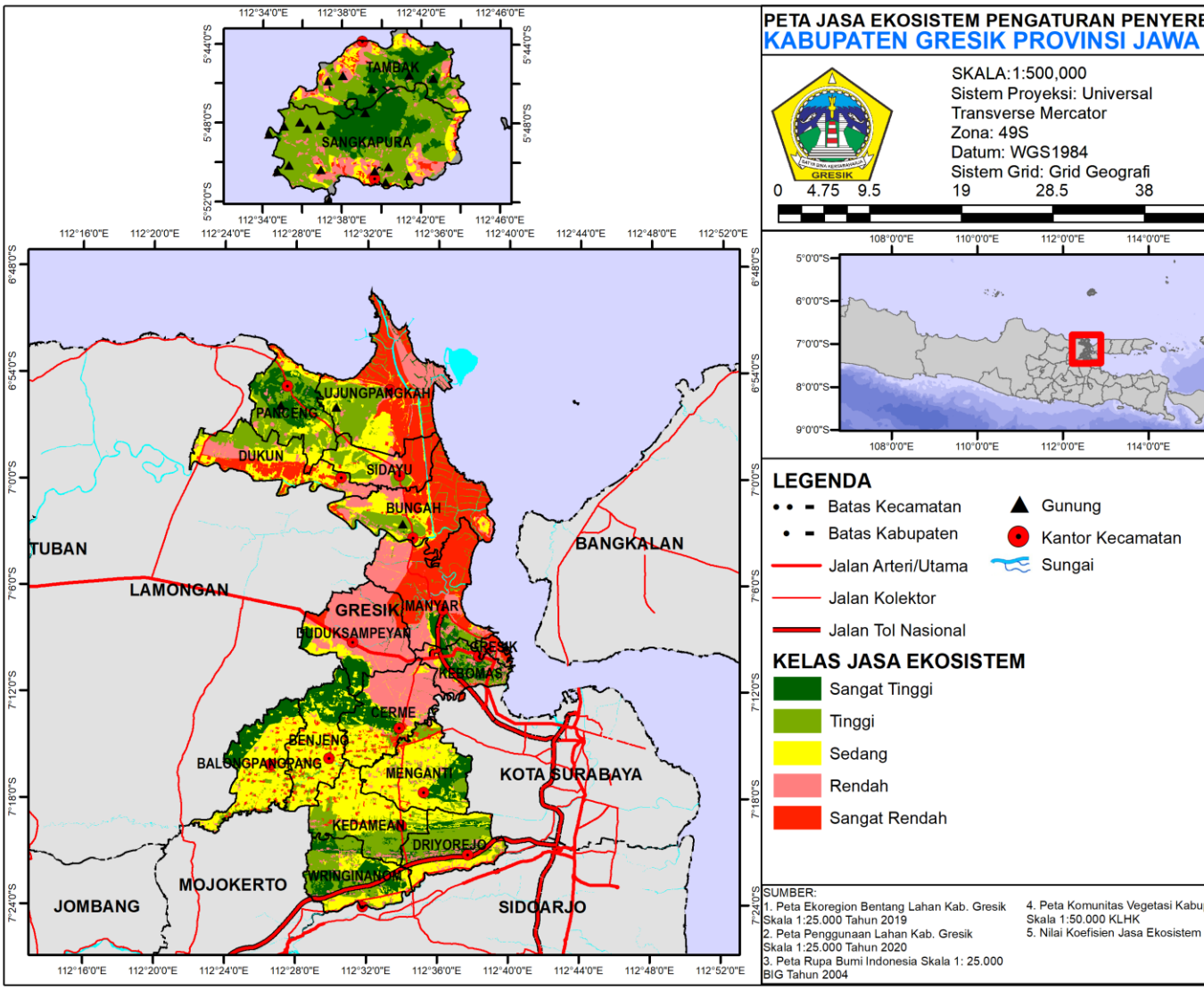
Gambar 4. 10 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan dan Pemurnian Air



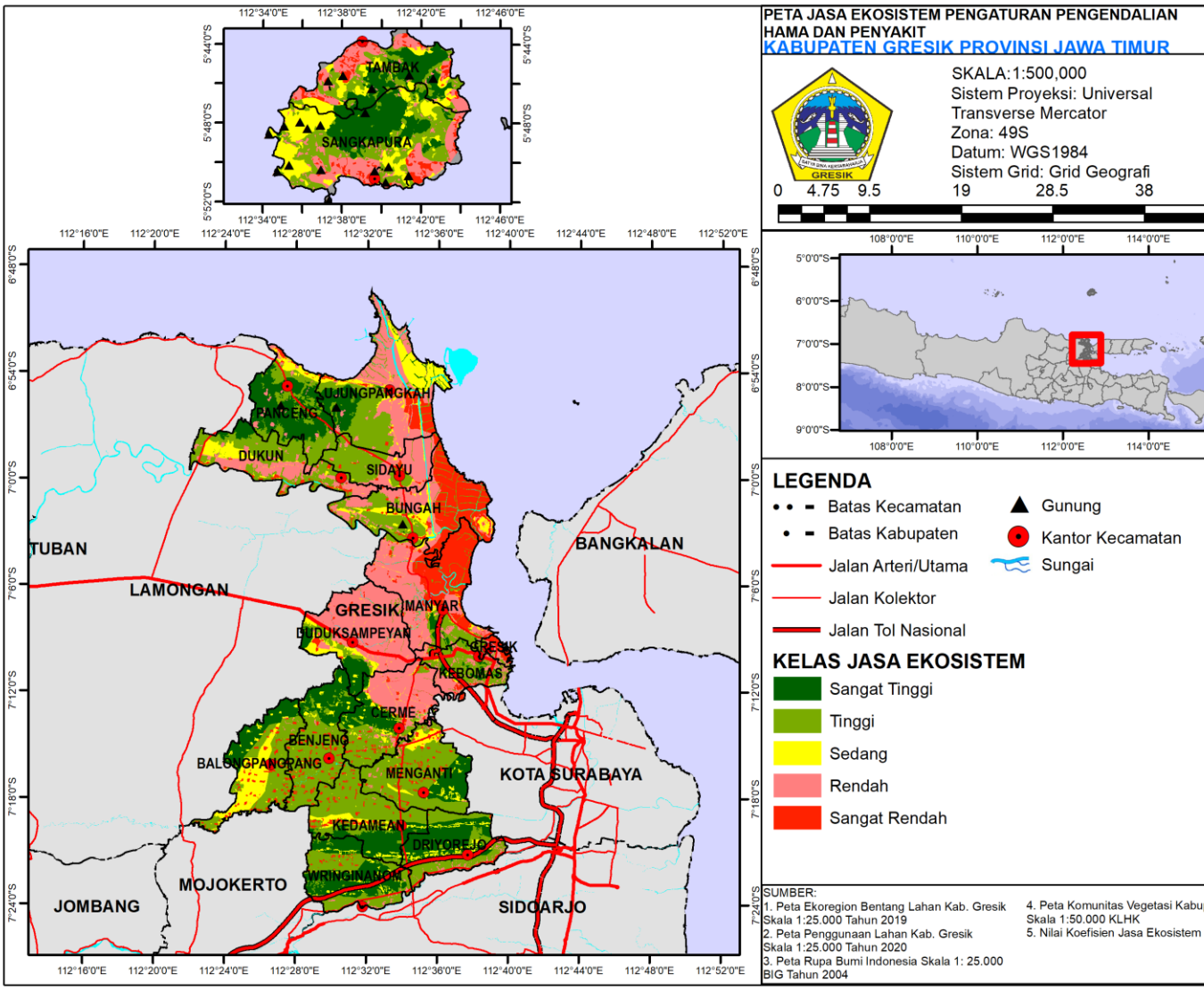
Gambar 4. 11 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah



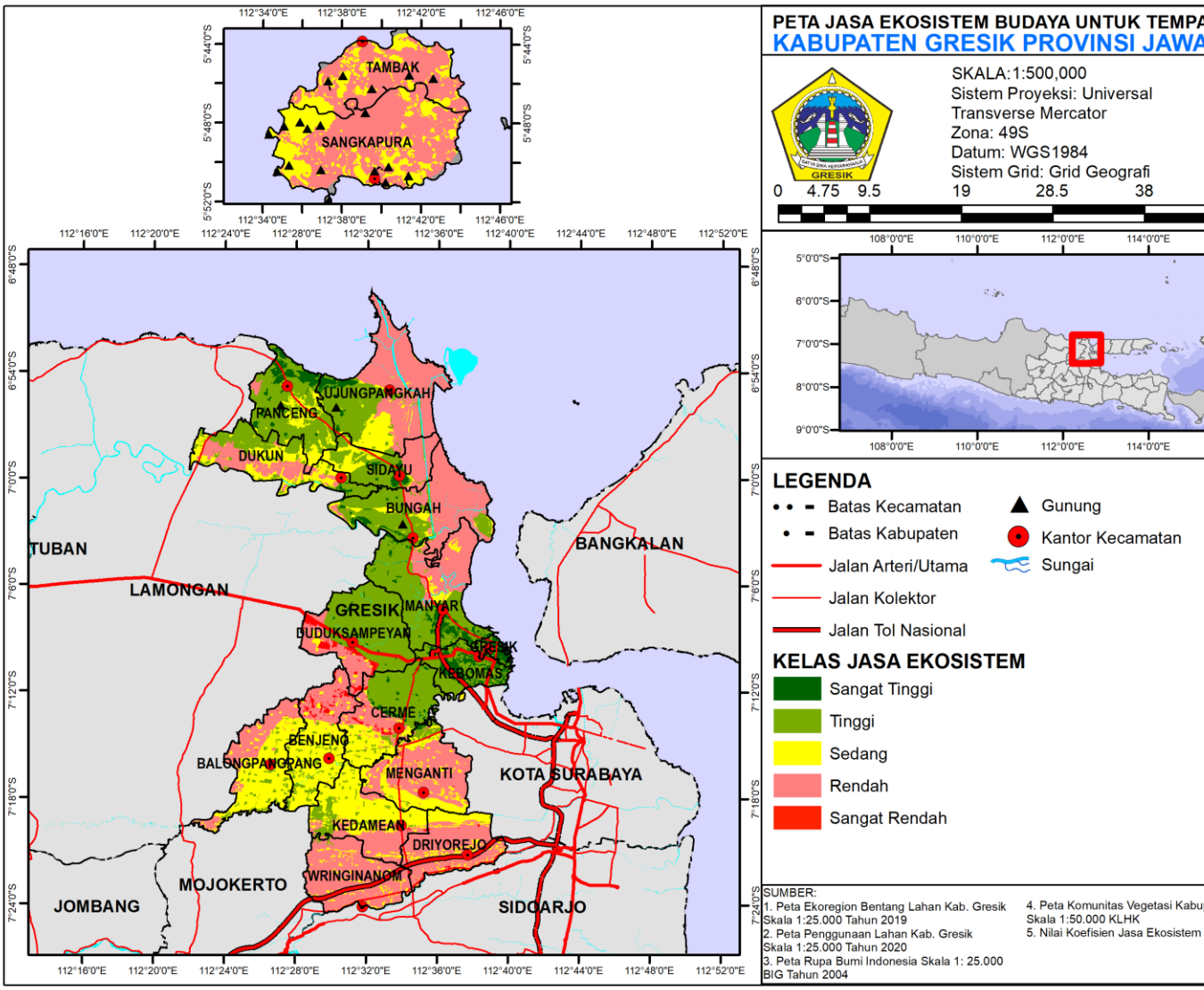
Gambar 4. 12 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara



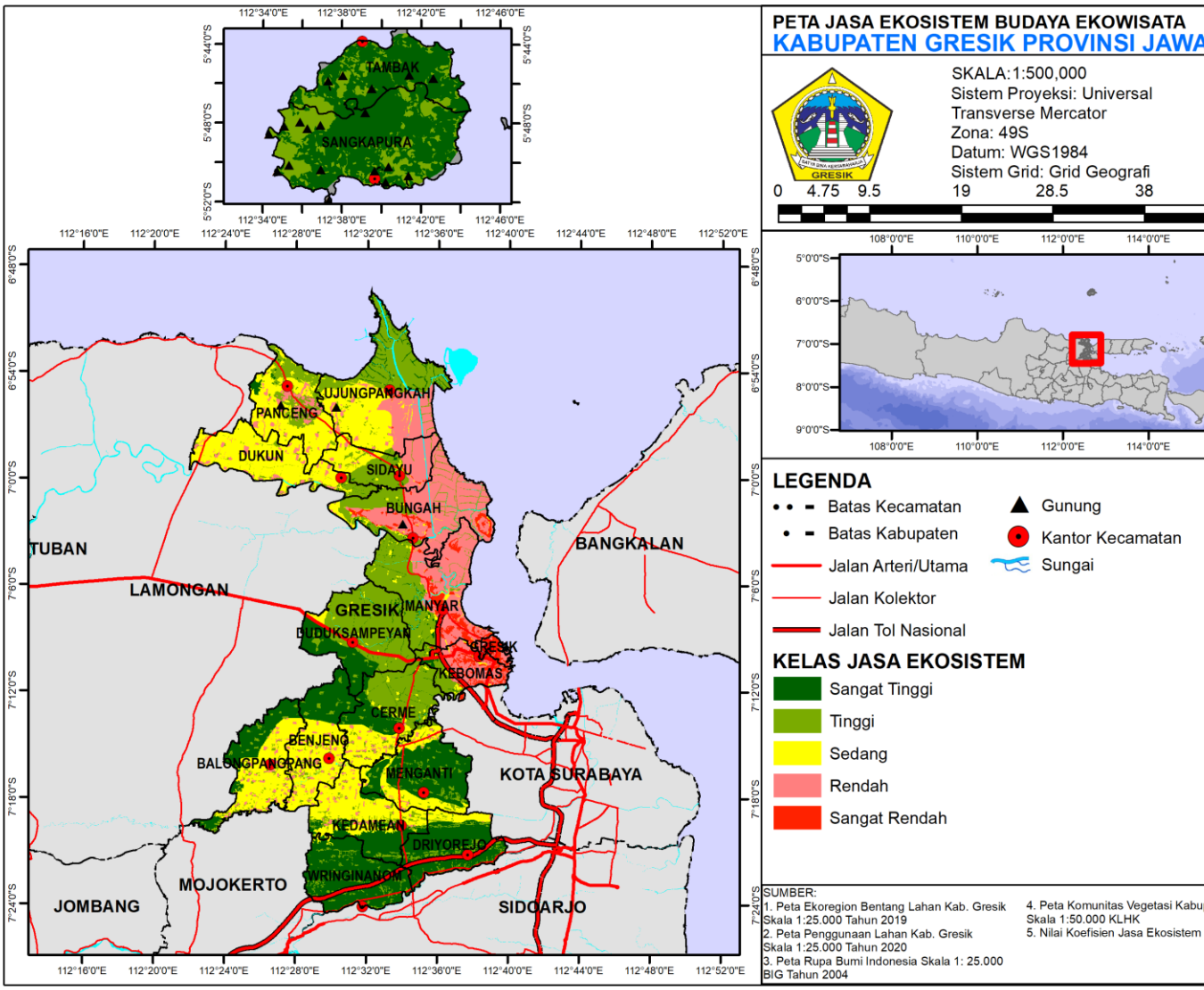
Gambar 4. 13 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami



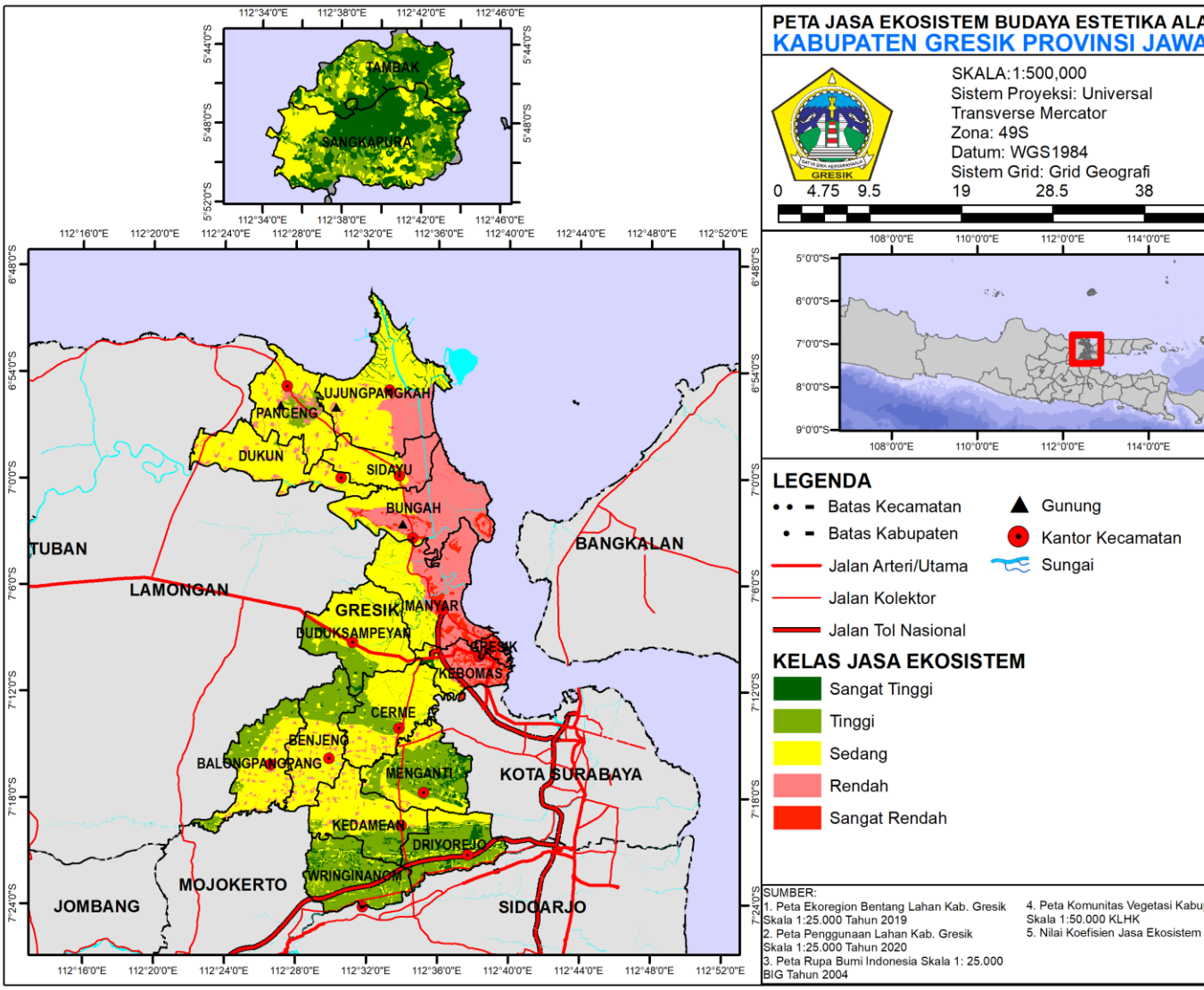
Gambar 4. 14 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit



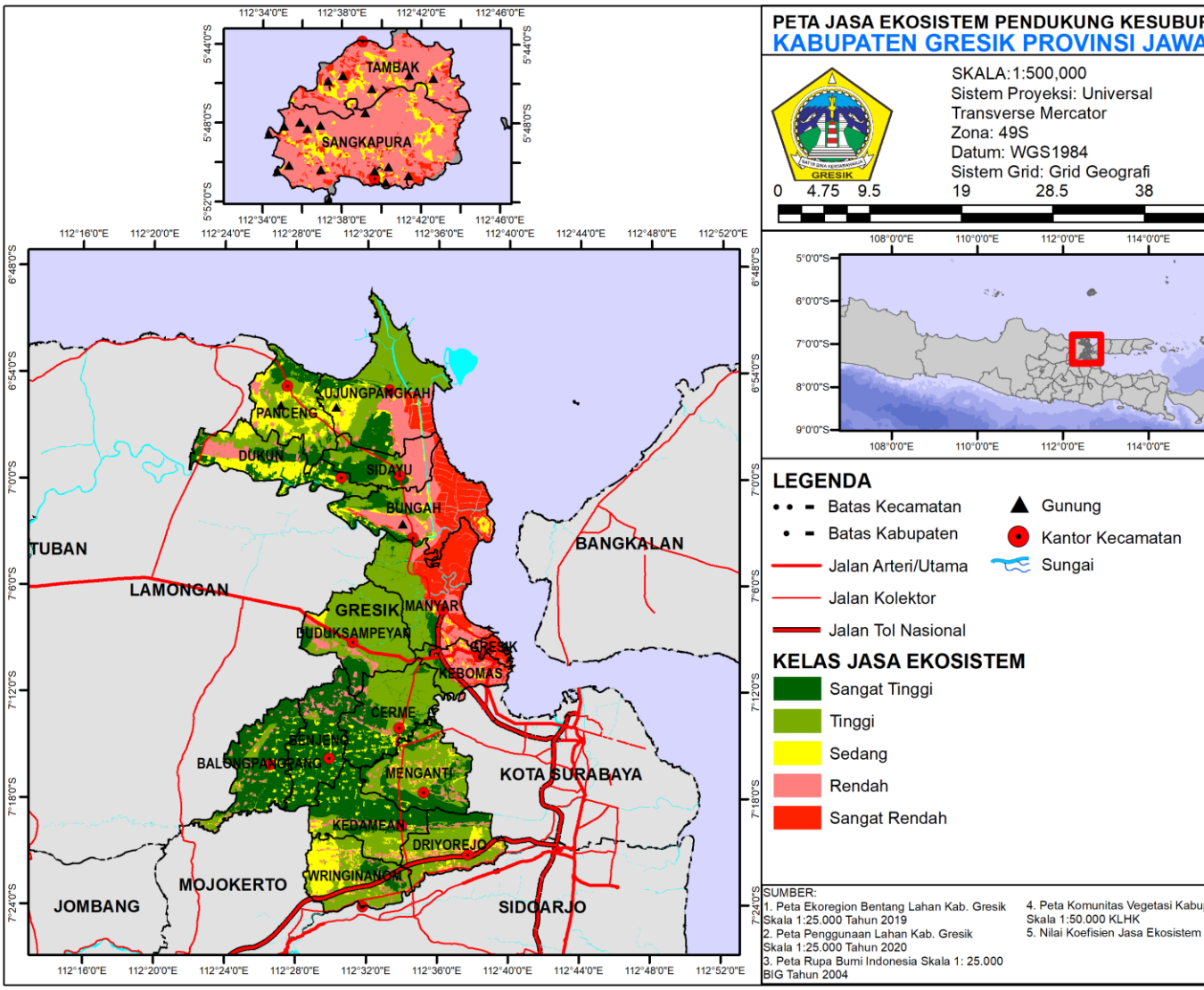
Gambar 4. 15 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup



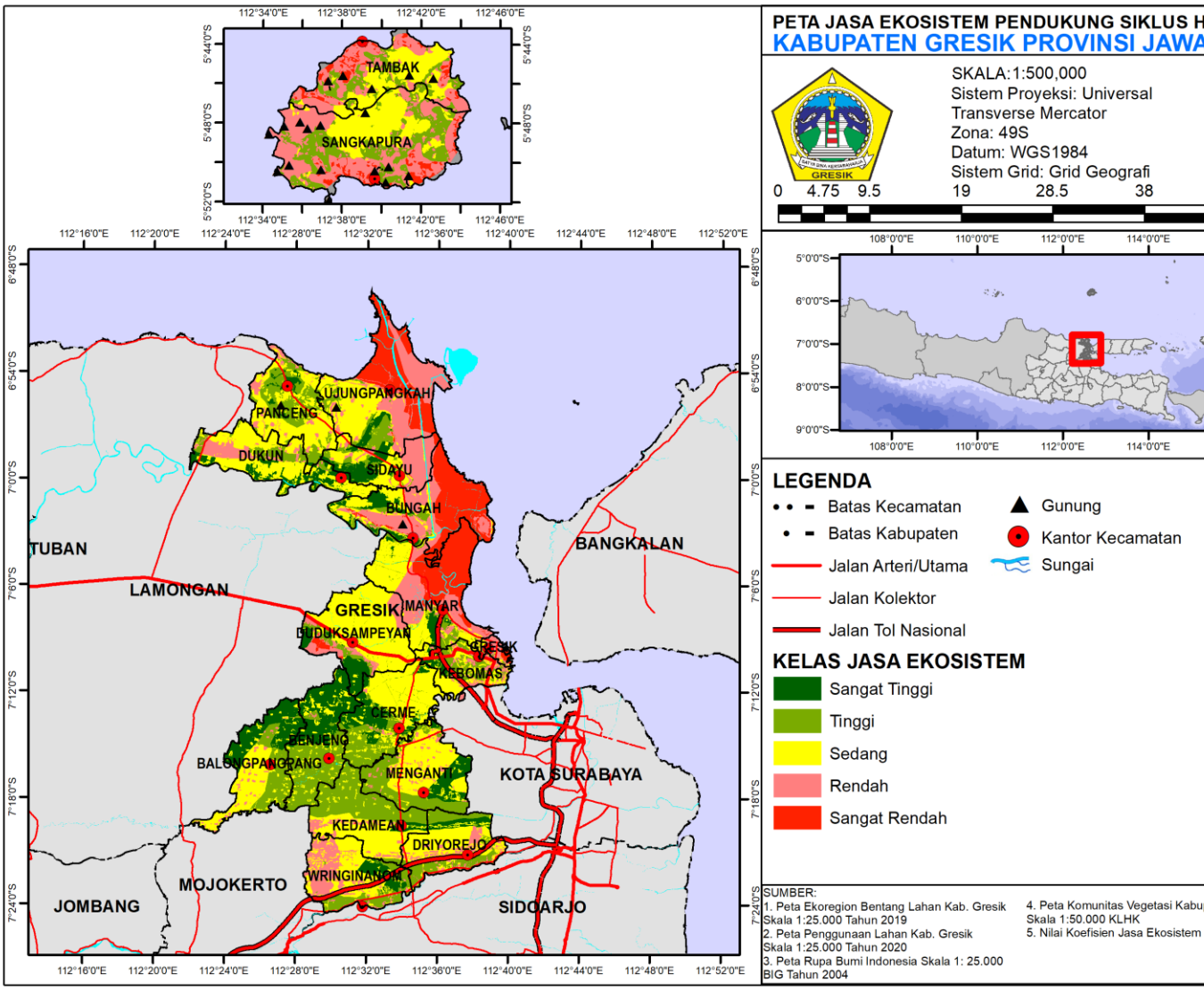
Gambar 4. 16 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ecotourism



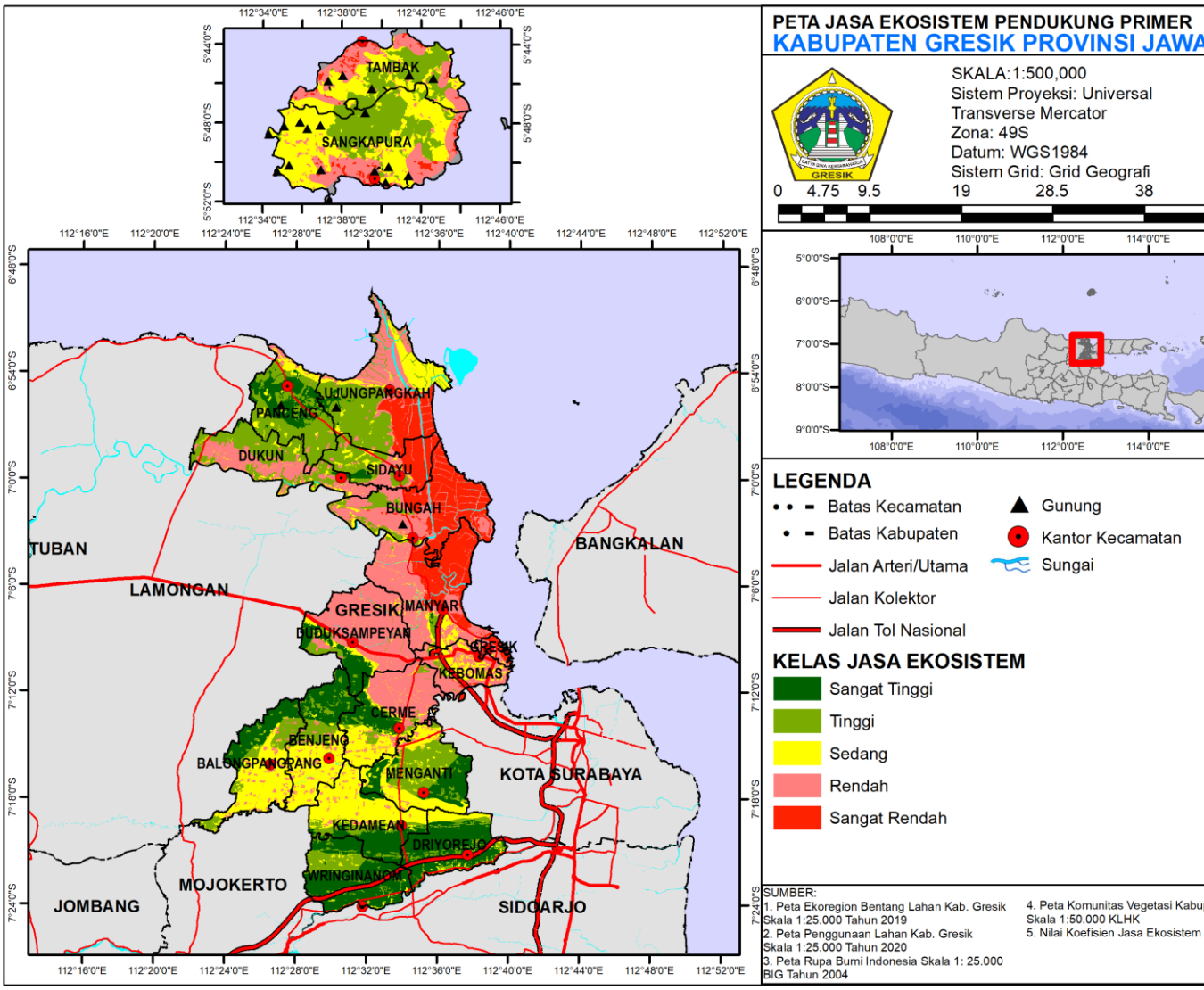
Gambar 4. 17 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Budaya Estetika



Gambar 4. 18 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah



Gambar 4. 19 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Siklus Hara



Gambar 4. 20 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Produksi Primer

3.2.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

A. Produksi Pangan

Kabupaten Gresik memiliki sektor pertanian yang produksi kooditas unggulanya terdiri dari tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman holtikultura. Berdasarkan produksi pertanian Kabupaten Gresik tertinggi pada tahun 2018 dengan perolehan 599.561,94 ton. Produksi padi sawah di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dimana pada tahun sebelumnya memiliki jumlah 549.765 ton dan pada tahun 2016 menjadi 556.875 ton pada tahun 2017 menjadi 594.410 ton, sehingga realisasi presentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian tahun ke tahun adalah 20%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2%.

Tabel 3. 81 Produksi Pertanian (ton)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Padi	403.906	422.343	433.410	428.755	433.213,30
Jagung	127.218	111.684	136.599	158.136	130.120,30
Kedelai	1.326	1.195	927	279,9	81,8
Kacang Tanah	2.925	2.161	2.151	1.582	1.311
Kacang Hijau	3.026	4.329	3.432	1.854,50	9.378
Ubi Kayu	10.426	11.287	3.547	8.775	224
Ubi Jalar	938	2.035	7.152	178,5	519
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	549.765	556.875	594.410	599.561,94	574.847,40

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka Tahun 2016-2020

Dalam sektor pertanian pasti mengupayakan segala sesuatu demi menunjang peningkatan produktivitas dan diverfikasi tanaman demi memenuhi kebutuhan pangan. Data produksi pertanian dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Gresik meliputi padi, jagung, kacang kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Dalam luas panen rata-rata dari produksi tanaman pangan paling tinggi pada bulan februari dengan rata-rata produksi sebesar 68,75 kw/ha dengan luas panen 16.619,6 Ha.

Tabel 3. 82 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Gresik Tahun 2018

Bulan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (ton)
Januari	1.014	68,63	6.963
Februari	16.619,60	68,75	114.260
Maret	13.043,10	66,5	86.737
April	2.602,30	66,55	17.318
Mei	7.856,20	63,4	49.808
Juni	10.200,20	62,6	63.853
Juli	5.387,10	62,55	33.696
Agustus	3.822,90	62,3	23.817
September	2.807,10	64,5	18.106
Oktober	2.776,90	64,65	18.508
November	1.558,70	67,8	10.568
Desember	274,9	67,8	1.864

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2019

Tabel 3. 83 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Padi Ladang di Kabupaten Gresik Tahun 2016

Bulan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (ton)
Januari	25	57	142,5
Februari	75	56	420
Maret	111	57,8	641,6
April	99	57	564,3
Mei	15	56,5	84,8
Juni	120	56	672
Juli	-	-	-
Agustus	18	56	100,8

Bulan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (ton)
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	463	56,72	2.625,90

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2019

Tabel 3. 84 Luas Panen Rata-rata dan Produksi Jagung di Kabupaten Gresik Tahun 2018

Bulan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (ton)
Januari	434,11	n.a	n.a
Februari	3.670,00	n.a	n.a
Maret	3.326,00	n.a	n.a
April	1.105,96	n.a	n.a
Mei	290	n.a	n.a
Juni	2. 751	n.a	n.a
Juli	1.969,24	n.a	n.a
Agustus	1.643,36	n.a	n.a
September	5.033,48	n.a	n.a
Oktober	3.408	n.a	n.a
November	266,8	n.a	n.a
Desember	66,8	n.a	n.a

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2019

Dalam tanaman holtikultura dan buah-buahan di Kabupaten Gresik didominasi dengan jenis tanaman cabai dengan produksinya sebesar 267.072 kuintal dengan luas panen 1.987 Ha.

Tabel 3. 85 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Tahun 2019

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)
Bawang Merah	21	1.417
Bayam	109	4.098
Cabai Besar	421	44.163
Cabai Rawit	1.566	222.909
Cabai	1.987	267.072
Kacang Panjang	59	5.216
Kangkung	135	6.626
Ketimun	24	3.515
Sawi	48	2.246
Terung	84	17.444
Tomat	62	11.070
Blewah	10	1.700
Melon	3	301
Semangka	11	2.180
Total	4.540	589.957

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 3. 86 Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2019

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal
Jahe	31.048	105.801
Laos	47	129
Lempuyang	-	-
Kencur	32	65
Kunyit	7.532.055	21.304.213
Temuireng	36	68
Temukunci	42	96
Temulawak	1.400.007	5.450.013
Jumlah	8.963.267	26.860.385

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 3. 87 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Tahun 2019

Jenis Tanaman	Produksi (ton)
Alpukat	327
Belimbing	5.399
Durian	1.273
Jambu Air	4.578
Jambu Biji	5.150
Jeruk Besar	288
Jeruk Siam	4.830
Jeruk	5.118
Mangga	379.227
Manggis	52
Melinjo	1
Nangka	5.733
Nanas	1
Pepaya	8.486
Pisang	195.135
Rambutan	7.170
Salak	8
Sawo	2.461
Sirsak	744
Sukun	1.170
Total	627.151

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 3. 88 Sentra Komoditas Unggulan Tanaman Holtikultura di Kabupaten Gresik

No	Jenis Komoditas Unggulan	Sentra Produksi	Rencana Hasil Industri
1	Mangga	Kecamatan Panceng	Sirup, manisan, puree mangga, selesai, jeli, sari buah, asinan, dodol, dll.
		Kecamatan Ujungpangkah	
2	Kangkung/Biji Kangkung	Kecamatan Balongpanggang	Bahan kosmetik dan bahan pembuatan obat.
		Kecamatan Benjeng	
		Kecamatan Kedamean	

Sumber: Pemaduserasian Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030

B. Sumberdaya Mineral Pertambangan

Pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Menganti, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.
2. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi diarahkan di Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Kebomas.

Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Pengelolaan kawasan bekas pertambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas pertambangan. Sub kawasan konsesi pertambangan migas terletak di perairan laut Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.

Penggunaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat merusak ekosistem lingkungan yang ada. Kabupaten Gresik merupakan daerah penghasil tambang, terutamanya untuk batuan. Keberadaan bahan tambang ini akan berdampak pada kegiatan pengeksploitasian yang sering menimbulkan dampak negatif sebagai berikut:

1. Topografi

   Bentuk topografi khususnya pada daerah perbukitan akan berubah menjadi kawasan kantong bentang alam yang rusak dengan pemandangan yang gersang dan buruk.
3. Tanah Penutup

   Hilangnya lapisan atas tanah sebagai akibat semakin gundulnya daerah perbukitan, hal ini akan menimbulkan dampak lain yang tidak baik berupa terjadinya longsoran/gerakan tanah terutama pada daerah perbukitan curam.
4. Tata Air

Berdampak pada menyurutnya potensi air/sumber air karena kelembaban tanah yang berkurang dan tanah akan menjadi kering bahkan pada daerah tertentu akan terjadi amblesan tanah dan penurunan dari muka air tanah. Terjadinya pelumpuran pada air permukaan, proses erosi, sedimentasi dan pendangkalan yang meningkat di badan sungai, ataupun waduk, pada musim hujan akan sering terjadi banjir karena tidak ada lagi penahan.

Untuk mengatasi atau memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan ini, maka perlu adanya upaya penataan kawasan. Adapun kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan pertambangan meliputi:

a. Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kriteria/syarat penambangan yang ada.
b. Pengembangan kegiatan lainnya di kawasan pertambangan untuk mengantisipasi kondisi masa pasca tambang.
c. Pengadaan kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kawasan terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Potensi bahan pertambangan di Kabupaten Gresik terdiri dari pertambangan untuk bahan baku industri dan bahan baku keramik. Pertambangan bahan industri antara lain dolomit, batugamping, pospat, feldspar, dan kalsit. Sedangkan pertambangan bahan keramik antara lain pasir kuarsa dan lempung. Eksploitasi bahan tambang diatur melalui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13/2002 mengenai Ijin Usaha Pertambangan batuan di Kabupaten Gresik (Dinas LHPE, tahun 2002). Kebijakan yang ada dilakukan dengan mengembangkan potensi-potensi pertambangan yang teridentifikasi. Sedangkan rencana pengembangan industri pengolahan untuk pertambangan adalah pengolahan batu gamping dan pengolahan semen di Kecamatan Bungah, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Panceng. Rencana pengembangan pertambangan batuan meliputi Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Bungah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Wringinanom, dan Kecamatan Sangkapura. Rencana pengembangan di kawasan pertambangan yang tidak menimbulkan kerusakan atau potensi lahan kritis adalah penerapan konsep reklamasi dalam penanganan lahan pasca penambangan meliputi:

1. Pemanfaatan lahan pasca penambangan yang memiliki morfologi berbentuk dataran atau kemiringan rendah menjadi areal permukiman dan kawasan industri. Misalnya Kawasan Industri Gresik dan Perumahan Gresik Kota Baru (GKB) di lahan pasca penambangan oleh PT Semen Gresik.
2. Pemanfaatan lahan pasca penambangan yang memiliki morfologi berupa cekungan menjadi penampung air hujan. Waduk dan telaga yang terbentuk dapat menjadi penyeimbang hidrogeologi air tanah, sumber air, dan kawasan wisata air. Kawasan wisata telaga Ngipik adalah contoh pengembangan lahan pascapertambangan menjadi kawasan wisata andalan.
3. Pemanfaatan lahan pasca penambangan yang disertai penghijauan atau reboisasi.
4. Rencana pengembangan tambang migas terdapat di Kecamatan Kebomas dan Ujungpangkah. Kawasan tambang migas dapat dilihat pada peta rencana pola ruang laut.

Tabel 3. 89 Ijin Produksi Pertambangan Tahun 2022

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Batu Gamping	CV. Bumi Sakti	124,35	-	2.400.000
2	Dolomit	PT. Gunung Kaklak Unggul Sumber Urip	36,13	-	528.960
3	Tanah urug	PT. Flash Entertainment Indonesia	26,54	-	270.000
4	Fosfat	PT. Krisna Cakra Cyrilla	4,13	-	39.600
5	Batu Gamping	PT. Umn Inda Sejahtera	8,5	-	54.720
6	Dolomit	PT. Polowijo Glosari	309,13	-	6.000.000
7	Batu Gamping	Holbari	2,6	-	95.625
8	Batu Gamping	Lutfi	5	-	112.500
9	Sirtu	Widhi Sulthon Wahyudi	6,94	-	432.000
10	Sirtu	Widhi Sulthon Wahyudi	22,82	-	72.000
11	Andesit	Imam Muslih	7,63	-	102.000
12	Batu Gamping	PT. Krisna Cakra Cyrilla	4,13	-	10.560

Sumber: ESDM Provinsi Jatim dalam IKPLHD Tahun 2022

C. Penanaman Mangrove

Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya menjaga keanekaragaman hayati melalui penanaman mangrove, bekerja sama dengan instansi terkait, organisasi lingkungan dan masyarakat setempat. Melalui program ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan luas hutan

mangrove di Kabupaten Gresik, yang selanjutnya akan memberikan manfaat jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir, menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, serta meningkatkan kualitas lingkungan bagi masyarakat Gresik.

Penanaman mangrove juga memberikan manfaat tambahan, seperti memperbaiki kualitas air dengan menyerap dan menyaring polutan serta nutrien yang terlarut di dalamnya. Selain itu, ekosistem mangrove juga menjadi tempat berlindung dan berkembang biak bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk spesies ikan dan burung. Dengan demikian, penanaman mangrove di Kabupaten Gresik tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi risiko banjir, tetapi juga dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir secara keseluruhan.





Survei Lapangan untuk Pemberian CSR Penanaman Mangrove dari Perusahaan 6 Juli 2022

Berikut merupakan data luas penanaman mengrove yang ada di Kabupaten Gresik:

Gambar 3. 17 Luas Penanaman Mangrove Kabupaten Gresik

No.	Kegiatan Penanaman	Luas	Desa	Kecamatan
1	Mangrove	35,41	Pangkah Kulon	Ujungpangkah
2	Mangrove	0,1	Banyuurip	Ujungpangkah
3	Mangrove	3,8	Randuboto	Sidayu
4	Mangrove	40,3	Pangkah Wetan	Ujungpangkah
5	Mangrove	37,96	Pangkah Wetan	Ujungpangkah
6	Mangrove	32,00	Banyuurip	Ujungpangkah
7	Mangrove	75,00	Pangkah Kulon	Ujungpangkah
8	Mangrove	140,00	Pangkah Wetan	Ujungpangkah
9	Mangrove	33,00	Randuboto	Sidayu
10	Mangrove	23,00	Manyarejo	Manyar
11	Mangrove	32,69	Banyuurip	Ujungpangkah
12	Mangrove	347,03	Pangkah Kulon	Ujungpangkah
13	Mangrove	763,99	Pangkah Wetan	Ujungpangkah
14	Mangrove		Manyarsidomukti	Manyar
15	Mangrove		Banyuurip	Ujungpangkah

No.	Kegiatan Penanaman	Luas	Desa	Kecamatan
16	Mangrove		Manyarsidomukti	Manyar

Sumber: IKPLHD, 2022

3.2.5 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

3.2.5.1 Gas Rumah Kaca

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Terdapat 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK yaitu CO_2 (karbon dioksida), CH_4 (metana). N_2O (dinitrogen oksida). HFC (hidro fluoro karbon), PFC (per fluoro karbon) dan SF_6 (sulfur heksa florida). Efek rumah kaca sebenarnya berguna untuk menjaga kestabilan temperatur suhu di bumi. Tanpa sejumlah gas rumah kaca, planet bumi akan mempunyai temperatur suhu sedingin permukaan bulan. Namun, jika rumah kaca meningkat secara dramatis akan menyebakan pemanasan global. Dampak negative yang ditimbulkan yaitu suhu bumi menjadi tinggi, pencairan gunung es, permukaan air laut menjadi tinggi, dan masih banyak lagi.

Salah satu isu global adalah perubahan iklim yang diakibatkan oleh peningkatkan emisi gas CO_2. Di wilayah perkotaan Gresik yang terdiri dari Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Duduksampeyan mengalami perubahan tata guna lahan yang drastis khusunya pada lahan non terbangun menjadi lahan perubahan dan industri. Wilayah perkotaan Gresik menghasilkan gas CO_2 dari aktivitas ruamh tangga, industry, dan transportasi masing-masing sebesar 215.567 ton/tahun (Kecamatan Gresik), 564.404 ton/tahun (Kecamatan Kebomas), 454.267 ton/tahun (Kecamatan Manyar), dan 104.536 ton/tahun (Kecamatan Duduksampeyan). Kondisi tersebut merupakan 50,37% atau sekitar 1.34 juta ton/tahun dari totoal 2.657.660 ton/tahun gas CO_2 yang dihasilkan di seluruh Kabupaten Gresik. Jumlah emisi CO_2 tersebut belum mencakup emisi CO_2 yang berasal dari pertanian dengan jumlah mencapai 3,89 juta ton/tahun.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Terdapat 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK yaitu CO_2 (karbon dioksida), CH_4 (metana). N_2O (dinitrogen oksida). HFC (hidro fluoro karbon), PFC (per fluoro karbon) dan SF_6 (sulfur heksa florida). Efek rumah kaca sebenarnya berguna untuk menjaga kestabilan temperatur suhu di bumi. Tanpa sejumlah gas rumah kaca, planet bumi akan mempunyai temperatur suhu sedingin permukaan bulan. Namun, jika rumah

kaca meningkat secara dramatis akan menyebakan pemanasan global. Dampak negative yang ditimbulkan yaitu suhu bumi menjadi tinggi, pencairan gunung es, permukaan air laut menjadi tinggi, dan masih banyak lagi. Berikut adalah penjelasan mengenai emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Gresik dari berbagai sektor.

- Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi

Terdapat berbagai sumber emisi gas rumah kaca, diantaranya dari aktivitas rumah tangga, industri, transportasi, kegiatan dan pertanian. Emisi dari sektor energi terbesar disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran karbon dan hidrogen dari bahan bakar fosil yang diubah menjadi karbon dioksida (CO_2) dan air (H_2O). Sektor transportasi berada pada urutan kedua setelah sektor listrik dan panas dalam memberikan kontribusi terhadap emisi Gas Rumah Kaca dengan persentase sebesar 20%. Besaran emisi GRK yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar terdiri dari dua jenis sumber yaitu sumber tidak bergerak dan sumber bergerak. Faktor emisi pembakaran bahan bakar sumber tidak bergerak contohnya adalah minyak mentah, gas alam cair, premium, avgas, avtur, solar/ADO/HSD/IDO, gas bumi, minyak tanah, dan sebagainya. Sedangkan emisi GRK dari pembakaran bahan bakar sumber bergerak berasal dari kegiatan transportasi. Kegiatan transportasi di Kabupaten Gresik terdiri dari kegiatan transportasi darat (melalui jalan raya dna kereta api) dan transportasi air (melewati laut atau perairan Kabupaten Gresik). Berikut adalah perhitungan total emisi gas rumah kaca dari sektor pengadaan dan penggunaan energi di Kabupaten Gresik Tahun 2016.

Tabel 3. 90 Perhitungan Total Emisi GRK Sektor Energi

No	Kegiatan	Emisi (Gg CO_2)
1	Emisi dari Industri Pembangkit	5.254,03
2	Emisi dari Pembakaran Bahan Bakar Kegiatan Transportasi	609,07
3	Emisi dari Pembakaran Bahan Bakar Kegiatan Rumah Tangga	1,35
	Total	**5.864,45**

- Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk (Industrial Process and Product Use -IPPU)

Emisi Gas Rumah Kaca dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas industri. Sumber emisi utamanya yaitu dari proses industri yang secara kimiawi atau fisik melakukan perubahan suatu bahan/material menjadi bahan lain produksi tembaga, produksi pelumas, industri pulp dan kertas dan industri Soap and Detergent. Proses-proses tersebut menghasilkan berbagai emisi GRK seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrous

oksida (N_2O), hidrofluorokarbon (HFC) dan perfluorocarbon (PFC). Selain dari IPPU, sektor industri juga menghasilkan emisi GRK dari pembakaran bahan bakar untuk keperluan energi dan dari pengolahan limbah. Berikut adalah data aktivitas estimasi GRK di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 91 Data Aktivitas Terkait Estimasi Emisi GRK dari Kegiatan IPPU di Kabupaten Gresik

Kategori	Tahun (ton)	
	2015	**2016**
Produksi tembaga	196.542	249.002
Penggunaan pelumas	133.473.000	612.220.218
Industri Pulp dan Kertas	47.316	64.933
Industri Makanan dan Minuman	48.230	83.437
Industri Soap and Detergent	2.163.598	2.176.765

Sumber: Kuesioner DLH Kabupaten Gresik, 2017

Berdasarkan **Tabel 3.2,** aktivitas yang paling banyak menghasilkan emisi GRK adalah penggunaan pelumas. Aktivitas yang menghasilkan emisi GRK dalam penggunaan pelumas yaitu proses produksi, impor dan ekspor pelumas.

- Sektor AFOLU (Agriculture, Foresty and Other Land Uses)

Emisi GRK dari sektor pertanian diperkirakan berasal dari metan (CH_4), karbon dioksida (CO_2), dinitrogen oksida (N_2O) dari tanah, termasuk emisi N_2O tidak langsung dari penambahan N ke tanah karena penguapan, dan non-CO_2 dari biomas yang dibakar pada aktivitas pertanian. Untuk menghitung emisi dari sektor pertanian memerlukan data aktivitas seperti luas tanam, luas panen, jenis tanah, dan data hasil penelitian seperti jumlah pupuk dan kapur pertanian yang digunakan.

Berbeda dengan sektor pertanian, pada sektor peternakan emisi GRK yang dihasilkan yaitu metana sebagai hasil samping dari fermentasi enterik dan juga dari sistem pengelolaan kotoran ternak. Selain itu, kotoran ternak baik cair maupun padat memiliki potensi untuk menghasilkan emisi metana dan dinitrogen oksida (N_2O) selama proses penyimpanan, pengolahan, dan penumpukan/pengendapan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai emisi GRK di sektor pertanian dan peternakan dari beberapa kegiatan yang disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 92 Perhitungan Total Emisi Sektor Pertanian dan Peternakan

No	Kegiatan	Nilai Emisi (Gg CO_2e)
1	Emisi dari Fermentasi Enterik dan Manure Management	49
2	Emisi dari Manure Management	18,36
3	Emisi dari Pemakaian Pupuk Urea	15,88
4	Indirect Emmission dari Manure Management	1.580,29
Total		**1.663,53**

- Sektor Pengelolaan Limbah

Dalam pengelolaan limbah, emisi GRK dihitung dari limbah padat domestik atau persampahan dan limbah air (domestik maupun industri). Emisi limbah padat domestic dihitung dari timbunan sampah di TPA baik yang dikelola atau tidak dikelola. Berikut adalah perhitungan total emisi sektor pengelolaan limbah.

Tabel 3. 93 Perhitungan Total Emisi Sektor Pengelolaan Limbah

No	Kegiatan	Emisi (Gg CO_2)
1	Emisi dari Limbah Padat Domestik	11,25
2	Emisi dari Limbah Cair Domestik	116,75
Total		**128,00**

Berikut adalah rekapitulasi estimasi emisi GRK dari keempat sektor yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 3. 94 Rekpitulasi Estimasi Emisi GRK

No	Sektor	Emisi GRK (Gg)			
		CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
1	**Pengadaan dan Penggunaan Energi**	**5.846,45**	**0,25**	**0,039**	**5.864,45**
	Pembangkit	5.248,98	0,09	0,0094	5.254,03
	Transportasi	596,13	0,16	0,030	609,07
	Rumah Tangga	1,34	0,000186	0,000011	1,35
2	**Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)**				
3	**Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU)**	**15,88**	**1,96**	**5,365**	**1.663,53**
	Emisi dari Fermentasi Enterik dan *Manure Management*	-	1,96	-	49
	Emisi dari Manure Management	-	-	0,0616	18,36
	Emisi dari Pemakaian Pupuk Urea	15,88	-	-	15,88
	Indirect Emission Dari Manure Management	-	-	5,303	1.580,29
4	**Limbah**	-	**5,12**	-	**128,00**
	Limbah Padat Domestik	-	0,45	-	11,25
	Limbah Cair Domestik	-	4,67	-	116,75
Total		**5.862,333**	**7,33**	**5,404**	**7.655,98**

Dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh estimasi emisi GRK di Kabupaten Gresik sebesar 7.655,98 Gg CO_2e atau 7.655.980 Ton CO_2e. Emisi GRK terbesar dihasilkan dari sektor pengadaan dan penggunaan energi sebesar 5.864,45 Gg CO_2e atau 5.864.450 Ton CO_2e.

3.2.5.2 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi

Kerentanan dan kapasitas adapatasi terhadap perubahan iklim berkaitan dengan intensitas kejadian bencana. Berikut merupakan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2022:

Tabel 3. 95 Junlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2022

Jenis Bencana	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banjir	3	2	31	16	10		34	87	84
Longsor	1			2				7	7
Rob			3						
Puting Beliung				15	3		4	34	24
Kebakaran				215	131		174	61	
Kekeringan								53	53
Total	**4**	**2**	**34**	**248**	**144**	**-**	**212**	**242**	**168**

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2021, BPBD dan Kabupaten Gresik Dalam Angka 2023

A. Banjir

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Pada tahun 2018, tercatat 10 bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik. Jumlah ini kemudian meningkat di tahun 2021 yaitu sebanyak 34 kali. BNPB melakukan penilaian terhadp indeks bahaya banjir berdasarkan kemiringan lereng dan jarak lokasi rawan banjir terhadap sungai dengan metode fuzzy logic (The National Agency for Disaster Countermeasure, 2016). Kabupaten Gresik memiliki indeks bahaya banjir mulai dari kelas sedang hingga tinggi. Namun, berdasarkan IRBI 2021, Kabupaten Gresik memiliki kelas resiko tinggi untuk bencana banjir dengan skor 19,04. Wilayah yang paling banyak mengalami banjir yaitu, Kecamatan Balongpanggang sebanyak 14 desa, Kecamatan Benjeng sebanyak 17 desa, Kecamatan Cerme sebanyak 18 desa. Penyebab banjir di Kabupaten Gresik adalah masalah DAS dan drainase. Wilayah Kabupaten Gresik menjadi muara DAS Bengawan Solo dan DAS Lamong, serta dibagian selatan berbatasan dengan DAS Surabaya mengakibatkan wilayah Kabupaten Gresik memiliki tingkat rawan bencana banjir dari rendah ke tinggi. Luas wilayah dengan ancaman banjir rendah yaitu 27.885,83 Ha. Sedangkan untuk wilayah dengan tingkat ancaman banjir sedang yaitu sebesar 15.432,66 Ha dan untuk dengan kerentanan tinggi seluas 11.145,010 Ha yang terdiri dari berbagai desa. Berikut adalah distribusi tingkat ancaman banjir yang ada di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 96 Ancaman Banjir Per Kecamatan Tahun 2020 Di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Ancaman Banjir (Desa)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Balongpanggang	19	5	1
Benjeng	11	4	8
Bungah	21	0	1
Cerme	7	7	11
Driyorejo	12	0	4
Sampeyan	23	0	0
Dukun	22	3	1
Gresik	21	0	0
Kebomas	18	0	3
Kedamean	16	0	0
Manyar	21	0	2
Menganti	15	2	5
Panceng	14	0	0
Sangkapura	17	0	0
Sidayu	21	0	0
Tambak	13	0	0
Ujung Pangkah	13	0	0
Wringinanom	16	0	0
Total	**300**	**21**	**36**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Kebakaran lahan/hutan

Bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) dibuat sesuai dengan metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya kebakaran hutan dan lahan terdiri dari parameter jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Setiap parameter diindentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunkan metode skoring. Pada tahun 2018 tercatat 131 kejadian kebakaran lahan/hutan. Namun, jumlah bencana ini menurun di tahun 2021, dimana jumlah kejadian yang tercatat hanya 61 kejadian. Berdasarkan IRBI tahun 2021, Kabupaten Gresik memiliki kelas resiko tinggi dengan skor 19,04. Kecamatan Kebomas merupakan wilayah dengan kejadian kebakaran lahan paling banyak yaitu 13 desa. Berikut adalah rincian tingkat ancaman kebakaran lahan/hutan yang ada di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 97 Tingkat Ancaman Bencana Kebakaran Lahan/Hutan Tahun 2020 Di Kabupaten Gresik

Tingkat Ancaman	Luas Total (Ha)
Rendah	126223,7
Sedang	15841,85
Tinggi	812,6871

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Tanah Longsor

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng. Bahaya tanah longsor dibuat berdasarkan pengklasifikasian zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVBMG dan dikoreksi dengan kemiringan lereng di atas 15%. Pada tahun 2021, terdapat 4 kejadian bencana tercatat di Kabupaten Gresik. Berdasarkan IRBI tahun 2021, Kabupaten Gresik memiliki kelas resiko dari rendah hingga sedang. Hal ini dipengaruhi karena hampir semua kawasan Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah. Kecamatan Sangkapura meliputi desa Patarselamat, Gunungteguh, Sungairujing dan Kecamatan Kebomas meliputi desa Gending merupakan wilayah yang paling banyak mengalami bencana longsor. Berikut adalah tingkat ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 98 Tingkat Ancaman Bencana Tanah Longsor 2020 Di Kabupaten Gresik

Tingkat Ancaman	Luas Total (Ha)
Rendah	109590,8
Sedang	34788,65
Tinggi	1082,756

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Angin Kencang/ Puting Beliung

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, angin puting beliung didefenisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba-tiba mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Bahaya cuaca ekstrem dalam hal ini bahaya angin puting beliung sesuai dengan Perka No.2 BNPB tahun 2012 dengan metode skoring terhadap parameter-parameter penyusunannya yaitu Keterbukaan Lahan (KL), Kemiringan Lereng (L), dan Curah Hujan Tahunan (CH). Tercatat 9 kejadian angin kencang/puting beliung di Kabupaten Gresik. Menurut IRBI tahun 2021, Kabupaten Gresik memiliki kelas resiko sedang untuk bencana cuaca ekstrim dalam hal ini angin kencang/puting beliung. Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas adalah wilayah yang terdampak bencana angin kencang/puting beliung.

Tabel 3. 99 Tingkat Ancaman Bencana Tanah Longsor 2020 Di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Ancaman Cuaca Ekstrem		
	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
Balongpanggang	6537	0	0
Benjeng	6234	0	0
Bungah	8634	0	0
Cerme	7168	0	0
Driyorejo	5467	0	0
Sampeyan	8184	0	0
Dukun	6665	0	0
Gresik	732	0	0
Kebomas	3467	0	0
Kedamean	6691	0	0
Manyar	9933	0	0
Menganti	7105	0	0
Panceng	6173	0	0
Sangkapura	12603	0	0
Sidayu	4483	0	0
Tambak	7436	0	0
Ujung Pangkah	12461	0	0
Wringinanom	6232	0	0
Total	**126205**	**0**	**0**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

E. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di Perka No.2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik mempunyai dataran tinggi diatas 25 mdpl, mempunyai kelerengan 2-15%. Sebagai kawasan pantai, terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan Tambak. Pada tahun 2021, tercatat 1 kejadian bencana gelombang tinggi di Kabupaten Gresik yaitu di Kecamatan Sangkapura tepatnya di Desa Dekatagung yang menyebabkan 1 unit rumah rusak. Berikut adalah pembagian luas total untuk masing-masing tingkat ancaman bencana gelombang ekstrem.

Tabel 3. 100 Tingkat Ancaman Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi 2020 Di Kabupaten Gresik

Tingkat Ancaman	Luas Total
Rendah	2052,464
Sedang	1277,076
Tinggi	471,284

Sumber: Hasil Analisis, 2023

F. Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Dalam konteks perubahan iklim Gallopolin (2006) menjelaskan bahwa kapasitas adaptif adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri pada perubahan iklim (termasuk variabilitas iklim dan iklim yang ekstrim) agar dapat mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi, memanfaatkan kesempatan-kesempatan atau agar dapat menghadapi konsekuensi yang terjadi. Kapasitas adaptif juga diartikan sebagai kemampuan komunitas menggunakan sumberdaya untuk melakukan perubahan dengan cara yang adaptif, reaktif dan produktif. Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Gresik Tahun 2021, distribusi luas lahan berbasis jasa ekosistem pengaturan pencegahan perlindungan bencana di dominasi kelas rendah yaitu seluas 68.415,24 Ha. Distribusi luas lahan secara umum lebih cenderung ke kelas sedang. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis pengaturan pencegahan perlindungan masih tergolong cukup baik. Berikut adalah rincian kerentanan Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 101 Tingkat Kerentanan Kabupaten Gresik

Kecamatan	Kerentanan			Grand Total
	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	
Balongpanggang	1446,12	5276,22	6289,14	13011,48
Benjeng	2019,80	6233,60	352,09	8605,49
Bungah	3984,74	4301,89	347,11	8633,73
Cerme	4105,53	2153,96	908,28	7167,77
Driyorejo	4913,19	553,12	0,00	5466,31
Duduk Sampeyan	5832,60	2351,58	0,00	8184,18
Dukun	2880,80	3093,15	692,70	6666,65
Gresik	687,54	46,54	0,00	734,08
Kebomas	3404,28	63,91	0,00	3468,19
Kedamean	2393,23	3062,20	1236,40	6691,84
Manyar	8247,45	1685,53	0,00	9932,98
Menganti	6524,71	580,53	0,00	7105,24
Panceng	3606,81	1882,98	683,05	6172,84
Sangkapura	9362,17	3240,68	0,00	12602,85
Sidayu	2005,51	2091,13	386,56	4483,19
Tambak	3433,72	4001,48	0,00	7435,20
Ujung Pangkah	3074,21	9384,84	0,00	12459,04
Wringinanom	3973,86	2257,05	0,00	6230,91
Totals	**71896,25**	**52260,40**	**10895,32**	**135051,97**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.5.3 Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Suhu sebagai salah satu indikator perubahan iklim dan kondisi di Kabupaten Gresik menunjukkan suhu rata-rata perbulan 27,4 - 28,2°C yang mengindikasikan ketidaknyamanan karena ambang batas suhu nyaman adalah 20,5°C - 27,1°C. Suhu rata-rata tahunan adalah ±28,3 °C dan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±76%. Jumlah curah hujan tahunan di wilayah Gresik adalah 1200–1600 mm per tahun dan dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari hujan per tahun. Musim penghujan biasanya berlangsung sejak bulan Desember hingga bulan Maret sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Oktober.

Tabel 3. 102 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
27.6	**27.5**	**28.1**	**28.1**	**28.3**	**27.9**	**27.9**	**28.3**	**28.4**	**27.5**	**27.5**	**27.4**

Sumber: Dokumen IKPLHD Kab. Gresik, 2023

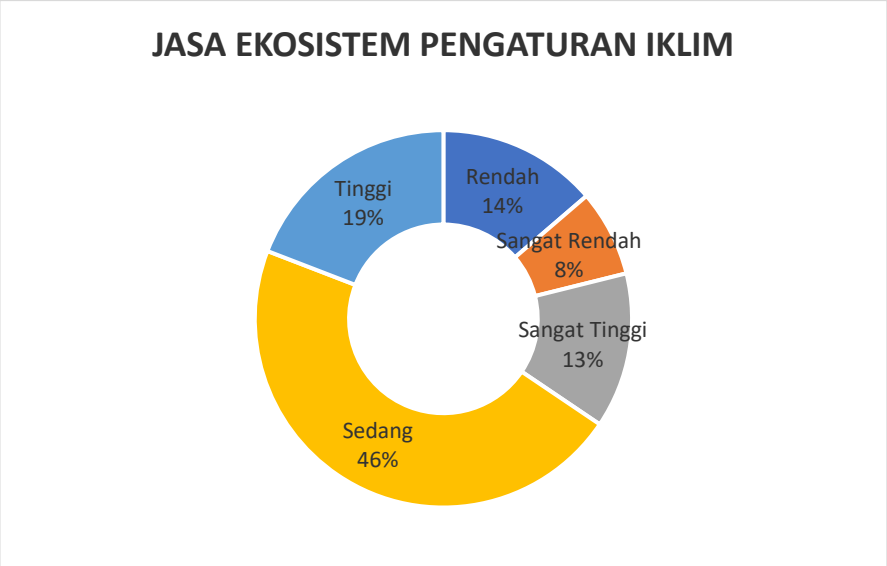
Tabel 3. 103 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	1606,26	780,38	4024,72	185,31		6596,67
2	Benjeng	2020,80	152,20	4092,25			6265,25
3	Bungah		131,55	2880,01	2523,34	3234,11	8769,01
4	Cerme	1318,63	374,79	5500,08			7193,49
5	Driyorejo	3118,05	1834,10	531,05			5483,20
6	Duduksampeyan	992,26	1231,83	5610,21	371,73		8206,04
7	Dukun		2310,52	4204,37			6514,89
8	Gresik			28,05	439,18	313,29	780,52
9	Kebomas		106,62	1880,33	1360,87	135,76	3483,59
10	Kedamean	1759,46	1189,93	3666,41	124,50		6740,30
11	Manyar		251,64	3112,30	2288,84	3890,98	9543,77
12	Menganti	1422,52	3377,69	2230,97	120,28		7151,46
13	Panceng	776,36	4968,02	522,47	186,19		6453,04
14	Sangkapura			9855,74	2150,54	378,13	12384,40
15	Sidayu		1098,88	1784,63	1439,19	51,75	4374,46
16	Tambak			4848,24	1998,39	329,41	7176,05
17	Ujungpangkah	47,96	3307,79	2931,31	3856,19	885,51	11028,77
18	Wringinanom	3507,62	2691,18	0,88			6199,68
	Total	16569,91	23807,13	57704,02	17044,57	9218,95	124344,58

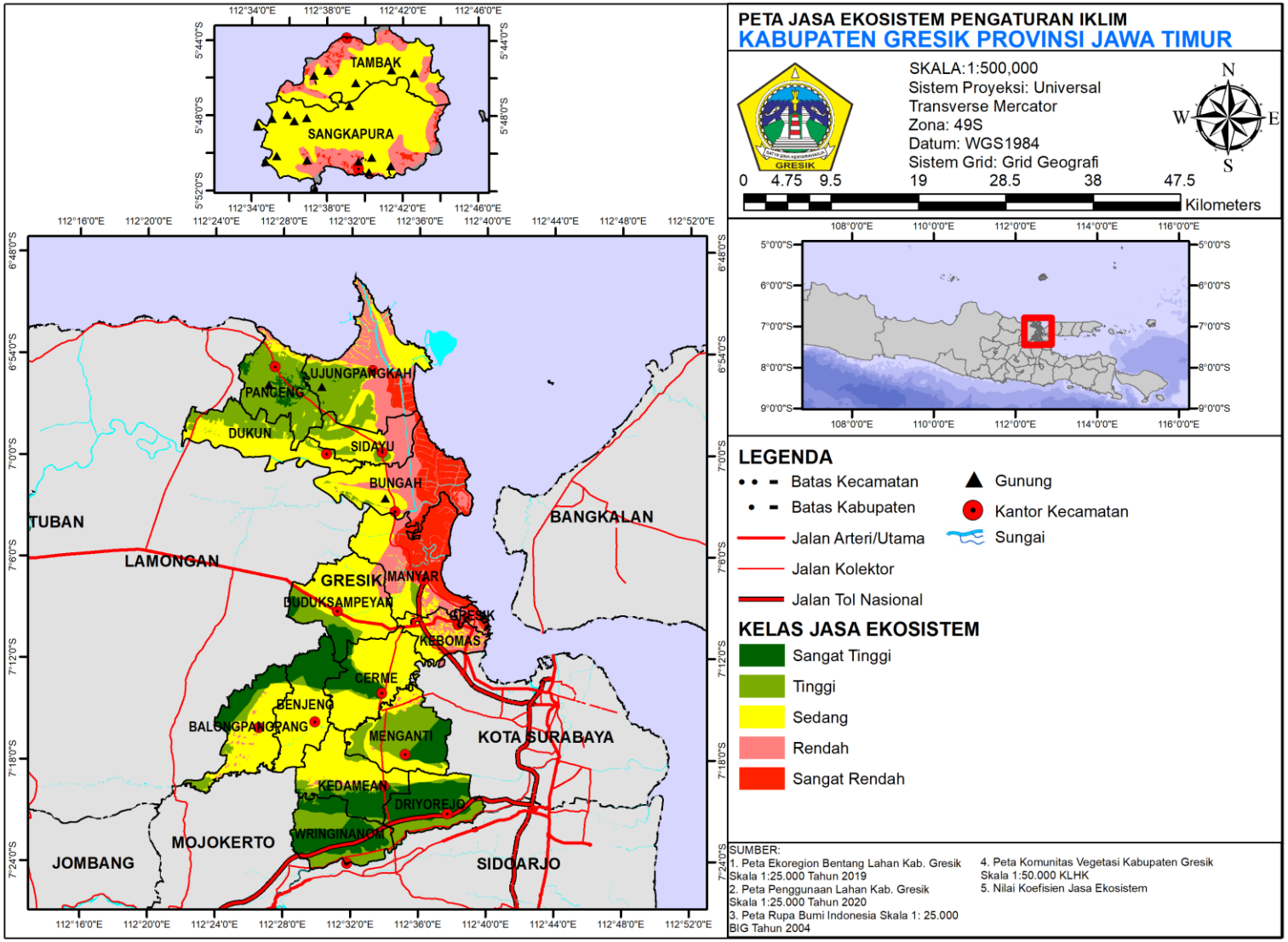
Tabel 3. 104 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Balongpangpang	1,29	0,63	3,24	0,15	0,00
2	Benjeng	1,63	0,12	3,29	0,00	0,00

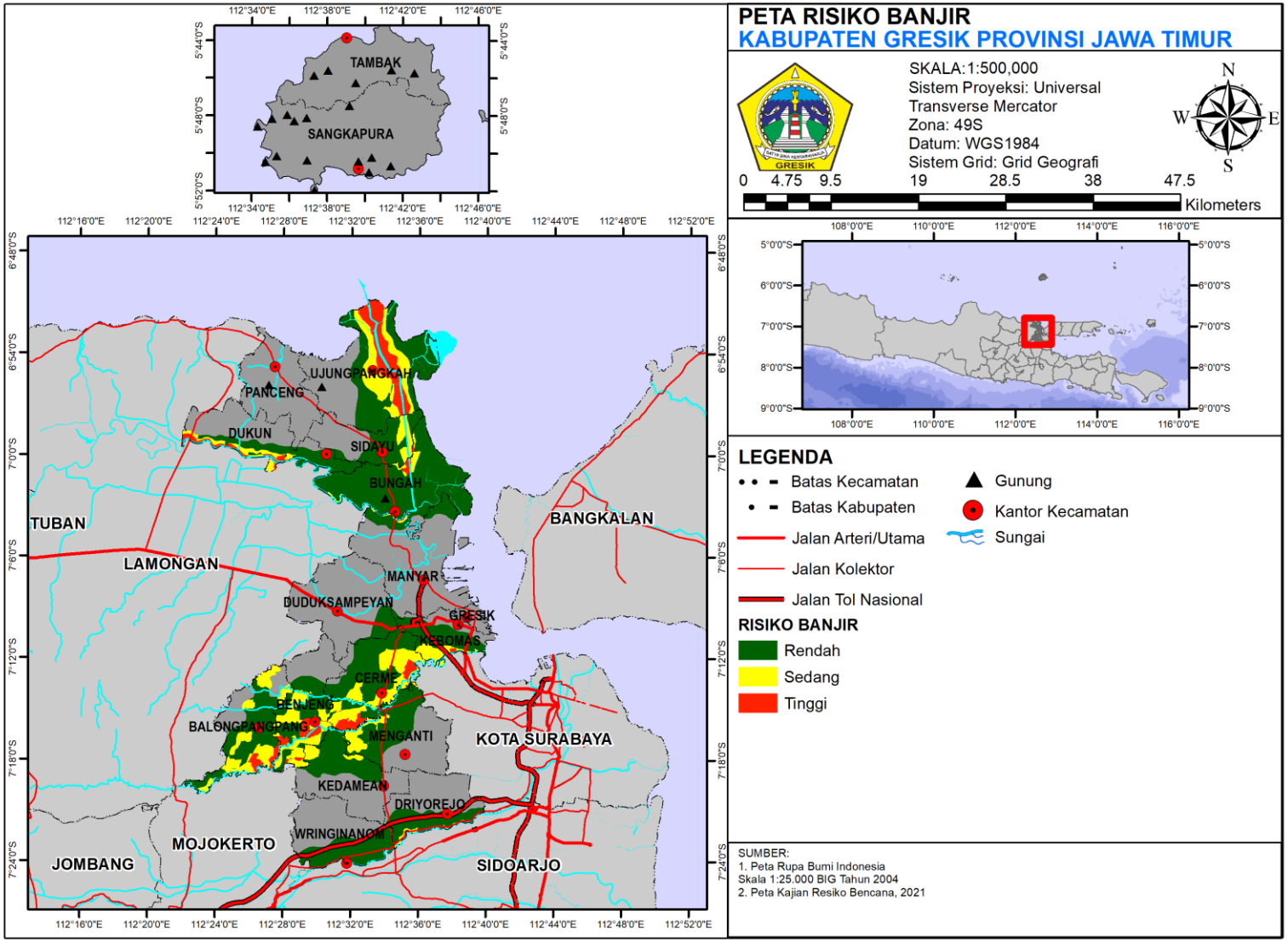
No	Kecamatan	Kelas				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
3	Bungah	0,00	0,11	2,32	2,03	2,60
4	Cerme	1,06	0,30	4,42	0,00	0,00
5	Driyorejo	2,51	1,48	0,43	0,00	0,00
6	Duduksampeyan	0,80	0,99	4,51	0,30	0,00
7	Dukun	0,00	1,86	3,38	0,00	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,02	0,35	0,25
9	Kebomas	0,00	0,09	1,51	1,09	0,11
10	Kedamean	1,41	0,96	2,95	0,10	0,00
11	Manyar	0,00	0,20	2,50	1,84	3,13
12	Menganti	1,14	2,72	1,79	0,10	0,00
13	Panceng	0,62	4,00	0,42	0,15	0,00
14	Sangkapura	0,00	0,00	7,93	1,73	0,30
15	Sidayu	0,00	0,88	1,44	1,16	0,04
16	Tambak	0,00	0,00	3,90	1,61	0,26
17	Ujungpangkah	0,04	2,66	2,36	3,10	0,71
18	Wringinanom	2,82	2,16	0,00	0,00	0,00
	Total	13,33	19,15	46,41	13,71	7,41



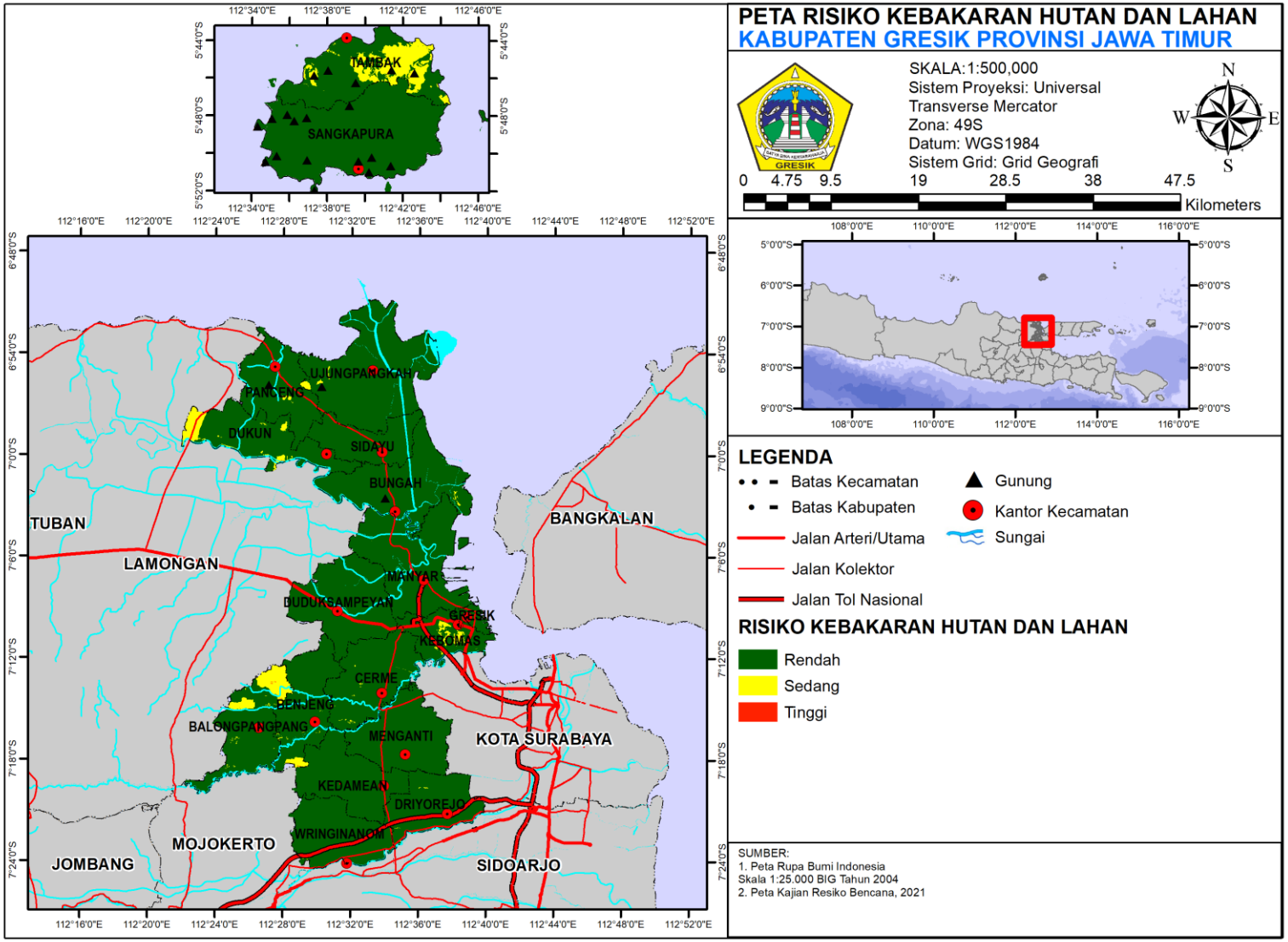
Gambar 3. 18 Presentase Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



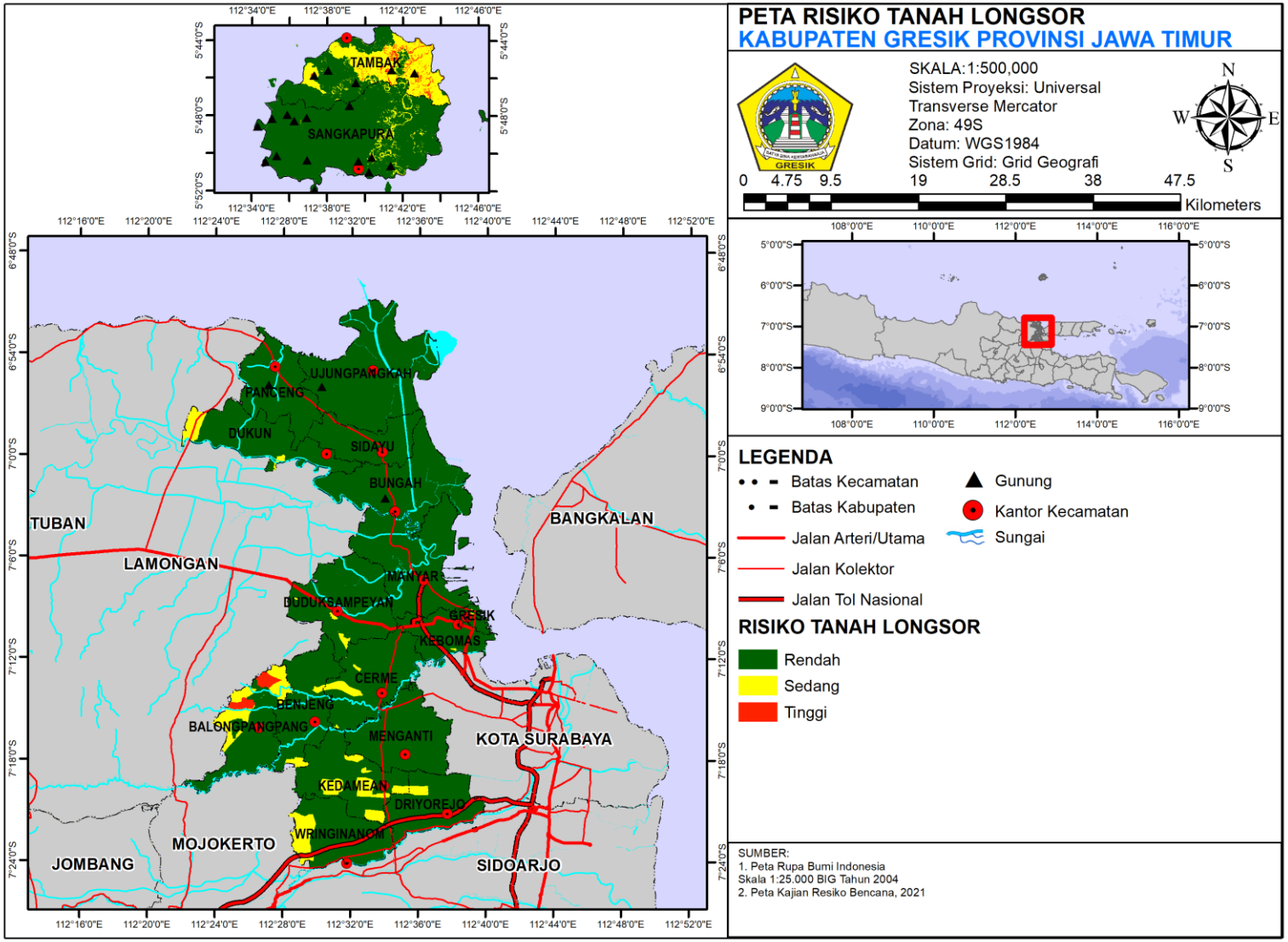
Gambar 4. 21 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



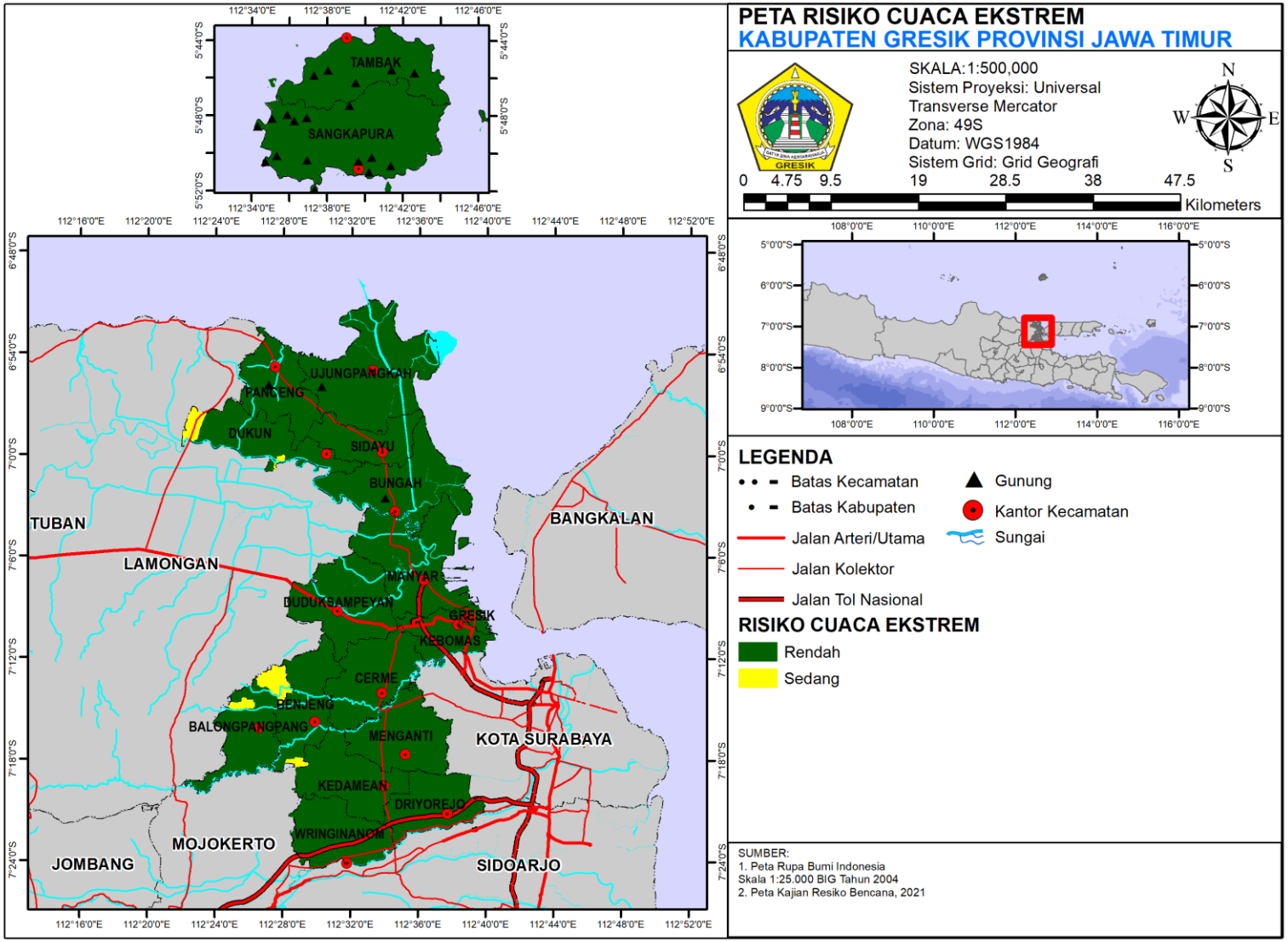
Gambar 4. 22 Peta Risiko Bencana Banjir



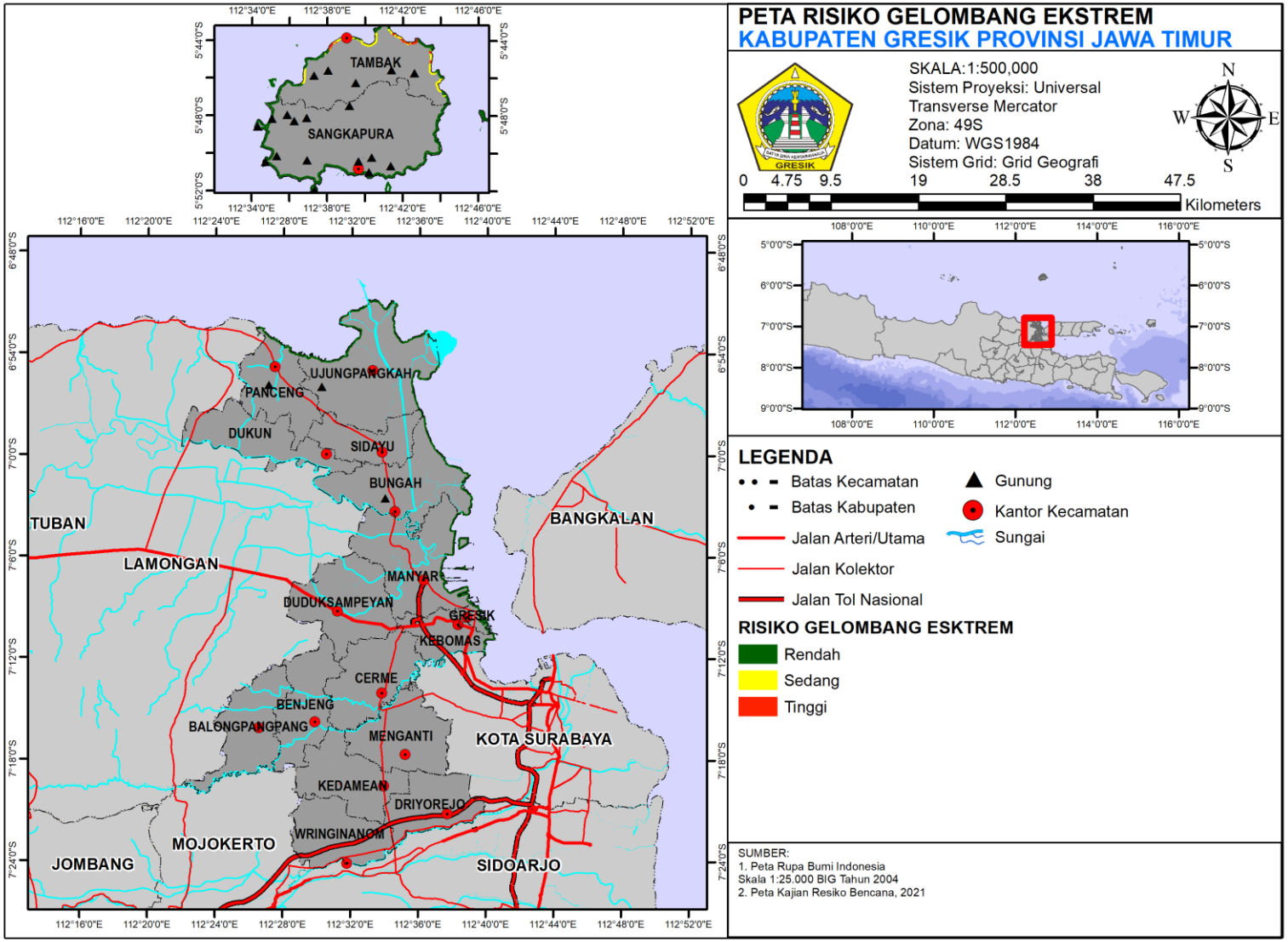
Gambar 4. 23 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



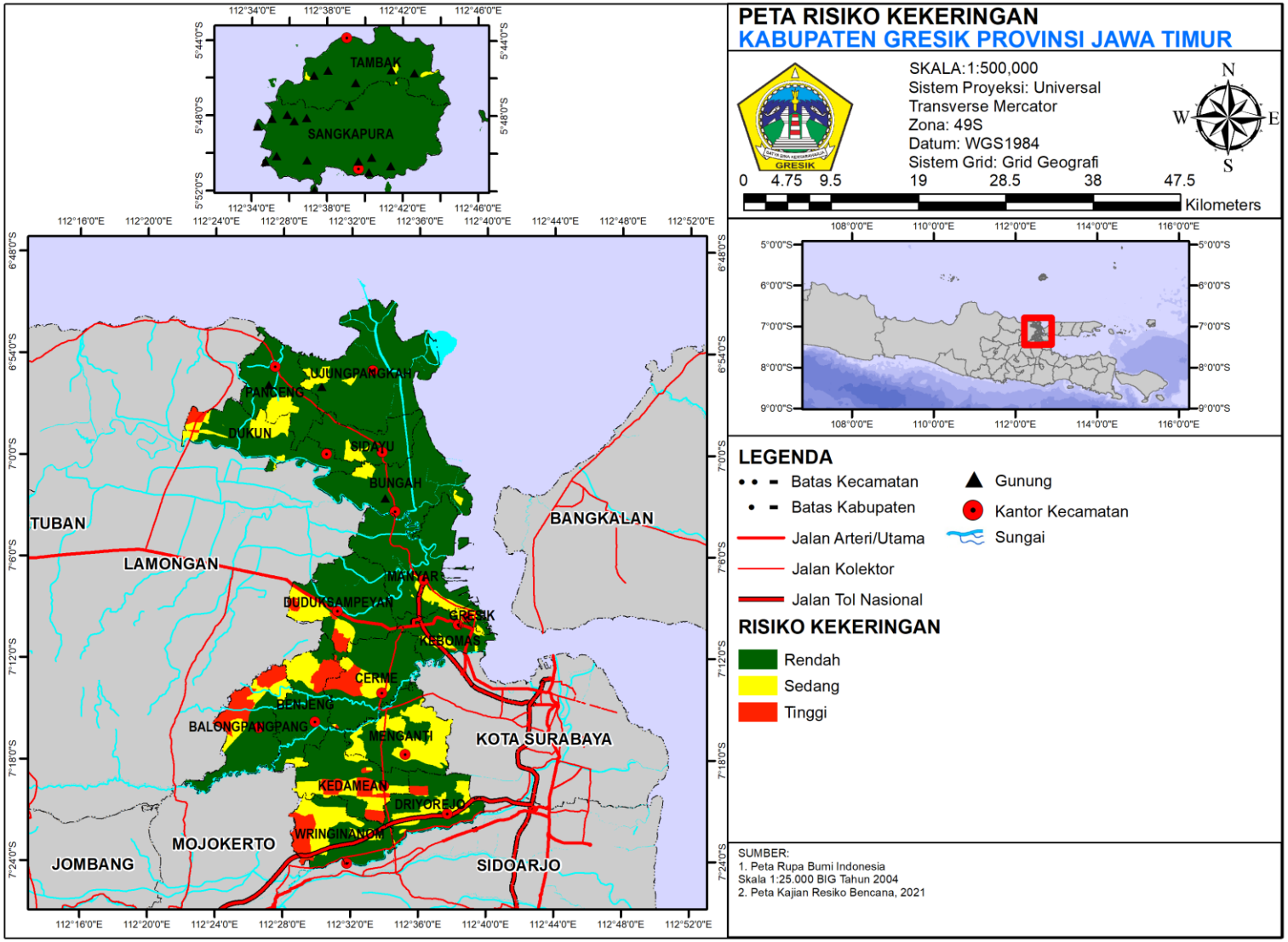
Gambar 4. 24 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor



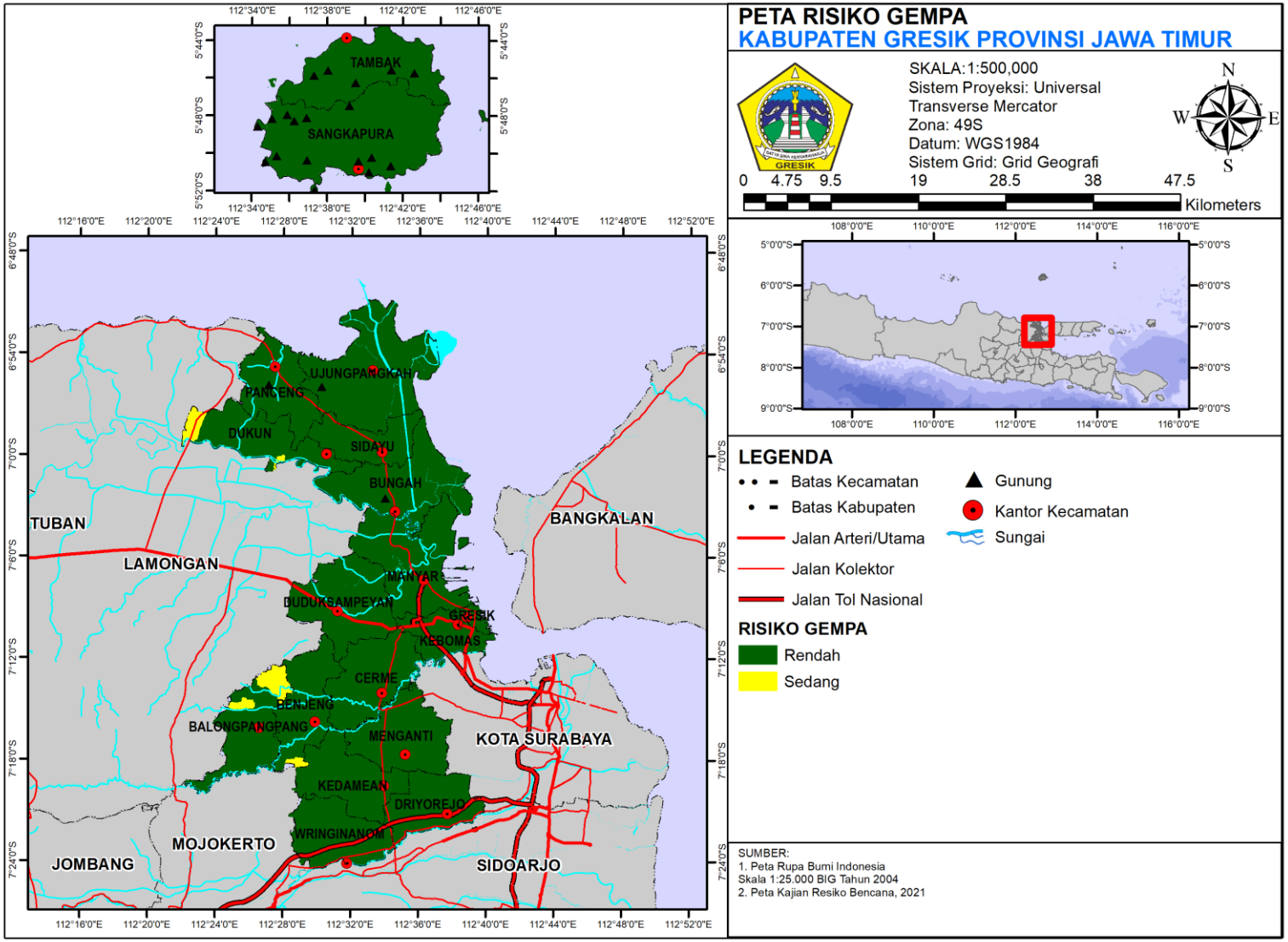
Gambar 4. 25 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim



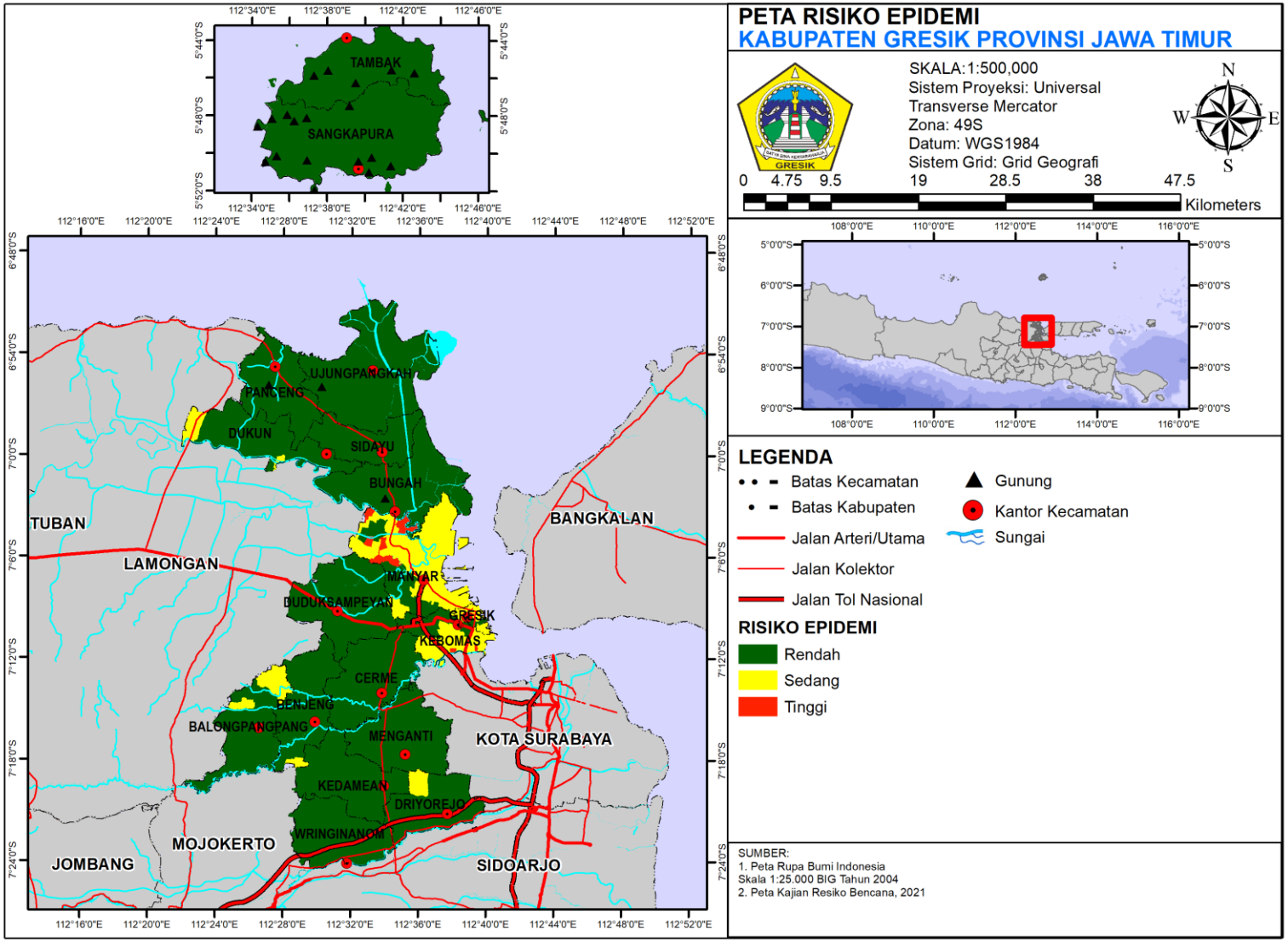
Gambar 4. 26 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim



Gambar 4. 27 Peta Risiko Bencana Kekeringan



Gambar 4. 28 Peta Risiko Bencana Gempa



Gambar 4. 29 Peta Risiko Bencana Epidemi

3.2.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

3.2.6.1 Vegetasi Alami

Kabupaten Gresik memiliki beberapa potensi keanekaragaman hayati. Diantaranya adalah dari golongan mamalia, aves, reptile, dan tumbuh-tumbuhan. Status yang dimiliki oleh masing masing spesiesnya juga berbeda-beda. Namun sebagian besar dari spesies tersebut masih memiliki status tidak dilindungi. Berikut merupakan tabel keanekaragaman hayati di Kabupaten Gresik.

Gambar 3. 19 Luas Vegetasi Kabupaten Gresik

Vegetasi	Sebaran Lokasi	Luas (Ha)	Deskripsi Tipe vegetasi Alami
Hutan Batu Gamping Pamah	Driyorejo, Kedamean, Menganti dan Wringinanom	4394.91 (3,68%)	Komunitas vegetasi yang berupa varian dari tipe hutan dipterokarpa pamah dan hutan non dipterokarpa pamah yang tumbuh pada habitat tanah batu gamping. Tidak banyak spesies yang mampu tumbuh beradaptasi di wilayah yang berbatu gamping, sehingga banyak ditemukan spesies endemik dan langka.
Hutan Batu Gamping Pamah Monsun Meranggas	Bungah, Dukun Kedamean, Panceng, Sidayu, Ujungpangkah dan Wringinanom	14754.75 (12,36%)	Komunitas vegetasi berupa varian dari tipe hutan dipterokarpa pamah dan hutan non dipterokarpa pamah yang berkembang pada lahan dengan substrat batugamping pamah pada wilayah yang beriklim monsun dengan karakteristik tegakan pohon merangas (menggugurkan daun) pada musim kering.
Hutan Mangrove Monsun	Kebomas	15.82 (0,01%)	Vegetasi yang terdapat pada komunitas hutan yang tumbuh dan berkembang pada habitat basah dan masin di sepanjang pantai, terutama pantai berlumpur dan pada muara-muara sungai besar/ kecil, dan dapat membentang sepanjang sungai besar jauh sampai ke pedalaman. Karakteristik vegetasinya adalah spesies ini tahan hidup di daerah kering dengan tipe hujan D – H (index Q > 60 %) dan evapotranspirasi melebihi curah hujan, yang umumnya

Vegetasi	Sebaran Lokasi	Luas (Ha)	Deskripsi Tipe vegetasi Alami
Hutan Non Dipterokarpa Pamah	Balongpangpang, Benjeng, Cerme, Driyorejo, Duduksampeyan, Gresik, Kebomas, Kedamean, Manyar Menganti dan Wringinanom	12619.89 (10,57%)	Komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada tanah pada tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah yang beraneka (kompleks) pada elevasi 0 - 1000 m, Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok Dipterocarpaceae. Vegetasi di sini merupakan hutan campuran yang tersusun oleh pohon-pohon tinggi dan besar dengan kerapatan yang tinggi. Tinggi pohon tidak sama sehingga dari udara kanopi hutan tampak tidak rata. Keanekaragamannya tidak setinggi di Kalimantan. Diantara Dipterocarpaceae yang paling penting adalah Anisoptera thurifera yang merupakan kayu komersil. Kayu jenis ini cepat tumbuh di tempat terbuka bahkan di hutan sekunder pada dataran aluvium.
Hutan Pamah Monsun Meranggas	Dukun, Panceng, Sangkapura, Sidayu Tambak dan Ujungpangkah	16905.93 (14,16%)	Vegetasi hutan pamah monsun merangas definisi operasionalnya adalavegetasi dengan komunitas hutan yang tumbuh dan berkembang pada lahan kering pamah pada wilayah yang beriklim monsun dengan karakteristik vegetasi hutan yang menggugurkan daun (merangas) atau mengering padamusim kemarau. Struktur dan komposisi floristik hutan tersebut mirip seperthutan hujan dengan perawakan pohonnya lebih kecil serta stratifikasi pohon tidak terlalu kompleks.
Hutan Pantai	Balongpangpang, Benjeng, Bungah, Cerme, Driyorejo, Duduksampeyan, Dukun, Gresik, Kebomas, Kedamean, Manyar, Menganti, Panceng, Sidayu, Ujungpangkah dan Wringinanom	44830.43 (37,55%)	Vegetasi hutan pantai definisi operasionalnya adalah vegetasi dengan komunitas vegetasi di sepanjang pantai di belakang pantai pasir yang ditumbuhi komunitas pes-caprae, dimana berkembang spesies semak atau komunitas perdu dan pohon kecil,Komposisi floristik hutan pantai seragam di seluruh Indonesia, baik yang terdapat di kawasan beriklim basah maupun beriklim kering musiman. Spesies karakteristik wilayah ini adalah Ardisia elliptica, Caesalpina bonduc, Clerodendron inerme, Colubrina asiatica, Cycas rumphii, Desmodium umbellatum, Dodonaea viscosa, Erythrina variegata, Messerschmidia argentea, Pemphis acidula, Pluchea indica, Premna corymbosa,

Vegetasi	Sebaran Lokasi	Luas (Ha)	Deskripsi Tipe vegetasi Alami
			Scaevola taccada, Sophora tomentosa dan Tacca leontopetaloides.
Hutan Pantai Monsun	Bungah, Duduksampeyan Gresik, Kebomas, Manyar, Panceng Sidayu dan Ujungpangkah	13298.29 (11,14%)	Wilayah pantai yang beriklim monsun dengan komunitas vegetasi di sepanjang pantai dibelakang pantai pasir yang ditumbuhi komunitas pes-caprae, dimanaberkembang spesies dominan dari semak atau komunitas perdu dan pohonkecil. Komposisi floristik hutan pantai seragam di seluruh Indonesia, baik yang terdapat di kawasan beriklim basah maupun beriklim kering (monsun)Spesies semak atau komunitas perdu dan pohon kecil. yang banyak ditemukan di wilayah ini adalah Ardisia elliptica, Caesalpina bonduc,Clerodendron inerme, Colubrina asiatica, Cycas rumphii, Desmodium umbellatum, Dodonaea viscosa, Erythrina variegata, Messerschmidia argentea, Pemphis acidula, Pluchea indica, Premna corymbosa, Scaevolataccada, Sophora tomentosa dan Tacca leontopetaloides. Spesies pohon lain juga ditemukan antara lain adalah Barringtonia asiatica dan Calophyllum inophyllum.
Hutan Terna Rawa Air Tawar Pamah Monsun	Sangkapura dan Tambak	4662.41 (3,91%)	Kelompok komunitas tumbuhan yang tumbuh dan berkembang pada wilayahlahan basah (rawa air tawar) yang beriklim monsun. Kawasan ini terkadangdibanjiri oleh air hujan. Air kaya akan mineral dengan kemasaman rendah (pH= 6 atau lebih). Wilayah ini tergolong kaya hara dengan vegetasi terna (herba)seperti berupa kelompok rerumputan (Leersia hexandra, Echinochlo astagnina, Oryza spp., Panicum sp., dan Hymenachne amplexycaulis), paku pakuan (Cyclosorus), teki-tekian (Thoracostachyum sumatranum dan Scleria sp), bakung- bakungan (Hanguana), kelompok pandan (Pandanus spp) serta tegakan pohon yang jarang dan saling tidak menutup tajuknya.

Vegetasi	Sebaran Lokasi	Luas (Ha)	Deskripsi Tipe vegetasi Alami
Savanna	Balongpangpang, Kedamean, Menganti dan Wringinanom	7459.59 (6,25%)	Komunitas vegetasi yang berupa padang rumput atau semak pendek dengan pohon-pohon yang tumbuh terpencar dan jarang, tajuknya yang tidak saling bersentuhan yang tumbuh dan berkembang pada wilayah lahan lahan kering yang beriklim monsun pada elevasi di bawah 1000 m dpl. Spesies yang mendominasi wilayah ini antara lain adalah rumput Heteropogon contortus. Pohon-pohon yang biasa tumbuh dan dominan di savana antara lain Acacia leucophloea, Albizia chinensis, Borassus flabelifer, Casuarina junghuhniana, Corypha gebanga dan Schleichera oleosa.
Terna Danau Pamah	Duduksampeyan	433.98 (0,36%)	Vegetasi dari kelompok terna yang tumbuh umumnya pada tepian danau yang airnya relatif dangkal. Beberapa spesies yang biasa ditemukan pada wilayah ini adalah kelompok rerumputan (Leersia hexandra, Echinochloa stagnina, Oryza spp., Panicum sp., dan Hymenachne amplexycaulis), paku- pakuan (Cyclosorus), teki tekian (Thoracostachyum sumatranum dan Scleria sp.), bakung-bakungan (Hanguana)

Sumber: D3TLH Kabupaten Gresik

3.2.6.2 Keanaekaragaman Hayati Flora dan Fauna

Tabel 3. 105 Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gresik

Golongan	Nama Species		Satatus			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
Amphibi	Fejervarya cancrivora	Katak sawah				V
Hewan Menyusui	Axis kuhlii	Rusa Bawean	V	V	V	
	Sus verrucosus	Babi Kutil Bawean	V	V		V
	Sus scrofa	Babi Hutan				V
	Prionailurus bengalensis	Kucing Hutan			V	
	Macaca fascicularis	Monyet Ekor Panjang				V
Burung	Ardeola speciose	Blekok sawah				V
	Ardea purpurea	Cangak merah				V
	Ixobrychus sinensis	Bambangan kuning				V

Golongan	Nama Species		Satatus			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Leptoptilos javanicus	Bangau tongtong				V
	Limosa lapponica	Biru-laut ekor-blorok				V
	Limosa limosa	Biru-laut ekor-hitam				V
	Lonchura maja	Bondol haji				V
	Lonchura leucogastroides	Bondol jawa				V
	Lonchura punctulate	Bondol peking				V
	Centropus bengalensis	Bubut alang-alang				V
	Centropus nigrorufus	Bubut jawa	V			V
	Passer montanus	Burung-gereja erasia				V
	Cinnyris jugularis	Burung-madu sriganti				V
	Dicaeum trigonostigma	Cabai bunga-api				V
	Dicaeum trochileum	Cabai jawa				V
	Picoides moluccensis	Caladi tilik				V
	Dendrocopos analis	Caladi ulam				V
	Ardea cinerea	Cangak abu				V
	Charadrius javanicus	Cerek jawa				V
	Pluvialis fulva	Cerek kernyut				V
	Charadrius leschenaultii	Cerek-pasir besar				V
	Charadrius mongolus	Cerek-pasir mongolia				V
	Orthotomus ruficeps	Cinenen kelabu				V
	Orthotomus sutorius	Cinenen pisang				V
	Aegithina tiphia	Cipoh kacat				V
	Pycnonotus aurigaster	Cucak kutilang				V
	Dendrocygna arcuata	Belibis kembang				V
	Todiramphus chloris	Cekakak sungai				V
	Charadrius alexandrius	Cerek tilil				V

Golongan	Nama Species		Satatus			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Sterna bengalensis	Dara-laut benggala				V
	Thalasseus bergii	Dara-laut jambul				V
	Sternula albifrons	Dara-laut kecil				V
	Chlidonias hybrida	Dara-laut kumis				V
	Chlidonias leucopterus	Dara-laut sayap-putih				V
	Sterna nilotica	Dara-laut tiram				V
	Streptopelia bitorquata	Dederuk jawa				V
	Pandion haliaetus	Elang tiram			V	
	Corvus macrorhynchos	Gagak kampung				V
	Himantopus leucocephalus	Gagang-bayam timur				V
	Numenius arquata	Gajahan besar				V
	Numenius phaeopus	Gajahan penggala				V
	Numenius madagascariensis	Gajahan timur				V
	Anas querquedula	Itik alis-putih				V
	Anas gibberifrons	Itik benjut				V
	Pachycephala cinerea	Kancilan bakau				V
	Lalage nigra	Kapasan kemiri				V
	Amaurornis phoenixucrus	Kareo padi				V
	Calidris ferruginea	Kedidi golgol				V
	Artamus leucoryn	Kekep babi				V
	Motacilla tschutschensis	Kicuit kerbau				V
	Rhipidura javanica	Kipasan belang				V
	Merops philippinus	Kirik-kirik laut				V
	Merops leschenaulti	Kirik-kirik senja				V

Golongan	Nama Species		Satatus			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Butorides striata	Kokokan laut				V
	Nycticorax nictycorax	Kowak-malam abu				V
	Egretta alba	Kuntul besar				V
	Egretta garzetta	Kuntul kecil				V
	Ardea intermedia	Kuntul perak				V
	Cecropis daurica	Layang-layang loreng				V
	Hirundo javanica	Layang-layang batu				V
	Gallinula chloropus	Mandar batu				V
	Pycnonotus goiaavier	Merbah cerukcuk				V
	Phalacrocorax sulcirostris	Pecuk-padi hitam				V
	Microcarbo niger	Pecuk-padi kecil				V
	Prinia familiaris	Perenjak jawa				V
	Prinia inornata	Perenjak padi				V
	Geopelia striata	Perkutut jawa				V
	Treron vernans	Punai gading				V
	Alcedo ceorulescens	Raja-udang biru				V
	Gerygone sulphurea	Remetuk laut				V
	Ficedula westermanni	Sikatan belang				V
	Pernis ptilorhynchus	Sikep-madu asia				V
	Spilopedia chinensis	Tekukur biasa				V
	Xenus cinereus	Trinil bedaran				V
	Tringa totanus	Trinil kaki-merah				V
	Actitis hypoleucos	Trinil pantai				V
	Arenaria interpes	Trinil pembalik-batu				V
	Collocalia linchi	Walet linci				V
	Cacomantis merulinus	Wiwik kelabu				V
Reptilia	Varanus salvator	Biawak				V
	Chelonia mydas	Penyu Hijau			V	
	Eretmochelys Imbricata	Penyu Sisik			V	

Golongan	Nama Species		Satatus			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Lepidochelys olivacea	Penyu Lekang			V	
	Phyton reticulatus	Ular Sanca Kembang				V
	Phyton bivittatus	Ular Sanca Bodo			V	
	Crocodylus porosus	Buaya muara			V	
Tumbuh Tumbuhan	Tectona grandis	Jati				V
	Dalbergia latifolia	Sonokeling				V
	Avicennia marina	Api-api laut				V
	Rhizopora mucronata	Bakau Hijau				V
	Avicennia alba	Api-api besar				V
	Sonneratia caseolaris	Pedada Merah				V
	Rhizopora apiculata	Tanjang				V
	Excoecaria agallocha	Buta-Buta				V

Sumber: Data Bidang Teknis Balai Besar Ksda Jawa Timur

3.2.6.3 Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah semua kehidupan di bumi ini, termasuk tanaman, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan berbagai sistem ekologi yang dikandungnya. Ini termasuk kelimpahan relatif dan keragaman genetik organisme dari semua habitat, baik di darat, di laut, atau di sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu Keanekaragaman jenis, keanekaragaman genetik dan keanekaragaman ekosistem. Berikut merupakan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pendukung biodiversitas.

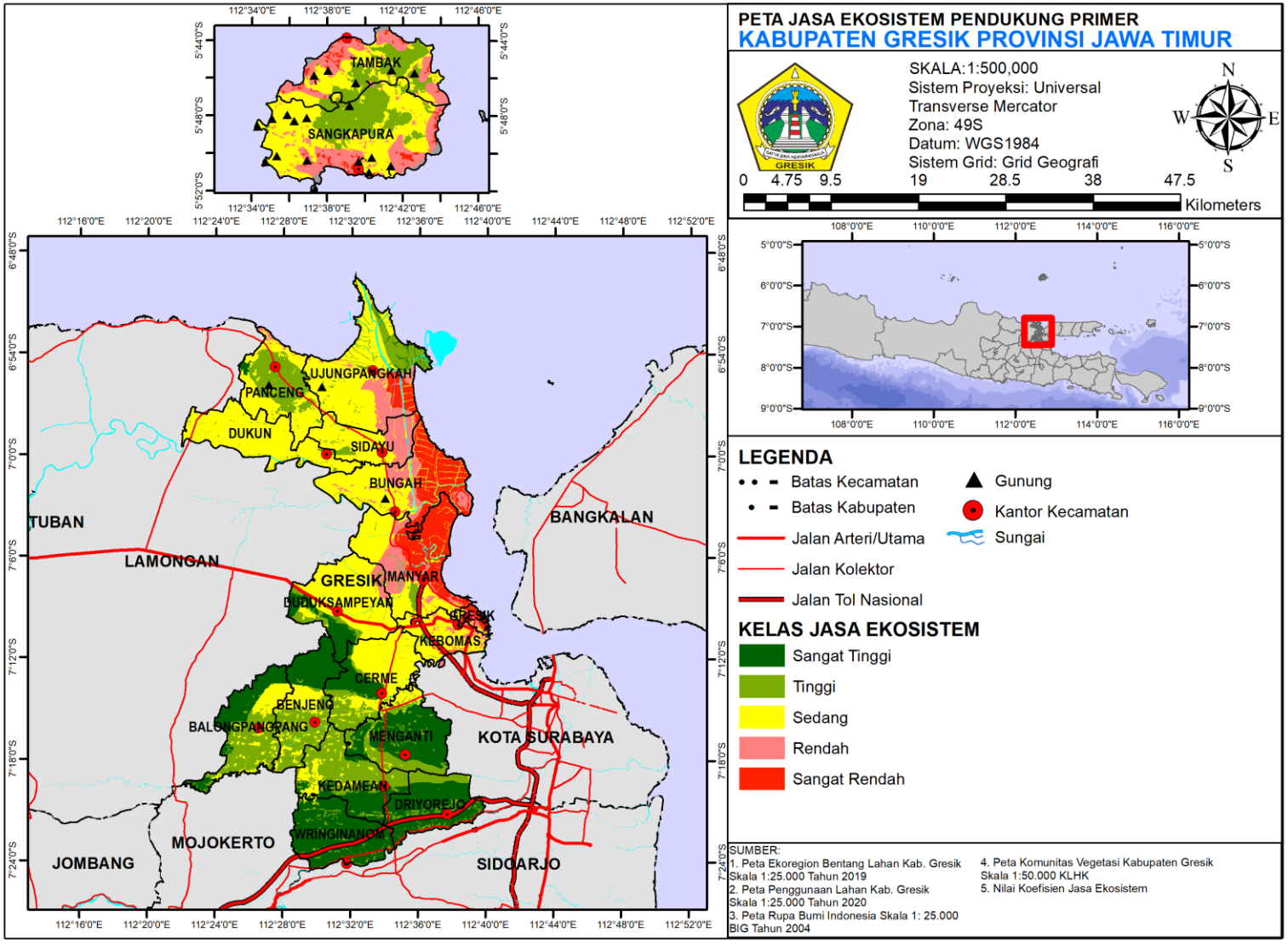
Tabel 3. 106 Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Balongpangpang	2289,74	2953,35	1353,59			6596,67
2	Benjeng	2116,90	2636,34	1512,01			6265,25
3	Bungah		55,00	3932,46	1565,34	3216,22	8769,01
4	Cerme	1389,21	1615,80	4188,48			7193,49
5	Driyorejo	4134,55	1335,25	13,40			5483,20
6	Duduksampeyan	1413,24	754,02	5667,75	371,03		8206,04
7	Dukun		243,72	6271,16			6514,89

No	Kecamatan	Kelas					Luas Total (Ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
8	Gresik			135,08	338,22	307,22	780,52
9	Kebomas		126,39	2595,04	689,83	72,33	3483,59
10	Kedamean	2135,43	3746,58	858,29			6740,30
11	Manyar		403,49	3646,79	1876,50	3617,00	9543,77
12	Menganti	4381,89	2074,65	694,91			7151,46
13	Panceng	128,56	2922,80	3233,83	167,85		6453,04
14	Sangkapura		3090,08	6276,42	2642,09	375,81	12384,40
15	Sidayu		238,19	2736,09	1348,42	51,75	4374,46
16	Tambak		2309,53	2283,78	2254,17	328,56	7176,05
17	Ujungpangkah	182,64	1977,51	6538,21	1471,39	859,02	11028,77
18	Wringinanom	5627,80	494,05	77,83			6199,68
	Total	23799,95	26976,75	52015,13	12724,83	8827,90	124344,58

Tabel 3. 107 Prosentase Daya Dukung lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

1	Balongpangpang	1,84	2,38	1,09	0,00	0,00
2	Benjeng	1,70	2,12	1,22	0,00	0,00
3	Bungah	0,00	0,04	3,16	1,26	2,59
4	Cerme	1,12	1,30	3,37	0,00	0,00
5	Driyorejo	3,33	1,07	0,01	0,00	0,00
6	Duduksampeyan	1,14	0,61	4,56	0,30	0,00
7	Dukun	0,00	0,20	5,04	0,00	0,00
8	Gresik	0,00	0,00	0,11	0,27	0,25
9	Kebomas	0,00	0,10	2,09	0,55	0,06
10	Kedamean	1,72	3,01	0,69	0,00	0,00
11	Manyar	0,00	0,32	2,93	1,51	2,91
12	Menganti	3,52	1,67	0,56	0,00	0,00
13	Panceng	0,10	2,35	2,60	0,13	0,00
14	Sangkapura	0,00	2,49	5,05	2,12	0,30
15	Sidayu	0,00	0,19	2,20	1,08	0,04
16	Tambak	0,00	1,86	1,84	1,81	0,26
17	Ujungpangkah	0,15	1,59	5,26	1,18	0,69
18	Wringinanom	4,53	0,40	0,06	0,00	0,00
	Total	19,14	21,70	41,83	10,23	7,10



Gambar 4. 30 Peta Kinerja Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

3.3 KONDISI DEMOGRAFI

3.3.1 Kependudukan

Karakteristik Kependudukan ialah penjelasan mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk sehingga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Karakteristik kependudukan pada Kabupaten Gresik dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, jumlah dan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data kependudukan tersebut diperoleh dari Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2021. Berikut merupakan Karakteristik Kependudukan Kabupaten Gresik.

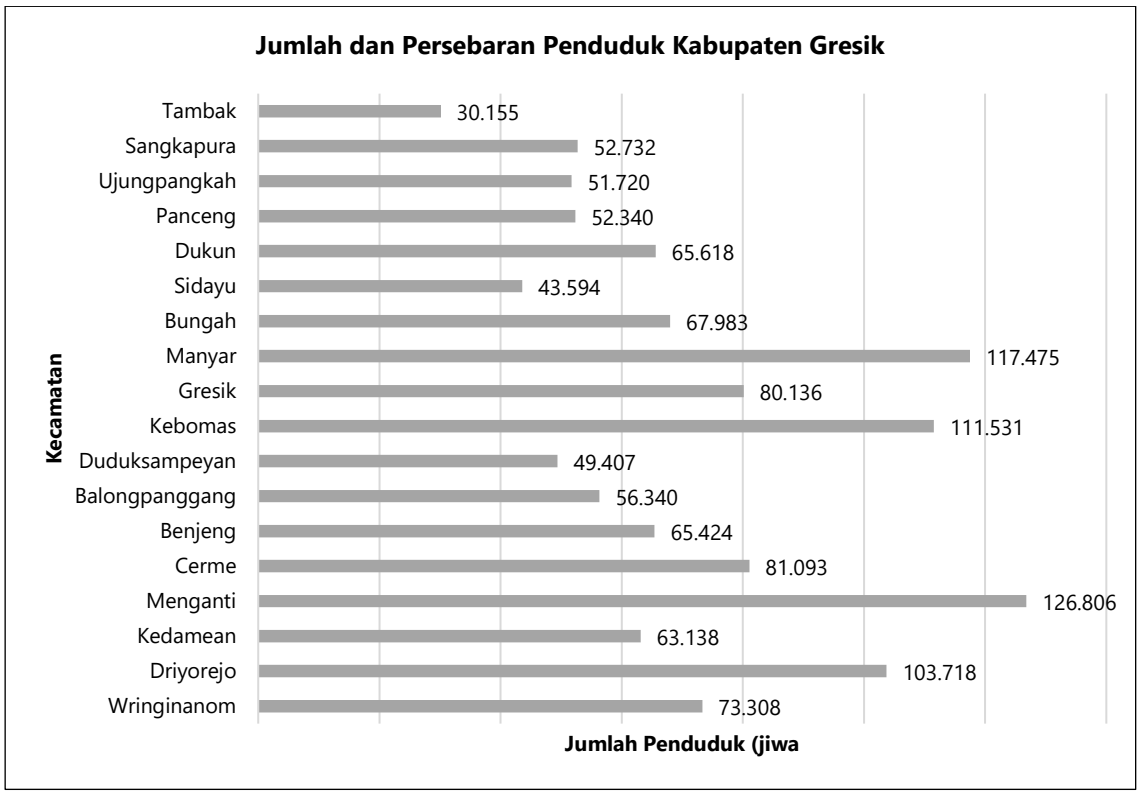
A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk merupakan data yang menjelaskan banyaknya penduduk yang berdomisili di wilayah tertentu. Berdasarkan Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023, jumlah penduduk yang berada pada Kabupaten Gresik mencapai 1.291.518 jiwa pada tahun 2022. Berikut merupakan jumlah dan persebaran penduduk Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 108 Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Wringinanom	73.308
2	Driyorejo	103.718
3	Kedamean	63.138
4	Menganti	126.806
5	Cerme	81.093
6	Benjeng	65.424
7	Balongpanggang	56.340
8	Duduksampeyan	49.407
9	Kebomas	111.531
10	Gresik	80.136
11	Manyar	117.475
12	Bungah	67.983
13	Sidayu	43.594
14	Dukun	65.618
15	Panceng	52.340
16	Ujungpangkah	51.720
17	Sangkapura	52.732
18	Tambak	30.155
Total		**1.291.518**

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2023



Gambar 3. 20 Grafik Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2023

Dari **Tabel 3.13 dan Gambar 3.1** dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Menganti memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 126.806 jiwa, dan Kecamatan Tambak memiliki jumlah penduduk terkecil dengan jumlah 30.155 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk ini terjadi karena perbandingan luas wilayah tiap kecamatan berbeda serta perbedaan fungsi kegiatan dan aktivitas dari kecamatan tersebut.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk didapatkan dari rumus jumlah penduduk tahun n dikurang jumlah penduduk tahun n-1 dibagi dengan jumlah penduduk tahun n-1. Semakin besar angka pertumbuhan penduduknya maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Berikut merupakan Laju Pertumbuhan Penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 109 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2020 – 2021)
1	Wringinanom	0,52
2	Driyorejo	-0,11
3	Kedamean	0,42

4	Menganti	1,11
5	Cerme	0,90
6	Benjeng	0,40
7	Balongpanggang	0,39
8	Duduksampeyan	0,26
9	Kebomas	0,53
10	Gresik	-0,27
11	Manyar	0,33
12	Bungah	0,64
13	Sidayu	0,23
14	Dukun	0,77
15	Panceng	1,53
16	Ujungpangkah	0,88
17	Sangkapura	0,47
18	Tambak	1,14
Rata-Rata		0,53

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Panceng memiliki laju pertumbuhan penduduk terbesar dengan pertumbuhan 1,53 per tahun, dan Kecamatan Gresik memiliki laju pertumbuhan penduduk terkecil yaitu sebesar -0,27 per tahun. Sedangkan Kabupaten Gresik, secara rata-rata memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,53 per tahun.

C. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah antara penduduk jenis kelamin laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah tertentu. Rasio jenis kelamin dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan, sehingga perhitungannya adalah jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dan hasilnya dikali seratus. Berikut merupakan rasio jenis kelamin yang tercatat dalam Kabupaten Gresik Dalam Angka 2023.

Tabel 3. 110 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Wringinanom	36.429	35.879	101,53
2	Driyorejo	52.248	51.470	101,51
3	Kedamean	31.841	31.297	101,74
4	Menganti	63.920	62.886	101,64
5	Cerme	40.834	40.259	101,43
6	Benjeng	32.829	32.595	100,72
7	Balongpanggang	28.052	28.289	99,16
8	Duduksampeyan	24.706	24.701	100,02
9	Kebomas	55.890	55.641	100,45

10	Gresik	39.802	40.334	98,68
11	Manyar	59.282	58.193	101,87
12	Bungah	34.346	33.637	102,11
13	Sidayu	21.984	21.610	101,73
14	Dukun	33.042	32.576	101,43
15	Panceng	26.138	26.202	99,76
16	Ujungpangkah	25.945	25.775	100,66
17	Sangkapura	26.568	26.164	101,54
18	Tambak	15.006	15.149	99,06
Kabupaten Gresik (Rata-rata)				100,97

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2023

Rata-rata rasio jenis kelamin pada Kabupaten Gresik yaitu 100,97 sehingga dapat disimpulkan terdapat 101 penduduk laki-laki dalam 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terletak pada Kecamatan Bungah yaitu 102,11 artinya jika dibulatkan maka terdapat 102 penduduk laki-laki dalam 100 penduduk perempuan. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Gresik yaitu 98,68 artinya jika dibulatkan setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

D. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk adalah hasil bagi antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas wilayah daerah tersebut. Kepadatan penduduk biasanya memiliki satuan jiwa/km^2 atau jiwa/ha. Semakin besar hasil dari pembagian tersebut, maka semakin padat jumlah penduduk di suatu wilayah (BPS, 2010). Berikut data kepadatan penduduk Kabupaten Gresik berdasarkan Kabupaten Gresik Dalam Angka 2022.

Tabel 3. 111 Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
1	Wringinanom	73.347	62,62	1.171,3
2	Driyorejo	122.562	51,29	2.389,59
3	Kedamean	61.562	65,95	933,48
4	Menganti	146.160	68,73	2.126,58
5	Cerme	82.189	71,73	1.145,81
6	Benjeng	63.181	61,26	1.031,36
7	Balongpanggang	53.971	63,88	844,88
8	Duduksampeyan	47.220	74,29	635,62
9	Kebomas	119.432	30,16	2.959,95
10	Gresik	76.077	5,54	13.732,31
11	Manyar	119.863	97,7	1.226,85
12	Bungah	65.852	79,84	824,8
13	Sidayu	43.623	47,13	925,59

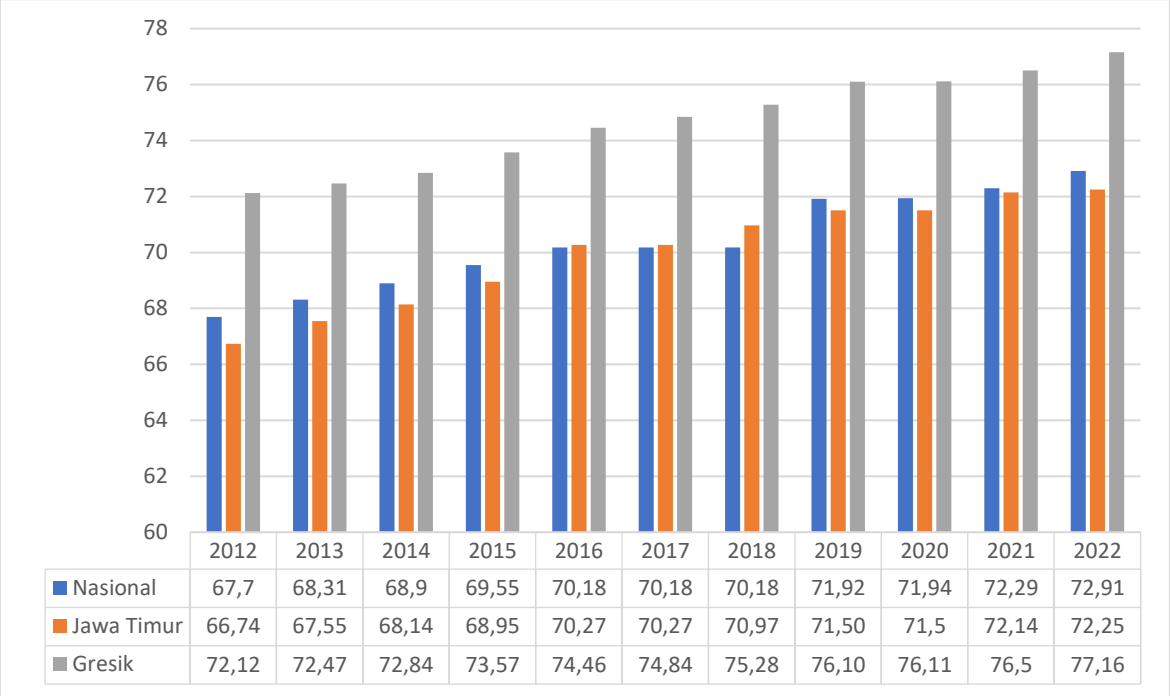
14	Dukun	63.387	59,08	1.072,9
15	Panceng	51.556	62,77	832,35
16	Ujungpangkah	49.530	94,82	522,36
17	Sangkapura	50.928	118,27	430,61
18	Tambak	30.129	78,7	382,83
Total / Rata-rata		1.320.570	1.193,76	1.106,23

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Dapat diketahui kepadatan penduduk dalam satuan kilometer persegi Kabupaten Gresik sebesar 1.106 jiwa/km^2 Kepadatan tertinggi terletak pada Kecamatan Gresik dengan 13.732 jiwa/km^2 sedangkan kepadatan terendah terletak pada Kecamatan Tambak yaitu 383 jiwa/ km^2.

3.3.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator dalam pengukuran untuk mencapai pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IPM Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya secara konsisten. Dalam rentang Tahun 2012 - 2022, IPM Kabupaten Gresik meningkat sebesar 5,04 poin. Pada Tahun 2022 IPM Kabupaten Gresik mencapai 77,16 poin berada di atas Nasional (72,91) dan Provinsi Jawa Timur (72,25).



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	67,7	68,31	68,9	69,55	70,18	70,18	70,18	71,92	71,94	72,29	72,91
Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95	70,27	70,27	70,97	71,50	71,5	72,14	72,25
Gresik	72,12	72,47	72,84	73,57	74,46	74,84	75,28	76,10	76,11	76,5	77,16

Gambar 3. 21 IPM Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik tahun 2012 – 2022
Sumber Data: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2022

Berdasarkan diagram diatas digambarkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional dan Jawa Timur. Kabupaten Gresik memiliki nilai IPM paling tinggi pada tahun 2022 dengan mencapai nilai 77,16. Dimana dalam kondisi kesejahteraan Kabupaten Gresik ini dinilai berdasarkan indikator Pendidikan dan Kesehatan. Indikator Pendidikan diukur dari jumlah tahun belajar berdasarkan jumlah penduduk (usia) , dan inikator Kesehatan diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

3.3.3 Kondisi Kemiskinan

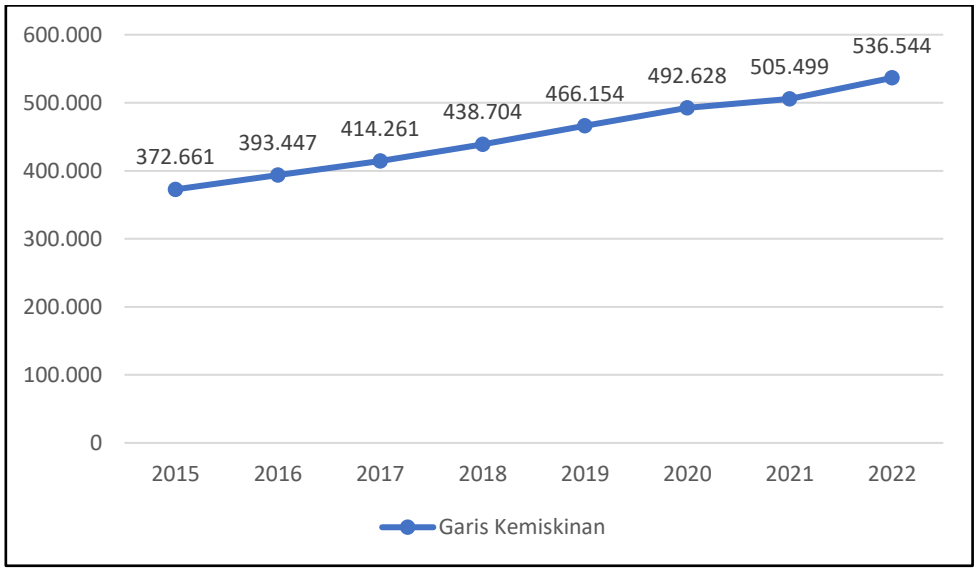
Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini meliputi makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi. Kemiskinan juga dapat diukur dengan standar pendapatan atau konsumsi, di mana individu atau keluarga yang pendapatannya di bawah ambang batas kemiskinan dianggap sebagai orang miskin.

Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik adalah 11,06 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 536.544,-. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 sebesar 2,17 dan Indkes Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik sebesar 0,89. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang ada.

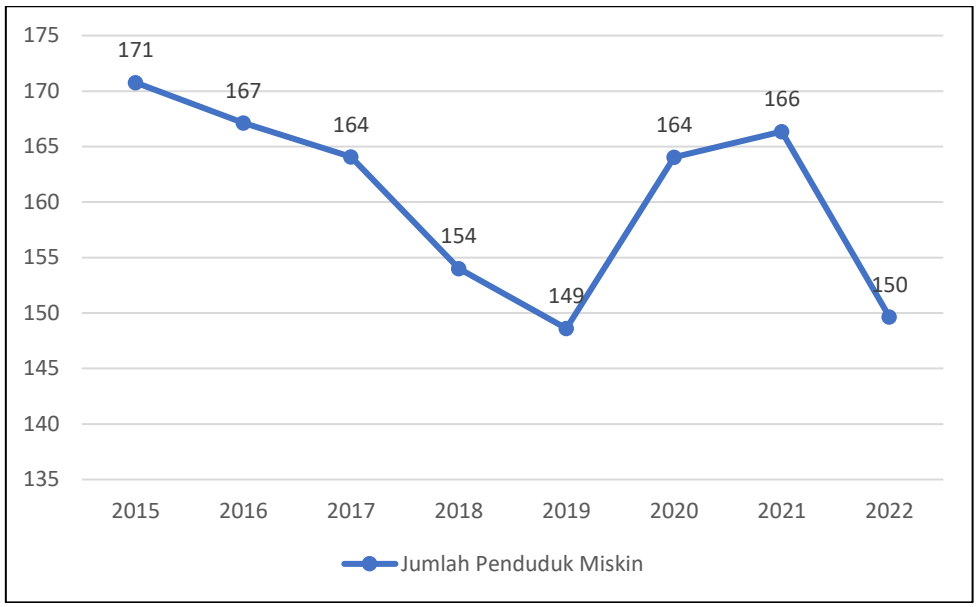
Tabel 3. 112 Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik 2015-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase (P0)		
2015	372661	170,76	13,63	2,58	0,67
2016	393447	167,12	13,19	2,19	0,56
2017	414261	164,08	12,8	2,51	0,71
2018	438704	154,02	11,89	1,79	0,45
2019	466154	148,61	11,35	2,21	0,61
2020	492628	164,05	12,4	2,51	0,8
2021	505499	166,35	12,42	2,15	0,61
2022	536544	149,64	11,06	2,17	0,89

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka (diolah)

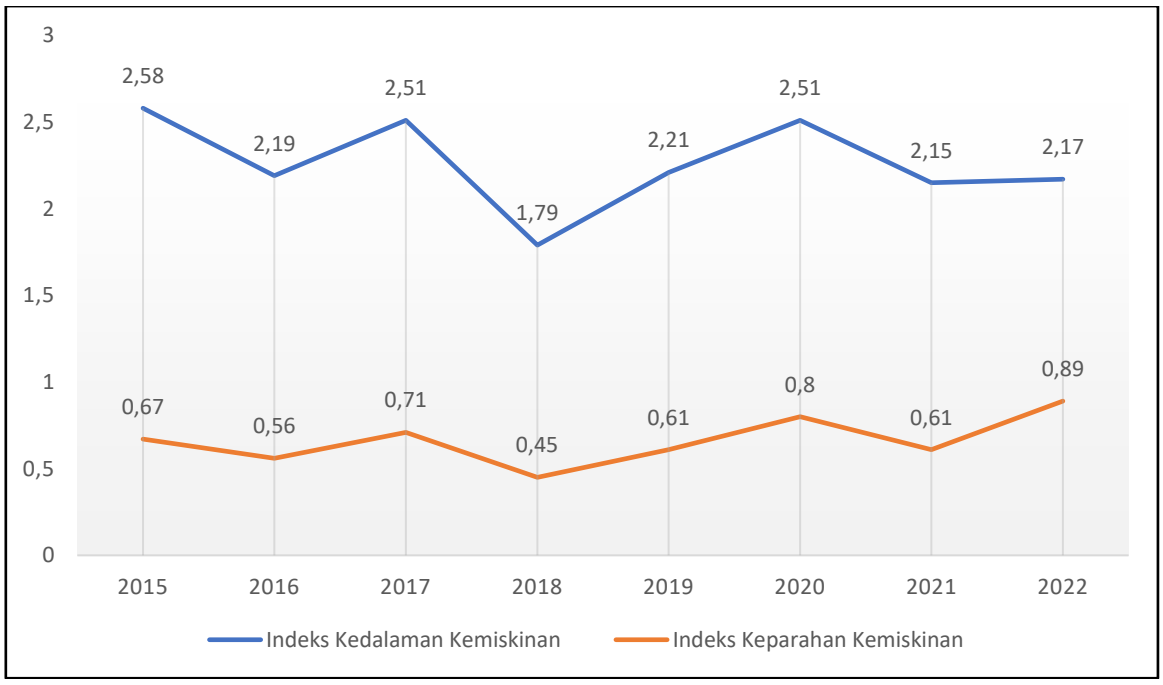


Gambar 3. 22 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik
Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka



Gambar 3. 23 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik (Ribu Jiwa)
Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka

Kabupaten Gresik memiliki indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,17 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,89 pada tahun 2022. Kedua indeks tersebut menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2015. Berikut merupakan grafik indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2015 hingga 2022.



Gambar 3. 24 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik
Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka (diolah)

3.3.4 Aspek Kesehatan

A. Sarana Kesehatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam menunjang layanan kesehatan masyarakat, Kabupaten Gresik memiliki fasilitas kesehatan dimana yang paling banyak adalah posyandu dengan jumlah 1.516, kemudian jumlah fasilitas Kesehatan yang terdapat di Kabupaten Gresik diantaranya 19 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 32 puskesmas, 66 poliklinik, dan 95 polindes. Dimana Rumah Sakit Ibnu Sina milik pemerintah Kabupaten Gresik telah menjadi rumah sakit rujukan nasional.

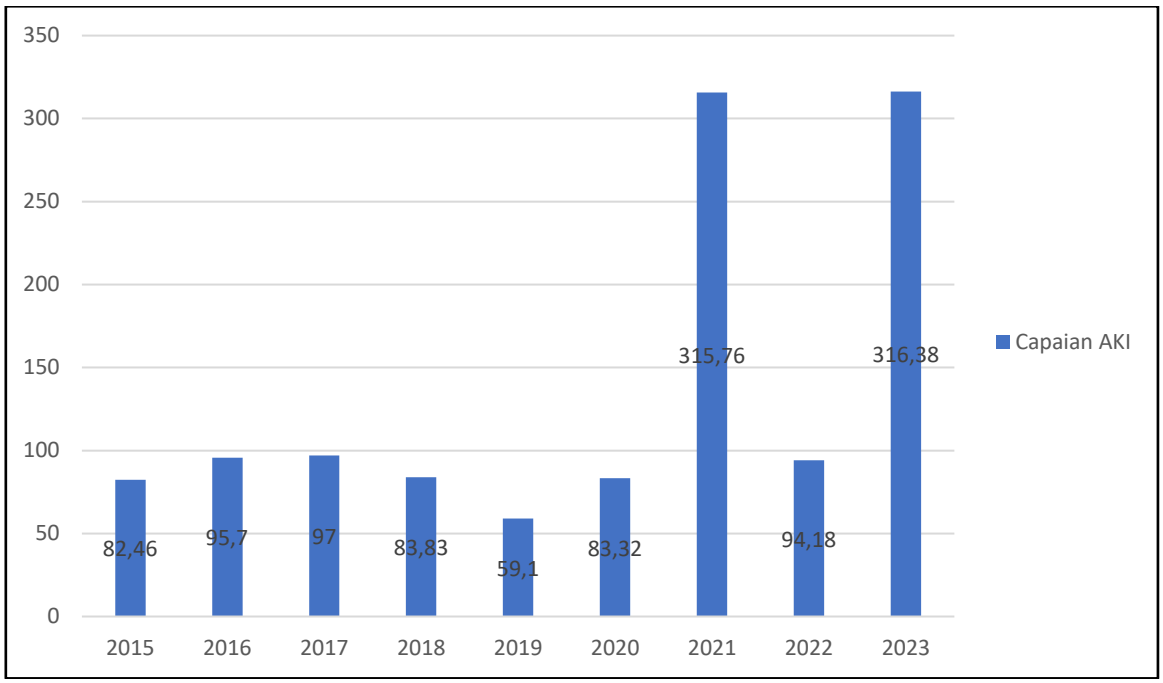
Tabel 3. 113 Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan (Unit) Kabupaten Gresik Tahun 2022

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas	Poliklinik	Posyandu	Polindes
Wringinanom	-	-	2	4	73	5
Driyorejo	2	-	2	7	121	6
Kedamean	-	-	2	2	77	-
Menganti	3	-	2	7	132	6
Cerme	-	-	2	4	78	1
Benjeng	-	-	2	3	84	13
Balongpanggang	2	-	2	3	83	1
Duduksampeyan	-	-	1	3	65	-
Kebomas	1	-	2	10	142	1
Gresik	6	-	3	2	92	11
Manyar	2	-	3	6	144	4
Bungah	1	-	1	4	75	-
Sidayu	-	1	1	2	52	-
Dukun	-	-	2	5	83	9
Panceng	-	-	1	-	49	14
Ujungpangkah	1	-	2	1	56	9
Sangkapura	1	-	1	3	66	15
Tambak	-	-	1	-	44	-
Jumlah	19	1	32	66	1.516	95

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka,2023

B. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah kematian ibu akibat komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan. AKI sering diukur dalam bentuk angka per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini memberikan gambaran tentang risiko kematian yang dihadapi oleh ibu saat menjalani proses kehamilan dan persalinan.

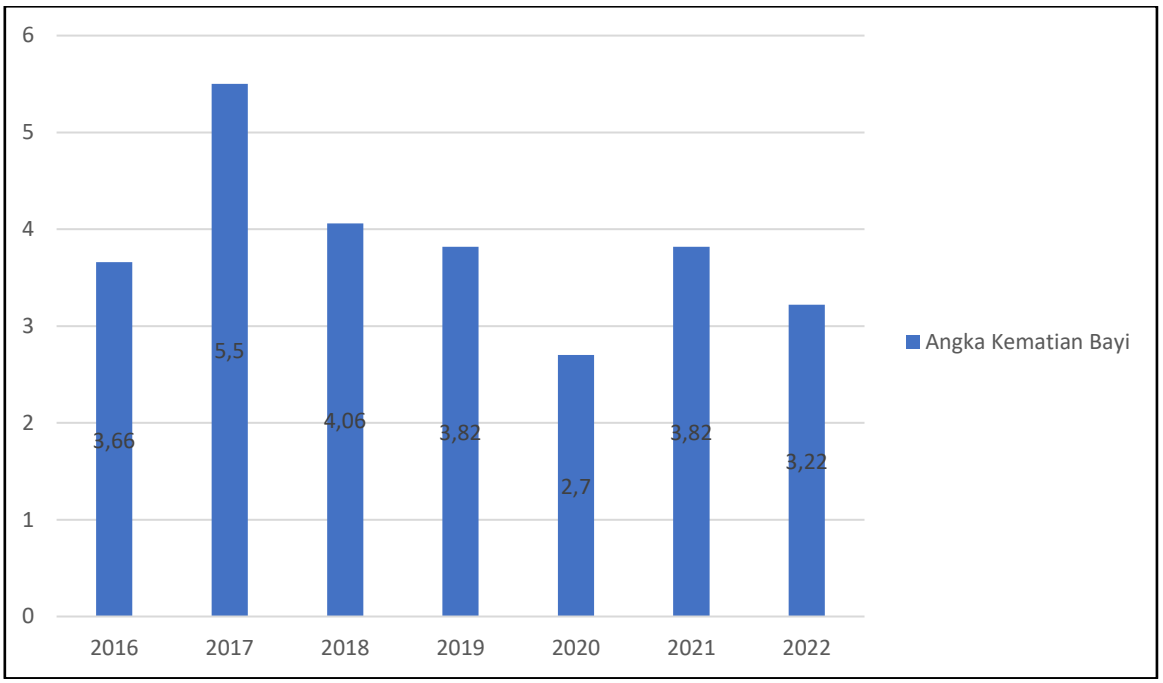


Gambar 3. 25 Capaian Angka Kematian Ibu Kabupaten Gresik
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian angka kematian ibu di Kabupaten Gresik bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2023, capaian angka kematian ibu di Kabupaten Gresik berada pada tingkat tertinggi yaitu sebesar 315,76 dan 316,38. Pada tahun 2021, angka kematian ibu tinggi karena terdampak pandemi covid19.

C. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. AKB mencerminkan tingkat kesehatan bayi dan pelayanan kesehatan maternal di suatu wilayah. AKB mencakup kematian bayi pada semua tahap, mulai dari masa neonatal (bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupannya) hingga masa setelah neonatal (bayi yang meninggal antara 29 hari hingga 1 tahun).



Gambar 3. 26 Angka Kematian Bayi Kabupaten Gresik
Sumber: Hasil Analisis, 2023

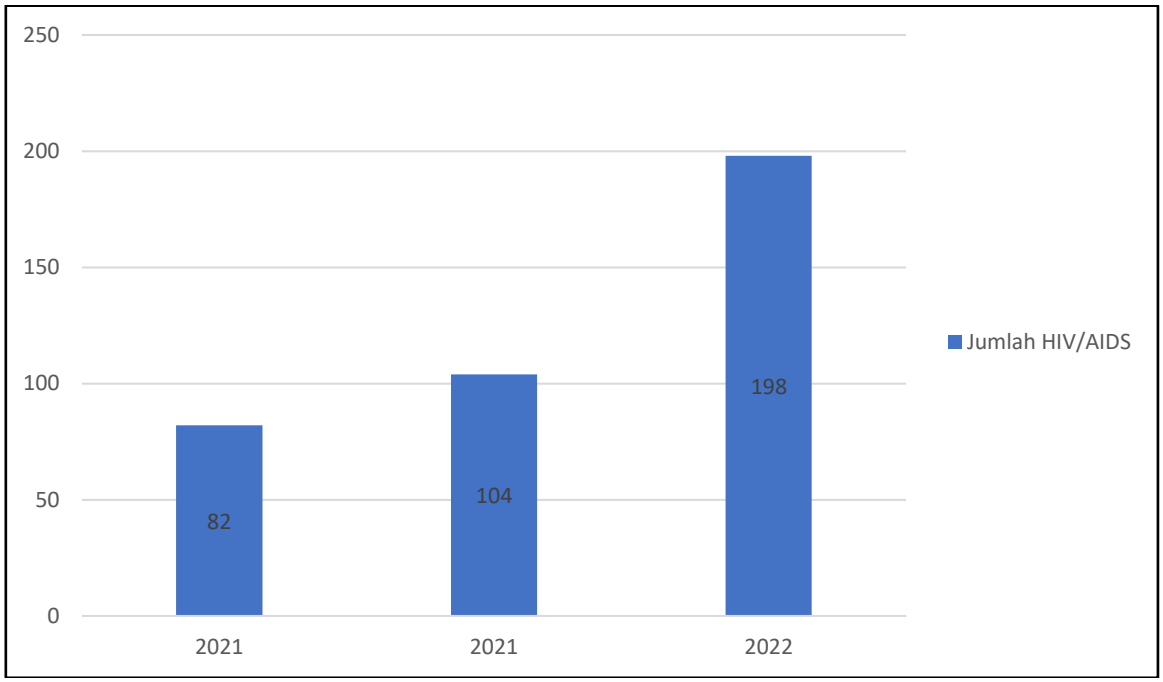
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian angka kematian ibu di Kabupaten Gresik bersifat fluktuatif. Tahun 2017 merupakan tahun dengan angka kematian bayi yang tertinggi di Kabupaten Gresik. sedangkan tahun 2020 merupakan tahun dengan angka kematian bayi terendah.

D. Penyakit

1. HIV/AIDS

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini merusak dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dengan menargetkan sel-sel yang disebut sel CD4 atau sel T-helper. Sel-sel ini penting dalam membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, infeksi HIV dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh yang parah, membuat tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit yang umumnya tidak akan berbahaya bagi orang dengan sistem kekebalan yang sehat. AIDS adalah tahap lanjut infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh telah sangat melemah sehingga tubuh tidak dapat secara efektif melawan infeksi. Orang yang mengalami AIDS dapat mengalami berbagai infeksi serius dan masalah kesehatan kronis. AIDS juga dapat menyebabkan kanker dan penyakit yang berhubungan dengan penurunan fungsi

kekebalan tubuh. Berikut merupakan grafik pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Gresik.

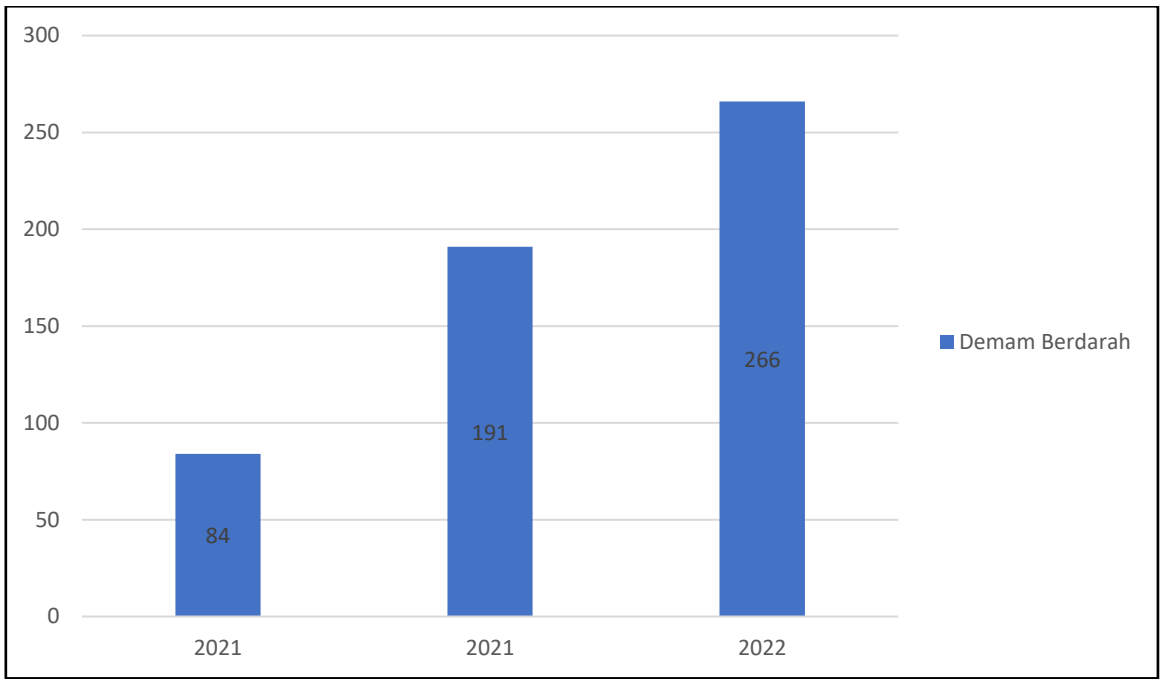


Gambar 3. 27 Jumlah HIV/AIDS Kabupaten Gresik
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik adalah adanya terapi pasien yang mengdap HIV/AIDS, sosialisasi, serta berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Gresik.

2. Demam Berdarah

Demam berdarah, juga dikenal sebagai demam dengue, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Demam berdarah umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Berikut merupakan grafik demam berdarah di Kabupaten Gresik.

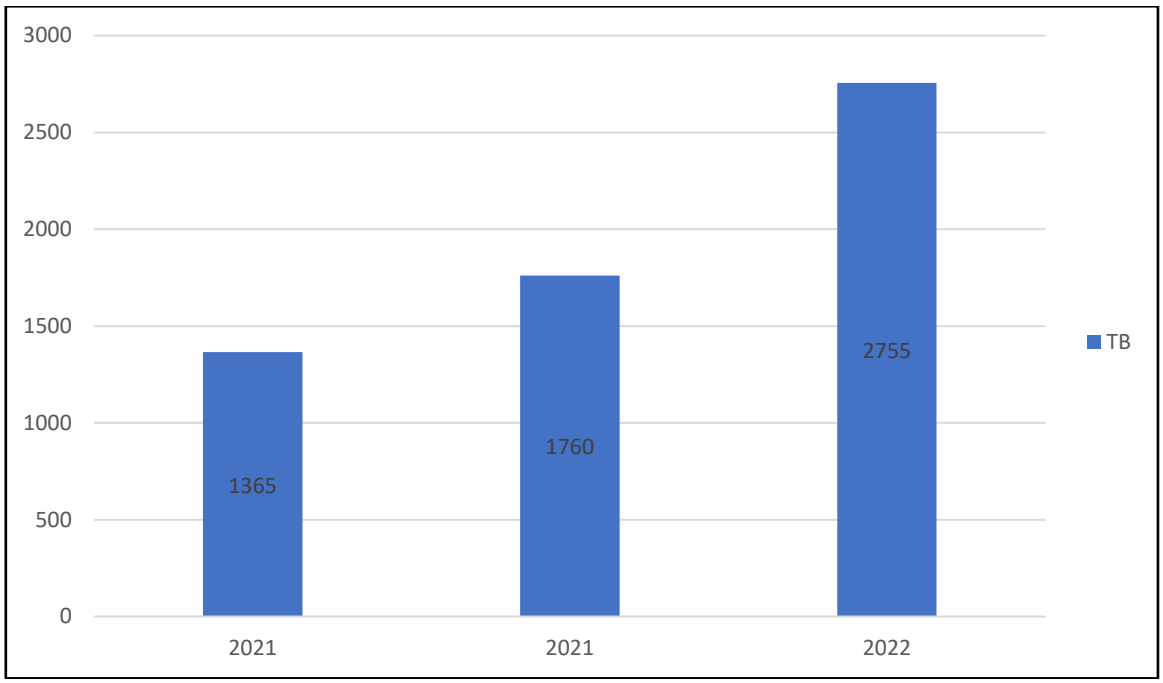


Gambar 3. 28 Demam Berdarah Kabupaten Gresik
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah demam berdarah Kabupaten Gresik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah demam berdarah mencapai 266 kasus. Pemerintah Kabupaten Gresik, seperti banyak pemerintah daerah lainnya di daerah tropis yang rentan terhadap demam berdarah, memiliki berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengendalikan penyakit ini seperti pengawasan dan pemantauan, pemberantasan sarang nyamuk, monitoring kasus, dan sosialisasi serta kampanye.

3. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menginfeksi paru-paru (tuberkulosis paru), tetapi juga dapat menyerang organ lain dalam tubuh seperti ginjal, tulang, dan otak. Tuberkulosis dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Berikut merupakan grafik pengidap TB di Kabupaten Gresik

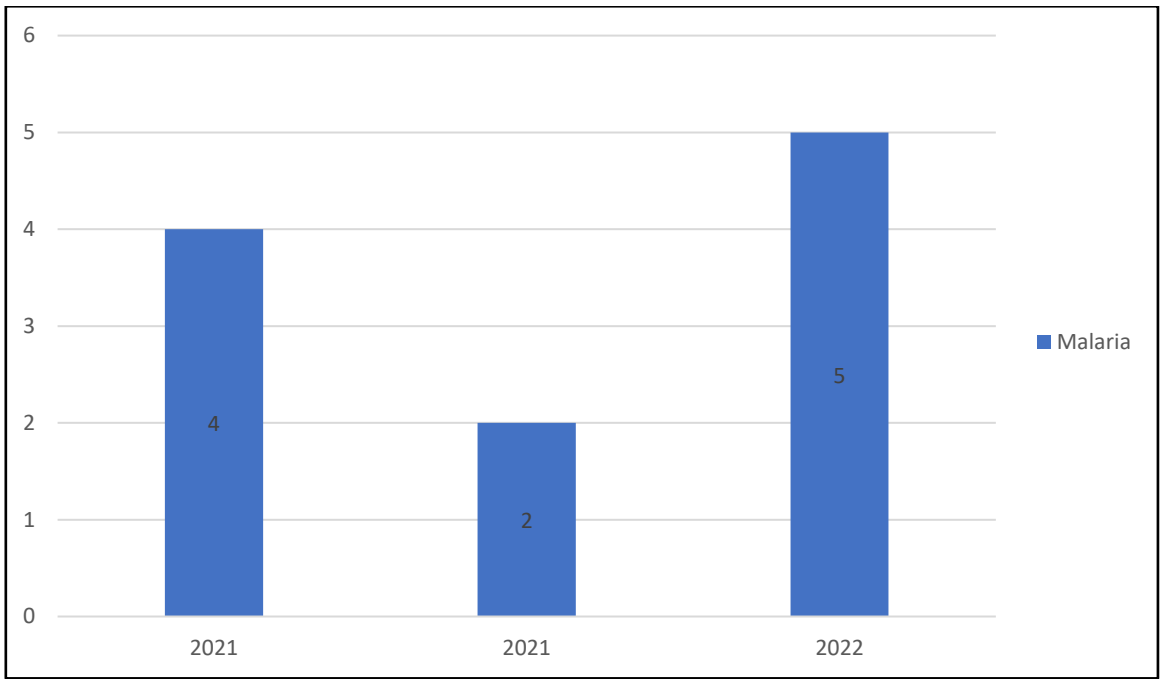


Gambar 3. 29 TB Kabupaten Gresik
Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan grafik di atas, pengidap Tubercolosis yang ada di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pengidap tubercolosis mencapai 2755 orang. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengidap TB dengan cara pemberian vitamin dan sembako.

4. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Malaria dapat menyebabkan gejala yang bervariasi dari ringan hingga parah, termasuk demam tinggi, menggigil, nyeri tubuh, sakit kepala, mual, dan muntah. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan anemia berat, gangguan organ, dan bahkan kematian. Berikut merupakan grafik kasus malaria di Kabupaten Gresik.



Gambar 3. 30 Malaria Kabupaten Gresik
Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan grafik di atas, kasus malaria yang ada di Kabupaten Gresik terbilang cukup rendah. Kasus malaria terbanyak berada pada tahun 2022 yaitu sebanyak 5 kasus. Sedangkan kasus malaria terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2 kasus.

3.3.5 Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan, pada jenjang Pendidikan dibagi dari TK hingga SMA. Pada tingkatan Pendidikan terbanyak dari segi siswa dan guru ada pada SD dengan jumlah sekolah negeri ataupun swasta sejumlah 76.040 siswa dan 4.975 guru, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 15,28. Kemudian pada tingkatan SMP baik negeri maupun swasta sebanyak 34.287 siswa dan 2.764 guru dengan rasio murid terhadap guru 12,40. Sementara untuk SMA baik negeri maupun swasta sebanyak 19.855 siswa dan 1.727 guru. Sedangkan SMK baik negeri maupun swasta sebanyak 20.334 siswa dan 1.699 guru. Sehingga rasio murid terhadap guru untuk SMA adalah 11,50 dan 11,97 untuk SMK.

Tabel 3. 114 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Gresik Tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	-	30	30
Driyorejo	-	62	62
Kedamean	-	20	20
Menganti	1	61	62
Cerme	-	48	48

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Benjeng	-	38	38
Balongpanggang	1	32	33
Duduksampeyan	-	23	23
Kebomas	-	45	45
Gresik	-	31	31
Manyar	1	38	39
Bungah	-	22	22
Sidayu	-	23	23
Dukun	-	27	27
Panceng	-	27	27
Ujungpangkah	-	21	21
Sangkapura	-	35	35
Tambak	-	21	21
Jumlah	3	604	607

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka,2023

Tabel 3. 115 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	23	5	28
Driyorejo	26	14	40
Kedamean	21	-	21
Menganti	26	13	39
Cerme	25	2	27
Benjeng	25	3	28
Balongpanggang	26	4	30
Duduksampeyan	16	-	16
Kebomas	20	6	26
Gresik	15	8	23
Manyar	16	4	20
Bungah	19	1	20
Sidayu	14	2	16
Dukun	20	2	22
Panceng	16	1	17
Ujungpangkah	16	2	18
Sangkapura	36	2	38
Tambak	29	1	30
Jumlah	389	70	459

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka,2023

Tabel 3. 116 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	2	4	6
Driyorejo	2	8	10
Kedamean	1	3	4
Menganti	2	11	13

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Cerme	2	3	5
Benjeng	2	4	6
Balongpanggang	3	2	5
Duduksampeyan	1	2	3
Kebomas	2	5	7
Gresik	4	7	11
Manyar	3	7	10
Bungah	1	10	11
Sidayu	4	2	6
Dukun	1	1	2
Panceng	1	5	6
Ujungpangkah	1	6	7
Sangkapura	2	3	5
Tambak	1	2	3
Jumlah	35	116	120

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka,2023

Tabel 3. 117 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gresik Tahun 2022/2023

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	1	-	1
Driyorejo	1	4	5
Kedamean	1	1	2
Menganti	1	3	4
Cerme	1	3	4
Benjeng	-	3	3
Balongpanggang	1	2	3
Duduksampeyan	-	1	1
Kebomas	1	2	3
Gresik	1	4	5
Manyar	1	2	3
Bungah	-	3	3
Sidayu	1	2	3
Dukun	1	3	4
Panceng	-	1	1
Ujungpangkah	-	3	3
Sangkapura	1	2	3
Tambak	-	1	1
Jumlah	12	40	52

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka,2023

3.3.6 Peribadatan

Dalam menunjang kehidupan bergama masyarakat dalam hal amal maka dari itu disediakanlah tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut, fasilitas peribadatan ini dibangun baik dari pemerintahan ataupun swasta. Jumlah fasilitas peribadatan Kabupaten Gresik terdapat 1.927 masjid, 5.458 musholla, 16 gereja, 1 pura dan 1 vihara.

Tabel 3. 118 Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022

Kecamatan	Masjid (unit)	Mushola (unit)	Gereja (unit)	Pura (unit)	Vihara (unit)
Wringinanom	89	288	2	-	-
Driyorejo	85	299	6	-	-
Kedamean	780	2.340	-	-	-
Menganti	102	230	1	-	-
Cerme	83	115	-	-	-
Benjeng	87	171	-	-	-
Balongpanggang	101	112	-	-	-
Duduksampeyan	47	84	-	-	-
Kebomas	80	297	1	-	-
Gresik	34	173	6	1	1
Manyar	90	203	-	-	-
Bungah	58	185	-	-	-
Sidayu	31	111	-	-	-
Dukun	60	158	-	-	-
Panceng	41	149	-	-	-
Ujungpangkah	31	135	-	-	-
Sangkapura	82	275	-	-	-
Tambak	46	133	-	-	-
Jumlah	1.927	5.458	16	1	1

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka,2023

3.4 KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian Kabupaten Gresik cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Kondisi perekonomian tersebut dapat ditinjau berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan rincian data PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3. 119 Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	**2019**	**2020**	**2021***	**2022****
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,70	7,41	7,70	7,02	6,76
Pertambangan dan Penggalian	8,21	7,62	5,96	6,94	8,39

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Industri Pengolahan	47,78	47,95	49,59	49,96	49,44
Pengadaan Listrik dan Gas	0,51	0,51	0,51	0,47	0,45
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
Konstruksi	9,70	9,71	9,42	8,92	8,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	13,17	12,47	12,62	12,67
Transportasi dan Pergudangan	2,38	2,53	2,48	2,37	2,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	1,40	1,33	1,35	1,36
Informasi dan Komunikasi	3,82	3,97	4,48	4,47	4,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,18	1,17	1,20	1,16	1,13
Real Estate	1,28	1,32	1,40	1,39	1,32
Jasa Perusahaan	0,29	0,30	0,32	0,31	0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26	1,31	1,41	1,31	1,20
Jasa Pendidikan	0,85	0,88	0,94	0,90	0,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,39	0,45	0,45	0,41
Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,27	0,28	0,31
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2022

Tabel 3. 120 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,35	0,39	-0,82	-3,01	3,17
Pertambangan dan Penggalian	3,02	-0,52	-12,82	1,44	7,81
Industri Pengolahan	6,12	5,45	-1,32	4,41	8,74
Pengadaan Listrik dan Gas	5,54	4,85	-0,09	2,37	6,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,11	6,25	3,67	10,22	3,51
Konstruksi	8,82	9,05	-6,66	1,99	5,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,74	6,70	-10,13	7,24	7,31
Transportasi dan Pergudangan	7,71	11,86	-5,46	3,39	13,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,13	8,33	-9,59	4,33	8,93
Informasi dan Komunikasi	8,75	9,71	8,28	6,97	3,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,27	4,26	-0,78	0,34	2,13
Real Estate	9,51	7,90	1,54	4,45	5,68
Jasa Perusahaan	9,35	6,45	1,94	2,28	5,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,21	3,86	-0,40	0,76	0,36
Jasa Pendidikan	7,90	8,46	2,80	2,24	0,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,70	7,86	8,98	4,68	-2,15
Jasa Lainnya	8,01	8,26	-14,98	5,53	19,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan sebelum akhirnya mengalami penurunan di tahun 2020. PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3.729.946,33

rupiah. Kondisi tersebut dapat terjadi salah satunya akibat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun tersebut.

3.4.2 Pendapatan Daerah

Dalam pendapat derah yang dimaksud memiliki tiga komponen, yang dapat dirincikan sebegai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Gambaran diatas merupakan gambaran secara umum mengenai kemampuan daerah dari segi finansial pembiayaan pembangunan daerah. Kemampuan secara finansial ini merupakan penggerak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diwujudkan melalui strategi penataan keuangan daerah untuk pembangunan. Adapun target dan realisasi pendapatan Kabupaten Gresik tahun 2018 dan 2019 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 121 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 dan 2019

Komponen	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kontribusi (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	921.926.953.257,00	923.973.075.519,70	956.832.098.114,86	980.751.230.877,09	100,18	106,15	100	31
Dana Perimbangan	1.437.511.804.000,00	1.453.822.430.964,00	1.425.168.417.026,00	1.458.947.957.330,00	99,14	100,35	50	47
Lain lain pendapatan Daerah yang Sah	511.414.768.000,00	633.597.502.420,00	493.919.572.225,00	670.332.486.800,00	96,58	105,80	17	22
PENDAPATAN	2.870.853.525.257,00	3.011.393.008.903,70	2.875.920.087.365,86	3.110.031.675.007,09	100,18	103,28	100	100

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan Tabel target dan realisasi PAD menunjukkan bahwa dari ketiga komponen mengalami kenaikan pada tahun 2019 hal tersebut berbanding lurus dengan

kenaikan capaian realisasi pendapatan. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan riil bidal dibandingkan dengan asumsi awal. Akan tetapi, bila dilihat dari perbandingan persentase kontribusi pendapatan dari ketiga komponen, hanya komponen dari pendapatan lain lain yang menunjukkan adanya kenaikan kontribusi dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Tidak hanya itu dalam realisasi capaian PAD paling tinggi kenaikannya berasal dari komponen pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana memiliki kontribusi sebesar 47-50% satu tahun terakhir ini (2018-2019). Peringkat capaian penerimaan terbesar kedua untuk PAD berasal dari pendapatan dana perimbangan dengan kontribusinya 17-22% berasal dari capaian penerimaan DAU dan DAK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Gresik khususnya pertambangan dan industri masih menjadi primadona dalam memperkuat pendapatan daerah. Selain itu, kegiatan layanan umum daerah termasuk layanan kesehatan juga merupakan sektor pendapatan yang cukup mendominasi. Potensi pendapatan daerah lainnya adalah dari sektor pajak dan restribusi, serta bea atas perolehan hak atas tanah. Berikut merupakan tabel realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020–2022.

Tabel 3. 122 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022

Komponen	Realisasi		
	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	924.664.863.143,07	1.031.080.997.728,72	1.191.799.002.154,29
Dana Perimbangan	1.331.644.546.291	1.388.743.965.408	1.528.999.930.386
Lain lain pendapatan Daerah yang Sah	683.175.106.340	713.442.494.397	645.855.851.853
PENDAPATAN	2.939.484.515.774,07	3.133.267.457.533,72	3.366.654.784.393,29

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023

3.4.3 Belanja Daerah

Dalam meunjang peningkatan pelayanan dasar prioritas belanja Kabupaten Gresik diwujudkan dalam pendidikan,kesehatan, dan penyelengaraan fasilitas umum yang layak. Dalam komponen belanja daerah inidiwujudkan dalam komponen belanja tidak langsung dan komponen belanja langsung. Total capaian realisasi belanja daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 mencapai 88,24% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,54% penurunan prosentase dapat disebabkan karena adanya peningkatan target capaian belanja yang diproyeksikan pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 3. 123 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 dan 2019

Komponen	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Belanja Tidak Langsung	1.689.291.787.647,11	1.707.894.423.849,96	1.583.763.924.646,76	1.621.875.243.008,94	93,75	94,96
Belanja Langsung	1.347.047.334.383,63	1.626.995.846.419,46	1.095.627.168.273,30	1.302.903.455.507,71	81,34	80.08
BELANJA	3.036.339.122.030,74	3.334.890.270.269,42	2.679.391.092.920,06	2.924.778.698.516,65	88,24	87,7

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan realisasi anggaran dalam data LKPJ Kabupaten Gresik komponen belanja langsung didominasi adanya belanja pegawai yang merupakan belanja rutin terdiri dari gaji, tunjangan, remunerasi, insentif pajak dan restribusi. Sedangkan dari belanja tidak langsung, pengeluaran terbesar didominasi oleh belanja barang dan jasa. Berikut merupakan tabel realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020–2022.

Tabel 3. 124 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022

Komponen	Realisasi		
	2020	2021	2022
Belanja Tidak Langsung	2.030.649.073.905,32	2.026.389.308.503,62	1.187.820.675.685,18
Belanja Langsung	1.064.914.775.629,7	1.166.362.562.185,71	2.366.256.231.942,09
BELANJA	3.095.563.849.535,02	3.192.751.870.689,33	3.554.076.907.627,27

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023

3.4.4 Pembiayaan Daerah

Dalam pembiayaan daerah Kabupaten Gresik adalah upaya dalam mengoptimalisasi kemampuan pemerintah dalam hal penyemibangan antara dana penerimaan dan pengeluaran daerah. Berdasarkan Tabel 3.26 dalam capaian realisasi yang memenuhi rancangan targetnya mengalai kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 0,2%. Hal lain adalah besaran investasi yang dilakukan oleh Kabupaten Gresik dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berdasarkan datanya tidak dapat diidentifikasi adanya kenaikan ataupun penurunan dari target dan capaiannya di tahun 2018.

Tabel 3. 125 Komposisi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 dan 2019

Komponen	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Penerimaan Pembiayaan Daerah	165.485.596.773,74	361.997.261.365,72	165.485.596.773,74	362.071.763.365,72	100	100,02

Komponen	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	38.500.000.000,00	0	38.500.000.000,00	0	100
Pembiayaan Netto	165.485.596.773,74	361.997.261.365,72	165.485.596.773,74	323.571.763.365,72	100	100,02

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019



BAB IV ANALISIS TPB

4.1 CAPAIAN INDIKATOR TPB

Berdasarkan indikator TPB/SDGs, Indonesia memiliki 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator yang terbagi menjadi 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Upaya pencapaian indikator TPB dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 206 Indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Gresik. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kabupaten Gresik dibandingkan dengan target nasional tahun 2018 yaitu Permendagri No 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut adalah rangkuman capaian indikator TPB di Kabupaten Gresik.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah

Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222

Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator (2), kondisi geografis (3) dan ketentuan indikator RPJPD (4). Kabupaten Gresik telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

1. Indikator TPB yang Sudah Mencapai Target
2. Indikator TPB yang Belum Mencapai Target
3. Indikator TPB Data Tidak Tersedia

Indikator TPB sebanyak 206 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik. Eliminasi indikator-indikator yang : Bukan kewenangan Kabupaten (Sektor Energi), Memiliki satuan indikator Kabupaten/Kota dan indikator program strategis nasional yg tidak berlokasi di Kab. Gresik (PKN).

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten GRESIK pada periode RPJPD berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak ada datanya. Daftar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

Tujuan 1	:	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Tujuan 2	:	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Tujuan 3	:	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Tujuan 4	:	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

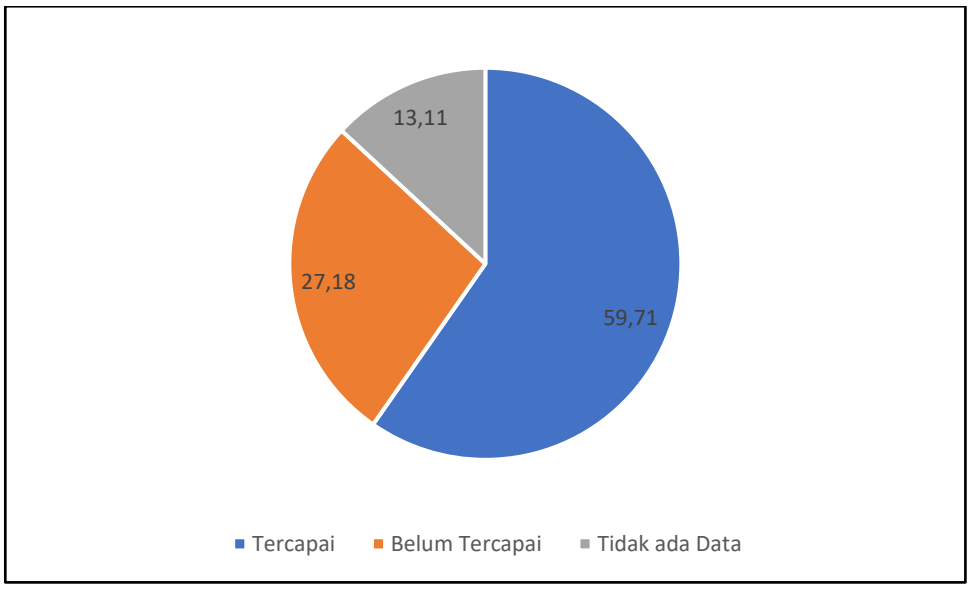
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

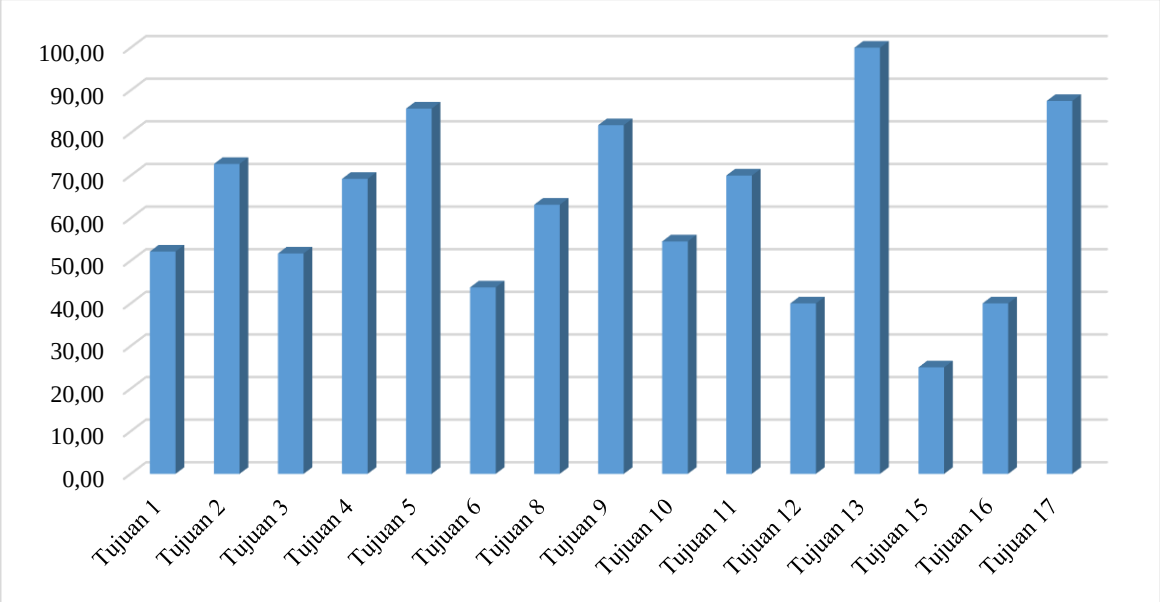
Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan



Gambar 4. 31 Capaian TPB

4.1.1 Indikator yang Sudah Mencapai Target

Terdapat 17 tujuan berdasarkan Tujuan SDGs, yaitu Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terbarukan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 15 (Ekosistem Daratan), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Persentase capaian indikator TPB berdasarkan Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik**.** Indikator TPB yang telah mencapai target nasional yaitu sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator.



Gambar 4. 32 **Persentase Capaian Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Tujuan SDGs**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 1 Indikator Yang Sudah Mencapai Target

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.
2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
3	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
4	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
5	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
6	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.
7	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
8	10.1.1*	Koefisien Gini.
9	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
10	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
11	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
12	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.
13	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.
14	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
15	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
16	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
17	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
18	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
19	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.
20	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
21	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
22	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
23	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
24	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
25	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
26	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
27	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
28	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.
29	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
30	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
31	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
32	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
33	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
34	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
35	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
36	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
37	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
38	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
39	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
40	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
41	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
42	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet
43	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
44	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
45	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.
46	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
47	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
48	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
49	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
50	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
51	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
52	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
53	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
54	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
55	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
56	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
57	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
58	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
59	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
60	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
61	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
62	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
63	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
64	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
65	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
66	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
67	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
68	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
69	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
70	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
71	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
72	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
73	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
74	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
75	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
76	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
77	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
78	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
79	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
80	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
81	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
82	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
83	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
84	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
85	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
86	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
87	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
88	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
89	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
90	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.
91	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
92	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
93	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
94	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
95	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
96	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.
97	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.
98	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
99	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
100	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
101	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.

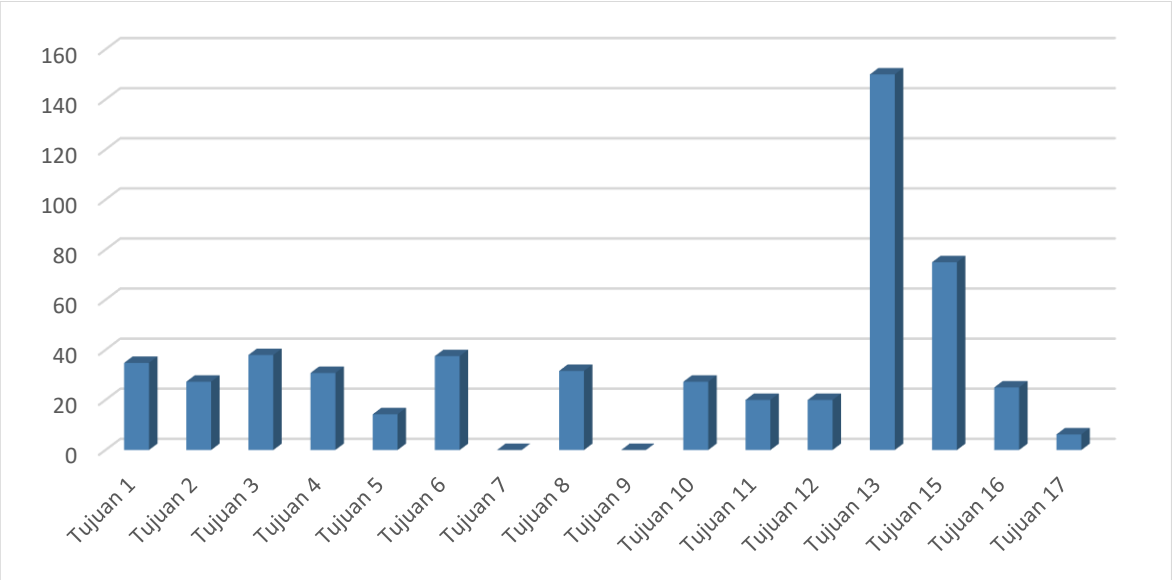
NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
102	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.
103	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
104	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.
105	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
106	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
107	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
108	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
109	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
110	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
111	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
112	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
113	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
114	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
115	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
116	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
117	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
118	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
119	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
120	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
121	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
122	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
123	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.1.2 Indikator yang Belum Mencapai Target

Realisasi pencapaian merupakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dibagi menjadi empat kategori yaitu tercapai, belum tercapai, tidak ada data dan bukan kewenangan/tidak termasuk ke otoritas

pemerintah daerah. Target yang digunakan adalah target nasional berdasarkan Permendagri No 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Terdapat beberapa indikator yang memiliki trend meningkat dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target. Berikut adalah persentase indikator dengan tren meningkat namun belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target nasional yaitu sebanyak 57 indikator atau sebesar 27,18% dari total indikator.



Gambar 4. 33 Persentase Indikator Yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Tujuan SDGs
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 2 Indikator Yang Belum Mencapai Target

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.
2	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
3	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
4	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
5	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
6	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
7	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
8	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.
9	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.
10	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
11	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
12	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).

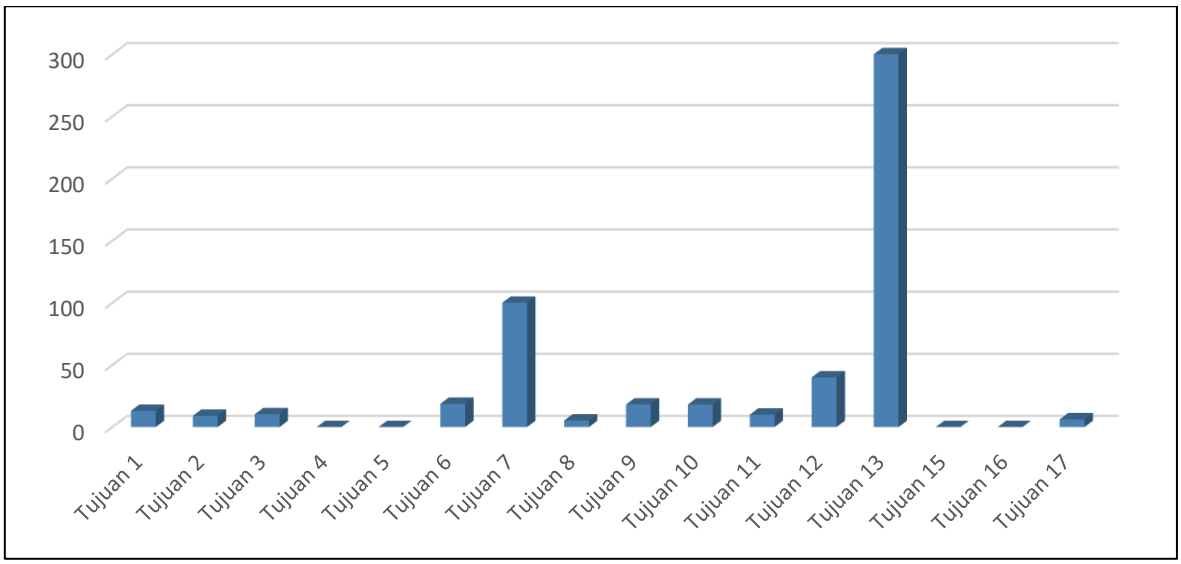
NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
13	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
14	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
15	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
16	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
17	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
18	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
19	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
20	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.
21	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
22	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).
23	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
24	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
25	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
26	2.2.1*	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun
27	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
28	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
29	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
30	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
31	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
32	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
33	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.
34	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.
35	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
36	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
37	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
38	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
39	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
40	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
41	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
42	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.
43	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
44	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
45	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
46	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
47	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
48	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
49	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
50	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
51	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
52	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
53	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
54	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
55	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
56	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.1.3 Indikator yang Data Tidak Tersedia

Realisasi pencapaian merupakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dibagi menjadi empat kategori yaitu tercapai, belum tercapai, tidak ada data dan bukan kewenangan/tidak termasuk ke otoritas pemerintah daerah. Target yang digunakan adalah target nasional berdasarkan Permendagri No 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dari 206 Indikator yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Gresik, masih terdapat beberapa indikator yang tidak memiliki data. Terdapat 27 indikator atau sebesar 13,10% yang tidak memiliki data. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Gresik. Berikut adalah persentase data tidak tersedia berdasarkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 4. 34 Persentase Data Tidak Tersedia
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 3 Indikator Yang Data Tidak Tersedia

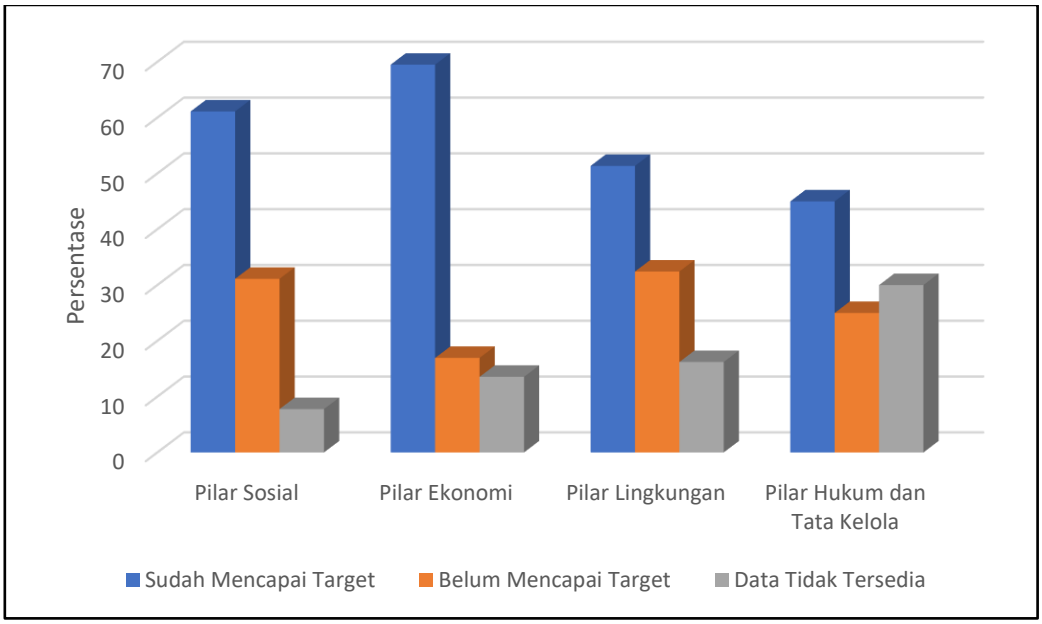
NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
2	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
3	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
4	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
5	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
6	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
7	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
8	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.
9	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
10	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
11	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
12	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
13	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.
14	7.3.1*	Intensitas energi primer.
15	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
16	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
17	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
18	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
19	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
20	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
21	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
22	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
23	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
24	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
25	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
26	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
27	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2 CAPAIAN INDIKATOR TPB TIAP PILAR

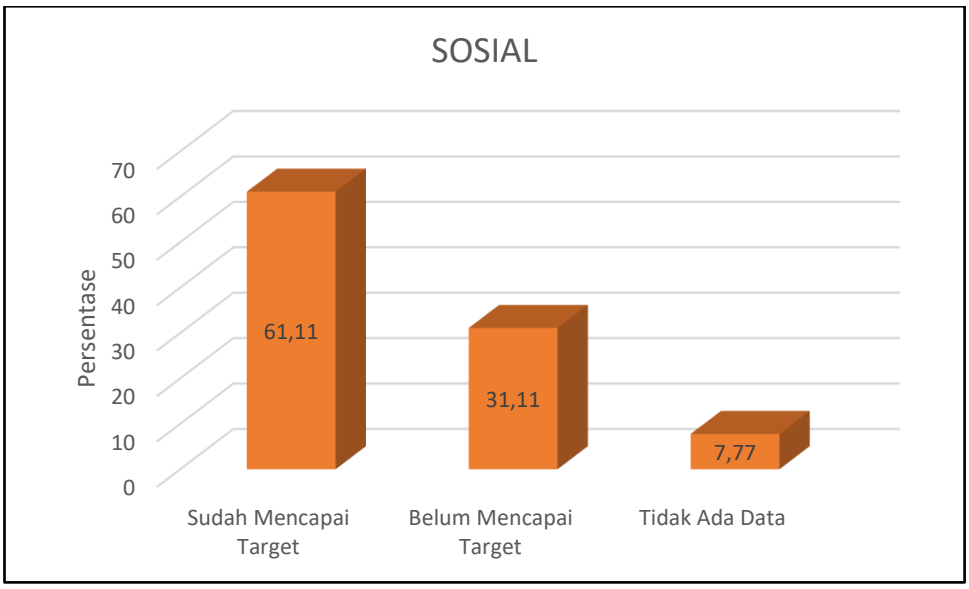
Indikator TPB terbagi menjadi 4 pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Terdapat 90 indikator dibawah pilar sosial, 59 indikator dibawah pilar ekonomi, 37 indikator dibawah pilar lingkungan, dan 20 indikator dibawah pilar hukum dan tata kelola.



Gambar 4. 35 Persentase Capaian Indikator TPB Tiap Pilar
Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.1 Pilar Sosial

Terdapat 90 indikator TPB dibawah pilar sosial. Berdasarkan hasil analisa, sebesar 61,11% diantaranya merupakan indikator yang sudah mencapai target. 31,11% diantaranya merupakan indikator yang belum mencapai target 7,77% diantaranya merupakan indikator yang tidak memiliki data pendukung. Berikut merupakan grafik persentase capaian indikator TPB pilar sosial.



Gambar 4. 36 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 4 Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Pilar Sosial

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
3	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
4	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
5	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
6	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
7	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
8	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
9	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.
11	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
12	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
13	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
14	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
15	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
16	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
17	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
18	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
19	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.
20	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
21	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
22	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
23	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
24	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
25	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
26	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
27	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
28	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
29	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
30	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
31	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
32	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
33	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
34	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
35	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
36	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
37	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
38	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
39	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
40	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
41	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
42	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
43	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
44	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
45	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
46	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
47	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
48	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
49	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
50	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
51	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
52	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
53	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
54	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
55	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
56	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 5 Indikator yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Pilar Sosial

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.
2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
3	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.
5	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.
6	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
7	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
8	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).
9	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
10	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
11	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
12	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
13	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
14	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
15	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
16	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
17	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
18	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
19	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
20	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
21	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
22	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
23	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.
24	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.
25	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
26	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
27	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
28	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 6 Indikator Data Tidak Tersedia Berdasarkan Pilar Sosial

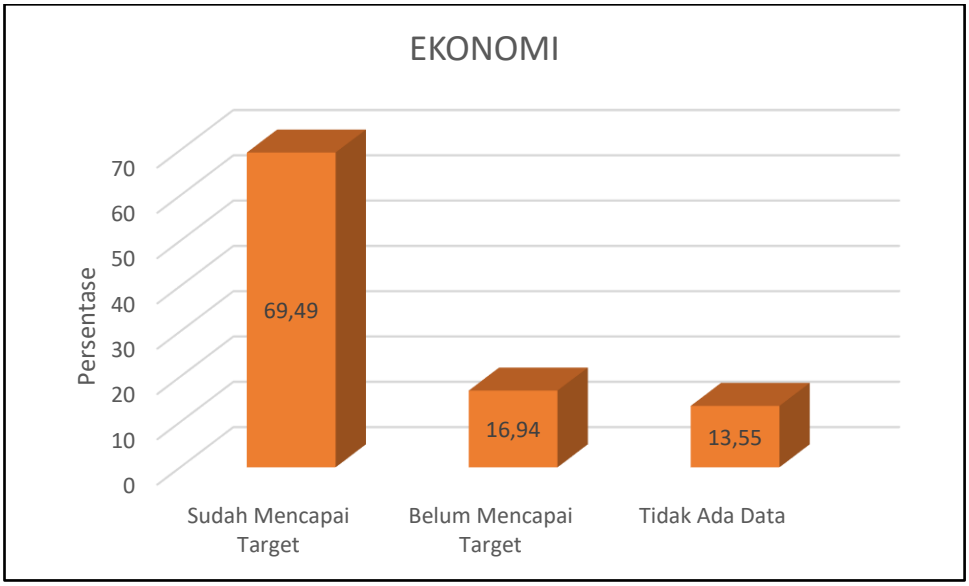
NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
2	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
3	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
4	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
5	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.
6	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
7	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.2 Pilar Ekonomi

Terdapat 59 indikator TPB dibawah pilar ekonomi. Berdasarkan hasil analisa, 69,4% atau 41 diantaranya merupakan indikator yang sudah mencapai target. 16,94% diantaranya merupakan indikator yang belum mencapai target. 13,55% diantaranya merupakan

indikator yang tidak memiliki data pendukung. Berikut merupakan grafik persentase capaian indikator TPB pilar ekonomi.



Gambar 4. 37 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 7 Indikator Data yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Pilar Ekonomi

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.
2	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
3	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
4	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
5	8.1.1.(a)	PDB per kapita.
6	10.1.1*	Koefisien Gini.
7	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
8	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
9	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.
10	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.
11	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
12	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
13	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet
14	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
15	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
16	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.
17	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.
18	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
19	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
20	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
21	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
22	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
23	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.
24	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.
25	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
26	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
27	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
28	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.
29	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.
30	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
31	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.
32	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
33	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
34	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
35	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
36	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
37	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
38	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
39	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
40	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
41	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 8 Indikator Data yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Pilar Ekonomi

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
2	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
3	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
4	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
5	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
6	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.
7	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.
8	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
9	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
10	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

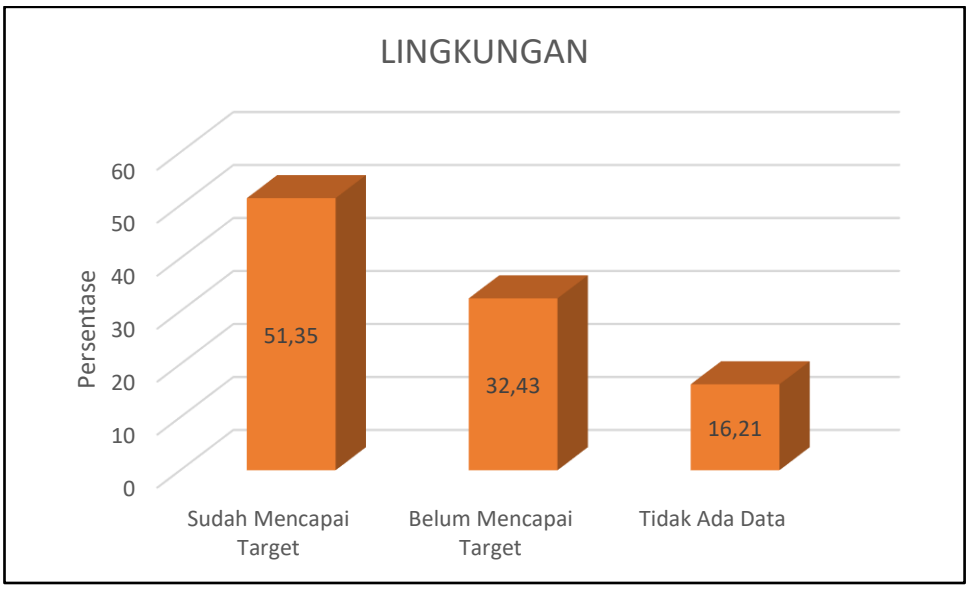
Tabel 4. 9 Indikator Data Tidak Tersedia Berdasarkan Pilar Ekonomi

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
2	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.
3	7.3.1*	Intensitas energi primer.
4	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
5	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
6	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
7	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
8	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.3 Pilar Lingkungan

Terdapat 37 indikator TPB dibawah pilar lingkungan. Berdasarkan hasil analisa, 51,3% atau 19 diantaranya merupakan indikator yang sudah mencapai target. 32,43% diantaranya merupakan indikator yang belum mencapai target. 16,21% diantaranya merupakan indikator yang tidak memiliki data pendukung. Berikut merupakan grafik persentase capaian indikator TPB pilar lingkungan.



Gambar 4. 38 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 10 Indikator Data yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Pilar Lingkungan

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
2	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
3	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
4	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
6	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
7	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
8	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
9	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
10	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
11	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
12	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
13	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
14	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
15	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
16	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
17	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
18	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
19	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 11 Indikator Data yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Pilar Lingkungan

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
2	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
3	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
4	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
5	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.
6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
7	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
8	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
9	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
10	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
11	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
12	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

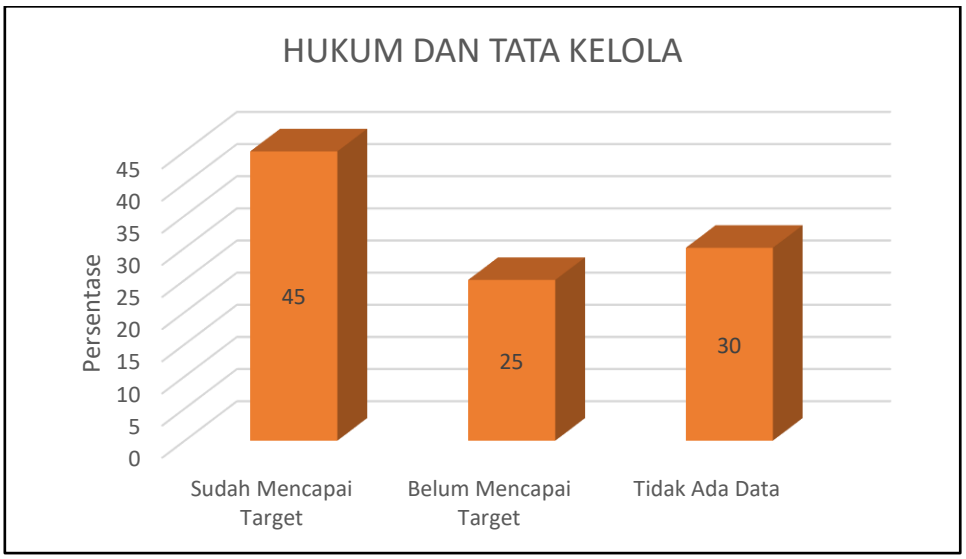
Tabel 4. 12 Indikator Data Tidak Tersedia Mencapai Target Berdasarkan Pilar Lingkungan

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
2	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
3	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
4	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
5	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
6	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola

Terdapat 20 indikator TPB dibawah pilar ekonomi. Berdasarkan hasil analisa, sebesar 45% diantaranya merupakan indikator yang sudah mencapai target. 25% diantaranya merupakan indikator yang belum mencapai target. 30% diantaranya merupakan indikator yang tidak memiliki data pendukung. Berikut merupakan grafik persentase capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola.



Gambar 4. 39 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 13 Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan Pilar Tata Kelola

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
2	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
4	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
5	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
6	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
7	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
8	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
9	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 14 Indikator yang Belum Mencapai Target Berdasarkan Pilar Tata Kelola

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
2	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
3	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
4	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
5	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 15 Indikator Data Tidak Tersedia Berdasarkan Pilar Tata Kelola

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
2	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
3	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
4	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
5	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
6	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan

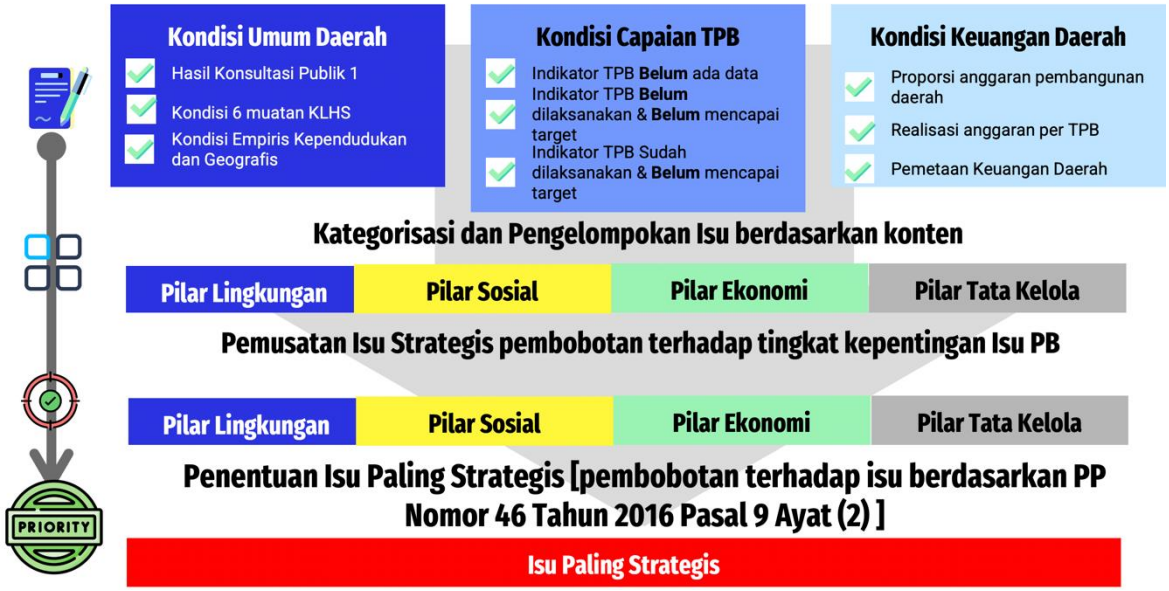
NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
		tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.3 PERUMUSAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Isu Pembangunan Berkelanjutan pada kajian lingkungan hidup strategis ini adalah gambaran situasi yang dipandang penting untuk mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara praktis, yang dipandang sebagai isu dapat merupakan sebuah fenomena permasalahan yang saat ini sedang berlangsung atau belum berlangsung tetapi dipandang akan dapat mempengaruhi keseluruhan upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan baik secara social, ekonomi, lingkungan, maupun hukum dan tata Kelola administrasi daerah. Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam KLHS Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Penjaringan isu-isu pembangunan dari berbagai stakeholder yang dihimpun melalui Konsultasi Publik 1 dengan melibatkan seluruh OPD atau kelompok kerja KLHS RPJPD Kabupaten Gresik
2. Kondisi 6 muatan KLHS di Kabupaten Gresik
3. Kondisi Empiris kependudukan
4. Pertimbangan capaian TPB dengan klasifikasi indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, belum ada data serta indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
5. Pengelompokan isu-isu strategis yang telah dihimpun melalui diskusi publik ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.
6. Melakukan penapisan terhadap TPB prioritas di Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan capaian indicator TPB yang didapatkan dari hasil evaluasi capaian masing-masing indicator TPB serta dengan mempertimbangkan realisasi anggaran masing-masing TPB di Kabupaten Gresik.
7. Identifikasi relasi antar isu untuk mendefiniskan isu pembangunan berkelanjutan yang dipandang strategis untuk menjadi masukan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Gresik.



Pada tahap selanjutnya dari penyusunan KLHS, hasil dari identifikasi isu strategis ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan rekomendasi program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, rencana dan program dalam RPJPD Kabupaten Gresik. Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen terkait seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dokumen D3TKH, Dokumen IKPLHD, serta dokumen perencanaan lain.

4.3.1 Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Penjaringan isu-isu berkelanjutan dilakukan pada saat proses Konsultasi Publik I yang melibatkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Gresik. Hasil penjaringan isu pembangunan berkelanjutan didapatkan pilar lingkungan sebesar 37 isu, pilar sosial sebesar 19 isu, pilar ekonomi sebesar 7 isu dan pilar hukum dan tata kelola sebesar 5 isu. Hasil penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Daftar Isu Panjang

No	Isu	Pilar
1	Termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai Bengawasn Solo, yang membawa dampak bencana banjir, penurunan kualitas air, sedimentasi dan meningkatnya kepadatan permukiman di bantaran sungai	Lingkungan
2	Terdapat kawasan lindung berupa kawasan konservasi ikan dan teru,bu karang	
3	Belum semua kawasan perkotaan dan permukiman padat terlayani pengelolaan sampahnya	
4	Masih banyaknya desa yang belum memiliki sistem penyediaan air bersih yang memadai, dan sistem sanitasi yang baik	
5	Kawasan pesisir memiliki permasalahan kompleks seperti permukiman kumus nelayan, banjir rob, abrasi hingga adanya reklamasi yang dapat memicu terjadinya degradasi lingkungan	

No	Isu	Pilar
6	Belum terpenuhinya standar kualitas dari sumberdaya air dan pengolahan lengkap	
7	Terbatasnya ketersediaan sumberdaya air yaitu air tanah dan air permukiman	
8	Menurunnya debit sumberdaya air pada musim kemarau	
9	Kuantitas sumberdaya air yang memenuhi beberapa pada luar wilayah Kabupaten Gresik	
10	Kurang optimalnya upaya dalam perlindungan dan pelestarian sumberdaya air	
11	Pada umumnya Pemerintah Kabupaten Gresik belum memiliki perncanaan kebutuhan air baku	
12	Ketersediaan pengelolaan sampah akhir di tingkat kabupaten	
13	Potensi bencana banjir	
14	Potensi bencana kebakaran hutan	
15	Potensi bencana perubahan iklim	
16	Pencemaran sungai, waduk, dan air laut	
17	Bertambahnya limbah cair domestik	
18	Keterbatasan sumber daya air	
19	Peningkatan bolume dan timbulan sampah	
20	Peningkatan volume limbah cair permukiman, industri, dan pariwisata	
21	Alih fungsi lahan pertanian	
22	Adanya lahan kritis	
23	Kerusakan hutan	
24	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industri	
25	Alih fungsi kawasan hutan untuk pengembangan industri	
26	Adanya pencemaran air sungai di wilayah utara dan selatan Kabupaten Gresik	
27	Terdapat wilayah yang belum terlayani sistem persampahan	
28	Indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan	
29	Memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi terutama pada DAS Bengawasn Solo dan DAS Lamong	
30	Potensi bencana tanah longsor	
31	Potensi bencana kekeringan	
32	Potensi bencana cuaca ekstrim dan putting beliung	
33	Potensi bencana abrasi	
34	Ketersediaan air tergolong kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Gresik	
35	Berkurangnya luasan hutan mangrove	
36	Dalam radius bahaya abrasi dan gelombang ekstrim	
37	Terdapat kawasan pegunungan kapur sehingga ketersediaan air tanah cenderung kecil	
38	Adanya program bank sampah	
39	Masivnya kegiatan industri memengaruhi penuruna kualitas udara	
40	Rendahnya nilai status air	
41	Gas rumah kaca dari kegiatan industri	
42	Terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi layak	
43	Gagal panen diakibatkan oleh kurangnya pasokan air	

No	Isu	Pilar
44	Alih fungsi lahan pada tanah pertanian yang subur menjadi permukiman dan industri	
1	Termasuk kedalam kawasan Gerbangkertosusila sebagai Kawasan Strategis Nasional	Ekonomi
2	Koridor dtrategis Jawa Timur yaitu koridor Ekonomi Surabaya-Gelangban (Gresik-Lamongan-Tuban)	
3	Terdapat potensi bahan mineral seperti, pasir, batu belah, kalsir, kapur, batu tras, dan gipsum sintetis yang belum dimanfaatkan secara optimal	
4	Laju perkembangan permukiman di perkotaan Kabupaten Gresik jauh lebih dinamis dan pesat dibanding wilayah lainnya	
5	Proyek strategis nasional di Kabupaten Gresik berupa Kawasan Industri JIIPE Gresik	
6	Potensi destinasi pariwisata Gresik berupa situs religi yang merupakan makam tokoh penyebar agama islam dan wisata alam berupa pulau bawean	
7	Munculnya kawasan permukiman baru pada kawasan yang berbatasan dengan Kota Surabaya	
8	Peningkatan pembangunan jalan diantaranya seperti pembangunan jalan bebas hambata antar kota yang terdiri dari Manyar-Tuban, pengembangan jalan strategis yaitu Jalan Raya Gresik, pembangunan fly over Teluk Lamong sebagai upaya penghubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat Kota Surabaya	
9	Rencana pengembangan pelabuhan baru dengan hirearki pelabuhan pengumpan lokal di Jawa Timur yaitu Pelabuhan Camar dan Tambak	
10	Pengambangan terminal khusus pada pelabuhan di wilayah kerja Gresik	
11	Pengembangan bandara perintis di Pulau Bawean menjadi Bandara Domestik dengan hirarki penumpang	
12	Reaktifasi jalur kereta api Surabaya Regional Railways Line sebagai sistem angkutan umum massal perkotaan pada pembangunan transportasi publik di Gerbangkertosusila	
13	Pengembangan jalur kereta api menuju kawasan industri JIIPE, PIER, dan Pelabuhan Teluk Lamong	
14	Adanya pelabuhan internasional di Kecamatan Manyar	
15	Adanya kesenjangan wilayah dimana kegiatan terkonsentrasi di Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar	
16	Kesetimbangan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	
17	Rencana pengembangan kawasan peruntukan industr	
18	Memiliki potensi galian golongan C	
19	Adanya perbukitan karst yang cocok untuk pariwisata	
20	Mencapai swasembada pangan	
21	Desa tertinggal	
22	Angka pengangguran relatif tinggi	
23	Desa mandiri	
24	Jumlah pengguna internet	
25	Akses UMKM terhadap modal usaha	
1	Termasuk kedalam daerah rawan banjir yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda masyarakat, kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian	Sosial
2	Sektor pertanian merupakan strategi pengembangan ekonomi daerah yang masih dipertahankan untuk mempermudah akses pangan	

No	Isu	Pilar
3	Rendahnya kesadaran masyarakat atas isu kesehatan terkini, sehingga penularan penyakit lebih mudah tersebar	
4	Pengembangan desa	
5	Preferensi penggunaan angkutan umum perkotaan	
6	Pengentasan kemiskinan	
7	Pengentasan stunting	
8	Tingginya angka kematian ibu	
9	Tingginya angka obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	
10	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak	
11	Penertiban anak jalanan dan pengamen di jalan	
12	Akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	
13	Penurunan keikutsertaan KB	
14	Pengalokasian ADD/ DD untuk penanggulangan kemiskinan (perbaikan RTLH, jambanisasi, air bersih)	
15	Meningkatnya perokok usia dini	
16	Meningkatnya kehamilan pada usia remaja	
17	Program pemberdayaan masyarakat miskin perlu untuk dioptimalkan	
18	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak	
19	Kurangnya fasilitas kesehatan dan pemantauan kesehatan secara rutin di daerah pelosok atau yang sulit untuk dijangkau	
20	Meningkatnya angka ibu rumah tangga dan anak dengan HIV	
21	Meningkatnya angka ibu rumah tangga dan anak dengan HIV	
1	Adanya program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Hukum dan Tata Kelola
2	Adanya monitoring dan pendataan timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan industri	
3	Meningkatnya jumlah kasus kekerasan	
4	Penduduk yang menjadi korban kekerasan	
5	Korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi	
6	Perempuan dan laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	
7	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	
8	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
9	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	
10	Indeks Kesetaraan	
11	Indeks kebebasan	
12	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	
13	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	
14	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	
15	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	

No	Isu	Pilar
16	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	
17	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	
18	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah lansia dan difabel	
19	Kesejahteraan masyarakat lansia	

4.3.2 Pemusatan Isu

Didapatkan sebanyak 68 daftar panjang isu, kemudian dilakukan pengelompokan isu-isu strategis berdasarkan kesamaan tema untuk mempermudah *scoring* dalam menentukan isu strategis dan isu paling strategis. Hasil pengelompokan isu-isu berdasarkan kesamaan tema dapat dilihat pada tabel berikut. Didapatkan 15 daftar isu pendek dengan pilar lingkungan sebanyak 7 Isu, pilar ekonomi sebanyak 5 Isu, pilar sosial sebanyak 5 Isu dan pilar hukum dan tata Kelola sebanyak 2 Isu. Berikut merupakan daftar pendek isu di Kabupaten Gresik:

Tabel 5. 2 Pemusatan Isu (Daftar Pendek)

No	Isu	Konten isu
	Pilar Lingkungan	
1	Termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, yang membawa dampak bencana banjir, penurunan kualitas air, sedimentasi dan meningkatnya kepadatan permukiman di bantaran sungai	Ekskalasi kejadian bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim, khususnya pada kawasan pesisir
2	Potensi bencana banjir	
3	Potensi bencana kebakaran hutan	
4	Potensi bencana perubahan iklim	
5	Potensi bencana tanah longsor	
6	Potensi bencana kekeringan	
7	Potensi bencana cuaca ekstrim dan putting beliung	
8	Potensi bencana abrasi	
9	Dalam radius bahaya abrasi dan gelombang ekstrim	
10	Memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi terutama pada DAS Bengawasn Solo dan DAS Lamong	
11	Belum semua kawasan perkotaan dan permukiman padat terlayani pengelolaan sampahnya	Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir
12	Bertambahnya limbah cair domestik	
13	Peningkatan bolume dan timbulan sampah	
14	Terdapat wilayah yang belum terlayani sistem persampahan	
15	Belum terpenuhinya standar kualitas dari sumberdaya air dan pengolahan lengkap	Penurunan daya tampung badan air seiring dengan peningkatan volume
16	Kurang optimalnya upaya dalam perlindungan dan pelestarian sumberdaya air	

No	Isu	Konten isu
17	Terbatasnya ketersediaan sumberdaya air yaitu air tanah dan air permukiman	kegiatan industri dan permukiman
18	Adanya pencemaran air sungai di wilayah utara dan selatan Kabupaten Gresik	
19	Pencemaran sungai, waduk, dan air laut	
20	Peningkatan volume limbah cair permukiman, industri, dan pariwisata	
21	Menurunnya debit sumberdaya air pada musim kemarau	Keterbatasan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan domestik
22	Kuantitas sumberdaya air yang memenuhi beberapa pada luar wilayah Kabupaten Gresik	
23	Pada umumnya Pemerintah Kabupaten Gresik belum memiliki perncanaan kebutuhan air baku	
24	Ketersediaan air tergolong kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Gresik	
25	Keterbatasan sumber daya air	
26	Rendahnya nilai status air	
27	Gagal panen diakibatkan oleh kurangnya pasokan air	
28	Alih fungsi lahan pertanian	Penurunan daya dukung lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan terbuka
29	Adanya lahan kritis	
30	Kerusakan hutan	
31	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industri	
32	Alih fungsi kawasan hutan untuk pengembangan industri	
33	Berkurangnya luasan hutan mangrove	
34	Alih fungsi lahan pada tanah pertanian yang subur menjadi permukiman dan industri	
35	Masivnya kegiatan industri memengaruhi penuruna kualitas udara	Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industri
36	Gas rumah kaca dari kegiatan industri	
37	Terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi layak	sistem sanitasi yang belum komprehensif dan menyeluruh, terutama pada kawasan pesisir
Pilar Sosial		
1	Rendahnya kesadaran masyarakat atas isu kesehatan terkini, sehingga penularan penyakit lebih mudah tersebar	Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas
2	Pengentasan stunting	
3	Tingginya angka kematian ibu	
4	Tingginya angka obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	
5	Akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	
6	Penurunan keikutsertaan KB	
7	Meningkatnya kehamilan pada usia remaja	
8	Meningkatnya angka ibu rumah tangga dan anak dengan HIV	
9	Meningkatnya perokok usia dini	

No	Isu	Konten isu
10	Kurangnya fasilitas kesehatan dan pemantauan kesehatan secara rutin di daerah pelosok atau yang sulit untuk dijangkau	
11	Preferensi penggunaan angkutan umum perkotaan	Terbatasnya fasilitas ruang publik yang mendukung kenyamanan dan keamanan anak dan golongan rentan
12	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak	
13	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak	
14	Termasuk kedalam daerah rawan banjir yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda masyarakat, kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian	
15	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah lansia dan difabel	
16	Pengentasan kemiskinan	kurang optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang menyebabkan lambatnya penurunan angka kemiskinan
17	Pengalokasian ADD/ DD untuk penanggulangan kemiskinan (perbaikan RTLH, jambanisasi, air bersih)	
18	Program pemberdayaan masyarakat miskin perlu untuk dioptimalkan	
19	Penertiban anak jalanan dan pengamen di jalan	
Pilar Ekonomi		
1	Munculnya kawasan permukiman baru pada kawasan yang berbatasan dengan Kota Surabaya	Perkembangan ekonomi regional yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Gresik
2	Peningkatan pembangunan jalan diantaranya seperti pembangunan jalan bebas hambata antar kota yang terdiri dari Manyar-Tuban, pengembangan jalan strategis yaitu Jalan Raya Gresik, pembangunan fly over Teluk Lamong sebagai upaya penghubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat Kota Surabaya	
3	Adanya kesenjangan wilayah dimana kegiatan terkonsentrasi di Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar	
4	Kesetimbangan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Masih lemahnya rehabilitasi ekonomi masyarakat terutama golongan rentan
5	Kesejahteraan masyarakat lansia	
6	Angka pengangguran relatif tinggi	Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi
7	Akses UMKM terhadap modal usaha	
Pilar Hukum dan Tata Kelola		
1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kurang optimalnya kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan
2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	
3	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Kurangnya sinkronisasi dan keselarasan data kependudukan antar OPD
4	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	
5	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	

4.3.3 Identifikasi Isu PB Strategis

Identifikasi isu PB strategis berdasarkan respon respond, responden yang diambil adalah bagian dari Kelompok Kerja KLHS RPJPD Kabupaten Gresik.Isu PB strategis pilar lingkungan adalah sebagai berikut:

- L1. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir
- L2. Penurunan daya dukung lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan terbuka
- L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industri

Kepentingan isu PB pilar lingkungan adalah sebagai berikut:

- Ekskalasi kejadian bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim, khususnya pada kawasan pesisir
- Penurunan daya tampung badan air seiring dengan peningkatan volume kegiatan industri dan permukiman
- Keterbatasan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan domestik
- sistem sanitasi yang belum komprehensif dan menyeluruh, terutama pada kawasan pesisir

Kepentingan isu PB pilar ekonomi adalah Perkembangan ekonomi regional yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Gresik. Isu PB strategis pilar Ekonomi adalah sebagai berikut:

- E1. Masih lemahnya rehabilitasi ekonomi masyarakat terutama golongan rentan
- E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi

Kepentingan isu PB pilar Ekonomi adalah terbatasnya fasilitas ruang publik yang mendukung kenyamanan dan keamanan anak dan golongan rentan. Isu PB strategis pilar Sosial adalah sebagai berikut:

- S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas
- S2. Kurang optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang menyebabkan lambatnya penurunan angka kemiskinan

Kepentingan isu PB pilar hukum dan tata kelola adalah Kurang optimalnya kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan Isu PB strategis pilar Sosial adalah Kurangnya sinkronisasi dan keselarasan data kependudukan antar OPD.

Tabel 5. 3 Matriks Isu PB Strategis

No	Isu	Konten isu	Responden									Rata-Rata	Nilai	RERATA KEPENTINGAN ISU
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
PILAR LINGKUNGAN														
1	Termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai Bengawasn Solo, yang membawa dampak bencana banjir, penurunan kualitas air, sedimentasi dan meningkatnya kepadatan permukiman di bantaran sungai	Ekskalasi kejadian bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim, khususnya pada kawasan pesisir	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2,333333	2,32	**2,38**
2	Potensi bencana banjir		3	3	3	3	3	1	3	3	2	2,666667		
3	Potensi bencana kebakaran hutan		2	2	3	3	1	1	1	2	2	1,888889		
4	Potensi bencana perubahan iklim		3	3	3	3	2	3	3	3	2	2,777778		
5	Potensi bencana tanah longsor		2	2	2	3	3	2	1	2	2	2,111111		
6	Potensi bencana kekeringan		2	2	3	3	3	2	1	2	2	2,222222		
7	Potensi bencana cuaca ekstrim dan putting beliung		2	2	3	3	3	2	1	2	2	2,222222		
8	Potensi bencana abrasi		3	2	3	3	3	2	1	2	2	2,333333		
9	Dalam radius bahaya abrasi dan gelombang ekstrim		2	3	2	2	2	1	1	2	3	2		
10	Memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi terutama pada DAS Bengawasn Solo dan DAS Lamong		3	3	2	3	3	2	2	3	3	2,666667		
11	Belum semua kawasan perkotaan dan permukiman padat terlayani pengelolaan sampahnya	Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir (L1)	1	3	3	2	3	2	1	3	3	2,333333	2,39	
12	Bertambahnya limbah cair domestik		2	3	3	3	3	1	2	3	2	2,444444		
13	Peningkatan bolume dan timbulan sampah		2	3	2	3	3	1	1	3	2	2,222222		
14	Terdapat wilayah yang belum terlayani sistem persampahan		2	3	3	2	3	3	1	3	3	2,555556		

No	Isu	Konten isu	Responden									Rata-Rata	Nilai	RERATA KEPENTINGAN ISU
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
15	Belum terpenuhinya standar kualitas dari sumberdaya air dan pengolahan lengkap	Penurunan daya tampung badan air seiring dengan peningkatan volume kegiatan industri dan permukiman (L4)	3	3	2	2	2	1	1	2	3	2,111111	2,39	
16	Kurang optimalnya upaya dalam perlindungan dan pelestarian sumberdaya air		2	3	2	2	2	2	1	2	2	2,222222		
17	Terbatasnya ketersediaan sumberdaya air yaitu air tanah dan air permukiman		3	2	3	2	3	1	1	2	3	2,111111		
18	Adanya pencemaran air sungai di wilayah utara dan selatan Kabupaten Gresik		3	3	3	3	3	3	2	3	3	2,888889		
19	Pencemaran sungai, waduk, dan air laut		2	3	3	3	3	3	1	3	2	2,555556		
20	Peningkatan volume limbah cair permukiman, industri, dan pariwisata		3	2	2	3	2	2	3	3	2	2,444444		
21	Menurunnya debit sumberdaya air pada musim kemarau	Keterbatasan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan domestik	2	3	2	2	3	2	1	2	3	2,222222	2,13	
22	Kuantitas sumberdaya air yang memenuhi beberapa pada luar wilayah Kabupaten Gresik		1	2	2	3	2	1	1	2	3	1,888889		
23	Pada umumnya Pemerintah Kabupaten Gresik belum memiliki perncanaan kebutuhan air baku		3	2	2	2	2	1	1	2	2	1,888889		
24	Ketersediaan air tergolong kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Gresik		2	2	3	3	2	2	2	2	2	2,222222		
25	Keterbatasan sumber daya air		3	3	2	3	3	1	1	3	2	2,333333		
26	Rendahnya nilai status air		2	2	2	3	3	3	1	2	2	2,222222		
27	Gagal panen diakibatkan oleh kurangnya pasokan air		2	2	3	3	3	1	1	2	2	2,111111		
28	Alih fungsi lahan pertanian	Penurunan daya dukung lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan terbuka (L2)	3	3	2	3	2	3	1	3	2	2,444444	2,59	
29	Adanya lahan kritis		3	2	2	3	2	2	1	3	2	2,222222		
30	Kerusakan hutan		2	2	3	3	1	3	1	3	2	2,222222		
31	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industri		2	3	2	3	3	3	3	3	3	2,777778		
32	Alih fungsi kawasan hutan untuk pengembangan industri		3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,888889		
33	Berkurangnya luasan hutan mangrove		2	3	3	3	2	3	2	3	3	2,666667		

No	Isu	Konten isu	Responden									Rata-Rata	Nilai	RERATA KEPENTINGAN ISU
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
34	Alih fungsi lahan pada tanah pertanian yang subur menjadi permukiman dan industri		2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,888889		
35	Masivnya kegiatan industri memengaruhi penuruna kualitas udara	Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry (L3)	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2,444444	2,56	
36	Gas rumah kaca dari kegiatan industri		2	3	3	3	2	3	3	3	2	2,666667		
37	Terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi layak	sistem sanitasi yang belum komprehensif dan menyeluruh, terutama pada kawasan pesisir	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2,333333	2,33	
PILAR SOSIAL														
1	Rendahnya kesadaran masyarakat atas isu kesehatan terkini, sehingga penularan penyakit lebih mudah tersebar	Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas (S1)	1	3	3	3	3	1	1	3	2	2,222222	2,09	**2,09**
2	Pengentasan stunting		1	3	2	3	3	3	3	3	2	2,555556		
3	Tingginya angka kematian ibu		1	3	2	3	3	1	1	3	2	2,111111		
4	Tingginya angka obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		1	2	2	3	3	1	1	3	2	2		
5	Akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.		1	2	3	3	2	1	1	2	2	1,888889		
6	Penurunan keikutsertaan KB		1	2	2	3	3	1	1	2	2	1,888889		
7	Meningkatnya kehamilan pada usia remaja		1	3	2	3	3	1	1	2	2	2		
8	Meningkatnya angka ibu rumah tangga dan anak dengan HIV		1	3	3	3	3	2	1	2	2	2,222222		

No	Isu	Konten isu	Responden									Rata-Rata	Nilai	RERATA KEPENTINGAN ISU
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
9	Meningkatnya perokok usia dini		1	3	2	3	3	1	1	2	2	2		
10	Kurangnya fasilitas kesehatan dan pemantauan kesehatan secara rutin di daerah pelosok atau yang sulit untuk dijangkau		1	2	3	3	2	2	1	2	2	2		
11	Preferensi penggunaan angkutan umum perkotaan	Terbatasnya fasilitas ruang publik yang mendukung kenyamanan dan keamanan anak dan golongan rentan	1	3	3	3	3	1	1	3	2	2,222222	2,06	
12	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak		1	2	2	3	3	1	1	2	2	1,888889		
13	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak		1	2	2	3	3	1	1	2	2	1,888889		
14	Termasuk kedalam daerah rawan banjir yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda masyarakat, kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian		1	3	2	3	3	1	1	3	3	2,222222		
15	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah lansia dan difabel													
16	Pengentasan kemiskinan	kurang optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang menyebabkan lambatnya penurunan angka kemiskinan (S2)	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2,444444	2,11	
17	Pengalokasian ADD/ DD untuk penanggulangan kemiskinan (perbaikan RTLH, jambanisasi, air bersih)		1	3	2	3	3	1	1	2	2	2		
18	Program pemberdayaan masyarakat miskin perlu untuk dioptimalkan		1	3	2	3	3	1	1	2	2	2		
19	Penertiban anak jalanan dan pengamen di jalan		1	2	3	3	3	1	1	2	2	2		
PILAR EKONOMI														
1	Munculnya kawasan permukiman baru pada kawasan yang berbatasan dengan Kota Surabaya	Perkembangan ekonomi	1	2	3	2	2	1	1	3	2	1,89	2,07	**2,19**

No	Isu	Konten isu	Responden									Rata-Rata	Nilai	RERATA KEPENTINGAN ISU
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	Peningkatan pembangunan jalan diantaranya seperti pembangunan jalan bebas hambata antar kota yang terdiri dari Manyar-Tuban, pengembangan jalan strategis yaitu Jalan Raya Gresik, pembangunan fly over Teluk Lamong sebagai upaya penghubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat Kota Surabaya	regional yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dalam wilayah	1	3	3	3	2	2	2	3	2	2,33		
3	Adanya kesenjangan wilayah dimana kegiatan terkonsentrasi di Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar	Kabupaten Gresik	1	2	2	3	3	2	1	2	2	2,00		
4	Kesetimbangan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Masih lemahnya rehabilitasi	1	2	3	3	3	1	1	3	3	2,22	2,22	
5	Kesejahteraan masyarakat lansia	ekonomi masyarakat terutama golongan rentan (E1)	1	2	3	3	3	1	1	3	3	2,22		
6	Angka pengangguran relatif tinggi	Terbatasnya	1	3	2	3	3	2	1	3	3	2,33	2,28	
7	Akses UMKM terhadap modal usaha	akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi (E2)	1	2	3	3	3	2	1	2	3	2,22		
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA														
1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kurang optimalnya kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan	1	2	2	3	2	1	1	2	2	1,78		**1,93**

No	Isu	Konten isu	Responden									Rata-Rata	Nilai	RERATA KEPENTINGAN ISU
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)		1	2	2	3	2	1	1	2	2	1,78	1,78	
3	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Kurangnya sinkronisasi dan keselarasan data kependudukan antar OPD (T1)	1	3	3	3	3	2	1	2	2	2,22		
4	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.		1	2	2	3	3	1	1	2	2	1,89		
5	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun		1	2	3	3	3	2	1	2	2	2,11	2,07	

Keterangan:

- Sangat Penting
- Penting
- Tidak Penting
- Tidak Terisi

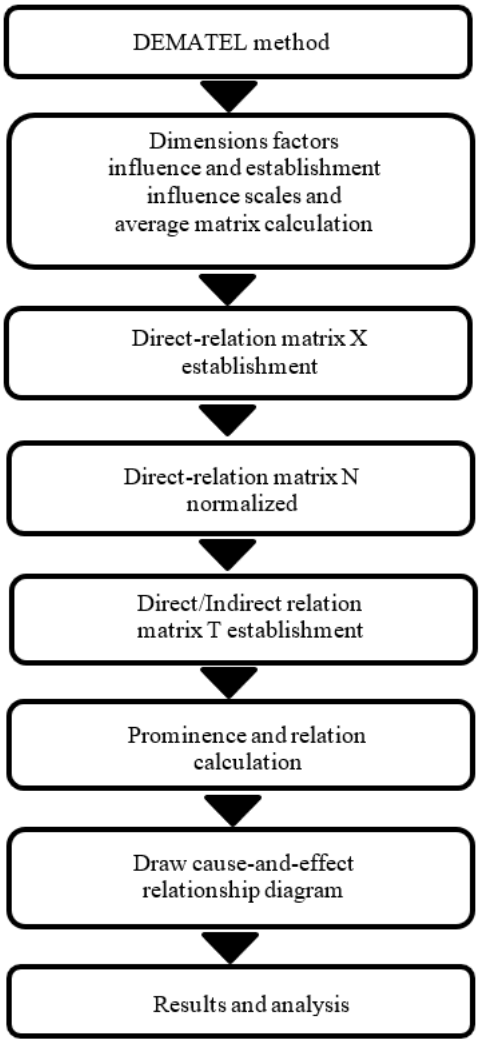
Tabel 3. 126 Persandingan Isu Strategis dengan 6 Muatan KLHS

Pilar	Isu Strategis	6 Muatan KLHS
Lingkungan	L1. Ekskalasi kejadian bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim, khususnya pada kawasan pesisir	Tahun 2022 terjadi 84 kejadian banjir di Kabupaten Gresik yang tersebar di beberapa kecamatan Selain banjir, bencana lain yang terjadi di Kabupaten Gresik yaitu longsor, rob, putting beliung, kebakaran, dan kekeringan. Total jumlah bencana yang ada di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 adalah sebanyak 168 kejadian
	L2. Penurunan daya dukung lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan terbuka	Daerah dengan status air terlampaui atau defisit terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Wringinanom, disebabkan oleh kepadatan penduduk Kecamatan Gresik terbesar di Kabupaten Gresik yang mengakibatkan alih fungsi lahan ke permukiman semakin pesat dan menyebabkan area resapan air menipis dan kebutuhan akan air bersih penduduk semakin tinggi yang berdampak terhadap nilai status.
	L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industri	Penyebab penurunan kualitas udara di Kabupaten Gresik yaitu peningkatan jumlah penduduk, banyak industri, berkembangnya perekonomian. Selain itu, penyebab penurunan kualitas udara bahkan pencemaran udara yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kegiatan industri, dan pembakaran sampah. Kecamatan Diyorejo tercatat memiliki konsentrasi polutan CO tertinggi dengan nilai mencapai 4571 µg/Nm3.
	L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	Penggunaan sumberdaya alam berlebihan berdampak pada menyurutnya potensi air/sumber air karena kelembaban tanah yang berkurang dan tanah akan menjadi kering bahkan pada daerah tertentu akan terjadi amblesan tanah dan penurunan dari muka air tanah. Terjadinya pelumpuran pada air permukaan, proses erosi, sedimentasi dan pendangkalan yang meningkat di badan sungai, ataupun waduk, pada musim hujan akan sering terjadi banjir karena tidak ada lagi penahan.
Sosial	S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas	Jumlah sarana Kesehatan di Kabupaten Gresik sebesar 1.653 unit. Jumlah penyakit mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022, HIV/AID meningkat dari 82 kasus menjadi 142 kasus, DBD dari 84 kasus menjadi 266 kasus, diare dari 35890 kasus menjadi 36614 kasus dan TB dari 1365 kasus menjadi 2755 kasus.
	S2. Kurang optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang menyebabkan lambatnya penurunan angka kemiskinan	Luas lahan sawah yang mengalami penurunan dari yang semula 38.052,5 ha menjadi 35.779 ha pada tahun 2017, atau turun sebesar 5,65%.. Angka kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2022 sebesar 11.06%, hal tersebut masih diatas target nasional.

Pilar	Isu Strategis	6 Muatan KLHS
Ekonomi	E1. Masih lemahnya rehabilitasi ekonomi masyarakat terutama golongan rentan	-
	E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi	-
Tata Kelola	T1. Kurangnya sinkronisasi dan keselarasan data kependudukan antar OPD	-

4.3.4 Isu PB Paling Strategis

Menentukan isu PB Paling strategis menggunakan metode DEMATEL. **Analisis DEMATEL (*Decision-making trial and evaluation laboratory*)** adalah suatu Teknik analisa yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat diantara banyak item yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.



Gambar 5. 1 Alur Analisa DEMATEL

L1. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir

L2. Penurunan daya dukung lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan terbuka

L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry

L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman

S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas

S2. Kurang optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang menyebabkan lambatnya penurunan angka kemiskinan

E1. Masih lemahnya rehabilitasi ekonomi masyarakat terutama golongan rentan

T1. Kurangnya sinkronisasi dan keselarasan data kependudukan antar OPD

Tabel 5. 4 Normalisasi Sebab Akibat

Normalisasi	L1	L2	L3	L4	S1	S2	E1	E2	T1
L1	0,00	0,16	0,12	0,16	0,16	0,16	0,12	0,08	0,04
L2	0,16	0,00	0,16	0,16	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
L3	0,16	0,16	0,00	0,12	0,08	0,12	0,12	0,08	0,04
L4	0,16	0,16	0,12	0,00	0,08	0,08	0,08	0,04	0,04
S1	0,16	0,08	0,12	0,12	0,00	0,16	0,12	0,08	0,08
S2	0,08	0,04	0,08	0,12	0,12	0,00	0,16	0,12	0,16
E1	0,12	0,04	0,12	0,12	0,04	0,12	0,00	0,16	0,12
E2	0,08	0,04	0,08	0,04	0,04	0,12	0,16	0,00	0,16
T1	0,04	0,04	0,08	0,04	0,08	0,16	0,08	0,12	0,00

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Tabel 5. 5 Keterkaitan Sebab Akibat

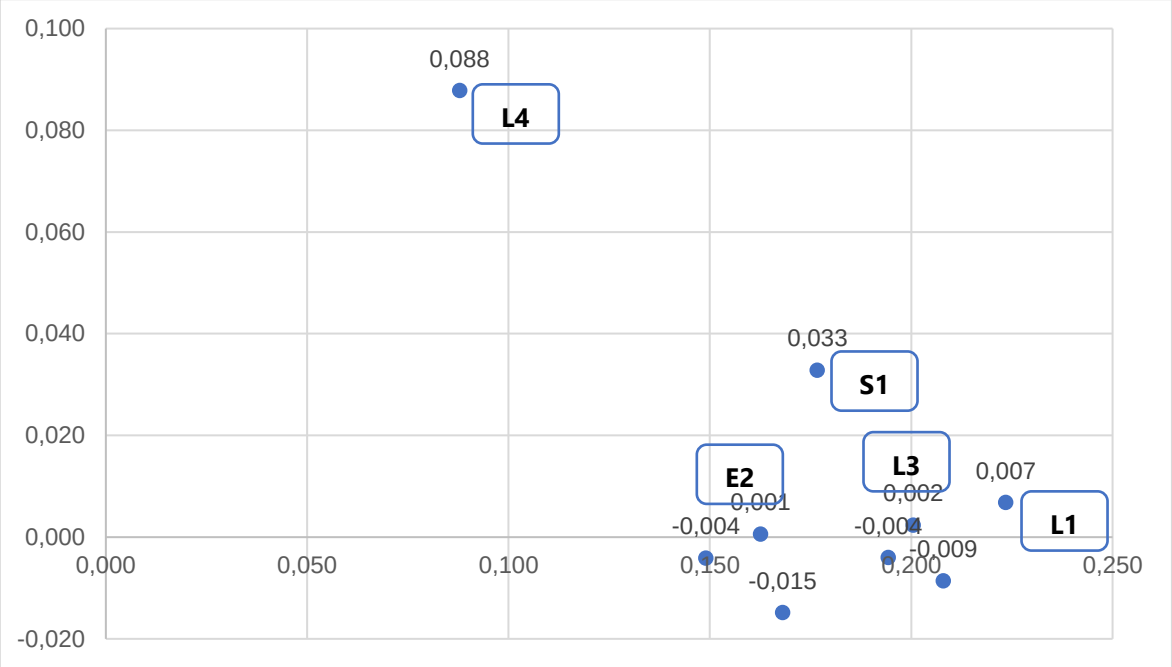
T	L1	L2	L3	L4	S1	S2	E1	E2	T1	D
L1	0,000	0,020	0,014	0,018	0,018	0,018	0,014	0,009	0,004	**0,115**
L2	0,018	0,000	0,018	0,018	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	**0,077**
L3	0,018	0,020	0,000	0,014	0,009	0,014	0,014	0,009	0,004	**0,101**
L4	0,018	0,020	0,014	0,000	0,009	0,009	0,009	0,004	0,004	**0,088**
S1	0,018	0,010	0,014	0,014	0,000	0,018	0,014	0,009	0,009	**0,105**
S2	0,009	0,005	0,009	0,014	0,014	0,000	0,018	0,014	0,018	**0,100**
E1	0,014	0,005	0,014	0,014	0,004	0,014	0,000	0,018	0,014	**0,095**
E2	0,009	0,005	0,009	0,004	0,004	0,014	0,018	0,000	0,018	**0,082**
T1	0,004	0,005	0,009	0,004	0,009	0,018	0,009	0,014	0,000	**0,072**
R	**0,108**	**0,091**	**0,099**	**0,099**	**0,072**	**0,108**	**0,099**	**0,081**	**0,077**	

Sumber: Hasil Analisa, 2023

Tabel 5. 6 Perhitungan Kekuatan Hubungan Sebab Akibat

	D	R	D+R		D-R
L1	0,115	0,108	0,223		0,007
L2	0,077	0,091	0,168		-0,015
L3	0,101	0,099	0,201		0,002
L4	0,088	0,000	0,088		0,088
S1	0,105	0,072	0,177		0,033
S2	0,100	0,108	0,208		-0,009
E1	0,095	0,099	0,194		-0,004
E2	0,082	0,081	0,163		0,001
T1	0,072	0,077	0,149		-0,004

Sumber: Hasil Analisa, 2023



Gambar 5. 2 Diagram Sebab-Akibat

Dari hasil perhitungan menggunakan Metode DEMATEL didapat Isu PB Paling Strategis sebagai berikut:

L1. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir

L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry

L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman

S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas

E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi

4.3.5 Baseline Isu

A. L1. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir

Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.925 Ha. Sampah yang dihasilkan Kabupaten Gresik berasal dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan, dan sampah perikanan. Tahun 2022 besar sampah yang terlayani sebesar 67,46%, Kawasan yang terlayani persampahan merupakan Kawasan perkotaan.

Tabel 5. 7 Kondisi Pengelolaan Persampahan

Sasaran	Indikator sasaran	2020	2021	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang bersih dan indah	Presentase pengelolaan sampah	59%	46,76%	62%	67,46%	109%

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia maka jumlah timbulan sampah ikut meningkat. Berikut merupakan proyeksi timbulan sampah Kabupaten Gresik hingga tahun 2024, dimana perlu adanya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik sehingga secara keseluruhan dapat terlayani sistem persampahan.

Tabel 5. 8 Proyeksi Timbulan Sampah

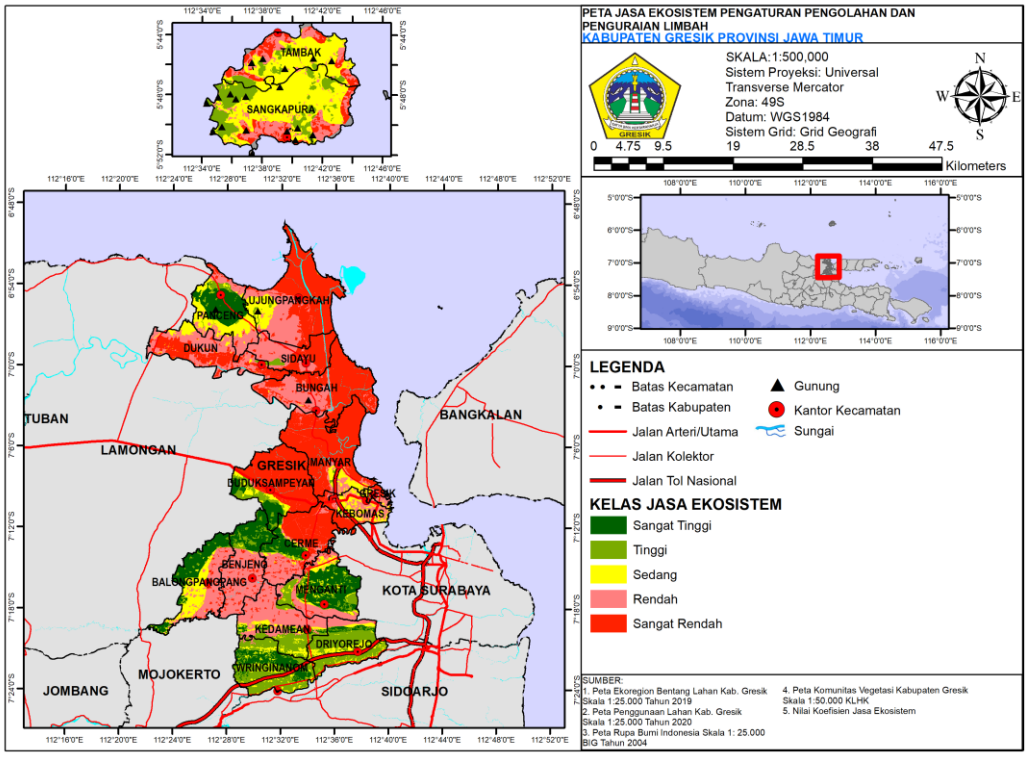
No	Kecamatan	Jumlah penduduk 2022	Timbulan sampah 2022	Proyeksi jumlah penduduk 2045	Proyeksi timbulan sampah 2045
1	Wiringinanom	72549	21,79	72308	21,71772
2	Driyorejo	104063	31,16	103718	31,05664
3	Kedamean	63348	19,02	63138	18,95691
4	Menganti	127228	37,97	126806	37,84405
5	Cerme	81363	24,35	81093	24,26923
6	Benjeng	65642	19,74	65424	19,67452
7	Balongpanggang	56527	17,01	56340	16,95358
8	Duduksampean	49571	14,93	49407	14,88048
9	Kebomas	111902	33,54	111531	33,42875
10	Gresik	80403	24,22	80136	24,13966
11	Manyar	117866	35,28	117475	35,16298
12	Bungah	68209	20,51	67983	20,44197
13	Sidayu	43739	13,14	43594	13,09642
14	Dukun	65836	19,88	65618	19,81406
15	Panceng	52514	15,81	52340	15,75756
16	Ujungpangkah	51892	15,6	51720	15,54826
17	Sangkapura	52907	16,17	52732	16,11636
18	Tambak	30255	9,2	30155	9,169484
	total	1297850	389,31	1297838	389,3064

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Kurang optimalnya pengelolaan sampah didukung oleh kinerja jasa ekosistem pengaturan, pengolahan dan penguraian limbah, didominasi oleh sangat rendah. Hal ini dikarenakan peran biota dan abiotic dalam proses pembersihan atau penguraian materi organic, senyawa dan nutrisi steril sangat rendah. Selain itu tingkat retensi air ditanah dan permukaan sangat rendah.

Tabel 5. 9 Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan Penguraian Limbah

Kecamatan	Sangat Rendah		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Balongpangpang	296,35		2320,69	1687,03	173,53	2119,07	
Benjeng	529,28		3575,33	43,78	522,36	1594,49	
Bungah	6160,97		2591,67	16,37			
Cerme	3571,87		1997,91	236,80	272,70	1114,20	
Driyorejo	8,87		525,56	1165,75	3469,89	313,13	
Duduksampeyan	5829,53		152,41	472,83	896,96	854,30	
Dukun	2924,01		2983,71	523,33	83,84		
Gresik	128,17		428,62	185,61	38,11		
Kebomas	948,46		1405,35	1125,07	4,71		
Kedamean	206,13		3811,31	765,94	1664,19	292,74	
Manyar	7812,32		918,10	781,97	31,38		
Menganti	216,51		1770,33	863,77	1346,33	2954,53	
Panceng	302,53		1546,63	1825,75	390,54	2387,59	
Sangkapura	1110,27		1933,85	6616,00	2724,28		
Sidayu	2238,61		1982,29	6,76	146,79		
Tambak	1162,02		1427,49	3754,23	832,31		
Ujungpangkah	6866,95		2839,66	1182,74	116,90	22,52	
Wringinanom	0,87		82,18	753,00	3809,21	1554,41	
Total	40313,73		32293,09	22006,76	16524,01	13206,99	



Gambar 5. 3 Kinerja Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguaraian Limbah

B. L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry

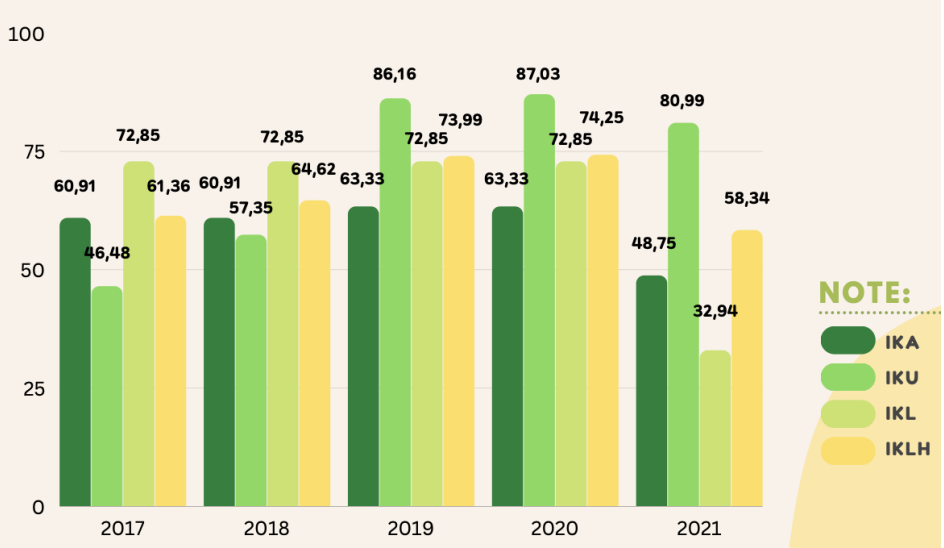
Kabupaten Gresik merupakan wilayah yang berpengaruh dan terpengaruh terhadap Pengembangan Gerbang Kertasusila (Gresik-Jombang-Bangkalan- Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo) sebagai Kawasan Strategis Nasional; dan menjadi menjadi salah satu koridor strategis ekonomi Jawa Timur yaitu Koridor Ekonomi Surabaya – Gelangban (Gresik – Lamongan – Tuban) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur sehingga berdampak terhadap meningkatnya kegiatan industry.

Tabel 5. 10 Jumlah Industri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten GresikTahun 2011-2016

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Industri	Industri	6.293	6.369	6.451	6.525	6.653	6.495
Tanda Daftar Industri (TDI)	Unit	61	45	25	30	41	194

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2017

Kawasan Industri Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal tersebut juga disebabkan karena adanya pembangunan pelabuhan internasional di Kecamatan Manyar. Pada tahun 2016 Kabupaten Gresik memiliki 6.495 industri atau yang terdaftar sebanyak 194 unit industri. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya kenaikan pertumbuhan industri dapat mancapai angka 373%. Dalam hal kenaikan tersebut maka berdampak pada investasi juga.



Gambar 5. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021
Sumber: DIKPLHD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Isu utama pada aspek kualitas udara yang di Kabupaten Gresik yaitu pencemaran udara di Kawasan Industri. Penyebab penurunan kualitas udara di Kabupaten Gresik yaitu peningkatan jumlah penduduk, banyak industri, berkembangnya perekonomian. Selain itu,

penyebab penurunan kualitas udara bahkan pencemaran udara yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kegiatan industri, dan pembakaran sampah. Berikut adalah hasil pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Gresik.

Lokasi	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)	HC (µg/Nm3)	PM10 (µg/Nm3)	PM2,5 (µg/Nm3)	TSP (µg/Nm3)	Pb (µg/Nm3)
Kecamatan Manyar	34.6	128.8	10.4	19.4	13.6	19.7	4.9	73.9	0.54
Kecamatan Driyorejo	60.4	4571.4	18.3	18.2	14.6	3.86	0.86	3	0.018
Kecamatan Cerme	38	1146	12	9	6.53	13	9	23	0.02
Kecamatan Kedamean	29.5	2683	20.4	9.3	27.3	15.9	4.8	47.9	0.019
Kecamatan Wringinanom	8.28	1150	6.5	6.8	6.8	7.8	2.2	22.1	0.042
Kecamatan Panceng	8.28	1150	6.5	26.3	27.3	4.7	1.4	1.4	0.014
Kecamatan Balongpanggang	36.1	1000	29.6	24.2	8	-	-	58.1	0.015
Kecamatan Benjeng	8.28	1150	6.5	6.8	27.3	(Kosong)	(Kosong)	(Kosong)	(Kosong)
Kecamatan Bungah	10.624	185	9.258	48.3	(Kosong)	(Kosong)	(Kosong)	24.57	0.01
Kecamatan Duduksampeyan	22.7	1150	6.5	7.69	27.3	8.9	2.7	26.7	0.018
Kecamatan Dukun									
Kecamatan Gresik	8.28	1150	18.5	6.8	27.3	(Kosong)	(Kosong)	0.0023	0.000016
Kecamatan Kebomas	20	547.2	20.1	12	4.27	11.1	6	19.27	0.01
Kecamatan Menganti	29.3	6072.3	15.6	19.4	11.2	0	0	24.4	0.047
Kecamatan Ujung Pangkah	8.28	1150	6.5	6.8	27.3	6.03	1.8	18.1	0.002
Kecamatan Sidayu	30	1968	12	13	6.53	(Kosong)	(Kosong)	18	0.02

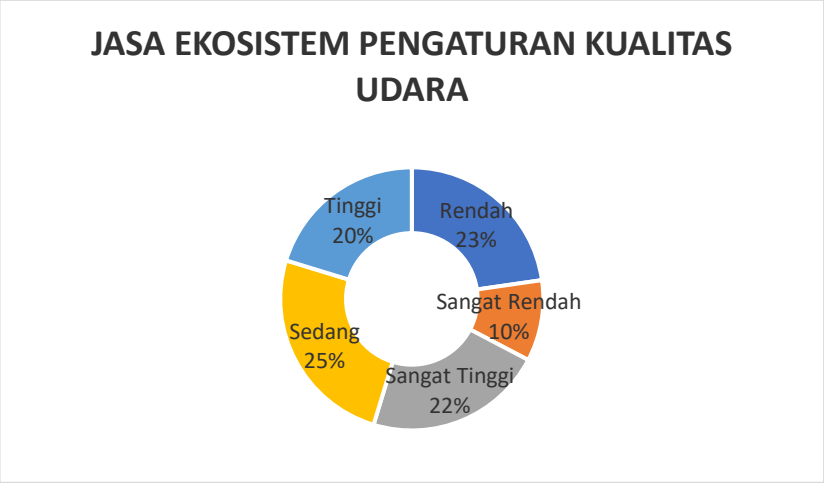
Gambar 5. 5 Kualitas Udara Kabupaten Gresik Tahun 2022

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Gresik Tahun 2022

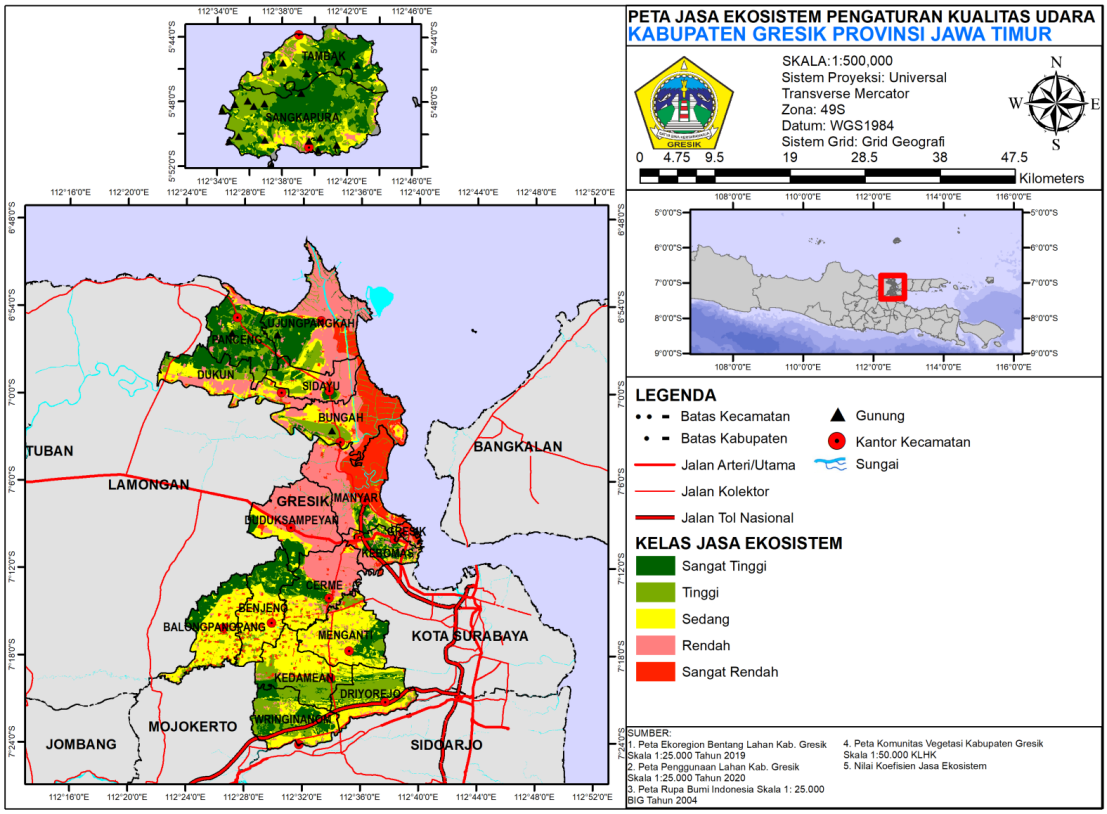
Berdasarkan Gambar Kecamatan Diyorejo tercatat memiliki konsentrasi polutan CO tertinggi dengan nilai mencapai 4571 µg/Nm3. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gresik didapatkan melalui perhitungan Indeks Pencemaran Udara melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang mewakili dampak pencemaran udara dari kawasan transportasi, perumahan, perkantoran, dan industry.

Di wilayah perkotaan Gresik yang terdiri dari Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Duduksampeyan mengalami perubahan tata guna lahan yang drastis khusunya pada lahan non terbangun menjadi lahan perubahan dan industri. Wilayah perkotaan Gresik menghasilkan gas CO_2 dari aktivitas ruamh tangga, industry, dan transportasi masing-masing sebesar 215.567 ton/tahun (Kecamatan Gresik), 564.404 ton/tahun (Kecamatan Kebomas), 454.267 ton/tahun (Kecamatan Manyar), dan 104.536 ton/tahun (Kecamatan Duduksampeyan). Kondisi tersebut merupakan 50,37% atau

sekitar 1.34 juta ton/tahun dari totoal 2.657.660 ton/tahun gas CO_2 yang dihasilkan di seluruh Kabupaten Gresik. Jumlah emisi CO_2 tersebut belum mencakup emisi CO_2 yang berasal dari pertanian dengan jumlah mencapai 3,89 juta ton/tahun.



Gambar 3. 31 Presentase Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara



Gambar 5. 6 Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Berdasarkan data GRK tertinggi berada di Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Duduksampeyan dan Kecamatan Manyar. Hal tersebut didukung oleh kinerja pelayanan jasa ekosistem pengaturan kualitas udara, dimana pada kecamatan tersebut didominasi oleh kelas rendah dan sangat rendah.

C. L4. Penurunan daya tampung badan air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang akan dilakukan pembangunan proyek stategis nasional. Dengan adanya proyek ini akan menumbuhkan dan memberikan dampak yang besar untuk wilayah secara ekonomi dan menjadi magnet pada wilayah sekitar. Salah satu yang harus diantisipasi dengan adanya proyek ini yakni akan ada penduduk yang akan datang dan berdomisili di wilayah Kabupaten Gresik. Proyek strategis nasional yang akan dilasanakan yakni Kawasan Industri JIIPE Gresik. Pengaruh Kegiatan terhadap Sistem Perkotaan dengan adanya kegiatan – kegiatan yang berkembang tersebut, maka muncul kawasan pemukiman baru dan fasilitas kebutuhan pemukiman mengingat Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan permukiman di Gresik, khususnya yang terpengaruh oleh kegiatan industri, dapat memiliki beberapa dampak. Dampak yang timbul akibat perkembangan kegiatan industri di Kabupaten Gresik.

1. **Peningkatan Penduduk**: Kegiatan industri dapat menarik penduduk baru ke wilayah tersebut dalam pencarian pekerjaan. Ini dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang cepat dan peningkatan permukiman.
2. **Pertumbuhan Ekonomi Lokal**: Kegiatan industri dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
3. **Infrastruktur**: Untuk mendukung industri, seringkali dibangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Ini dapat meningkatkan aksesibilitas ke daerah tersebut dan meningkatkan kondisi infrastruktur di perkotaan dan pedesaan sekitarnya.
4. **Kenaikan Harga Tanah dan Properti**: Dampak industri yang positif seperti peningkatan pekerjaan juga dapat berdampak pada kenaikan harga tanah dan properti. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi penduduk setempat yang mungkin mengalami kesulitan dalam membeli atau menyewa rumah.
5. **Penyediaan Layanan Publik**: Pertumbuhan permukiman yang cepat dapat menimbulkan tuntutan pada penyediaan layanan publik seperti pendidikan,

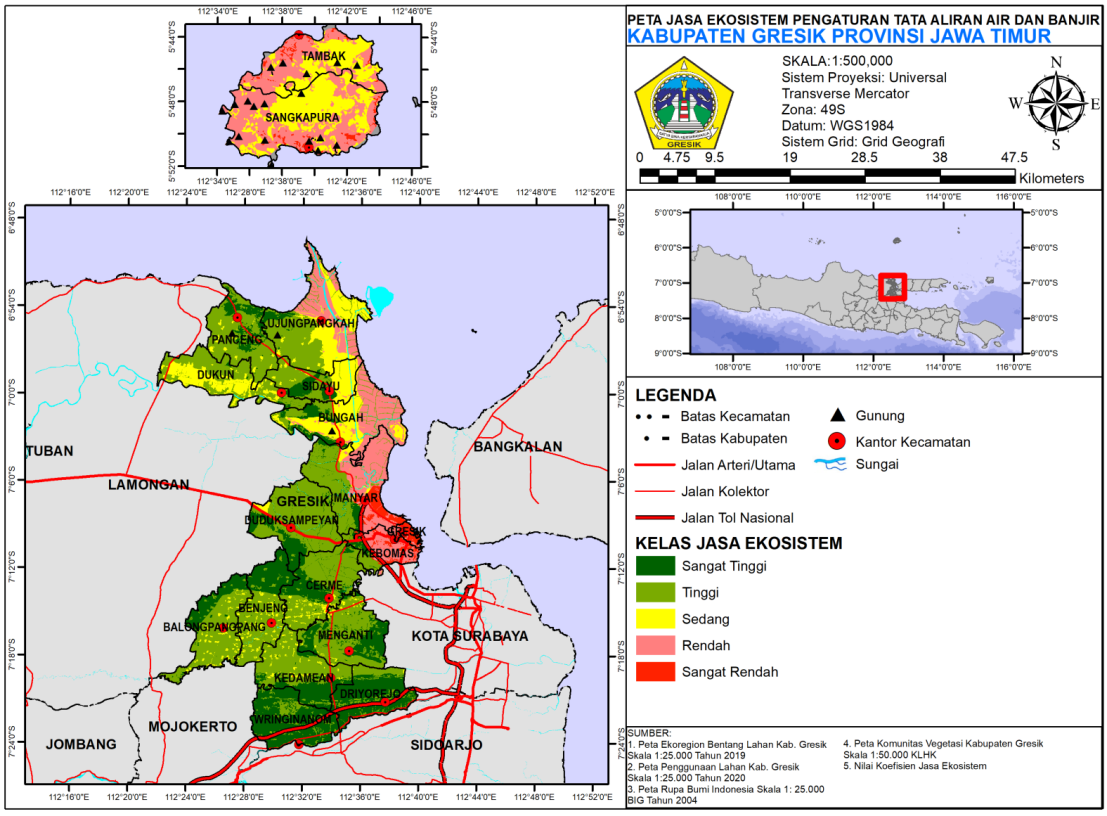
kesehatan, dan transportasi. Pemerintah daerah harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, yang membawa dampak terjadi bencana banjir, serta terjadinya penurunan kualitas air, sedimentasi dan kepadatan pemukiman sekitar bantaran sungai. Kabupaten Gresik terbagi kedalam 2 Daerah Aliran Sungai utama yaitu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hilir dan Daerah Aliran Sungai Brantas Hilir. Berikut merupakan table dan gambar yang menjelaskan daerah aliran sungai utama yang mengaliri Kabupaten Gresik.

Tabel 5. 11 Luas Daerah Aliran Sungai

Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)
Bengawan Solo Hilir	113731.05
Brantas Hilir	12820.88

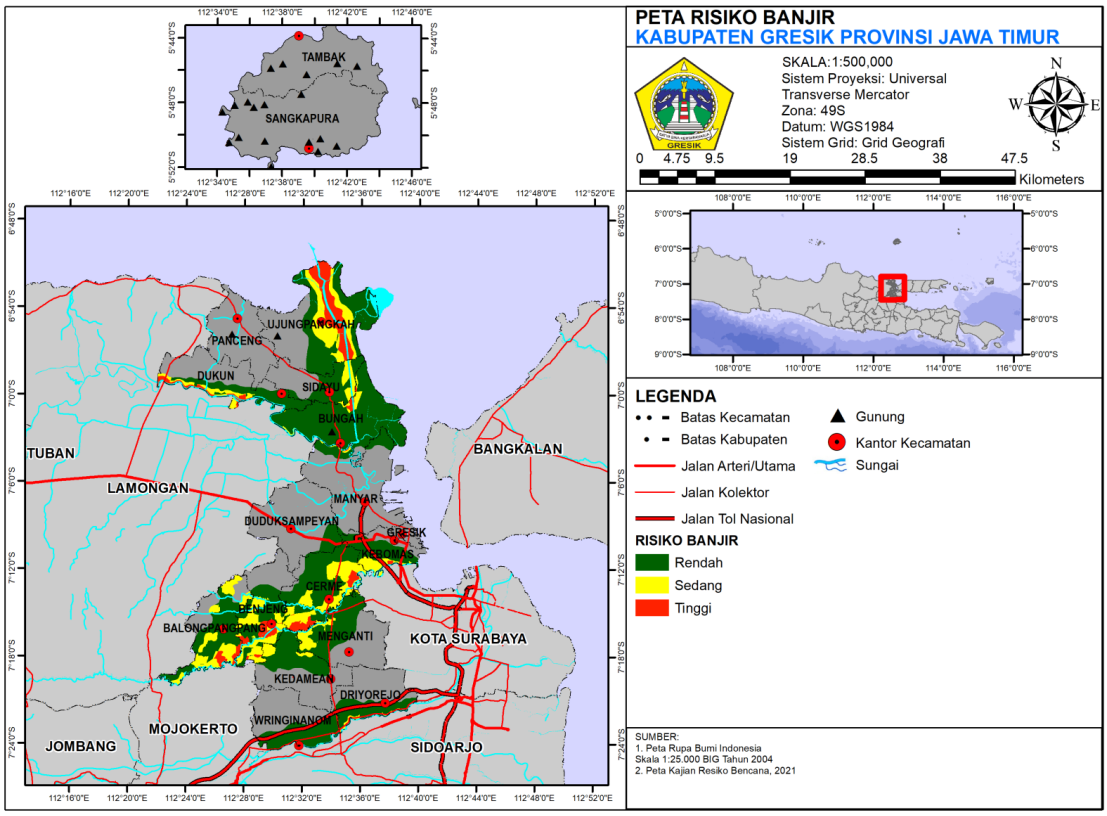
Sumber: D3TLH, 2021



Gambar 5. 7 Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan tata Aliran Air dan Banjir

Sungai Kali Lamong merupakan sungai utama yang mengalir melewati Kabupaten Gresik. Sungai Kali Lamong merupakan anak dari Sungai Bengawan Solo dengan luas DAS kurang lebih 720 km2 dan panjang alur sungai kurang lebih 103 km serta memiliki 7 anak sungai. Pada musim penghujan, sungai Kali Lamong tidak mampu menampung semua debit yang masuk, akibatnya terjadi banjir di sekitar Kali Lamong. Penyebab utamanya yaitu curah

hujan yang tinggi namun tidak diimbangi oleh kapasitas sungai. Oleh karena itu, banyak permukiman yang terkena lupasan dari Sungai Kali Lamong sehingga mengalami kebanjiran. Pada tahun 2022 terjadi 84 kejadian banjir di Kabupaten Gresik yang tersebar di beberapa kecamatan.



Gambar 5. 8 Peta Risiko Bencana Banjir

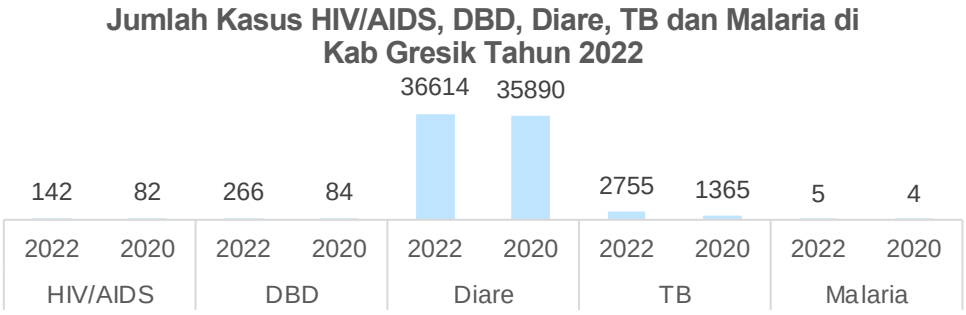
Wilayah yang paling banyak mengalami banjir yaitu, Kecamatan Balongpanggang sebanyak 14 desa, Kecamatan Benjeng sebanyak 17 desa, Kecamatan Cerme sebanyak 18 desa. Penyebab banjir di Kabupaten Gresik adalah masalah DAS dan drainase. Wilayah Kabupaten Gresik menjadi muara DAS Bengawan Solo dan DAS Lamong, serta dibagian selatan berbatasan dengan DAS Surabaya mengakibatkan wilayah Kabupaten Gresik memiliki tingkat rawan bencana banjir dari rendah ke tinggi. Luas wilayah dengan ancaman banjir rendah yaitu 27.885,83 Ha. Sedangkan untuk wilayah dengan tingkat ancaman banjir sedang yaitu sebesar 15.432,66 Ha dan untuk dengan kerentanan tinggi seluas 11.145,010 Ha yang terdiri dari berbagai desa.

D. S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas

Kesehatan keluarga penting untuk dijaga dan diperhatikan. Hal ini karena keluarga yang sehat menjadi cikal bakal bangsa yang sehat. Fenomena dan gejala yang berkaitan dengan kesehatan keluarga penting untuk diketahui oleh orang tua terlebih dahulu agar tindakan yang diambil tepat. "Mencapai Indonesia Emas" adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tujuan Indonesia untuk menjadi negara maju dengan berbagai indikator kemajuan di berbagai sektor, termasuk di bidang kesehatan. Kesehatan keluarga merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai tujuan ini. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan mendukung pencapaian visi "Indonesia Emas":

1. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan: Memastikan bahwa semua anggota keluarga memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik dan rumah sakit, serta pelayanan imunisasi, konsultasi dokter, dan layanan kesehatan reproduksi
2. Nutrisi Seimbang: Memastikan ketersediaan makanan yang sehat dan bergizi di rumah, serta mempromosikan konsumsi makanan yang seimbang dengan menghindari makanan cepat saji yang tidak sehat
3. Pencegahan Penyakit: Mendorong keluarga untuk mengadopsi gaya hidup sehat, seperti olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menghindari perilaku berisiko, seperti merokok dan minuman beralkohol
4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Memastikan akses ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terpercaya, termasuk keluarga berencana, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan perawatan persalinan yang berkualitas
5. Perawatan Kesehatan Mental: Memahami bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan keluarga. Mendorong pembicaraan terbuka tentang masalah kesehatan mental dan mencari bantuan jika diperlukan
6. Kebersihan dan Sanitasi: Memastikan kebersihan rumah dan lingkungan sekitar untuk mencegah penyakit menular dan mempromosikan Kesehatan
7. Imunisasi: Memastikan bahwa semua anggota keluarga mendapatkan imunisasi yang tepat sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh otoritas Kesehatan

8. Pengelolaan Penyakit Kronis: Jika ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis, seperti diabetes atau hipertensi, penting untuk mengelolanya dengan baik melalui pengobatan yang teratur dan perubahan gaya hidup yang sesuai



Gambar 5. 9 Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBDm Diare, TB dan Malaria di Kabupaten Gresik Tahun 2022

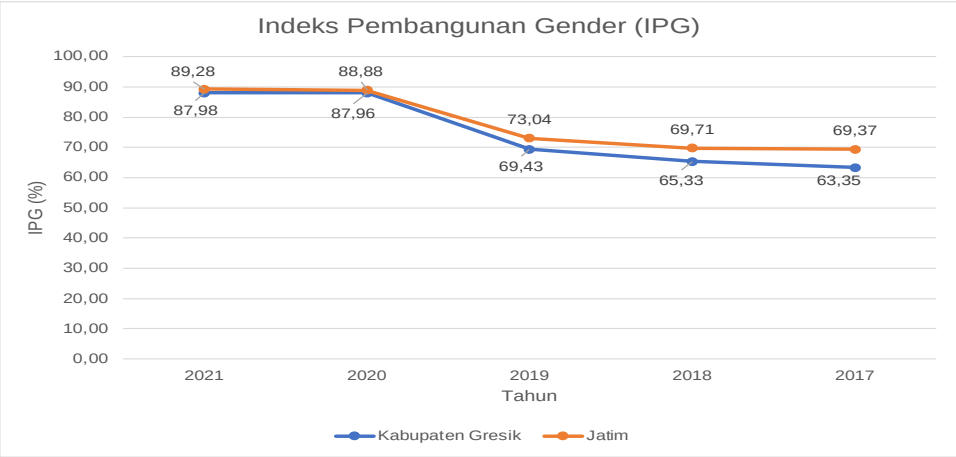
Jumlah ksus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB dan malaria di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah akses terhdap sarana Kesehatan. Dukungan layanan fasilitas Kesehatan yang lebih lengkap terhadap kasus penyakit yang terkait dengan Kesehatan dan kualitas keluarga perlu diselaraskan.

Tabel 5. 12 Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2022

No	Kecamatan	RS Umum	RS Khusus	Puskesmas	Klinik/ Balai Kesehatan	Posyandu
1	Wiringinanom			2	5	73
2	Driyorejo	2		2	10	121
3	Kedamean			2	1	77
4	Menganti	3		2	7	132
5	Cerme			2	7	78
6	Benjeng			2	3	84
7	Balongpanggang	2		2		83
8	Duduksampean			1	4	65
9	Kebomas	1		2	14	142
10	Gresik	6		3	10	92
11	Manyar	2		3	14	144
12	Bungah	1		1	2	75
13	Sidayu		1	1		52
14	Dukun			2	3	83
15	Panceng			1	1	49
16	Ujungpangkah	1		2	1	56
17	Sangkapura	1		1	3	66
18	Tambak			1		44
	Total	**19**	**1**	**32**	**85**	**1516**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam menunjang layanan kesehatan masyarakat, Kabupaten Gresik memiliki fasilitas kesehatan dimana yang paling banyak

adalah posyandu dengan jumlah 1.516, kemudian jumlah fasilitas Kesehatan yang terdapat di Kabupaten Gresik diantaranya 19 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 32 puskesmas, 66 poliklinik, dan 95 polindes. Dimana Rumah Sakit Ibnu Sina milik pemerintah Kabupaten Gresik telah menjadi rumah sakit rujukan nasional.



Gambar 5. 10 Indeks Pembangunan Gender

Selain akses terhadap sarana Kesehatan, perlu adanya pencegahan penyakit kronis, pola hidup sehat. Dimana peran ibu sangat diperlukan untuk menjaga Kesehatan keluarga. Penting untuk diingat bahwa hubungan antara kesehatan keluarga dan pembangunan gender dapat sangat bervariasi berdasarkan budaya, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lainnya. Namun, dengan memperhatikan berbagai aspek dan bekerja menuju kesetaraan gender yang lebih besar, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

E. E2. Terbatasnya Akses UMKM pada Sarana Prasarana Pendukung Aktivitas Ekonomi

Berdasarkan data UMKM Kabupaten Gresik tahun 2021 diketahui jumlah UMKM sebesar 7.331 unit yang tersebar di Kabupaten Gresik. Terdapat berbagai jenis usaha seperti olahan makanan, pakaian, aksesoris, olahan minuman, furniture, alat music, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Yang mendominasi adalah olahan makanan dan minuman.



Gambar 5. 11 Jumlah Koperasi Aktif tahun 2018-2022
Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2022

Tabel 5. 13 Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Tahun 2022

Lapangan Usaha	Nominal (Juta Rp)
Pertanian, kehutanan & Perikanan	373.398
Pertambangan dan penggalian	280.011
Industri pengolahan	38.997.547
Pengadaan listrik dan gas	1.532.601
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	26.526
Konstruksi	3.314.221
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	6.453.733
transportasi dan pergudangan	1.149.276
Penyediaan akomodasi dan makan minum	522.311
Indformasi dan komunikasi	24.223
Jasa keuangan dan asuransi	419.103
Real estate	135.656
Jasa perusahaan	318.180
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.801
jasa pedidikan	63.472
jasa kesehatan dan kegiatan lainnya	97.019
jasa lainnya	518.525

Sumber: Kabupaten Gresik Angka, 2023

Tabel 5. 14 Pinjaman Modal Kerja yang Diberikan Bank Umum Tahun 2022

Bulan	Pinjaman Rupiah
Januari	26.277.695
Februari	26.483.108
Maret	27.508.892
April	29.498.986
Mei	29.348.292
Juni	32.922.450
Juli	32.776.196
Agustus	34.143.678

Bulan	Pinjaman Rupiah
September	34.640.156
Oktober	34.520.302
November	32.831.236
Desember	34.147.132

Sumber: Kabupaten Gresik Angka, 2023

Akses keuangan adalah kemampuan UMKM untuk mendapatkan dana dan layanan keuangan yang mereka butuhkan untuk memulai, mengembangkan, dan menjalankan bisnis mereka. Hubungan ini memiliki beberapa aspek penting:

1. **Pendanaan Awal**: Banyak UMKM memerlukan modal awal untuk memulai operasi mereka. Akses keuangan dapat membantu mereka mendapatkan dana dalam bentuk pinjaman atau modal ventura untuk membeli inventaris, peralatan, atau tempat usaha.
2. **Pengembangan Bisnis**: Ketika UMKM tumbuh, mereka mungkin membutuhkan dana tambahan untuk memperluas operasi mereka. Ini bisa termasuk memperluas fasilitas, mengembangkan produk atau layanan baru, atau memperluas jaringan distribusi. Akses keuangan yang baik akan memungkinkan mereka untuk melakukan ini.
3. **Ketahanan Finansial**: Akses keuangan juga membantu UMKM untuk mengatasi tantangan finansial yang tak terduga, seperti biaya perbaikan mendesak, penurunan penjualan, atau perubahan dalam kebutuhan modal kerja. Dengan akses keuangan yang memadai, UMKM dapat menjaga stabilitas finansial mereka.
4. **Inovasi dan Perkembangan Teknologi**: UMKM yang memiliki akses keuangan yang baik dapat berinvestasi dalam teknologi dan inovasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka di pasar.
5. **Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan**: Akses keuangan dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan bisnis.
6. **Kreativitas dan Pengembangan Produk Baru**: UMKM yang memiliki akses keuangan yang cukup mungkin lebih cenderung untuk mencoba hal-hal baru, menciptakan produk atau layanan baru, dan mengembangkan ide-ide kreatif.

Akses keuangan untuk UMKM dapat diberikan melalui berbagai cara, termasuk bank komersial, lembaga keuangan mikro, koperasi, investor swasta, atau bahkan program

pemerintah. Penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung akses keuangan bagi UMKM, karena UMKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan kontributor signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.



BAB V ANALISIS CAPAIAN TPB PADA ORGANISASI

5.1 IDENTIFIKASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau entitas yang mempunyai kepentingan, mempengaruhi, atau memiliki keterkaitan dengan proyek, organisasi, atau isu tertentu. Mereka mungkin bersifat internal atau eksternal terhadap entitas yang terlibat dan kepentingan mereka mungkin bersifat finansial, sosial, politik atau lingkungan. Pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan membimbing suatu proyek atau organisasi. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, serta mempertimbangkan kepentingan dan perspektif mereka, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut merupakan kontribusi mitra pembangunan yang berada di Kabupaten Gresik yang ikut berperan dalam pembangunan dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan Kabupaten Gresik.

Tabel 5. 15 Kontribusi Mitra Pembangunan

Nama Pihak	Bentuk Peran	Keterkaitan TPB
Kepolisian Resort Gresik	Kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	Tujuan 16
ASOBSI	Kegiatan pengelolaan persampahan	Tujuan 12

Nama Pihak	Bentuk Peran	Keterkaitan TPB
LSM	Kegiatan penyelamatan lingkungan	Tujuan 6, 11, 12, 13, dan 15
Ecoton Gresik	Kegiatan mengajak masyarakat peduli lingkungan	Tujuan 6, 11, 12, 13, dan 15
PKK Kabupaten Gresik	Kegiatan pengkaderan perempuan dalam mendukung program pemerintah	Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5
Yayasan Pendidikan	Kegiatan penyediaan layanan pendidikan	Tujuan 4
Komunitas Anak Gresik	Kegiatan penyediaan perlindungan anak	Tujuan 5
Lembaga Perlindungan Anak Gresik	Kegiatan penyediaan perlindungan anak	Tujuan 5
PT Telekomunikasi Indonesia Area Gresik	Kegiatan penyediaan layanan telekomunikasi	Tujuan 5, 9, dan 17
Provider di Kabupaten Gresik	Kegiatan penyediaan layanan telekomunikasi	Tujuan 5, 9, dan 17
PT PLN	Kegiatan penyediaan infrastruktur dasar kelistrikan	Tujuan 1
Perumda Giri Tirta	Kegiatan penyediaan infrastruktur dasar air bersih	Tujuan 6, 11, 12, 13, dan 15
Koperasi	Kegiatan penyediaan akses pendanaan UMKM	Tujuan 17
Perum Bulog	Kegiatan penyadiaan bahan pangan pokok	Tujuan 2
BPJS Kesehatan Cabang Gresik	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang di Daftarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik	Tujuan 3
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan	Tujuan 3
Perhutani (KPH)	Kegiatan pengelolaan kawasan hitan	Tujuan 15
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gresik (RS, RS Bersalin, dll)	Kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat	Tujuan 3
BMKG	Kegiatan terkait kebencanaan dari mulai mitigasi hingga pasca bencana	Tujuan 13
BPS	Kegiatan penyediaan data statistik	Tujuan 8, 16, dan 17
KPU Gresik	Kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum	Tujuan 5 dan 16
Perusahaan di Kabupaten Gresik (PT. Petrokimia, PT. Semen Indonesia, dll)	Kegiatan CSR meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan	Tujuan 1-17
Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Pengelolaan DAS Brantas	Tujuan 6

Nama Pihak	Bentuk Peran	Keterkaitan TPB
Akademisi (seperti Universitas Internasional Semen Indonesia, Universitas Muhammadiyah Gresik, dll)	Bekerjasama dalam proses pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas SDM	Tujuan 4, 11, 12, 13, dan 15
PATTIRO Gresik	Kegiatan mendorong terpenuhinya hak-hak dasar warga masyarakat secara adil dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan alokasi anggaran pemerintah	Tujuan 10, 16, dan 17

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dalam pembangunan dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan Kabupaten Gresik, terdapat perusahaan-perusahaan yang ikut berperan dalam pencapaian tersebut. Berikut merupakan tabel *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik.

Tabel 5. 16 Kontribusi Perusahaan Mitra Pembangunan

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha/Investasi	Keterkaitan TPB
1	PT. Keramik Diamond Industries	Ubin Keramik	Tujuan 8 dan 9
2	PT. Bank Jatim Cabang Gresik	Perbankan	Tujuan 1, 3, 8, 10, dan 16
3	PT. Pertamina Hulu Energi WMO	Minyak dan Gas Bumi	Tujuan 7, 8, dan 12
4	PT. Kia Keramik Mas	Keramik	Tujuan 8 dan 9
5	PT. Petro Kimia Gresik	Pupuk	Tujuan 6, 8, 9, 10, 12, dan 13
6	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	Industri Semen	Tujuan 8, 9, 11, dan 13
7	PT. Leewon Industrial	Pelaksanaan konstruksi	Tujuan 8, 9, dan 11
8	Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN Saka)	Minyak dan Gas Bumi	Tujuan 7, 8, dan 12
9	PT. Indonesia Marina Shipyard	Perkapalan	Tujuan 8, 9, 11, dan 14
10	PT. Gloster Furniture	Furniture	Tujuan 8, 9, dan 15
11	PT. Pertamina Lubricant Production Unit Gresik	Minyak dan Gas Bumi	Tujuan 7, 8, dan 12
12	PC Ketapang II Ltd	Minyak dan Gas Bumi	Tujuan 7, 8, dan 12
13	PT. Adiprima Suraprinta	Produksi Kertas	Tujuan 8, 9, dan 15
14	PT. Suryatama Mega Cemerlang	Industri Tas	Tujuan 8 dan 9
15	PT. Pertamina EP Asset 4 Poleng Field	Minyak dan Gas Bumi	Tujuan 7, 8, dan 12
16	PT. Malingo Feedmill, Tbk	Industrik Pakan Ternak dan Peternakan Anak Ayam	Tujuan 2, 3, 8, 9, 12, dan 15
17	PT. Pertamina (Persero) Marketing Regional Jatimbalinusa	Minyak dan Gas Bumi	Tujuan 7, 8, dan 12
18	PT. Bumi Lingga Pertiwi	Real Estate	Tujuan 1, 3, dan 11
19	PT. Liku Telaga	Manufaktur Bahan Bahan Kimia Dasar	Tujuan 6, 8, 13, 14, dan 15

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha/Investasi	Keterkaitan TPB
20	PT. Nipsea Paint and Chemicals	Industri Cat	Tujuan 8 dan 9
21	PT. Etex Building Performance Indonesia	Industri Papan Fibersemen	Tujuan 8 dan 9
22	PT. Weltes Energi Nusantara	Teknik Industri	Tujuan 8, 9, dan 11
23	PT. Cargill Manyar	Industri Pangan	Tujuan 2, 3, 8, 9, 12, dan 15
24	PT. Smelting Manyar	Pengolahan dan Pemurnian Konsentrat	Tujuan 6, 8, 13, 14, dan 15
25	PT. Pelindo III Cabang Gresik	Jasa Logistik dan Kepelabuhan	Tujuan 8, 9, dan 12
26	PT. Warnatama Cemerlang	Industri Cat	Tujuan 8 dan 9
27	PT. Solvay Manyar	Manufaktur Kimia	Tujuan 6, 8, 13, 14, dan 15
28	PT. Adyabuana Persada	Produksi Keramik	Tujuan 8 dan 9

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR BERDASARKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

Selaras dengan TPB, sumber daya alam hutan dan lingkungan yang berkeunggulan komparatif dan kompetitif harus dikelola secara berkeadilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan ekonomi wilayah. Dalam mencapai tujuan bersama tersebut, maka kedaulatan negara dan peradaban sosial masyarakatnya harus terjamin seiring dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau yang menekankan produktivitas tinggi, efisiensi dan rendah emisi.

Sejalan dengan tujuan agenda global tesebut, filosofi lintas generasi yang terkandung dalam pasal 33 UUD 45, yaitu "bumi, air dan kekayaan alam yang menjadi dasar pembangunan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" hanya akan tercapai apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berikut merupakan table keterkaitan antara tujuan pembangunan berkelanjutan dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Gresik:

Tabel 5. 17 Persandingan D3TLH dengan TPB

Jenis D3TLH	Ketersediaan	Kebutuhan	%	Keterangan
Daya dukung pangan	1.179,22	733,28	62,18	Surplus

Jenis D3TLH	Ketersediaan	Kebutuhan	%	Keterangan
Daya dukung ketersediaan air	424.981.000	236.918.580	55,75	Belum Terlampaui

Berdasarkan tabel maka diketahui daya dukung pangan dan air termasuk kedalam kategori surplus. Daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Gresik mayoritas didominasi belum terlampaui namun terdapat 3 kecamatan yang terlampaui yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Driyorejo, dimana mayoritas kegiatan industry berada dikecamatan tersebut.

Kabupaten Gresik dapat mencapai swasembada pangan dengan tetap mempertahankan produktivitas dan lahan pertanian yang ada. Terdapat 9 dari 18 kecamatan merupakan defisit pangan namun 9 kecamatan lainnya surplus pangan. Ketersediaan pangan terbesar berada di Kecamatan Bunga, nilai rasio dengan kebutuhan pangan sebesar 10,28, dengan besarnya potensi pertanian di Kecamatan Bunga dapat menjadi lumbung padi Kabupaten Gresik.

Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara masing masing TPB dengan elemen jasa layanan ekosistem dan D3TLH. Selain itu juga menunjukkan beberapa TPB mempunyai jumlah keterkaitan yang lebih tinggi terhadap masing masing elemen jasa ekosistem. Masing masing TPB tersebut tentunya mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi untuk diselesaikan di Kabupaten Gresik.

Tabel 5.1 Persandingan Jasa Ekosistem dengan TPB

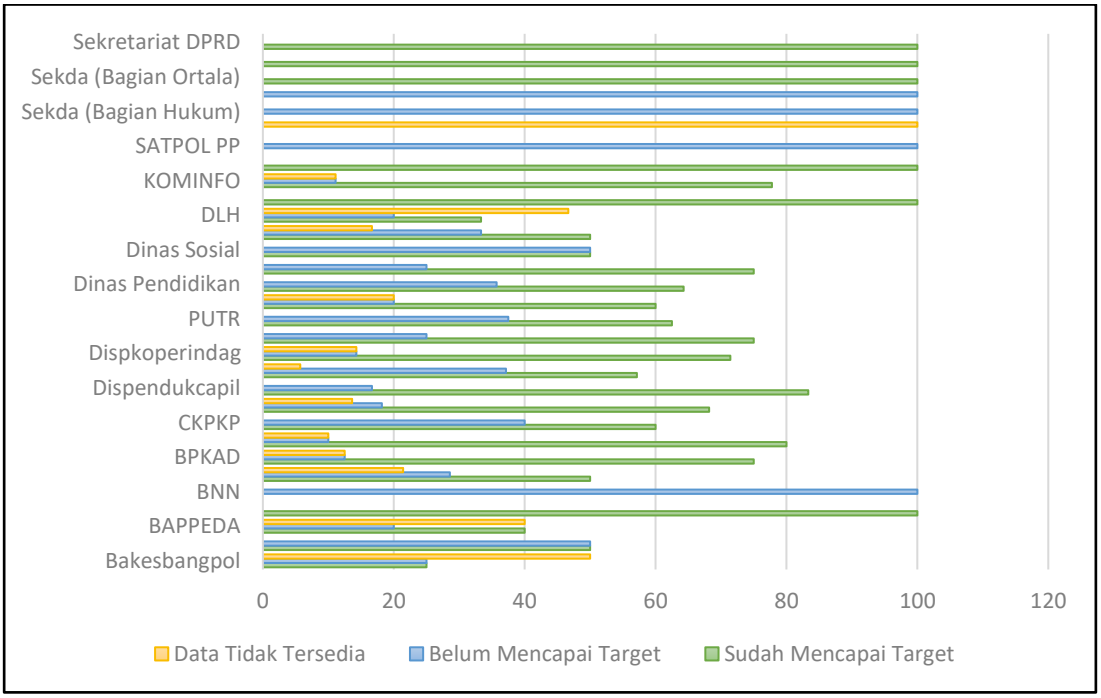
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jasa Ekosistem	
		Fungsi	Tujuan Ke-
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Penyediaan	01, 02, 03, 04, 05
		Budaya	06, 07, 08
		Pendukung	-
		Pengaturan	13, 14, 15, 18, 20
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Penyediaan	01, 03, 04, 05
		Budaya	-
		Pendukung	09, 10,11, 12
		Pengaturan	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Penyediaan	02, 05
		Budaya	06
		Pendukung	12
		Pengaturan	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
4		Penyediaan	-
		Budaya	06

TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jasa Ekosistem	
		Fungsi	Tujuan Ke-
	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Pendukung	-
		Pengaturan	-
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Penyediaan	-
		Budaya	06, 07, 08
		Pendukung	-
		Pengaturan	-
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Penyediaan	01, 02, 03, 04
		Budaya	06
		Pendukung	11
		Pengaturan	13, 14, 15, 16, 17, 20
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Penyediaan	02; 04
		Budaya	-
		Pendukung	09
		Pengaturan	14
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penyediaan	-
		Budaya	06, 07, 08
		Pendukung	-
		Pengaturan	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	Penyediaan	01, 02, 03, 04, 05
		Budaya	06, 07, 08
		Pendukung	09, 10, 11, 12
		Pengaturan	13
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	Tidak ada kaitan	
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Penyediaan	01, 02, 03, 04, 05
		Budaya	06, 07, 08
		Pendukung	10, 12
		Pengaturan	13, 14, 15,
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Penyediaan	01, 02, 03, 04, 05
		Budaya	06, 07, 08
		Pendukung	09, 10, 11, 12
		Pengaturan	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Penyediaan	-
		Budaya	-
		Pendukung	-
		Pengaturan	-
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Penyediaan	05
		Budaya	07, 08
		Pendukung	-
		Pengaturan	13, 15, 17, 18
15	Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan	Penyediaan	01, 02, 03, 04, 05
		Budaya	06, 07, 08
		Pendukung	09, 10, 11, 12
		Pengaturan	13, 14, 15, 17, 18

TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jasa Ekosistem	
		Fungsi	Tujuan Ke-
	penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati		
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untukpembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Tidak ada kaitan	
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevetalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Tidak ada kaitan	

5.3 CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

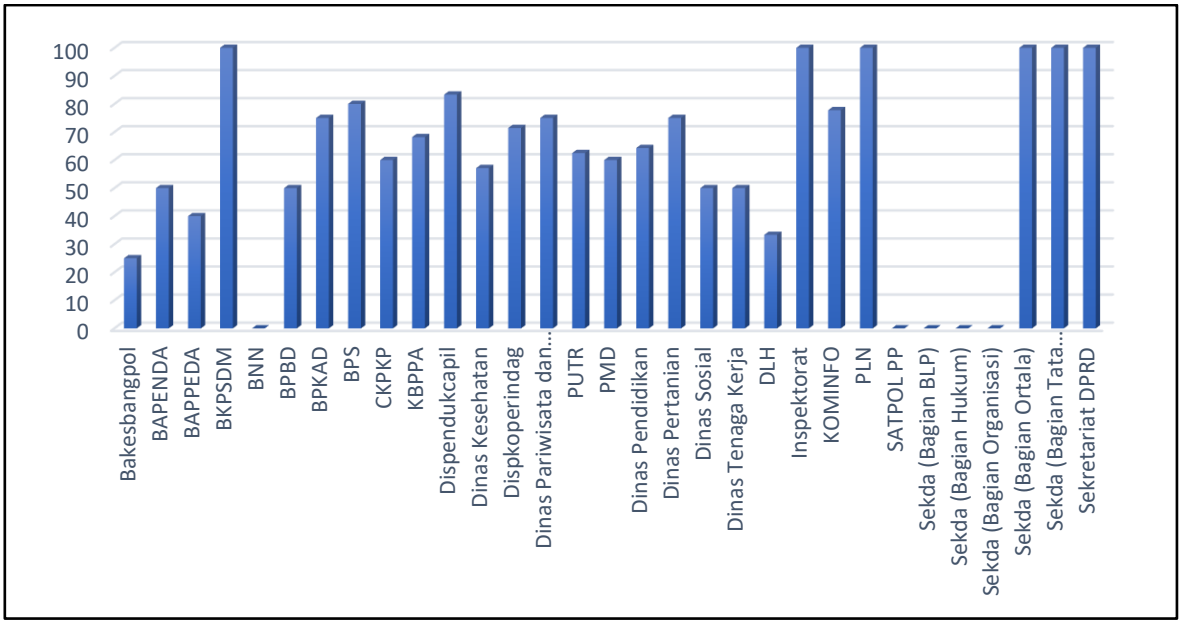
Terdapat 31 Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi indikator indikator TPB. Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Bakesbangpol, BAPENDA, BAPPEDA, BKPSDM, BNN, BPBD, BPKAD, BPS, CKPKP, KBPPA, Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Diskoperindag, Disparekrafbudpora, PUTR, PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DLH, Inspektorat, KOMINFO, PLN, SATPOL PP, Sekda Bagian BLP, Sekda Bagian Hukum, Sekda Bagian Organisasi, Sekda Bagian Ortala, Sekda Bagian Tata Pemerintahan, dan Sekretariat DPRD. Berikut merupakan capaian indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah.



Gambar 4. 40 Persentase Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah
Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.3.1 Indikator yang Sudah Mencapai Target

Terdapat 31 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gresik. Namun belum semua Organisasi Perangkat Daerah memiliki indikator yang sudah mencapai target. Persentase capaian indikator yang sudah mencapai target berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah. Indikator TPB yang berada dibawah BNN, SATPOL PP, Sekretariat Daerah bagian BLP, hukum, dan organisasi belum mencapai target. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah dengan persentase indikator yang sudah mencapai seluruh target (100%) adalah BKPSDM, Inspektorat, PLN, Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan), dan Sekretariat DPRD.



Gambar 4. 41 Persentase Capaian Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan OPD
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 16 Indikator yang Sudah Mencapai Target Berdasarkan OPD

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
1	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	BAPENDA
3	10.1.1*	Koefisien Gini.	BAPPEDA
4	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	
5	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM
6	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD
7	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
8	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	
9	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	
10	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	
11	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	
12	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	
13	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD
14	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	
15	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	
16	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	
17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	
18	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	
19	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS
20	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	
21	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	
22	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	
23	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	
24	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	
25	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	
26	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	
27	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	
29	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
30	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
32	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	
33	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	
34	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
35	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
36	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
37	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
38	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	
39	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	
40	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	
41	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	
42	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
43	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	
44	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	
45	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
46	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	
47	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
48	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	
49	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	
50	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan
51	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	
52	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	
53	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	
54	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	
55	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	
56	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	
57	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	
58	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	
59	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	
60	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	
61	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	
62	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	
63	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	
64	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	
65	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	
66	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	
67	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	
68	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	
69	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	
70	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
71	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
72	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	
73	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	
74	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	
75	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
76	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	
77	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	
78	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
79	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	
80	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	
81	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	
82	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	
83	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
84	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	
85	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	
86	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan
87	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	
88	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	
89	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	
90	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	
91	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	
92	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	
93	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	
94	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	

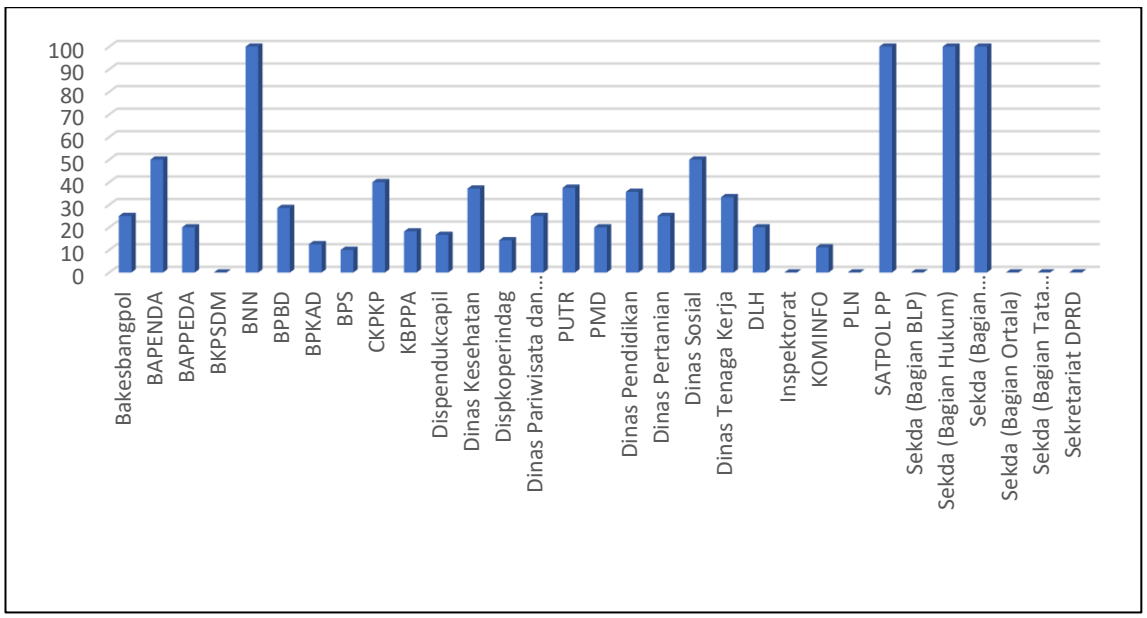
NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
95	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pertanian
96	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	
97	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	
98	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial
99	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja
100	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	
101	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	
102	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	
103	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	
104	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH
105	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	
106	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	
107	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	
108	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	
109	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	INSPEKTORAT
110	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	KOMINFO
111	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	
112	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	
113	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	
114	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	
115	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	
116	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	
117	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	PLN
118	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah (Bagian Ortala)

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
119	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	
120	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
121	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	
122	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Sekretariat DPRD
123	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	
124	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.3.2 Indikator yang Belum Mencapai Target

Terdapat 64 indikator dari 25 Organisasi Perangkat Daerah yang belum mencapai target. Berdasarkan hasil analisa, Organisasi Perangkat Daerah dengan persentase indikator yang belum tercapai tertinggi adalah BNN, SATPOL PP, dan Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Organisasi). Berikut merupakan grafik persentasi capaian indikator yang sudah mencapai target berdasarkan OPD.



Gambar 4. 42 Persentase Capaian Indikator yang Belum Mencapai Target Berdasarkan OPD

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 17 Indikator yang Belum Mencapai Target

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
1	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	BAPENDA
3	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	
4	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN
5	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD
6	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
7	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	
8	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
9	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BPKAD
10	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS
11	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	
13	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	
15	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	
16	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	
17	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
18	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan
19	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	
20	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	
21	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	
22	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	
23	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	

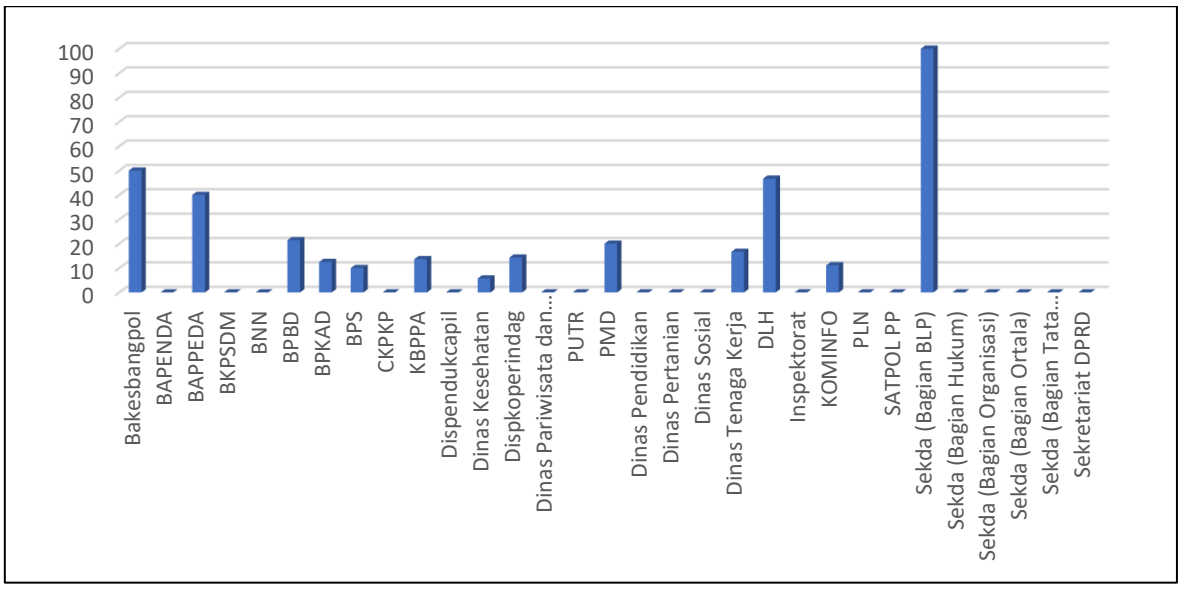
NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
24	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	
25	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	
26	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	
27	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	
28	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	
29	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	
30	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	
31	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
32	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
33	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
34	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	
35	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	
36	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
37	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan
38	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	
39	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	
40	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	
41	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	
42	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Pertanian
43	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial
44	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja
45	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
46	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	
47	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH
48	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	
49	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	
50	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	KOMINFO
51	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	SATPOL PP
52	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
53	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	
54	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	
55	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.3.3 Indikator yang Data Tidak Tersedia

Beberapa capaian indikator TPB berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah tidak dapat mencapai 100% karena beberapa faktor. Salah satunya adalah tidak adanya data yang mendukung capaian TPB. Bakesbangpol, BAPPEDA, BPBD, BPKAD, BPS, KBPPA, Dinas Kesehatan, Diskoperindag, PMD, Dinas Tenaga Kerja, DLH, KOMINFO, dan Sekretariat Daerah (Bagian BLP) adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki indikator dengan data yang tidak tersedia. Berikut merupakan grafik persentase capaian indikator yang tidak memiliki data berdasarkan OPD.



Gambar 4. 43 Persentase Capaian Indikator yang Data Tidak Tersedia Berdasarkan OPD
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 18 Indikator Data Tidak Tersedia

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	
3	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	BAPPEDA
4	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	
5	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD
6	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	
7	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	
8	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD
9	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS
10	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	
12	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	
13	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan
14	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	
15	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag

NO.	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	OPD
16	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja
18	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
19	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH
20	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	
21	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	
22	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	
23	7.3.1*	Intensitas energi primer.	
24	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	
25	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	
26	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	KOMINFO
27	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah (Bagian BLP)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.4 TARGET DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TPB PADA PERANGKAT DAERAH

Identifikasi capaian masing-masing indikator dalam TPB dilakukan dengan cara analisis target dan indikator capaian TPB pada perangkat daerah. Capaian TPB yang akan dikaji berjumlah 208 indikator yang termasuk ke dalam 16 tujuan dan 4 pilar yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Berikut merupakan tabel target dan indikator pencapaian TPB pada perangkat daerah Kabupaten Gresik.

Tabel 5. 18 Target dan Indikator Pencapaian TPB Pada Perangkat Daerah

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
1	1.2.1*	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	6-7%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	12.40	12.42	11.06	BPS
1	1.a.2*	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	18,76	21,84	24,28	BPKAD
1	1.4.1.(k)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 100%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		100%	100%	PLN
1	1.4.1.(g)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Meningkat menjadi 94,78%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	96,67 %	95.70 %	94,81%	Dinas Pendidikan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1	1.4.1.(h)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Meningkat menjadi 82,2%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	74.77 %	74.43 %	63,49%	Dinas Pendidikan
1	1.4.1.(a)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Meningkat menjadi 70%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	92,01	92,701	93,392	Dinas Kesehatan
1	1.4.1.(b)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Meningkat menjadi 63%.	90%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	113,65	117,82	121,99	Dinas Kesehatan
1	1.4.1.(d)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan	Meningkat menjadi 100%	100% layak dan 15% aman	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	74,94	59,19	90.70	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.							
1	1.4.1.(e)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	90% layak termasuk 15 % aman	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	90.70	86,61	90.71	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	1.3.1.(d)	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Menurun menjadi 2,8 juta	a. 10 b. 15,6 c. 31,4 d. 31,4	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	386127	388831	183774	Dinas Sosial
1	1.5.1.(b)	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Meningkat menjadi 151 ribu		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BPBD
1	1.5.1.(c)	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Meningkat menjadi 81,5 ribu		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BPBD

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
1	1.3.1.(c)	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Meningkat menjadi 17,12%	0,41	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,06%	0,39%	0,35%	Dinas Sosial
1	1.3.1.(b)	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	a. >30% b. >30%	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 99,5				Dinas Tenaga Kerja
1	1.4.1.(j)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Meningkat menjadi 77,4%.		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	96,16	91,5	98,21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
1	1.4.1.(c)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%	63,40%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	76,53	78,42		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	1.3.1.(a)	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Meningkat menjadi 95%	98%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		98.65	99.65	Dinas Kesehatan
1	1.5.1*	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,00002	0,00001	0	BPBD
1	1.5.1.(d)	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkat menjadi 450		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		1	3	BPBD

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
1	1.5.1.(e)	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Menurun menjadi 118,6		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	99.29	115.30	117.31	BPBD
1	1.5.2.(a)	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	0,1	0,11	0,59	0,47	0,49	BPBD
1	1.5.3*	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		1	1	BPBD
1	1.a.1*	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	100	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	94,32 %	90,42 %	84,27%	BPKAD
2	2.2.2*	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	7%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,17	0,13	0,09	Dinas Kesehatan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2	2.1.1.(a)	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Menurun menjadi 17%	7%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	3,6	3,6		Dinas Kesehatan
2	2.1.2*	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	4	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			3 desa	Dinas Pertanian
2	2.2.2.(c)	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/ tahun	95,2	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		83,7		Dinas Pertanian
2	2.1.1*	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	5	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	3,6 (dinkes)	3,6 (dinkes)		Dinas Pertanian

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
2	2.1.2.(a)	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Menurun menjadi 8,5 %	4	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	12	12	11	Dinas Pertanian
2	2.2.1*	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		stunting di bawah 5 persen	11,04	10,9		Dinas Kesehatan
2	2.2.1.(a)	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Menurun menjadi 28%	14%	stunting di bawah 5 persen	11,04	10,9		Dinas Kesehatan
2	2.2.2.(a)	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Menurun menjadi 28%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		41.5		Dinas Kesehatan
2	2.2.2.(b)	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi	Meningkat menjadi 50%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Kesehatan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		50% pada tahun (2013: 38%).							
2	2.3.1*	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	59,9	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	**1E+07**	1E+07		BPS
3	3.2.2.(a)	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Menurun menjadi 24	16%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	2.7	3.82	3.22	Dinas Kesehatan
3	3.c.1*	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	4,78259	3,2535	3,293	Dinas Kesehatan
3	3.1.2*	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Meningkat menjadi 95%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	92,01	92,701	93,392	Dinas Kesehatan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
3	3.1.2.(a)	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85 %		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	3.2.2.(b)	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Meningkat menjadi 95%	90%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Kesehatan
3	3.3.2.(a)	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Menurun menjadi 245	190	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	104	134	213	Dinas Kesehatan
3	3.3.3*	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	405	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,003	0,001	0,0039	Dinas Kesehatan
3	3.2.1*	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	16%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	2,7 2,66 (dinkes)	3,22 3,47 (dinkes)	2,084	Dinas Kesehatan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
3	3.3.1.(a)	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Menurun menjadi <0,5%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,06	0,08	0,15	Dinas Kesehatan
3	3.2.2*	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	2,51%	3,62%		Dinas Kesehatan
3	3.1.1*	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Menurun menjadi 306	0,18	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	83,32	315,76	94.18	Dinas Kesehatan
3	3.7.1.(a)	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%	63,4	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	76,53	78,42		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	3.7.2*	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019	Menurun menjadi 38	18%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	2,03	1,89		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				menjadi 38 (2012-2013: 48).							
3	3.7.1.(b)	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Meningkat menjadi 23,5%	63,4	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	11,48	10,08	9,55	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	3.7.2.(a)	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Menurun menjadi 2,28	63,4	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	7,9			Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	3.3.5*	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,5	0,5	0,3667	Dinas Kesehatan
3	3.4.1.(a)	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Menurun menjadi 5,4%	8,7	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		17,15		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	3.4.1.(b)	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Menurun menjadi 24,3%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	27.20	36.65	35.6	Dinas Kesehatan
3	3.4.1.(c)	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas	Menurun	21,8	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	285,21 %	######	######	Dinas Kesehatan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.		pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).							
3	3.4.2*	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	100	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	1	1	1	Dinas Kesehatan
3	3.5.1.(e)	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	Menurun menjadi angka 0,02%	1,69	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	97,70 %	97,23 %	96,76%	BNN
3	3.5.2*	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0.23	0.22	0.18	Dinas Kesehatan
3	3.7.1*	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Meningkat menjadi 66%	63,4	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	11,48	10,08	9,55	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	3.8.1.(a)	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Menurun menjadi 9,91%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	11.57		19.69	Dinas Kesehatan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
3	3.8.2*	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		98.65	99.65	Dinas Kesehatan
3	3.8.2.(a)	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Meningkat menjadi minimal 95%	98%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	100%	100%	97%	Dinas Kesehatan
3	3.9.3.(a)	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	Proporsi kematian akibat keracunan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0	0		Dinas Kesehatan
3	3.a.1*	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	8,70%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		17,15		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	3.b.1.(a)	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	100%	100%	97%	Dinas Kesehatan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
4	4.1.1.(g)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Meningkat menjadi 8,8 tahun	13,89	rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun	9.30	9.56	9.75	Dinas Pendidikan
4	4.6.1.(b)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	99,48			Dinas Pendidikan
4	4.6.1.(a)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Meningkat menjadi 96,1%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	99,48			Dinas Pendidikan
4	4.1.1.(d)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Meningkat menjadi 114,09%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	107,41	109,05	104,26	Dinas Pendidikan
4	4.1.1.(e)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Meningkat menjadi 106,94%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	90,51	88,84	90,18	Dinas Pendidikan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4	4.2.2.(a)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Meningkat menjadi 77,2%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	65.72	85,89	62.83	Dinas Pendidikan
4	4.5.1*	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	(a) 96,67 % ; (b) 74,77 ; (c) N/A ; (d) N/A	(a) 95,70 % ; (b) 74,43 ; (c) N/A ; (d) N/A		Dinas Pendidikan
4	4.4.1*	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	44,1284	56,3972		Dinas Tenaga Kerja

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4	4.1.1*	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	a. 396 b. 388 c. 402	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Pendidikan
4	4.1.1.(a)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	Meningkat menjadi 84,2%	a. 34,1 b. 30,9 c. 44,0	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			98,33	Dinas Pendidikan
4	4.1.1.(b)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Meningkat menjadi 81%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			89,95	Dinas Pendidikan
4	4.a.1*	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air,	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			100%	Dinas Pendidikan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
			sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).								
4	4.c.1*	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		96.13		Dinas Pendidikan
5	5.b.1*	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	78,89 %	78,35 %	79,80%	KOMINFO
5	5.5.1*	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	3. 9 Orang Perempuan 4. 50 Orang	3. 9 Orang Perempuan 4. 50 Orang	3. 9 Orang Perempuan 4. 50 Orang	Sekretariat DPRD
5	5.2.1*	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,01163	0,01819		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.2.2.(a)	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Meningkat menjadi 70%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
5	5.3.1.(b)	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Menurun menjadi 38 tahun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	2,03	1,89		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.3.1*	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,024 %	0,024 %	0,016%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	5.6.1.(a)	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Menurun menjadi 9,9%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	11,48	10,08	9,55	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.3.1.(a)	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	Meningkat menjadi 21 tahun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		143 pernikahan usia dini	229 pernikahan usia dini	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.1.1*	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah	bertambah sebanyak 16	91,39 74,18	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	4	4	4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				sebanyak 16 (2015: 19).							
5	5.2.1.(a)	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	19	23,7	17,8	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.2.2*	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	6			Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.5.2*	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	3. 0 Orang Perempuan 4. 4 Orang	3. 2 Orang Perempuan 4. 4 Orang	3. 2 Orang Perempuan 4. 4 Orang	Sekretariat DPRD
5	5.6.1*	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	73,86	76,53	78,42	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	5.6.1.(b)	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman	Meningkat menjadi 85%		(tidak ada dalam	11,48	10,08	9,55	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	metode kontrasepsi modern.	Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).			lampiran RPJPN 2025)				Perempuan dan Perlindungan Anak
6	6.1.1.(a)	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	100 layak dan 15% aman	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	66,27	68,83	63,334	Dinas Kesehatan
6	6.1.1.(c)	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	100 layak dan 15% aman	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	66,27 %	68.83 %	73,74%	Dinas Kesehatan
6	6.2.1.(b)	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	90 layak termasuk 15 aman	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	96.9	91.56		Dinas Kesehatan
6	6.3.2.(a)	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air danau.	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15	Meningkat	55,5	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	63.33	48.75		Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				danau, 5 wilayah sungai.							
6	6.3.2.(b)	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Meningkat	55,5	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				DLH
6	6.1.1.(b)	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	6.2.1.(a)	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	45,55	66,67	87,79	Dinas Kesehatan
6	6.2.1.(c)	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Kesehatan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		(STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).							
6	6.2.1.(d)	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	100	100	111,4	Dinas Kesehatan
6	6.2.1.(f)	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	6.3.1.(b)	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	6,5 juta	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0.42%	0.39%	0.31%	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	6.4.1.(b)	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	Ada	Ada	Ada	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).							
6	6.5.1.(a)	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	105%	105%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	6.5.1.(c)	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	8 WS		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				DLH
6	6.5.1.(f)	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	10 WS (skala nasional)		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				DLH
6	6.5.1.(g)	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	Ada	Ada	Ada	DLH

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.							
7	7.2.1*	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	10-16%	17,4	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				DLH
7	7.3.1*	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	133,8 SBM/miliar	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				DLH
8	8.1.1*	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	3,7-4,5	PDB Nominal USD 9,8 Triliun	-3.68%	3.79%	7.38%	BPS

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
8	8.5.2*	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	3,6-4,3%	4				Dinas Tenaga Kerja
8	8.2.1*	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Meningkat	3,7-4,5	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	-3.68%	3.79%	7.38%	BPS
8	8.1.1.(a)	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	########	2E+06	3E+06	BPKAD
8	8.9.1*	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Meningkat menjadi 8%		Rasio PDB Pariwisata 8(%)	1,33	1,35		BAPENDA
8	8.9.1.(a)	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,004	0,0004	0,013	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8	8.9.1.(b)	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	350-400	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	2	2	4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
8	8.9.1.(c)	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	1785411	1959412		BAPENDA
8	8.3.1*	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	53,4481	48,3323		Dinas Tenaga Kerja
8	8.3.1.(a)	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	51%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	65,64 %	66,52 %	69,43%	Dinas Tenaga Kerja
8	8.3.1.(b)	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	10,78	15,7323		Dinas Tenaga Kerja
8	8.3.1.(c)	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	25%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		86,3574		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
8	8.5.1*	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	16			Dinas Tenaga Kerja
8	8.5.2.(a)	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	27,98	30,03	32,08	Dinas Tenaga Kerja
8	8.6.1*	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	12,44	13,93	15,41	Dinas Tenaga Kerja
8	8.9.2*	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	1	1	1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8	8.10.1*	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	57,5	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BAPPEDA
8	8.10.1. (a)	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Menurun (mendekat)		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			2 km	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
8	8.10.1. (b)	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan	Meningkat	30,8	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			11.11% (1jt), 1.09% (3jt),	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.						0.89% (4jt)	
9	9.2.1*	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	18,9	kontribusi PDB industri manufaktur sebesar 28 persen	49,59	50,03	49,44	BAPPEDA
9	9.2.1.(a)	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB		kontribusi PDB industri manufaktur sebesar 28 persen	-1,31%	4,42%	8,74%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
9	9.c.1.(a)	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	78,89 %	78,35 %	79,80%	KOMINFO
9	9.c.1*	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	100,00 %	100	100	KOMINFO
9	9.c.1.(b)	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	78,89 %	78,35 %	79,80%	KOMINFO

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
9	9.1.1.(b)	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	1000 Km (skala nasional)	2.500 km	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	20,7	20,7		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	9.1.1.(c)	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Panjang jalur kereta api.	Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	Bertambah 3.258 km	7.451 km	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	13,5	13,5		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	9.2.2*	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		25,2 persen.	46,55	49,28	50,20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
9	9.3.1*	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	20	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
9	9.3.2*	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	5	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	1411 usaha yg meminjam			Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag
9	9.5.1*	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	0,42	(tidak ada dalam				BAPPEDA

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.					lampiran RPJPN 2025)				
10	10.1.1*	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Menurun menjadi 0,36		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,3	0,31	0,36	BAPPEDA
10	10.1.1. (a)	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	6-7%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	12,40 %	12,42 %	11,78%	BAPPEDA
10	10.1.1. (f)	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	Menurun menjadi 14%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	12,40 %	12,42 %	11,78%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	10.4.1. (b)	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	98	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 99,6				Dinas Tenaga Kerja

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).							
10	10.1.1. (b)	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	80 Kabupaten (skala nasional)	Desa	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	10.1.1. (c)	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Jumlah desa tertinggal.	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	10.1.1. (d)	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	47			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	10.1.1. (e)	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	10.2.1*	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	108,5	88,5	68,5	BPKAD
10	10.3.1. (a)	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87	Meningkat menjadi 87		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	80,51	88,11		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		pada tahun 2019 (2015: 80,3).							
10	10.3.1. (d)	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0	0	0	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
11	11.6.1. (a)	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Meningkat menjadi 80%	80%penanganan dan 20% pengurangan	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	70,00 %	78%	86%	DLH
11	11.1.1. (a)	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	3,7 juta rumah tangga	70%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	97.99	96.9		Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	11.5.1*	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	102	102	102	BPBD
11	11.1.1. (b)	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	77,735	71,546	65,357	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.							
11	11.3.2. (b)	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	73,7	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	73,37	73,727	74,084	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	11.4.1. (a)	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	16	16	16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
11	11.5.1. (a)	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Menurun menjadi 30%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	99.29	115.30	117.31	BPBD
11	11.5.1. (c)	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	100%	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BPBD

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11	11.5.2. (a)	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	0,1% PDB	0,11	0,59	0,47	0,49	BPBD
11	11.b.2*	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		1	1	BPBD
12	12.4.2. (a)	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	539,8c	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	1828,78			DLH
12	12.5.1. (a)	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu	20 ton per hari (skala nasional)		90 (35% terdaur ulang)			30% dari timbulan sampah	DLH

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.		(reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).							
12	12.6.1. (a)	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				DLH
12	12.7.1. (a)	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0	0	0	DLH
12	12.8.1. (a)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				DLH
13	13.1.1*	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)		1	1	BPBD

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				nasional dan daerah hingga tahun 2019.							
13	13.1.2*	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	102	102	102	BPBD
15	15.3.1. (a)	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	5,5 juta ha (skala nasional)		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	3 Lokasi (Taman Alon-Alon, Taman Median JL Dr. Wahidin, Taman Median JL R.A Kartini			DLH
15	15.1.1. (a)	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Meningkat	65 juta ha	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			6%	DLH
15	15.6.1*	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0	0	0	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
15	15.9.1. (a)	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	1	1	1	DLH
16	16.7.1. (b)	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	6	7	7	BKPSDM
16	16.7.1. (a)	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	3. 9 Orang Perempuan 4. 50 Orang	3. 9 Orang Perempuan 4. 50 Orang	3. 9 Orang Perempuan 4. 50 Orang	Sekretariat DPRD
16	16.2.1. (a)	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	16.2.1. (b)	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan	Menurun		(tidak ada dalam	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.		terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).			lampiran RPJPN 2025)				Perempuan dan Perlindungan Anak
16	16.9.1*	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			30% dari timbulan sampah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16	16.9.1. (b)	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85%	100	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	90,5989	92,7514	98,907	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16	16.9.1. (a)	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 77,4%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	96,16	91,5	98,21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16	16.1.1. (a)	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	35	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	16.1.2. (a)	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	100	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	16.1.3. (a)	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang menjadi korban	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam		170 kasus	230 kasus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
			kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.				lampiran RPJPN 2025)				
16	16.1.4*	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Meningkat		80	33%	39%	22%	SATPOL PP
16	16.2.3. (a)	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,00457	0,01476		Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	16.5.1. (a)	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	Meningkat menjadi 4,0	4,14	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	87,18	92,64	98,1	INSPEKTORAT
16	16.6.1*	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BPKAD

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
16	16.6.1. (b)	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	a. 100 b. 100 c. 80	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	81,11	80,86		Sekretariat Daerah (Bagian Ortala)
16	16.6.1. (c)	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Menjadi menjadi 80%	a. 85 b. 85 c. 70	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				Sekretariat Daerah (Bagian BLP)
16	16.6.1. (d)	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA,	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0,20833	0,2128	100%	Sekretariat Daerah (Bagian Ortala)

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				Kabupaten/Kota: NA).							
16	16.6.2. (a)	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten /Kota: 80%	164 per 623	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			57.65	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
16	16.10. 2.(c)	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				KOMINFO
16	16.b.1. (a)	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	0	0	0	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
17	17.1.1*	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang,	Total pendapatan pemerintah sebagai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PM	(tidak ada dalam	21,892 6	21,693 2	20,54	BPKAD

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.				lampiran RPJPN 2025)				
17	17.6.2. (b)	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	100,00 %	100	100	KOMINFO
17	17.6.2. (c)	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			98,8	KOMINFO
17	17.8.1*	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	78,89 %	78,35 %	79,80%	KOMINFO

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17	17.1.1. (a)	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Di atas 12%		18,0-22,0	20,07	23,04	23,28	BPKAD
17	17.1.2*	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	22,3069	25,037	25,982	BPKAD
17	17.8.1. (a)	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	100%		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			98,8	KOMINFO
17	17.17.1.(a)	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	146	167	109	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
				Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).							
17	17.17.1.(b)	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	ada		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	Ada	Ada	Ada	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
17	17.18.1.(a)	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BPS
17	17.18.1.(b)	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BPS

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
17	17.18.1.(c)	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BPS
17	17.18.1.(d)	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)			100	BPS
17	17.19.2.(b)	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	100	(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	Kelahiran 327630 jiwa, Kematian 7601 jiwa	Kelahiran 342286 jiwa, Kematian 13105 jiwa	Kelahiran 326699 jiwa, Kematian 21256 jiwa	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17	17.19.2.(c)	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)	24247	27758	28747	BPS

NO. TUJUAN	NO. INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (RPJMN 2020-2024	Target RPJPN 2025-2045	2020	2021	2022	OPD
		pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17	17.19.2.(d)	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		(tidak ada dalam lampiran RPJPN 2025)				BPS

5.5 ANALISIS KEUANGAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR TPB

Sub bab ini memuat penjelasan mengenai ketercapaian keungan daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan indikator TPB. Dalam hal ini, anggaran yang dilihatt untuk mencapai indikator TPB adalah penggunaan anggaran pada belanja langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan dikaitkan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang berperan penting dalam pencapaian SDGs. Tabel ini merupakan rekapitulasi dari total anggaran yang digunakan untuk melaksanakan semua TPB yang ada di Kabupaten Gresik.

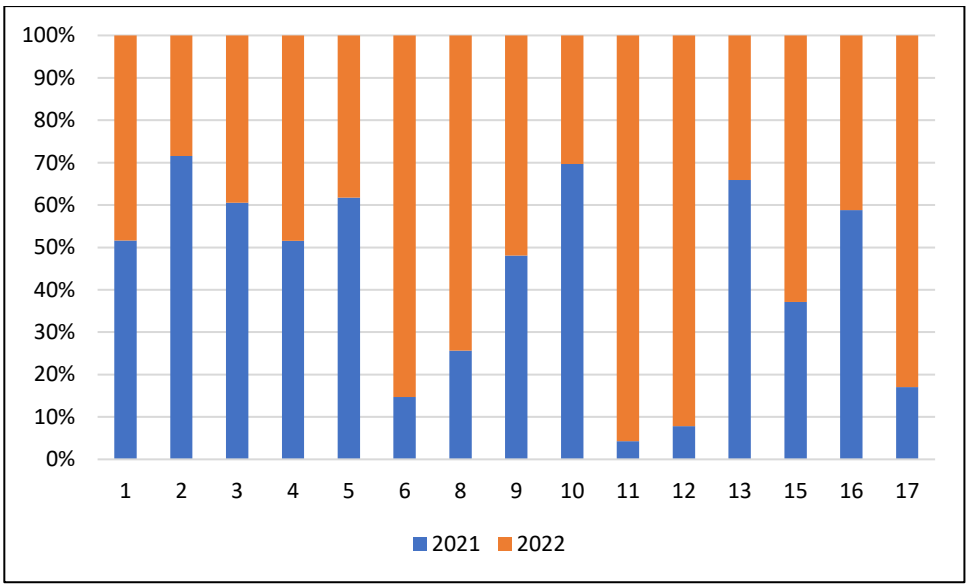
Tabel 4. 19 Pemetaan Anggaran

TPB	Target Anggaran	% Anggaran 2021	Realisasi Anggaran	% Realisasi 2021	% gap rencana x realisasi	Target Anggaran
a	b	c	d	e	f	g
1	Rp361.978.306.308,00	48,14	Rp231.134.357.145	48,05	-36,15	Rp453.320.669.841,00
2	Rp253.635.915	0,03	Rp250.748.075	0,05	-1,14	201.972.825,00
3	Rp19.485.375.360	2,59	Rp12.102.927.081	2,52	-37,89	Rp17.504.172.060
4	Rp354.223.471.313	58,75	Rp225.745.763.297	46,93	-48,90	Rp441.789.548.971
5	Rp6.708.359.120	0,89	Rp4.245.820.927	0,88	-36,71	Rp5.834.724.020
6	Rp5.619.346.051,00	0,75	Rp4.361.938.494	0,91	-22,38	Rp73.896.890.900
7	Rp0	0,00	Rp0	0,00	0	Rp0
8	Rp215.978.000	0,03	Rp204.412.164	0,04	-5,36	Rp1.638.593.845
9	Rp705.594.696	0,09	Rp700.801.839	0,15	-0,68	Rp1.954.255.000
10	Rp502.975.000	0,07	Rp492.071.870	0,10	-2,17	Rp502.975.000
11	Rp361.646.300	0,05	Rp350.402.000	0,07	-3,11	Rp16.443.543.360
12	Rp688.119.312	0,09	Rp490.921.500	0,10	-28,66	Rp12.138.510.435
13	Rp149.999.866,00	0,02	Rp139.762.366,00	0,03	-6,83	Rp149.999.866,00
15	Rp300.629.144	0,04	Rp272.859.224	0,06	-9,24	Rp943.600.000
16	Rp653.243.350	0,09	Rp420.974.735	0,09	-35,56	Rp714.612.302
17	Rp148.143.122	0,02	Rp138.716.160	0,03	-6,36	Rp1.404.037.660
Total	Rp751.994.822.857		Rp481.052.476.877			Rp1.028.438.106.085,00

Tabel Lanjutan...

TPB	Target Anggaran	% Anggaran 2022	Realisasi Anggaran	% realisasi 2022	% gap rencanaxrealisasi	realisasi 2021-2023
a	g	h	i	j	k	
1	Rp453.320.669.841,00	44,08	Rp433.275.179.900	45,01	-4,42	Turun
2	201.972.825,00	0,02	199.130.825	0,02	-1,41	Turun
3	Rp17.504.172.060	1,70	Rp15.769.411.645	1,64	-9,91	Turun
4	Rp441.789.548.971	42,96	Rp424.325.585.852	44,08	-3,95	Turun

TPB	Target Anggaran	% Anggaran 2022	Realisasi Anggaran	% realisasi 2022	% gap rencanaxrealisasi	realisasi 2021-2023
a	g	h	i	j	k	
5	Rp5.834.724.020	0,57	Rp5.256.470.548	0,55	-9,91	Turun
6	Rp73.896.890.900	7,19	Rp50.554.124.469	5,25	-31,59	Naik
7	Rp0	0,00	Rp0	0,00	0	-
8	Rp1.638.593.845	0,16	Rp1.187.693.700	0,12	-27,52	Naik
9	Rp1.954.255.000	0,19	Rp1.512.564.690	0,16	-22,60	Naik
10	Rp502.975.000	0,05	Rp429.071.870	0,04	-14,69	Turun
11	Rp16.443.543.360	1,60	Rp15.569.692.234	1,62	-5,31	Naik
12	Rp12.138.510.435	1,18	Rp11.577.601.625	1,20	-4,62	Naik
13	Rp149.999.866,00	0,01	Rp144.621.000,00	0,02	-3,59	Naik
15	Rp943.600.000	0,09	Rp925.675.307	0,10	-1,90	Naik
16	Rp714.612.302	0,07	Rp589.788.070	0,06	-17,47	Turun
17	Rp1.404.037.660	0,14	Rp1.347.759.978	0,14	-4,01	Naik
Total	Rp1.028.438.106.085,00		Rp962.664.371.713			



Gambar 4. 44 Persentase Realisasi Anggaran
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan anggaran tahun 2021 dan tahun 2023, Kabupaten Gresik telah mengalokasikan anggaran berturut-turut sebesar Rp481.052.476.877 dan Rp962.664.371.713. Alokasi anggaran TPB terbesar adalah untuk pelaksanaan TPB 1 yaitu Tanpa Kemiskinan dengan total anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp361.978.306.308,00 atau 48,14% dari total anggaran dan Tahun 2022 sebesar Rp433.275.179.900 atau sebesar 44,08 dari total anggaran Kabupaten Gresik, diikuti dengan anggaran pelaksanaan TPB 4 untuk pendidikan yang berkualitas dengan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar

Rp354.223.471.313 (58,75% dari total anggaran), sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp441.789.548.971 (42,96% dari total anggaran). Adapun alokasi anggaran TPB terkecil adalah untuk pelaksaan TPB 13 terkait penanganan perubahan iklim dengan realisasi anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp139.762.366,00 dan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp144.621.000,00.

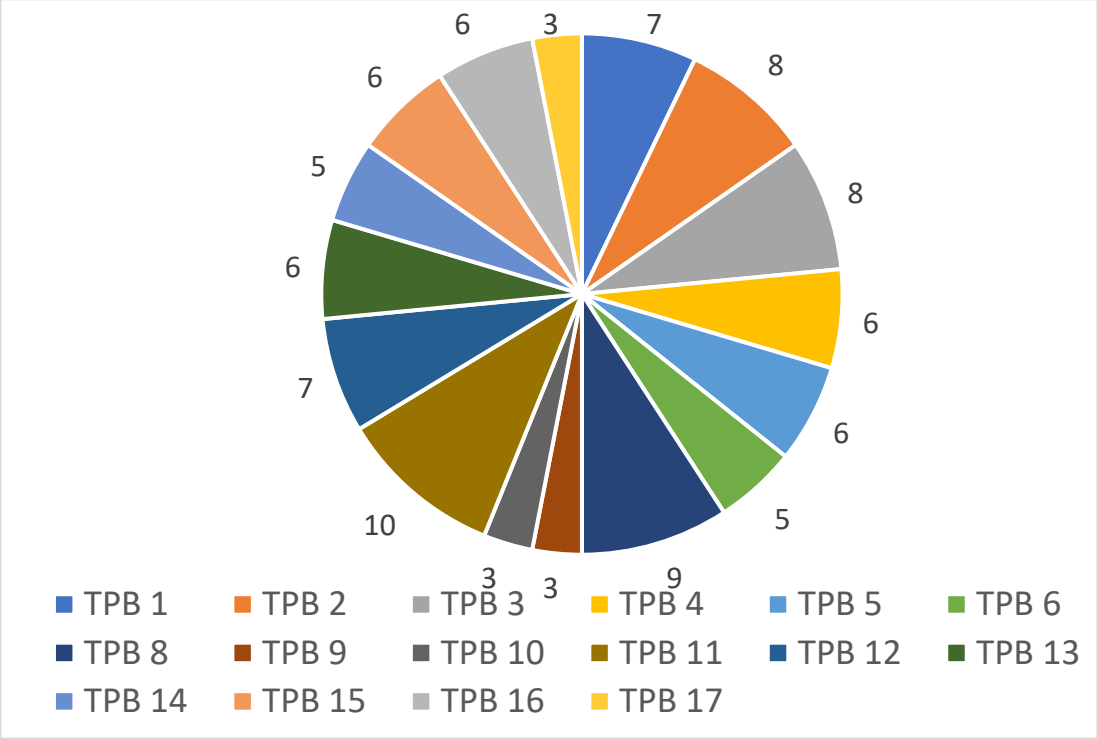
5.6 PERUMUSAN TPB PRIORITAS

Beberapa tujuan TPB dapat saling berinteraksi satu sama lain (Griggs, et al., 2017). Tujuan-tujuan tersebut didesain sebagai seperangkat prioritas global dan tujuan yang saling bergantung secara fundamental. Interaksi dapat mengarah ke dampak negatif ataupun positif, sehingga TPB prioritas dapat saling berinteraksi dengan TPB prioritas maupun dengan TPB non-prioritas.

Tabel 5. 19 Interaksi antar TPB

No	Tujuan	TPB Terkait															
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0

No	Tujuan	TPB Terkait															
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua																
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serat mendorong inovasi	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
11	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
13	Mengambil langkah & tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
14	melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangung kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
17	Menguatkan saranan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1



Gambar 5. 12 Jumlah Keterkaitan antar TPB

Berdasarkan perhitungan interaksi antar TPB didapatkan TPB dengan keterkaitan tertinggi terdapat 10 TPB dengan nilai keterkaitan tertinggi. TPB tertinggi yaitu Tujuan 1 (mengakhiri segala bentuk kemiskinan), Tujuan 3 (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia), Tujuan 5 (mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan), Tujuan 6 (menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), Tujuan 8 (meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua), Tujuan 10 (mengurangi kesenjangan intra dan antar negara), Tujuan 11 (menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan), Tujuan 12 (menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan), Tujuan 15 (melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati) dan Tujuan 16 (menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangung kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan).

Setelah melaksanakan penapisan isu pembangunan berkelanjutan strategis, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis keterkaitan isu strategis prioritas terhadap

aspek/ muatan kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, yaitu:

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan
3. Kinerja Pelayanan/Jasa Ekosistem
4. Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam
5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim
6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Selain berdasarkan 6 muatan KLHS, pertimbangan lain yang digunakan adalah kondisi sosial, demografi, ekonomi serta isu paling strategis. Keterkaitan TPB dengan komponen lain menggambarkan pengaruh dari kondisi eksisting TPB akan merubah kondisi umum, 6 muatan KLHS serta Isu paling strategis ataupun sebaliknya

Tabel 5. 20 Matriks Keterkaitan TPB dengan Kondisi Umum, 6 Muatan KLHS dan Isu PB Prioritas

Nomor TPB blm mencapai target	Indikator TPB	L1	L3	L4	S1	E2	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1	1		1		1	1	1		1	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.				1				1		1	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1	1	1			1	1		1	1	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	1	1			1	1		1	1	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.				1						1	1
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	1	1	1						1		1
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1	1	1			1	1		1	1	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.		1	1					1			
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.				1				1		1	1
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1	1	1			1	1	1		1	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	1	1	1			1	1	1		1	

Nomor TPB blm mencapai target	Indikator TPB	L1	L3	L4	S1	E2	B1	B2	B3	B4	B5	B6
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.				1						1	
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).		1	1			1		1		1	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		1	1			1		1		1	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		1	1							1	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.				1						1	
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.				1							
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.				1							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.				1							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	1	1	1					1		1	
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	1	1	1								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		1									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	1	1	1								
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		1		1							
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.				1				1		1	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.				1				1		1	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1	1		1					1	1	
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1									1	
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.				1							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1	1	1			1	1		1	1	1
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	1	1	1			1	1	1		1	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1	1	1			1	1		1	1	
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	1	1	1			1	1	1		1	1
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1	1	1			1	1	1	1	1	
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	1	1	1			1	1	1		1	
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1	1	1			1			1		1
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	1	1	1			1			1		1
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		1	1				1	1	1	1	

Nomor TPB blm mencapai target	Indikator TPB	L1	L3	L4	S1	E2	B1	B2	B3	B4	B5	B6
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.					1						
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.					1						
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.					1						
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1	1	1		1	1		1	1	1	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	1	1			1				1	1	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				1							
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	1	1	1						1	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1	1							1	1	1
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	1	1	1			1	1	1			
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	1	1	1			1	1	1	1	1	
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.					1						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1	1	1			1		1	1	1	1
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.				1							
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.				1							
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	1	1	1								
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).					1						
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					1						
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.				1							

Keterangan Tabel :
B.1 = D3TLH
B.2 = Kinerjas Jasa Ekosistem
B.3 = Efisiensi Pemanfaatan SDA
B.4 = Dampak & Risiko LH
B.5 = Kerentanan dan Adaptasi thd Perubahan Iklim
B.6 = Keanekaragaman Hayati
L1 = Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir
L3 = Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry
L4 = Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman
S1 = Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas
E2 = Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi

Tabel 5. 21 Skor dan Gap Ketercapaian TPB

Nomor TPB blm mencapai target	Indikator TPB	Skor Keterkaitan TPB	Gap Capaian	Skor Prioritas	Klasifikasi
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7	2	17	Tinggi
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	7	1	11	Sedang
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	7	1	15	Tinggi
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	7	1	15	Tinggi
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	7	1	11	Sedang
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	7	1	13	Tinggi
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	7	3	15	Tinggi
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	7	1	11	Sedang
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	7	1	12	Sedang
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7	3	15	Tinggi
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	7	3	15	Tinggi
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	5	1	8	Rendah
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	5	3	11	Sedang
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	5	1	11	Sedang
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	5	3	9	Sedang
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	5	1	8	Rendah
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	5	1	7	Rendah
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	5	1	7	Rendah
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	5	3	7	Rendah
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	5	3	11	Sedang
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	5	1	9	Sedang
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	5	1	7	Rendah
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	5	2	9	Sedang
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	5	3	8	Rendah

Nomor TPB blm mencapai target	Indikator TPB	Skor Keterkaitan TPB	Gap Capaian	Skor Prioritas	Klasifikasi
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	5	1	9	Sedang
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	5	1	9	Sedang
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	5	3	11	Sedang
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	4	3	7	Rendah
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	4	3	6	Rendah
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	9	2	18	Tinggi
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	9	3	17	Tinggi
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	9	1	17	Tinggi
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	9	3	18	Tinggi
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	9	1	18	Tinggi
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	9	3	17	Tinggi
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	6	3	13	Sedang
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	6	1	13	Sedang
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	6	3	13	Sedang
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	6	2	8	Rendah
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	6	2	8	Rendah
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	6	2	8	Rendah
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	3	3	12	Sedang
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	3	3	9	Sedang
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	3	2	5	Rendah
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	10	3	17	Tinggi
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	10	2	16	Tinggi
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	7	2	14	Tinggi
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	9	2	18	Tinggi
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	9	2	11	Sedang
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	9	2	18	Tinggi

Nomor TPB blm mencapai target	Indikator TPB	Skor Keterkaitan TPB	Gap Capaian	Skor Prioritas	Klasifikasi
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	4	1	6	Rendah
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	4	3	6	Rendah
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	4	2	8	Rendah
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	4	2	6	Rendah
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	4	2	6	Rendah
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	3	1	5	Rendah

Keterangan:
Skor keterkaitan = 1 (terkait), 0 (tidak terkait)
Kategori Indikator Prioritas = 4 – 8 (rendah), 9 – 13 (sedang), 14 – 18 (tinggi)

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan TPB prioritas sebagai berikut:

- TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
- TPB 2 : Tanpa Kelaparan
- TPB 6 : Akses Air Bersih & Sanitasi
- TPB 8 : Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi
- TPB 11 : Kota & Komunitas Berkelanjutan
- TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab
- TPB 15 : Menjaga Ekosistem Daratan



BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG DAERAH

Skenario Pembangunan berkelanjutan dirumuskan dari kondisi pencapaian TPB yang diproyeksikan dari analisis data, untuk menghasilkan kondisi dan alternatif target pencapaian TPB selama masa pencapaian TPB yang disesuaikan dalam jangka waktu masa berlakunya dokumen. Pencapaian target TPB selama periode dokumen tersebut dilaksanakan dengan menyusun beberapa rangkaian alternatif scenario seperti alternatif scenario tanpa Upaya tambahan yairtu yang disusun dengan mempertahankan TPB yang telah menyamai atau melampaui target nasional, dan alternatif scenario dengan Upaya tambahan. Untuk alternatif scenario dengan Upaya tambahan memperhatikan hal hal berikut:

1. Pencapaian target tanpa Upaya tambahan, yaitu melihat kesenjangan antara proyeksi capaian TPB tanpa Upaya tambahan dengan target TPB tahun 2030.
2. Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional, yaitu sasaran strategis yang disusun beserta targetnya harus dapat berkontribusi pada pencapaian target TPB nasional.

3. Potensi, daya saing, dan inovasi daerah. Upaya tambahan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi terkait sasaran strategis Pembangunan berkelanjutan.
4. Daya dukung dan daya tampung daerah. Upaya tambahan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Intervensi lebih untuk pemenuhan TPB disusun dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
5. Kontribusi mitra pemerintah. Upaya tambahan mempertimbangkan intervensi lebih dari mitra pemerintah dalam pencapaian target TPB
6. Pertimbangan sesuai kebutuhan daerah, artinya daerah dapat menyusun pertimbangan lain dalam penentuan bentuk Upaya tambahan.

6.1.1 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DAYA DUKUNG PANGAN

Pangan memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ahli perencana, memahami pentingnya pangan adalah kunci untuk menciptakan kebijakan dan strategi yang efektif.

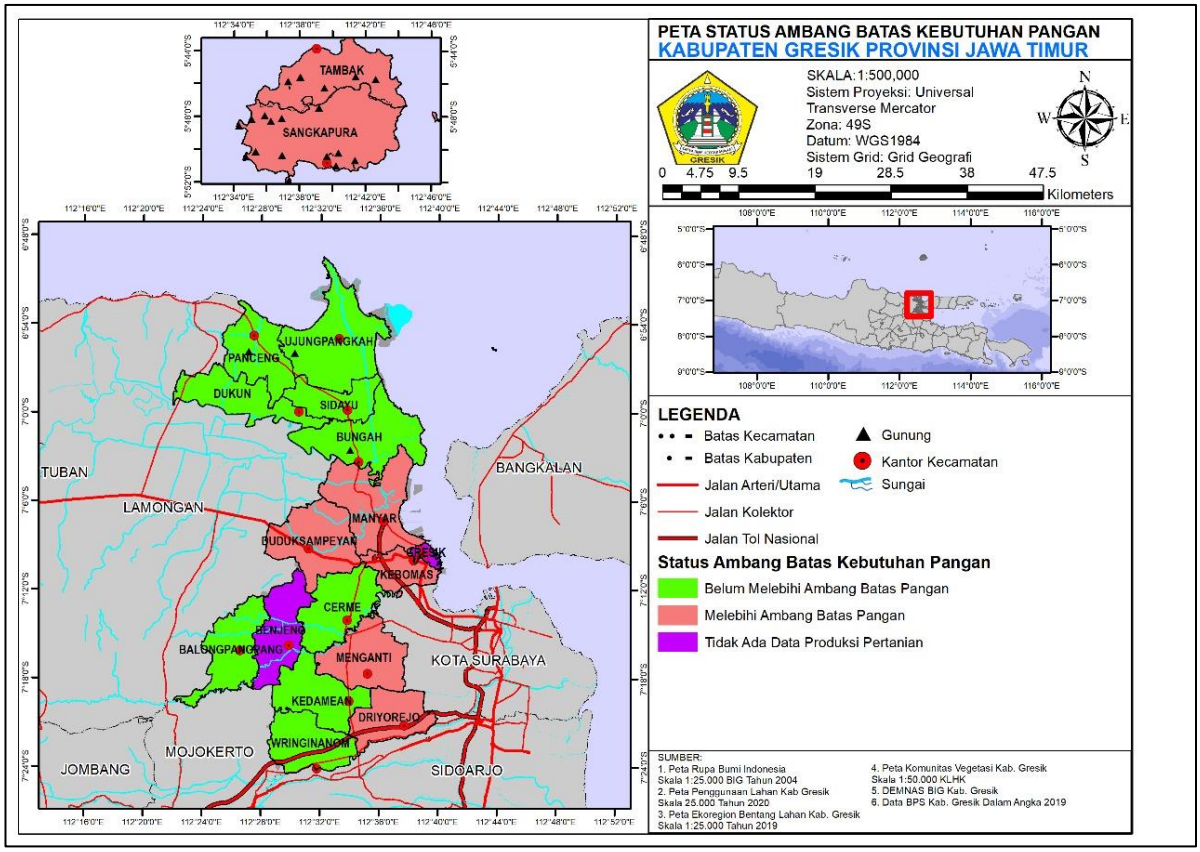
Secara umum kebutuhan bahan pangan (beras) Kabupaten Gresik tergolong sedang. Total Kebutuhan pangan Kabupaten Gresik adalah 236.918,58 ton/tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 adalah 1.298.184 jiwa dan kebutuhan pangan beras perkapita Kabupaten Gresik mencapai lebih dari 236.918,58 ton/tahun, dengan kondisi ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) yang luas. Kabupaten Gresik memiliki ketersediaan pangan beras mencapai lebih dari 424.981 ton/tahun. Berikut merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan beras di Kabupaten Gresik.

No	Kecamatan	Daya Dukung Bahan Pangan Berbasis Jasa Ekosistem Dengan Sistem Grid (30" X 30")				
		Jumlah Penduduk BPS 2019 (jiwa)	Produksi Beras BPS 2019 (kg/th)	Ketersediaan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th	Kebutuhan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th	Nilai Status Daya Dukung Pangan
1	Benjeng	66.546	-	-	12.144.645	0,00
2	Gresik	82.448	-	-	15.046.760	0,00
3	Manyar	114.893	2.184.000	2.184.000	20.967.972	0,10
4	Kebomas	109.392	4.719.000	4.719.000	19.964.040	0,24
5	Menganti	124.468	18.135.000	18.135.000	22.715.410	0,80
6	Driyorejo	102.646	15.550.000	15.550.000	18.732.895	0,83
7	Tambak	32.519	5.140.000	5.140.000	5.934.718	0,87
8	Duduksampeyan	50.497	8.312.000	8.312.000	9.215.702	0,90
9	Sangkapura	56.053	9.235.000	9.235.000	10.229.672	0,90
10	Panceng	52.599	11.013.000	11.013.000	9.599.317	1,15
11	Wringinanom	73.297	20.108.000	20.108.000	13.376.702	1,50
12	Ujungpangkah	51.890	14.402.000	14.402.000	9.469.925	1,52
13	Balongpangpang	58.015	32.826.000	32.826.000	10.587.738	3,10
14	Dukun	67.127	38.911.000	38.911.000	12.250.678	3,18
15	Kedamean	63.887	38.358.000	38.358.000	11.659.377	3,29
16	Sidayu	43.533	26.442.000	26.442.000	7.944.772	3,33
17	Cerme	80.032	51.411.000	51.411.000	14.605.840	3,52
18	Bungah	68.342	128.235.000	128.235.000	12.472.415	10,28
Kabupaten Gresik		1.298.184	424.981.000	424.981.000	236.918.580	1,79

Gambar 6. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Gresik

Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Gresik 2021

Secara rinci terdapat 19 kecamatan dengan status ketersediaan pangan terlampaui atau surplus yang artinya ketersediaan pangan mampu memenuhi kebutuhan akan pangan yang layak bagi penduduk yang ditandakan dengan warna biru. Secara umum ambang batas penduduk Kabupaten Gresik dengan kemampuan ketersediaan bahan pangan yang ada saat ini belum melampaui ambang batas. Dengan jumlah 1.298.184 jiwa dan kemampuan produksi padi setara beras 236.918,58 ton/tahun, maka ambang batas penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.030.479 jiwa.



Gambar 6. 2 Peta Status Ambang Batas Kebutuhan Pangan Kabupaten Gresik

Alih fungsi lahan dan keterbatasan daya tampung lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas tanah untuk pengembangan lahan pertanian pangan, sehingga diperlukan Skenario-skenario yang berorientasi pada pembangunan berjelanjutan. Berikut merupakan alternatif dan rekomendasi daya dukung air.

Tabel 6. 1 Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Pangan

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas	TPB 1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	• Mengintegrasikan program kesejahteraan sosial yang mencakup bantuan pangan, nutrisi, dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan • Mendorong pertanian lokal dan produksi pangan di daerah rentan dengan menyediakan dukungan teknis, permodalan, dan infrastruktur yang diperlukan
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan untuk mendukung produksi pangan yang aman dan sehat serta mengurangi risiko kerentanan pangan

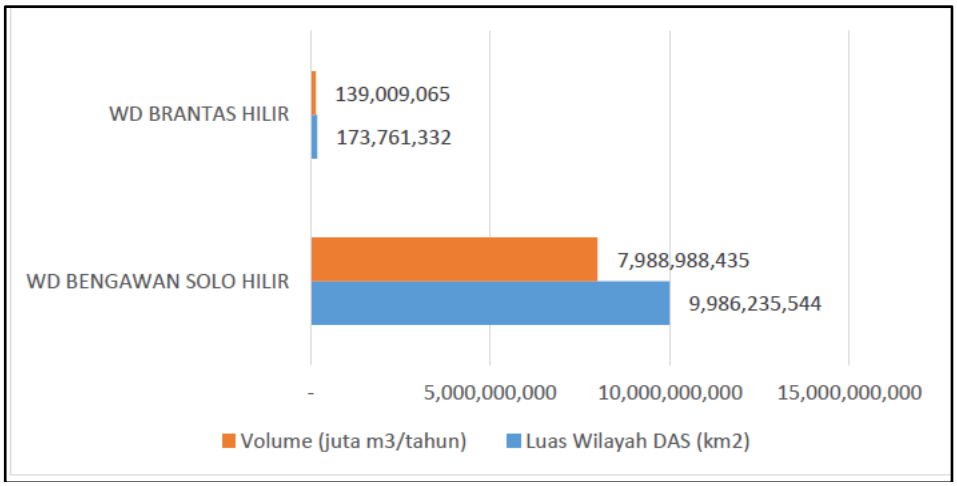
Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, sehingga mendukung produksi pangan yang aman, sehat, dan mengurangi risiko terjadinya penyakit terkait pangan
L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman		1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Meningkatkan ketahanan pangan di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi terhadap bencana dengan mengidentifikasi, memitigasi, dan mengatasi risiko bencana yang dapat mengganggu produksi, distribusi, dan akses pangan
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Meningkatkan ketahanan pangan dengan mengurangi dampak ekonomi langsung yang ditimbulkan oleh bencana alam dan bencana terkait lainnya yang dapat mengancam pasokan pangan
S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas	TPB 2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	• Mendorong praktik pemberian makanan pendamping ASI yang aman dan bergizi setelah enam bulan usia • Meningkatkan akses anak-anak pada makanan bergizi, terutama bagi keluarga yang kurang mampu
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	
L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatkan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan untuk mendukung produksi pangan yang aman dan sehat serta mengurangi risiko kerentanan pangan
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkatkan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, sehingga mendukung produksi pangan yang aman, sehat, dan mengurangi risiko terjadinya penyakit terkait pangan
		6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Mendorong praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas air danau
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan	Mengelola sumber daya air dengan bijak untuk memastikan pasokan yang cukup dan berkelanjutan, termasuk praktik konservasi air dan perlindungan ekosistem air

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
			air baku untuk pulau-pulau	
E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi	TPB 8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Memastikan bahwa pekerja informal memiliki kondisi kerja yang aman dan layak, serta hak-hak pekerja yang dihormati, seperti akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan kesehatan
L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	• Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penyediaan pangan yang tahan terhadap bencana, termasuk penyimpanan pangan yang aman dan infrastruktur irigasi yang terlindungi • Membangun cadangan pangan darurat yang memadai untuk mengatasi situasi darurat dan kekurangan pasokan akibat bencana • Memberikan dukungan dan bantuan kepada para petani dan pelaku usaha pangan yang terkena dampak bencana untuk membantu pemulihan ekonomi mereka
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi	TPB 12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	• Mendorong produsen untuk mendaftarkan produk pangan yang ramah lingkungan dan memenuhi standar tertentu untuk memperoleh sertifikasi • Memberikan insentif kepada produsen pangan untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, termasuk penggunaan teknik pertanian organik, pengurangan limbah, dan konservasi tanah dan air • Mendorong konsumsi produk pangan yang diproduksi secara lokal untuk mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan transportasi dan mendukung petani lokal
L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	• Mengembangkan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan yang mengintegrasikan pertanian, kehutanan, dan produksi pangan • Mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti agroforestri dan pola tanam yang berkelanjutan
		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	• Meningkatkan perlindungan hutan lindung dan taman nasional untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan lingkungan alami

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.1.2 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DAYA DUKUNG AIR

Kabupaten Gresik terletak dalam konstelasi 2 wilayah DAS, yaitu DAS Brantas Hilir dan DAS Bengawan Solo Hilir.. Dari data ketersediaan air tiap Wilayah DAS (WD), digunakan asumsi 80% dari ketersediaan air merupakan air merupakan jumlah air optimal yang dapat dimanfaatkan atau disebut juga sebagai ketersediaan air andalan. Dua WD yang digunakan dalam kajian ini yakni WD Brantas Hilir dan WD Bengawan Solo Hilir. Selanjutnya perhitungan ketersedian air dilakukan melalui pendekatan system grid dengan resolusi 30" x 30" (±0,9km x 0,9km) degan cara melakukan proses tumpang Susun (Overlay) antara Peta Wilayah Aliran Sungai, Peta Grid dan Peta Kinerja Jasa Lingkungan sebagai Penyedia Air.



Gambar 6. 3 Grafik Distribusi Volume Ketersediaan Air 80% (juta m3/tahun) pada Wilayah DAS di Kabupaten Gresik
Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Gresik

Wilayah DAS Brantas Hilir diperkirakan memiliki 80% volume air sebanyak 139.009.065 juta m^3/tahun dari luas Wilayah DAS Brantas Hilir sebesar 173.761.332 km2. Hal ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Wilayah DAS Bengawan Solo sebesar 7.988.988.435 juta m^3/tahun dari luas Wilayah DAS Bengawan Solo sebesar 9.986.235.544 km2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ketersediaan air Kabupaten Gresik Berasal dari Wilayah DAS Bengawan Solo. Volume Ketersediaan Air 80% (juta m^3/tahun) terbesar berada di Wilayah DAS Bengawan Solo yang terletak di Kecamatan Sangkapura sebesar 746.971.989 juta m^3/tahun, diikuti Kecamatan Ujungpangkah sebesar 745.850.297 juta m^3/tahun, serta Kecamatan Manyar sebesar 744.055.590 juta m^3/tahun. Sementara itu, Volume Ketersediaan Air 80% (juta m^3/tahun) terkecil berada di Wilayah DAS Brantas Hilir yang terletak di Kecamatan Menganti sebesar 12.636.255 juta m^3/tahun.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, secara umum Kabupaten Gresik memiliki status yang belum terlampaui atau surplus air dalam jumlah yang signifikan yaitu 15 kecamatan dan tiga kecamatan dalam status terlampaui atau defisit. Kabupaten Gresik mengalami surplus ketersediaan air bersih sebesar 445,94 juta m^3.tahun.

No	Kecamatan	Penduduk Sistem Grid 30' X 30' (jiwa)	Ketersediaan Total (juta m3/th)	Kebutuhan Total (juta m3/th)	Nilai Status Air	Status Air
1	Gresik	82.448	3,35	7,33	0,46	Terlampaui
2	Driyorejo	102.646	48,94	52,46	0,93	Terlampaui
3	Wringinanom	73.297	55,12	58,98	0,93	Terlampaui
4	Kedamean	63.887	68,44	66,24	1,03	Belum Terlampaui
5	Menganti	124.468	76,25	72,45	1,05	Belum Terlampaui
6	Balongpangpang	58.015	70,98	66,06	1,07	Belum Terlampaui
7	Benjeng	66.546	68,64	60,29	1,14	Belum Terlampaui
8	Kebomas	109.392	27,91	18,01	1,55	Belum Terlampaui
9	Panceng	52.599	71,65	43,97	1,63	Belum Terlampaui
10	Dukun	67.127	64,32	37,64	1,71	Belum Terlampaui
11	Sangkapura	56.053	101,06	54	1,87	Belum Terlampaui
12	Sidayu	43.533	43,95	22,67	1,94	Belum Terlampaui
13	Tambak	32.519	59,01	29,86	1,98	Belum Terlampaui
14	Cerme	80.032	83,95	37,79	2,22	Belum Terlampaui
15	Ujungpangkah	51.89	86,73	39	2,22	Belum Terlampaui
16	Bungah	68.342	68,82	28,82	2,39	Belum Terlampaui
17	Manyar	114.893	80,35	17,46	4,6	Belum Terlampaui
18	Duduksampeyan	50.497	99,73	20,24	4,93	Belum Terlampaui
Kab. Gresik		1.298.184	1,179,22	733,28	1,61	Belum Terlampaui

Gambar 6. 4 Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Gresik
Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Gresik

Pesatnya alih fungsi lahan ke permukiman juga menyebabkan permasalahan baru seperti jumlah penduduk yang akan meningkat dan mengurasi daerah resapan air. Hal ini dapat menyebabkan ketersediaan air bersih semakin menurun dan kebutuhan air bersih semakin meningkat. Jika tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan masalah-masalah lain seperti banjir. Skenario-skenario tersebut berorientasi pada Pembangunan berkelanjutan yang antara lain mempertimbangkan informasi daya dukung pangan, daya dukung air, dan kinerja jasa lingkungan pada suatu wilayah. Berikut adalah alternatif dan rekomendasi daya dukung air.

Tabel 6. 2 Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung *Air*

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas	TPB 1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Meningkatkan akses penduduk, terutama kelompok berpendapatan rendah, terhadap air bersih yang aman untuk konsumsi dan sanitasi dasar
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber	• Mengintegrasikan penyediaan sanitasi dasar yang aman bersama dengan layanan air

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
			air minum layak dan berkelanjutan.	minum untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	• Memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan dan perlindungan sumber daya air yang digunakan untuk pasokan air minum • Meningkatkan investasi dalam pembangunan dan perawatan infrastruktur air bersih, termasuk penyediaan sistem air minum yang dapat diandalkan
L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman		1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	• Memastikan bahwa infrastruktur air yang digunakan untuk pasokan air minum dan sanitasi di pusat-pusat pertumbuhan dirancang untuk tahan terhadap bencana, termasuk perlindungan terhadap banjir dan gempa bumi • Membangun sistem peringatan dini yang efektif dan rencana evakuasi yang dapat diandalkan untuk mengurangi risiko terhadap penduduk di pusat-pusat pertumbuhan
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas	TPB 2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Mengintegrasikan pendekatan gizi, seperti peningkatan gizi anak dan ibu hamil, dengan program air dan sanitasi untuk mencegah stunting
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	
L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	• Memastikan perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur air minum yang ada agar tetap berfungsi dengan baik • Mengidentifikasi dan mengatasi potensi kegagalan sistem air minum yang dapat mengancam akses air bersih penduduk • Memastikan bahwa air yang disediakan melalui layanan air minum adalah aman untuk konsumsi manusia sesuai
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	

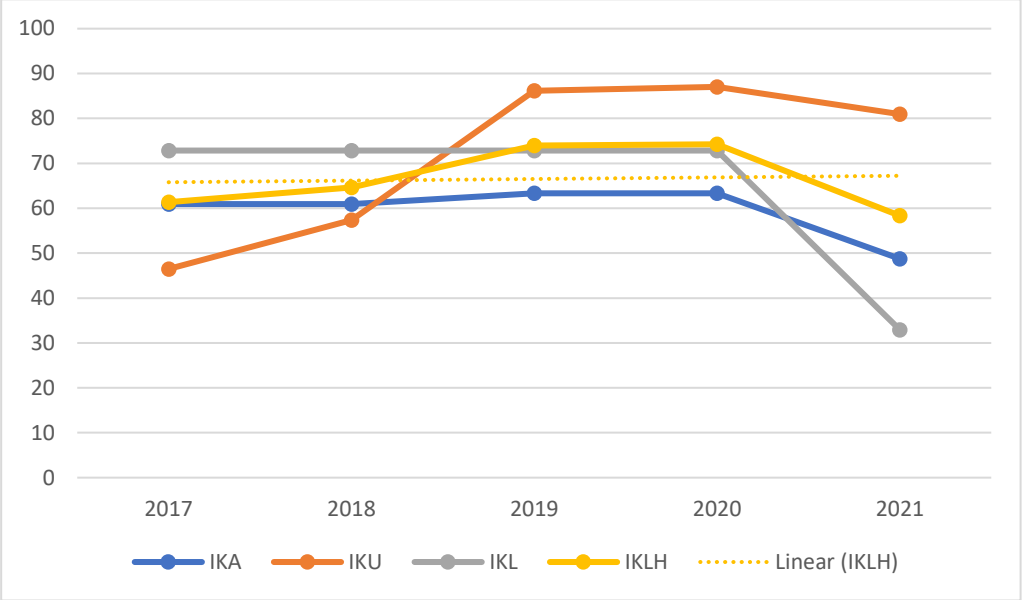
Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
				dengan standar keamanan air yang berlaku • Meningkatkan fasilitas sanitasi yang ada, termasuk pembangunan toilet yang aman dan berkelanjutan
		6.3.2.(a)	Kualitas air danau	• Memastikan bahwa ekosistem danau dan kehidupan akuatik yang ada dalam danau mendapatkan perlindungan yang cukup • Mengatur dan mengawasi aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi kualitas air danau, seperti pertanian, industri, dan penggunaan lahan • Melakukan pemantauan dan pengujian berkala terhadap kualitas air danau untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan air yang berlaku
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	• Mengoptimalkan pengelolaan sumber air yang ada dengan memanfaatkan teknologi yang lebih efisien dan praktik berkelanjutan • Mengelola limbah industri dan perkotaan dengan baik untuk meminimalkan dampak pencemaran terhadap sumber air
E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi	TPB 8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program akses air bersih
L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	• Memastikan bahwa infrastruktur air baku dirancang untuk tahan terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, dan badai • Membangun kemampuan pemulihan cepat pasca bencana untuk memastikan pasokan air segera pulih
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana	TPB 12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	• Mendorong sektor industri untuk mengembangkan

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
prasarana pendukung aktifitas ekonomi				produk-produk yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, terutama terkait dengan penggunaan air • Mendorong adopsi sistem sertifikasi dan label ramah lingkungan untuk produk-produk yang efisien dalam penggunaan air • Mendorong penggunaan sumber air terbarukan dalam proses produksi di berbagai sektor industri
L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	• Melindungi kawasan konservasi yang melibatkan ekosistem yang penting dalam siklus air • Mengidentifikasi dan mendukung proyek restorasi ekosistem untuk memulihkan lahan yang rusak secara ekologis • Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap tutupan lahan dan kualitas air • Bekerja sama dengan lembaga lingkungan dan organisasi internasional untuk mendukung upaya konservasi dan restorasi tutupan lahan • Melaksanakan kebijakan yang melarang atau mengatur penggundulan hutan yang tidak berkelanjutan
		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	

6.1.3 ALTERNATIF DAN REKOMENDASI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN (IKL)

Indeks Kualitas Lingkungan (EQI) adalah ukuran atau indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah atau negara. EQI menggabungkan berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, polusi dan faktor lainnya ke dalam satu angka atau indeks. Tujuan utama WQI adalah untuk memberikan wawasan mengenai sejauh mana standar atau tujuan lingkungan regional tertentu telah dipenuhi dalam kaitannya dengan kesehatan manusia

dan kelestarian lingkungan. Berikut merupakan grafik indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Gresik.



Gambar 6. 5 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
Sumber: Dokumen IKPLHD Kabupaten Gresik

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Kualitas Air cenderung naik hingga tahun 2020 dan turun pada tahun 2021. Hal yang sama juga berlaku pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Rata-rata dari keseluruhan ketiga indeks tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan garis berwarna kuning. Berdasarkan trendline Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dapat diketahui bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Gresik mengalami peningkatan. Adapun alternatif dan rekomendasi Indek Kualitas Lingkungan (IKL) adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 3 Alternatif dan Rekomendasi Indeks Kualitas Lingkungan

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas	TPB 1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	• Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang menghasilkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan • Memastikan akses penduduk miskin ke sumber daya lingkungan yang berkelanjutan, seperti air bersih dan lahan pertanian
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber	• Mendorong praktik konservasi air dan rehabilitasi daerah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan sumber air

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
			air minum layak dan berkelanjutan.	• Mengidentifikasi sumber air berkelanjutan yang dapat digunakan dalam jangka panjang, seperti mata air dan sumber air baku yang tidak tercemar.
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Mengatur dan mengelola limbah manusia dengan baik untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan
L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman		1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	• Membangun dan memperkuat infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti tanggul, sistem peringatan dini, dan evakuasi yang aman • Mempertahankan dan mendukung konservasi ekosistem yang berperan dalam mitigasi risiko bencana, seperti hutan, sungai, dan lahan basah • Mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang mendukung mitigasi risiko bencana, termasuk penggunaan lahan yang aman
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	
S1. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas	TPB 2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	• Meningkatkan kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang baik, untuk mengurangi risiko penyakit menular • Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan pedesaan untuk mendukung kebersihan lingkungan dan sanitasi yang lebih baik
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	
L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	• Mendorong praktik konservasi air dan rehabilitasi daerah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan sumber air • Mengidentifikasi sumber air berkelanjutan yang dapat digunakan dalam jangka panjang, seperti mata air dan sumber air baku yang tidak tercemar.
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses	Mengatur dan mengelola limbah manusia dengan baik untuk

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
			terhadap layanan sanitasi layak	mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan
		6.3.2.(a)	Kualitas air danau	• Melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air danau untuk memahami perubahan dan ancaman terhadap ekosistem danau • Mempertahankan dan mengembangkan daerah tangkapan air yang berkontribusi pada pasokan air danau • Mendukung program restorasi danau yang mungkin rusak akibat pencemaran atau kerusakan ekosistem
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	• Mengatur pengelolaan sumber air baku dengan baik, termasuk perlindungan terhadap pencemaran dan penggunaan yang berlebihan • Mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan air baku, termasuk penggunaan sumber air terbarukan
E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi	TPB 8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	• Memastikan pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab di tempat kerja, termasuk daur ulang bahan dan pemusnahan yang tepat • Mempromosikan praktik konservasi sumber daya, seperti penghematan energi dan air
L3. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	• Membangun dan memperkuat infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti tanggul, sistem peringatan dini, dan evakuasi yang aman • Mempertahankan dan mendukung konservasi ekosistem yang berperan dalam mitigasi risiko bencana, seperti hutan, sungai, dan lahan basah • Mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	

Isu Lingkungan Hidup	No. TPB	No. Indikator	Indikator Dengan Upaya Tambahan (DUT)	Arahan Kebijakan
				mendukung mitigasi risiko bencana, termasuk penggunaan lahan yang aman
E2. Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi	TPB 12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	• Mendorong penggunaan bahan baku dan produksi yang ramah lingkungan serta daur ulang material produk • Mendorong penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan • Mengurangi emisi dan polusi yang dihasilkan selama proses produksi produk • Mengontrol penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk dan menggantinya dengan alternatif yang lebih aman
L4. Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman	TPB 15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	• Mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan, termasuk pertanian berkelanjutan dan tata guna lahan yang bijaksana • Mempromosikan praktik konservasi lahan, seperti pemeliharaan hutan, pelestarian tanah, dan perlindungan lahan pertanian • Mendukung program pemulihan lahan yang terdegradasi atau terkikis, seperti reboisasi dan rehabilitasi lahan basah
		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	• Mendukung program rehabilitasi ekosistem yang rusak atau terdegradasi sebagai bagian dari rencana pemanfaatan • Mengatur pengelolaan spesies keanekaragaman hayati yang terancam punah dan mengurangi perburuan liar yang merusak • Memastikan bahwa rencana tersebut mempertahankan dan melindungi habitat penting bagi spesies langka dan ekosistem yang rentan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.2 ALTERNATIF DAN SEKENARIO DAN REKOMENDASI PADA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) DENGAN UPAYA TAMBAHAN

Berdasarkan hasil analisa TPB prioritas yang mempertimbangkan aspek berikut :

1. Kondisi Demografi, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Gresik
2. Isu strategis pembangunan berkelanjutan antara lain Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir, Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industri, Penurunan Daya Tampung badan Air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman, Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas dan Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi
3. Kondisi 6 muatan KLHS
4. Gap capiaan TPB
5. Keterkaitan antar TPB

Maka dapat diidentifikasi TPB prioritas yang harus diselesaian dalam rencana jangka Panjang pembangunan daerah Kabupaten Gresik antara lain :



Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan (*No proverty*)
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun



Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan (*Zero hunger*)
Menghilangkan kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan



Tujuan 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and sanitation*)
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan Untuk Semua



Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent work and economic growth*)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua



Tujuan 11 – Kota dan Komunitas Berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*)
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan



Tujuan 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab (*Responsible consumption and production*)
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan



Tujuan 15 – Ekosistem Daratan (*Life on land*)
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Berikut ini adalah perumusan alternatif skenario dan rekomendasi bagi TPB Prioritas di Kabupaten Gresik.

6.2.1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun)

Terdapat 5 indikator belum mencapai target yang terdapat di TPB 1 yaitu

- 1.2.1* "Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur",
- 1.4.1.(d) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan"
- 1.4.1.(e) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan"
- 1.5.1.(e) "Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi" dan
- 1.5.2.(a) "Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana"

Perumusan skenario indikator belum mencapai target TPB 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 4 Tabel Perumusan Rekomendasi TPB Priotitas 1

TPB Prioritas Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Target Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Nomor Indikator - 1.2.1* "Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur",

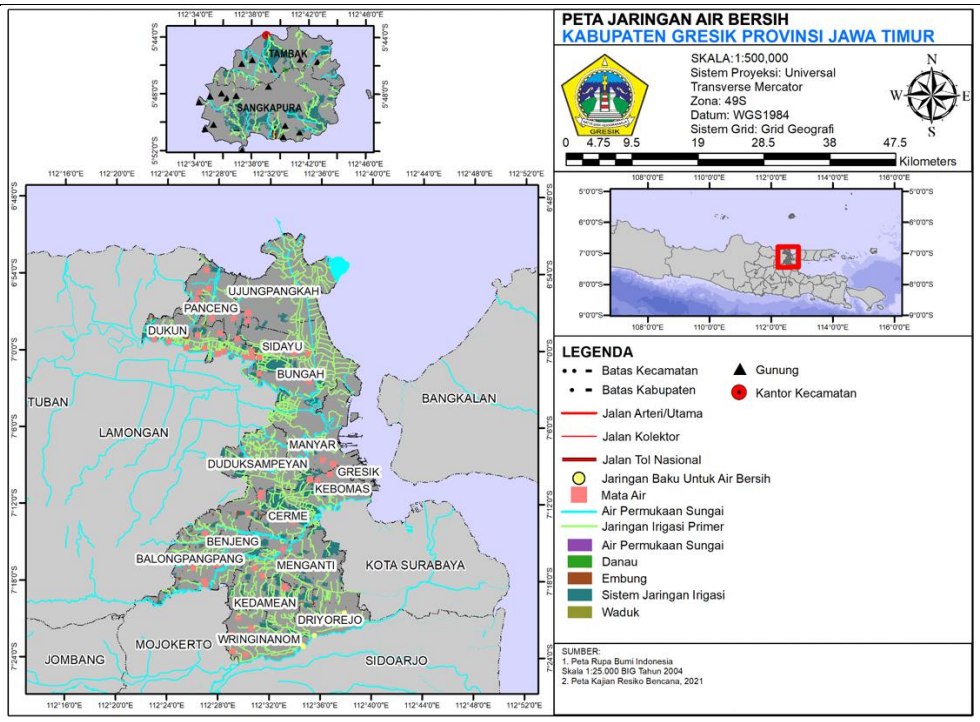
- 1.4.1.(d) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan"
- 1.4.1.(e) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan"
- 1.5.1.(e) "Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi" dan
- 1.5.2.(a) "Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana"

Kondisi



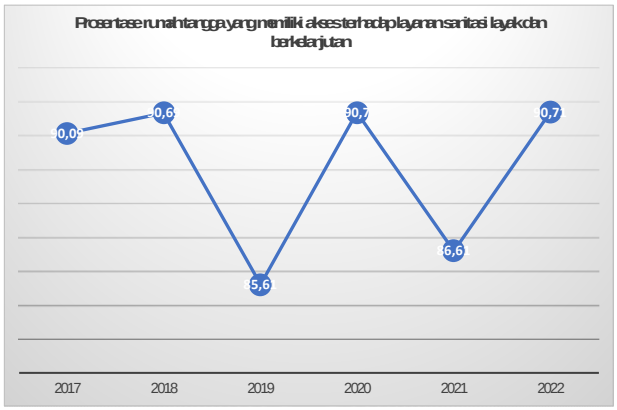
Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik masih berada di atas prosentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Prosentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak ekonomi dari Pandemi COVID-19, sedangkan pada tahun 2022 setelah aktifitas sudah mulai normal dan aktifitas ekonomi sudah mampu beradaptasi, prosentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sampai pada 11,26%. Apabila dibandingkan dengan target nasional yang termuat dalam RPJPN, target prosentase penduduk miskin tahun 2024 maksimal mancapai 7 – 8 % sehingga jika dibandingkan dengan target nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan upaya tambahan dalam menurunkan prosentase penduduk miskin.

Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalam melalui peningkatan kualitas dan akses terhadap infrastruktur dasar, salah satunya adalah airbersih dan sanitasi. Berdasarkan dokumen IKPLHD Kab. Gresik tahun 2023, jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari air sumur lebih mendominasi daripada pengguna air bersih yang bersumber dari mata air ataupun PAM. Keberadaan mata air sebagai sumber air baku yang lebih berkualitas juga tidak merata di semua kecamatan, dari 18 Kecamatan, hanya Kecamatan Sangkapura dan Tambak saja yang memiliki mata air sebagai sumber air baku.



Gambar 6. 6 Peta Jaringan Eksisting Pipa Air Bersih

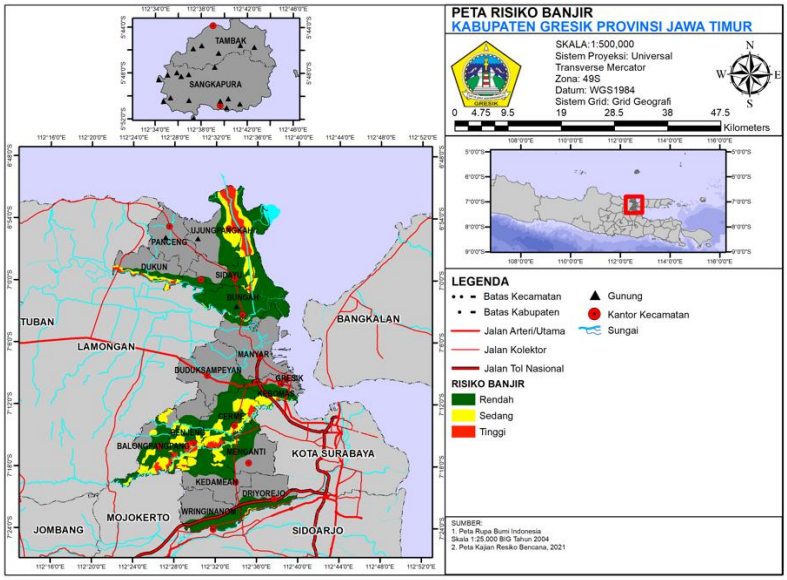
Berdasarkan hasil studi EHRA, jumlah keluarga yang telah memiki SPAL awalnya hanya sebesar 60,99% (Masterplan Air Limbah Gresik 2014-2034), kemudian meningkat menjadi sebesar 95,2% (Studi EHRA 2020 dalam SSK Kabupaten Gresik, 2021). Dari kenaikan tersebut, masih terdapat sebesar 4,8% KK di Kabupaten Gresik yang belum memiliki SPAL. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut



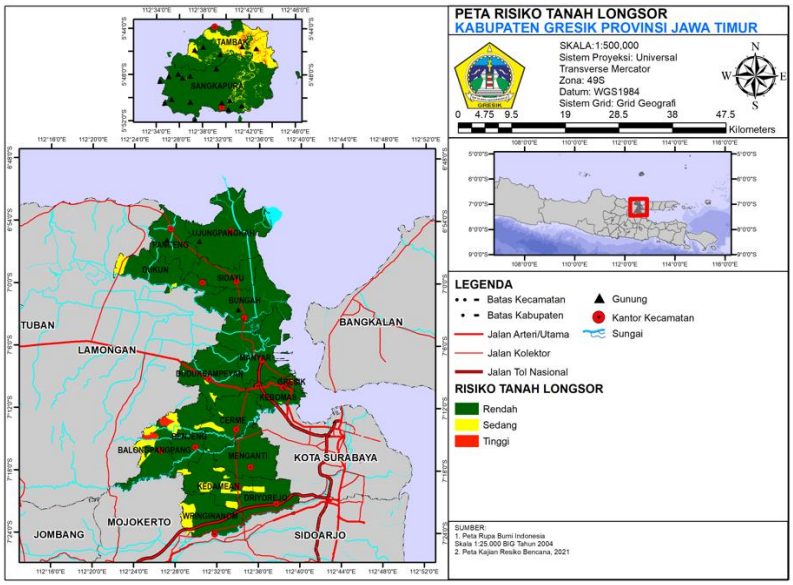
Secara holistic terdapat perbedaan antara skema pengelolaan air limbah di kawasan perkotaan, pedesaan dan Pulau Bawean.Perbedaan yang mendasar pada alur pengelolaan air limbah di wilayah daratan (perkotaan dan non perkotaan) dan wilayah pulau (Pulau Bawean) terletak pada ketersediaan pengolahan air limbah terpusat. Wilayah daratan Gresik cenderung lebih baik karena sudah ada pengolahan limbah terpusat berupa IPAL komunal dan IPLT Betoyoguci. Di mana hal tersebut belum terdapat di Pulau Bawean, sehingga pengelolaannya cenderung dilakukan secara individu dan belum terkelola dengan baik. Pengelolaan air limbah setempat di Pulau Bawean dilakukan dengan tangki septik dengan bangunan beton tertutup permanen.

No.	Kecamatan	Jumlah IPAL	Jumlah SR	Kapasitas SR	Tingkat Pemenuhan Kapasitas Pelayanan
1	Panceng	2	107	125	85,60%
2	Ujungpangkah	-	-	-	0,0%
3	Sidayu	2	100	100	100,00%
4	Bungah	1	0	50	0,00%
5	Dukun	2	0	100	0,00%
6	Manyar	36	1.257	2.335	53,83%
7	Gresik	49	1.220	3.270	37,31%
8	Kebomas	39	1.596	3.350	47,64%
9	Cerme	1	0	75	0,00%
10	Benjeng	1	0	50	0,00%
11	Balongpanggang	1	50	50	100,00%
12	Duduksampeyan	-	-	-	0,0%
13	Menganti	-	-	-	0,0%
14	Kedamean	-	-	-	0,0%
15	Driyorejo	-	-	-	0,0%
16	Wringinanom	-	-	-	0,0%
17	Sangkapura	-	-	-	0,0%
18	Tambak	-	-	-	0,0%
Total		**134**	**4.330**	**9.505**	**45,55%**

Dari sisi kebencanaan, penduduk miskin termasuk kategori rentan dalam menghadapi resiko bencana dan memiliki tingkat kapasitas yang lebih rendah sehingga upaya peningkatan prosentase kemiskinan ini sekaligus dapat meningkatkan kapasitas penduduk dalam menangani resiko bencana dan menurunkan jumlah kerugian akibat bencana. Secara umum jenis ancaman bencana Kabupaten Gresik terdiri dari bencana banjir, banjir ron, angin kencang dan tanah longsor dengan data luas wilayah terdampak sebesar 4.968,18 Ha (Sumber : IKPLHD, 2023).



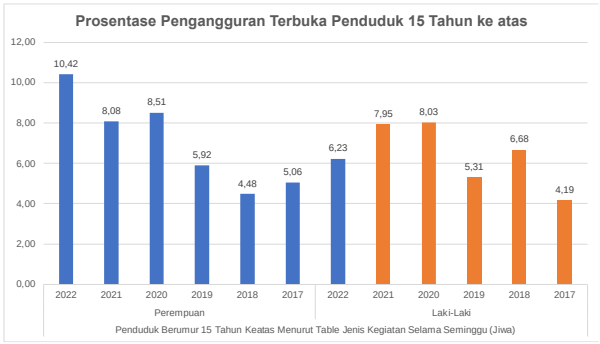
Gambar 6. 7 Peta Risiko Bencana Banjir



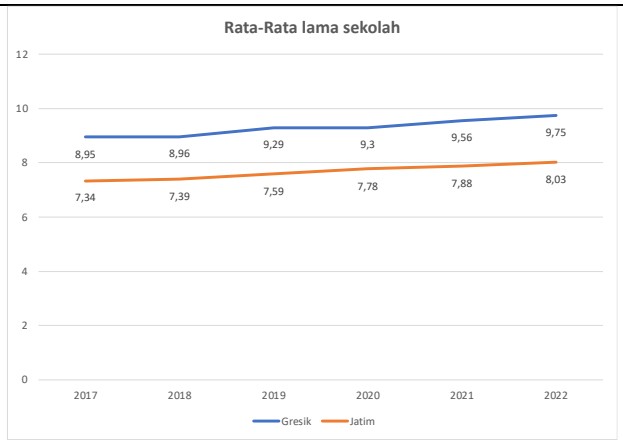
Gambar 6. 8 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor

Akar Permasalahan

1. Persentase pengangguran penduduk >15 tahun bersifat fluktuatif dan menunjukkan bahwa persentase pengangguran terbuka untuk jenis kelamin perempuan lebih besar

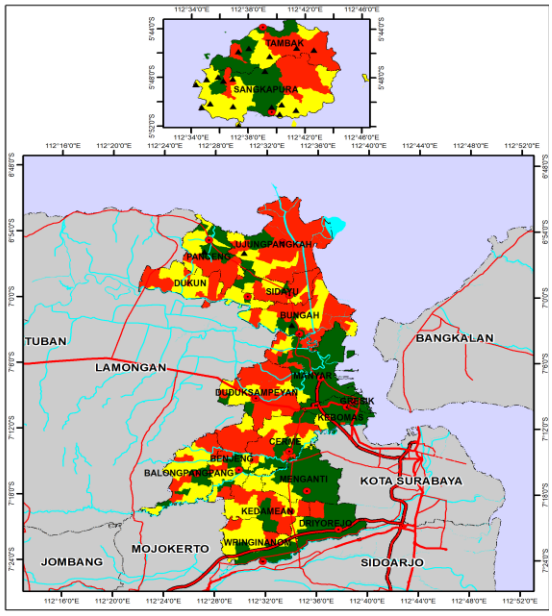


Kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga bisa dilihat dari factor Pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah. Percepatan wajib belajar merupakan salah satu upaya dalam melakukan transformasi social di Indonesia dengan kewajiban menempuh Pendidikan maksimal 1 tahun *pre school* dan 12 tahun Pendidikan dasar menengah. Rata -rata lama sekolah di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai 9,75 tahun, jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Jawa Timur masih dinilai bagus, tetapi untuk menciptakan kondisi ideal SDM yang berkualitas dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan, maka perlu dilakukan upaya untuk menambah rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gresik.

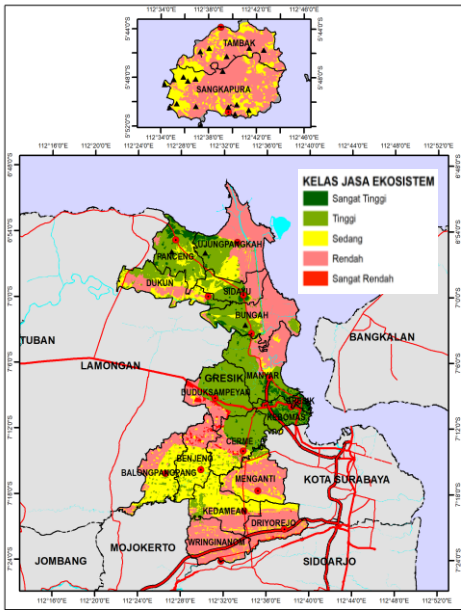


Gambar 6. 9 Rata-Rata Lama Sekolah 2017 - 2022

2. Kondisi kerentanan masyarakat didominasi skala kerentanan tinggi, sehingga fluktuasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakt pun bersifat fluktuatif terpengaruh perubahan alam maupun non alam. Berdasarkan gambar (Gambar 6.1) berikut bahwa dominasi nilai kerentanan social tinggi hampir merata di wilayah perkotaan, pedesaan dan Pulau Bawean. Dinamika pembangunan daerah yang terdampak dari perubahan kebijakan nasional akan sangat mempengaruhi masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menurunkan tingkat kerentanan masyarakat dan meningkatkan tingkat adaptasi masyarakat.
3. Sebanyak 44% wilayah Kabupaten Gresik memiliki jasa ekosistem tempat tinggal yang rendah dan hanya tersisa 4% wilayah kabupaten Gresik dengan tingkat jasa ekosistem tempat tinggal yang tinggi yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan keterbatasan tutupan lahan terbuka yang memiliki pengaruh penting untuk kenyamanan hunian (Gambar 6.2).

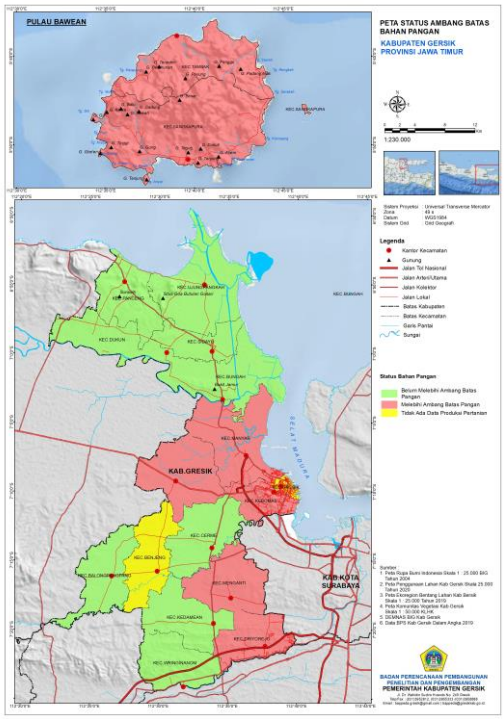


Gambar 6. 10 Peta Kerentanan Sosial



Gambar 6. 11 Jasa Ekosistem Tempat Tinggal

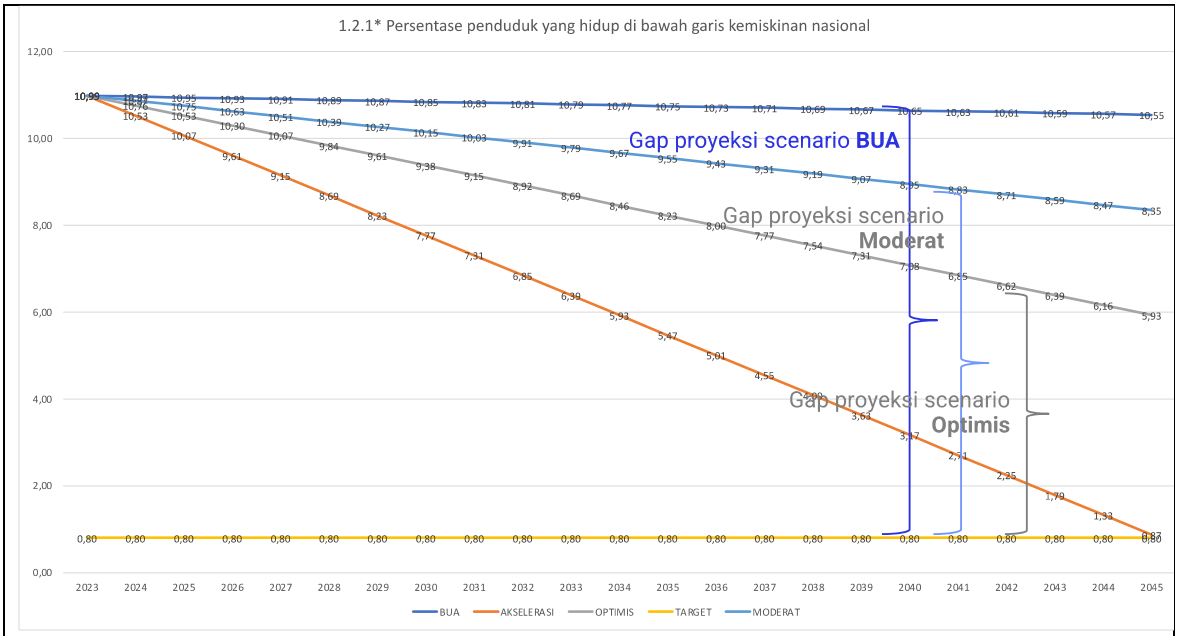
4. Kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan pada beberapa daerah perlu diperhatikan karena status daya dukung lahan pangannya sudah melebihi ambang batas, faktor distribusi logistik menjadi perhatian dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.



Gambar 6. 12 Status ambang batas bahan Pangan

Alternatif Skenario

Penentuan skenario yang diterapkan dalam pencapaian target TPB menggunakan modeto proyeksi skenario dengan 3 skema, yaitu BUA/Tanpa Upaya tambahan, Moderat (Dengan upaya tambahan mengoptimalkan potensi yang ada sesuai kemampuan stakeholder), Optimis (Dengan Upaya tambahan dengan mengerahkan potensi yang ideal), Akselerasi (Dengan Upaya tambahan dan intervensi). Berikut adalah hasil proyeksi skenario.



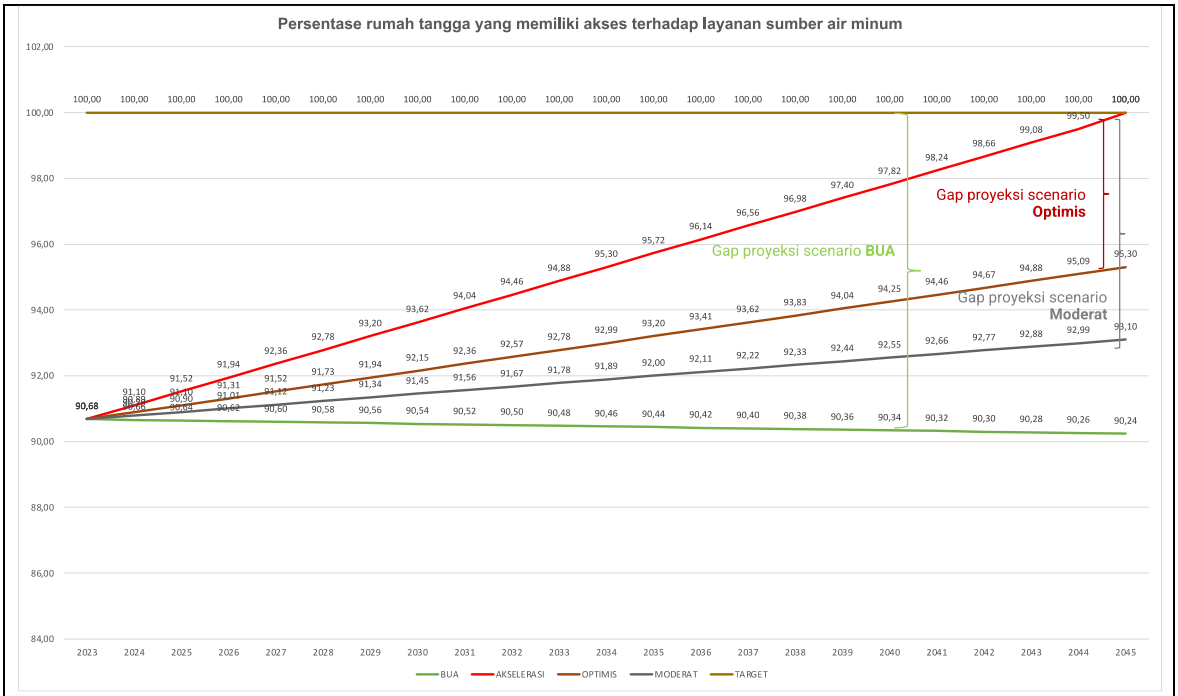
Gambar 6. 13 Proyeksi Skenario Prosentase Penduduk Miskin

Berikut adalah info angka capaian per tahun dengan 4 macam skenario, yaitu BUA, Moderat, optimis dan akselerasi. Berdasarkan gap proyeksi capaian, dapat diketahui gap tertinggi apabila menggunakan skenario BUA , tetapi jika menggunakan skenario optimis masih belum mencapai target nasional tahun 2045, sehingga skenario yang terbaik untuk mencapai target adalah skenario Akselerasi dengan mewujudkan kondisi ideal setiap sumber daya dan potensi untuk penurunan prosentase kemiskinan, sekaligus menciptakan kemampuan stakeholder yang ideal untuk mewujudkan kondisi ideal potensi daerah.

Tabel 6. 5 Proyeksi Capaian Indikator 1.2.1*

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BUA	10,99	10,97	10,95	10,93	10,91	10,89	10,87	10,85	10,83	10,81	10,79	10,77	10,75	10,73	10,71	10,69	10,67	10,65	10,63	10,61	10,59	10,57	10,55
AKSELERASI	10,99	10,53	10,07	9,61	9,15	8,69	8,23	7,77	7,31	6,85	6,39	5,93	5,47	5,01	4,55	4,09	3,63	3,17	2,71	2,25	1,79	1,33	0,87
OPTIMIS	10,99	10,76	10,53	10,30	10,07	9,84	9,61	9,38	9,15	8,92	8,69	8,46	8,23	8,00	7,77	7,54	7,31	7,08	6,85	6,62	6,39	6,16	5,93
MODERAT	10,99	10,87	10,75	10,63	10,51	10,39	10,27	10,15	10,03	9,91	9,79	9,67	9,55	9,43	9,31	9,19	9,07	8,95	8,83	8,71	8,59	8,47	8,35

Salah satu intervensi yang bisa dilakukan untuk penurunan prosentase kemiskinan adalah melalui upaya pemerataan akses air bersih aman dan layak, serta pemerataan akses sanitasi pada seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Dalam menciptakan kondisi ideal tersebut perlu di tentukan skenario yang tepat untuk mecapai kondisi ideal/target tahun 2045 sebagai berikut.



Gambar 6. 14 Proyeksi Skenario Akses Layanan Sumber Air Minum

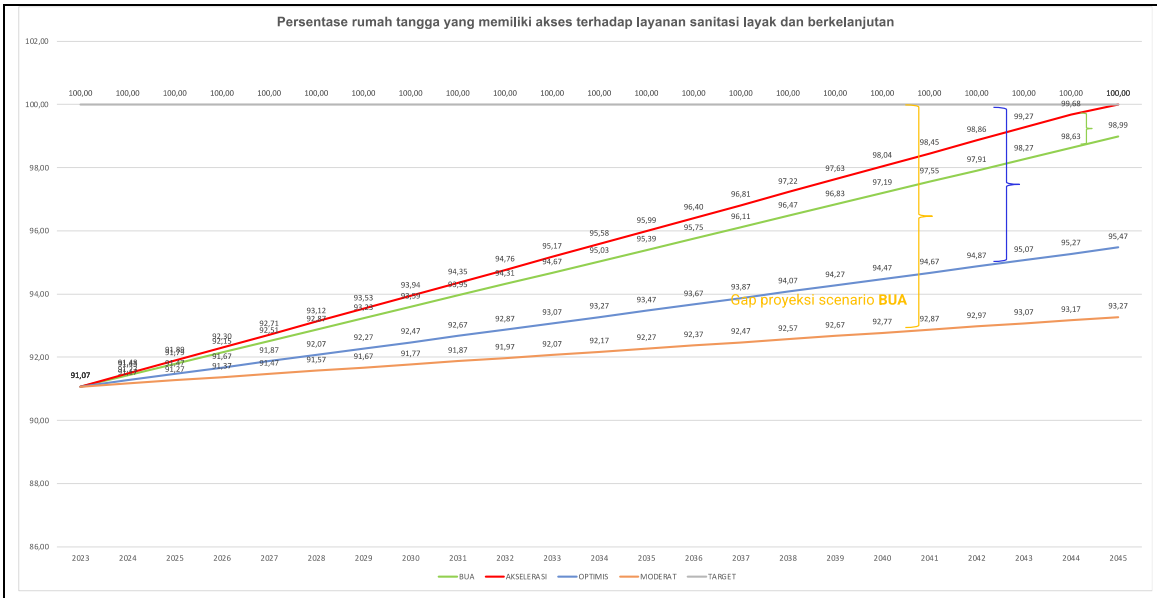
Berdasarkan proyeksi tersebut dapat diketahui bahwa jika skenario BUA di terapkan maka angka proyeksi capaian memiliki nilai gap yang semakin jauh dari target tahun 2045, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk menciptakan kondisi ideal akses layanan sumber air minum.

Sedangkan untuk proyeksi akses layanan sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 6 Proyeksi Capaian Indikator 1.4.1 (d)

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BUA	90,68	90,66	90,64	90,62	90,60	90,58	90,56	90,54	90,52	90,50	90,48	90,46	90,44	90,42	90,40	90,38	90,36	90,34	90,32	90,30	90,28	90,26	90,24
AKSELERASI	90,68	91,10	91,52	91,94	92,36	92,78	93,20	93,62	94,04	94,46	94,88	95,30	95,72	96,14	96,56	96,98	97,40	97,82	98,24	98,66	99,08	99,50	100,00
OPTIMIS	90,68	90,89	91,10	91,31	91,52	91,73	91,94	92,15	92,36	92,57	92,78	92,99	93,20	93,41	93,62	93,83	94,04	94,25	94,46	94,67	94,88	95,09	95,30
MODERAT	90,68	90,79	90,90	91,01	91,12	91,23	91,34	91,45	91,56	91,67	91,78	91,89	92,00	92,11	92,22	92,33	92,44	92,55	92,66	92,77	92,88	92,99	93,10

Selain air minum, infrastruktur dasar lain yang pelru di intervensi dalam menciptakan kondisi ideal potensi daerah adalah akses terhadap layanan sanitasi. Berikut adalah perhitungan proyeksi capaian akses layanan sanitasi berkelanjutan di kabupaten Gresik.



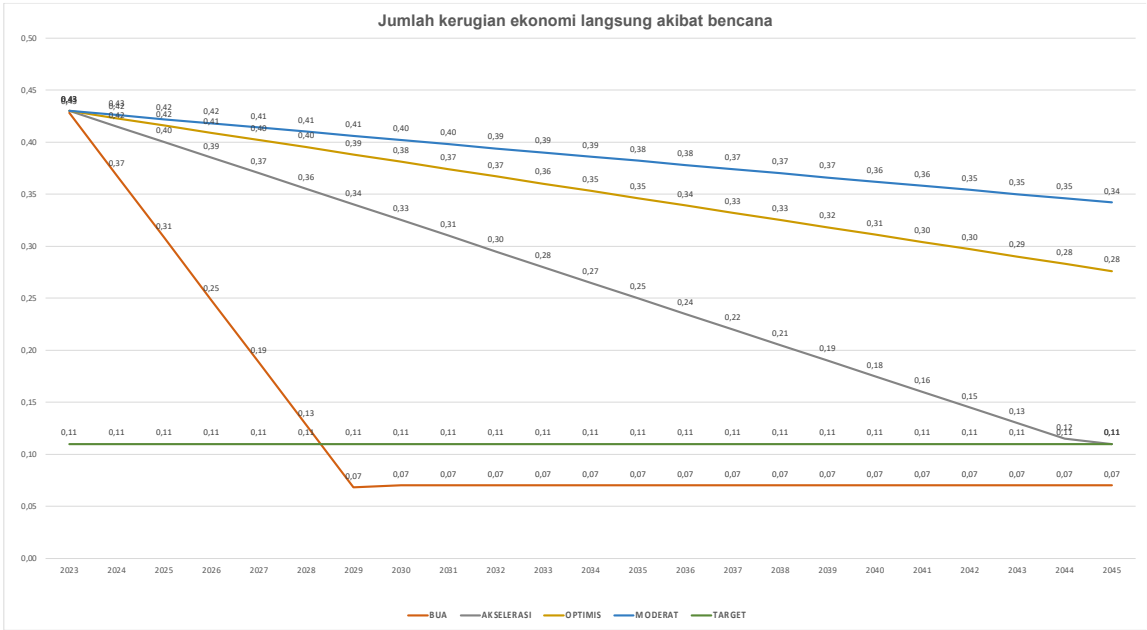
Gambar 6. 15 Proyeksi Skenario Akses Layanan Sanitasi

Berdasarkan proyeksi skenario tersebut dapat diketahui bahwa dengan upaya tambahan di Skenario Optimis dan Akselerasi, capaian layanan sanitasi pada tahun 2045 bisa mencapai target nasional.

Tabel 6. 7 Proyeksi Capaian Indikator 1.4.1 (a)

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BUA	91,07	91,43	91,79	92,15	92,51	92,87	93,23	93,59	93,95	94,31	94,67	95,03	95,39	95,75	96,11	96,47	96,83	97,19	97,55	97,91	98,27	98,63	98,99
AKSELERASI	91,07	91,48	91,89	92,30	92,71	93,12	93,53	93,94	94,35	94,76	95,17	95,58	95,99	96,40	96,81	97,22	97,63	98,04	98,45	98,86	99,27	99,68	100,00
OPTIMIS	91,07	91,27	91,47	91,67	91,87	92,07	92,27	92,47	92,67	92,87	93,07	93,27	93,47	93,67	93,87	94,07	94,27	94,47	94,67	94,87	95,07	95,27	95,47
MODERAT	91,07	91,17	91,27	91,37	91,47	91,57	91,67	91,77	91,87	91,97	92,07	92,17	92,27	92,37	92,47	92,57	92,67	92,77	92,87	92,97	93,07	93,17	93,27

Indiaktor TPB1 berikutnya yang belum mencapai target adalah indikator 1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Target nasional 2045 yang ditetapkan untuk proporsi kerugian akibat bencana sebesar 0,11%, sehingga dengan *baseline* kabupaten Gresik yang berada pada nilai 0,43% perlu di hitung proyeksi capaiannya pada tahun 2045 terhadap 4 skenario, yaitu BUA, Moderat, optimis dan Akselerasi.



Gambar 6. 16 Proyeksi Skenario Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana

Berdasarkan skenrio tersebut dapat diketahui bahwa dengan skenario BUA, target terhadap nilai kerugian akibat kencana bisa memenuhi target nasional di tahun 2028 atau periode pertama RPJPMD Kab. Gresik, sehingga skenario yang bisa di terapkan untuk indiaktor tersebut adalah BUA atau tanpa upaya tambahan.

Tabel 6. 8 Proyeksi Capaian Indikator 1.5.2 (a)

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BUA	0,43	0,37	0,31	0,25	0,19	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
AKSELERASI	0,43	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
OPTIMIS	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28
MODERAT	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34

Rekomendasi 1

Akar permasalahan : Kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas fasilitas Pendidikan kejuruan dan Lembaga pelatihan tenaga kerja baik formal maupun informasl
2. Meningkatkan Kompetensi dan skill SDM pencari kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan yang mendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja
2. Memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengembangan kewirausahaan

Arahan Kebijakan :

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Meningkatkan investasi sektor Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas Pendidikan dengan mengintegrasikan kurikulum dengan kompetensi tenaga kerja	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE2 Pendidikan berkualitas yang Merata)	Dinas Pendidikan	9,5 tahun	12 tahun
Mengembangkan program-program pelatihan yang mendukung akselerasi digitalisasi dunia industry dan tenaga kerja	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE6. Transformasi Digital)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Peringkat 51	Peringkat 30 besar
Mendorong Kerjasama pemerintah dan stakeholder eksternal dalam penyediaan dana dan sumber daya ideal	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan BAPPEDA	26%	48,9%

untuk pengembangan usaha masyarakat		Ngo (Non Governmental Organization)		

Rekomendasi 2

Akar Permasalahan : Kondisi kerentanan masyarakat didominasi skala kerentanan tinggi, sehingga fluktuasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakt pun bersifat fluktuatif terpengaruh perubahan alam maupun non alam

Sasaran:

1. Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
2. Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan social
3. Mengurangi ketimpangan social yang diperparah oleh dampak bencana

Strategi :

1. Mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam aktifitas ekonomi daerah
2. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial
3. Meningkatkan indeks kapasitas sistem peringatan dini, mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana untuk meningkatkan ketahanan komunitas
4. Percepatan rehabilitas infrastuktur pada daerah terdampak bencana

Arahan Kebijakan:

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Meningkatkan dukungan kebijakan daerah dalam penerapan konsep ekonomi sirkular melalui pengotimalan pengelolaan limbah, pengurangan emisi GRK dan Industri Hijau	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE5 Penerapan Ekonomi Hijau)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	70,80	90,65
Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana	Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE3 Perlindungan Sosial Adaptif)	Dinas Kesehatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan BPJS dan Lembaga Asuransi yang kompeten	44,1	99,5

Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan ketahanan komunitas	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)	BAPPEDA BPBD NGO	6,2	2,1
Pengembangan kebijakan pemulihan pasca bencana yang berfokus pada rehabilitas infrastruktur dasar pada daerah terdampak	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Cipta karya Perumahan dan Kawasan Permukiman BPBD	0,14	0,11

Rekomendasi 3

Akar Permasalahan: Sebanyak 44% wilayah Kabupaten Gresik memiliki jasa ekosistem tempat tinggal yang rendah dan hanya tersisa 4% wilayah kabupaten Gresik dengan tingkat jasa ekosistem tempat tinggal yang tinggi yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan keterbatasan tutupan lahan terbuka yang memiliki pengaruh penting untuk kenyamanan hunian

Sasaran:

1. Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas lingkungan hidup
2. Pengendalian emisi gas rumah kaca, terutama pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan Kabupaten Gresik
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Strategi :

1. Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan ruang yang harmonis antara manusia dan lingkungan
2. Mengendalikan beban pencemar badan air permukaan dan meningkatkan kualitas air permukaan sebagai potensi sumber air baku
3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memastikan pengelolan limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Arah kebijakan :

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Memperkuat kebijakan pengendaliaan tata ruang untuk menghadapi dinamika investasi	Misi 5 : Ketahanan ESosial, Budaya dan Ekologi (IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	29,94 %	81,96 %
Mendorong teknologi modern dan inovasi pengelolaan limbah terutama limbah domestik dan limbah industri	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup	72,42	76,12
Membangun kemitraan strategis antar pemerintah dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang efektif	Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup	71,94	96,98
Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan beban pencemar limbah domestik	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% Terdaur ulang)
Mengembangkan standar dan regulasi ketat terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan memmastikan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif terhadap penaatan standar dan regulasi pengendalian pencemaran tersebut	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas Lingkungan Hidup	72,42	76,12
Mendorong minat masyarakat dan komunitas untuk berperan dalam kegiatan peningkatan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup melalui program penghargaan dan apresiasi	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas Lingkungan Hidup	0,35	0,75

Rekomendasi 4

Akar Permasalahan : Kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan

Sasaran :

1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan pangan
2. Meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan dan efisien
3. Memastikan akses pangan yang cukup dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat

Strategi :

1. Mendorong diversifkasi tanaman dan lahan yang resisten terhadap cuaca ekstrem dan penyakit untuk mengurangi resiko kerentanan pangan
2. Meningkatkan produktifitas pertanian pada kawasan LP2B dan LSD
3. Mengembangkan sistem dan teknologi irigasi yang berkelanjutan dengan pasokan air yang terjamin bagi sektor pertanian

Arah kebijakan :

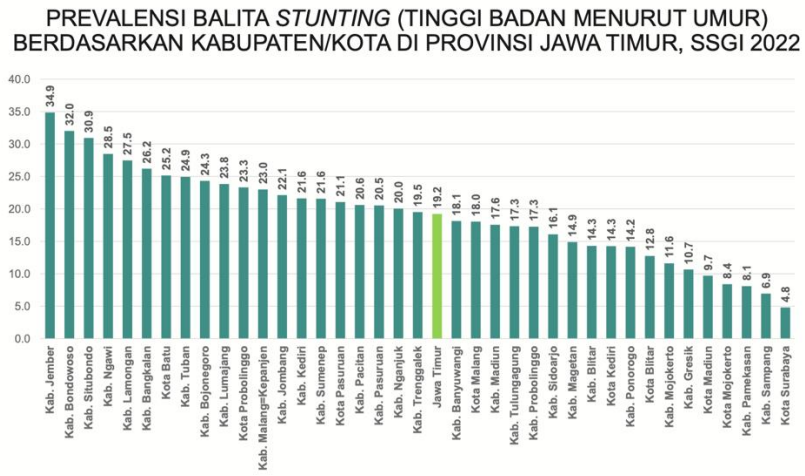
Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Menerapkan kebijakan pangan yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, termasuk kebijakan pengendalian kebijakan harga dan perlindungan social bagi kelompok rentan	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)	Dinas Pertanian		
Mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan agribisnis yang berkelanjutan	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 4 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi)	Dinas Pertanian		
Memperluas akses pasar hasil pertanian melalui pengembangan rantai pasok pertanian yang optimal, hilirisasi produk pertanian dengan nilai jual tinggi dan pemanfaatan akses teknologi informasi	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)	Dinas Pertanian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		
Mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian pada sistem. Pertanian yang holistic dan melindungi hak petani atas lahan dan akses terhadap modal serta infrastruktur dasar pertanian	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 6 Transformasi Digital)	Dinas Pertanian		
Mendorong pengunaan teknologi modern dan inovasi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim)	Dinas Pertanian		

6.2.2 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan)

Terdapat 2 indikator belum mencapai target yang terdapat di TPB 2 yaitu

- 2.2.1* "Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita",
- 2.2.1 (a) "Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta"

Tabel 6. 9 Tabel Perumusan Rekomendasi TPB Priotitas 2

TPB Prioritas Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula
Nomor Indikator - 2.2.1* "Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita", - 2.2.1 (a) "Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta"
Kondisi Berdasarkan metadata capaian indikator 2.2.1 dapat diketahui bahwa angka pravelansi stunting di Kabupaten Gresik di tahun 2022 mengalami penurunan dari 10,9% menjadi 10,7%, walaupun capaian tersebut sudah melebih rata-rata prevalensi stunting Jawa Timur (19,2%), tetapi apabila di bandingkan dengan target RPJPN tahun 2045 sebesar 5% maka diperlukan suatu arah kebijakan untuk mencapai target nasional di tahun 2045. 

Gambar 6. 17 Konstelasi Pravelansi Balita Stunting Jawa Timur (SSGI, 2022)

Identifikasi awal dari stunting bayi dapat diketahui dari informasi gizi buruk dan berat badan rendah pada bayi lahir. Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui masih ada 2,68 % bayi lahir dengan kondisi berat badan rendah dan sebanyak 179 BBLR tersebut memiliki status gizi buruk.

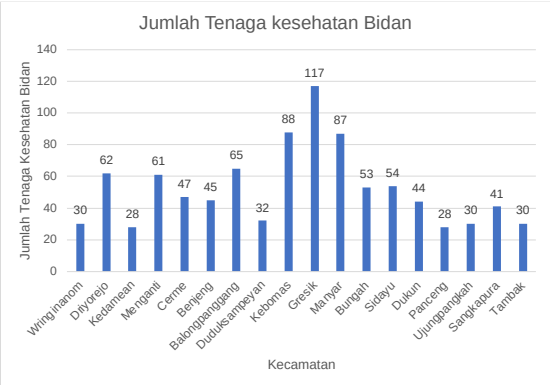
Tabel 6. 10 Kondisi Bayi Lahir, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan Gizi Buruk

Kecamatan *Subdistrict*	Bayi Lahir *Births*	BBLR *LBW*		Gizi Buruk *Malnutrition*
		Jumlah *Total*	Dirujuk *Treated*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wringinanom	1 052	17	17	6
Driyorejo	2 198	43	43	39
Kedamean	806	42	42	10
Menganti	2 014	61	61	14
Cerme	1 034	28	28	8
Benjeng	987	24	24	1
Balongpanggang	677	17	17	2
Duduksampeyan	657	24	24	1
Kebomas	1 765	25	25	26
Gresik	1 116	53	53	18
Manyar	1 800	47	47	10
Bungah	934	6	6	1
Sidayu	710	16	16	14
Dukun	785	35	35	7
Panceng	693	3	3	2
Ujungpangkah	733	26	26	14
Sangkapura	776	45	45	2
Tambak	376	-	-	4
Kabupaten Gresik	**19 113**	**512**	**512**	**179**

Sumber/*Source:* Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik/*Public Health Service of Gresik Regency*

Akar Permasalahan

1. Kemandirian dan pemahaman masyarakat mengenai Kesehatan keluarga belum optimal. Kesejahteraan keluarga memiliki hubungan signifikan dengan Kesehatan keluarga, antara lain factor pendapatan keluarga dan Pendidikan ibu memiliki pengaruh signifikan terhadap angka stunting (Tebi *et al,* 2021). Program penyuluhan Kesehatan keluarga oleh tenaga Kesehatan pada level desa dan kelurahan memberi peran signifikan untuk kemandirian ibu dalam menjaga Kesehatan keluarga, proporsi tenaga Kesehatan bidan di setiap kecamatan di Kabupaten Gresik masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah KK.



Gambar 6. 18 Sebaran Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan di Kabupaten Gresik

Keberadaan fasilitas Kesehatan sebagai pendukung peningkatan Kesehatan keluarga juga turut berperan dalam menyelesaikan permasalahan stunting. Selain fasilitas puskesmas dan

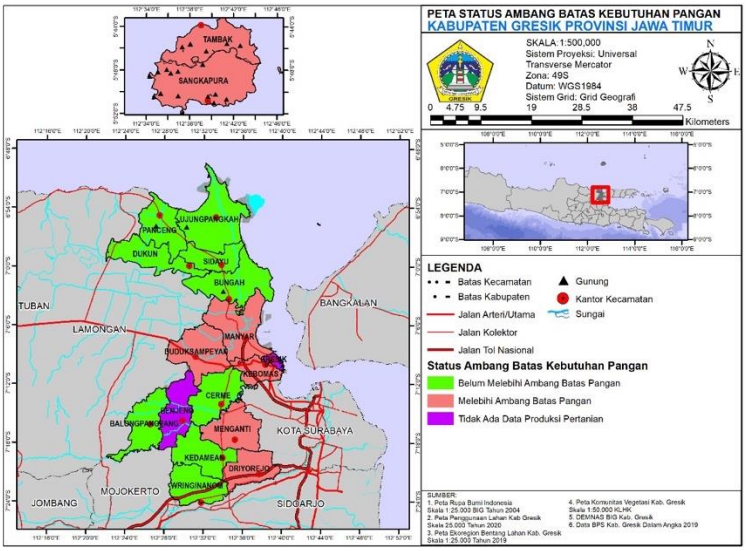
puskesmas pembantu yang tersebar di semua kecamatan, keberadaan rumah sakit khusus ibu dan anak juga memiliki kompotensi signifikan dalam masalah stunting. Belum adanya fasilitas rumah sakit khusus ibu dan anak di Kabupaten Gresik juga merupakan akar permasalahan yang perlu diselesaikan untuk percepatan penyelesaian permasalahan stunting di Kabupaten Gresik.

Tabel 6. 11 Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Sarana Kesehatan					
	Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Wringinanom	-	-	5	2	3	6
Driyorejo	2	-	10	2	4	35
Kedamean	-	-	1	2	4	13
Menganti	3	-	7	2	4	36
Cerme	-	-	7	2	4	18
Benjeng	-	-	3	2	4	14
Balongpanggang	2	-	-	2	4	10
Duduksampeyan	-	-	4	1	5	4
Kebomas	1	-	14	2	6	24
Gresik	6	-	10	3	1	26
Manyar	2	-	14	3	7	41
Bungah	1	-	2	1	5	9
Sidayu	1	-	-	1	4	7
Dukun	-	-	3	2	5	7
Panceng	-	-	1	1	5	8
Ujungpangkah	1	-	1	2	2	6
Sangkapura	1	-	3	1	4	3
Tambak	-	-	-	1	3	1
Total	**20**	**-**	**85**	**32**	**74**	**268**

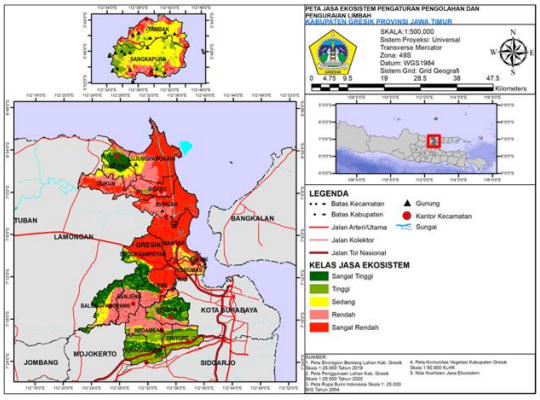
2. Kerentanan indikator Kesehatan lingkungan yang berpengaruh pada Kesehatan keluarga seperti kualitas air bersih, kualitas sistem sanitasi dan kualitas pengelolaan persampahan.

   Ketercukupan pangan dan factor sanitasi adalah salah satu penyebab stunting pada anak, sehingga daya dukung kawasan terhadap kebutuhan pangan, kemampuan ekonomi terhadap akses bahan pangan berkualitas serta kualitas sistem sanitasi termasuk air bersih suatu kawasan turut mempengaruhi kondisi atunting pada kabupaten. Kurang meratanya efisiensi jasa ekosistem ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Gresik menghambat pemenuhan gizi ibu hamil, bayi dan anak. Berdasarkan kondisi ambang batas kebutuhan pangan Kabupaten Gresik, sebanyak 50% kecamatan di Gresik memiliki status ambang batas pangan defisit.

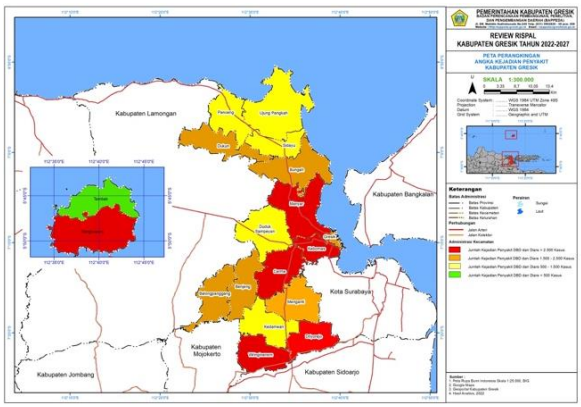


Gambar 6. 19 Status Ambang batas Kebutuhan Pangan Kab. Gresik

Kesehatan keluarga juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan di tempat tinggalnya, terutama kualitas sanitasi dan infrastuktur dasar pengolah limbah lain seperti persampahan. Berdasarkan kondisi jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah diketahui bahwa didominasi kawasan dengan kelas jasa ekosistem yang sangat rendah seluas 32,42 Ha. Kabupaten Gresik memiliki 134 Unit IPAL Komunal yang terpasang tetapi penggunaan IPALnya hanya mencapai 46% SR yang terpasang. Selain stunting kondisi sistem sanitasi yang belum optimal ini juga dapat dilihat dampaknya pada persebaran penyakit DBD dan Diare.



Gambar 6. 20 Jasa Ekosistem Penguraian Limbah



Gambar 6. 21 Sebaran Penyakit DBD & Diare

3. Belum optimalnya jangkauan layanan asuransi Kesehatan khususnya bagi masyarakat rentan.

   Imunisasi lengkap merupakan Langkah pencegahan stunting yang penting, sehingga akses masyarakat terhadap layanan imunisasi lengkap perlu di optimalkan. Berdasarkan tabel berikut di ketahui bahwa keterjangkauan kartu imunisasi sudah mencapai 94,11%, tetapi proporsi anak dengan imunisasi lengkap hanya mencapai 66,17%.

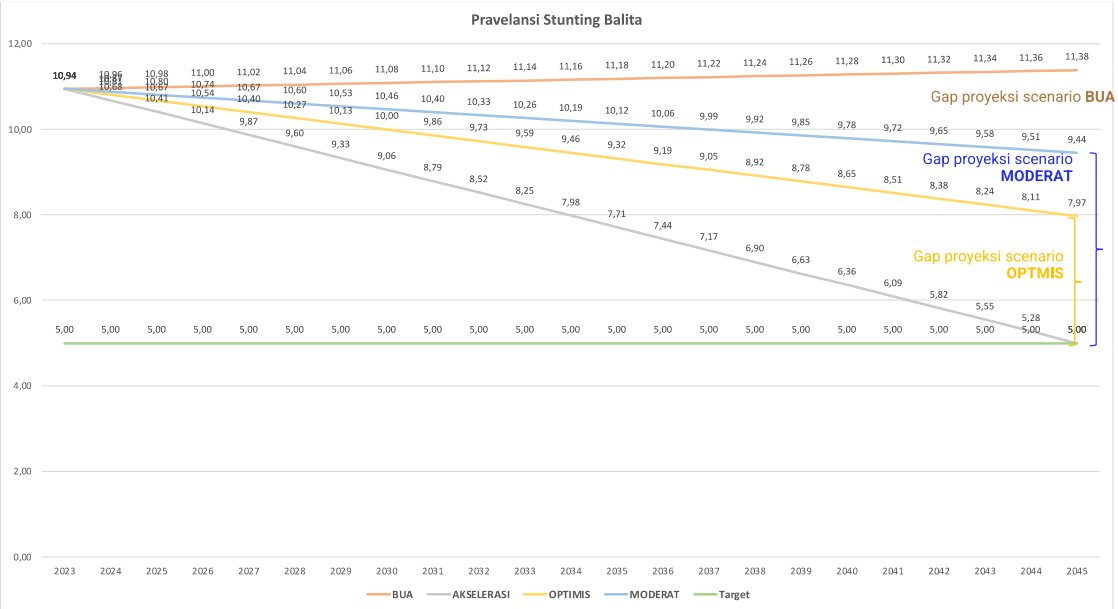
Tabel 6. 12 Akses Imunisasi Lengkap Kabupaten Gresik

Jenis Kelamin	Memiliki Kartu Imunisasi (%)		Mendapat Imunisasi Lengkap (%)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	98,22	94,85	59,59	60,58
Perempuan	95,84	93,32	68,54	72,06
Laki-laki+Perempuan	97,06	94,11	63,94	66,17

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2019-2020

Alternatif Skenario

Penentuan skenario yang diterapkan dalam pencapaian target TPB menggunakan motode proyeksi skenario dengan 3 skema, yaitu BUA/Tanpa Upaya tambahan, Moderat (Dengan upaya tambahan mengoptimalkan potensi yang ada sesuai kemampuan stakeholder), Optimis (Dengan Upaya tambahan dengan mengerahkan potensi yang ideal), Akselerasi (Dengan Upaya tambahan dan intervensi). Berikut adalah hasil proyeksi skenario.



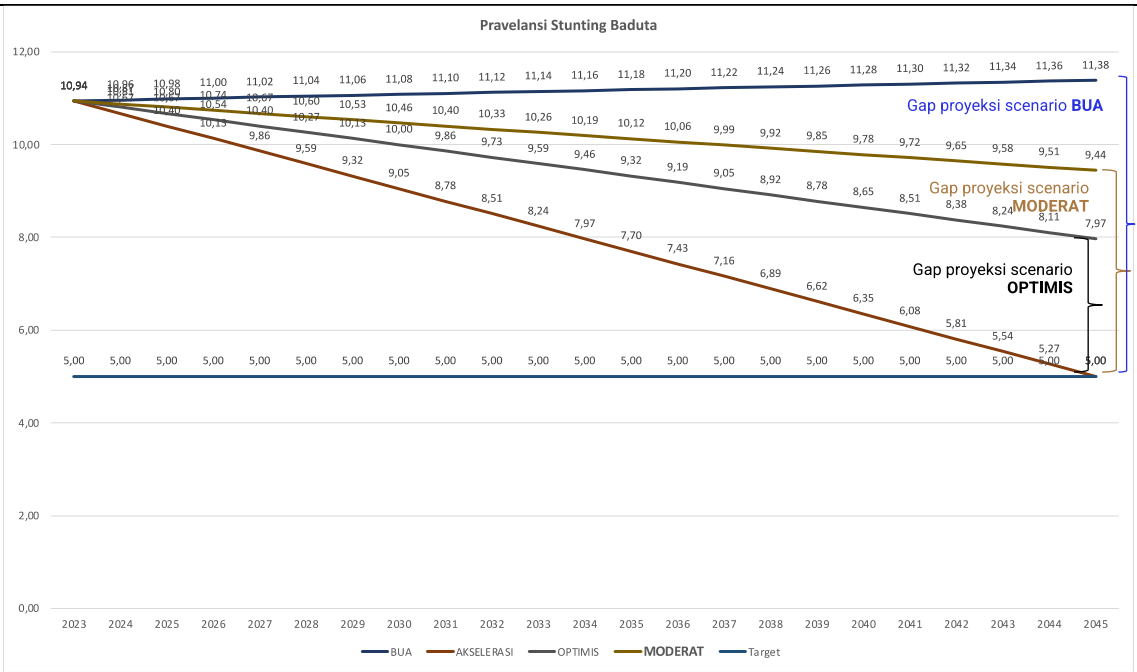
Gambar 6. 22 Proyeksi Capaian Indiaktor 2.2.1 * sampai Tahun 2045

Berdasarkan proyeksi tersebut dapat diketahui bahwa gap capaian di tahun 2045 paling tinggi adalah proyeksi dengan skenario BUA, dan proyeksi dengan gap paling kecil adalah skenario Akselerasi. Lebih jelas mengenai angka capaian indikator 2.2.2* sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 13 Proyeksi Capaian Indiaktor 2.2.1* sampai Tahun 2045

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BUA	10,94	10,96	10,98	11,00	11,02	11,04	11,06	11,08	11,10	11,12	11,14	11,16	11,18	11,20	11,22	11,24	11,26	11,28	11,30	11,32	11,34	11,36	11,38
AKSELERASI	10,94	10,68	10,41	10,14	9,87	9,60	9,33	9,06	8,79	8,52	8,25	7,98	7,71	7,44	7,17	6,90	6,63	6,36	6,09	5,82	5,55	5,28	5,00
OPTIMIS	10,94	10,81	10,67	10,54	10,40	10,27	10,13	10,00	9,86	9,73	9,59	9,46	9,32	9,19	9,05	8,92	8,78	8,65	8,51	8,38	8,24	8,11	7,97
MODERAT	10,94	10,87	10,80	10,74	10,67	10,60	10,53	10,46	10,40	10,33	10,26	10,19	10,12	10,06	9,99	9,92	9,85	9,78	9,72	9,65	9,58	9,51	9,44

Metode proyeksi capaian yangsama juga di gunakan untuk menghitung proyeksi capaian indikator 2.2.1 (a) sampai dengan tahun 2045. Berdasarkan perhitungan proyeksi, dapat diketahui bahwa pendekatan skenario yang dapat digunakan untuk mencapai target indikator 2.2.1 (a) pada tahun 2045 adalah dengan skenario Akselerasi.



Gambar 6. 23 Proyeksi Capaian Indikator 2.2.1 (a) sampai Tahun 2045

Lebih jelas mengenai nilai proyeksi capaian indiiaktor 2.2.1 (a) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 14 Proyeksi Capaian Indikator 2.2.1 (a) sampai Tahun 2045

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BUA	10,94	10,96	10,98	11,00	11,02	11,04	11,06	11,08	11,10	11,12	11,14	11,16	11,18	11,20	11,22	11,24	11,26	11,28	11,30	11,32	11,34	11,36	11,38
AKSELERASI	10,94	10,67	10,40	10,13	9,86	9,59	9,32	9,05	8,78	8,51	8,24	7,97	7,70	7,43	7,16	6,89	6,62	6,35	6,08	5,81	5,54	5,27	5,00
OPTIMIS	10,94	10,81	10,67	10,54	10,40	10,27	10,13	10,00	9,86	9,73	9,59	9,46	9,32	9,19	9,05	8,92	8,78	8,65	8,51	8,38	8,24	8,11	7,97
MODERAT	10,94	10,87	10,80	10,74	10,67	10,60	10,53	10,46	10,40	10,33	10,26	10,19	10,12	10,06	9,99	9,92	9,85	9,78	9,72	9,65	9,58	9,51	9,44
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rekomendasi 1

Akar permasalahan : Kemandirian dan pemahaman masyarakat mengenai Kesehatan keluarga belum optimal

Sasaran :

1. Peningkatan jumlah bayi yang telah menyelesaikan imunisasi dasar lengkap
2. Memperluas jangkauan penyuluhan dan pelatihan Kesehatan keluarga terutama pada kelompok keluarga miskin dan rentan
3. Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan social

Strategi :

1. Mendorong kesiapan vaksin dan tenaga penyuluh Kesehatan keluarga pada fasilitas Kesehatan daerah

2. Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh Kesehatan dan tenaga Kesehatan terkait program pemenuhan Kesehatan keluarga
3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memastikan pengelolan limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan
4. Meningktkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial

Arahan Kebijakan :

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Menjamin mutlaknya pemerataan layanan kesehatan keluarga bagi masyarakat rentan dan miskin	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)	Dinas Kesehatan	13,5	5
Mendorong kebijakan yang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)	Dinas Kesehatan	13,5	5
Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan beban pencemar limbah domestik	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% Terdaur ulang)
Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana	Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)	Dinas Kesehatan Lembaga Asuransi yang kompeten	98,0	99,5

Rekomendasi 2

Akar Permasalahan : Kerentanan indikator Kesehatan lingkungan yang berpengaruh pada Kesehatan keluarga seperti kualitas air bersih, kualitas sistem sanitasi dan kualitas pengelolaan persampahan

Sasaran:

1. Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Strategi :

1. Mengendalikan beban pencemar badan air permukaan dan meningkatkan kualitas air permukaan sebagai potensi sumber air baku

2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memastikan pengelolan limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Arahan Kebijakan:

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan beban pencemar limbah domestik	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% Terdaur ulang)
Membangun kemitraan strategis antar pemerintah dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang efektif	Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup	71,94	96,98
Mendorong minat masyarakat dan komunitas untuk berperan dalam kegiatan peningkatan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup melalui program penghargaan dan apresiasi	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas Lingkungan Hidup	0,35	0,75

Rekomendasi 3

Akar Permasalahan : Belum optimalnya jangkauan layanan asuransi Kesehatan khususnya bagi masyarakat rentan

Sasaran:

1. Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan social

Strategi :

1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial

Arah kebijakan :

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana	Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE 1 Kesehatan Untuk Semua)	Dinas Kesehatan Lembaga Asuransi yang kompeten	98	99,5
Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan ketahanan komunitas	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 14 Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender)	Dinas Kesehatan	58,49	80

6.2.3 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan)

Terdapat 6 indikator belum mencapai target yang terdapat di TPB 6 yaitu

- 6.1.1.(a) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak"
- 6.1.1.(b) "Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau"
- 6.1.1.(c) "Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan"
- 6.2.1.(b) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak"
- 6.3.1(b) "Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja" dan
- 6.3.2.(a) "Kualitas air danau".

Tabel 6. 15 Tabel Perumusan Rekomendasi TPB Prioritas 6

TPB Prioritas
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
• Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. • Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan

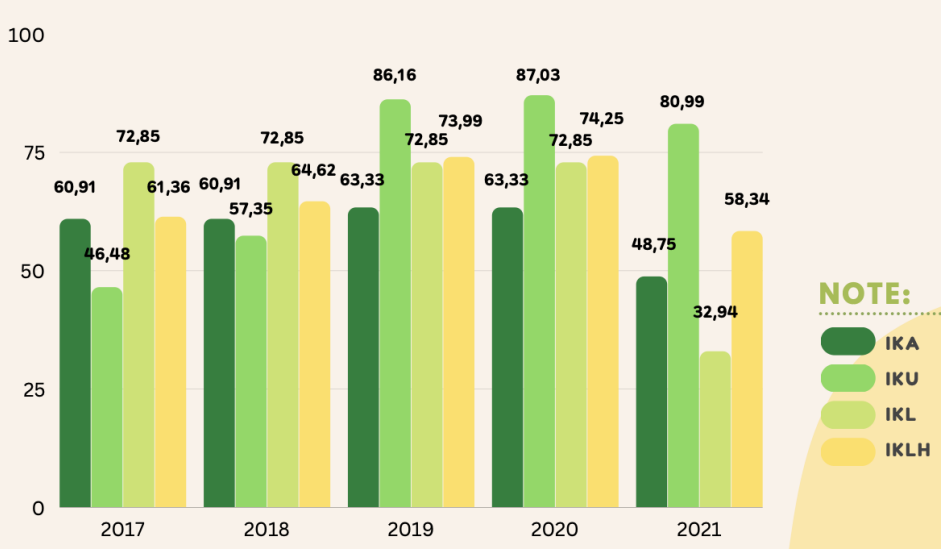
kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Nomor Indikator

- 6.1.1.(a) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak"
- 6.1.1.(b) "Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau"
- 6.1.1.(c) "Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan"
- 6.2.1.(b) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak"
- 6.3.1(b) "Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja"
- 6.3.2.(a) "Kualitas air danau".

Kondisi

Indeks kualitas air memiliki indeks paling rendah, sehingga perlu di waspadai kondisi beban pencemar pada badan air permukaan Gresik



Gambar 6. 24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Tabel 2.49. Jumlah Sumber Air di Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan (Liter)/DAM
1	Gresik	0	26	24	0	0	30
2	Kebomas	0	27	37	0	5	72
3	Manyar	0	52	33	0	0	77
4	Duduksampeyan	0	16	7	0	1	32
5	Cerme	0	53	58	0	15	49
6	Benjeng	1	35	63	0	0	41
7	Balongpanggang	0	21	49	0	0	57
8	Menganti	0	35	295	0	0	131
9	Kedamean	0	9	34	0	0	58
10	Driyorejo	0	18	0	0	0	76
11	Wringinanom	0	11	22	0	0	51
12	Bungah	0	17	444	0	0	53
13	Sidayu	0	11	1	0	0	44
14	Dukun	0	20	67	0	0	41
15	Ujungpangkah	0	8	71	0	0	38
16	Panceng	0	17	9	0	0	19
17	Sangkapura	24	0	101	0	0	9
18	Tambak	1	12	41	0	0	4

Sumber: Laporan D3TLH tahun 2021 dan IKPLHD Tahun 2022

Tabel 2.53. Pemantauan Kualitas Air 2022

No	Nama Sungai	Lokasi/Koordinat	Kelas Air	Kategori
1	Afvour Wringinanom	S:07°23'05.1" E:112°34'32.5"	Kelas IV	Syarat jumlah minimal sungai
2	Kali Mireng	S:07°04'38.5 E:112°34'22.4	Kelas III	Syarat jumlah minimal sungai
3	Tambangan Ds. Bambe (Kali Surabaya)	S:7°21'05.0" E:112°39'44"	Kelas III	Titik Sampling Limbah non point source
4	Bengawan Solo (Jembatan Kalirejo-Karangbinangun)	S:7°00'44.0" E:112°30'18.0"	Kelas III	Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama, Lokasi tengah sungai bengawan solo di Gresik
5	ABA Jembatan Sembayat Bungah (B. Solo)	S:07°03'45.90" E:112°34'35.20"	Kelas III	Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama Lokasi tengah sungai bengawan solo di Gresik
6	ABA Jembatan Ds. Kali Rejo Kec. Dukun (B. Solo)	S:7°00'41.0" E:112°30'18.0"	Kelas III	Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama Lokasi tengah sungai bengawan solo di Gresik
7	Kali Lamong Desa Boboh	S:07°15'02.5" E:112°33'43.7"	Kelas III	Syarat jumlah minimal sungai
8	Kali Lamong Desa Segoromadu, Kec. Kebomas	S:07°11'41.1" E:112°38'45.1"	Kelas IV	Titik Sampling Pencemaran Point Source
9	Afvour Kali Tengah Ds. Bambe, Kec. Driyorejo	S:7°21'04" E:112°39'44"	Kelas IV	Titik Sampling Pencemaran Point Source
10	Afvour Kali Tengah Ds. Tenaru, Kec. Driyorejo	S:7°21'35" E:112°37'39"	Kelas IV	Titik Sampling Pencemaran Point Source
11	Kali Manyar	S:07°06'43,2" E:112°35'37.0"	Kelas IV	Titik Sampling Pencemaran Non Point Source
12	Jembatan Sembayat, Kabupaten Gresik (Pusat)	S:-7.062287" E:112.576396"	Pusat	Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama
13	Stasiun ONLIMO, Kecamatan Wringinanom	S:-7.393877" E:112.567596"	Pusat	Syarat jumlah minimal sungai, Sungai Outlet Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama

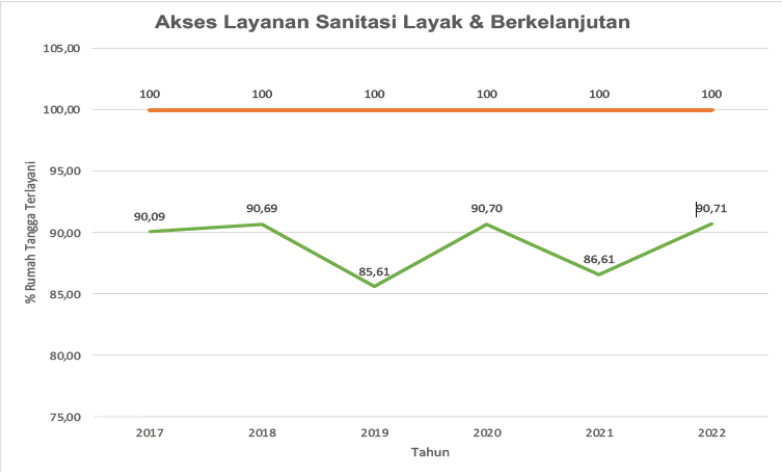
Kecamatan Sangkapura memiliki 24 mata air yang dapat dimanfaatkan, sementara beberapa kecamatan lain seperti Gresik dan Kebomas tidak memiliki mata air sama sekali. Sebaliknya, kecamatan Kedamean hanya memiliki 9 sumur dan kecamatan Driyorejo bahkan tidak memiliki sumur sama sekali. Kecamatan Bungah memiliki akses terbanyak terhadap air bersih melalui sumur dengan jumlah 444 sumur, sementara kecamatan Menganti memiliki akses terbanyak melalui sumber air ledeng/PAM dengan jumlah 295

sumber. Adanya perbedaan akses air bersih di setiap kecamatan menjadi salah satu faktor penyebab ketidakmerataan dalam penanganan masalah air di Kabupaten Gresik.

Secara umum, Kabupaten Gresik memiliki status yang belum terlampaui atau surplus air dalam jumlah yang signifikan yaitu 15 kecamatan dan tiga kecamatan dalam status terlampaui atau defisit; dengan jumlah ketersediaan 1.179,22 juta m3/tahun dan jumlah penduduk menurut sistem grid mencapai 1.298.184 jiwa, kebutuhannya mencapai 733,28 juta m3/tahun. Maka dari itu, Kabupaten Gresik surplus ketersediaan air bersih sebesar 445,94 juta m3/tahun. Berikut merupakan tabel status daya dukung air sistem grid Kabupaten Gresik.

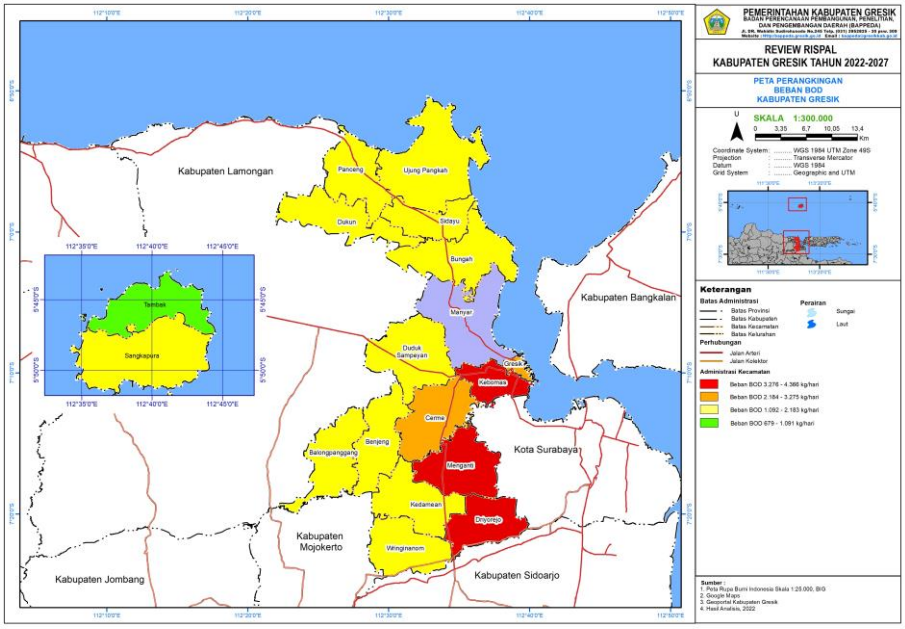
No	Kecamatan	Penduduk Sistem Grid 30' X 30' (jiwa)	Ketersediaan Total (juta m3/th)	Kebutuhan Total (juta m3/th)	Nilai Status Air	Status Air
1	Gresik	82.448	3,35	7,33	0,46	Terlampaui
2	Driyorejo	102.646	48,94	52,46	0,93	Terlampaui
3	Wringinanom	73.297	55,12	58,98	0,93	Terlampaui
4	Kedamean	63.887	68,44	66,24	1,03	Belum Terlampaui
5	Menganti	124.468	76,25	72,45	1,05	Belum Terlampaui
6	Balongpangpang	58.015	70,98	66,06	1,07	Belum Terlampaui
7	Benjeng	66.546	68,64	60,29	1,14	Belum Terlampaui
8	Kebomas	109.392	27,91	18,01	1,55	Belum Terlampaui
9	Panceng	52.599	71,65	43,97	1,63	Belum Terlampaui
10	Dukun	67.127	64,32	37,64	1,71	Belum Terlampaui
11	Sangkapura	56.053	101,06	54	1,87	Belum Terlampaui
12	Sidayu	43.533	43,95	22,67	1,94	Belum Terlampaui
13	Tambak	32.519	59,01	29,86	1,98	Belum Terlampaui
14	Cerme	80.032	83,95	37,79	2,22	Belum Terlampaui
15	Ujungpangkah	51.89	86,73	39	2,22	Belum Terlampaui
16	Bungah	68.342	68,82	28,82	2,39	Belum Terlampaui
17	Manyar	114.893	80,35	17,46	4,6	Belum Terlampaui
18	Duduksampeyan	50.497	99,73	20,24	4,93	Belum Terlampaui
Kab. Gresik		1.298.184	1,179,22	733,28	1,61	Belum Terlampaui

Gambar 6. 25 Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Gresik
Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Gresik 2021



Akar Permasalahan

1. Keberadaan infrastruktur pengelolaan lumpur tinja Kabupaten Gresik belum mencukupi sehingga berdampak pada Beban BOD yang tinggi pada beberapa kecamatan



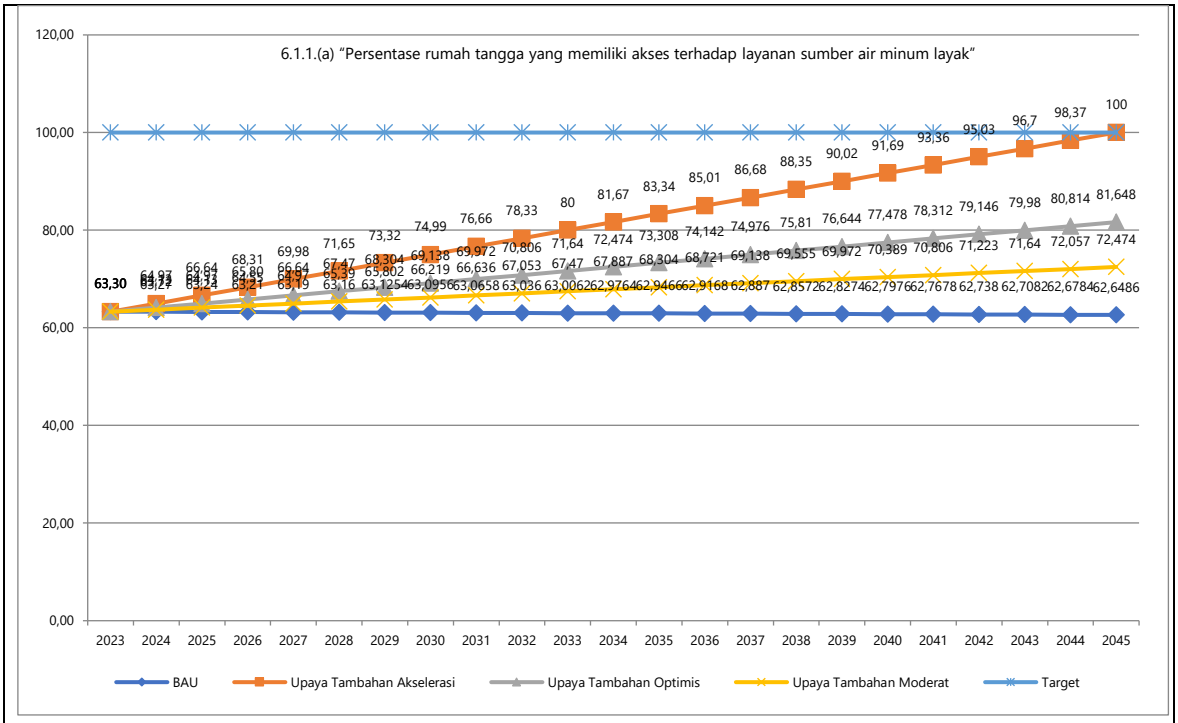
Gambar 6. 26 Peta Beban BOD Kabupaten Gresik

Keberadaan infrastruktur pengelolaan lumpur tinja Kabupaten Gresik belum mencukupi proyeksi timbulan air limbah tahun 2042 sebesar 112.878.741 liter/hari. Sedangkan berdasarkan peta di atas, Beban BOD yang tinggi pada beberapa kecamatan mengindikasikan dampak dari sistem pengelolaan lumpur tinja yang belum optimal.

2. Hasil analisis status mutu air sungai berdasarkan perhitungan indeks pencemaran air (Indeks Kualitas Air) diketahui sungai-sungai di Kabupaten Gresik terdapat beberapa sungai saja yang memenuhi baku mutu air, sedangkan sungai tercemar ringan dan sungai tercemar sedang masih banyak terdapat di wilayah Utara dan selatan Kabupaten Gresik.

Alternatif Skenario

Penentuan skenario yang diterapkan dalam pencapaian target TPB menggunakan metode proyeksi skenario dengan 3 skema, yaitu BUA/tanpa upaya tambahan, Moderat (dengan upaya tambahan mengoptimalkan potensi yang ada sesuai kemampuan stakeholder), Optimis (dengan upaya tambahan dengan mengerahkan potensi yang ideal), Akselerasi (dengan upaya tambahan dan intervensi). Berikut adalah hasil proyeksi skenario.

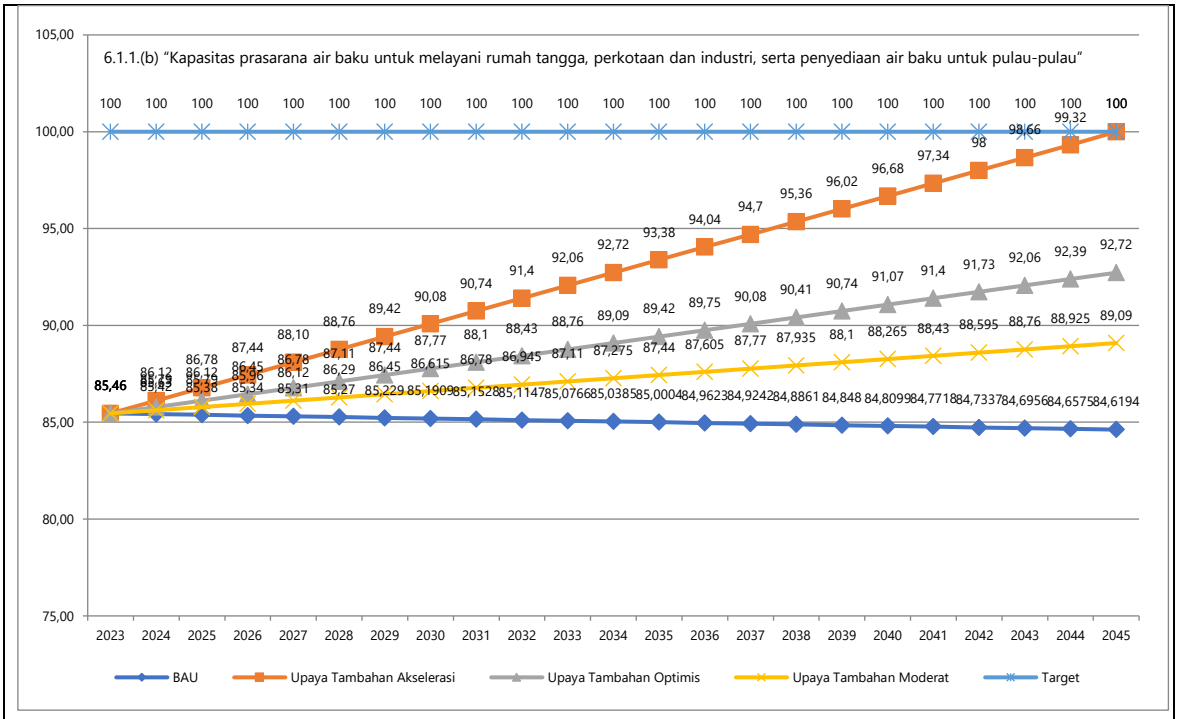


Gambar 6. 27 Proyeksi Capaian Indikator 6.1.1.(a) sampai Tahun 2045

Berdasarkan gap proyeksi capaian, dapat diketahui gap tertinggi apabila menggunakan skenario BAU , tetapi jika menggunakan skenario optimis masih belum mencapai target nasional tahun 2045, sehingga skenario yang terbaik untuk mencapai target adalah skenario Akselerasi dengan mewujudkan akses merata terhadap layanan sumber air minum layak.

Tabel 6. 16 Proyeksi Capaian Indikator 6.1.1 (a)

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BAU	63,30	63,27	63,24	63,21	63,19	63,16	63,1254	63,0956	63,0658	63,036	63,0062	62,9764	62,9466	62,9168	62,887	62,8572	62,8274	62,7976	62,7678	62,738	62,7082	62,6784	62,648
Upaya Tambahan Akselerasi	63,30	64,97	66,64	68,31	69,98	71,65	73,32	74,99	76,66	78,33	80	81,67	83,34	85,01	86,68	88,35	90,02	91,69	93,36	95,03	96,7	98,37	100
Upaya Tambahan Optimis	63,30	64,13	64,97	65,80	66,64	67,47	68,304	69,138	69,972	70,806	71,64	72,474	73,308	74,142	74,976	75,81	76,644	77,478	78,312	79,146	79,98	80,814	81,64
Upaya Tambahan Moderat	63,30	63,72	64,13	64,55	64,97	65,39	65,802	66,219	66,636	67,053	67,47	67,887	68,304	68,721	69,138	69,555	69,972	70,389	70,806	71,223	71,64	72,057	72,47
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

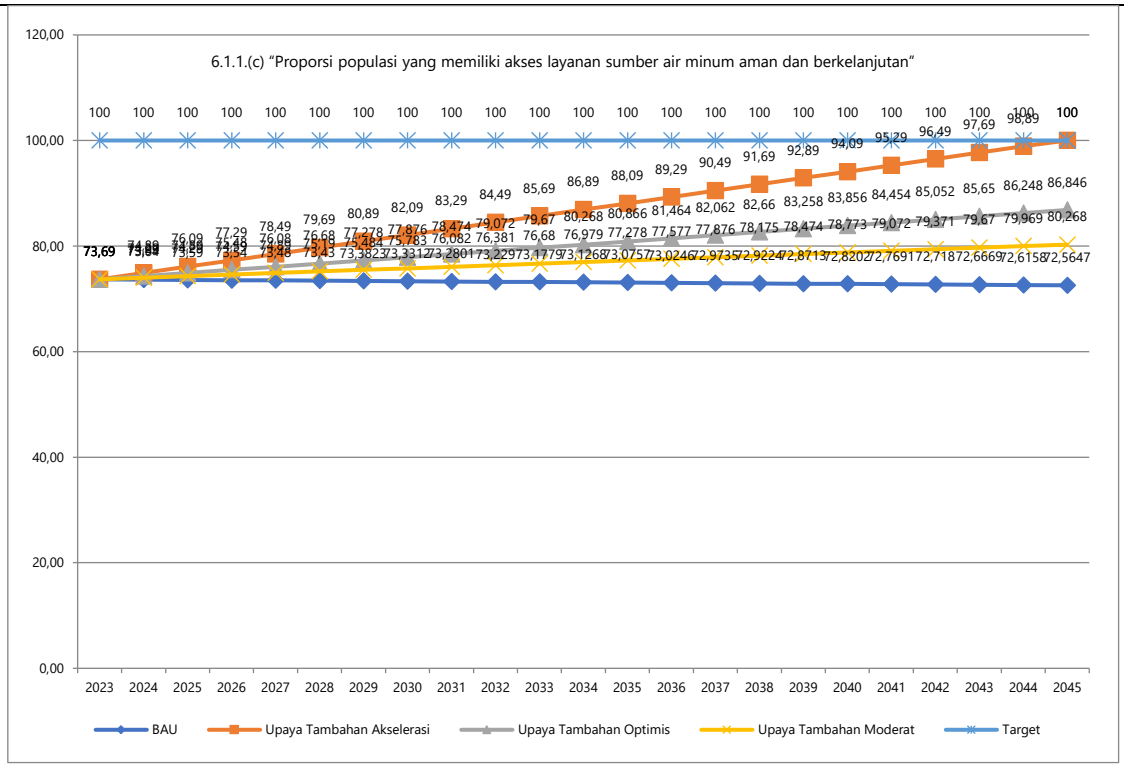


Gambar 6. 28 Proyeksi Capaian Indikator 6.1.1.(b) sampai Tahun 2045

Berdasarkan gap proyeksi capaian, dapat diketahui gap tertinggi apabila menggunakan skenario BAU, tetapi jika menggunakan skenario optimis masih belum mencapai target nasional tahun 2045, sehingga skenario yang terbaik untuk mencapai target adalah skenario Akselerasi.

Tabel 6. 17 Proyeksi Capaian Indikator 6.1.1 (b)

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	204
BAU	85,46	85,42	85,38	85,34	85,31	85,27	85,229	85,1909	85,1528	85,1147	85,0766	85,0385	85,0004	84,9623	84,9242	84,8861	84,848	84,8099	84,7718	84,7337	84,6956	84,6575	84,6
Upaya Tambahan Akseleras	85,46	86,12	86,78	87,44	88,10	88,76	89,42	90,08	90,74	91,4	92,06	92,72	93,38	94,04	94,7	95,36	96,02	96,68	97,34	98	98,66	99,32	10
Upaya Tambahan Optimis	85,46	85,79	86,12	86,45	86,78	87,11	87,44	87,77	88,1	88,43	88,76	89,09	89,42	89,75	90,08	90,41	90,74	91,07	91,4	91,73	92,06	92,39	92,
Upaya Tambahan Moderat	85,46	85,63	85,79	85,96	86,12	86,29	86,45	86,615	86,78	86,945	87,11	87,275	87,44	87,605	87,77	87,935	88,1	88,265	88,43	88,595	88,76	88,925	89,
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10

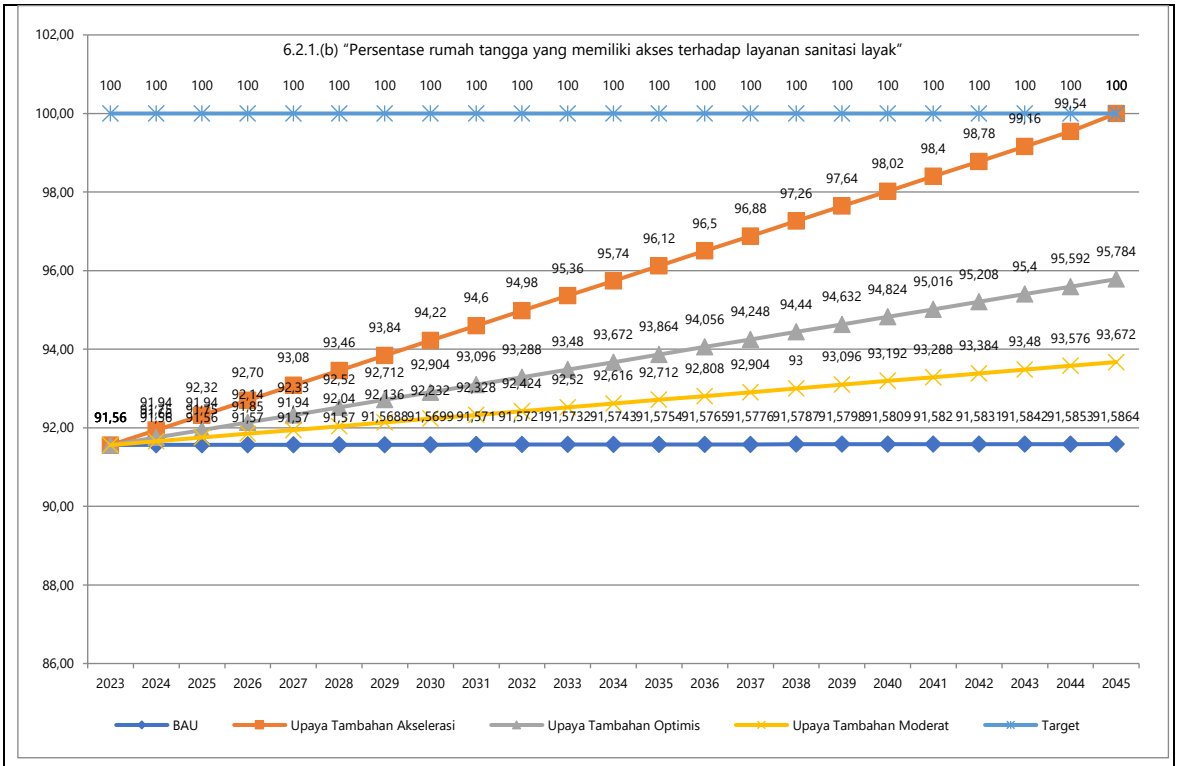


Gambar 6. 29 Proyeksi Capaian Indikator 6.1.1.(c) sampai Tahun 2045

Berdasarkan gap proyeksi capaian, dapat diketahui gap tertinggi apabila menggunakan skenario BAU , tetapi jika menggunakan skenario optimis masih belum mencapai target nasional tahun 2045, sehingga skenario yang terbaik untuk mencapai target adalah skenario Akselerasi dengan mewujudkan akses merata terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

Tabel 6. 18 Proyeksi Capaian Indikator 6.1.1 (c)

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	20
BAU	73,69	73,64	73,59	73,54	73,48	73,43	73,3823	73,3312	73,2801	73,229	73,1779	73,1268	73,0757	73,0246	72,9735	72,9224	72,8713	72,8202	72,7691	72,718	72,6669	72,6158	72,5
Upaya Tambahan Akseleras	73,69	74,89	76,09	77,29	78,49	79,69	80,89	82,09	83,29	84,49	85,69	86,89	88,09	89,29	90,49	91,69	92,89	94,09	95,29	96,49	97,69	98,89	1
Upaya Tambahan Optimis	73,69	74,29	74,89	75,48	76,08	76,68	77,278	77,876	78,474	79,072	79,67	80,268	80,866	81,464	82,062	82,66	83,258	83,856	84,454	85,052	85,65	86,248	86,
Upaya Tambahan Moderat	73,69	73,99	74,29	74,59	74,89	75,19	75,484	75,783	76,082	76,381	76,68	76,979	77,278	77,577	77,876	78,175	78,474	78,773	79,072	79,371	79,67	79,969	80,
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1

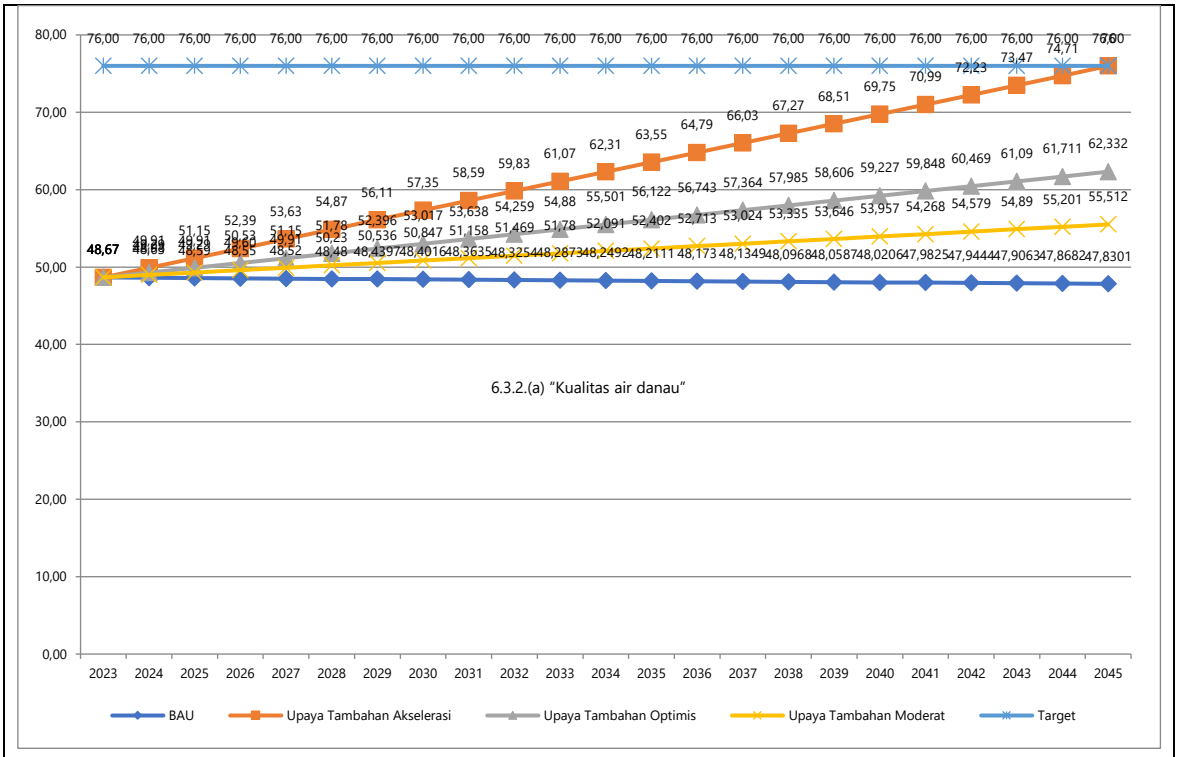


Gambar 6. 30 Proyeksi Capaian Indikator 6.2.1.(b) sampai Tahun 2045

Berdasarkan gap proyeksi capaian, dapat diketahui gap tertinggi apabila menggunakan skenario BAU , tetapi jika menggunakan skenario optimis masih belum mencapai target nasional tahun 2045, sehingga skenario yang terbaik untuk mencapai target adalah skenario Akselerasi dengan mewujudkan akses merata terhadap layanan sanitasi layak.

Tabel 6. 19 Proyeksi Capaian Indikator 6.2.1 (b)

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	20
BAU	91,56	91,56	91,56	91,57	91,57	91,57	91,5688	91,5699	91,571	91,5721	91,5732	91,5743	91,5754	91,5765	91,5776	91,5787	91,5798	91,5809	91,582	91,5831	91,5842	91,5853	91,5
Upaya Tambahan Akselerasi	91,56	91,94	92,32	92,70	93,08	93,46	93,84	94,22	94,6	94,98	95,36	95,74	96,12	96,5	96,88	97,26	97,64	98,02	98,4	98,78	99,16	99,54	1
Upaya Tambahan Optimis	91,56	91,75	91,94	92,14	92,33	92,52	92,712	92,904	93,096	93,288	93,48	93,672	93,864	94,056	94,248	94,44	94,632	94,824	95,016	95,208	95,4	95,592	95,
Upaya Tambahan Moderat	91,56	91,66	91,75	91,85	91,94	92,04	92,136	92,232	92,328	92,424	92,52	92,616	92,712	92,808	92,904	93	93,096	93,192	93,288	93,384	93,48	93,576	93,
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1



Gambar 6. 31 Proyeksi Capaian Indikator 6.3.2.(a) sampai Tahun 2045

Berdasarkan gap proyeksi capaian, dapat diketahui gap tertinggi apabila menggunakan skenario BAU , tetapi jika menggunakan skenario optimis masih belum mencapai target nasional tahun 2045, sehingga skenario yang terbaik untuk mencapai target adalah skenario Akselerasi dengan mewujudkan kualitas air danau yang lebih baik.

Tabel 6. 20 Proyeksi Capaian Indikator 6.3.2 (a)

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BAU	48,67	48,63	48,59	48,55	48,52	48,48	48,4397	48,4016	48,3635	48,3254	48,2873	48,2492	48,2111	48,173	48,1349	48,0968	48,0587	48,0206	47,9825	47,9444	47,9063	47,8682	47
Upaya Tambahan Akselerasi	48,67	49,91	51,15	52,39	53,63	54,87	56,11	57,35	58,59	59,83	61,07	62,31	63,55	64,79	66,03	67,27	68,51	69,75	70,99	72,23	73,47	74,71	
Upaya Tambahan Optimis	48,67	49,29	49,91	50,53	51,15	51,78	52,396	53,017	53,638	54,259	54,88	55,501	56,122	56,743	57,364	57,985	58,606	59,227	59,848	60,469	61,09	61,711	62
Upaya Tambahan Moderat	48,67	48,98	49,29	49,60	49,91	50,23	50,536	50,847	51,158	51,469	51,78	52,091	52,402	52,713	53,024	53,335	53,646	53,957	54,268	54,579	54,89	55,201	55
Target	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	7

Rekomendasi 1

Akar permasalahan : Keberadaan infrastruktur pengelolaan lumpur tinja Kabupaten Gresik belum mencukupi sehingga berdampak pada Beban BOD yang tinggi pada beberapa kecamatan.

Sasaran :

1. Meningkatkan kestabilan dan keberlanjutan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah

Strategi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat mencemari air sungai, termasuk pemeriksaan industri, pertanian, dan pembuangan limbah domestik.
2. Memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pencemaran air sungai

3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memastikan pengelolan limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan

Arahan Kebijakan :

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Mendorong penelitian dan inovasi dalam pengelolaan kualitas air sungai, termasuk pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan limbah dan monitoring kualitas air sungai	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan)	Dinas Lingkungan Hidup	39,0	100
Mendorong kesiapan infrastruktur daerah dalam meningkatkan daya tampung lingkungan hidup	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	72,42	76,12
Membangun kemitraan strategis antar pemerintah dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang efektif	Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup	71,94	96,98

Rekomendasi 2

Akar Permasalahan : Hasil analisis status mutu air sungai berdasarkan perhitungan indeks pencemaran air (Indeks Kualitas Air) diketahui sungai-sungai di Kabupaten Gresik terdapat beberapa sungai saja yang memenuhi baku mutu air, sedangkan sungai tercemar ringan dan sungai tercemar sedang masih banyak terdapat di wilayah Utara dan selatan Kabupaten Gresik.

Sasaran:

1. Mengurangi beban limbah B3
2. Mengurangi tingkat pencemaran ke badan air akibat aktivitas pemanfaatan ruang

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur drainage dan limbah untuk mengurangi limbah yang masuk ke badan air
2. Meningkatkan akses layanan dan efektivitas fasilitas pengolahan limbah B3 Regional

Arahan Kebijakan:

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Meningkatkan keterlibatan mitra/stakeholder pengembangan infrastruktur pengolahan limbah B3	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas lingkungan Hidup	72,42	76,12
Mengembangkan standar dan regulasi yang ketat terkait pengelolaan limbah B3 dan aktivitas domestik yang berpotensi mencemari air sungai	Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)	Dinas lingkungan Hidup	71,94	96,98
Meningkatkan program pemantauan kualitas air dan dampak aktivitas pemanfaatan ruang di sekitar badan air	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan)	Dinas lingkungan Hidup	39,0	39,0

6.2.4 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)

Terdapat 1 indikator belum mencapai target yang terdapat di TPB 8 yaitu yaitu indikator 8.3.1* "Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin".

Tabel 6. 21 Tabel Perumusan Rekomendasi TPB Priotitas 8

TPB Prioritas
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
Target
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Nomor Indikator

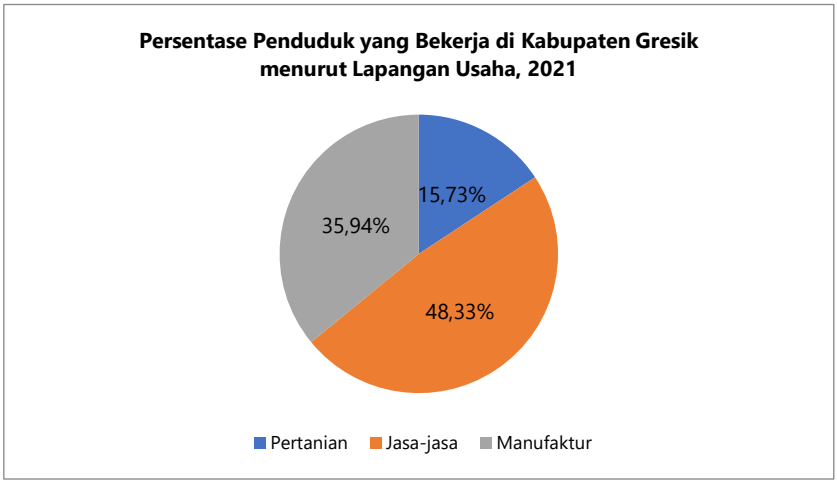
- 8.3.1* "Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin".

Kondisi

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Penduduk Usia Kerja (orang)	512.415	530.386	1.042.801
Angkatan Kerja (orang)	438.358	285.688	724.046
Bekerja (orang)	403.521	262.613	666.134
Pengangguran Terbuka (orang)	34.837	23.075	57.912
Bukan Angkatan Kerja (orang)	74.057	244.698	318.755
TPAK (%)	85,55	54	69
TPT (%)	7,95	8,08	8,00

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun. TPAK Kabupaten Gresik sebesar 69,43 persen, menurun 2,90 persen poin dibandingkan TPAK 2019, yaitu sebesar 66,53 persen. TPAK memberikan gambaran bahwa dari 100 penduduk usia kerja terdapat 69 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja atau mencari kerja). Selain itu, TPT Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 8,00 persen, menurun 0,21 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini memberikan gambaran bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat 8 orang yang menganggur.

Pada tahun 2021, sektor tersier masih menjadi primadona yang mampu menyerap tenaga kerja paling banyak atau hampir 48,33 persen dari total penduduk bekerja. Sektor tersier ini meliputi sektor perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasajasa. Selain itu, sektor sekunder yang meliputi sektor industri, listrik, gas, dan air bersih, dan konstruksi ini juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan 35,94 persen cukup menarik banyak tenaga kerja. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terendah di Kabupaten Gresik, yaitu sebesar 15,73 persen pada tahun 2021.



Hasil Survei Pekerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menunjukan terjadinya penurunan jumlah pekerja pada sektor industri pengolahan akibat efek pandemi sebesar 8,93 persen.

Sebagian pabrik tidak mampu bertahan dan mulai tutup secara permanen atau tutup sementara. Sebagian pabrik secara bertahap mengurangi jumlah pekerja dan produknya akibat situasi dan permintaan terhadap produksi yang menurun. Peningkatan permintaan dolar AS sebagai respon ketidakpastian perekonomian global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bank Indonesia mencatat, selama tahun 2020 secara rerata nilai tukar rupiah melemah 2,66 persen. Hal ini membuat sektor industri manufaktur semakin kesulitan, terutama dalam mendapatkan bahan baku dan menjual hasil produksi.

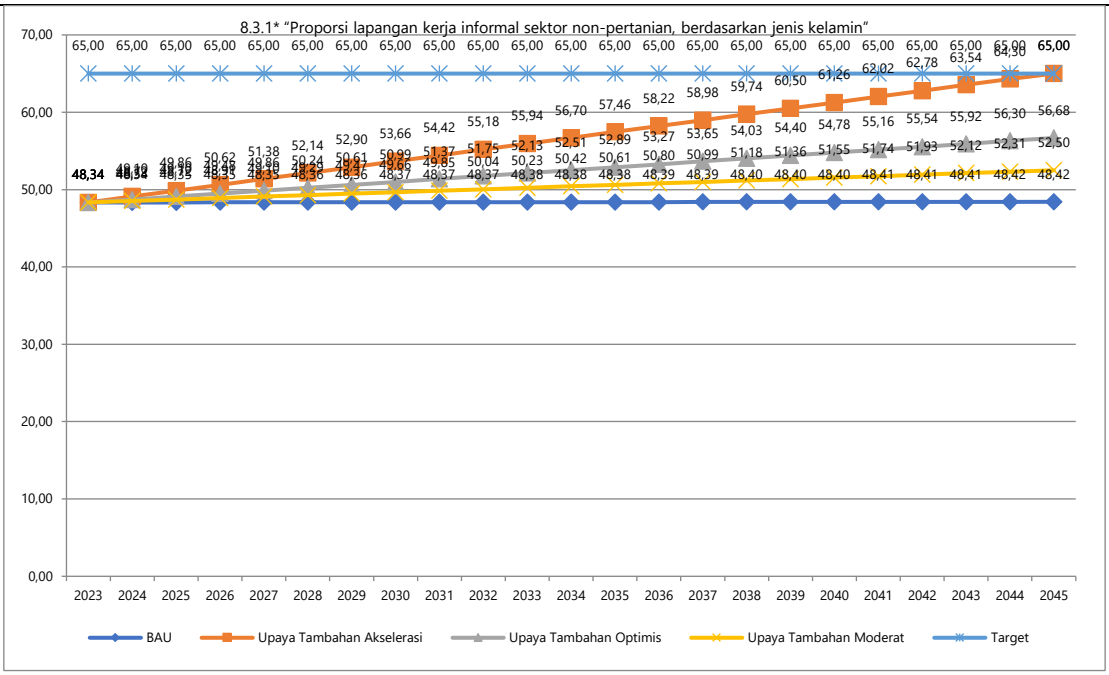
Dampak COVID-19 dirasakan juga oleh industri pengolahan skala mikro dan kecil (IMK). Kondisi ini berbeda dengan saat krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, dimana IMK saat itu mampu bertahan dan bahkan menjadi salah satu pelaku ekonomi yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Meskipun nilai tambah atas produksi yang dihasilkan IMK relatif sangat kecil dibandingkan industri pengolahan skala menengah dan besar, namun kelompok industri ini mampu menyerap pekerja dalam jumlah besar, terutama pekerja perempuan di sektor informal. Survei IMK tahun 2019 menunjukkan serapan pekerja sebanyak 9,58 juta pekerja (49,88 persen dari pekerja sektor industri manufaktur), dimana 48,22% diantaranya adalah pekerja perempuan.

Akar Permasalahan

1. Hasil Survei Pekerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menunjukan terjadinya penurunan jumlah pekerja pada sektor industri pengolahan akibat efek pandemi sebesar 8,93 persen. Sebagian pabrik tidak mampu bertahan dan mulai tutup secara permanen atau tutup sementara. Sebagian pabrik secara bertahap mengurangi jumlah pekerja dan produknya akibat situasi dan permintaan terhadap produksi yang menurun.

Alternatif Skenario

Penentuan skenario yang diterapkan dalam pencapaian target TPB menggunakan metode proyeksi skenario dengan 3 skema, yaitu BAU/tanpa upaya tambahan, Moderat (dengan upaya tambahan mengoptimalkan potensi yang ada sesuai kemampuan stakeholder), Optimis (dengan upaya tambahan dengan mengerahkan potensi yang ideal), Akselerasi (dengan upaya tambahan dan intervensi). Berikut adalah hasil proyeksi skenario.



Gambar 6. 32 Proyeksi Capaian Indikator 8.3.1 sampai Tahun 2045

Berdasarkan gap proyeksi capaian, dapat diketahui gap tertinggi apabila menggunakan skenario BAU , tetapi jika menggunakan skenario optimis masih belum mencapai target nasional tahun 2045, sehingga skenario yang terbaik untuk mencapai target adalah skenario Akselerasi.

Tabel 6. 22 Proyeksi Capaian Indikator 8.3.1

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	20
BAU	48,34	48,34	48,35	48,35	48,35	48,36	48,36	48,37	48,37	48,37	48,38	48,38	48,38	48,39	48,39	48,40	48,40	48,40	48,41	48,41	48,41	48,42	48,
Upaya Tambahan Akselerasi	48,34	49,10	49,86	50,62	51,38	52,14	52,90	53,66	54,42	55,18	55,94	56,70	57,46	58,22	58,98	59,74	60,50	61,26	62,02	62,78	63,54	64,30	65,
Upaya Tambahan Optimis	48,34	48,72	49,10	49,48	49,86	50,24	50,61	50,99	51,37	51,75	52,13	52,51	52,89	53,27	53,65	54,03	54,40	54,78	55,16	55,54	55,92	56,30	56,
Upaya Tambahan Moderat	48,34	48,53	48,72	48,91	49,10	49,29	49,47	49,66	49,85	50,04	50,23	50,42	50,61	50,80	50,99	51,18	51,36	51,55	51,74	51,93	52,12	52,31	52,
Target	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,

Rekomendasi 1

Akar permasalahan : Hasil Survei Pekerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menunjukan terjadinya penurunan jumlah pekerja pada sektor industri pengolahan akibat efek pandemi sebesar 8,93 persen. Sebagian pabrik tidak mampu bertahan dan mulai tutup secara permanen atau tutup sementara. Sebagian pabrik secara bertahap mengurangi jumlah pekerja dan produknya akibat situasi dan permintaan terhadap produksi yang menurun.

Sasaran :

1. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor informal
2. Mendorong pengembangan sektor industri

Strategi :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan sehingga memperbesar kesempatan penyerapan tenaga kerja pada sektor informal
2. Meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pengawasan proses industri dan pengendalian keuangan

Arahan Kebijakan :

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata)	Dinas Pendidikan	58,9	67,9
Meningkatkan keterlibatan mitra/stakeholder dalam inovasi pengembangan proses industri hulu-hilir	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	20,8	28,0

6.2.5 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 11 (Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan)

Terdapat 2 indikator belum mencapai target yang terdapat di TPB 11 yaitu:

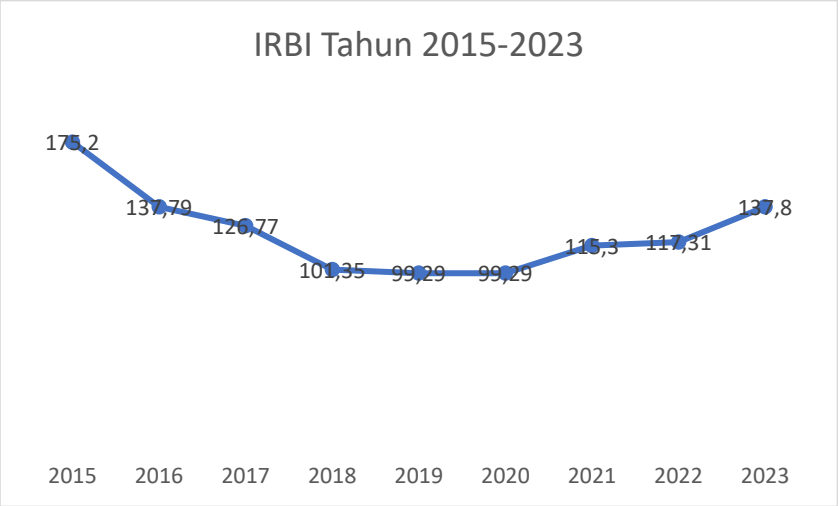
- 11.5.1.(a) "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)"
- 11.5.2.(a) "Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana"

Perumusan skenario indikator belum mencapai target TPB 12 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 23 Tabel Perumusan Rekomendasi TPB Prioritas 12

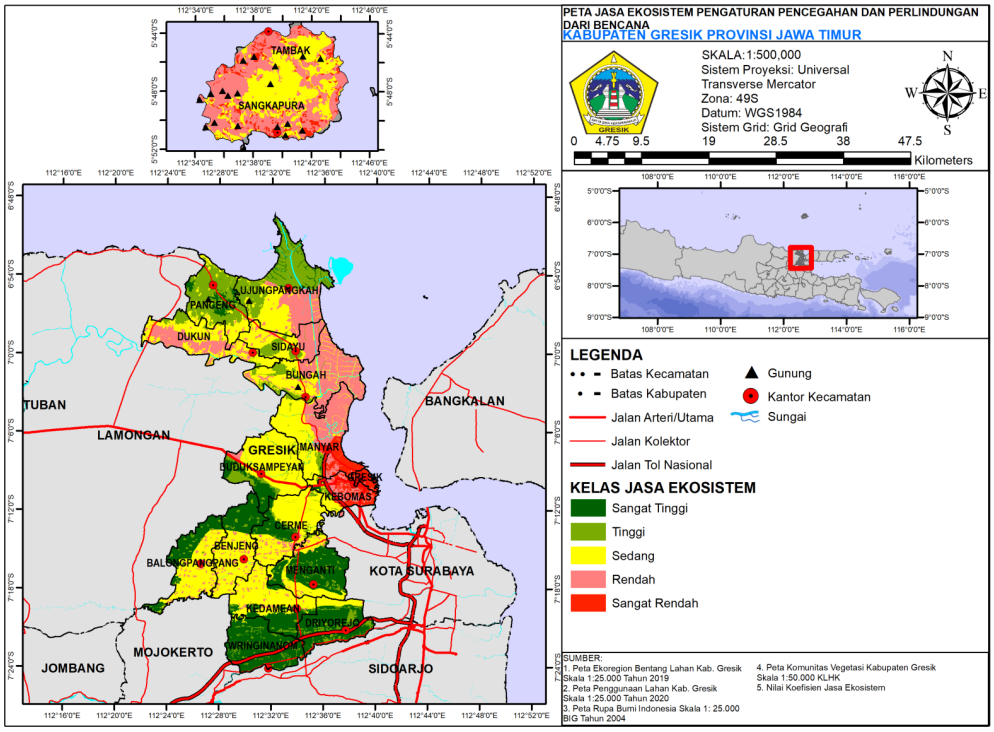
TPB Prioritas Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
Target Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
Nomor Indikator - 11.5.1.(a) "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)" - 11.5.2.(a) "Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana"
Kondisi

Sungai Kali Lamong merupakan sungai utama yang mengalir melewati Kabupaten Gresik. Sungai Kali Lamong merupakan anak dari Sungai Bengawan Solo dengan luas DAS kurang lebih 720 km2 dan panjang alur sungai kurang lebih 103 km serta memiliki 7 anak sungai. Pada musim penghujan, sungai Kali Lamong tidak mampu menampung semua debit yang masuk, akibatnya terjadi banjir di sekitar Kali Lamong. Penyebab utamanya yaitu curah hujan yang tinggi namun tidak diimbangi oleh kapasitas sungai. Oleh karena itu, banyak permukiman yang terkena lupasan dari Sungai Kali Lamong sehingga mengalami kebanjiran. Pada tahun 2022 terjadi 84 kejadian banjir di Kabupaten Gresik yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Kedamean.



Gambar 6. 33 Proyeksi Skenario Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana

IRBI Kabupaten Gresik tahun 2023 mengalami peningkatan, hal tersebut dapat disebabkan oleh menurunnya angka kapasitas. Jasa Ekosistem pencegahan bencana banjir mayoritas berada pada kelas sedang sebesar 49892,52 Ha dan kelas rendah sebesar 27933,93 Ha. Kerugian akibat bencana bancir berupa rusaknya rumah warga, rusaknya lahan sawah serta rusaknya infrastruktur seperti jembatan. Pada tahun 2022, bencana banjir yang menerjang Kabupaten Gresik menyebabkan 2.221 unit rumah rusak.



Gambar 6. 34 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

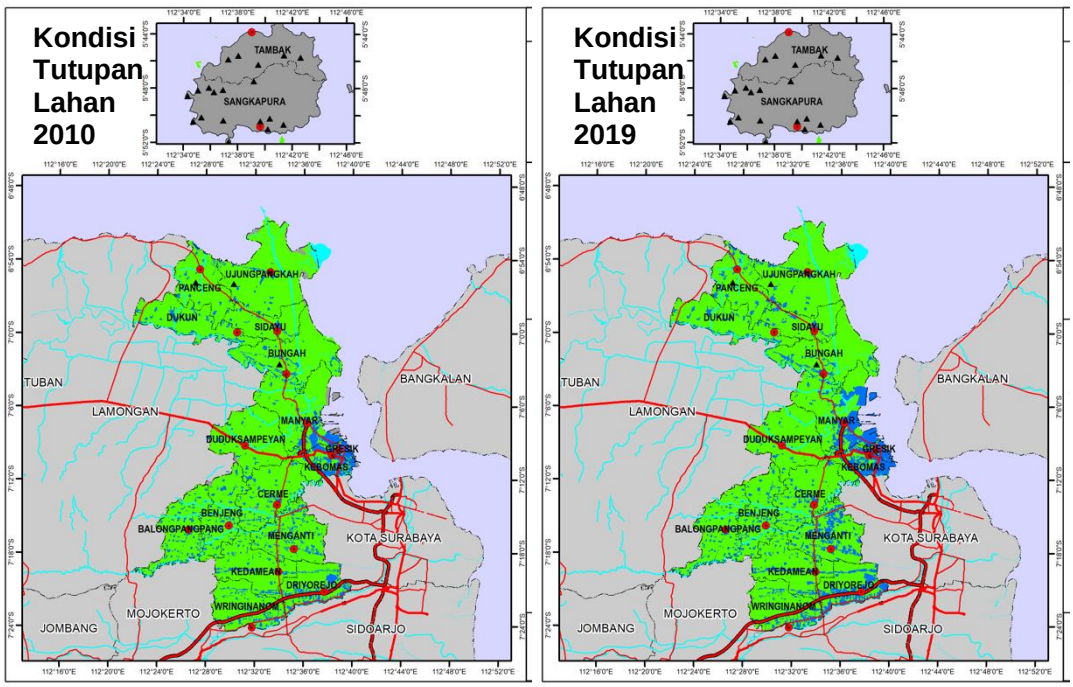
Akar Masalah

1. Meningkatnya alih fungsi lahan dan urbanisasi berdampak pada peningkatan kerentanan

   Peningkatan alih fungsi lahan dipengaruhi oleh kegiatan induatri. Terjadinya alih fungsi untuk mendukung kegiatan industry, seperti pengadaan permukiman karyawan, kawasan industry, pergudangan dan sebagainya.

	2010 (Ha)	2019 (Ha)
Lahan Terbangun	13.721,62	18.385,44
Lahan Tidak Terbangun	111.358,9	112.568,3

   Perubahan lahan tidak terbangun menjadi terbangun selama kurun 10 tahun terakhir sebesar 4.663,82 Ha. Dari luasan hutan yang ada di Kabupaten Gresik, telah terjadi penurunan jumlah luasan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena tekanan terhadap kawasan hutan untuk pengembangan investasi industri dan pergudagan yang cukup besar. Dari data status lingkungan hidup Kabupaten Gresik tahun 2017 diketahui bahwa sebesar 3.293,69 ha kawasan hutan mengalami pelepasan untuk pengembangan industri terutama di wilayah Kecamatan Kebomas.



2. Kerusakan lahan di Kabupaten Gresik terjadi di lahan pertanian, perikanan, atau konservasi alam. Saat lahan pertanian digunakan secara intensif dan tidak sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan, erosi dan kekeringan dapat terjadi sehingga menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan ketidakstabilan pasokan pangan.

Tabel 6. 24 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

No.	Kabupaten / Kota/ Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan	hutan	non hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Gresik		26,61		1768,28		3177,25		20697,89		

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Gresik, 2022

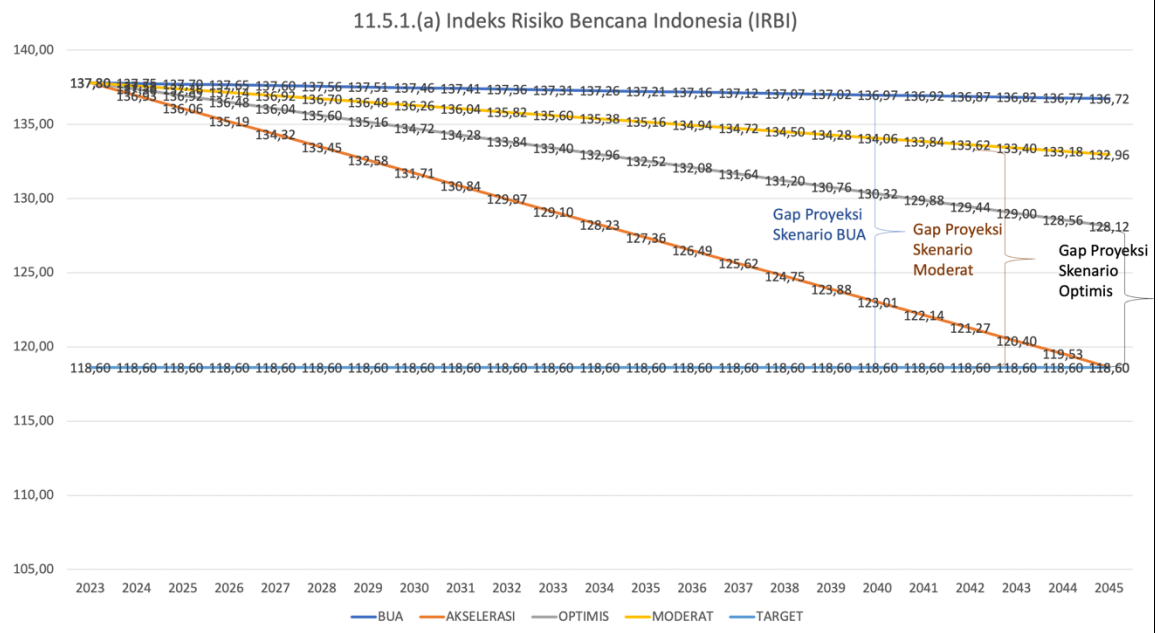
Pada lahan perikanan, penggunaan lahan tambak yang intensif dan tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lahan. Kerusakan lahan pada lahan perikanan dapat menyebabkan ternjadinya intrusi air laut, penurunan kualitas air, dan kerusakana ekosistem terumbu karang. Pada konservasi alam, jika lahan hutan atau lahan konservasi lainnya digunakan untuk pengambilan kayu secara ilegal, degradasi lingkungan dapat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan ancaman pada keberlangsungan ekosistem.

Alternatif Skenario

Penentuan scenario yang diterapkan dalam pencapaian target TPB menggunakan modeto proyeksi scenario dengan 3 skema, yaitu BUA/Tanpa Upaya tambahan, Moderat (Dengan

upaya tambahan mengoptimalkan potensi yang ada sesuai kemampuan stakeholder), Optimis (Dengan Upaya tambahan dengan mengerahkan potensi yang ideal), Akselerasi (Dengan Upaya tambahan dan intervensi). Berikut adalah hasil proyeksi scenario.

Indiaktor TPB11 berikutnya yang belum mencapai target adalah indikator 11.5.1 (a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)". Target nasional IRBI menurun hingga 118,60.



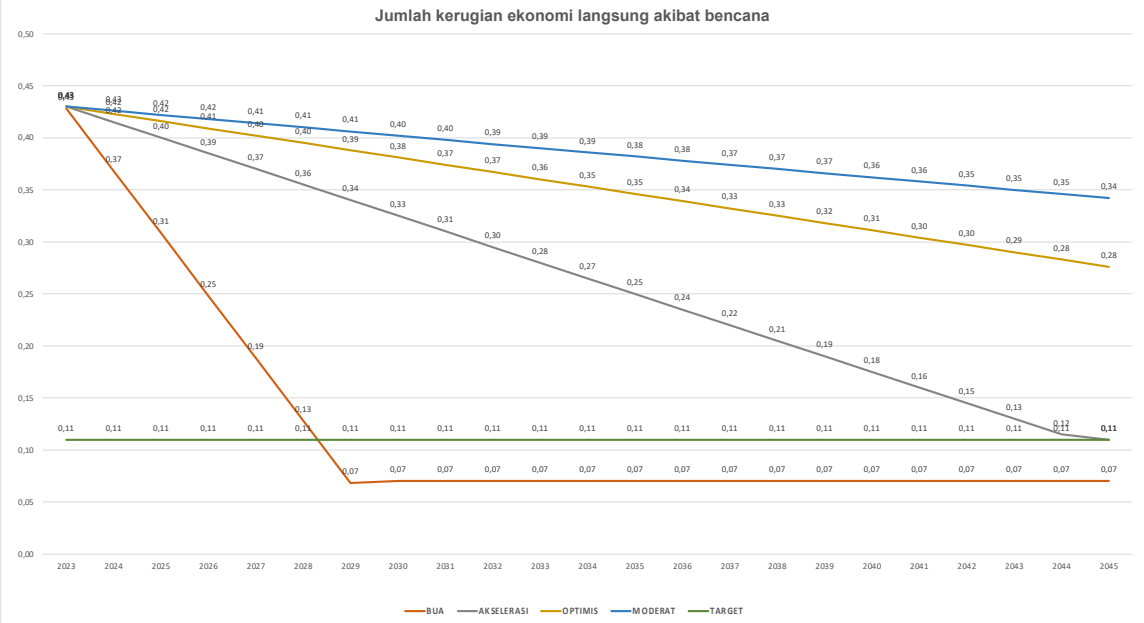
Gambar 6. 35 Proyeksi Capaian Indikator 11.5.1.(a) sampai Tahun 2045

Berdasarkan hasil proyeksi scenario, indikator 11.5.1.(a) dapat mencapai target nasional dengan scenario upaya tambahan akselerasi. IRBI dapat mencapai target nasional pada periode RPJMD ke-empat.

Tabel 6. 25 Proyeksi Capaian Indikator 11.5.1 (a)

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
BUA	137,80	137,75	137,70	137,65	137,60	137,56	137,51	137,46	137,41	137,36	137,31	137,26	137,21	137,16	137,12	137,07	137,02	136,97	136,92	136,87	136,82	136,77
AKSELERASI	137,80	136,93	136,06	135,19	134,32	133,45	132,58	131,71	130,84	129,97	129,10	128,23	127,36	126,49	125,62	124,75	123,88	123,01	122,14	121,27	120,40	119,53
OPTIMIS	137,80	137,36	136,92	136,48	136,04	135,60	135,16	134,72	134,28	133,84	133,40	132,96	132,52	132,08	131,64	131,20	130,76	130,32	129,88	129,44	129,00	128,56
MODERAT	137,80	137,58	137,36	137,14	136,92	136,70	136,48	136,26	136,04	135,82	135,60	135,38	135,16	134,94	134,72	134,50	134,28	134,06	133,84	133,62	133,40	133,18

Indiaktor TPB11 berikutnya yang belum mencapai target adalah indikator 11.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Target nasional 2045 yang ditetapkan untuk proporsi kerugian akibat bencana sebesar 0,11%, sehingga dengan *baseline* kabupaten Gresik yang berada pada nilai 0,43% perlu di hitung proyeksi capaiannya pada tahun 2045 terhadap 4 skenario, yaitu BUA, Moderat, optimis dan Akselerasi.



Gambar 6. 36 Proyeksi Capaian Indikator 11.5.2.(a) sampai Tahun 2045

Berdasarkan skenario tersebut dapat diketahui bahwa dengan scenario BUA, target terhadap nilai kerugian akibat kencana bisa memenuhi target nasional di tahun 2028 atau periode pertama RPJPMD Kab. Gresik, sehingga scenario yang bisa di terapkan untuk indiaktor tersebut adalah BUA atau tanpa upaya tambahan.

Tabel 6. 26 Proyeksi Capaian Indikator 11.5.2 (a)

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
BUA	0,43	0,37	0,31	0,25	0,19	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
AKSELERASI	0,43	0,42	0,40	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
OPTIMIS	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28
MODERAT	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34

Rekomendasi 1

Akar Permasalahan: Meningkatnya alih fungsi lahan dan urbanisasi berdampak pada peningkatan kerentanan

Sasaran:

1. Meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana dengan mengintegrasikan perencanaan tata kota yang bijak dan mitigasi bencana dalam pengembangan perkotaan
2. Mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata kota, pengurangan risiko bencana, dan pemantauan alih fungsi lahan

Strategi:

1. Mengembangkan rencana tata kota yang memprioritaskan keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana
2. Mengintegrasikan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur

3. publik dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan pentingnya tindakan pencegahan

Arah Kebijakan:

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Mengembangkan indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup parameter-parameter seperti kualitas udara, air, lahan hijau, keberlanjutan energi, dan mitigasi risiko bencana	Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE5. Lingkungan hidup berkualitas) Misi 8: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan BPBD	72,42 (2022)	76,12
Menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tahan bencana serta meminimalisir kerugian ketika bencana terjadi	Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE17. Resiliensi terhdap bencana dan perubahan iklim)	DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan BPBD	0,14	0,22
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan	Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Diplomasi (IE10. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaga Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial)	Bakesbangpol	Sedang	Tinggi

Rekomendasi 2

Akar Permasalahan: Kerusakan lahan di Kabupaten Gresik terjadi di lahan pertanian, perikanan, atau konservasi alam

Sasaran:

1. Mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam yang penting untuk keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam
2. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian dan perikanan

Strategi:

1. Meningkatkan upaya konservasi lahan basah dan hutan mangrove sebagai bagian dari perlindungan ekosistem alam
2. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan ekologi, termasuk penggunaan pupuk organik, pertanian organik, dan rotasi tanaman

Arahan Kebijakan:

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan dan dampaknya terhadap pemulihan dan konservasi lingkungan dalam menjaga keanakaragaman hayati	Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE5. Lingkungan hidup berkualitas)	DLH dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,38 (2022)	0,15
Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani, nelayan, dan masyarakat lokal tentang praktik-praktik berkelanjutan dan pentingnya pelestarian lingkungan guna mencapai *green economy inclusive*	Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE5. Penerapan Ekonomi Hijau)	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag	70,80	90,65
Membangun kemitraan dengan organisasi lingkungan, sektor swasta, universitas, dan pemerintah lainnya untuk mendukung inisiatif berkelanjutan	Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE13. Agama bermaslahat dan berkebudayaan maju)	Filantropi	55,57 (2021)	68,15

6.2.6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 12 (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Terdapat 1 indikator belum mencapai target yang terdapat di TPB 12 yaitu: 12.7.1.(a) "Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister"

Perumusan skenario indikator belum mencapai target TPB 12 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 27 Tabel Perumusan Rekomendasi TPB Prioritas 12

TPB Prioritas Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
Target Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
Nomor Indikator 12.7.1.(a) "Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister"

Kondisi

Kawasan Industri Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal tersebut juga disebabkan karena adanya pembangunan pelabuhan internasional di Kecamatan Manyar. Pada tahun 2016 Kabupaten Gresik memiliki 6.495 industri atau yang terdaftar sebanyak 194 unit industri. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya kenaikan pertumbuhan industri dapat mancapai angka 373%. Dalam hal kenaikan tersebut maka berdampak pada investasi juga.

Tabel 6. 28 Jumlah Industri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten GresikTahun 2011-2016

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Industri	Industri	6.293	6.369	6.451	6.525	6.653	6.495
Tanda Daftar Industri (TDI)	Unit	61	45	25	30	41	194

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2017

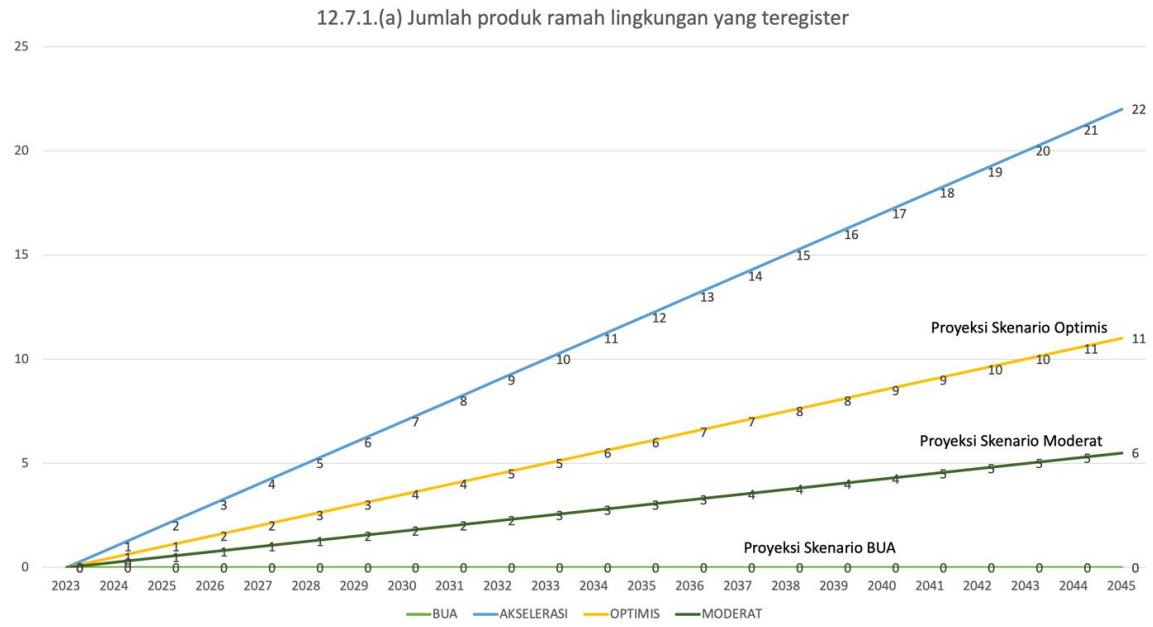
Akar Masalah:

1. Pesatnya pertumbuhan industry di Kabupaten Gresik tidak diimbangi oleh produk ramah lingkungan. Tidak terdapat produk ramah lingkungan di Kabupaten Gresik. Produsen dan pengecer tidak melihat permintaan yang cukup besar untuk produk ramah lingkungan, sehingga tidak ada yang memproduksi atau menjual produk ramah lingkungan
2. Masyarakat tidak sepenuhnya menyadari pentingnya produk ramah lingkungan atau mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang produk-produk tersebut

Alternatif Skenario:

Penentuan scenario yang diterapkan dalam pencapaian target TPB menggunakan modeto proyeksi scenario dengan 3 skema, yaitu BUA/Tanpa Upaya tambahan, Moderat (Dengan upaya tambahan mengoptimalkan potensi yang ada sesuai kemampuan stakeholder), Optimis (Dengan Upaya tambahan dengan mengerahkan potensi yang ideal), Akselerasi (Dengan Upaya tambahan dan intervensi). Berikut adalah hasil proyeksi scenario.

Indikator 12 belum mencapai target yang terdapat di TPB 12 yaitu: 12.7.1.(a) "Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister"



Gambar 6. 37 Proyeksi Capaian Indikator 12.7.1.(a) sampai Tahun 2045

Target Indikator 12.7.1.(a) adalah meningkat, sehingga dengan meningkatnya produkyang teregister dapat mencapai target dengan sekanrio moderat, optimis dan akselereasi.

Tabel 6. 29 Proyeksi Capaian Indikator 12.7.1 (a)

Skenario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
BUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKSELERASI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIMIS	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
MODERAT	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5

Rekomendasi 1

Akar Permasalahan: Produsen dan pengecer tidak melihat permintaan yang cukup besar untuk produk ramah lingkungan, sehingga tidak ada yang memproduksi atau menjual produk ramah lingkungan

Sasaran:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang manfaat produk ramah lingkungan, termasuk dampak positifnya terhadap lingkungan dan Kesehatan
2. Mendorong produsen dan pengecer untuk memproduksi dan menjual produk ramah lingkungan

Strategi:

1. Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan dan produsen untuk mendorong produksi produk ramah lingkungan dan meningkatkan penawaran di pasar
2. Mendukung program sertifikasi dan labeling yang memungkinkan konsumen mengidentifikasi produk ramah lingkungan secara jelas

Arah Kebijakan:

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda Pembangunan RPJPN 8	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)

Menetapkan regulasi dan standar lingkungan yang mendorong produksi dan penggunaan produk ramah lingkungan.	Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi) Misi 3: Transformasi Tata Kelola (IE9. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif)	DLH dan Diskoperindag	0,60 (2021)	0,84
Memberlakukan pajak atau insentif fiskal yang mendukung produk ramah lingkungan atau memberikan insentif kepada produsen dan pengecer yang memproduksi atau menjual produk tersebut	Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global) Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi (IE11. Stabilitas ekonimi makro)	DLH dan Diskoperindag	51	30 besar

Rekomendasi 2

Akar Permasalahan: Masyarakat tidak sepenuhnya menyadari pentingnya produk ramah lingkungan atau mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang produk-produk tersebut

Sasaran:

Mendorong masyarakat untuk menggunakan lebih banyak produk ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari

Strategi:

1. Memastikan bahwa informasi tentang produk ramah lingkungan, seperti label lingkungan atau sertifikasi, tersedia dengan jelas untuk konsumen
2. Mendorong produsen dan pengecer untuk aktif mempromosikan produk ramah lingkungan dan memberikan insentif kepada konsumen yang memilih produk tersebut

Arahan Kebijakan:

Arahan Kebijakan	**Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN**	**Stakeholder**	**Baseline (2025)**	**Target (2045)**
Menyediakan platform online atau sumber daya yang dapat diakses oleh	Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE6. Transfromasi Digital)	Kominfo	2,3	5,0

masyarakat untuk mencari informasi tentang produk ramah lingkungan.				
Mendukung program sertifikasi dan labeling yang memungkinkan konsumen mengidentifikasi produk ramah lingkungan dengan mudah.		DLH dan Diskoperindag		
Memberlakukan insentif fiskal seperti potongan pajak atau keringanan pajak bagi konsumen yang memilih produk ramah lingkungan	Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi (IE11. Stabilitas ekonimi makro)	Diskoperindag dan Direktorat Jendral Pajak	10,0-12,0	18,0-22,0

6.2.7 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB 15 (Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati)

Terdapat 2 indikator belum mencapai target yang terdapat di TPB 15 yaitu

- 15.1.1.(a) "Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan" dan
- 15.9.1.(a) "Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati"

Tabel 6. 30 Tabel Perumusan Rekomendasi TPB Priotitas 15

TPB Prioritas Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
• Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. • Pada tahun 2030, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
Nomor Indikator - 15.1.1.(a) "Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan" - 15.9.1.(a) "Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati"
Kondisi

Berdasarkan fungsi hutan, kawasan hutan di Kabupaten Gresik memiliki fungsi Hutan Porduksi, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa dengan total luasnya 5.584,43 Ha. Berdasarkan status hutan, kawasan hutan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah Hutan Kota seluas 16,52 Ha.

Tabel 6. 31 Luas Hutan Kabupaten Gresik Berdasarkan Status dan Fungsi

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	1.032,62
2	Hutan Lindung	-
3	Taman Nasional	-
4	Taman Wisata Alam	-
5	Taman Buru	-
6	Cagar Alam	632,81
7	Suaka Margasatwa	3.919,00
8	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	5.584,43
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat *)	
3	Hutan Kota *)	16,52
4	Taman Hutan Raya	-
5	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Sumber : Dokumen IKPLHD, 2023

Jenis spesies dan status flora fauna di Kabupaten cukup beragam, walaupun didominasi spesies dengan status tidak dilindungi tetapi Kabupaten Gresik juga memiliki beberapa spesies yang masuk kategori Endemik, Terancam dan Dilindungi seperti Rusa Bawean (*Axis kuhlii*), Babi Kutil Bawean (*Sus verrucosus*), Babi HUtan (*Sus scrofa*), Kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*), Burung Bubut Jawa (*Centropus nigrorufus*), Elang Tiram (*Pandion haliaetus*), Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Penyu sisik (*Eretmochelys Imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Ular Sanca kembang (*Phyton reticulatus)*, Ular Sanca Bodo (*Phyton bivittatus*) dan Buaya Muara (*Crocodylus porosus*).

Selain ekosistem daratan, Kabupaten Gresik juga memiliki kekayaan ekosistem air berupa terumbu karang seluas 1.344,41 Ha dan mangrove yang tersebar lokasinya di 13 desa dengan rincian luas sebagai berikut.

Tabel 6. 32 Luas Hutan Kabupaten Gresik Berdasarkan Status dan Fungsi

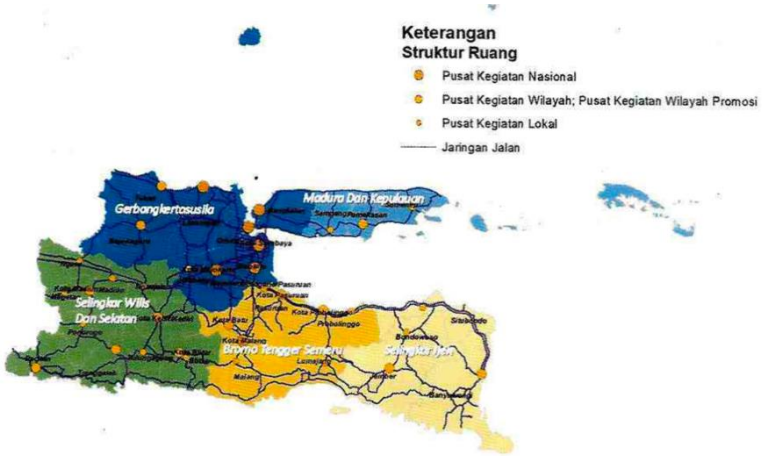
No.	Lokasi Desa	Luas Lokasi (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Pangkah Kulon	35.410
2	Banyuurip	0.100
3	Randuboto	3.800
4	Pangkah Wetan	40.300
5	Pangkah Wetan	37.960
6	Banyuurip	32.00
7	Pangkah Kulon	75.00

8	Pangkah Wetan	140.00
9	Randuboto	33.00
10	Manyarejo	23.00
11	Banyuurip	32.690
12	Pangkah Kulon	347.030
13	Pangkah Wetan	763.990

Sumber : Dokumen IKPLHD, 2023

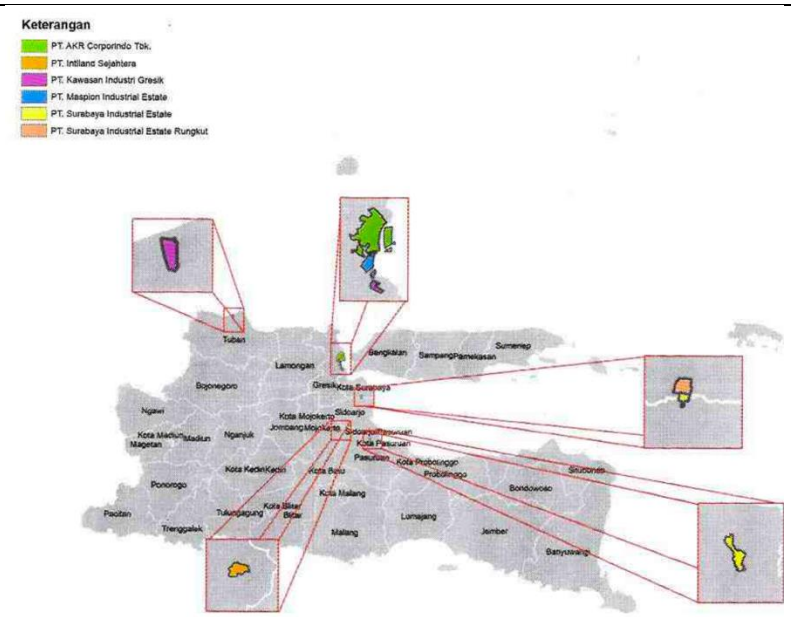
Akar Permasalahan

1. Dinamika tata ruang yang dituntut untuk adaptif dengan program percepatan pembangunan ekonomi kawasan GerbangKertasusila. Berdasarkan Perpres No 80 Tahun 2019, Kabupaten Gresik masuk dalam kawasan prioritas Grebangkertasusilo dengan focus pada bidang industry dan merupakan lokasi untuk program strategis nasional Kawasan Industri JIIPE (Java Integrated Industrial Port Estate)



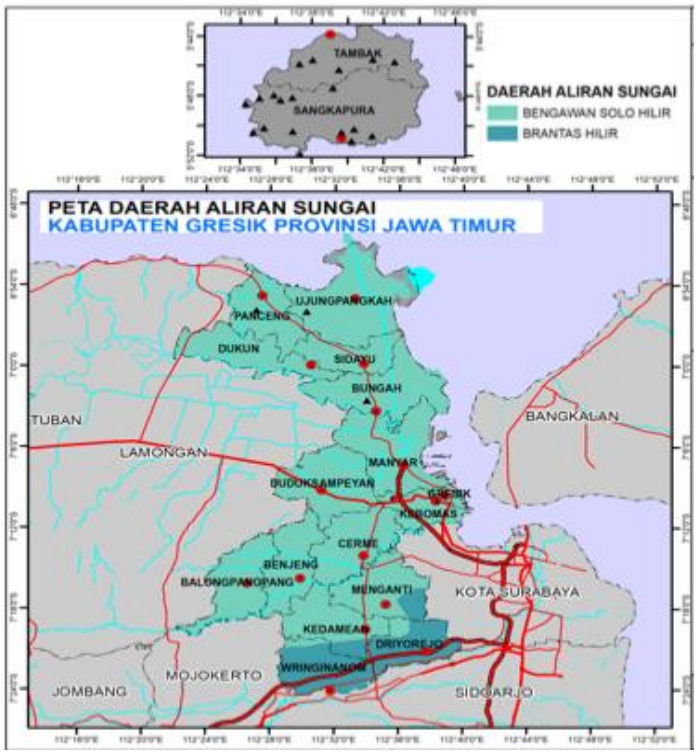
Gambar 6. 38 Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung Provinsi Jawa Timur (Sumber : Perpres no 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan BTS dan Kawasan Selingkar Wilis)

Apabila dibandingkan dengan kawasan prioritas lain, kabupaten Gresik diarahkan untuk memiliki kawasan industry yang paling banyak diantara kawasan prioritas lainnya di Provinsi Jawa Timur seperti dapat dilihat apda gambar berikut



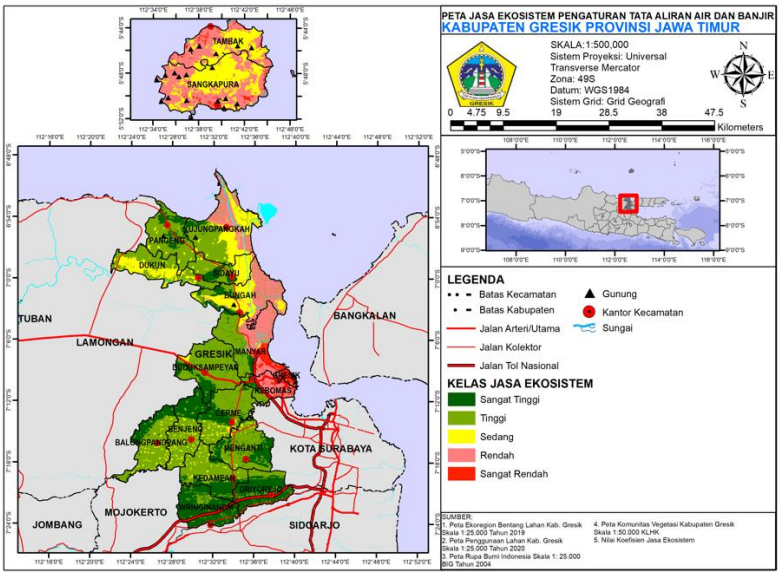
Gambar 6. 39 Kawasan Industri Provinsi Jawa Timur (Sumber : Perpres no 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan BTS dan Kawasan Selingkar Wilis)

2. Alih fungsi lahan pada wilayah DAS Kali Lamong yang merupakan satu sistem pengelolaan sumber daya air dengan DAS Bengawan Solo. Berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Gresik 2023, hingga bulan desember tahun 2020 kerugian yang diakibatkan oleh banjir Kali Lamong mencapai 67,7 miliar, kerugian tersebut meliputi area persawahan dan tambak yang terendam banjir di Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, dan Menganti. Area persawahan yang terendam banjir seluas 2.095 ha dengan total kerugian Rp. 41, 9 miliar dan tambak seluas 1.290 ha dan total kerugian Rp. 25,8 miliar.



Gambar 6. 40 Konstelasi Wilayah Kabupaten Gresik dalam DAS

Apabila di tampalkan dengan kondisi Jasa Ekosistem tata air Kabupaten Gresik, wilayah pesisir Kabupaten Gresik yang masuk dalam kawasan DAS Bengawan Solo memiliki jasa ekosistem tata air yang rendah dan sangat rendah, sehingga indeks ancaman untuk resiko bencana banjir pada kawasan tersebut semakin tinggi. Lebih jelas mengenai klasifikasi jasa ekosistem tata aliran air Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut.

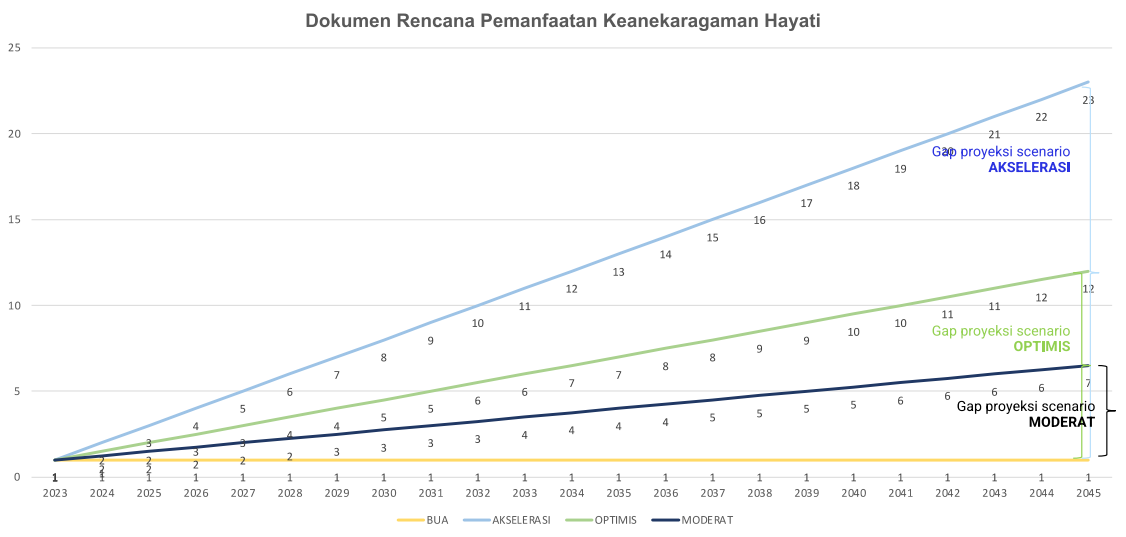


Gambar 6. 41 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Alternatif Skenario

Penentuan skenario yang diterapkan dalam pencapaian target TPB menggunakan motode proyeksi skenario dengan 3 skema, yaitu BUA/Tanpa Upaya tambahan, Moderat

(Dengan upaya tambahan mengoptimalkan potensi yang ada sesuai kemampuan stakeholder), Optimis (Dengan Upaya tambahan dengan mengerahkan potensi yang ideal), Akselerasi (Dengan Upaya tambahan dan intervensi). Berikut adalah hasil proyeksi skenario.



Gambar 6. 42 Proyeksi Capaian Indikator 15.9.1.(a) sampai Tahun 2045

Berdasarkan proyeksi indikator 15.9.1 (a) terkait keberadaan dokumen rencana pengelolaan Kehati, maka dengan model moderat sudah menunjukkan peningkatan capaian indikator yang signifikan sampai dengan tahun 2045, sehingga cukup dengan mengoptimalkan potensi yang ada sesuai dengan kemampuan stakeholder diperkirakan sudah bisa mencapai target capaian tahun 2045.

Rekomendasi 1

Akar permasalahan : Dinamika tata ruang yang dituntut untuk adaptif dengan program percepatan pembangunan ekonomi kawasan GerbangKertasusila

Sasaran :

1. Menyelaraskan program perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pada level nasional dan global
2. Meningkatkan kestabilan dan keberlanjutan daya dampung dan daya dukung lingkungan hidup
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam sektor industry, pengembangan IPTEK dan inovasi untuk memperluas dampak program pembangunan nasional dan global terhadap kondisi social ekonomi masyarakat

Strategi :

1. Meningkatkan keselarasan proses pembangunan daerah yang sinkron antar level dan antar stakeholder serta antar daerah dalam satu kawasan strategis
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memastikan pengelolan

limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan

3. Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan yang mendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengembangan kewirausahaan

Arahan Kebijakan :

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi proses perencanaan serta terorganisasi antar sektor, antar wilayah, antar pusat dengan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi)	BAPPEDA	45,3	48,9
Mendorong kesiapan infrastruktur daerah dalam meningkatkan daya tampung lingkungan hidup	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	72,42	76,12
Mengembangkan program-program pelatihan yang mendukung akselerasi digitalisasi dunia industry dan tenaga kerja	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE6. Transformasi Digital)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Peringkat 51	Peringkat 30 besar

Rekomendasi 2

Akar Permasalahan : Alih fungsi lahan pada wilayah DAS Kali Lamong yang merupakan satu sistem pengelolaan sumber daya air dengan DAS Bengawan Solo

Sasaran:

3. Pengendalian alih fungsi lahan yang selaras dan berkelanjutan
4. Pemaduserasian berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan

Strategi :

3. Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan ruang yang harmonis antara manusia dan lingkungan
4. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana dan berkelanjutan

Arahan Kebijakan:

Arahan Kebijakan	Transformasi Agenda 8 Pembangunan RPJPN	Stakeholder	Baseline (2025)	Target (2045)
Mendorong kebijakan-kebijakan pengendalian tata ruang yang lebih ketat dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas lingkungan Hidup	72,42	76,12
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas lingkungan Hidup	0,35	0,15
Pemeliharaan keanekaragaman hayati secara bertanggungjawab dan berkelanjutan	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Dinas lingkungan Hidup	0,35	0,15

6.3 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI TANPA UPAYA TAMBAHAN

Alternatif skenario tanpa upaya tambahan adalah pilihan yang diterapkan untuk indikator-indikator TPB yang telah berhasil diimplementasikan dan mencapai target nasional. Dari total 206 indikator yang berada dalam lingkup kewenangan Kabupaten Gresik, sebanyak 123 indikator tidak memerlukan upaya tambahan. Dalam konteks ini, alternatif skenario untuk TPB adalah dengan menjaga tingkat pencapaian yang telah setara atau bahkan melebihi target nasional, mengikuti pola yang telah berjalan (Business as Usual).

6.4 RINGKASAN ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045		
1	**Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun**												
Sosial	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	10,55 %	0,87 %	Kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga	1	Meningkatkan Kualitas fasilitas Pendidikan kejuruan dan Lembaga pelatihan tenaga kerja baik formal maupun informasl	1	Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan yang mendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	1	Meningkatkan investasi sektor Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas Pendidikan dengan mengintegrasikan kurikulum dengan kompetensi tenaga kerja	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE2 Pendidikan berkualitas yang Merata)			
										2	Mengembangkan program-program pelatihan yang mendukung akselerasi digitalisasi dunia industry dan tenaga kerja	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE6. Transformasi Digital)			
						2	Meningkatkan Kompetensi dan skill SDM pencari kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan	2	Memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengembangan kewirausahaan	3	Mendorong Kerjasama pemerintah dan stakeholder eksternal dalam penyediaan dana dan sumber daya ideal untuk	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045		
										pengembangan usaha masyarakat			
	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	90,24	100	Sebanyak 44% wilayah Kabupaten Gresik memiliki jasa ekosistem tempat tinggal yang rendah dan hanya tersisa 4% wilayah kabupaten Gresik dengan tingkat jasa ekosistem tempat tinggal yang tinggi yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan keterbatasan tutupan lahan terbuka yang memiliki pengaruh penting untuk kenyamanan hunian	1	Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan ruang yang harmonis antara manusia dan lingkungan	1	Memperkuat kebijakan pengendaliaan tata ruang untuk menghadapi dinamika investasi	Misi 5 : Ketahanan ESosial, Budaya dan Ekologi (IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim)		
	1.4.1 €	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	98,99	100				2	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	2	Mendorong minat masyarakat dan komunitas untuk berperan dalam kegiatan peningkatan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup melalui program penghargaan dan apresiasi	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)		
	1.5.1 €	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi												

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan		Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
						2	Pengendalian emisi gas rumah kaca, terutama pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan Kabupaten Gresik	3	Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memastikan pengelolan limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan	3	Mendorong teknologi modern dan inovasi pengelolaan limbah terutama limbah domestik dan limbah industri	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
										4	Membangun kemitraan strategis antar pemerintah	Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI							Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan		Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
											dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang efektif	Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)			
						3	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	4	Mengendalikan beban pencemar badan air permukaan dan meningkatkan kualitas air permukaan sebagai potensi sumber air baku	5	Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan beban pencemar limbah domestik	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
										6	Mengembangkan standar dan regulasi ketat terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan memmastikan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
										efektif terhadap penaatan standar dan regulasi pengendalian pencemaran tersebut				
					Kondisi kerentanan masyarakat didominasi skala kerentanan tinggi, sehingga fluktuasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakt pun bersifat fluktuatif terpengaruh perubahan alam maupun non alam	1	Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	1	Mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam aktifitas ekonomi daerah	1	Meningkatkan dukungan kebijakan daerah dalam penerapan konsep ekonomi sirkular melalui pengotimalan pengelolaan limbah, pengurangan emisi GRK dan Industri Hijau	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE5 Penerapan Ekonomi Hijau)			
						2	Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan sosial	2	Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial	2	Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk	Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE3 Perlindungan Sosial Adaptif)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
										membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana				
						3	Mengurangi ketimpangan social yang diperparah oleh dampak bencana	3	Meningkatkan indeks kapasitas sistem peringatan dini, mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana untuk meningkatkan ketahanan komunitas	3	Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan ketahanan komunitas	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)			
								4	Percepatan rehabilitas infrastuktur pada daerah terdampak bencana	4	Pengembangan kebijakan pemulihan pasca bencana yang berfokus pada rehabilitas infrastruktur dasar pada daerah terdampak	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI							Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan		Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	0,07	0,11	Kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan	1	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan pangan	1	Mendorong diversifkasi tanaman dan lahan yang resisten terhadap cuaca ekstrem dan penyakit untuk mengurangi resiko kerentanan pangan	1	Menerapkan kebijakan pangan yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, termasuk kebijakan pengendalian kebijakan harga dan perlindungan social bagi kelompok rentan	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)			
										2	Mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian pada sistem. Pertanian yang holistic dan melindungi hak petani atas lahan dan akses terhadap modal serta infrastruktur dasar pertanian	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 6 Transformasi Digital)			
						2	Meningkatkan produksi pangan secara	2	Meningkatkan produktifitas pertanian pada	3	Mendorong pengunaan teknologi modern	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045		
							berkelanjutan dan efisien		kawasan LP2B dan LSD		dan inovasi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim	dan Ekologi (IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim)		
						3	Memastikan akses pangan yang cukup dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat	3	Mengembangkan sistem dan teknologi irigasi yang berkelanjutan dengan pasokan air yang terjamin bagi sektor pertanian	4	Mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan agribisnis yang berkelanjutan	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 4 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi)		
										5	Memperluas akses pasar hasil pertanian melalui pengembangan rantai pasok pertanian yang optimal, hilirisasi produk pertanian dengan nilai jual tinggi dan pemanfaatan akses teknologi informasi	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)		

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045		
2	**Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**												
SOSIAL	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	11,38	5	Kemandirian dan pemahaman masyarakat mengenai Kesehatan keluarga belum optimal	1	Peningkatan jumlah bayi yang telah menyelesaikan imunisasi dasar lengkap	1	Mendorong kesiapan vaksin dan tenaga penyulu Kesehatan keluarga pada fasilitas Kesehatan daerah	1	Menjamin mutlaknya pemerataan layanan kesehatan keluarga bagi masyarakat rentan dan miskin	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)		
	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	11,38	5		2	Memperluas jangkauan penyuluhan dan pelatihan Kesehatan keluarga terutama pada kelompok keluarga miskin dan rentan	2	Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh Kesehatan dan tenaga Kesehatan terkait program pemenuhan Kesehatan keluarga	3	Mendorong kebijakan yang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)		
						3	Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas	3	Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di	3	Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan		

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan		Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
							lingkungan hidup		daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memastikan pengelolan limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan		beban pencemar limbah domestik	Ramah Lingkungan			
						4	Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan social	4	Meningktkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial	4	Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk	Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045	Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan					
											membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana				
					Kerentanan indikator Kesehatan lingkungan yang berpengaruh pada Kesehatan keluarga seperti kualitas air bersih, kualitas sistem sanitasi dan kualitas pengelolaan persampahan	1	Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas lingkungan hidup	1	Mengendalikan beban pencemar badan air permukaan dan meningkatkan kualitas air permukaan sebagai potensi sumber air baku	1	Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan beban pencemar limbah domestik	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
						2	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	2	Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat	2	Membangun kemitraan strategis antar pemerintah dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan	Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
								pertumbuhan untuk memastikan pengelolan limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan		teknologi pengelolaan limbah yang efektif	berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)			
							3	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pengawasan dan	3	Mendorong minat masyarakat dan komunitas untuk berperan dalam kegiatan peningkatan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup melalui program penghargaan dan apresiasi	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI							Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan		Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045		
									pengendalian pencemaran lingkungan hidup					
					Belum optimalnya jangkauan layanan asuransi Kesehatan khususnya bagi masyarakat rentan	1	Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan social	1	Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial	1	Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana	Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE 1 Kesehatan Untuk Semua)			
										2	Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan ketahanan komunitas	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 14 Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati													
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	6	6	Dinamika tata ruang yang dituntut untuk adaptif dengan program percepatan pembangunan ekonomi kawasan GerbangKertasusila	1	Menyelaraskan program perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pada level nasional dan global	1	Meningkatkan keselarasan proses pembangunan daerah yang sinkron antar level dan antar stakeholder serta antar daerah dalam satu kawasan strategis	1	Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi proses perencanaan serta terorganisasi antar sektor, antar wilayah, antar pusat dengan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi)			
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	7		2	Meningkatkan kestabilan dan keberlanjutan daya dampung dan daya dukung lingkungan hidup	2	Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang ideal, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memastikan		Mendorong kesiapan infrastruktur daerah dalam meningkatkan daya tampung lingkungan hidup	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
									pengelolan limbah domestik dan industri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku agar limbak domestik dan industry yang dihasilkan tidak menambah beban pencemar lingkungan						
						3	Meningkatkan peran masyarakat dalam sektor industry, pengembangan IPTEK dan inovasi untuk memperluas dampak program pembangunan nasional dan global terhadap kondisi social	3	Meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan yang mendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengembangan kewirausahaan	3	Mengembangkan program-program pelatihan yang mendukung akselerasi digitalisasi dunia industry dan tenaga kerja	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE6. Transformasi Digital)			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI						Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi	
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran		Strategi		Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
							ekonomi masyarakat							
					Alih fungsi lahan pada wilayah DAS Kali Lamong yang merupakan satu sistem pengelolaan sumber daya air dengan DAS Bengawan Solo	1	Pengendalian alih fungsi lahan yang selaras dan berkelanjutan	1	Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan ruang yang harmonis antara manusia dan lingkungan	1	Mendorong kebijakan-kebijakan pengendalian tata ruang yang lebih ketat dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)			
						2	Pemaduserasian berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan	2	Meningkatkan efisiensi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana dan berkelanjutan	2	Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)			
										3	Pemeliharaan keanekaragaman hayati secara bertanggungjawab dan berkelanjutan	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan			

TPB/ Tujuan / Pilar	No. Indikator	Indikator	Proyeksi Capaian TPB tahun 2045		Akar Permasalahan	REKOMENDASI					Sasaran Spasial	Tawaran Pokok Visi Misi
			Tanpa Upaya Tambahan	Dengan Upaya Tambahan		Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 – 2045			
									Hidup Berkualitas)			



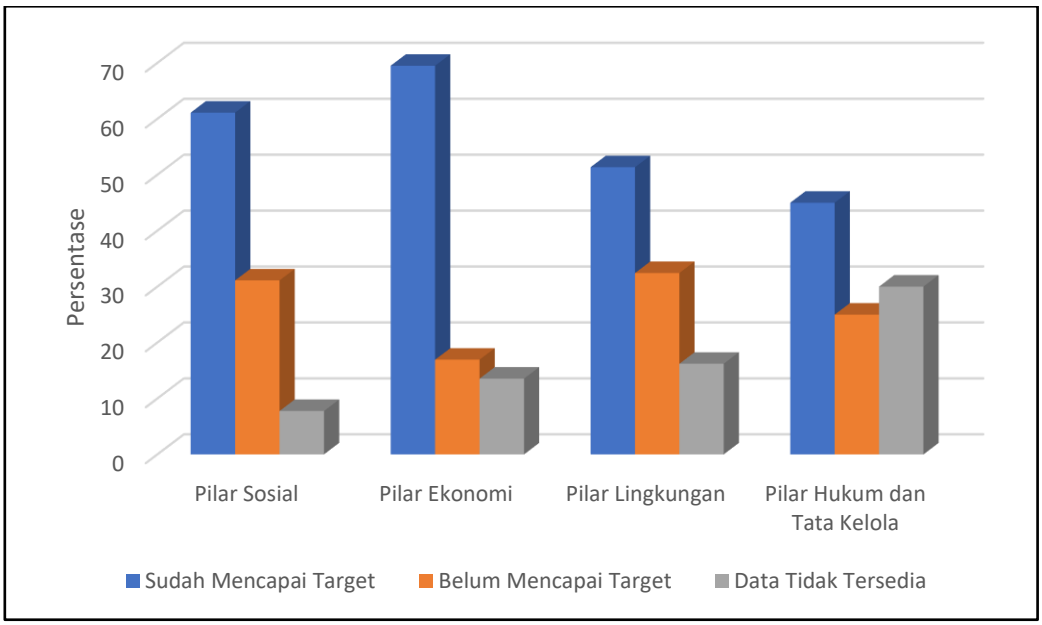
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup serta kajian terhadap kondisi umum dan kebijakan pengembangan wilayah secara holistic, dapat disimpulkan dari hasil kajian sebagai berikut.

7.1.1 Capaian Daerah Terhadap Indikator TPB

Terdapat 90 indikator dibawah pilar sosial, 59 indikator dibawah pilar ekonomi, 37 indikator dibawah pilar lingkungan, dan 20 indikator dibawah pilar hukum dan tata Kelola. Berikut adalah capaian daerah terhadap indiaktor TPB sampai dengan tahun 2022.

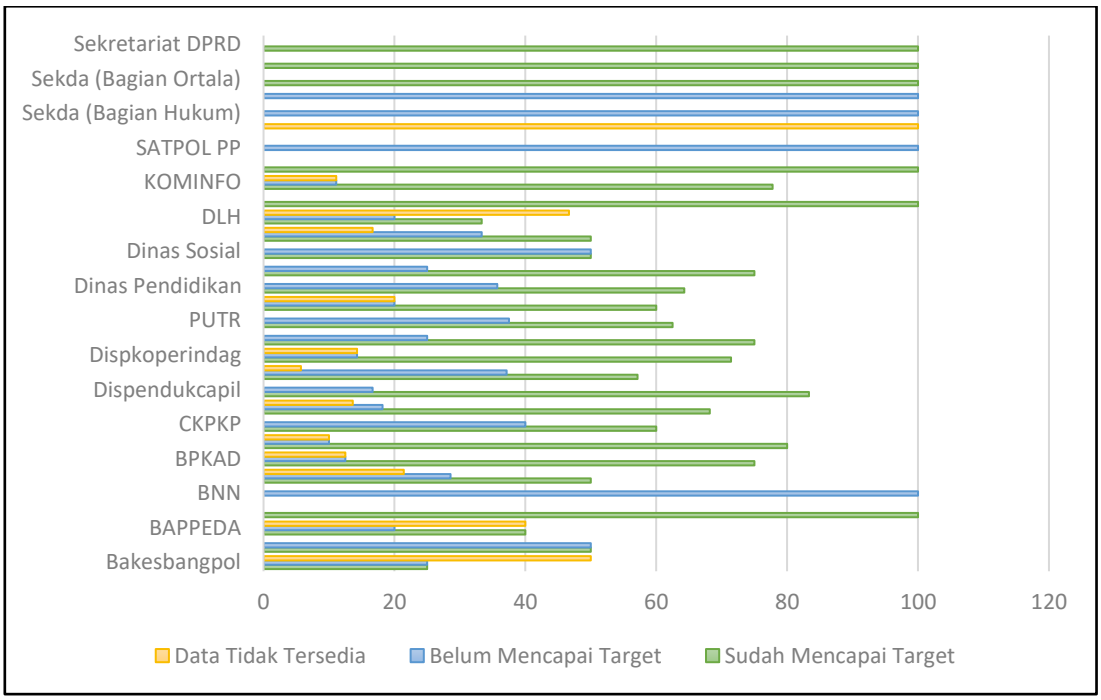


Gambar 7. 1 Persentase Capaian Indikator TPB Tiap Pilar
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan capaian tersebut dapat diketahui capaian tertinggi Kabupaten Gresik adalah pada pilar Ekonomi sebanyak 69,49% atau 41 indikator pilar Ekonomi yang sudah mencapair target. Pilar dengan indikator tidak tercapai yang paling banyak adalah Pilar Lingkungan. Sebanyak 32,43% atau 12 indikator TPB di pilar lingkungan yang belum mencapai target.

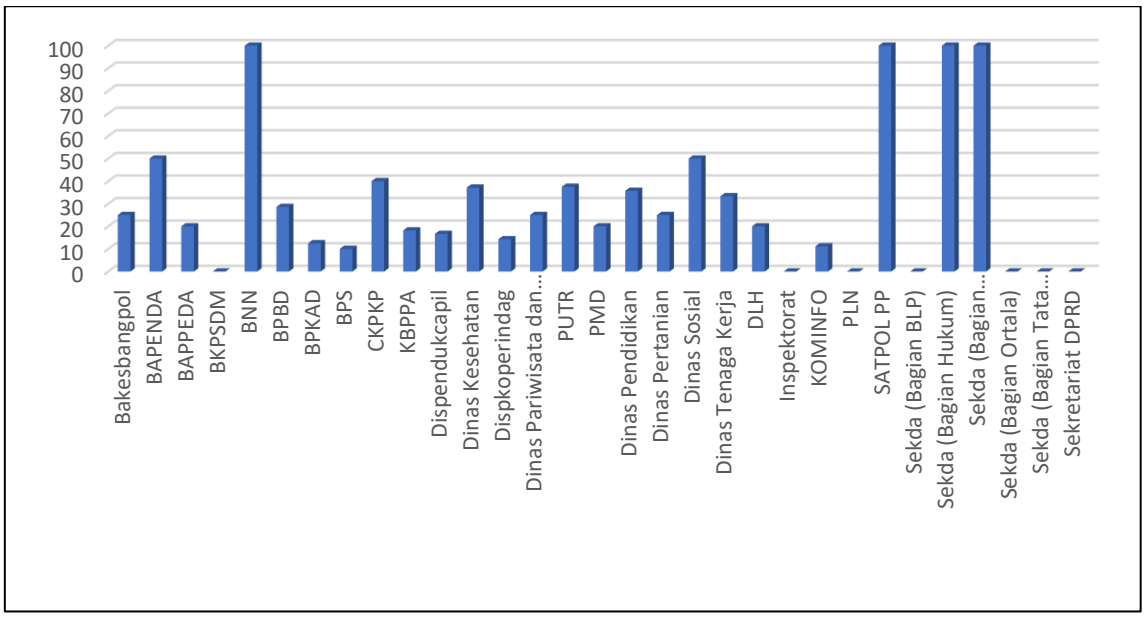
7.1.2 Capaian OPD terhadap Indikator TPB

Terdapat 31 Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi indikator indikator TPB. Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Bakesbangpol, BAPENDA, BAPPEDA, BKPSDM, BNN, BPBD, BPKAD, BPS, CKPKP, KBPPA, Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Diskoperindag, Disparekrafbudpora, PUTR, PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DLH, Inspektorat, KOMINFO, PLN, SATPOL PP, Sekda Bagian BLP, Sekda Bagian Hukum, Sekda Bagian Organisasi, Sekda Bagian Ortala, Sekda Bagian Tata Pemerintahan, dan Sekretariat DPRD. Berikut merupakan capaian indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah.



Gambar 7. 2 Persentase Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasark gambar tersebut diketahui OPD dengan mampu mencapai target indikator paling besar adalah BKPSDM, Inspektorat, PLN, Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan), dan Sekretariat DPRD. Terdapat 64 indikator dari 25 Organisasi Perangkat Daerah yang belum mencapai target. Berdasarkan hasil analisa, Organisasi Perangkat Daerah dengan persentase indikator yang belum tercapai tertinggi adalah BNN, SATPOL PP, dan Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Organisasi). Berikut merupakan grafik persentasi capaian indikator yang sudah mencapai target berdasarkan OPD.



Gambar 7. 3 Persentase Capaian Indikator yang Belum Mencapai Target Berdasarkan OPD
Sumber: Hasil Analisis, 2023

7.1.3 Hasil Perumusan Isu Strategis

Berdasarkan kajian holistic terhadap capaian indikator TPB, Kondisi umum daerah, kondisi 6 muatan KLHS serta kondisi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik, maka dapat diidentifikasi isu strategis daerah Kabupaten Gresik antara lain :

1. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir [Pilar Lingkungan]
2. Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industry [Pilar Lingkungan]
3. Penurunan daya tampung badan air seiring dengan peningkatan skala kegiatan industri dan pemukiman [Pilar Lingkungan]
4. Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas [Pilar Sosial]
5. Terbatasnya Akses UMKM pada Sarana Prasarana Pendukung Aktivitas Ekonomi [Pilar Ekonomi]

7.1.4 Hasil Perumusan TPB Prioritas

Dari kajian capaian daerah terhadap indikator TPB, terdapat 27,18% atau sebanyak 57 indikator TPB yang belum mencapai target dengan sebaran sebagai berikut.

1. Indikator TPB pilar Sosial yang belum mencapai target sebanyak 28 indikator TPB
2. Indikator TPB pilar ekonomi yang belum mencapai target sebanyak 10 indikator TPB
3. Indikator TPB pilar Lingkungan yang belum mecapai target sebanyak 12 indikator TPB dan
4. Indikator TPB pilar Tata Kelola yang belum mencapai target sebanyak 5 indikator

Berdasarkan analisis keterkaitan antara capaian TPB tersebut dengan interaksi antar TPB, KOndisi umum daerah (Sosial, ekonomi dan demografi), Kondisi 6 muatan lingkungan hidup, isu PB paling strategis serta gap capaian TPB maka dapat diketahui TPB Prioritas Kabupaten Gresik yang harus di selesaikan melalui arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut.



Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan (*No proverty*)
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun



Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan (*Zero hunger*)
Menghilangkan kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan



Tujuan 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and sanitation*)
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan Untuk Semua



Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent work and economic growth*)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua



Tujuan 11 – Kota dan Komunitas Berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*)
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan



Tujuan 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab (*Responsible consumption and production*)
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan



Tujuan 15 – Ekosistem Daratan (*Life on land*)
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

7.1.5 Rekomendasi Bagi Daerah

Rekomendasi bagi peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Gresik antara lain :

A. Peningkatan Daya Dukung Pangan

1. Mengintegrasikan program kesejahteraan sosial yang mencakup bantuan pangan, nutrisi, dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan
2. Mendorong pertanian lokal dan produksi pangan di daerah rentan dengan menyediakan dukungan teknis, permodalan, dan infrastruktur yang diperlukan
3. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan untuk mendukung produksi pangan yang aman dan sehat serta mengurangi risiko kerentanan pangan
4. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, sehingga mendukung produksi pangan yang aman, sehat, dan mengurangi risiko terjadinya penyakit terkait pangan
5. Meningkatkan ketahanan pangan di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi terhadap bencana dengan mengidentifikasi, memitigasi, dan mengatasi risiko bencana yang dapat mengganggu produksi, distribusi, dan akses pangan
6. Meningkatkan ketahanan pangan dengan mengurangi dampak ekonomi langsung yang ditimbulkan oleh bencana alam dan bencana terkait lainnya yang dapat mengancam pasokan pangan
7. Mendorong praktik pemberian makanan pendamping ASI yang aman dan bergizi setelah enam bulan usia
8. Meningkatkan akses anak-anak pada makanan bergizi, terutama bagi keluarga rentan

9. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan untuk mendukung produksi pangan yang aman dan sehat serta mengurangi risiko kerentanan pangan
10. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, sehingga mendukung produksi pangan yang aman, sehat, dan mengurangi risiko terjadinya penyakit terkait pangan
11. Mendorong praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas air danau
12. Mengelola sumber daya air dengan bijak untuk memastikan pasokan yang cukup dan berkelanjutan, termasuk praktik konservasi air dan perlindungan ekosistem air
13. Memastikan bahwa pekerja informal memiliki kondisi kerja yang aman dan layak, serta hak-hak pekerja yang dihormati, seperti akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan kesehatan
14. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan penyediaan pangan yang tahan terhadap bencana, termasuk penyimpanan pangan yang aman dan infrastruktur irigasi yang terlindungi
15. Membangun cadangan pangan darurat yang memadai untuk mengatasi situasi darurat dan kekurangan pasokan akibat bencana
16. Memberikan dukungan dan bantuan kepada para petani dan pelaku usaha pangan yang terkena dampak bencana untuk membantu pemulihan ekonomi mereka
17. Mendorong produsen untuk mendaftarkan produk pangan yang ramah lingkungan dan memenuhi standar tertentu untuk memperoleh sertifikasi
18. Memberikan insentif kepada produsen pangan untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, termasuk penggunaan teknik pertanian organik, pengurangan limbah, dan konservasi tanah dan air
19. Mendorong konsumsi produk pangan yang diproduksi secara lokal untuk mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan transportasi dan mendukung petani lokal
20. Mengembangkan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan yang mengintegrasikan pertanian, kehutanan, dan produksi pangan
21. Meningkatkan perlindungan kawasan. hutan dan taman nasional untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan lingkungan alami

B. Peningkatan Daya Dukung Air

1. Meningkatkan akses penduduk, terutama kelompok berpendapatan rendah, terhadap air bersih yang aman untuk konsumsi dan sanitasi dasar
2. Mengintegrasikan penyediaan sanitasi dasar yang aman bersama dengan layanan air minum untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif
3. Memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan dan perlindungan sumber daya air yang digunakan untuk pasokan air minum
4. Meningkatkan investasi dalam pembangunan dan perawatan infrastruktur air bersih, termasuk penyediaan sistem air minum yang dapat diandalkan
5. Memastikan bahwa infrastruktur air yang digunakan untuk pasokan air minum dan sanitasi di pusat-pusat pertumbuhan dirancang untuk tahan terhadap bencana, termasuk perlindungan terhadap banjir dan gempa bumi
6. Membangun sistem peringatan dini yang efektif dan rencana evakuasi yang dapat diandalkan untuk mengurangi risiko terhadap penduduk di pusat-pusat pertumbuhan
7. Mengintegrasikan pendekatan gizi, seperti peningkatan gizi anak dan ibu hamil, dengan program air dan sanitasi untuk mencegah stunting
8. Memastikan perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur air minum yang ada agar tetap berfungsi dengan baik
9. Mengidentifikasi dan mengatasi potensi kegagalan sistem air minum yang dapat mengancam akses air bersih penduduk
10. Memastikan bahwa air yang disediakan melalui layanan air minum adalah aman untuk konsumsi manusia sesuai dengan standar keamanan air yang berlaku
11. Meningkatkan fasilitas sanitasi yang ada, termasuk pembangunan toilet yang aman dan berkelanjutan
12. Memastikan bahwa ekosistem danau dan kehidupan akuatik yang ada dalam danau mendapatkan perlindungan yang cukup
13. Mengatur dan mengawasi aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi kualitas air danau, seperti pertanian, industri, dan penggunaan lahan
14. Melakukan pemantauan dan pengujian berkala terhadap kualitas air danau untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan air yang berlaku

15. Mengoptimalkan pengelolaan sumber air yang ada dengan memanfaatkan teknologi yang lebih efisien dan praktik berkelanjutan
16. Mengelola limbah industri dan perkotaan dengan baik untuk meminimalkan dampak pencemaran terhadap sumber air
17. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program akses air bersih
18. Memastikan bahwa infrastruktur air baku dirancang untuk tahan terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, dan badai
19. Membangun kemampuan pemulihan cepat pasca bencana untuk memastikan pasokan air segera pulih
20. Mendorong sektor industri untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, terutama terkait dengan penggunaan air
21. Mendorong adopsi sistem sertifikasi dan label ramah lingkungan untuk produk-produk yang efisien dalam penggunaan air
22. Mendorong penggunaan sumber air terbarukan dalam proses produksi di berbagai sektor industri
23. Melindungi kawasan konservasi yang melibatkan ekosistem yang penting dalam siklus air
24. Mengidentifikasi dan mendukung proyek restorasi ekosistem untuk memulihkan lahan yang rusak secara ekologis
25. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap tutupan lahan dan kualitas air
26. Bekerja sama dengan lembaga lingkungan dan organisasi internasional untuk mendukung upaya konservasi dan restorasi tutupan lahan
27. Melaksanakan kebijakan yang melarang atau mengatur penggundulan hutan yang tidak berkelanjutan

C. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang menghasilkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan

2. Memastikan akses penduduk miskin ke sumber daya lingkungan yang berkelanjutan, seperti air bersih dan lahan pertanian
3. Mendorong praktik konservasi air dan rehabilitasi daerah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan sumber air
4. Mengidentifikasi sumber air berkelanjutan yang dapat digunakan dalam jangka panjang, seperti mata air dan sumber air baku yang tidak tercemar.
5. Mengatur dan mengelola limbah manusia dengan baik untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan
6. Membangun dan memperkuat infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti tanggul, sistem peringatan dini, dan evakuasi yang aman
7. Mempertahankan dan mendukung konservasi ekosistem yang berperan dalam mitigasi risiko bencana, seperti hutan, sungai, dan lahan basah
8. Mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang mendukung mitigasi risiko bencana, termasuk penggunaan lahan yang aman
9. Meningkatkan kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang baik, untuk mengurangi risiko penyakit menular
10. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan pedesaan untuk mendukung kebersihan lingkungan dan sanitasi yang lebih baik
11. Mendorong praktik konservasi air dan rehabilitasi daerah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan sumber air
12. Mengidentifikasi sumber air berkelanjutan yang dapat digunakan dalam jangka panjang, seperti mata air dan sumber air baku yang tidak tercemar.
13. Mengatur dan mengelola limbah manusia dengan baik untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan
14. Melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air danau untuk memahami perubahan dan ancaman terhadap ekosistem danau
15. Mempertahankan dan mengembangkan daerah tangkapan air yang berkontribusi pada pasokan air danau
16. Mendukung program restorasi danau yang mungkin rusak akibat pencemaran atau kerusakan ekosistem

17. Mengatur pengelolaan sumber air baku dengan baik, termasuk perlindungan terhadap pencemaran dan penggunaan yang berlebihan
18. Mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan air baku, termasuk penggunaan sumber air terbarukan
19. Memastikan pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab di tempat kerja, termasuk daur ulang bahan dan pemusnahan yang tepat
20. Mempromosikan praktik konservasi sumber daya, seperti penghematan energi dan air
21. Membangun dan memperkuat infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti tanggul, sistem peringatan dini, dan evakuasi yang aman
22. Mempertahankan dan mendukung konservasi ekosistem yang berperan dalam mitigasi risiko bencana, seperti hutan, sungai, dan lahan basah
23. Mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang mendukung mitigasi risiko bencana, termasuk penggunaan lahan yang aman
24. Mendorong penggunaan bahan baku dan produksi yang ramah lingkungan serta daur ulang material produk
25. Mendorong penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan
26. Mengurangi emisi dan polusi yang dihasilkan selama proses produksi produk
27. Mengontrol penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk dan menggantinya dengan alternatif bahan baku ramah lingkungan
28. Mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan, termasuk pertanian berkelanjutan dan tata guna lahan yang bijaksana
29. Mempromosikan praktik konservasi lahan, seperti pemeliharaan hutan, pelestarian tanah, dan perlindungan lahan pertanian
30. Mendukung program pemulihan lahan yang terdegradasi atau terkikis, seperti reboisasi dan rehabilitasi lahan basah
31. Mendukung program rehabilitasi ekosistem yang rusak atau terdegradasi sebagai bagian dari rencana pemanfaatan
32. Mengatur pengelolaan spesies keanekaragaman hayati yang terancam punah dan mengurangi perburuan liar yang merusak
33. Memastikan bahwa rencana tersebut mempertahankan dan melindungi habitat penting bagi spesies langka dan ekosistem yang rentan

D. Rekomendasi Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Berdasarkan kondisi capaian daerah terhadap indikator TPB, Kondisi umum daerah, kondisi 6 muatan Lingkungan Hidup, isu paling strategis, TPB Prioritas serta arah kebijakan, maka kata kunci yang memiliki frekuensi kemunculan paling banyak dan menjadi kata kunci visi untuk visi pembangunan jangka panjang daerah antara lain:

1. Keberlanjutan
2. Ketahanan
3. Lingkungan
4. Penguatan

Dengan sasaran arahan kebijakan mencakup beberapa aspek antara lain:

1. Pangan
2. Air
3. Lahan
4. Bencana
5. Infrastruktur



Maka rekomendasi kalimat visi yang dapat dberikan dari kajian lingkungan hidup adalah "**Terwujudnya Kabupaten Gresik sebagai Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Wilayah yang Maju dan Berkelanjutan**"

E. Rekomendasi Sasaran, Misi dan Arahan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tabel 6. 33 Rekomendasi Sasaran, Misi dan Arahan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
1	1. Meningkatkan Kualitas fasilitas Pendidikan kejuruan dan Lembaga pelatihan tenaga kerja baik formal maupun informasl 2. Meningkatkan Kompetensi dan skill SDM pencari kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE2 Pendidikan berkualitas yang Merata	Meningkatkan investasi sektor Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas Pendidikan dengan mengintegrasikan kurikulum dengan kompetensi tenaga kerja
		Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE6. Transformasi Digital	Mengembangkan program-program pelatihan yang mendukung akselerasi digitalisasi dunia industry dan tenaga kerja
		Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global)	Mendorong Kerjasama pemerintah dan stakeholder eksternal dalam penyediaan dana dan sumber daya ideal untuk pengembangan usaha masyarakat
	1. Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 2. Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan social 3. Mengurangi ketimpangan social yang diperparah oleh dampak bencana	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE5 Penerapan Ekonomi Hijau)	Meningkatkan dukungan kebijakan daerah dalam penerapan konsep ekonomi sirkular melalui pengotimalan pengelolaan limbah, pengurangan emisi GRK dan Industri Hijau

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
		Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE3 Perlindungan Sosial Adaptif)	Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana
		Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)	Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan ketahanan komunitas
		Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)	Pengembangan kebijakan pemulihan pasca bencana yang berfokus pada rehabilitas infrastruktur dasar pada daerah terdampak
	4. Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas lingkungan hidup 5. Pengendalian emisi gas rumah kaca, terutama pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan Kabupaten Gresik 6. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Misi 5 : Ketahanan ESosial, Budaya dan Ekologi (IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim)	Memperkuat kebijakan pengendaliaan tata ruang untuk menghadapi dinamika investasi
		Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mendorong teknologi modern dan inovasi pengelolaan limbah terutama limbah domestik dan limbah industri

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
		Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)	Membangun kemitraan strategis antar pemerintah dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang efektif
		Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan beban pencemar limbah domestik
		Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Mengembangkan standar dan regulasi ketat terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan memmastikan implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif terhadap penaatan standar dan regulasi pengendalian pencemaran tersebut
		Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Mendorong minat masyarakat dan komunitas untuk berperan dalam kegiatan peningkatan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup melalui program penghargaan dan apresiasi
	4. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16 Berketahanan Energi,	Menerapkan kebijakan pangan yang berfokus pada

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
	kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan pangan 5. Meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan dan efisien 6. Memastikan akses pangan yang cukup dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat	Air dan Kemandirian Pangan)	peningkatan ketahanan pangan, termasuk kebijakan pengendalian kebijakan harga dan perlindungan social bagi kelompok rentan
		Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 4 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi)	Mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan agribisnis yang berkelanjutan
		Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan)	Memperluas akses pasar hasil pertanian melalui pengembangan rantai pasok pertanian yang optimal, hilirisasi produk pertanian dengan nilai jual tinggi dan pemanfaatan akses teknologi informasi
		Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 6 Transformasi Digital)	Mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian pada sistem. Pertanian yang holistic dan melindungi hak petani atas lahan dan akses terhadap modal serta infrastruktur dasar pertanian
		Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim)	Mendorong pengunaan teknologi modern dan inovasi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim
2	5. Peningkatan jumlah bayi yang telah menyelesaikan imunisasi dasar lengkap	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)	Menjamin mutlaknya pemerataan layanan kesehatan keluarga

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
	6. Memperluas jangkauan penyuluhan dan pelatihan Kesehatan keluarga terutama pada kelompok keluarga miskin dan rentan 7. Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas lingkungan hidup 8. Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan social		bagi masyarakat rentan dan miskin
		Misi 1 : Transformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)	Mendorong kebijakan yang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan
		Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan beban pencemar limbah domestik
		Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE 1 Kesehatan untuk Semua)	Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana
	3. Meningkatkan tingkat kenyamanan melalui pengoptimalan kualitas lingkungan hidup 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan akses layanan infrastruktur masyarakat untuk menurunkan beban pencemar limbah domestik
		Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)	Membangun kemitraan strategis antar pemerintah dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
			teknologi pengelolaan limbah yang efektif
		Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Membangun kemitraan strategis antar pemerintah dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang efektif
	2. Meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan social	Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE 1 Kesehatan Untuk Semua)	Membangun dan memperluas program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, asuransi bencana, dan program jaminan sosial, untuk membantu masyarakat terdampak mengatasi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana
		Misi 1 : Tranformasi Sosial (IE 1 Kesehatan Untuk Semua)	Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan ketahanan komunitas
6	3. Meningkatkan kestabilan dan keberlanjutan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup 4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah	Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan)	Mendorong penelitian dan inovasi dalam pengelolaan kualitas air sungai, termasuk pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan limbah dan monitoring kualitas air sungai
		Misi 5 : Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE 16	Mendorong kesiapan infrastruktur daerah

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan)	dalam meningkatkan daya tampung lingkungan hidup
		Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)	Membangun kemitraan strategis antar pemerintah dengan sektor swasta dan lembaha penelitian untuk pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang efektif
	5. Mengurangi beban limbah B3 6. Mengurangi tingkat pencemaran ke badan air akibat aktivitas pemanfaatan ruang	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Meningkatkan keterlibatan mitra/stakeholder pengembangan infrastruktur pengolahan limbah B3
		Misi 3 : Transformasi Tata Kelola (IE 9 Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegrasi, tangkas dan kolaboratif)	Mengembangkan standar dan regulasi yang ketat terkait pengelolaan limbah B3 dan aktivitas domestik yang berpotensi mencemari air sungai
		Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan)	Meningkatkan program pemantauan kualitas air dan dampak aktivitas pemanfaatan ruang di sekitar badan air
8	3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor informal 4. Mendorong pengembangan sektor industri	Misi 1 : Transformasi Sosial (IE 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata)	Meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
		Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 4 Iptek, Inovasi, dan	Meningkatkan keterlibatan

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
		Produktivitas Ekonomi)	mitra/stakeholder dalam inovasi pengembangan proses industri hulu-hilir
11	3. Meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana dengan mengintegrasikan perencanaan tata kota yang bijak dan mitigasi bencana dalam pengembangan perkotaan 4. Mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata kota, pengurangan risiko bencana, dan pemantauan alih fungsi lahan	Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE5. Lingkungan hidup berkualitas) Misi 8: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mengembangkan indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup parameter-parameter seperti kualitas udara, air, lahan hijau, keberlanjutan energi, dan mitigasi risiko bencana
		Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE17. Resiliensi terhdap bencana dan perubahan iklim)	Menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tahan bencana serta meminimalisir kerugian ketika bencana terjadi
		Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Diplomasi (IE10. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaga Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial)	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
	3. Mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam yang penting untuk keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam 4. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian dan perikanan	Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE5. Lingkungan hidup berkualitas)	Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan dan dampaknya terhadap pemulihan dan konservasi lingkungan dalam menjaga keanakaragaman hayati
		Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE5.	Memberikan pendidikan dan

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
		Penerapan Ekonomi Hijau)	pelatihan kepada petani, nelayan, dan masyarakat lokal tentang praktik-praktik berkelanjutan dan pentingnya pelestarian lingkungan guna mencapai *green economy inclusive*
		Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (IE13. Agama bermaslahat dan berkebudayaan maju)	Membangun kemitraan dengan organisasi lingkungan, sektor swasta, universitas, dan pemerintah lainnya untuk mendukung inisiatif berkelanjutan
12	3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang manfaat produk ramah lingkungan, termasuk dampak positifnya terhadap lingkungan dan Kesehatan 4. Mendorong produsen dan pengecer untuk memproduksi dan menjual produk ramah lingkungan	Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi) Misi 3: Transformasi Tata Kelola (IE9. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif)	Menetapkan regulasi dan standar lingkungan yang mendorong produksi dan penggunaan produk ramah lingkungan.
		Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global) Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi (IE11. Stabilitas ekonimi makro)	Memberlakukan pajak atau insentif fiskal yang mendukung produk ramah lingkungan atau memberikan insentif kepada produsen dan pengecer yang memproduksi atau menjual produk tersebut
	Mendorong masyarakat untuk menggunakan lebih banyak produk ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari	Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE6. Transfromasi Digital)	Menyediakan platform online atau sumber daya yang dapat diakses oleh

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
			masyarakat untuk mencari informasi tentang produk ramah lingkungan.
		Misi 2: Transformasi Ekonomi (IE6. Transfromasi Digital)	Mendukung program sertifikasi dan labeling yang memungkinkan konsumen mengidentifikasi produk ramah lingkungan dengan mudah.
		Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi (IE11. Stabilitas ekonimi makro)	Memberlakukan insentif fiskal seperti potongan pajak atau keringanan pajak bagi konsumen yang memilih produk ramah lingkungan
15	4. Menyelaraskan program perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pada level nasional dan global 5. Meningkatkan kestabilan dan keberlanjutan daya dampung dan daya dukung lingkungan hidup 6. Meningkatkan peran masyarakat dalam sektor industry, pengembangan IPTEK dan inovasi untuk memperluas dampak program pembangunan nasional dan global terhadap kondisi social ekonomi masyarakat	Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi)	Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi proses perencanaan serta terorganisasi antar sektor, antar wilayah, antar pusat dengan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
		Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE 8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi)	Mendorong kesiapan infrastruktur daerah dalam meningkatkan daya tampung lingkungan hidup
		Misi 2 : Transformasi Ekonomi (IE6. Transformasi Digital)	Mengembangkan program-program pelatihan yang mendukung akselerasi digitalisasi dunia

TPB	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
			industry dan tenaga kerja
	1. Pengendalian alih fungsi lahan yang selaras dan berkelanjutan 2. Pemaduserasian berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Mendorong kebijakan-kebijakan pengendalian tata ruang yang lebih ketat dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup
		Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
		Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas)	Pemeliharaan keanekaragaman hayati secara bertanggungjawab dan berkelanjutan